Annual Report
2023
Laporan Tahunan

PELINDO
MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN

Enhancement & Expansion



PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Tahunan serta Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Information Presented in the Annual Report and Disclaimer and Limitation of Liability

Penyusunan Laporan Tahunan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, disebut juga "IPCC" atau "Perusahaan" tahun 2023 menggunakan referensi dan standar yang berlaku di Indonesia, tempat di mana IPCC berdomisili dan mengembangkan kegiatan operasi dan bisnisnya. Parameter dan kriteria standar mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Penyampaian laporan tahunan IPCC juga mengelaborasi beberapa dokumen Perusahaan, baik itu Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Laporan Keuangan teraudit, dan Laporan Evaluasi Kinerja. Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian, hingga kemungkinan perbedaan dengan perkembangan yang aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang terkait lingkungan bisnis Perusahaan. IPCC tidak dapat menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil yang pasti.

Untuk dapat meraih pembaca yang lebih beragam dan sesuai ketentuan yang berlaku, laporan ini disajikan dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di situs web resmi Perusahaan yaitu www.indonesiacarterminal.co.id. Selain itu, laporan ini juga memberikan penanda kinerja untuk mempermudah pembaca dan pengguna laporan, di mana terdapat indikator berwarna "hijau" untuk memberikan penanda kenaikan, dan indikator berwarna "biru" untuk memberikan penanda penurunan.

The preparation of the 2023 Annual Report of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, also called "IPCC" or "Company" uses references and standards applicable in Indonesia, the place where IPCC is domiciled and develops its operations and business activities. Standard parameters and criteria refer to Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies, as well as OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies, as well as Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Submission of the IPCC annual report also elaborates on several Company documents, including the Company's Work Plan and Budget (RKAP), Company Long Term Plan (RJPP), audited Financial Reports and Performance Evaluation Reports. This Annual Report contains various statements regarding the Company's financial condition, operations, policies, projections, plans, strategies and objectives, which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws. These statements have the prospect of risk and uncertainty, as well as the possibility of differences with actual developments. Various prospective statements in this Annual Report are prepared based on assumptions regarding current conditions, as well as projections of future situations related to the Company's business environment. The IPCC cannot guarantee that documents that have been confirmed as valid will produce definitive results.

To reach a wider range of readers and in accordance with applicable regulations, this report is presented in 2 (two) languages, namely Indonesian and English. This Annual Report can be viewed and downloaded on the Company's official website, namely www.indonesiacarterminal.co.id. Apart from that, this report also provides performance markers to make things easier for readers and users of the report, where there is a "green" indicator to indicate an increase, and a "blue" indicator to indicate a decrease.

Tema Sampul dan Kesinambungan Tema

Cover Theme and Theme Continuity

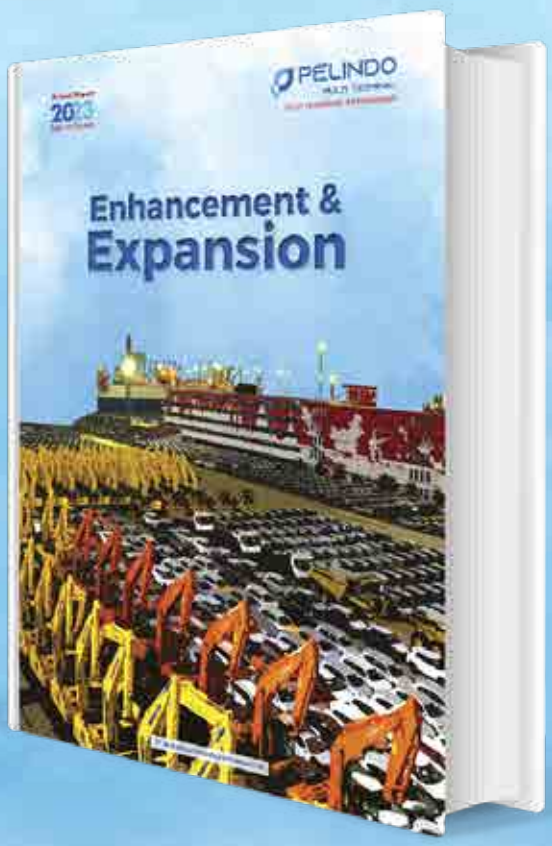

Enhancement & Expansion

IPCC berupaya merespon potensi dan tantangan yang muncul di sepanjang tahun 2023 dengan tujuan menciptakan operasional yang unggul, layanan yang prima, kinerja keuangan yang solid, dan nilai tambah bagi pemegang saham. Kerja sama dengan prinsipal yang terus terbangun di sepanjang tahun 2023 menjadi salah satu capaian penting, hal ini menunjukkan kepercayaan pelanggan dan pengalaman pelanggan atas produk dan layanan yang diberikan IPCC. Di samping itu, ekspansi IPCC atas Terminal Satelit Balikpapan di tahun 2023 menjadi hal positif yang akan memberikan tambahan cakupan jaringan konektivitas terminal kendaraan yang dikelola Perusahaan.

Tema "Membangun Kemitraan dan Ekspansi Wilayah Bisnis" berupaya menekankan berbagai upaya yang dilakukan IPCC untuk dapat mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Terutama dengan pembukuan laba dengan kenaikan yang cukup baik, hal ini tentu menjadi faktor fundamental bagi pemegang saham dalam menilai prospek IPCC ke depan.

IPCC seeks to respond to the potential and challenges that arise throughout 2023 with the aim of creating superior operations, excellent service, solid financial performance and added value for shareholders. Collaboration with principals that continues to be built throughout 2023 is one of the important achievements, this shows customer trust and customer experience with the products and services provided by IPCC. In addition, IPCC's expansion of the Balikpapan Satellite Terminal in 2023 is a positive thing that will provide additional coverage for the vehicle terminal connectivity network managed by the Company.

The theme "Building Partnerships and Expanding Business Areas" seeks to emphasize the various efforts made by the IPCC to realize sustainable growth. Especially with recorded profits with a fairly good increase, this is certainly a fundamental factor for shareholders in assessing IPCC's future prospects.



2022

Komitmen Untuk Menjaga Keunggulan Bisnis dan Operasional

Commitment To Maintain Business and Operational Excellence

Pada tahun 2022, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perseroan" atau "IPCC") berhasil melanjutkan turnaround pertumbuhan kinerja yang positif, ditopang oleh perkembangan yang terus membaik pada industri otomotif, pertambangan dan aktivitas logistik. Pencapaian positif ini diyakini akan semakin memantapkan posisi Perseroan dalam merealisasikan visinya "menjadi Pengelola Ekosistem Terminal Kendaraan Berkelas Dunia". Untuk menjaga stabilitas bisnis, Perseroan telah berinvestasi pada berbagai aspek untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional pelayanan secara fisik serta memastikan tersedianya sistem digitalisasi dalam rangka mempercepat proses bisnis sehingga pemberian layanan kepada para mitra pun dapat berjalan efektif. Dengan menerapkan berbagai inisiatif strategis, Perseroan optimis dapat meraih pertumbuhan kinerja unggul yang berkelanjutan secara konsisten.

In 2022, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("the Company" or "IPCC") has succeeded in continuing its turnaround in positive performance growth, supported by developments that continue to improve in the automotive industry, mining and logistics activities. This positive achievement is believed to further strengthen the Company's position in realizing its vision of "becoming a World-Class Car Terminal Ecosystem Manager". To maintain business stability, the Company has invested in various aspects to guarantee the smooth operation of services in person, as well as ensuring the availability of a digitized system in order to accelerate business processes, to ensure that the provision of services to partners can run effectively. By implementing a variety of strategic initiative, the Company is optimistic that it will be able to consistently achieve superior performance growth.



2021

Memperkuat Digitalisasi untuk Mewujudkan Strategi Pengembangan Bisnis yang Terintegrasi

Strengthening Digitalization upon Realizing an

Sebagai salah satu operator terminal khusus kendaraan di Indonesia, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perseroan atau IPCC") berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang dimiliki untuk mewujudkan hadirnya terminal kendaraan yang berdaya saing tinggi. Pengembangan atas strategi bisnis terus dikaji agar pelayanan yang disediakan Perseroan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Tahun 2021, Perseroan mengejawantahkan komitmen tersebut dengan memperkuat digitalisasi untuk mempercepat proses bisnis sehingga pemberian layanan kepada para mitra pun dapat berjalan efektif. Didukung oleh performa yang menjanjikan di tengah tantangan industri dan makroekonomi, serta sinergi grup yang terjalin bersama Pelindo Group, Perseroan optimis dapat meraih pertumbuhan yang berkelanjutan secara konsisten sehingga turut berkontribusi dalam mendorong tumbuhnya ekosistem maritim logistik yang terintegrasi dan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

As one of Terminal Operators specialized in car in Indonesia, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (the "Company or IPCC") has committed to continuously improve its services and facilities to be a highly competitive car terminal. The development of business strategies continues to be reviewed that the services provided by the Company are able to meet the market needs. In 2021, the Company embodied the commitment through strengthening digitalization to accelerate business processes that the service provided delivered effectively to partners. Driven by promising performances in the midst of industry and macroeconomic challenges, as well as a good synergy of the Pelindo Group, the Company optimist to achieve a consistent sustainable growth that will contribute to encouraging the growth of an integrated maritime logistics ecosystem and have positive impacts on the Indonesian economy as a whole.



2021

Mendorong Tumbuhnya Ekosistem Terminal Kendaraan Yang Terintegrasi

Driving Integrated Car Terminal Ecosystem

IPC Car Terminal sebagai bagian dari mata rantai ekosistem supply chain dan juga sebagai bagian dari IPC Group yang harus mendukung penuh visi World Class Maritime Ecosystem IPC yaitu mendorong tumbuhnya ekosistem maritim logistik yang terintegrasi sehingga memberikan dampak positif bagi Indonesia. Mendorong tumbuhnya ekosistem terminal kendaraan yang terintegrasi IPC Car Terminal diharapkan tidak hanya mampu mengelola jasa operasional layanan kepelabuhanan yang unggul namun juga melakukan pengembangan bisnis dan pengelolaan usaha di sektorsektor yang merupakan rantai pasok dan pendukung sektor pelabuhanan, dalam rangka menciptakan jasa end to end logistic dan tumbuh secara anorganik serta mendorong tumbuhnya ekosistem terminal kendaraan yang terintegrasi sehingga memberikan dampak positif bagi Indonesia. Definisi ini diharapkan mampu membangun kepemimpinan tingkat nasional dan regional, dengan ekspansi bisnis secara global dalam menjadi pengelola terminal kendaraan (car terminal) kelas dunia yang berkontribusi terhadap ekosistem. Pembangunan bisnis secara berkesinambungan dengan penguatan kerjasama dengan pemain ekosistem logistik maritim

IPC Car Terminal as part of logistics ecosystem supply chain and also as part of the IPC Group must fully support the IPC vision of a World Class Maritime Ecosystem, which is to encourage the growth of an integrated maritime logistics ecosystem so that it has a positive impact on Indonesia. Encouraging the growth of an integrated car terminal ecosystem, IPC Car Terminal is expected to not only be able to manage superior port service operational services but also carry out business development and business management in sectors that constitute the supply chain and support the port sector, in order to create end-to-end logistics services and grow inorganically and encourage the growth of an integrated car terminal ecosystem so as to have a positive impact on Indonesia. This definition is expected to be able to build leadership at the national and regional levels, with business expansion globally to become a world-class car terminal operator that contributes to the ecosystem. Sustainable business development by strengthening cooperation with other maritime logistics ecosystem players.

Daftar Isi
List of Contents

3 **Informasi Yang Disajikan Dalam Laporan Tahunan Serta Sanggahan Dan Batasan Tanggung Jawab**
Information Presented In The Annual Report And Disclaimer And Limitation Of Liability

4 **Tema Sampul dan Kesinambungan Tema**
Cover Theme And Theme Continuity

6 **Daftar Isi**
List Of Contents

8 **Mengembangkan Konektivitas Dalam Jaringan Kepelabuhanan Nasional**
Developing Connectivity In The National Port Network

9 **Kinerja 2023**
Performance In 2023

01 PERFORMA 2023
PERFORMA 2023

12 **Ikhtisar Data Keuangan Penting**
Key Financial Highlights

20 **Ikhtisar Operasi Dan Usaha**
Operations And Business Highlights

22 **Ikhtisar Organisasi**
Organization Highlights

23 **Ikhtisar Saham**
Share Highlights

26 **Penghargaan Dan Sertifikasi**
Awards And Certifications

30 **Kilas Peristiwa 2023**
Event Highlights 2023

02 LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

38 **Laporan Dewan Komisaris**
Board Of Commissioners Report

52 **Laporan Direksi**
Board Of Directors Report

68 **Surat Pernyataan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 PT Indonesia Kendaran Terminal Tbk**
The Board Of Directors' Statement Of Accountability For The 2023 Annual Report Of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

69 **Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk**
The Board Of Commissioners' Statement of Accountability For The 2023 Annual Report of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

03 PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

72 **Informasi Umum Perusahaan**
Company General Information

74 **Riwayat Singkat Perusahaan**
Brief History Of The Company

79 **Jejak Langkah**
Milestones

81 **Identitas Dan Logo Perusahaan**
Company Identity And Logo

83 **Visi, Misi, Dan Nilai-Nilai Perusahaan**
Vision, Mission And Company Values

88 **Kegiatan Usaha**
Business Activities

96 **Wilayah Operasional**
Operational Areas

98 **Struktur Organisasi Perusahaan**
Organizational Structure of The Company

100 **Keanggotaan Pada Asosiasi**
Association Membership

102 **Profil Direksi**
Board Of Directors Profile

110 **Profil Dewan Komisaris**
Board Of Commissioners Profile

117 **Profil Pejabat Eksekutif**
Executive Officers Profile

127 **Demografi Karyawan**
Employee Demographics

131 **Struktur Dan Komposisi Pemegang Saham**
Shareholders Structure And Composition

136 **Nama Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura Bersama**
Name Of Subsidiaries, Associates, Joint Venture Company

138 **Struktur Grup Perusahaan**
Company Group Structure

139 **Kronologi Penerbitan Dan/Atau Pencatatan Saham**
Chronology Of Share Issuance And/Or Listing

140 **Kronologis Penerbitan Efek Lainnya**
Chronology Of Other Securities Issuance

140 **Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik**
Public Accounting And Public Accounting Firm

141 **Lembaga Dan/Atau Profesi Penunjang**
Institutions And/Or Supporting Professionals

142 **Informasi Pada *Website* Perusahaan**
Information On The Company Website

04 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

146 **Tinjauan Perekonomian Dan Industri**
Overview Of Economic And Industrial

150 **Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha**
Operational Review By Business Segment

154 **Pelayanan Jasa Terminal Dan Jasa Barang**
Terminal Services And Goods Services

159 **Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas Dan Utilitas**
Miscellaneous Services, Facilities And Utilities Business

163 **Segmen Geografis**
Geographic Segment

165 **Aspek Pemasaran**
Marketing Aspect

173 **Penelitian Dan Pengembangan**
Research And Development

174 **Laporan Posisi Keuangan**
Financial Position Statement

175 **Aset**
Assets

177 **Aset Lancar**
Current Assets

180 **Aset Tidak Lancar**
Non-Current Assets

182 **Liabilitas**
Liabilities

184 **Liabilitas Jangka Pendek**
Current Liabilities

186 **Liabilitas Jangka Panjang**
Non-Current Liabilities



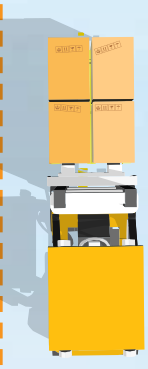

187 **Ekuitas**
Equity

188 **Laporan Laba Rugi Dan**
Penghasilan Komprehensif Lain
Statement Of Profit Or Loss And Other Comprehensive Income

191 **Laporan Arus Kas**
Cash Flow Statement

193 **Profitabilitas Dan Kemampuan Perusahaan Dalam Menghasilkan Keuntungan**
Profitability And Company Ability To Generate Profits

194 **Kemampuan Membayar Utang**
Solvency

197 **Struktur Modal Perusahaan Dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal**
Company Capital Structure And Management Policy On Capital Structure

198 **Investasi Barang Modal**
Capital Expenditures

199 **Informasi Dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan**
Material Information And Facts Subsequent To The Accountant Report Date

202 **Rencana Strategis dan Proyeksi Kinerja Perusahaan Tahun 2024**
Strategic Plan and Company Performance Projections For 2024

204 **Kebijakan Dividen dan Pembagiannya**
Dividend Policy and Distribution

206 **Kontribusi Kepada Negara**
Contribution to The Nations

207 **Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, Restruktursiasi Utang Dan/Atau Modal**
Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, Debt Restructuring And/Or Capital

208 **Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan/Atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi**
Information On Material Transactions Containing Conflicts Of Interest And/Or Transactions With Affiliated Parties/Related Parties

213 **Informasi Keuangan Yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi**
Financial Information Containing Extraordinary And Rare Events

213 **Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Terhadap Perusahaan**
Amendment Of Law And Regulations That Have An Influence On The Company

214 **Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan**
Amendment Of Accounting Policies And Its Impact on The Company

05 FUNGSI PENUNJANG BISNIS
BUSINESS SUPPORTING FUNCTION

220 **Pengelolaan Sumber Daya Manusia**
Human Capital Management

230 **Teknologi Informasi**
Information Technology

06 TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

262 **Pernyataan Penerapan Tata Kelola Perusahaan**
Corporate Governance Implementation Statement

267 **Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan**
Sustainable Implementation Of Corporate Governance

319 **Struktur Dan Mekanisme Gcg**
Gcg Structure And Mechanisms

325 **Rapat Umum Pemegang Saham ("Rups")**
General Meeting Of Shareholders ("Gms")

361 **Direksi**
Board Of Directors

376 **Dewan Komisaris**
Board Of Commissioners

387 **Komisaris Independen**
Independent Commissioner

389 **Transparansi Informasi Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris**
Transparency Of Information About The Board Of Directors And Board Of Commissioners

430 **Organ Pendukung Dewan Komisaris**
Supporting Organs Of The Board Of Commissioners

468 **Sekretaris Perusahaan**
Corporate Secretary

475 **Audit Internal**
Internal Audit

489 **Akuntan Publik**
Public Accountant

492 **Sistem Pengendalian Internal**
Internal Control System

504 **Manajemen Risiko**
Risk Management

537 **Perkara Hukum yang Berdampak Material yang Dihadapi oleh Perusahaan, Entitas Anak, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris**
Legal Cases With Material Impact Faced By The Company, Subsidiaries, Members Of The Board Of Directors And Members Of The Board Of Commissioners

538 **Transparansi Kondisi Keuangan**
Transparency Of Financial Conditions

541 **Akses Informasi Dan Data Perusahaan**
Access To Company Information And Data

551 **Kode Etik**
Code Of Conduct

561 **Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Dan/Atau Manajemen**
Share Ownership Program By Employees And/Or Management

561 **Kebijakan Pengungkapan Informasi Lainnya**
Other Information Disclosure Policy

562 **Sistem Pelaporan Pelanggaran**
Whistle Blowing System

570 **Pengadaan Barang Dan Jasa**
Procurement Of Goods And Services

575 **Kebijakan Anti-Korupsi Dan Anti-Gratifikasi**
Anti-Corruption And Anti-Gratification Policy

579 **Kebijakan Insider Trading**
Insider Trading Policy

580 **Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)**
Implementation of State Official Wealth Reporting (LHKPN)

581 **Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik**
Donation To Political Activity

581 **Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Direksi dan Dewan Komisaris Apabila Terlibat dalam Kejahatan Keuangan**
Policy For Dismissal Of Board Of Directors And Board Of Commissioners If Engaged In Financial Crimes Transparansi Praktik Bad Governance Report On Company Activities That Pollute The Environment

07 LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL REPORT

690 **Referensi Silang SEOJK No. 16 /Seojk.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik**
Cross-Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Format and Completing The Annual Report Of Issuers Or Public Companies

Mengembangkan Konektivitas dalam Jaringan Kepelabuhanan Nasional

Developing Connectivity in the National Port Network

“IPCC telah menjadi bagian dari perkembangan Pelindo dalam mengembangkan konektivitas jaringan kepelabuhanan nasional, khususnya dalam pengelolaan terminal kendaraan.”
“IPCC has become part of Pelindo’s development in developing national port network connectivity, especially in managing car terminals.”network connectivity, especially in managing car terminals.”

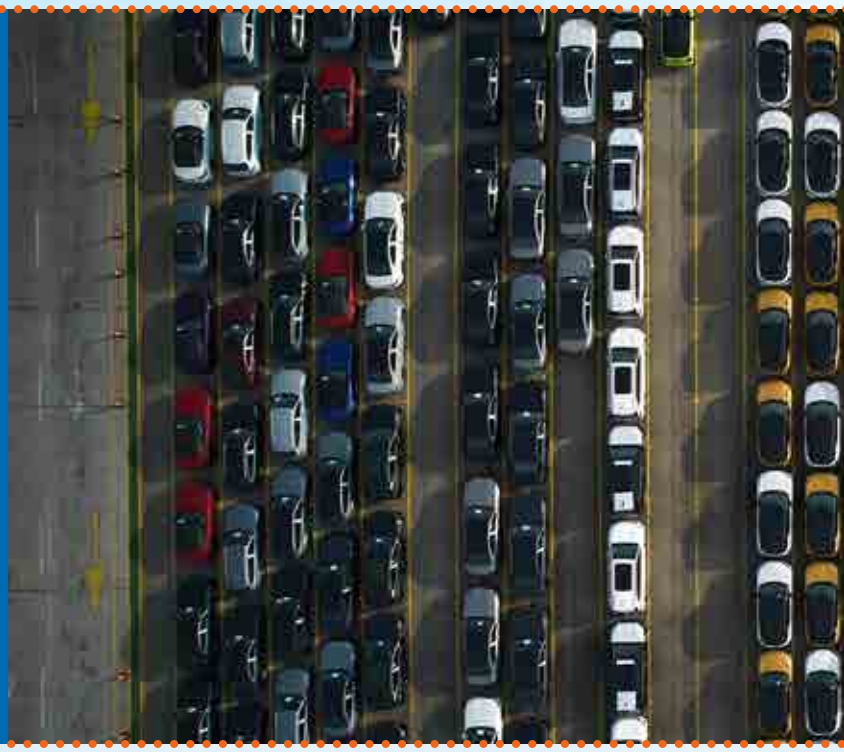



Kinerja 2023
Performance in 2023



"Perjalanan yang berkelanjutan menjadi aspek penting bagi IPCC dalam mewujudkan bisnis yang tumbuh dan berkembang."
"Sustainable travel is an important aspect for IPCC in realizing a business that grows and develops."

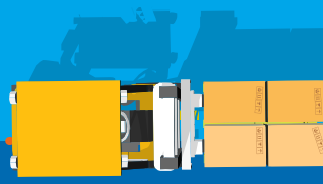

451.039 unit
451,039 units

Jumlah Bongkar Muat Mobil dalam Arus Barang Perdagangan Luar Negeri
Number of Loading and Unloading Cars in the Flow of International Trade Goods

Meningkat **3,17%** dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak **437.194 unit.** Selain itu, dalam arus barang perdagangan luar negeri sebagai operasi yang berkontribusi besar terhadap pendapatan, terhadap juga kendaraan berat (mencakup alat berat dan truk/bus) serta *general cargo* berupa *sparepart.*
An increase of 3.17% compared to the previous year of 437,194 units. Apart from that, in the flow of international trade goods as an operation that contributes greatly to income, also includes heavy vehicles (including heavy equipment and trucks/buses) as well as general cargo in the form of spare parts.

Rp735,21 miliar
Rp735.21 billion

Jumlah Pendapatan Operasi
Total Operating Revenue

Mencatat kenaikan **1,19%** dari tahun sebelumnya sebesar **Rp726,57 miliar.** Kenaikan pendapatan operasi ini terutama disebabkan meningkatnya unit bongkar muat mobil.
Recorded an increase of 1.19% from the previous year of Rp726.57 billion. This increase in operating revenue was mainly due to the increase in car loading and unloading units.

Rp190,86 miliar
Rp190.86 billion

Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year

Tumbuh hingga **18,01%** dibandingkan tahun sebelumnya sebesar **Rp161,73 miliar.** Meningkatnya laba tahun berjalan, terutama dengan kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan pendapatan operasi, menunjukkan keberhasilan Perusahaan dalam mengelola keuangan untuk menciptakan nilai rantai yang efektif dan efisien.
grew by 18.01% compared to the previous year of Rp161.73 billion. The increase in profit for the year, especially with a higher increase compared to the increase in operating revenue, shows the Company's success in managing finances to create an effective and efficient value chain.

Rp1,22 triliun
Rp1.22 trillion

Jumlah Ekuitas
Total Equity

Meningkat **5,24%** dibandingkan tahun sebelumnya sebesar **Rp 1,61 triliun.** Kenaikan ekuitas memberikan kemampuan IPCC untuk dapat berekspansi di masa mendatang.
An increase of 5.24% compared to the previous year of Rp1.61 trillion. The increase in equity provides IPCC capabilities to expand in the future.

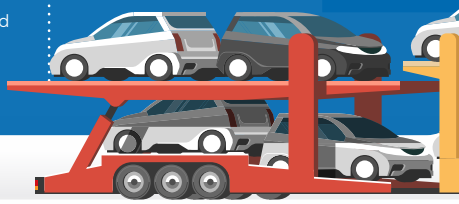

01

Performa 2023

Performance 2023



Sebagai pengelola terminal kendaraan, IPCC berupaya menjaga kualitas layanannya, yang pada akhirnya membentuk kinerja keuangan yang cukup baik, khususnya pada pertumbuhan laba.

As a car terminal manager, IPCC strives to maintain the quality of its services, which ultimately results in quite good financial performance, especially in profit growth.



Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Highlights

Laba (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain
Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain In billion Rupiah, unless otherwise stated	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)	CAGR 2019-2023 (%)
Pendapatan Operasi Operating Revenues							
Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang Terminal Services and Cargo Services	**711.763**	709.507	510.701	351.937	515.971	0,32 ▲	8,37 ▲
Pelayanan Jasa Rupa-rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas Business Services, Facilities and Utilities	**23.442**	17.066	6.136	4.595	7.248	37,36 ▲	34,11 ▲
Jumlah Pendapatan Operasi Total Operating Revenues	**735.205**	726.573	516.837	356.532	523.219	1,19 ▲	8,88 ▲
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	**(408.728)**	(379.727)	(318.590)	(280.822)	(305.575)	7,64 ▲	7,54 ▲
Laba Bruto Gross Profit	**326.477**	346.847	198.247	75.711	217.644	(5,87) ▼	10,67 ▲
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expense	**(76.343)**	(88.904)	(69.638)	(86.230)	(81.038)	(14,13) ▼	(1,48) ▼
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya Other Operating Income (Expenses)	**(4.926)**	(12.886)	(15.481)	(7.262)	(7.511)	(61,78) ▼	(10,01) ▼
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	**245.208**	245.057	113.128	(17.782)	129.095	0,06 ▲	17,40 ▲
Pendapatan (Beban) Keuangan Financial Income (Expense)	**(8.388)**	(32.070)	(31.887)	(18.848)	41.403	(73,85) ▼	N/a
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Badan Profit (Loss) Before Corporate Income Tax	**236.820**	212.987	81.241	(36.630)	170.497	11,19 ▲	8,56 ▲
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax Benefits (Expense)	**(45.966)**	(51.262)	(21.185)	12.857	(35.196)	(10,33) ▼	6,90 ▲
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Income (Loss) for the Year	**190.855**	161.725	60.056	(23.773)	135.302	18,01 ▲	8,98 ▲
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	**-**	-	-	-	-	-	-
Total Laba Komprehensif Total Comprehensive Income	**190.855**	161.725	60.056	(23.773)	135.302	18,01 ▲	8,98 ▲
Laba per Saham (Rupiah penuh) Earnings per Share (full Rupiah)	**104,96**	88,94	33,03	(13,07)	74,41	18,01 ▲	8,98 ▲


GIGA
ISUZU

Pendapatan
Revenue

(Rp-juta) (Rp-million)

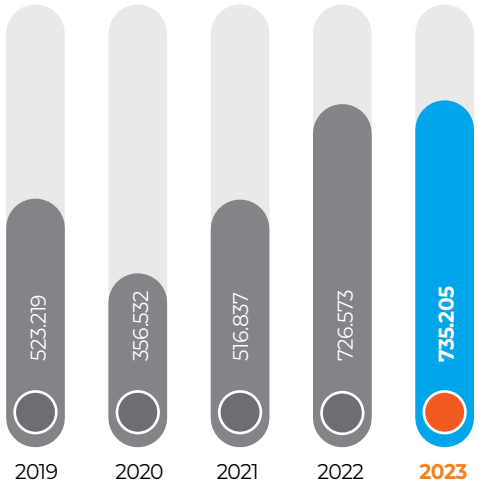

Laba (Rugi) Usaha
Operating Profit (Loss)

(Rp-juta) (Rp-million)

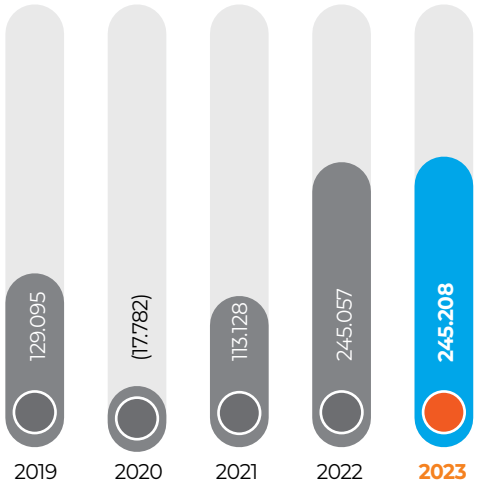

Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Income (Loss) for the Year

(Rp-juta) (Rp-million)

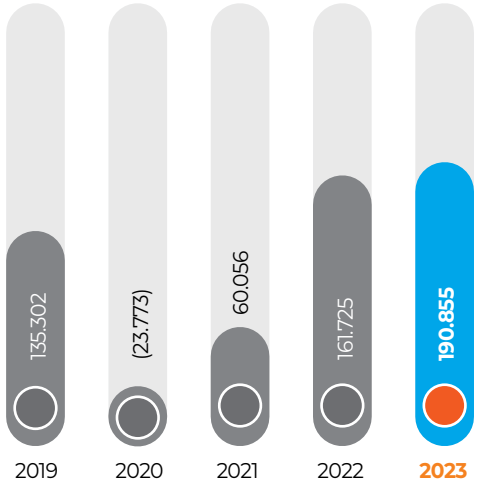

Laba (Rugi) per Saham
Earnings (Loss) per Share

(Rupiah penuh) (Full Rupiah)

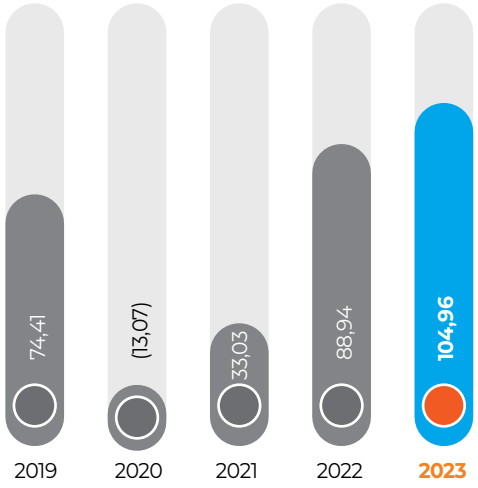

Posisi Keuangan
Financial Position

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain In billion Rupiah, unless otherwise stated	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)	CAGR 2019-2023 (%)
Aset Assets							
Aset Lancar Current Assets							
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	670.182	1.019.761	768.869	519.656	491.547	(34,28) ▲	8,06 ▲
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	88.940	76.216	58.076	80.305	138.632	16,69 ▼	(10,50) ▼
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	759.122	1.095.977	826.945	599.961	630.179	(30,74) ▼	4,76 ▲
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets							
Aset Tetap – Neto Fixed Assets - Net	359.356	362.665	368.232	355.032	354.391	(0,91) ▼	0,35 ▲
Aset Hak Guna – Neto Right-of-Use Assets - Net	606.287	675.417	718.287	793.122	-	(10,24) ▼	-
Aset Tidak lancar Lainnya Other Non-Current Assets	63.549	57.769	49.413	76.937	280.299	10,00 ▲	(31,00) ▼
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	1.029.192	1.095.851	1.135.932	1.225.091	634.690	(6,08) ▼	12,85 ▲
Jumlah Aset Total Assets	1.788.314	2.191.828	1.962.878	1.825.053	1.264.869	(18,41) ▼	9,04 ▲
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity							
Liabilitas Liabilities							
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	205.968	634.871	171.289	134.866	191.597	(67,56) ▼	1,82 ▲
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	359.480	394.987	726.596	685.250	-	(8,99) ▼	-
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	565.448	1.029.858	897.885	820.116	191.597	(45,09) ▼	31,07 ▲
Ekuitas Equity							
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.222.867	1.161.970	1.064.993	1.004.936	1.073.272	5,24 ▲	3,32 ▲
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	1.788.314	2.191.828	1.962.878	1.825.053	1.264.869	(18,41) ▼	9,04 ▲

Jumlah Aset
Total Assets

(Rp-juta) (Rp-million)

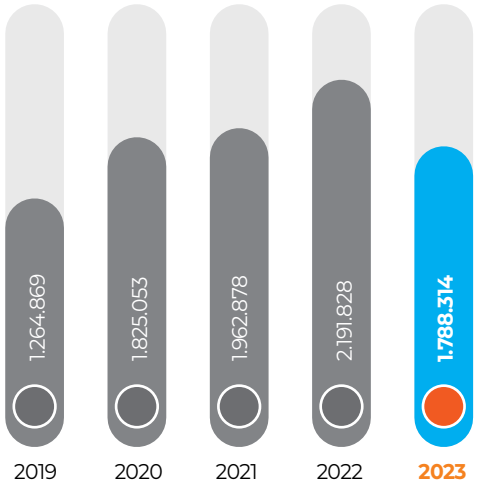

Liabilitas dan Ekuitas
Liabilities and Equity

(Rp-juta) (Rp-million)

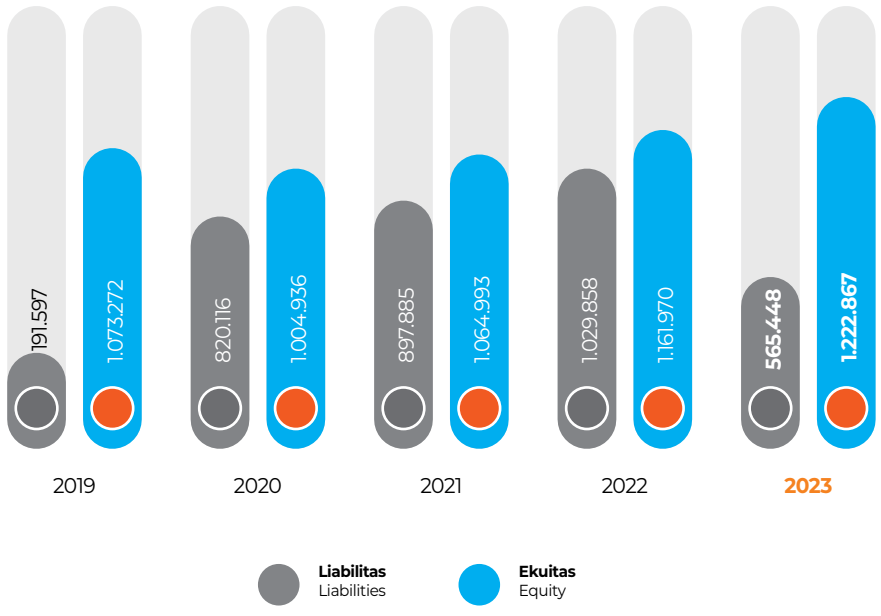

Arus Kas
Cash Flows

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain In billion Rupiah, unless otherwise stated	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)	CAGR 2019-2023 (%)
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi Cash Flow from (for) Operating Activities	249.113	343.943	305.237	159.011	162.770	(27,57) ▼	11,23 ▲
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi Cash Flows from (for) Investment Activities	(27.239)	(32.880)	(44.642)	(18.862)	(125.647)	(17,15) ▼	(31,76) ▼
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flows from (for) Financing Activities	(571.453)	(60.172)	(11.381)	(112.040)	(102.102)	849,70 ▲	53,81 ▲
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) in Net Cash and Cash Equivalents	(349.579)	250.891	249.214	28.109	(64.979)	(239,33) ▼	52,30 ▲
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents Balance at the Beginning of the Year	1.019.761	768.870	519.656	491.547	556.526	32,63 ▲	16,35 ▲
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents Balance at the End of the Year	670.182	1.019.761	768.870	519.656	491.547	(34,28) ▼	8,06 ▲

Kas dan Setara Kas di Akhir Tahun
Cash and Cash Equivalents Balance at the End of the Year

(Rp-juta) (Rp-million)

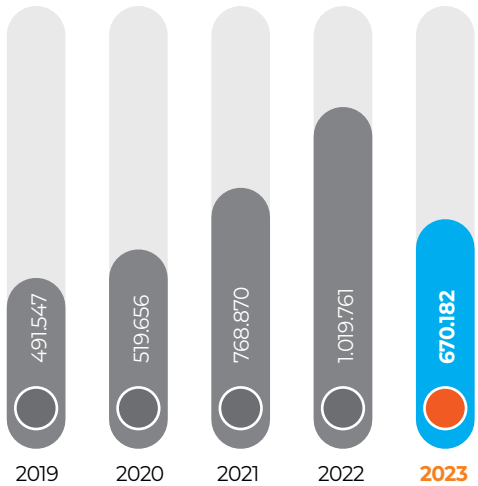

Rasio-rasio Keuangan
Financial Ratios

Perihal Subject	Satuan Unit	2023	2022	2021	2020	2019	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023 (%)	
Profitabilitas Profitability								
Margin Laba Bruto (%) Gross Profit Margin (%)	%	44,41	47,74	38,36	21,24	41,60	(3,33)	▼
Margin Laba Usaha (%) Operating Profit Margin (%)	%	33,35	33,73	21,89	(4,99)	24,67	(0,38)	▼
Margin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	%	25,96	22,26	11,62	(6,67)	25,86	3,70	▲
Imbal Hasil Ekuitas Return on Equity	%	15,61	14,52	5,80	(2,36)	12,61	1,09	▲
Imbal Hasil Aset Return on Assets	%	10,67	7,38	3,06	(1,30)	10,70	3,29	▲
Pertumbuhan Growth								
Pendapatan Operasi Operating Income	%	1,19	40,58	44,96	(31,86)	0,27	(39,39)	▼
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	%	7,64	19,19	13,45	(8,10)	12,41	(11,55)	▼
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	%	16,45	74,96	161,85	(65,21)	37,86	(58,51)	▼
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Income (Loss) for the Year	%	18,01	169,29	(352,62)	(117,57)	(20,50)	(151,28)	▼
Aset Assets	%	(18,41)	11,66	7,55	44,29	0,77	(30,07)	▼
Liabilitas Liabilities	%	(45,09)	14,70	9,48	328,04	26,25	(59,79)	▼
Ekuitas Equity	%	5,24	9,11	5,98	(6,37)	(2,74)	(3,87)	▼
Likuiditas Liquidity								
Rasio Kas Cash Ratio	kali	3,25	1,61	4,49	3,85	2,57	1,64	▲
Rasio Cepat Quick Ratio	kali	3,69	1,73	4,83	4,45	3,29	1,96	▲
Rasio Lancar Current Ratio	kali	3,69	1,73	4,83	4,45	3,29	1,96	▲

Perihal Subject	Satuan Unit	2023	2022	2021	2020	2019	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023 (%)	
Solvabilitas Solvency								
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset Debt to Asset Ratio	kali	31,62	46,99	45,74	44,94	15,15	(15,37)	▼
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas Debt to Equity Ratio	kali	46,24	88,63	84,31	81,61	17,85	(42,39)	▼
Kolektabilitas Piutang Receivables Collectability								
Kolektabilitas Piutang (kali) Receivables Collectability (times)	kali	11,59	12,38	8,82	4,75	6,43	(0,79)	▼
Rata-Rata Hari Kolektabilitas Piutang (hari) Average Days of Receivables Collectability (days)	hari	31,48	29,49	41,38	76,77	56,80	1,99	▲

Ikhtisar Operasi dan Usaha

Operations and Business Highlights

Perihal Subject	Satuan	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)	CAGR 2019-2023 (%)
Jasa Terminal Terminal Services								
Bongkar Muat Mobil Car Loading and Unloading	Unit	797.137	746.064	522.917	402.969	572.017	6,85 ▲	8,65 ▲
Kendaraan Berat (Alat Berat dan Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment and Trucks/ Buses)	Unit	122.189	114.354	51.127	66.725	204.992	6,85 ▲	(12,13) ▼
	m3	5.233.537	5.281.244	2.902.116	1.243.036	1.723.775	(0,90)	32,00 ▲
Sparepart	PKGS	56.866	13.642	18.445	14.606	16.293	316,85 ▲	36,68 ▲
Bongkar Muat Motor Motorcycle Loading and Unloading	Unit	315.513	306.695	78.932	24.098	34.458	2,88 ▲	73,95 ▲
Jasa Barang Cargo Services								
Import Import								
Mobil Car	Unit	70.167	69.706	47.010	33.231	74.980	0,66 ▲	(1,64) ▼
Kendaraan Berat (Alat Berat dan Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment and Trucks/ Buses)	Unit	9.965	13.056	10.023	3.578	8.623	(23,67) ▼	3,68 ▲
	m3	910.972	1.202.579	868.922	255.624	642.080	(24,25) ▼	9,14 ▲
Sparepart	PKGS	7.071	9.494	10.343	5.520	9.442	(25,52) ▼	(6,97) ▼
	m3	51.984	42.232	42.645	21.806	37.242	23,09	8,69 ▲
Ekspor Export								
Mobil Car	Unit	380.872	367.488	290.276	230.760	326.047	3,64 ▲	3,96 ▲
Kendaraan Berat (Alat Berat dan Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment and Trucks/ Buses)	Unit	2.725	3.137	5.440	6.278	4.017	(13,13) ▼	(9,25) ▼
	m3	220.110	212.100	329.511	241.828	222.845	3,78 ▲	(0,31)
Sparepart	PKGS	2.096	3.723	6.435	4.009	3.655	(43,70) ▼	(12,98) ▼
	m3	21.313	33.647,22	37.706	26.626	26.300	(36,66) ▼	(5,12) ▼
Jasa Barang Berdasarkan Pelanggan Dalam Negeri Cargo Services Based on Domestic Trading								
Bongkar Unloading								
Mobil Car	Unit	180.808	147.999	14.410	13.410	25.427	22,17 ▲	63,30 ▲
Kendaraan Berat (Alat Berat dan Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment and Trucks/ Buses)	Unit	52.841	45.044	11.586	23.701	88.915	17,31 ▲	(12,20) ▼
	m3	1.984.515	1.702.134	510.836	176.416	128.949	16,59 ▲	98,07 ▲

Perihal Subject	Satuan	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)	CAGR 2019-2023 (%)
Sparepart	PKGS	46.610	418	224	216	115	11.050,72 ▲	348,69 ▲
	m3	59.401	2.198	2.527	2.065	2.120	2.602,50 ▲	130,07 ▲
Motor Motorcycle	Unit	213.459	192.033	27.263	2.278	7.251	11,16 ▲	132,93 ▲
Muat Loading								
Mobil Car	Unit	165.290	160.871	171.221	125.568	145.563	2,75 ▲	3,23
Kendaraan Berat (Alat Berat dan Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment and Trucks/ Buses)	Unit	56.658	53.117	24.078	33.168	103.437	6,67 ▲	(13,97) ▼
	m3	2.117.940	2.164.431	1.192.846	569.172	729.901	(2,15) ▼	30,52
Sparepart	PKGS	1.089	398	1.443	4.861	3.081	173,62 ▲	(22,89) ▼
	m3	12.890	14.856	22.869	12.304	24.004	(13,23) ▼	(14,40) ▼
Motor Motorcycle	Unit	102.054	114.271	51.669	21.820	27.207	(10,69) ▼	39,17
Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik Land, Buildings, Water and Electrical Services								
Sewa Ruangan Kantor Office Rent Services	m^2	182	269	236	236	248	67,65 ▼	(7,44) ▼

Ikhtisar Organisasi
Organization Highlights

Keterangan Description	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)	
Jumlah Karyawan Total Employees							
Karyawan Tetap (Orang) Permanent Employees (People)	85	75	70	71	76	13,33	▲
Karyawan Kontrak (Orang) Contract Employees (People)	1	3	2	2	3	(66,67)	▼
Karyawan Alihdaya (Orang) Outsourced Employees (People)	349	340	324	310	289	2,65	▲
Jumlah Total	435	418	396	383	368	4,07	▲
Penilaian Penerapan Sistem Pengendalian Internal (skor) Internal Control System Implementation Assessment (score)	88,82	88,82	84,27	N/A	N/A		
Penilaian Penerapan GCG GCG Implementation Assessment							
Penilaian *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) (skor)** ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) assessment (score)**	107,26	93,21	83,55	79,69	N/A		

*) Perangkat dan metode evaluasi dan *assessment* atas penerapan GCG menggunakan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

**) Perangkat dan metode evaluasi dan *assessment* atas penerapan GCG menggunakan basis *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

*) Tools and methods for evaluation and assessment of GCG implementation using a copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOE.

**) Evaluation and assessment tools and methods for GCG implementation use the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) basis.

Ikhtisar Saham
Share Highlights

Kode Saham
Stock Code: IPCC

"Pada tanggal 9 Juli 2018, Perusahaan resmi memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia."
"On July 9, 2018, the Company officially traded its shares on the Indonesia Stock Exchange."

Sekilas Kinerja Saham IPCC Periode 2019-2023
IPCC Stock Performance at a Glance for the 2019-2023 Period

	2023	2022	2021	2020	2019
Harga Pembukaan (Rp/lembar saham) Opening Price (Rp/share)	575	515	530	685	1.640
Harga Tertinggi (Rp/lembar saham) Highest Price (Rp/share)	865	675	900	695	1.640
Harga Terendah (Rp/lembar saham) Lowest Price (Rp/share)	530	470	472	226	630
Harga Penutupan (Rp/lembar saham) Closing Price (Rp/share)	715	570	515	530	680
Jumlah Saham Beredar (juta lembar saham) Total Outstanding Shares (million shares)	1.818.384.820	1.818.384.820	1.818.384.820	1.818.384.820	1.818.384.820
Bursa Saham Stock Exchange	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange				

Informasi Perdagangan Saham IPCC Periode 2021-2023
IPCC Stock Trading Information for the 2021-2023 Period

Periode Period	**Jumlah Saham Beredar (lembar saham)** Total Outstanding Shares (shares)	**Harga Pembukaan (Rp/lembar saham)** Opening Price (Rp/share)	**Harga Tertinggi (Rp/lembar saham)** Highest Price (Rp/share)	**Harga Terendah (Rp/lembar saham)** Lowest Price (Rp/share)	**Harga Penutupan (Rp/lembar saham)** Closing Price (Rp/share)	**Volume Perdagangan (lembar saham)** Trading Volume (shares)	**Kapitalisasi Pasar (Rp-miliar)** Market Capitalization (Rp-billion)
2023							
Triwulan I Quarter I	1.818.384.820	575	665	530	625	123.248.500	1.136.490
Triwulan II Quarter II	1.818.384.820	630	800	615	765	164.330.000	1.391.064
Triwulan III Quarter III	1.818.384.820	770	865	680	710	176.035.400	1.291.053
Triwulan IV Quarter IV	1.818.384.820	715	790	675	715	148.200.200	1.300.145
2022							
Triwulan I Quarter I	515	555	478	550	127.279	915.184	915.184
Triwulan II Quarter II	540	675	500	615	261.709	1.063.425	1.063.425
Triwulan III Quarter III	615	620	496	505	134.060	989.761	989.761

Periode Period	**Jumlah Saham Beredar (lembar saham)** Total Outstanding Shares (shares)	**Harga Pembukaan (Rp/lembar saham)** Opening Price (Rp/share)	**Harga Tertinggi (Rp/lembar saham)** Highest Price (Rp/share)	**Harga Terendah (Rp/lembar saham)** Lowest Price (Rp/share)	**Harga Penutupan (Rp/lembar saham)** Closing Price (Rp/share)	**Volume Perdagangan (lembar saham)** Trading Volume (shares)	**Kapitalisasi Pasar (Rp-miliar)** Market Capitalization (Rp-billion)
Triwulan IV Quarter IV	505	660	492	570	226.550	1.035.304	1.035.304
2021							
Triwulan I Quarter I	1.818.384.820	530	900	496	530	19.442	1.119.350
Triwulan II Quarter II	1.818.384.820	590	615	472	585	3.795	973.514
Triwulan III Quarter III	1.818.384.820	510	710	496	498	17.042	1.078.418
Triwulan IV Quarter IV	1.818.384.820	590	615	496	515	5.415	1.007.783

Grafik Pergerakan Harga Penutupan Saham dan Volume Perdagangan Saham IPCC Periode Januari 2021 s.d Desember 2023
Chart of Closing Stock Price Movements and IPCC Stock Trading Volume for the Period January 2021 to December 2023

	Volume Perdagangan (Lembar Saham) Volume Perdagangan (Lembar Saham)	**Harga Penutupan (Rp)** Harga Penutupan (Rp)
Jan 21	520.296.000	530
Feb 21	419.470.000	595
Mar 21	246.189.700	635
Apr 21	76.434.600	585
Mei 21	77.406.600	540
Jun 21	70.041.600	545
Jul 21	482.651.500	498
Agt 21	389.764.400	625
Sep 21	201.207.100	605
Okt 21	117.793.300	540
Nov 21	141.258.300	570
Des 21	87.529.400	515
Jan 22	51.559.200	492
Feb 22	22.541.700	492
Mar 22	53.178.300	550
Apr 22	91.885.700	570
Mei 22	88.228.900	655
Jun 22	81.594.600	615
Jul 22	46.563.900	555
Agt 22	43.082.400	525
Sep 22	44.413.200	505
Okt 22	26.233.200	515
Nov 22	161.477.000	620

	Volume Perdagangan (Lembar Saham) Volume Perdagangan (Lembar Saham)	**Harga Penutupan (Rp)** Harga Penutupan (Rp)
Des 22	38.839.700	570
Jan 23	27.861.100	575
Feb 23	43.756.900	650
Mar 23	51.630.500	625
Apr 23	42.617.100	705
Mei 23	73.710.000	690
Jun 23	48.002.900	765
Jul 23	85.650.000	760
Agt 23	42.389.100	750
Sep 23	38.996.300	710
Okt 23	79.351.400	715
Nov 23	33.433.900	725
Des 23	35.414.900	715

Informasi tentang Aksi Korporasi

Di sepanjang tahun 2022 dan 2023, Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham *(reverse stock),* dividen saham, saham bonus, serta perubahan nilai nominal saham. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait tanggal pelaksanaan aksi korporasi, rasio pemecahan saham *(stock split),* penggabungan saham *(reverse stock),* dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, perubahan nilai nominal saham, jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi, jumlah efek konversi yang dilaksanakan, dan harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi, yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Information about Corporate Actions

Throughout 2022 and 2023, the Company did not carry out corporate actions that cause changes in shares, such as stock splits, reverse stock, share dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares. Thus, there is no information regarding the date of implementation of the corporate action, stock split ratio, reverse stock, stock dividends, bonus shares, number of convertible securities issued, changes in nominal value of shares, number of shares outstanding before and after the corporate action, the number of convertible securities carried out, and stock prices before and after the corporate action, which can be presented in this Annual Report.

Informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham *(Suspension)* dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham *(Delisting)*

Di tahun 2022 dan 2023, Perusahaan tidak pernah dikenakan sanksi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek tempat Perusahaan mencatatkan saham dan memperdagangkan saham, baik penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*).

Information on Temporary Suspension of Share Trading (Suspension) and/or Removal of Share Listing (Delisting)

In 2022 and 2023, the Company has never been subject to sanctions that could affect share trading activities on the Stock Exchange where the Company lists shares and trades shares, whether temporary suspension of share trading (suspension) and/or cancellation of share listing (delisting).

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

PENGHARGAAN TAHUN 2023 BERSKALA INTERNASIONAL/ REGIONAL

INTERNATIONAL/REGIONAL SCALE AWARDS IN 2023

Penghargaan Tahun 2023 Berskala Nasional

National award in 2023

Otoritas Pelabuhan Award
Award Port Authority



Deskripsi Penghargaan
Award Description

IPCC menerima 3 penghargaan sekaligus yaitu Terminal Umum dalam mendukung Green Port, Terminal Operator dengan kinerja terbaik dan terminal dengan pendukung kampanye anti korupsi. Capaian tersebut tidak lepas dari peran aktif IPCC dalam mendukung lingkungan kerja yang bersih dari polusi kendaraan, pencemaran lingkungan dan pengurangan pemakaian botol plastik. Selain itu IPCC juga berperan aktif untuk mendukung program kerja Zero Accident dalam kegiatan operasional 24/7 serta pro aktif dalam kampanye anti korupsi di lingkungan IPCC.
IPCC won 3 awards at once, namely Public Terminal in supporting Green Port, Terminal Operator with the best performance and terminal supporting anti-corruption campaigns. This achievement cannot be separated from the IPCC's active role in supporting a work environment that is clean from vehicle pollution, environmental pollution and reducing the use of plastic bottles. Apart from that, the IPCC also plays an active role in supporting the Zero Accident work program in 24/7 operational activities and is pro-active in anti-corruption campaigns within the IPCC.

Pemberi Penghargaan
Awarded by

Port Authority

Acara/Kegiatan
Event/Activity

Port Authority Award

Tanggal Diberikan:
Date Awarded

27 Januari 2023
January 27, 2023

Public Relation Indonesia Award



Deskripsi Penghargaan
Award Description

IPCC berhasil menyabet PRIA (Public Relation Indonesia Award) sektor anak usaha BUMN tahun 2023 dengan kategori Laporan Tahunan sub kategori Annual Report. Dengan diraihnya penghargaan tersebut juga menjadikan IPCC untuk pertama kalinya meraih penghargaan bergengsi untuk kategor Annual Report tahun 2021. IPCC sendiri pada tahun 2021 berhasil bertahan ditengah pandemi virus corona dan berhasil mencatatkan laba usaha Perseroan yang cukup baik dan juga kolaborasi semua divisi di IPCC.
IPCC succeeded in winning the PRIA (Public Relations Indonesia Award) for the SOE subsidiary sector in 2023 in the Annual Report category, sub-category of Annual Report. By winning this award, IPCC also won the prestigious award for the 2021 Annual Report category for the first time. In 2021, IPCC itself managed to survive the corona virus pandemic and managed to record quite good company operating profits and also collaborated with all divisions at IPCC.

Pemberi Penghargaan
Awarded by

PT Media Piar Indonesia

Acara/Kegiatan
Event/Activity

PR Indonesia Awards

Tanggal Diberikan:
Date Awarded

17 Maret 2023
March 17, 2023

TOP CSR Award



Deskripsi Penghargaan
Award Description

Untuk pertama kalinya IPCC meraih penghargaan bintang 4 (empat) untuk kategori CSR dan juga meraih penghargaan Top Leader on CSR Commitment kepada Direktur Utama IPCC. Penghargaan ini diraih atas keberhasilan IPCC dalam menerapkan program CSR yang berkesinambungan, bermanfaat dan berdampak langsung dengan operasional Perusahaan, yaitu dengan melakukan Uji Emisi bagi kendaraan di lingkungan kerja Perusahaan bagi Car Carrier dan trucking.
For the first time the IPCC won a 4 (four) star award for the CSR category and also won the Top Leader on CSR Commitment award to the President Director of the IPCC. This award was won for IPCC's success in implementing a CSR program that is sustainable, beneficial and has a direct impact on the Company's operations, namely by conducting Emission Tests for vehicles in the Company's work environment for Car Carriers and trucking.

Pemberi Penghargaan
Awarded by

Top Business Magazine

Acara/Kegiatan
Event/Activity

Top CSR Awards 2023 dan Top Leader 2023

Tanggal Diberikan:
Date Awarded

7 Juni 2023
June 7, 2023

Gold Award - The Best Indonesia Sales Marketing Award - VI - 2023 pada Kategori Public Company - Port Industry



Deskripsi Penghargaan
Award Description

IPCC berhasil memboyong salah satu penghargaan bergengsi yaitu Gold Award - untuk kategori Public Company - Port Industry dan Marketing Award. Penghargaan yang diraih tersebut sebagai apresiasi terhadap kinerja IPCC dalam menyusun strategi bisnis dan market Perusahaan.
IPCC succeeded in winning one of the prestigious awards, namely the Gold Award - for the Public Company - Port Industry and Marketing Award categories. The award received was an appreciation of IPCC's performance in developing the Company's business and market strategies.

Pemberi Penghargaan
Awarded by

Economic Review

Acara/Kegiatan
Event/Activity

6th Indonesia Sales & Marketing Award 2023-VI-2023 (ISMA-VI-2023)

Tanggal Diberikan:
Date Awarded

23 Juni 2023
June 23, 2023

ASEAN GRC Award 2023



Deskripsi Penghargaan
Award Description

IPCC berhasil membawa pulang ASEAN GRC Award 2023 sebagai runner up kategori 1 yang diberikan kepada organisasi yang menunjukan kemampuan luar biasa dalam mengintegrasikan Governance, Risk dan Compliance (GRC) ke dalam proses bisnis yang terbukti dapat mendobrak silo, memungkinkan organisasi mencapai tujuan, mengatasi ketidakpastian dan bertindak dengan integritas.
IPCC succeeded in bringing home the ASEAN GRC Award 2023 as runner up in category 1 which is given to organizations that demonstrate extraordinary abilities in integrating Governance, Risk and Compliance (GRC) into business processes that are proven to be able to break down silos, enabling the organization to achieve its goals, overcome uncertainty and act with integrity.

Pemberi Penghargaan
Awarded by

ERMA
(Enterprise Risk Management Academy)

Acara/Kegiatan
Event/Activity

ASEAN GRC Award

Tanggal Diberikan:
Date Awarded

7 Juli 2023
July 7, 2023

Silver Award 2023



Deskripsi Penghargaan
Award Description

IPCC berhasil kembali membawa pulang SNI Award kali ini dengan peringkat Silver. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang berhasil menerapkan SOP mengenai Zero Accident di lingkungan perusahaan sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan sehat. Untuk itu, IPCC terus berkomitmen untuk mengedepankan Zero Accident dalam setiap lini pekerjaan terutama operasional.
IPCC succeeded in bringing home the SNI Award again this time with a Silver rating. This award is awarded to companies that successfully implement SOPs regarding Zero Accidents in the company environment so as to create a safe and healthy work environment. For this reason, the IPCC continues to be committed to prioritizing Zero Accidents in every line of work, especially operations.

Pemberi Penghargaan
Awarded by

National Standardization Agency

Acara/Kegiatan
Event/Activity

SNI Award

Tanggal Diberikan:
Date Awarded

16 November 2023
November 16, 2023

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2023

Certifications that are still valid in 2023

SNI ISO 9001:2015 Quality Management System-Requirements



Deskripsi Sertifikasi
Certification Description

Pelayanan jasa bongkar muat dari dan dan ke kapal di pelabuhan, yang meliputi stevedoring, cargodoring serta receiving/ delivery atas kendaraan, alat berat dan suku cadang, serta layanan lainnya yang berhubungan dengan pleayanan jasa terminal kendaraan.
Loading and unloading services from and to ships at the port, which includes stevedoring, cargodoring and receiving/delivery of vehicles, heavy equipment and spare parts, as well as other services related to car terminal services.

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi
Issued by

Sucofindo

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi
Certification Issue Date

10 Maret 2021
March 10, 2021

Masa Berlaku Hingga
Validity Period

28 Desember 2023
December 28, 2023

SNI ISO 14001:2015 Environmental Management System-Requirements With Guidance For Use



Deskripsi Sertifikasi
Certification Description

Pelayanan jasa bongkar muat dari dan dan ke kapal di pelabuhan, yang meliputi stevedoring, cargodoring serta receiving/ delivery atas kendaraan, alat berat dan suku cadang, serta layanan lainnya yang berhubungan dengan pleayanan jasa terminal kendaraan beserta utilitasnya yang berdapmpak pada lingkungan, termasuk proses penanganan polusi udara, limbah cair, dan limbah padat.
Loading and unloading services from and to ships at the port, which includes stevedoring, cargodoring and receiving/delivery of vehicles, heavy equipment and spare parts, as well as other services related to vehicle terminal services and their utilities which have an impact on the environment, including the process of handling air pollution, liquid waste and solid waste.

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi
Issued by

Sucofindo

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi
Certification Issue Date

10 Maret 2021
March 10, 2021

Masa Berlaku Hingga
Validity Period

28 Desember 2023
December 28, 2023

SNI ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System – Requirements With Guidance for use



Deskripsi Sertifikasi
Certification Description

Pelayanan jasa bongkar muat dari dan dan ke kapal di pelabuhan, yang meliputi stevedoring, cargodoring serta receiving/ delivery atas kendaraan, alat berat dan suku cadang, serta layanan lainnya yang berhubungan dengan pleayanan jasa terminal kendaraan yang berpengaruh pada keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.
Loading and unloading services from and to ships at the port, which includes stevedoring, cargodoring and receiving/delivery of vehicles, heavy equipment and spare parts, as well as other services related to vehicle terminal services which affect the safety and health of personnel Work.

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi
Issued by

Sucofindo

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi
Certification Issue Date

10 Maret 2021
March 10, 2021

Masa Berlaku Hingga
Validity Period

28 Desember 2023
December 28, 2023

SNI ISO 37001:2016



Deskripsi Sertifikasi
Certification Description

Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Anti-Bribery Management System

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi
Issued by

Sucofindo

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi
Certification Issue Date

7 Maret 2022
March 7, 2022

Masa Berlaku Hingga
Validity Period

6 Maret 2025
March 6, 2025

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Deskripsi Sertifikasi
Certification Description

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Health and Safety Management System

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi
Issued by

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi
Certification Issue Date

9 Juni 2023
June 9, 2023

Masa Berlaku Hingga
Validity Period

9 Juni 2026
June 9, 2026

Kilas Peristiwa 2023
Event Highlights 2023

Januari
January



Ceremony First Vessel, pada tanggal 1 Januari 2023
First Vessel Ceremony, on January 1, 2023

Januari
January



Pelindo Forum yang dihadiri oleh Menteri BUMN, pada tanggal 20 Januari 2023
Pelindo Forum attended by the Minister of SOE, on January 20, 2023

Februari
February



Pelaksanaan Apel K3, pada tanggal 3 Februari 2023
Implementation of the OHS Rollcall, on February 3, 2023

Februari
February



Partisipasi IPCC Terminal Kendaraan di acara BIMP-EAGA Maritime 2023, pada tanggal 25 Februari 2023
IPCC Car Terminal participation at the BIMP-EAGA Maritime 2023 event, on February 25, 2023

Februari
February



Pelindo Mengajar Balikpapan, pada tanggal 26 Februari 2023
Pelindo Mengajar Balikpapan, on February 26, 2023

Maret
March



Tim IPCC Peduli salurkan bantuan untuk korban bencana kebakaran Depo Pertamina Plumpang, pada tanggal 4 Maret 2023
The IPCC Cares Team distributed donation to victims of the Pertamina Plumpang Depot fire disaster, on March 4, 2023

Maret
March



Silaturahmi dan Peresmian Gedung Kantor Operasi dan Teknik, pada tanggal 21 Maret 2023
Gathering and Inauguration of the Operations and Engineering Office Building, on March 21, 2023

April
April



Mudik gratis Pelindo Group, pada tanggal 20 April 2023
Pelindo Group's free homecoming, on April 20, 2023

Mei
May



Emiten Forum: Bincang Emiten IPCC Bersama IPCM dan Mirae, pada tanggal 24 Mei 2023
Issuer Forum: IPCC Issuer Discussion with IPCM and Mirae, on May 24, 2023

Mei
May



Media Gathering, pada tanggal 26 Mei 2023
Media Gathering, on May 26, 2023

Juni
June



Penanaman Pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, pada tanggal 6 Juni 2023
Tree planting to commemorate Environment Day, on June 6, 2023

Juni
June



Media visit Transnesia, pada tanggal 12 Juni 2023
Media visit Transnesia, on June 12, 2023

Juni
June



IPCC berbagi Kurban, pada tanggal 27 Juni 2023
IPCC shares Qurban, on June 27, 2023

Juli
July



RUPS 2023, pada tanggal 3 Juli 2023
2023 GMS, on July 3, 2023

Juli
July



Investor Network Day, pada tanggal 5 Juli 2023
Investor Network Day, on July 5, 2023

Juli
July



Pelatihan Excelent Public Speaking, pada tanggal 10 Juli 2023
Excellent Public Speaking Training, on July 10, 2023

Agustus
August



Emiten Forum: Mengarungi Samudera, pada tanggal 26 Agustus 2023
Issuer Forum: Sailing the Ocean, on August 26, 2023

Agustus
August



Penandatanganan MOU bersama PII, pada tanggal 26 Agustus 2023
Signing of the MOU with PII, on August 26, 2023

September
September



RUPS dan Public Expose, pada tanggal 5 September 2023
GMS and Public Expose, on September 5, 2023

September
September



Pelindo Mengajar Jombang, pada tanggal 19 September 2023
Pelindo Mengajar Jombang, on September 19, 2023

September
September



Penanaman Mangrove di Lamongan bersama SPMT Group, pada tanggal 21 September 2023
Mangrove planting in Lamongan with SPMT Group, on September 21, 2023

September
September



Ekspansi Terminal Satelit Balikpapan, pada tanggal 29 September 2023
Expansion of the Balikpapan Satellite Terminal, on September 29, 2023

Oktober
October



IPCC gelar kegiatan Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), pada tanggal 10 Oktober 2023
IPCC held training activities on the use of light fire extinguishers (APAR), on October 10, 2023

Oktober
October



Peresmian UMK Tenun Nyaman, pada tanggal 18 oktober 2023
Inauguration of the Comfort Weaving UMK, on October 18, 2023

Oktober
October



Workshop: Edukasi Pasar Modal, pada tanggal 24 oktober 2023
Workshop: Capital Market Education, on October 24, 2023

November
November



IPCC Menandatangani Perpanjangan Perjanjian dengan Hyundai Glovis dalam Kerjasama Berkelanjutan, pada tanggal 1 November 2023
IPCC Signs Extension of Agreement with Hyundai Glovis on Sustainable Cooperation, on November 1, 2023

November
November



Customer Gathering, pada tanggal 16-18 November 2023
Customer Gathering, on November 16-18, 2023

Oktober
October



Program IPCC Peduli, menggandeng Persatuan Istri Pegawai (PIP) PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dengan memberikan bantuan 10 papan tulis akrilik kepada SMP Barunawati 3 dan SD Barunawati di wilayah Jakarta Utara, pada tanggal 31 oktober 2023
The IPCC Cares Program, collaborates with the Employee Wives Association (PIP) of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk by providing 10 acrylic whiteboards to Barunawati 3 Middle School and Barunawati Elementary School in the North Jakarta area, on October 31, 2023

November
November



Workshop: Edukasi Investasi Keuangan, pada tanggal 15 November 2023
Workshop: Financial Investment Education, on November 15, 2023

Desember
December



Acara Kepoin Emiten IPCC, pada tanggal 8 Desember 2023
IPCC Issuer Kepo Event, on December 8, 2023

Desember
December



IPCC Roadshow 4 Kota di Indonesia, pada tanggal 10 Desember 2023
IPCC Roadshow 4 Cities in Indonesia, on December 10, 2023

Desember
December



Pemberian Bantuan Sembako Hari Natal, pada tanggal 27 Desember 2023
Providing Christmas Day Basic Food Assistance, on December 27, 2023

02

Laporan Manajemen

Management Report



Di samping berfokus pada pertumbuhan usaha, kami juga mengedepankan penerapan keberlanjutan dalam menjalankan usaha melalui integrasi aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola ke dalam proses operasional Perusahaan. Dengan semangat keberlanjutan, IPCC senantiasa berupaya meningkatkan nilai Perusahaan bagi setiap pemangku kepentingan.

Apart from focusing on business growth, we also prioritize implementing sustainability in running our business through integrating environmental, economic, social and governance aspects into the Company's operational processes. With the spirit of sustainability, IPCC always strives to increase the Company's value for every stakeholder.


PELINDO
MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

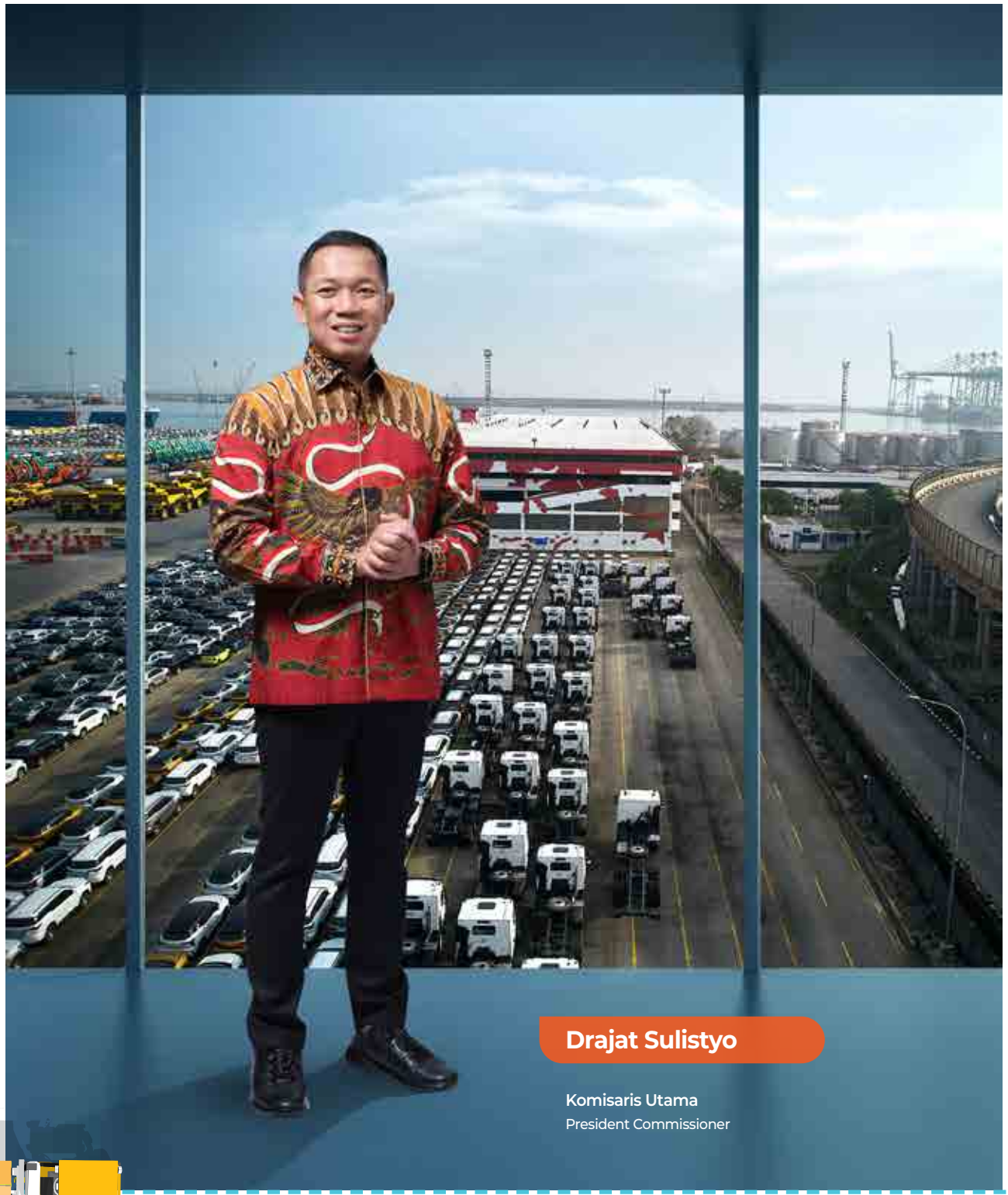

Drajat Sulistyo

Komisaris Utama
President Commissioner

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah berupaya mendorong kinerja Perusahaaan, melaksanakan seluruh arahan Pemegang Saham, serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan melalui berbagai inisiatif strategis dalam menghadapi dinamika usaha sepanjang 2023, sehingga IPCC mencatatkan kinerja yang sangat baik sesuai dengan melampaui target yang telah dicanangkan, bahkan IPCC telah mencadangkan Laba Bersih untuk Dividen interm yang akan dibayarkan pada awal tahun 2024.

"The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has made efforts to encourage the Company's performance, carry out all Shareholder directions, and maintain stakeholder trust through various strategic initiatives in facing business dynamics throughout 2023, so that the IPCC recorded excellent performance exceeding the targets that had been set, in fact the IPCC has reserves Net Profit for Interim Dividend which will be paid in early 2024."



Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Kami mengucapkan rasa syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau "IPCC" atau "Perusahaan" berhasil melewati tahun 2023 dengan capaian yang positif meski di tengah kondisi makro ekonomi yang penuh tantangan dan ketidakpastian.

Dalam menjalankan fungsi strategisnya, Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, bertanggung jawab, dan penuh kehati-hatian demi kepentingan Perusahaan. Kami selaku Dewan Komisaris senantiasa berupaya memastikan pengelolaan Perusahaan melalui pemantauan kecukupan pengawasan dan efektivitas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

We express our gratitude to the Presence of Almighty God who has bestowed His mercy and grace, so that PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk or "IPCC" or "Company" successfully passed 2023 with positive achievements even in the midst of challenging and uncertainty macroeconomic conditions.

In carrying out its strategic functions, the Board of Commissioners carries out its duties of supervision and providing advice to the Board of Directors in good faith, responsibility and with full prudence for the interests of the Company. We as the Board of Commissioners always strive to ensure the management of the Company through monitoring the adequacy of supervision and the effectiveness of compliance with applicable laws and regulations, as well as based on the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Fokus pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi, antara lain meliputi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), tindak lanjut atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan arahan Pemegang Saham, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan manajemen risiko, penerapan kode etik dan nilai-nilai budaya Perseroan, serta pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Perusahaan mampu bertahan dan terus tumbuh secara berkelanjutan.

Atas segala upaya, kerja kerjas, serta pencapaian IPCC yang cukup solid meski di tengah tantangan, Kami menyepakati untuk menjadikan tema RJPP 2023, yaitu *"Enhancement & Expansion"* sebagai tema Laporan Tahunan 2023 ini, yang kemudian akan menjadi dokumentasi perjalanan Perusahaan di tahun 2023.

Merupakan kehormatan bagi Saya, mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yang berakhir pada 31 Desember 2023, sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, terkhusus prinsip keterbukaan informasi.

LAPORAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Persreoan Terbatas, sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi agar sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah dicanangkan di awal tahun, memberikan nasihat atau saran terhadap hal-hal strategis dan memberikan tanggapan tertulis atau mengambil keputusan terhadap hal-hal perlu mendapatkan persetujuan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentun Anggaran Dasar Perseroan.

Pada fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara rutin melakukan koordinasi dengan Direksi Direksi untuk mengawasi dan membahas perkembangan kinerja dan isu strategis yang ada di dalam Perseroan. Sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris juga telah melakukan pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris yang masing-masing memantau bidang

The focus of supervision and providing advice to the Board of Commissioners on the management of the Company by the Board of Directors includes, among other things, the implementation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP), follow-up to the decisions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and directions from Shareholders, implementation of Good Corporate Governance, effectiveness Internal Control System and risk management, implementation of the Company's code of conducts and cultural values, as well as implementation of applicable statutory provisions, so that the Company is able to survive and continue to grow sustainably.

Due to all the efforts, hard work, and solid achievements of the IPCC despite the challenges, we have agreed to make the theme of RJPP 2023, namely "Enhancement & Expansion" as the theme of this 2023 Annual Report, which will then become a documentation of the Company's journey in 2023.

It is an honor for me to represent the Board of Commissioners to submit a report on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in supervising the management of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk which ends on December 31, 2023, as part of implementing the principles of Good Corporate Governance, especially the principle of information disclosure.

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE REPORT

In accordance with the mandate of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, throughout 2023, the Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities to supervise the management of the Company carried out by the Board of Directors so that it is in accordance with the Company's Work Plan and Budget (RKAP) which was launched at the beginning of the year, providing advice or suggestions on strategic matters and providing written responses or making decisions on matters requiring approval by the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

In its supervisory function, the Board of Commissioners regularly coordinates with the Board of Directors to monitor and discuss performance developments and strategic issues within the Company. As an embodiment of the implementation of the principles of Good Corporate Governance, the Board of Commissioners has also divided the duties of each member of the Board of Commissioners, each of whom monitors the fields of operations and

operasi dan teknik, komersial dan pengembangan bisnis, keuangan, manajemen risiko, dan Sumber Daya Manusia.

Pembagian tugas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendalaman terhadap hal-hal yang menjadi topik pengawasan Dewan Komisaris. Seluruhnya dijalankan oleh komite-komite yang ditugaskan untuk membuat laporan secara regular, baik secara lisan melalui rapat, maupun secara tertulis.

Dalam menjalankan fungsi perannya, Dewan Komisaris memiliki Organ Pendukung, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG. Komite-komite tersebut membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas manajemen sesuai dengan bidangnya masing-masing.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERSEROAN SERTA KETERLIBATAN DEWAN KOMISARIS DALAM PENYUSUNAN RKAP

Dalam menyusun rencana, target, dan strategi yang kemudian dituangkan dalam RKAP 2023, Direksi mengacu kepada beberapa asumsi, diantaranya, kondisi makro dan mirko Perseroan, disamping memperhatikan aspirasi pemegang saham untuk tahun 2023.

Dewan Komisaris kemudian melakukan pedalaman dan evaluasi atas usulan RKAP 2023 yang hasilnya disampaikan kepada Direksi, serta melakukan pembahasan dengan para Senior Manager terkait untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang rencana kerja Perusahaan di tahun ini. Direksi bilamana diperlukan. Dengan kondisi 2023 yang belum sepenuhnya dapat diprediksi, Dewan Komisaris memberikan saran dan masukan kepada Direksi terkait RKAP 2023.

Dalam perjalanannya, Dewan Komisaris senantiasa mengingatkan Direksi untuk melakukan analisis terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi. Terhadap strategi yang dijalankan Direksi di tahun 2023, Dewan Komisaris menilai telah sejalan dengan rencana yang ditetapkan dalam RKAP 2023, terutama terkait pengembangan usaha dan strategi ekspansi yang akan dilakukan Perusahaan. Dewan Komisaris juga senantiasa berupaya memberikan masukan kepada Perusahaan terkait penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko melalui rekomendasi serta masukan dari Komite-Komite Dewan Komisaris.

engineering, commercial and business development, finance, risk management and Human Capital.

This division of duties aims to improve the quality of in-depth study of matters that are topics of supervision by the Board of Commissioners. Everything is carried out by committees which are assigned to make regular reports, either verbally through meetings or in writing.

In carrying out its role functions, the Board of Commissioners has supporting organs, namely the Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination, Remuneration and GCG Committee. These committees assist the Board of Commissioners in carrying out their supervisory and monitoring duties on management activities in accordance with their respective fields.

SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S POLICIES AND STRATEGIES AND THE INVOLVEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN THE PREPARATION OF THE RKAP

In preparing plans, targets and strategies which are then outlined in the 2023 RKAP, the Board of Directors refers to several assumptions, including, the company's macro and micro conditions, in addition to consider the shareholder aspirations for 2023.

The Board of Commissioners then carried out an in-depth and evaluation of the 2023 RKAP proposal, the results of which were submitted to the Board of Directors, as well as holding discussions with the relevant Senior Managers to gain a comprehensive understanding of the Company's work plans for this year. Related with the conditions in 2023 which is not yet fully predictable, the Board of Commissioners provides suggestions and input to the Board of Directors regarding the 2023 RKAP.

Throughout its journey, the Board of Commissioners always reminds the Board of Directors to carry out an analysis of possible risks. Regarding the strategy implemented by the Board of Directors in 2023, the Board of Commissioners assesses that it is in line with the plans set out in the 2023 RKAP, especially regarding business development and expansion strategies that will be carried out by the Company. The Board of Commissioners also always strives to provide input to the Company regarding the implementation of the internal control system and risk management through recommendations and input from the Board of Commissioners Committees.

MEKANISME DAN FREKUENSI PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dewan Komisaris mengapresiasi atas hubungan kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Dewan Komisaris dan Direksi. Transparansi dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan, memfasilitasi kemudahan bagi Dewan Komisaris sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin, menyediakan media bagi peningkatan kompetensi dan pengetahuan Komisaris.

Dewan Komisaris senantiasa menjalin hubungan kerja yang sangat baik dengan Direksi dan mengedepankan prinsip saling menghormati wewenang masing-masing pihak. Dewan Komisaris melaksanakan mekanisme pengawasan dan pemberian nasihat, baik ketika diminta oleh Direksi maupun berdasarkan inisiatif Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris secara proaktif meninjau dan melakukan pengawasan implementasi kebijakan dan strategi yang ditetapkan pada awal tahun bersama Direksi, baik pada pengelolaan operasional maupun pengelolaan keuangan. Rekomendasi dan saran yang konstruktif dan solutif dalam menjalankan kegiatan usaha termasuk berbagai inisitif strategis, kemudian akan disampaikan kepada Direksi dan organ lain yang berkepentingan melalui mekanisme Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan minimal satu kali dalam satu bulan.

Sepanjang tahun 2023, Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi dilaksanakan sebanyak 12 kali. Dalam rangka memastikan kecukupan pengawasan, Dewan Komisaris secara berkala melakukan pengawasan langsung ke lapangan melalui kegiatan kunjungan kerja ke wilayah operasional IPCC. *Site visit* ke lapangan *(Management Walkthrough)* mampu membantu Dewan Komisaris dalam memperoleh gambaran yang lebih luas atas tantangan dan peluang yang dimiliki IPCC, serta mampu berinteraksi dengan pekerja IPCC yang bertugas di wilayah kerja IPCC sehingga memperoleh input dari sisi para pekerja.

Dewan Komisaris juga dibantu Komite Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi dan reviu atas kinerja yang telah berjalan dan rencana kerja ke depan.

Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komirasis, baik melalui pembahasan dengan Direksi terkait kinerja Perseroan, maupun kunjungan ke wilayah

MECHANISM AND FREQUENCY OF PROVIDING ADVICE TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners appreciates the good cooperative relationship that has existed between the Board of Commissioners and the Board of Directors. Transparency and timeliness in submitting reports, facilitating convenience for the Board of Commissioners so that they can carry out their functions as well as possible, providing a medium for increasing the competence and knowledge of Board of Commissioners.

The Board of Commissioners always maintains a very good working relationship with the Board of Directors and prioritizes the principle of mutual respect for the authority of each party. The Board of Commissioners implements monitoring and advisory mechanisms, both when requested by the Board of Directors and based on the Board of Commissioners' initiative.

The Board of Commissioners proactively reviews and supervises the implementation of policies and strategies established at the beginning of the year together with the Board of Directors, both in operational management and financial management. Recommendations and suggestions that are constructive and solutions in carrying out business activities, including various strategic initiatives, will then be submitted to the Board of Directors and other interested organs through the mechanism of a Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors which is held at least once a month.

Throughout 2023, Coordination Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors has been held 12 times. In order to ensure the adequacy of supervision, the Board of Commissioners periodically carries out direct supervision in the field through work visits to IPCC operational areas. Site visits to the field (Management Walkthrough) are able to assist the Board of Commissioners in obtaining a broader illustration of the challenges and opportunities that the IPCC has, as well as being able to interact with IPCC workers who work in the IPCC work area so as to obtain input from the workers' side.

The Board of Commissioners is also assisted by the Board of Commissioners Committee to carry out evaluations and reviews of ongoing performance and future work plans.

Based on the supervision carried out by the Board of Commissioners, both through discussions with the Board of Directors regarding the Company's performance, as well

kerja, Dewan Komisaris menilai, Perusahaan telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan rencana kerja tahunan, visi dan misi serta arahan strategis dari Pemegang Saham. Melalui pengamatan cermat terhadap kondisi makroekonomi, perubahan lingkungan usaha, Perusahaan pun mampu beradaptasi dan menerapkan strategi yang relevan sesuai perkembangan terkini.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KINERJA DIREKSI ATAS PENGELOLAAN PERSEROAN, DAN DASAR PENILAIANNYA

Setiap tahun, RUPS menetapkan target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi sebagai tolok ukur penilaian kinerja Direksi baik secara individu maupun kolegial. KPI tersebut disusun dengan mengacu kepada format dan pokok-pokok indikator yang telah diatur oleh Kementerian BUMN, sehingga tetap dalam koridor peraturan yang berlaku.

Dalam KPI tersebut kami menilai Direksi dari 5 perspektif, yaitu:
1. Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia;
2. Inovasi model bisnis;
3. Kepemimpinan teknologi;
4. Peningkatan investasi;
5. Pengembangan talenta.

Selain itu, penilaian juga dilakukan pada aspek penerapan GCG dimana IPCC setiap tahun melakukan *assessment* GCG (baik *self assessment* maupun penilaian oleh pihak independent) serta mengevaluasi kinerja korporat melalui penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.

Untuk memastikan pencapaian RKAP terpantau, secara berkala Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas hasil usaha IPCC setiap bulan melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk periode tahun buku 2023, Dewan Komisaris menilai bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah menunjukkan kinerja yang baik. Prestasi tersebut tercermin dari skor *Key Performance Indicators* (KPI) Perusahaan mencapai target dengan skor 108,50%. Dewan Komisaris mengapresiasi capaian KPI dan berharap Direksi dapat mengoptimalkan peluang untuk mengembangkan proyek strategis demi meningkatnya keuntungan.

as visits to work areas, the Board of Commissioners assesses that the Company has carried out business activities in accordance with the annual work plan, vision and mission as well as strategic direction from Shareholders. Through careful observation of macroeconomic conditions and changes in the business environment, the Company is able to adapt and implement relevant strategies according to the latest developments.

THE BOARD OF COMMISSIONERS' ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN THE MANAGEMENT OF THE COMPANY, AND THE BASIS OF THE ASSESSMENT

Every year, the GMS sets targets for the Board of Directors' Key Performance Indicators (KPI) as a benchmark for assessing the performance of the Board of Directors both individually and collectively. The KPI is prepared by referring to the format and main indicators that have been regulated by the Ministry of SOE, so that it remains within the corridor of applicable regulations.

In this KPI we assess the Board of Directors from 5 perspectives, namely:
1. Economic and social value for Indonesia;
2. Business model innovation;
3. Technology leadership;
4. Increased investment;
5. Talent development.

Apart from that, assessments are also carried out on aspects of GCG implementation where the IPCC annually carries out GCG assessments (both self-assessment and assessment by independent parties) and evaluates corporate performance through assessing the Company's Health Level.

To ensure that RKAP achievements are monitored, the Board of Commissioners periodically supervises IPCC's business results every month through Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Based on the above, for the 2023 financial year period, the Board of Commissioners considers that in carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors has demonstrated good performance. This achievement is reflected in the Company's Key Performance Indicators (KPI) score which achieved the target with a score of 108.50%. The Board of Commissioners appreciates KPI's achievements and hopes that the Board of Directors can optimize opportunities to develop strategic projects to increase profits.

Dewan Komisaris menyadari kondisi ekonomi khususnya perekonomian nasional secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja Perusahaan. Untuk itu, Dewan Komisaris mengapresiasi upaya Direksi dalam menghadapi dinamika perkembangan ekonomi ini dengan berbagai inisiatif yang dicetuskan sehingga secara umum target kinerja Perusahaan dapat tercapai.

The Board of Commissioners is aware that economic conditions, especially the national economy, directly or indirectly affect the Company's performance. For this reason, the Board of Commissioners appreciates the Board of Directors' efforts in dealing with the dynamics of economic development with various initiatives initiated so that in general the Company's performance targets can be achieved.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi pencapaian Perusahaan pada tahun 2023. Dimana, Perusahaan mencatatkan laba tahun berjalan sebesar RP190,86 miliar meningkat 18,01% dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar Rp161,73milyar. Jika dibandingkan dengan RKAP 2023, pendapatan terealisir sebesar 145,47% dari target sebesar Rp131.201 miliar. Tercapainya target tersebut terutama disebabkan meningkatnya pelayanan jasa barang, pelayanan jasa terminal, pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik, serta pengoperasioan kegiata pre *distribution center*.

The Board of Commissioners also appreciated the Company's achievements in 2023. The Company recorded a profit for the year of Rp190.86 billion, an increase of 18.01% compared to the previous period of Rp161.73 billion. When compared with the 2023 RKAP, realized revenue was 145.47% of the target of Rp131,201 billion. The achievement of this target was mainly due to increased goods services, terminal services, exploitation of land, buildings, water and electricity, as well as the operation of pre-distribution center activities.

Di penghujung akhir tahun 2023, IPCC juga memberikan pengumuman bahwa di awal tahun, IPCC akan membagikan hasil usaha beruba dividen interim dari Laba Bersih tahun periode Januari sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp39,46 miliar.

At the end of 2023, IPCC also announced that at the beginning of the year, IPCC will distribute business results in the form of interim dividends from Net Profit for the period January to June 2023 amounting to Rp39.46 billion.

Atas pencapaian yang baik tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh jajaran manajemen. Dewan Komisaris akan terus mendukung Direksi dan jajarannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Perseroan di tahun-tahun mendatang, tentunya dengan bersungguh-sungguh dalam menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya sebagai Dewan Komisaris.

For this good achievement, the Board of Commissioners gives high appreciation to the Board of Directors and all levels of management. The Board of Commissioners will continue to support the Board of Directors and their staff to maintain and improve the Company's performance in the coming years, of course by seriously carrying out their roles, functions and duties as the Board of Commissioners.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN YANG DISUSUN DIREKSI

VIEWS ON THE COMPANY'S BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

Melihat dinamika ekonomi nasional, kemudian memandang rencana kerja dan rencana strategis yang disusun oleh Direksi untuk periode tahun 2024, serta pencapaian kinerja Perusahaan yang dapat menjadi modal, Dewan Komisaris meyakini bahwa masih terdapat potensi bisnis yang cukup besar bagi IPCC untuk bertumbuh secara berkelanjutan dengan memanfaatkan momentum dari pencapaian kinerja tahun 2023.

Looking at the dynamics of the national economy, then looking at the work plans and strategic plans prepared by the Board of Directors for the 2024 period, as well as the Company's performance achievements which can be used as capital, the Board of Commissioners believes that there is still quite large business potential for IPCC to grow sustainably by taking advantage of the momentum from performance achievements in 2023.

Nilai tambah lain yang dapat menjadi modal Perusahaan dalam meraih kinerja positif pada tahun mendatang adalah status IPCC sebagai entitas anak tidak langsung PT Pelabuhan Indonesia (persero) yang merupakan Badan

Another added value that can be used as capital for the Company in achieving positive performance in the coming year is IPCC's status as an indirect subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), which is a State-

Usaha Milik Negara, yang berpengalaman di bidang usaha kepelabuhanan, sehingga mampu memberikan layanan yang berkualitas sesuai dengan harapan pelanggan. Dengan didukung sumber daya yang andal dan prosesional, IPCC melayani hampi 100% ekspor dan impor kendaraan serta sekitar 26% penjualan kendaraan domesti di Indonesia didistiribusikan melalui IPCC.

Selain itu , kebijakan untuk terus bermitra dan berekspansi usaha menjadi langkah yang strategis untuk mengembangkan usaha dan mendorong pertumbuhan. Dewan Komisaris memberikan dukungan penuh terhadap keputusan strategis dari Perusahaan. Perusahaan juga memiliki diversifikasi lini bisnis yang cukup beragam sehingga mampu memenuhi kebutuhan pelangaan.

PENGAWASAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

IPCC berusaha untuk senantiasa meningkatkan kinerja secara sehat dan berkelanjutan salah satunya dengan mematuhi setiap peraturan dan perundang-udangan yang berlaku dan menerapkan praktik terbaik *best practice*) prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi: *Transparency, Accountability, Responsibility*, *Independency, Fairness*, dan *Trusted* (TARIFT), serta Pilar Governansi korporat, yaitu Perilaku beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan.

Implementasi prinsip-prinsip GCG merupakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bersama dengan Direksi beserta seluruh jajarannya. Dewan Komisaris dan dengan Direksi berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada setiap aktivitas Perseroan. Dewan Komisaris tidak hanya bertanggung jawab pada hasil akhir tetapi juga senantiasa memantau proses untuk mencapai hasil yang diharapkan apakah telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

Dewan Komisaris melalui komite yang berada di bawah Dewan Komisaris secara seksama melakukan pemantauan dan peninjauan mengenai kesesuaian aktivitas operasional Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices* penerapan GCG, baik yang berlaku di Indonesia maupun pada tingkat internasional.

Owned Enterprise, which is experienced in the port business sector, so that it is able to provide quality services according to with customer expectations. Supported by reliable and processional resources, IPCC serves almost 100% of vehicle exports and imports and around 26% of domestic vehicle sales in Indonesia are distributed through IPCC.

Apart from that, the policy of continuing to partner and expand the business is a strategic step to develop the business and encourage growth. The Board of Commissioners provides full support for the Company's strategic decisions. The company also has diversified business lines that are quite diverse so that it is able to meet customer needs.

SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The IPCC strives to continually improve performance in a healthy and sustainable manner, one of which is by complying with all applicable regulations and legislation and implementing best practices of Good Corporate Governance (GCG) principles which include: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness and Trusted (TARIFT), as well as the Pillars of Corporate Governance, namely Ethical Behavior, Accountability, Transparency and Sustainability.

Implementation of GCG principles is the duty and responsibility of the Board of Commissioners together with the Board of Directors and all their staff. The Board of Commissioners and the Board of Directors are committed to implementing the principles of good corporate governance in every Company activity. The Board of Commissioners is not only responsible for the final results but also continuously monitors the process to achieve the expected results in accordance with applicable regulations and procedures.

The Board of Commissioners, through committees under the Board of Commissioners, carefully monitors and reviews the conformity of the Company's operational activities to applicable laws and regulations and best practices for implementing GCG, both in Indonesia and at the international level.

Dewan Komisaris menilai bahwa IPCC telah dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IPCC mampu mencatat nilai GCG yang sangat baik dibandingkan tahun 2023 dan terhadap *Area of Improvements* atau rekomendasi yang dihasilkan, IPCC senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan sehingga diharapkan dapat memperoleh skor GCG yang lebih baik.

The Board of Commissioners assesses that the IPCC has been managed well and in accordance with applicable laws and regulations. The IPCC was able to record very good GCG scores compared to 2023 and regarding the Areas of Improvements or recommendations produced, the IPCC always strives to make improvements so that it is hoped that it can obtain a better GCG score.

Selain itu, kualitas penerapan GCG di lingkungan Perusahaan juga terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dari semakin baik dan lengkapnya infrastruktur, *soft structure* serta mekanisme GCG yang dikembangkan Perusahaan.

Apart from that, the quality of GCG implementation within the Company also continues to improve as shown by the better and more complete infrastructure, soft structure and GCG mechanisms developed by the Company.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS SELURUH PERANGKAT GCG PERSEROAN DAN KETERLIBATAN DEWAN KOMISARIS DALAM BERBAGAI IMPLEMENTASI GCG

THE BOARD OF COMMISSIONERS' VIEWS ON ALL OF THE COMPANY'S GCG TOOLS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS' INVOLVEMENT IN VARIOUS GCG IMPLEMENTATIONS

Dewan Komisaris senantiasa mengingatkan Direksi agar dalam proses pengurusan Perseroan harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Beberapa saran dan nasihat untuk peningkatan kualitas penerapan GCG di IPCC:

1. Senantiasa melakukan mitigasi risiko bilamana terjadi perubahan lingkungan bisnis dan secara transparan melaporkannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholder dengan menggunakan kanal komunikasi resmi Perseroan.
3. Pelaksanaan pengendalian internal yang berjenjang perlu dipastikan berjalan dan termonitor dengan baik oleh manajemen, dengan konsep kendali berlapis (*three lines of defense*).
4. Menjadikan manajemen risiko menjadi budaya setiap Insan Perusahaan dalam bekerja dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, serta selalu menganalisa dan memitigasi risiko yang mempunyai dampak signifikan terhadap kinerja Perseroan.
5. Pemanfaatan dan implementasi sistem teknologi harus dapat diukur tingkat keberhasilan dan kemanfaatannya secara nyata.
6. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai aset Perusahaan untuk mendapatkan nilai tambah Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan

The Board of Commissioners always reminds the Board of Directors that the Company's management process must be carried out in accordance with GCG principles. Some suggestions and advice for improving the quality of GCG implementation at the IPCC:

1. Always mitigate risks whenever changes in the business environment occur and transparently report them to the Board of Commissioners and Shareholders, considering the applicable rules and regulations.
2. Respond to suggestions, hopes, problems and complaints from stakeholders using the Company's official communication channels.
3. The implementation of tiered internal control needs to be ensured that it runs and is well monitored by management, with a layered control concept (three lines of defense).
4. Make risk management a culture for every Company Person in working and acting for and on behalf of the Company, and always analyzing and mitigating risks that have a significant impact on the Company's performance.
5. The use and implementation of technology systems must be able to measure the level of success and real benefits.
6. Optimize human capital as Company assets to obtain added value for the Company for all stakeholders.

7. Menjalankan manajemen sumber daya manusia dengan memperhatikan prinsip keadilan dan keharmonisan, termasuk dan tidak terbatas pada isu gender, sumber daya lokal, dan disabilitas.
8. Melakukan pengadaan barang yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
9. Memberikan layanan yang terbaik dan terdepan kepada Pelanggan.
10. Sebagai entitas yang baik, beretika dan bertanggungjawab terhadap keberadaannya di lingkungan sosial, maka IPCC senantiasa melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat dimana Perusahaan menjalankan aktivitasnya.
11. Menjunjung tinggi perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga dengan melaksanakannya dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
12. Mampu membuat dan menerapkan kebijakan hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan untuk mencapai tujuan Perusahaan yang paling optimal.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

IPCC selalu berupaya dalam membangun sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi aset Perseroan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan Sistem Pengendalian Internal dengan dibantu Komite Audit Dewan Komisaris antara lain melalui pertemuan dan pendalaman dengan Satuan Pengawas Internal, maupun kunjungan ke lapangan. Dewan Komisaris menilai bahwa Sistem Pengendalian Internal di IPCC sudah memadai dan senantiasa mendorong manajemen untuk melakukan pemutakhiran seiring dengan perkembangan teknologi dan lingkungan kerja yang dinamis.

7. Carry out human capital management by considering the principles of justice and harmony, including but not limited to gender issues, local resources and disabilities.
8. Procure goods effectively, efficiently and in accordance with applicable statutory provisions.
9. Provide the best and most advanced service to customers.
10. As a good, ethical and responsible entity for its existence in the social environment, IPCC always implements all applicable laws and regulations in the places where the Company carries out its activities.
11. Uphold agreements that have been made with third parties by implementing them with due observance of applicable laws and regulations.
12. Able to create and implement parent company and subsidiary relationship policies to achieve the most optimal company goals.

THE BOARD OF COMMISSIONERS' VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

IPCC always strives to build an effective internal control system to safeguard the Company's investment assets. The Board of Commissioners supervises the Internal Control System with the assistance of the Audit Committee of the Board of Commissioners, including through meetings and in-depth discussions with the Internal Supervisory Unit, as well as field visits. The Board of Commissioners assesses that the Internal Control System at IPCC is adequate and continues to encourage management to update it in line with technological developments and a dynamic work environment.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Peran manajemen risiko dalam kegiatan usaha Perusahaan sangat penting. Memperhatikan hal tersebut, penerapan manajemen risiko di IPCC pada tahun 2023 kami nilai lebih menjadi sorotan dan senantiasa melakukan perbaikan. Adapun upaya mitigasi yang perlu dilakukan yang perlu diperhatikan utamanya berkaitan dengan mitigasi profil risiko yang telah dipetakan melalui proses assessment yang dilakukan internal Perusahaan, seperti risiko kepatuhan, risiko disrupsi proses bisnis, risiko keamanan jaringan, risiko pengambangan bisnis baru, risiko HSSE, risiko pergerakan saham umum, dan risiko *cost overrun*.

Terhadap hal-hal tersebut, Direksi telah menyiapkan mitigasi risiko yang memadai dan senantiasa menjadi salah satu hal yang menjadi fokus pengawasan Dewan Komisaris atas progres dan penerapannya.

PANDANGAN DAN PERAN DEWAN KOMISARIS ATAS PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)

Dewan Komisaris sangat memahami bahwa penyelesaian pelaporan pelanggaran oleh *stakeholder* merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan *stakeholder* dalam rangka menjamin hak-haknya dalam berhubungan dengan IPCC. Oleh karena itu, IPCC telah melengkapi diri dengan prosedur Pengendalian Gratifikasi dan *Whistleblowing System*, serta penerapan tata kelola terintegrasi Induk dan Anak Perusahaan dalam suatu pedoman, yakni Pedoman *Subsidiary Governance*.

Pengelolaan WBS pada lingkup IPCC menjadi tanggung jawab yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem pencegahan dan saluran *whistleblowing* di lingkungan Perseroan. Seluruh laporan yang masuk melalui WBS harus dianalisis oleh Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dengan *counterpart* atau pengawasan dari Komite Audit.

Komite Audit secara rutin melakukan reviu dan pembahasan bersama Tim UPG dimana tidak menutup kemungkinan pembahasan yang meliputi reviu atas WBS yang telah berjalan serta tindak lanjut atas laporan keluhan/aduan yang masuk jika ada.

THE BOARD OF COMMISSIONERS' VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

The role of risk management in the Company's business activities is very important. Taking this into account, we value the implementation of risk management at the IPCC in 2023 as being more in the spotlight and will continue to make improvements. The mitigation efforts that need to be taken that need to be considered are primarily related to mitigating risk profiles that have been mapped through an assessment process carried out internally by the Company, such as compliance risk, business process disruption risk, network security risk, new business development risk, HSSE risk, stock movement risk. general, and the risk of cost overrun.

Regarding these matters, the Board of Directors has prepared adequate risk mitigation and this has always been one of the things that has become the focus of the Board of Commissioners' supervision of its progress and implementation.

VIEWS AND ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ON THE IMPLEMENTATION OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

The Board of Commissioners fully understands that the completion of whistleblowing by stakeholders is a form of increasing stakeholder protection in order to guarantee their rights in dealing with the IPCC. Therefore, the IPCC has equipped itself with Gratification Control and Whistleblowing System procedures, as well as the implementation of integrated governance for Parent and Subsidiaries in a guideline, namely the Subsidiaries Governance Guideline.

WBS management within the scope of the IPCC is the responsibility of those responsible for implementing the prevention system and whistleblowing channels within the Company. All reports submitted through the WBS must be analyzed by the Gratification Control Unit Team (UPG) with counterpart or supervision from the Audit Committee.

The Audit Committee routinely carries out reviews and discussions with the UPG Team which does not rule out the possibility of discussions that include reviews of the ongoing WBS as well as follow-up on incoming complaints/complaints if any.

EVALUASI KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remuenrasi dan GCG. Setiap tahun Dewan Komisaris melalui Ketua Komite, mengevaluasi anggota-anggota Komite independent. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris menilai kinerja komite tersebut memuaskan karena senantiasa memberikan *feedback* yang memadai kepada Dewan Komisaris dan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Piagam Komite.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Di sepanjang tahun 2023, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris. Susunan dan komposisi Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Komisaris Independen, dan 1 (satu) orang Komisaris. Susunan dan komposisi Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Perusahaan.

Mengingat peran dan tugas Dewan Komisaris sangat strategis, maka setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan harus memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris Perseroan juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi. Adapun komposisi dan susunan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut:

EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Risk Management Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration and GCG Committees. In every year, the Board of Commissioners through the Committee Chairman evaluates the independent Committee members. Throughout 2023, the Board of Commissioners assesses that the committee's performance is satisfactory because it always provides adequate feedback to the Board of Commissioners and carries out its duties and functions in accordance with the Committee Charter.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2023, there was no changes to the structure and composition of the Board of Commissioners. The structure and composition of the Board of Commissioners consists of 3 (three) people, 1 (one) President Commissioner, 1 (one) Independent Commissioner, and 1 (one) Commissioner. The structure and composition of the Board of Commissioners has been adjusted to the Company's organizational needs.

Considering that the role and duties of the Board of Commissioners are very strategic, each member of the Company's Board of Commissioners must have high integrity, knowledge, ability and commitment to provide time to carry out their duties. The Company's Board of Commissioners is also required to be able to act independently, in the sense of not having a conflict of interest that could interfere with its ability to carry out its duties independently and critically, both in relation to each other and to the Board of Directors. The composition and structure of the Board of Commissioners can be seen in the following table

Tabel Susunan dan Komposisi Direksi Per 31 Desember 2023
Table of Structure and Composition of the Board of Directors As of December 31, 2023

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Period of Office
Drajat Sulistyo	Komisaris Utama President Commissioner	Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 27 Tanggal 13 April 2022 Deed of Extraordinary GMS Minutes No. 27 April 13, 2022	April 2022-RUPST 2027 April 2022-AGMS 2027	Ke-1 First
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Menjabat sebagai Komisaris Independen IPCC berdasarkan Akta Notaris Nomor: 48 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Served as Independent Commissioner of the IPCC based on Notarial Deed Number: 48 dated August 26, 2020 concerning Statement of Meeting Resolution of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	4 Agutsus 2020-RUPST 2025 August 4, 2020- AGMS 2025	Ke-1 First
LM. Arya Bima Yudiantara	Komisaris Independen Independent Commissioner	Menjabat sebagai Komisaris Independen IPCC berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: 27 tanggal 14 Juni 2021. Served as Independent Commissioner of the IPCC based on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number: 27 dated June 14, 2021.	Juni 2021- RUPST 2026 June 2021- AGMS 2026	Ke-1 First

AKHIR KATA DAN APRESIASI

Atas pencapaian serta upaya yang telah dikerahkan di sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi mendalam setinggi-tingginya kepada jajaran Direksi, manajemen serta karyawan Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yang telah memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki.

Dewan Komisaris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungannya sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Apresiasi juga kami sampaikan kepada segenap pemangku kepentingan yang telah memberikan kepercayaan kepada IPCC. Mari kita terus melandaskan diri pada praktik bisnis terbaik untuk mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan.

CLOSURE AND APPRECIATION

For the achievements and efforts that have been made throughout 2023, the Board of Commissioners expresses its highest appreciation to the Board of Directors, management and employees of Indonesia Kendaraan Terminal Tbk who have maximized all their potential.

The Board of Commissioners also expresses its gratitude to the Shareholders for their trust and support so that the Board of Commissioners can carry out their duties and responsibilities well. We also express our appreciation to all stakeholders who have trusted the IPCC. Let's continue to base ourselves on the best business practices to realize the Company's Vision and Mission.

Jakarta, 29 April 2023
Atas nama Dewan Komisaris
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Jakarta, April 29, 2023
On behalf of the Board of Commissioners
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk



Drajat Sulityo
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direksi
Board of Directors Report

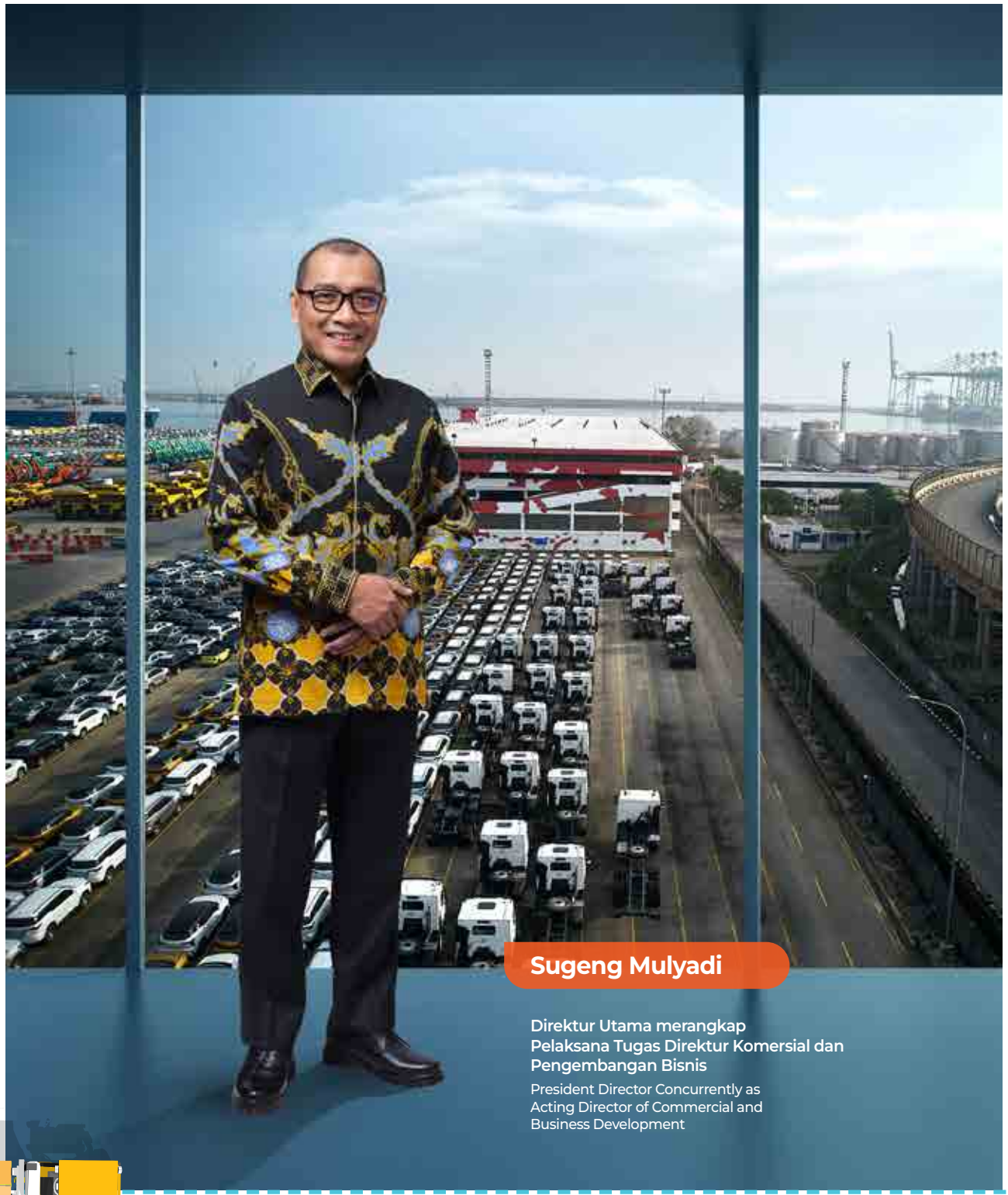

Sugeng Mulyadi

Direktur Utama merangkap Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis

President Director Concurrently as Acting Director of Commercial and Business Development

Kami memahami, meraih kepercayaan dari para Pemangku Kepentingan sejatinya bukanlah suatu serta merta, akan tetapi merupakan buah dari pengejawantahan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh Insan IPCC. Direksi yang didukung oleh Dewan Komisaris serta semua jajaran Perusahaan, senantiasa berupaya dan bekerja keras dalam mencapai target-target Perusahaan.

We understand that gaining the trust of the Stakeholders is not something that happens immediately, but is the result of serious efforts from all IPCC People. The Board of Directors, supported by the Board of Commissioners and all levels of the Company, always strive and work hard to achieve the Company's targets.



Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, pada kesempatan ini Kami atas nama Direksi dapat menyampaikan Laporan Tahunan 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan dalam mengelola Perusahaan selama satu periode tahun buku.

Jika merujuk pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024, maka Tahun 2023 merupakan tahun "Kemitraan dan Ekpansi Bisnis". Di tahun ini, IPCC berupaya, bekerja keras, dan bersinergi, untuk mewujudkan target Perusahaan yang tertuang dalam RJPP, RKAP, dan aspirasi Pemegang Saham yang secara resmi disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Kami sangat menyadari bahwa pelabuhan, termasuk terminal kendaraan, merupakan gerbang utama perkembangan perekonomian suatu wilayah bahkan negara. Oleh karena itu, Kami berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pelanggan kami, melalui peningkatan kualitas layanan,

Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Praise and gratitude to the presence of Almighty God, on this occasion we, on behalf of the Board of Directors, can submit the 2023 Annual Report as a form of our responsibility to Shareholders and all Stakeholders in managing the Company during one financial year period.

If we refer to the Company's Long Term Plan (RJPP) 2020-2024, then 2023 is the year of "Partnership and Business Expansion". This year, IPCC is making efforts, working hard, and synergizing, to realize the Company's targets stated in the RJPP, RKAP, and Shareholder aspirations which were officially conveyed at the Annual General Meeting of Shareholders.

We are very aware that ports, including car terminals, are the main gateway to the economic development of a region or even a country. Therefore, we strive to provide the best service for each of our customers, through improving service quality, technology, digitalization and innovation, as well as strengthening the implementation

teknologi, digitalisasi dan inovasi, serta penguatan penerapan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko, sehingga Kami mampu mewujudkan aspirasi Pemangku Kepentingan untuk menjadi perusahaan pengelola terminal kendaraan yang profesional dan dapat disejajarkan serta bersaing dengan penyedia layanan terminal kendaraan terbaik di dunia.

of corporate governance and risk management, so that we are able to realize the Stakeholders' aspirations to become a professional car terminal management company that can be on par with and compete with the best vehicle terminal service providers in the world.

Kami memahami, meraih kepercayaan dari para Pemangku Kepentingan sejatinya bukanlah suatu serta merta, akan tetapi merupakan buah dari pengejawantahan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh Insan IPCC. Direksi yang didukung oleh Dewan Komisaris serta semua jajaran Perusahaan, senantiasa berupaya dan bekerja keras dalam mencapai target-target Perusahaan.

We understand that gaining the trust of the Stakeholders is not something that happens immediately, but it is the result of serious efforts from all IPCC People. The Board of Directors, supported by the Board of Commissioners and all levels of the Company, always strive and work hard to achieve the Company's targets.

Di samping berfokus pada pertumbuhan usaha, kami juga mengedepankan penerapan keberlanjutan dalam menjalankan usaha melalui integrasi aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola ke dalam proses operasional perbankan. Dengan semangat keberlanjutan, IPCC senantiasa berupaya meningkatkan nilai Perusahaan bagi setiap pemangku kepentingan.

Apart from focusing on business growth, we also prioritize implementing sustainability in running our business through integrating environmental, economic, social and governance aspects into banking operational processes. With the spirit of sustainability, IPCC always strives to increase the Company's value for every stakeholder.

ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN

Dalam menyusun rencana kerja dan target Perusahaan, salah satu yang menjadi asumsi Kami, adalah perkembangan ekonomi makro. Di sepanjang tahun 2023, dinamika perekonomian global berubah cepat dengan ketidakpastian yang tinggi. Optimisme pemulihan pasca Covid-19 pun berangsur meredup. Fragmentasi geopolitik-ekonomi meningkat dengan berlangsungnya perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan keterbatasan pasokan serta tetap tingginya harga energi dan pangan global. Sementara itu, berlanjutnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berdampak pada penurunan tidak hanya ekspor-impor kedua negara tersebut, tetapi juga volume perdagangan dunia.

Di sisi lain, ketegangan Israel dan Palestina sejak awal Oktober 2023 menambah ketegangan geopolitik di Kawasan Timur Tengah dan juga dunia. Hal ini mengakibatkan proses pemulihan ekonomi global semakin melambat, disertai dengan berlanjutnya tekanan inflasi karena harga energi dan pangan dunia, serta keketatan pasar tenaga kerja di sejumlah negara maju.

COMPANY PERFORMANCE ANALYSIS

In preparing the Company's work plans and targets, one of our assumptions is macroeconomic developments. Throughout 2023, the dynamics of the global economy will change rapidly with high uncertainty. Optimism for post-Covid-19 recovery is gradually fading. Geopolitical-economic fragmentation increased with the ongoing Russian-Ukrainian war which caused supply limitations and continued high global energy and food prices. Meanwhile, continuing trade tensions between the United States (US) and China have resulted in a decline not only in the exports and imports of the two countries, but also in the volume of world trade.

On the other hand, tensions between Israel and Palestine since early October 2023 have added to geopolitical tensions in the Middle East region and also the world. This has resulted in the global economic recovery process becoming increasingly slow, accompanied by continued inflationary pressures due to world energy and food prices, as well as tight labor markets in a number of developed countries.

Perlambatan ekonomi dunia juga disebabkan oleh pengetatan moneter yang harus ditempuh bank-bank sentral untuk menurunkan inflasi, dengan kenaikan suku bunga yang sangat tinggi di negara maju, khususnya Amerika Serikat. Melonjaknya utang pemerintah untuk membiayai ekspansi kebijakan fiskal di negara maju, khususnya AS, makin mendorong suku bunga dan kuatnya dolar AS di pasar keuangan global sehingga menarik aliran modal dunia dalam jumlah besar.

Tekanan inflasi yang masih terus berlanjut hingga penghujung tahun 2023 tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian global masih akan berada pada situasi *high for longer*, di mana tingkat suku bunga global yang bertahan pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.

Dalam laporan *World Economic Outlook* (WEO) yang dirilis pada Oktober 2023, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan perekonomian global tahun 2023 tumbuh melemah dari 3,5% di tahun 2022 menjadi 3,0% di 2023 dan melanjutkan pelemahan ke 2,9% di 2024. Divergensi pemulihan ekonomi juga semakin lebar di mana perekonomian AS menunjukkan tren pemulihan yang menguat sementara kawasan lain, seperti Eropa dan Tiongkok mengalami tren pemulihan yang lemah.

PERKEMBANGAN EKONOMI DOMESTIK

Di Tanah Air, pertumbuhan ekonomi relatif terjaga, meski melambat dibanding tahun 2023, namun Indonesia termasuk salah satu negara dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang masih kuat. Berdasarkan Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal Edisi IV 2023 yang dirilis oleh Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, daya tahan ekonomi nasional terutama ditopang oleh APBN yang bekerja dengan baik dalam fungsinya sebagai stabilisator dan *shock absorber* untuk melindungi masyarakat.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan global yang mengakibatkan penurunan kinerja ekspor, sedangkan permintaan domestik masih cukup kuat sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%. Sementara

The world economic slowdown was also caused by the monetary tightening that central banks had to undertake to reduce inflation, with very high interest rates increasing in developed countries, especially the United States. Soaring government debt to finance the expansion of fiscal policy in developed countries, especially the US, has further pushed up interest rates and the strength of the US dollar in global financial markets, thus attracting large flows of world capital.

Inflationary pressures that will continue until the end of 2023 indicate that the global economy will remain in a high situation for longer, where global interest rates will remain at high levels for a longer period of time.

In the World Economic Outlook (WEO) report released in October 2023, the International Monetary Fund (IMF) projects that the global economy will grow weaker in 2023 from 3.5% in 2022 to 3.0% in 2023 and continue to weaken to 2.9% in 2024. The divergence in economic recovery is also widening, with the US economy showing a stronger recovery trend while other regions, such as Europe and China, are experiencing a weak recovery trend.

DOMESTIC ECONOMIC DEVELOPMENT

In Indonesia, economic growth is relatively maintained, although it is slowing compared to 2023, but Indonesia is one of the countries with strong economic growth performance. Based on the Economic, Financial and Fiscal Review, Edition IV 2023, released by the Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the resilience of the national economy is mainly supported by the APBN which works well in its function as a stabilizer and shock absorber to protect society.

The slowdown in Indonesia's economic growth was mainly caused by declining global demand which resulted in a decline in export performance, while domestic demand was still quite strong in line with growth in household consumption.

Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), the Indonesian economy in 2023 grew by 5.05%, lower than the achievement in 2022 which experienced growth of 5.31%. In terms of production, the highest growth occurred in the Transportation and Warehousing Business Field at 13.96%. Meanwhile, in terms of expenditure, the highest

dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83%.

Tinjauan Industri dan Posisi IPCC dalam Industri

Pada tanggal 22 Juni 2023, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia, hal ini secara tidak langsung merupakan tanda semakin menguatnya kondisi yang mendukung *economic recovery* yang mendorong pertumbuhan dan penguatan ekonomi Nasional.

Sejatinya, dengan pulihnya perekonomian masyarakat, tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat juga ikut meningkat. Hal ini berdampak pula terhadap industri otomotif dan mendorong pertumbuhan penjualan, termasuk ekpor dan impor kendaraan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) dalam websitenya https://www.gaikindo.or.id/, mencatat mencatat total penjualan mobil secara *whole sales* sepanjang tahun 2023 mencapai 1.005.802 unit, turun 4% dibandingkan capaian sepanjang Tahun 2022 sebanyak 1.048.040 unit. Sementara penjualan secara *retail* sepanjang tahun 2023 mencapai 998.059 unit, turun 1,5% dibandingkan Tahun 2022 yang mencapai 1.013.582 unit. Pencapaian di bawah target 1,05 juta unit, disebabkan adanya perlambatan pasar otomotif pada semester kedua tahun 2023 yang disebabkan beberapa faktor antara lain kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) dan pertumbuhan perekonomian yang turut melambat.

Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekspor mobil dalam bentuk utuh (completely built-up, CBU) maupun dalam bentuk komponen di sepanjang Januari hingga April 2023 dibanding periode yang sama tahun 2022 lalu. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan dari sisi ekspor, jumlah ekspor kendaraan buatan Indonesia mengalami kenaikan sebesar 6,7% dari 473.602 unit di tahun 2022 menjadi 505.134 unit di tahun 2023. Daihatsu masih menjadi merek yang paling banyak melakukan ekspor mobil dari Indonesia, diikuti oleh Toyota dan Mitsubishi Motors. Berikut daftar lima teratas selama periode 2023:

growth was achieved by the Consumption Expenditure of Nonprofit Institutions Serving Households (PK-LNPRT) at 9.83%.

Industry Overview and IPCC Position in the Industry

On June 22, 2023, the President issued Presidential Decree (KEPPRES) Number 17 of 2023 concerning Determination of the End of the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic Status in Indonesia, this is indirectly a sign of increasingly strengthening conditions that support economic recovery which encourages growth and strengthening of the National economy.

In fact, with the recovery of the community's economy, people's consumption levels and purchasing power have also increased. This also has an impact on the automotive industry and encourages sales growth, including vehicle exports and imports.

Based on data released by the Association of Indonesian Automotive Industries (GAIKINDO) on its website https://www.gaikindo.or.id/, it recorded that total car sales throughout 2023 reached 1,005,802 units, decreased by 4% compared to the achievement throughout 2022 of 1,048,040 units. Meanwhile, retail sales throughout 2023 will reach 998,059 units, down 1.5% compared to 2022 which reached 1,013,582 units. The achievement was below the target of 1.05 million units, due to a slowdown in the automotive market in the second semester of 2023 which was caused by several factors, including an increase in Bank Indonesia (BI) interest rates and slowing economic growth.

Indonesia recorded growth in car exports in complete form (completely built-up, CBU) and in component form from January to April 2023 compared to the same period in 2022. Based on data from the Association of Vehicle Industries from the export side, the number of exports of vehicles made in Indonesia has increased by 6.7% from 473,602 units in 2022 to 505,134 units in 2023. Daihatsu is still the brand that exports the most cars from Indonesia, followed by Toyota and Mitsubishi Motors. The following is a list of the top five for the 2023 period:

1. Daihatsu – 148.757 unit
2. Toyota – 125.864 unit
3. Mitsubishi Motors – 74.135 unit
4. Hyundai HMMI – 50.106 unit
5. Suzuki –36.297 unit

Sementara itu, tren penjualan alat berat pada tahun ini diperkirakan melemah, atau tak secemerlang dibandingkan pada 2022. Hal ini terutama disebabkan karena tahun 2023 merupakan tahun menuju tahun politik, dan juga terjadi penurunan harga komoditas, serta menurunnya aktivitas konstruksi di Tanah Air.

Kondisi perekonomian global dan nasional serta kinerja ekspor, impor, dan penjualan kendaraan, menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Perusahaan. Hal tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Perusahaan. Sebagai entitas usaha yang bergerak di bidang jasa dan layanan bongkar muat kendaraan di pelabuhan, baik untuk ekspor maupun impor, Perusahaan memiliki kesempatan yang besar untuk turut berpartisipasi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, karena industri otomotif berdasarkan *press release* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada 2 Desember 2023 merupakan salah satu kontributor terbesar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal lain yang menjadi pertimbangan Direksi dalam menetapkan target dan strategi pencapaian Perusahaan tahun 2023 adalah asumsi internal Perusahaan serta Aspirasi Pemegang Saham yang dituangkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut serta mengacu pada arahan RJPP 2021-2025 serta Visi dan Misi Perusahaan, Perusahaan menyusun target dan program kerja yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023. Berdasarkan RJPP, target yang hendak dicapai Perusahaan, yaitu *Enhancement & Expansion*.

1. Daihatsu – 148,757 units
2. Toyota – 125,864 units
3. Mitsubishi Motors – 74,135 units
4. Hyundai HMMI – 50,106 units
5. Suzuki –36,297 units

Meanwhile, the sales trend for heavy equipment this year is expected to weaken, or not be as bright as in 2022. This is mainly because 2023 is a year leading to a political year, and there will also be a decline in commodity prices, as well as a decline in construction activity in the country.

Global and national economic conditions as well as the performance of exports, imports and vehicle sales are external factors that influence the Company's performance. This is both a challenge and an opportunity for the Company. As a business entity that operates in the field of services and vehicle loading and unloading services at ports, both for export and import, the Company has a great opportunity to participate in the growth of the Indonesian economy, because the automotive industry is based on a press release from the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia on December 2 2023 is one of the biggest contributors to Indonesia's economic growth.

Another thing that is taken into consideration by the Board of Directors in setting targets and strategies for achieving the Company in 2023 is the Company's internal assumptions and Shareholder Aspirations as outlined in the Company's Work Plan and Budget.

Based on these assumptions and referring to the 2021-2025 RJPP direction and the Company's Vision and Mission, the Company prepared targets and work programs which were then outlined in the 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP). Based on the RJPP, the target the Company wishes to achieve is Enhancement & Expansion.

ENHANCEMENT & EXPANSION

IPCC merupakan satu-satunya anak perusahaan Pelindo melalui Pelindo Multi Terminal yang khusus menangani terminal Mobil dan RORO. IPCC memulai keahliannya sebagai terminal mobil, namun untuk membuka kapasitas di setiap terminal yang dioperasikan oleh IPCC dan untuk meningkatkan konektivitas di Indonesia, IPCC memperluas keahlian dan layanannya dalam mengoperasikan terminal RORO (dan ROPAX) di Indonesia, terutama di Belawan, Pontianak, Makassar dan Balikpapan.

ENHANCEMENT & EXPANSION

IPCC is the only Pelindo subsidiary through Pelindo Multi Terminal which specifically handles Car and RORO terminals. IPCC started its expertise as a car terminal, but to open capacity in each terminal operated by IPCC and to improve connectivity in Indonesia, IPCC expanded its expertise and services in operating RORO (and ROPAX) terminals in Indonesia, especially in Belawan, Pontianak, Makassar and Balikpapan .



Perusahaan berupaya meraih seluruh peluang usaha di luar usaha terminal, baik laut maupun darat, dengan menitik beratkan pada aspek digitalisasi, ekpansi, dan integrasi.

Ekspansi yaitu meraih peluang di luar gerbang terminal dengan semangat baru “Di Luar Gerbang”. Sementara digitalisasi dan integrasi, yaitu integrasi data, di pelabuhan oleh extending RFId pemanfaatan hingga pelabuhan masuk (menghilangkan proses manual). Target digitalisasi dan integrasi data, pertama adalah membangun konektivitas yang lebih baik, terutama dengan bea cukai, operator pelabuhan, mitra logistik, dan pemerintah. Kedua adalah untuk kepatuhan penuh terhadap peraturan pemerintah.

Adapun strategi untuk mencapai target Enhancement & Expansion, dapat dijelaskan melalui bagan berikut:

The company seeks to seize all business opportunities outside the terminal business, both sea and land, by focusing on aspects of digitalization, expansion and integration.

Expansion means seizing opportunities outside the terminal gate with a new spirit “Beyond the Gate”. Meanwhile digitalization and integration, namely data integration, at ports by extending RFId utilization to the port of entry (eliminating manual processes). The first target of digitalization and data integration is to build better connectivity, especially with customs, port operators, logistics partners and the government. Second is for full compliance with government regulations.

The strategy for achieving the Enhancement & Expansion target can be explained through the following chart:

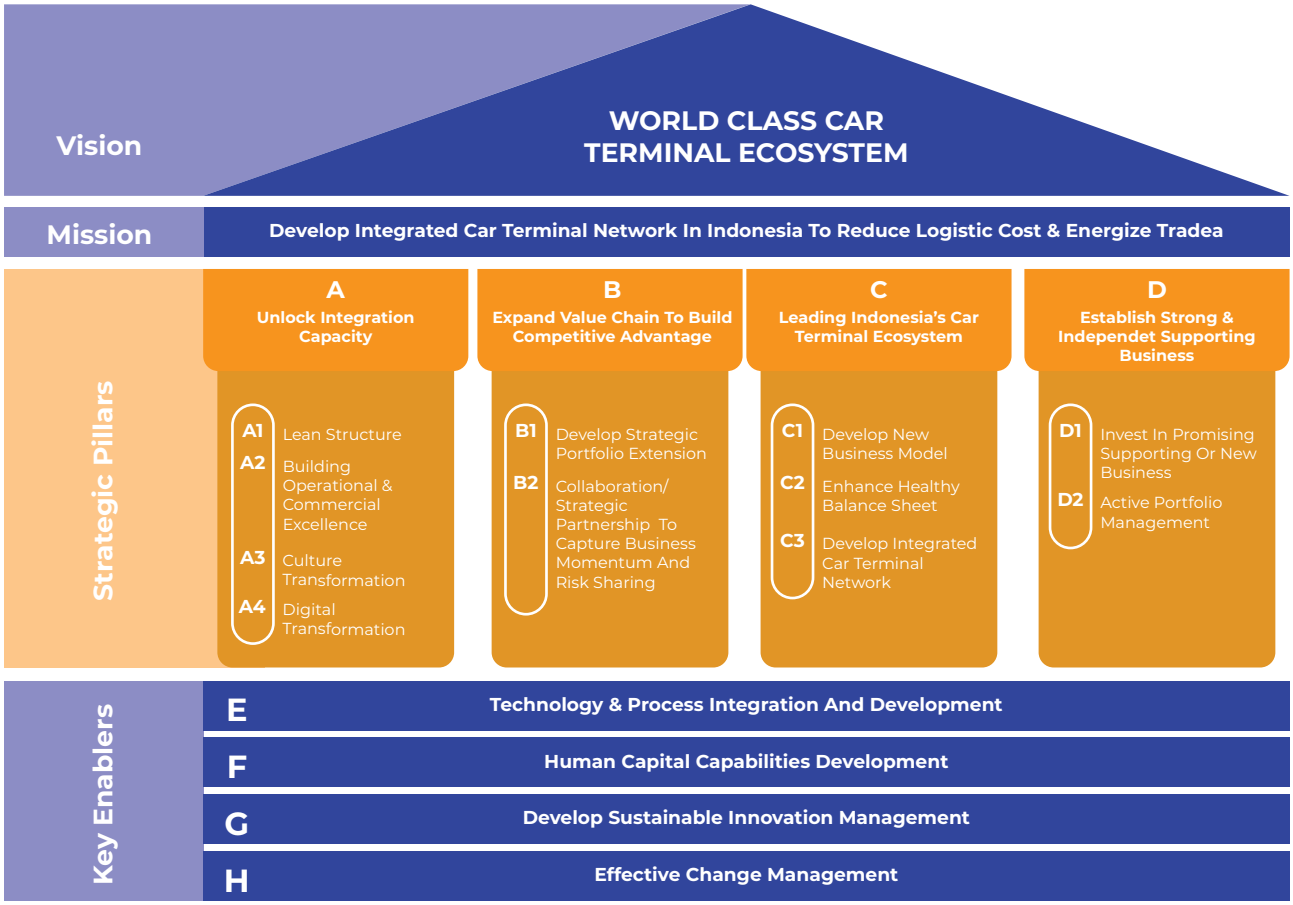

Sumber: RJPP IPCC 2020-2024 | Source: 2020-2024 RJPP of IPCC

Pada Rumah Strategi RJPP periode 2020-2024, misi Perusahaan adalah *Develop Integrated Car Terminal Network in Indonesia to Reduce Logistic Cost & Energize Trade.* Dalam Rumah Strategi tersebut terdapat 4 (empat) *strategic pillars* yaitu:

1. *Unlock Integration Capacity*
2. *Expand Value Chain To Build Competitive Advantage*
3. *Leading Indonesia's Car Terminal Ecosystem*
4. *Establish Strong & Independent Supporting Business.*

Empat pilar tersebut didukung oleh 4 (empat) *enablers*, yaitu:

1. *Technology & Process Integration And Development*
2. *Human Capital Capabilities Development*
3. *Develop Sustainable Innovation Management*
4. *Effective Change Management*

In the RJPP Strategy House for the 2020-2024 period, the Company's mission is to Develop an Integrated Car Terminal Network in Indonesia to Reduce Logistic Cost & Energize Trade. In the Strategy House there are 4 (four) strategic pillars, namely:

1. Unlock Integration Capacity
2. Expand Value Chain To Build Competitive Advantage
3. Leading Indonesia's Car Terminal Ecosystem
4. Establish Strong & Independent Supporting Business.

These four pillars are supported by 4 (four) enablers, namely:

1. Technology & Process Integration And Development
2. Human Capital Capabilities Development
3. Develop Sustainable Innovation Management
4. Effective Change Management

Sementara itu, area fokus utama Perusahaan di tahun 2023 adalah:

- Transfer operatorship terminal kendaraan di area kerja Pelindo
- Integrasi & standarisasi operasi, dengan fokus pada digitalisasi & sistemisasi
- Layanan dan operasi terintegrasi dengan fungsi dan *enabler* terpusat
- Penambahan kapasitas car distribution management (CDM)
- Digitalisasi proses bisnis
- Peningkatan *corporate value* dan kinerja harga saham melalui *buyback*
- *Full dedicated car terminal* (fase 1)
- Opsi divestasi/likuidasi MKO MTKI

PERANAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Direksi merumuskan strategi dan kebijakan strategi yang diterapkan pada tahun 2023 selaras dengan amanat yang ditetapkan dalam *Board Manual* serta arahan dari RJPP. Direksi berperan aktif dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan senantiasa sejalan dengan Visi dan Misi Perusahaan.

PROSES YANG DILAKUKAN DALAM MEMASTIKAN PENERAPAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk memastikan semua target yang telah ditetapkan di awal tahun dapat terealisasi dengan baik sesuai harapan pemegang saham, Direksi secara berkala melakukan pengawasan, meninjau, dan pengawalan langsung progres pencapaian target serta mengevaluasi aktualisasi program-program kerja yang sudah disepakati bersama. Setiap bulan, Direksi mengadakan pertemuan bersama unit-unit kerja untuk membahas pencapaian tersebut, antara lain melalui Rapat Direksi, Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi, Rapat Kerja Direktorat, hingga Rapat Kerja formal lainnya. Melalui pelaksanaan berbagai jenis rapat formal tersebut, Direksi dapat secara *real time* mengawasi dan mengetahui perkembangan terkini mengenai pengelolaan Perseroan, mulai dari aspek pemasaran, keuangan, perpajakan, sumber daya manusia, bahkan operasional di sejumlah Terminal Perusahaan.

Apabila pada praktiknya Direksi menemukan adanya kendala yang signifikan untuk merealisasikan target-target yang sudah ditetapkan, Direksi memiliki

Meanwhile, the Company's main focus areas in 2023 are:

- Transfer operatorship of vehicle terminals in Pelindo work areas
- Integration & standardization of operations, with a focus on digitalization & systemization
- Integrated services and operations with centralized functions and enablers
- Additional car distribution management (CDM) capacity
- Digitalization of business processes
- Increasing corporate value and share price performance through buybacks
- Full dedicated car terminal (phase 1)
- MKO MTKI divestment/liquidation option

THE ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN STRATEGY AND POLICY FORMULATION

The Board of Directors formulates strategies and strategic policies to be implemented in 2023 in line with the mandate set out in the Board Manual as well as directions from the RJPP. The Board of Directors plays an active role in formulating strategies and strategic policies as part of implementing their duties and responsibilities. The strategies and policies established are always in line with the Company's Vision and Mission.

PROCESSES CARRIED OUT TO ENSURE THE IMPLEMENTATION OF STRATEGIES AND POLICIES

To ensure that all targets set at the beginning of the year can be realized well according to shareholders' expectations, the Board of Directors periodically supervises, reviews and directly monitors the progress of achieving targets and evaluates the actualization of work programs that have been mutually agreed upon. Every month, the Board of Directors holds meetings with work units to discuss these achievements, including through Board of Directors Meetings, Joint Meetings of Commissioners and Directors, Directorate Work Meetings, and other formal Work Meetings. Through holding various types of formal meetings, the Board of Directors can monitor and find out in real time the latest developments regarding the management of the Company, starting from aspects of marketing, finance, taxation, Human Capital, and even operations at a number of Company Terminals.

If in practice the Board of Directors finds that there are significant obstacles to realizing the targets that have been set, the Board of Directors has the authority to

kewenangan untuk melakukan revisi atas RKAP Tahunan selaras dengan dinamika pasar dan industri yang berkembang di tahun berjalan dengan meminta dukungan dan tanggapan Dewan Komisaris sebelum melaksanakannya.

PENCAPAIAN KINERJA 2023 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN TARGET

Secara umum, Pencapaian target Perusahaan tahun 2023 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hampir seluruh operasi Perusahaan menunjukkan pencapaian di atas target yang telah ditetapkan. Adanya deviasi pada target dalam kendaraan berat terutama disebabkan belum optimalnya sektor pertambangan dalam negeri yang berpengaruh pada kebutuhan alat berat di sektor tambang. Namun, realisasi bongkar muat mobil dan *sparepart* dengan pencapaian di atas target memberikan dorongan positif bagi pencapaian pendapatan dan laba Perusahaan yang juga membukukan pencapaian positif.

Sementara itu, Pendapatan Operasi IPCC tahun 2023 terealisasi sebesar Rp735,21 miliar meningkat 1,27% dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar Rp726,30 milyar. Jika dibandingkan dengan RKAP, pendapatan terealisir sebesar 106,68% dari target yang dicanangkan sebesar Rp689,16 miliar. Peningkatan Pendapatan selaras dengan kinerja ekspor mobil secara utuh dari Tanah Air atau completely build-up (CBU) secara umum naik dari periode sebelumnya. Dimana secara tahunan 2023, ekspor mobil buatan dalam negeri masih positif sebesar 10,6%.

Laba Bersih tercatat sebesar Rp190,86 Miliar, meningkat 18,01% dari tahun sebelumnya sebesar Rp161,73 miliar. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, maka Laba Bersih mencapai 145,47 dari target sebesar Rp1.648,66 Miliar. Total Aset terealisasi sebesar Rp1.788,31 Miliar, menurun sebesar 18,41% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.191,83 Miliar. Jika dibandingkan dengan target, Total Aset mencapai 108,47% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.648,66 Miliar.

revise the Annual RKAP in line with market and industry dynamics that are developing in the current year by requesting the support and response of the Board of Commissioners before implementing it.

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS FOR 2023 AND COMPARISON WITH THE TARGET

In general, the achievement of the Company's targets for 2023 shows quite good performance. Almost all of the Company's operations show achievements above the targets that have been set. The deviation in targets for heavy vehicles is mainly due to the suboptimal domestic mining sector which has an impact on the need for heavy equipment in the mining sector. However, the realization of loading and unloading of cars and spare parts with achievements above the target provided a positive impetus for the Company's revenue and profit achievement which also recorded positive achievements.

Meanwhile, IPCC Operational Income in 2023 was realized at Rp735.21 billion, an increase of 1.27% compared to the previous period of Rp726.30 billion. When compared with the RKAP, realized revenue was 106.68% of the stated target of Rp689.16 billion. The increase in income is in line with the performance of complete car exports from the country or completely build-up (CBU) which generally increased from the previous period. Where in 2023, exports of domestically made cars will still be positive at 10.6%.

Net Profit was recorded at Rp190.86 billion, an increase of 18.01% from the previous year of Rp161.73 billion. When compared with the 2023 target, Net Profit reached 145.47 of the target of Rp1,648.66 billion. Total realized assets amounted to Rp1,788.31 billion, a decrease of 18.41% from the previous year which was recorded at Rp2,191.83 billion. When compared with the target, Total Assets reached 108.47% of the target set at Rp1,648.66 billion.

Pada struktur modal, Perusahaan tetap menggunakan modal sendiri dalam memenuhi kebutuhan investasi dan operasinya. Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tetap merealisasikan untuk tidak menggunakan utang berbasis bunga untuk memenuhi kebutuhan investasinya.

KENDALA/TANTANGAN SERTA SOLUSINYA

Ekspansi kegiatan usaha IPCC di tahun 2023 tentu diwarnai dengan perjalanan lika liku dalam proses pendekatan dengan sejumlah pihak hingga sampai terjadi kesepakatan. Dalam menghadapi kendala tersebut, IPCC terus berupaya menjalin komunikasi yang efektif dan harmonis dengan para pihak yang berkepentingan. IPCC secara intensif melakukan berbagai upaya pendekatan dan memberikan penjelasan yang meyakinkan bahwa hasil akhir dari pengembangan bisnis tidak hanya memberikan nilai tambah semata namun juga membawa dampak positif bagi pihak-pihak lain. Upaya ini terbukti membuahkan hasil positif dimana rencana ekspansi bisnis IPCC dapat berjalan dengan baik di tahun 2023.

Tantangan baru pun muncul yaitu pesaing baru yang memiliki layanan yang sama, termasuk layanan terminal internasional yg sebelumnya di monopoli oleh Perusahaan.

Tantangan lainnya hadir dari *gap* pengembangan SDM dan organisasi yang terlihat dari kurang cepatnya unit kerja dalam beradaptasi dengan perubahan model bisnis baru dan kompetensi SDM yang belum merata. Untuk itu, Perseroan secara kontinu menanamkan pemikiran yang kuat kepada semua karyawan akan pentingnya meningkatkan kompetensi diri dan menggali potensi yang dimiliki di tengah era persaingan ketat yang dihadapi saat ini. Langkah konkret IPCC dalam mengatasi tantangan di bidang SDM ditunjukkan melalui penyediaan program pelatihan dan pengembangan SDM yang berkesinambungan untuk semua karyawan dari berbagai tingkatan manajerial apapun. Kami senantiasa memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dalam mengevaluasi seluruh tantangan ataupun kendala yang dihadapi di lapangan, selain menerima laporan evaluasi kerja dari unit-unit kerja, Direksi selaku jajaran Manajemen Puncak juga melakukan *management walkthrough* untuk melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan dan berkomunikasi dengan sejumlah pihak yang terlibat didalamnya, baik karyawan maupun mitra bisnis untuk mengetahui secara langsung

In terms of capital structure, the Company continues to use its own capital to meet its investment and operational needs. Until the end of 2023, the Company continue to realize that it will not use interest-based debt to meet its investment needs.

CONSTRAINTS/CHALLENGES AND THEIR SOLUTIONS

The expansion of IPCC's business activities in 2023 will certainly be marked by twists and turns in the process of approaching a number of parties until an agreement is reached. In facing these obstacles, the IPCC continues to strive to establish effective and harmonious communication with interested parties. The IPCC intensively carries out various approaches and provides convincing explanations that the final results of business development do not only provide added value but also have a positive impact on other parties. This effort has proven to produce positive results where IPCC's business expansion plans can run well in 2023.

New challenges have emerged, namely new competitors who have the same services, including international terminal services which were previously monopolized by the Company.

Another challenge arises from the gap in HC and organizational development which can be seen from the lack of speed in adapting work units to changes in new business models and uneven HC competencies. For this reason, the Company continuously instills strong thinking in all employees regarding the importance of improving their personal competence and exploring their potential in the current era of intense competition. The IPCC's concrete steps in overcoming challenges in the HC sector are demonstrated through the provision of continuous HC training and development programs for all employees at all managerial levels. We always provide equal space and opportunities for all employees to take part in available training activities according to their individual needs.

In evaluating all the challenges or obstacles faced in the field, apart from receiving work evaluation reports from work units, the Board of Directors as the Top Management also conducts management walkthroughs to see directly the conditions that occur in the field and communicate with a number of parties involved in it, both employees and business partners to find out directly about the problems they often face. With the active involvement

permasalahan yang seringkali dihadapi. Dengan adanya keterlibatan aktif Direksi, maka proses pengambilan keputusan untuk mencegah atau memitigasi potensi risiko yang dapat terjadi dapat berjalan lebih cepat.

PROSPEK USAHA

Tahun 2024 masih akan menjadi tahun yang menantang bagi perekonomian global dan nasional. Dampak peperangan dan geopolitik masih akan terus mempengaruhi pergerakan ekonomi pada tahun 2024. Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) periode Januari 2024, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global hanya akan sebesar 3,1% dari perkiran bulan Oktober 2023 sebesar 2,9%. Sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global hanya tumbuh 2,4 persen, lebih rendah dari kinerja perekonomian global 2023.

Berbeda dengan proyeksi IMF, Bank Indonesia (BI) justru optimis dalam memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh cukup kuat di 2024 dengan laju pertumbuhan berada pada kisaran 4,7%-5,5% (yoy) . Fundamental ekonomi yang tetap solid pada 2024 didasarkan pada kinerja perekonomian Indonesia yang terus menunjukkan perbaikan. BI juga memprediksi inflasi tahunan Indonesia akan lebih tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 ±1%.

Sejalan dengan proyeksi positif terhadap perkembangan ekonomi domestik ke depan, mengawali tahun 2024 industri otomotif Indonesia juga sudah menorehkan catatan positif. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), kinerja ekspor kendaraan bermotor roda empat CBU unit untuk bulan Januari 2024 tercatat sebanyak 33.009 unit. Hal ini menunjukan bahwa aktivitas ekspor otomotif di awal 2024 khususnya dalam bentuk CBU sudah berjalan dengan sangat baik.

Sebagai bagian dari rantai pasok industri yang memanfaatkan bongkar muat dalam aktivitas produksi dan distribusi kendaraan, bisnis terminal kendaraan tidak bisa berdiri sendiri karena saling berkaitan dengan perkembangan berbagai industri di sekitarnya. Dengan pencapaian kinerja ekspor yang gemilang dari sektor otomotif, IPCC percaya kegiatan usaha akan terus menguat di tahun 2024. Tidak hanya mengandalkan otomotif, IPCC juga memiliki peluang bisnis yang cukup besar dari pengiriman kendaraan berat yang biasanya digunakan oleh industri pertambangan untuk mengangkut komoditas CPO, alat-alat konstruksi, dan lainnya.

of the Board of Directors, the decision-making process to prevent or mitigate potential risks that may occur can run more quickly.

BUSINESS PROSPECT

2024 will still be a challenging year for the global and national economy. The impact of war and geopolitics will continue to influence economic movements in 2024. Based on the World Economic Outlook (WEO) for the January 2024 period, the IMF predicts that global economic growth will only be 3.1% from the October 2023 estimate of 2.9%. Meanwhile, the World Bank predicts that the global economy will only grow 2.4 percent, lower than the performance of the global economy in 2023.

In contrast to the IMF's projections, Bank Indonesia (BI) is actually optimistic in estimating that the Indonesian economy will grow quite strongly in 2024 with a growth rate in the range of 4.7%-5.5% (yoy). Economic fundamentals that remain solid in 2024 are based on the performance of the Indonesian economy which continues to show improvement. BI also predicts that Indonesia's annual inflation will be more maintained within the target range of 2.5 ± 1%.

In line with positive projections for future domestic economic development, starting 2024 the Indonesian automotive industry has also made a positive note. Based on data from the Association of Indonesian Automotive Industries (Gaikindo), the export performance of CBU units of four-wheeled motorized vehicles for January 2024 was recorded at 33,009 units. This shows that automotive export activity in early 2024, especially in the form of CBU, is going very well.

As part of the industrial supply chain that utilizes loading and unloading in vehicle production and distribution activities, the vehicle terminal business cannot stand alone because it is interrelated with the development of various surrounding industries. By achieving brilliant export performance from the automotive sector, IPCC believes business activities will continue to be strong in 2024. Not only relying on automotive, IPCC also has quite large business opportunities from shipping heavy vehicles which are usually used by the mining industry to transport CPO commodities, equipment -construction tools, and others.

Dengan mengusung semangat tersebut, IPCC berencana menerapkan strategi *Develop Strategic Portfolio Extension* pada tahun 2024 agar posisi Perusahaan sebagai pengelola Terminal Kendaraan semakin kuat dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Selain itu, IPCC juga berkomitmen untuk mengembangkan portofolio perusahaan melalui investasi pada bisnis lain.

Agenda rencana bisnis berikutnya, IPCC menaruh fokus pada *Collaboration/Strategic Partnership to Capture Business Momentum and Risk Sharing* di mana IPCC akan membangun kerja sama strategis (*inorganic*) untuk mendukung bisnis baru dengan sejumlah pihak yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi IPCC dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Terakhir, IPCC juga berencana akan menjalanan strategi Terminal *Capacity Expansion* yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas terminal kendaraan untuk mengantisipasi kenaikan *throughput*.

Carrying this spirit, IPCC plans to implement the Develop Strategic Portfolio Extension strategy in 2024 so that the Company's position as a Car Terminal manager becomes stronger compared to other competitors. Apart from that, IPCC is also committed to developing the company portfolio through investment in other businesses.

The next business plan agenda, the IPCC focuses on Collaboration/Strategic Partnership to Capture Business Momentum and Risk Sharing where the IPCC will build strategic (inorganic) cooperation to support new businesses with a number of parties which are expected to provide added value for the IPCC and other parties. other interests. Lastly, the IPCC also plans to implement a Terminal Capacity Expansion strategy which is carried out by increasing car terminal capacity to anticipate an increase in throughput.

2023-2024
Enhancement & Expansion

Kemitraan & Ekspansi
- Transfer operatorship terminal kendaraan di area kerja Pelindo
- Integrasi & standarisasi operasi, dengan fokus pada digitalisasi & sistemasi
- Layanan dan operasi terintegrasi dengan fungsi dan enabler terpusat
- Penambahan kapasitas
- Car Distribution Management (CDM)
- Digitalisasi proses bisnis
- Peningkatan corporate value dan kinerja harga saham melalui buyback
- Full dedicated car terminal (fase 1)
- Opsi divestasi/likuidasi MKO MTKI

Partnerships & Expansion
- Transfer of car terminal operatorship in the Pelindo work area
- Integration & standardization of operations, with a focus on digitalization & systemization
- Integrated services and operations with centralized functions and enablers
- Increased capacity
- Car Distribution Management (CDM)
- Digitalization of business processes
- Increasing corporate value and share price performance through buybacks
- Full dedicated car terminal (phase 1)
- MKO MTKI divestment/liquidation option

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai bagian dari Pelindo Group, Perusahaan memiliki tanggung jawab moral sebagai agen perubahan, termasuk memenuhi seluruh kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan tersebut telah dijalankan Perusahaan, yang berdampak positif terhadap pola pengelolaan Perusahaan oleh manajemen. Kemitraan strategis melalui pengawasan oleh Dewan Komisaris berdampak pada pengelolaan Perusahaan yang lebih berimbang. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memberikan forum bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan strategis turut mendorong praktik penerapan prinsip GCG yang berlandaskan pada transparansi dan akuntabilitas.

DEVELOPMENT OF THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

As part of the Pelindo Group, the Company has a moral responsibility as an agent of change, including fulfilling all compliance with applicable laws and regulations. The Company has implemented this compliance, which has had a positive impact on the management pattern of the Company. Strategic partnerships through supervision by the Board of Commissioners have an impact on more balanced management of the Company. The General Meeting of Shareholders (GMS) which provides a forum for shareholders to make strategic decisions also encourages the practice of implementing GCG principles which are based on transparency and accountability.

Perusahaan telah melengkapi diri dengan manajemen risiko dan audit internal. Kedua pendekatan yang berfungsi layaknya dua sisi dalam satu mata koin ini berfungsi memberikan pendeteksian dini atas kemungkinan-kemungkinan risiko yang dihadapi Perusahaan, sekaligus memberikan evaluasi dan pengawasan pada proses bisnis yang telah berjalan.

Transparansi informasi kepada pemegang saham juga menjadi perhatian manajemen. Melalui fungsi Sekretaris Perusahaan, Perusahaan memberikan informasi yang komprehensif kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan menyadari transparansi informasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan keberlanjutan yang ditopang oleh keterikatan pemangku kepentingan dalam proses pengawasan tidak langsung.

Transparansi informasi yang komprehensif juga dilakukan melalui penyajian Laporan Keuangan Teraudit, yang telah melalui proses audit independen oleh akuntan publik. Penunjukan akuntan publik juga dilakukan melalui rangkaian mekanisme berjenjang, yang melibatkan pemegang saham melalui RUPS. Hal ini dilakukan untuk menjaga independensi akuntan publik, yang pada akhirnya akan memberikan opini yang sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Agar penerapan prinsip GCG dapat terukur, Perusahaan melakukan *assessment* secara periodik tahunan. *Assessment* ini, baik *assessment* oleh pihak independen maupun *self assessment* yang dilakukan tim internal, akan menjadi evaluasi dan masukan bagi perbaikan penerapan prinsip GCG di lingkup Perusahaan. Untuk *assessment* tahun ukur 2023, Perusahaan menggunakan paramenter PUGKI (Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia dengan pencapaian 70 rekomendasi telah dilaksanan dari 81 rekomendasi PUGKI. Selain PUGKI, untuk menguatkan hasil evaluasi penerapan GCG, Perusahaan juga menggunakan standar Internasional, yaitu ASEAN Corporate Governance Scorecard, dengan skor akhir adalah 107,26 *point,* dengan predikat "*Excellent*", yang memiliki arti"*Leadership in corporate governance (ASEAN Asset Class)*"

PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan memiliki mempunyai komitmen yang kuat untuk melandaskan setiap kegiatannya pada prinsip Pengelolaan Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance*. Perusahaan mengimplementasikan sistem

The company has equipped itself with risk management and internal audit. These two approaches, which function like two sides of one coin, function to provide early detection of possible risks faced by the Company, as well as provide evaluation and supervision of ongoing business processes.

Transparency of information to shareholders is also a concern for management. Through the function of Corporate Secretary, the Company provides comprehensive information to shareholders and all stakeholders. Companies realize that information transparency is an inseparable part of sustainable development which is supported by the involvement of stakeholders in the indirect monitoring process.

Comprehensive information transparency is also carried out through the presentation of Audited Financial Reports, which have gone through an independent audit process by public accountants. The appointment of a public accountant is also carried out through a series of tiered mechanisms, involving shareholders through the GMS. This is done to maintain the independence of public accountants, who will ultimately provide opinions in accordance with the provisions of Financial Accounting Standards (SAK) that apply in Indonesia.

So that the implementation of GCG principles can be measured, the Company carries out periodic assessments every year. This assessment, both an assessment by an independent party and a self-assessment carried out by an internal team, will serve as evaluation and input for improving the implementation of GCG principles within the Company. For the assessment for the 2023 measuring year, the Company uses PUGKI parameters (General Guidelines for Indonesian Corporate Governance with the achievement of 70 recommendations that have been implemented out of 81 PUGKI recommendations. Apart from PUGKI, to strengthen the evaluation results of GCG implementation, the Company also uses international standards, namely the ASEAN Corporate Governance Scorecard, with The final score was 107.26 points, with the predicate "Excellent", which means "Leadership in corporate governance (ASEAN Asset Class)"

WHISTLEBLOWING SYSTEM IMPLEMENTATION

The company has a strong commitment to base every activity on the principles of Good Corporate Governance. The company implements a violation reporting system (whistleblowing system) by referring to the Guidelines for

pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dengan mengacu pada Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar dan Penerapan *Whistleblowing System* yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal.

Di tahun 2023, Perusahaan telah melakukan sosialisasi kepada *stakeholder*, baik secara langsung melalui tatap muka antara manajemen dengan seluruh karyawan, maupun secara tidak langsung melalui website Perusahaan. Pelaksanaan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sistem pelaporan pelanggaran di IPCC.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Hingga akhir tahun 2023, terdapat 2 (dua) kali perubahan susunan dan komposisi Direksi, pertama, pada 18 April 2023, telah dilakukan pergantian susunan dan komposisi keanggotaan Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menerima pengunduran diri Bapak Rio Theodore Natalianto Lasse sebagai Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan terhitung sejak tanggal pengunduran dirinya, serta memberhentikan Bapak Andi Hamdani sebagai Direktur Operasi dan Teknik terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa tersebut.

RUPS Luar Biasa kemudian mengangkat Bapak Sugeng Mulyadi sebagai Direktur Utama dan Bapak Bagus Dwipoyono sebagai Direktur Operasi dan Teknik. Dengan demikian, pada periode ini Direksi IPCC berjumlah 3 (tiga) orang Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, dan 2 (dua) orang Direksi, masing-masing Direktur Operasi dan Teknik dan Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

Perubahan kedua pada 5 September 2023. Perubahan dilakukan melalui melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menerima pengunduran diri Bapak Sumarno sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia sejak tanggal pengundurannya, sekaligus menyetujui pengangkatan Bapak Wing Megantoro sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

Dengan demikian, susunan dan komposisi Anggota Direksi IPCC terdiri dari 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang Direktur Utama yang merangkap Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis, dan 2 (dua) orang Direksi, masing-masing Direktur Operasi dan Teknik dan Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia. Berikut susunan dan komposisi anggota Direksi per 31 Desember 2023.

Gratification Management, Reporting Illegal Levies and Implementation of the Whistleblowing System which are stipulated through the Decree of the Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal.

In 2023, the Company has carried out outreach to stakeholders, either directly through face-to-face meetings between management and all employees, or indirectly via the Company website. The aim of the socialization is to provide an understanding of the whistleblowing system in the IPCC.

CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

Until the end of 2023, there were 2 (two) changes to the structure and composition of the Board of Directors, first, on April 18 2023, the structure and composition of the Board of Directors was changed based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders which accepted the resignation of Mr. Rio Theodore Natalianto Lasse as The President Director concurrently serves as the Director of Commercial and Business Development of the Company as of the date of his resignation, as well as dismissing Mr. Andi Hamdani as Director of Operations and Engineering as of the closing of the Extraordinary GMS.

The Extraordinary GMS then appointed Mr. Sugeng Mulyadi as President Director and Mr. Bagus Dwipoyono as Director of Operations and Engineering. Thus, in this period the IPCC Board of Directors numbered 3 (three) Directors, consisting of 1 (one) President Director , and 2 (two) Directors, respectively the Director of Operations and Engineering and the Director of Finance and Human Capital.

The second change was on September 5, 2023. The change was made through the Extraordinary General Meeting of Shareholders which accepted the resignation of Mr. Sumarno as Director of Finance and Human Capital from the date of his resignation, while also approving the appointment of Mr. Wing Megantoro as Director of Finance and Human Capital.

Thus, the structure and composition of the IPCC Board of Directors consists of 3 (three) people, 1 (one) President Director who is also the Acting Director of Commercial and Business Development, and 2 (two) Directors, respectively Director of Operations and Engineering and Director of Finance and Human Capital. The following is the structure and composition of members of the Board of Directors as of December 31, 2023.

Tabel Susunan dan Komposisi Direksi Per 31 Desember 2023
Table of Structure and Composition of the Board of Directors As of December 31, 2023

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa dan Periode Jabatan** Tenure and Term of Office
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama merangkap Plt Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director and Acting Director of Commercial and Business Development	Akta Nomor 44 tanggal 18 April 2023 Deed Number 44 dated April 18, 2023	April 2023-RUPS Tahunan Tahun 2028, Periode Ke-1 April 2023-2028 Annual GMS, 1st Period
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Engineering	Akta Nomor 44 tanggal 18 April 2023 Deed Number 44 dated April 18, 2023	April 2023-RUPS Tahunan Tahun 2028, Periode Ke-1 April 2023-2028 Annual GMS, 1st Period
Wing Megantoro	Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Director of Finance and Human Capital	Akta Nomor 06 tanggal 5 September 2023 Deed Number 06 dated September 5, 2023	September 2023--RUPS Tahunan Tahun 2028, Periode Ke-1 September 2023--Annual GMS 2028, 1st Period

Akhir Kata

Atas pencapaian yang ditorehkan di tahun 2023, izinkan Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham utama, yaitu PT Pelindo Multi Terminal. Terima kasih juga diucapkan kepada regulator, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha, atas kerja sama yang telah tercipta. Kepada seluruh karyawan, Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras dan kerja cerdas yang telah ditunjukkan. Semoga pencapaian ini akan menginspirasi seluruh pihak untuk dapat terus mengoptimalkan kemampuannya dan menjadi modal Perusahaan untuk dapat terus tumbuh berkembang hingga ke masa-masa yang akan datang.

Closure

For the achievements made in 2023, allow the Board of Directors to express respect and gratitude to the Board of Commissioners, as well as the major shareholder, namely PT Pelindo Multi Terminal. Thanks are also expressed to regulators, customers, suppliers and business partners, for the cooperation that has been created. To all employees, the Board of Directors expressed its highest appreciation for the hard work and smart work that has been demonstrated. We hope that this achievement will inspire all parties to continue optimizing their capabilities and become capital for the Company to continue to grow into the future.

Jakarta, 29 April 2023
Atas nama Direksi
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Jakarta, April 29, 2023
On behalf of the Board of Directors
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk



Sugeng Mulyadi
Direktur Utama
President Director

Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

The Board of Directors' Statement of Accountability for the 2023 Annual Report of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Tahun Buku 2023 telah ditinjau dan dimuat secara lengkap, dan Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, hereby stated that all information contained in the 2023 Annual Report of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk have been comprehensively presented and fully accountable for the accuracy of the content of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 29 April 2024

Jakarta, April 29, 2024

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS



Sugeng Mulyadi
Direktur Utama,
merangkap Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
President Director concurrently as Acting Director of Commercial and Business Development



Bagus Dwipoyono
Direktur Operasi dan Teknik
Director of Operations and Technical



Wing Megantoro
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia
Director of Finance and Human Capital

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

The Board of Commissioners' Statement of Accountability for the 2023 Annual Report of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Tahun Buku 2023 telah ditinjau dan dimuat secara lengkap, dan Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, hereby stated that all information contained in the 2023 Annual Report of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk have been comprehensively presented and fully accountable for the accuracy of the content of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 29 April 2024

Jakarta, April 29, 2024

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Drajat Sulistyo
Komisaris Utama
President Commisioner

Abdur Rahim Hasan
Komisaris Independen
Independent Commisioner

LM. Arya Bima Yudiantara
Komisaris
Commisioner

03

Profil Perusahaan

Company Profile



“IPCC sebagai satu-satunya operator terminal khusus kendaraan terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas untuk mewujudkan terminal kendaraan yang berdaya saing tinggi dan melampaui ekspetasi pelanggan. Pengembangan atas strategi bisnis dan digitalisasi terus dilakukan agar pelayanan yang disediakan IPCC mampu memenuhi kebutuhan pasar dan menciptakan ekosistem terminal kendaraan yang terintegrasi.”

"IPCC as the only special car terminals operator continues to improve services and facilities to create a car terminal that is highly competitive and exceeds customer expectations. "Development of business strategies and digitalization continues to be carried out so that the services provided by IPCC are able to meet market needs and create an integrated car terminal ecosystem."


IPCC
024
IPCC
091
IPCC
IRFAN ROSADI

Informasi Umum Perusahaan

Company General Information

Nama Perusahaan Name of Company	**PT Indonesia Kendaraan Terminal T**
Informasi Perubahan Nama pada Tahun Buku Information on Name Changes in the Fiscal Year	Tidak terdapat perubahan nama There is no name change
Badan Hukum Legal Entity	Perusahaan Terbatas Limited Liability Company
Kegiatan Usaha Business Activities	Pengelolaan terminal kendaraan dan menja usaha-usaha di bidang bongkar muat baran meliputi pelaksanaan *stevedoring, cargo* *receiving/delivery*, pelayanan penumpuka pelayanan logistik dan value added lainnya s one stop services. Management of Car Terminal and running busin the field of loading and unloading goods which i carrying out stevedoring, cargodoring, rec delivery, stacking services as well as logistics an value added services as one stop services.



Modal Dasar
Authorized Capital

Rp500.000.000.000, (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus rupiah).
Rp500,000,000,000 (five hundred billion Rupiah) which is divided into 5,000,000,000 (five billion) shares, each share with a nominal value of Rp100 (one hundred rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Paid-Up Capital

Rp1.818.384.820 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) lembar saham dengan nilai nominal Rp181.838.482.000 (seratus delapan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
Rp1,818,384,820 (one billion eight hundred eighteen million three hundred eighty four thousand eight hundred and twenty rupiah) shares with a nominal value of Rp181,838,482,000 (one hundred eighty one billion eight hundred thirty eight million four hundred eight twenty two thousand rupiah)

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Akta Pendirian Nomor 10 tahun 2012 tanggal 5 November 2012, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-58515.
AH.01.01 Tahun 2012. Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan perubahan terakhir ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal 14 April 2018 dan telah disahkan Keputusan Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008618. AH.01.02 tanggal 17 April 2018.
Deed of Establishment Number 10 of 2012 dated November 5, 2012, has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-58515. AH.01.01 of 2012. The Company's Articles of Association underwent changes with the latest amendment being stipulated based on Deed Number 48 dated April 14, 2018 and has been ratified by Decree of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0008618. AH.01.02 dated April 17, 2018.

Status Perusahaan
Company Status

Status perusahaan berubah sejak 1 Oktober 2021 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perusahaan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: S-38/ MBU/01/2022 tentang Perubahan Struktur Permodalan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perusahaan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia 02 tanggal 09 Februari 2022, yang disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 00147753.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 01 Maret 2022.
The company's status has changed since October 1, 2021 in accordance with the Deed of Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Number: S-38/MBU/01/2022 concerning Changes in Capital Structure and Amendments to the Articles of Association of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia 02 dated February 9, 2022, which was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-00147753.AH.01.02.TAHUN 2022 dated March 1, 2022.



Tanggal Pendirian dan Beroperasi
Date of Establishment and Operation

5 November 2012
November 5, 2012

Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia
Date of Listing on the Indonesia Stock Exchange

9 Juli 2018
July 9, 2018

Kode Saham
Stock Code

IPCC

Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition

- PT Pelindo Multi Terminal (71,28%)
- PT Pelabuhan Investama (5,54%)
- PT Multi Terminal Indonesia (0,72%)
- Publik/Common Shareholder (22,46%)



Jumlah Karyawan
Number of Employees

435
orang
people (2023)



Jaringan Kantor
Office Network

1
Kantor Pusat/Head Office

4
Kantor Satelit/Satellite Offices

1
Manajemen Kerja Sama Operasi/Operation Cooperation Management

Akses Terhadap Perusahaan Termasuk Kantor Cabang atau Perwakilan
Access to Companies Including Branch or Representative Offices

JARINGAN KANTOR
OFFICE NETWORK

Kantor Pusat
Head Office

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Jalan Sindang Laut No.100, Cilincing, Jakarta Utara, 14110
Telp : +62 21 4393 2251

Situs Web
Website

www.indonesiacarterminal.co.id

Kontak Perusahaan
Company Contact

Sekretaris Perusahaan/Company Secretary
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Jalan Sindang Laut No.100, Cilincing, Jakarta Utara, 14110
Telp : +62 21 4393 2251

E-mail
corsec@indonesiacarterminal.co.id
info@indonesiacarterminal.co.id

Customer Care : +62 811933 9930

Media Sosial/Social Media
Twitter : @IPCC Terminal Kendaraan
Facebook : IPCC Terminal Kendaraan
Instagram : @IPCC Terminal Kendaraan
Youtube : IPCC Terminal Kendaraan
Tiktok : IPCC Terminal Kendaraan

Whistle Blowing System
e-mail: good.governance@indonesiacarterminal.co.id
Telp: +62 21 4393 2251 (ext; 211)

KANTOR SATELIT
SATELLITE OFFICE

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk – Pelabuhan Pontianak/ Pontianak Port
Jalan Pak Kasih Nomor 11, Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat/ West Kalimantan, 78112

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk – Pelabuhan Belawan Medan/ Belawan, Medan Port
Jalan Sumatera, Belawan I, Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara/ North Sumatra, 20411

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk – Pelabuhan Makassar/ Makassar Port
Jalan Soekarno, Makassar,

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk – Pelabuhan Balikpapan/ Balikpapan Port
Jalan Yos Sudarso No.30 Balikpapan, 76111

KANTOR MANAJEMEN KERJA SAMA OPERASI
OFFICE OF OPERATIONS COOPERATION MANAGEMENT

Kantor MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia
MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia Office
Jalan Beta Kawasan Industri Maspion V, Sukomulyo, Manyar, Gresik, Jawa Timur/East Java

Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of The Company



PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perusahaan" atau "IPCC") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tahun 2012 tanggal 5 November 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012. Anggaran Dasar ini telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal 14 April 2018 dan telah disahkan Keputusan Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008618.AH.01.02 tanggal 17 April 2018.

Sebelum resmi berdiri sebagai sebuah perusahaan berbadan hukum, Perusahaan adalah *Strategic Business Unit (SBU)* dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau *Indonesia Port Corporation*/"IPC" bernama Tanjung Priok Car Terminal (TPT) yang pengelolaannya 100% berada di bawah Kantor Pusat IPC.

TPT beroperasi secara khusus sejak 28 November 2007 untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor kendaraan serta kargo secara *Roll on-Roll off (Ro-Ro)* dan menyediakan layanan kegiatan bongkar muat di Terminal Kendaraan Tanjung Priok.

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Company" or "IPCC") was established based on Deed of Establishment Number 10 of 2012 dated November 5, 2012 and was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-58515.AH.01.01 of 2012. Budget This basis has undergone changes with the latest amendment based on Deed Number 48 dated April 14, 2018 and has been ratified by the Decree of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0008618.AH.01.02 dated April 17, 2018.

Before officially being established as a legal entity, the Company was a Strategic Business Unit (SBU) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) or Indonesia Port Corporation/"IPC" named Tanjung Priok Car Terminal (TPT) whose management was 100% under the Head Office IPC.

TPT has been operating specifically since 28 November 2007 to support the export and import activities of vehicles and cargo on a Roll on-Roll off (Ro-Ro) basis and provide loading and unloading services at the Tanjung Priok Car Terminal.

Seiring dengan berkembangnya lini usaha TPT yang dikelola oleh IPC dan tingginya *demand* di Pelabuhan terhadap terminal kendaraan, maka pada 5 November 2012, TPT resmi berdiri sebagai entitas bisnis dengan nama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perusahaan" atau "IPCC") yang secara khusus dirancang untuk menyediakan layanan terminal kendaraan yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan sejumlah Pelabuhan/ Terminal *Roll on - Roll off* (Ro-Ro) lainnya di Indonesia. Dengan fasilitas dan peralatan khusus yang dimiliki untuk melayani kargo berupa kendaraan dan barang secara Ro-Ro, maka Perusahaan mendapatkan penetapan status sebagai terminal kendaraan (*car terminal*) oleh Departemen Perhubungan.

In line with the development of the TPT business line managed by IPC and the high demand at the port for Car Terminal, on November 5, 2012, TPT was officially established as a business entity with the name PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Company" or "IPCC") which specifically designed to provide Car Terminal services operating at Tanjung Priok Port, Jakarta, and a number of other Roll on - Roll off (Ro-Ro) Ports/Terminals in Indonesia. With the special facilities and equipment it has to serve cargo in the form of vehicles and goods on a Ro-Ro basis, the Company has received status as a Car Terminal (car terminal) by the Department of Transportation.

Secara menyeluruh, layanan terminal yang diberikan Perusahaan meliputi *Terminal Handling* dan *Value Added Services*. Layanan *Terminal Handling* yang disediakan Perusahaan termasuk *Stevedoring*, *Cargodoring*, *Receiving*, dan *Delivery*. Sedangkan layanan *Value Added Services*, meliputi *Car Processing Center*, dan *Equipment Processing Center*, *Road Freight Services*, dan *Port Stock*. Perusahaan juga menyatakan komitmennya untuk mendukung program Pemerintah dalam meminimalkan pengangkutan barang melalui jalur darat.

Overall, the terminal services provided by the Company include Terminal Handling and Value Added Services. Terminal Handling services provided by the Company include Stevedoring, Cargodoring, Receiving and Delivery. Meanwhile, Value Added Services include Car Processing Center and Equipment Processing Center, Road Freight Services and Port Stock. The company also stated its commitment to support the Government's program to minimize the transportation of goods by land.

Pada 9 Juli 2018, Perusahaan memulai tonggak sejarah baru sebagai perusahaan terbuka setelah melakukan aksi korporasi berupa Penawaran Umum Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) atas sebesar 509.147.700 (lima ratus sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus) dengan nilai nominal Rp100/per lembar saham yang mewakili atau setara 28,0% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perusahaan. Adapun kode

On July 9, 2018, the Company started a new milestone as a public company after carrying out Company action in the form of an Initial Public Offering of Shares on the Indonesia Stock Exchange (BEI) amounting to 509,147,700 (five hundred nine million one hundred forty seven thousand seven hundred) with a nominal value Rp100/ per share which represents or is equivalent to 28.0% of the capital that has been issued and fully paid up by the Company. The Company's share code on the IDX is "IPCC".

Sebagai pionir terminal khusus kendaraan di Indonesia dengan citra dan reputasi positif, Perusahaan berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanannya kepada seluruh pengguna jasa serta pemangku kepentingan lainnya. Sejalan dengan rencana strategi jangka panjang, Perusahaan akan terus melakukan pengembangan usaha agar dapat memberikan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan pasar.

As a pioneer of special Car Terminal in Indonesia with a positive image and reputation, the Company is committed to continuing to maintain and improve the quality of its services to all service users and other stakeholders. In line with the long-term strategic plan, the Company will continue to develop its business so that it can provide services that are able to meet market needs.

Selain berfokus pada ekspansi wilayah usaha, Perusahaan juga secara berkesinambungan memperkuat sinergi bersama Pelindo Group terutama dalam mengintegrasikan terminal-terminal di bawahnya. Selain itu, Perusahaan juga menaruh perhatian besar terhadap pengembangan teknologi digital dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan dan mendukung efisiensi proses bisnis.

Apart from focusing on expanding its business area, the Company also continuously strengthens synergies with the Pelindo Group, especially in integrating the terminals under it. Apart from that, the Company also pays great attention to the development of digital technology with the aim of improving service to customers and supporting business process efficiency.

Pada tahun 2021, Perusahaan telah bekerja sama dengan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan soft launching penggunaan Radio Frequency Identification (RFID) pada unit yang dibawa

In 2021, the Company has collaborated with PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) to carry out a soft launch of the use of Radio Frequency Identification (RFID) on units carried by TMMIN, namely Toyota. This step is part

oleh TMMIN, yaitu Toyota. Langkah ini menjadi bagian dari perjalanan digitalisasi layanan Perusahaan di era digital 4.0. Penggunaan RFID bertujuan untuk mendukung terciptanya car logistic ecosystem yang nantinya diharapkan dapat memberikan nilai tambah tidak hanya bagi IPCC namun juga kepada para pelanggan.

of the Company's service digitization journey in the digital 4.0 era. The use of RFID aims to support the creation of a car logistics ecosystem which is expected to provide added value not only to IPCC but also to customers.

Pada 1 Oktober 2021, merger Pelindo secara resmi telah terlaksana, dengan ditandatanganinya Akta Penggabungan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Layanan Jasa Pelabuhan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) melebur menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) / Pelindo yang menjadi surviving entity. Merger tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan value creation bagi BUMN Pelabuhan. Inisiatif ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kepelabuhanan nasional.

On October 1, 2021, the Pelindo merger was officially carried out, with the signing of the Deed of Merger of four Port Services State-Owned Enterprises (BUMN), namely PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) merged to become PT Pelabuhan Indonesia (Persero) / Pelindo which became the surviving entity. The merger was carried out in order to increase value creation for Port BUMN. This initiative aims to increase the effectiveness and efficiency of national ports.

Pada tahun 2022, guna mempertahankan eksistensinya, Perusahaan yang merupakan bagian dari rantai pasok ekosistem (ecosystem value chain) industri otomotif mulai menjajaki peluang bisnis industri tersebut sebagai bagian dari ekspansi bisnis yang dilakukan. Perusahaan meyakini bahwa peluang bisnis yang ada telah sejalan dengan semangat "Beyond The Gate" yang diusung Perusahaan di tahun ini. Merger antara PT Pelabuhan Indonesia I hingga IV (Perusahaan) diiringi dengan dilakukannya perubahan logo dan branding pada tanggal 30 Juni 2022.

In 2022, in order to maintain its existence, the Company, which is part of the automotive industry's ecosystem value chain, begin exploring business opportunities in this industry as part of its business expansion. The Company believes that the existing business opportunities are in line with the spirit of "Beyond The Gate" promoted by the Company this year. The merger between PT Pelabuhan Indonesia I and IV (the Company) was accompanied by changes to the logo and branding on June 30, 2022.

Sebagai tindak lanjut dari merger Pelindo, pada tahun 2022, dibentuk struktur organisasi perusahaan dimana terdiri dari empat regional yang terdiri dari sejumlah cabang dan juga pembentukan entitas baru sebagai Sub-Holding yang membawahi sejumlah anak perusahaan dari eks-Pelindo I hingga Pelindo IV. IPCC berada pada klaster Non Peti Kemas dengan PT Pelindo Multi Terminal sebagai entitas baru Sub- Holding. Dengan demikian, yang menjadi pemegang saham mayoritas IPCC ialah Sub-holding PT Pelindo Multi Terminal setelah terjadinya pengalihan saham/inbreng dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku pemilik 71,3% saham IPCC kepada Sub-holding PT Pelindo Multi Terminal.

As a follow-up to the Pelindo merger, in 2022, the company organizational structure was formed which consists of four regions consisting of a number of branches and also the formation of a new entity as a Sub-Holding which oversees a number of subsidiaries from ex-Pelindo I to Pelindo IV. IPCC is in the Non-Container cluster with PT Pelindo Multi Terminal as the new Sub-Holding entity. Thus, the majority shareholder of IPCC is Sub-holding PT Pelindo Multi Terminal after the transfer of shares/inbreng from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as owner of 71.3% of IPCC shares to Sub-holding PT Pelindo Multi Terminal.

Perusahaan kemudian melakukan sosialisasi serah terima operasi Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Belawan kepada PT Pelindo Multi Terminal untuk peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan yang lebih baik lagi. Serah terima untuk Belawan, Medan terhitung sejak 1 Januari 2022 dan Makassar terhitung sejak 1 Mei 2022.

The company then conducted socialization regarding the handover of operations at Makassar Port and Belawan Port to PT Pelindo Multi Terminal to improve the quality of port services even better. Handover for Belawan, Medan starting January 1, 2022 and Makassar starting May 1, 2022.

PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT") adalah anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang mengelola entitas bisnis kepelabuhanan di bidang operasi terminal multipurpose di Indonesia, seperti curah cair, curah kering, kargo umum dan lain sebagainya.

PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT") is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Company) which manages port business entities in the field of multipurpose terminal operations in Indonesia, such as liquid bulk, dry bulk, general cargo and so on.

Dalam pengembangan inovasi bisnis, Perusahaan terus berekspansi untuk dapat memberikan layanan terintegrasi berupa Cargo Distribution Management yang salah satunya ialah layanan lapangan penumpukan kargo sebelum didistribusikan via darat. Adapun layanan tersebut ialah Pre-Delivery Center (PDC). Layanan ini telah berhasil direalisasikan oleh Perusahaan dengan dukungan para sumber daya manusia yang telah memiliki standardisasi pelayanan berkelas dunia. Dukungan ini menjadi keharusan demi mewujudkan excellent operation di layanan yang disediakan oleh Perusahaan. Masuknya Perusahaan ke dalam layanan PDC merupakan bagian dari realisasi komitmen Perusahaan untuk menyediakan layanan-layanan pada ekosistem rantai distribusi kargo otomotif.

In developing business innovation, the Company continues to expand to be able to provide integrated services in the form of Cargo Distribution Management, one of which is a field service for stacking cargo before it is distributed via land. This service is the Pre-Delivery Center (PDC). This service has been successfully realized by the Company with the support of Human Capital who have world-class service standards. This support is a necessity in order to realize excellent operations in the services provided by the Company. The Company's entry into PDC services is part of the realization of the Company's commitment to providing services in the automotive cargo distribution chain ecosystem.

Dengan melihat peluang tersebut maka tidak tertutup kemungkinan Perusahaan akan dapat menjalin kerja sama dengan sejumlah pabrikan otomotif. Saat ini, Hyundai Motor Indonesia merupakan pelanggan perdana yang telah menggunakan layanan

By looking at these opportunities, it is possible that the Company will be able to collaborate with a number of automotive manufacturers. Currently, Hyundai Motor Indonesia is the first customer to use this new service from the Company.

Pada tahun 2023, dalam rangka menjalankan strategi pengembangan usaha Perusahaan, sebagaimana arahan dari RJPP, di mana tahun 2023 merupakan tahun ekspansi, maka Perusahaan melakukan sejumlah kerja sama, baik kerja sama optimalisasi aset Pelindo, kerja sama pelayanan, dan kerja sama lainnya dengan entitas usaha pada Pelindo Group, maupun di luar Pelindo. Pada tahun ini pula, Perusahaanx mulai melakukan Pengoperasian terminal Semayang, Balikpapan pada Oktober 2023 dan Pembangunan Ruang *Integrated Terminal Monitoring System* (ITMS). Sementara untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan, Perusahaan mulai mengimplementasikan *Single System* ERP-SAP, Sistem Billing Praya, dan mulai melakukan pembangunan Portal Customer Care System (CCS).

In 2023, in order to carry out the Company's business development strategy, as directed by the RJPP, which 2023 is a year of expansion, the Company carried out a number of collaborations, including cooperation in optimizing Pelindo assets, service cooperation, and other collaborations with business entities within the Pelindo Group, as well as outside Pelindo. Also this year, the Company began operating the Semayang terminal, Balikpapan in October 2023 and building an Integrated Terminal Monitoring System (ITMS) space. Meanwhile, to improve service to customers, the Company began implementing the Single ERP-SAP System, the Praya Billing System, and began building a Customer Care System (CCS) Portal.

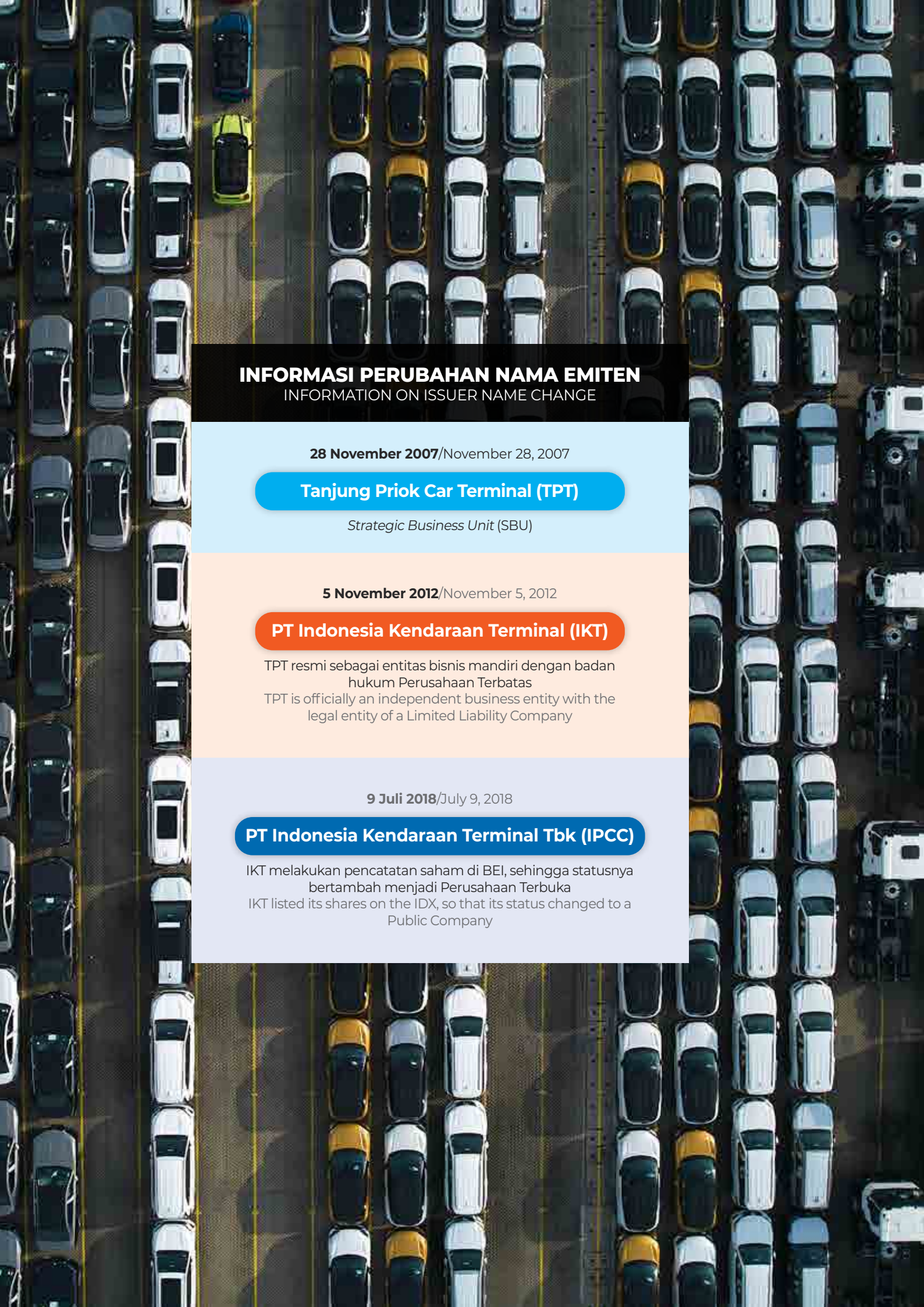

INFORMASI PERUBAHAN NAMA EMITEN
INFORMATION ON ISSUER NAME CHANGE

28 November 2007/November 28, 2007

Tanjung Priok Car Terminal (TPT)

Strategic Business Unit (SBU)

5 November 2012/November 5, 2012

PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT)

TPT resmi sebagai entitas bisnis mandiri dengan badan hukum Perusahaan Terbatas
TPT is officially an independent business entity with the legal entity of a Limited Liability Company

9 Juli 2018/July 9, 2018

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC)

IKT melakukan pencatatan saham di BEI, sehingga statusnya bertambah menjadi Perusahaan Terbuka
IKT listed its shares on the IDX, so that its status changed to a Public Company

Jejak Langkah
Milestones

2007
Pembentukan Tanjung Priok Car Terminal (TPT) sebagai Strategic Business Unit dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Establishment of Tanjung Priok Car Terminal (TPT) as a Strategic Business Unit of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).



2012
Tanjung Priok Car Terminal (TPT) resmi berbadan hukum dengan status Perusahaan Terbatas dan melakukan perubahan nama menjadi PT Indonesia Kendaraan Terminal.

Tanjung Priok Car Terminal (TPT) was officially inCompanyd with the status of a Limited Liability Company and changed its name to PT Indonesia Kendaraan Terminal

2017
Peresmian pelayaran perdana rute Jakarta–Surabaya.

Official Inauguration of the Jakarta–Surabaya shipping route.

2018
Resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan ticker code: IPCC.

Officially listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) with ticker code: IPCC.

2020
Implementasi Auto Gate System terintegrasi.

Integrated Auto Gate System Implementation.

2019
Penerapan simplifikasi Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk CBU.

Implementation of simplification of motor car exports in CBU form..



2021
- Perusahaan dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) meluncurkan penggunaan Radio Frequency Identification (RFID).
- Pengembangan aplikasi dashboard operasional sebagai media penyampaian informasi secara real-time kepada manajemen untuk membantu pengambilan keputusan.
- Implementasi dan Integrasi aplikasi Terminal Operating System (TOS) dengan Sistem Billing dan E-Invoice yang terintegrasi dengan aplikasi ERP Finance.
- Penyusunan IT Master Plan tahun 2020-2024 yang berfungsi sebagai acuan Rencana Kerja Manajemen Sistem Informasi di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Penambahan dan Pengembangan Perangkat Jaringan IT dan CCTV Surveillance System untuk kebutuhan Lapangan Eks-DKP guna mendukung kegiatan operasi di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Pengadaan, Instalasi Setup dan Konfigurasi Perangkat Keamanan IT yang berfungsi untuk mengantisipasi terhadap tindakan cyber attack.
- Pekerjaan Perapihan dan Pemetaan Jalur Jaringan Fiber Optic di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Melakukan Upgrade Lisensi Email Company dari Microsoft Exchange menjadi Microsoft 365 yang menyediakan instalasi.
- Pengembangan dan integrasi dengan platform INSW untuk kegiatan impor di Terminal sebagai bagian dari program pemerintah dalam meningkatkan ease of doing business di Indonesia.
- Implementasi CARDOM yaitu implementasi pada kegiatan operasional di terminal domestik, mulai dari tally sampai RBM.
- SKEP Autogate yaitu penerbitan Surat Keputusan penerapan autogate di terminal internasional oleh Bea Cukai.
- Penanganan receiving and delivery serta Cargodoring unit PT Suzuki Indomobil Motor.
- Full cashless TFS Internasional yaitu penerapan full cashless Terminal Facility Services (TFS) di terminal internasional.

- The Company and PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) launched the use of Radio Frequency Identification (RFID).
- Development of operational dashboard applications as a medium for delivering real-time information to management to assist decision making;
- Implementation and integration of the Terminal Operating System (TOS) application with the Billing and E-Invoice system that is integrated with the ERP Finance application;
- Preparation of the 2020-2024 IT Master Plan which served as a reference for the Information System Management Work Plan at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
- Addition and Development of IT Network Equipment and CCTV Surveillance System for the needs of the Ex-DKP Yard to support operations within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
- Procurement, Installation, Setup and Configuration of IT Security Devices which function to anticipate cyber attacks.;
- Work on Smoothing and Mapping Fiber Optic Network Paths at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
- Upgrading the Company Email License from Microsoft Exchange to Microsoft 365 which provides installation.
- Development and integration with the INSW platform for import activities at the Terminal as part of the government's program to improve ease of doing business in Indonesia;
- CARDOM implementation, namely the implementation of operational activities in domestic terminals, from tally to RBM;
- SKEP Autogate, namely the issuance of a Decree on the application of autogate at international terminals by Customs;
- Handling of receiving and delivery as well as Cargodoring unit of PT Suzuki Indomobil Motor;
- Full cashless TFS International, namely the implementation of full cashless Terminal Facility Services (TFS) in international terminals.

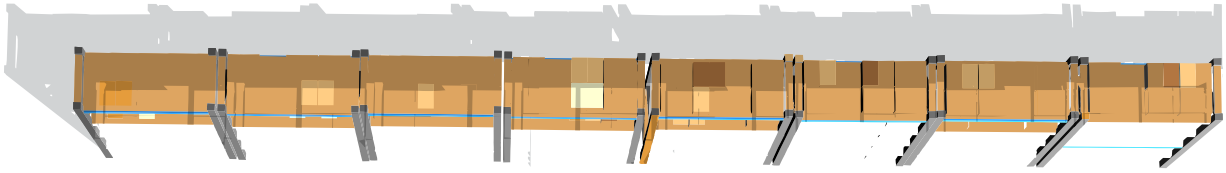

2022

- Kerja sama layanan *Vehicle Distribution Centre* (VDC) antara IPCC dan Glovis Indonesia Internasional guna menyajikan layanan terpadu.
- Pengoperasian terminal kendaraan di Pelabuhan Belawan, Medan, pengoperasian tersebut merupakan bagian proses pasca merger. Dimana pengelolaan operasi Pelabuhan Belawan, Medan secara bertahap akan diserahkan kepada Subholding Pelindo Multi Terminal (SPMT).
- Pengoperasian terminal kendaraan di Pelabuhan Makassar, pengoperasian tersebut merupakan tahap lanjutan transformasi bisnis pasca merger Pelindo. Dimana pengelolaan operasi Pelabuhan Makassar secara bertahap akan diserahkan kepada Subholding Pelindo Multi Terminal (SPMT).
- IPCC Resmikan Layanan *Customer Care Station* (CCS) di Tanjung Priok.
- Penanganan kargo Hyundai Genesis untuk perhelatan G20 yang diselenggarakan di Bali, Indonesia.

- Vehicle Distribution Center (VDC) services cooperation between IPCC and Glovis Indonesia Internasional to provide integrated services.
- Operation of the car terminal at Makassar Port, the operation is part of the post-merger process. In which the management of Belawan, Medan Port operations will be gradually handed over to Pelindo Multi Terminal Subholding (SPMT).
- Operation of the car terminal at Makassar Port, These operations are the next stage of business transformation after the Pelindo merger. In which the management of Makassar Port operations will be gradually handed over to Pelindo Multi Terminal Subholding (SPMT).
- IPCC Inaugurates the Customer Care Station (CSS) Service in Tanjung Priok.
- Handling of Hyundai Genesis cargo for the G20 event, which was held in Bali, Indonesia.



2023

- Pengoperasian terminal Semayang, Balikpapan pada Oktober 2023
- Implementasi Single Sistem ERP-SAP
- Pembangunan Ruang Integrated Terminal Terminal Monitoring Sistem (ITMS)
- Implementasi Sistem Billing Praya
- Pembangunan Portal Customer Care System (CCS)

- Operation of Semayang terminal, Balikpapan in October 2023
- Implementation of a Single ERP-SAP System
- Construction of an Integrated Terminal Monitoring System (ITMS) room
- Implementation of the Praya Billing System
- Development of a Customer Care System (CCS) Portal





IDENTITAS DAN LOGO PERUSAHAAN

Company IDENTITY AND LOGO

Identitas Perusahaan

Perusahaan adalah anak perusahaan PT Pelindo Multi Terminal yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Sehingga seluruh identitas Perusahaan merujuk kepada identitas PT Pelindo Multi Terminal terutama pada logogram. Logo Perusahaan memiliki makna yaitu friendly, spirit, energy, dan agility.

Pada 30 Juni 2022, Perusahaan melakukan perubahan logo dan branding setelah terjadinya penggabungan Pelindo I, II, III, IV. Perubahan logo dan branding yang dilakukan Perusahaan merupakan bagian terpenting dari proses mencapai cita-cita PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC untuk menjadi Pengelola Ekosistem Terminal Kendaraan Berkelas Dunia.

Logo Perusahaan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai merek jasa penyediaan lahan dan penumpukan untuk ekspor impor sejak tanggal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal tanggal 30 Juni 2022 tentang Penetapan Pedoman Identitas Visual dan Brand PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Company Identity

The Company is a subsidiary of PT Pelindo Multi Terminal which is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). So that the entire identity of the Company refers to the identity of PT Pelindo Multi Terminal, especially the logogram. The Company logo has the meaning of friendly, spirit, energy and agility.

On June 30, 2022, the Company made changes to its logo and branding following the merger of Pelindo I, II, III, IV. The changes to the logo and branding carried out by the Company are the most important part of the process of achieving the ideals of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk or IPCC to become a World Class Vehicle Terminal Ecosystem Manager.

The Company's logo has been registered with the Directorate General of Intellectual Property as a service mark for providing land and piling for export and import since the date based on the Decree of the Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal dated June 30, 2022 concerning Determination of Visual and Brand Identity Guidelines for PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.



Makna Logo
Logogram

PELINDO
MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN

Mengambil inspirasi dari bentuk jalur atau rute yang sibuk, padat, dan simpang siur, yang menggambarkan Pelindo sebagai penyedia jasa kepelabuhanan dan logistik terintegrasi yang selalu aktif dan berperan besar dalam transportasi laut - sebagai urat nadi perekonomian nasional - sekaligus mendukung terwujudnya tol laut Indonesia.

Inspired from the shape of a busy, crowded, and complex passage or route, which illustrates Pelindo as an integrated port and logistics service provider that is always active and has a major role in sea transporation – as the artery of the national economy – while supporting the realization of the Indonesia sea highway



- Mengambil huruf P yang menjadi inisial dari Pelindo sekaligus berbentuk ikan, yang menjadi lambang habitat makhluk hidup laut penting bagi Indonesia yang merupakan negara maritim. Ini juga menjadi simbol dari komitmen Pelindo untuk menjaga kekayaan alam Indonesia dengan terus berkontribusi dalam mendukung kelestarian ekosistem laut di wilayah operasinya.

- Taking the letter P which is the initial of Pelindo and also takes the shape of a fish, which is a symbol of the habitat of important marine creatures for Indonesia, which is a maritime country. This is also a symbol of Pelindo's commitment to preserving Indonesia's natural wealth by continuing to contribute to supporting the preservation of marine ecosystems in its operational areas.



- Warna biru adalah warna laut Indonesia, yang sangat dekat dengan Pelindo. Warna ini melambangkan stabilitas, kepercayaan, integritas, profesionalisme, dan pengabdian. Warna ini juga melambangkan simbolisasi dari upaya Pelindo, sebagai bagian dari BUMN untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh *stakeholders*.

- The blue color is the color of the Indonesia sea, which is very close to Pelindo. This color symbolizes stability, trust, integrity, professionalism, and devotion. This color also symbolizes Pelindo's efforts, as part of SOE, to always provide the best for all stakeholders.



- Warna Merah melambangkan aksi, antusiasme, kecepatan, keberanian, dan bagian dari warna simbol negara Indonesia. Merepresentasikan Perusahaan yang kuat, berkomunikasi secara terbuka, serta mampu memberikan semangat persatuan dan energi antar perusahaan-perusahaan di Pelindo Group.

- The color red symbolizes action, enthusiasm, speed, courage, and is part of the color symbols of the Indonesia state. Represent a strong company, communicate openly, and be able to provide a spirit of unity and energy between companies in the Pelindo Group.

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan

Vision, Mission and Company Values

REVIEW VISI DAN MISI OLEH DIREKSI/DEWAN KOMISARIS

Visi dan misi Perusahaan telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor: HK.56/1/20/IKT-17 tanggal 29 Maret 2017 tentang Penetapan Logo, Visi, Misi, Karakter, dan Nilai-Nilai Perusahaan PT Indonesia Kendaraan Terminal. Visi dan misi Perusahaan ditetapkan dan ditinjau secara berkala dengan melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan jajaran manajemen lainnya untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan lingkungan bisnis Perusahaan.

REVIEW OF VISION AND MISSION BY THE BOARD OF DIRECTORS/ BOARD OF COMMISSIONERS

The Company's vision and mission have been ratified through the Decree of the Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Number: HK.56/1/20/IKT-17 dated March 29, 2017 concerning Determination of the Logo, Vision, Mission, Character and Company Values of PT Indonesia Kendaraan Terminal. The Company's vision and mission are determined and reviewed periodically by involving the Board of Directors, Board of Commissioners and other management levels to ensure their relevance to developments in the Company's business environment.

VISI
Vision

"Menjadi Pengelola Ekosistem Terminal Kendaraan Berkelas Dunia."

"To Become World Class Car Terminal Ecosystem."



Penjelasan Visi:

"Menjadi Pengelola"
Perusahaan mampu menjadi perusahaan pengelola terminal kendaraan profesional dan dapat disejajarkan serta bersaing dengan penyedia layanan terminal kendaraan terbaik di dunia.

- Image perusahaan yang baik
- Fasilitas dan infrastruktur yang modern
- Sistem yang terintegrasi

"Terminal Kendaraan Berkelas Dunia"
IPCC mampu membangun kepemimpinan tingkat nasional dan regional, dengan ekspansi bisnis secara global dalam menjadi pengelola terminal kendaraan (*car terminal*) kelas dunia yang berkontribusi terhadap ekosistem. Pembangunan bisnis secara berkesinambungan dengan penguatan kerjasama dengan pemain ekosistem logistik maritim lainnya.

IPCC sebagai perusahaan kelas dunia memiliki kualitas utama:

- Memiliki kinerja dan citra perusahaan yang baik,
- Memiliki fasilitas infrastruktur yang modern dan sistem yang terintegrasi,
- Memiliki dampak positif bagi pemangku kepentingan.

Di samping itu, IPCC diharapkan tidak hanya mampu mengelola jasa operasional layanan kepelabuhanan yang unggul namun juga melakukan pengembangan bisnis dan pengelolaan usaha di sektor-sektor yang merupakan rantai pasok dan pendukung sektor kepelabuhanan, dalam rangka menciptakan jasa *end to end logistic* dan tumbuh secara anorganik serta mendorong tumbuhnya ekosistem terminal kendaraan yang terintegrasi sehingga memberikan dampak positif bagi Indonesia.

Vision Explanation:

"Become a Manager"
The Company is able to become a professional car terminal manager company and can be aligned and compete with the best car terminal service providers in the world.

- Good company image
- Modern facilities and infrastructure
- Integrated system

"World Class Car Terminal Ecosystem"
IPCC is able to build national and regional leadership, with global business expansion in becoming a world-class Car Terminal manager that contributes to the ecosystem. Sustainable business development by strengthening cooperation with other maritime logistics ecosystem players.

IPCC as a world-class company has the following main qualities:

- Have good performance and company image,
- Have modern infrastructure facilities and integrated systems,
- Have a positive impact on stakeholders.

In addition, the IPCC is expected to not only be able to manage the excellent port operational services but also carry out business development and management in supply chain and supporting sectors for the port, to create end-to-end logistics services and grow inorganic steadily as well as to encourage the growth of integrated car terminal ecosystem that has positive impacts for Indonesia.

MISI
Mission

"Mengembangkan Jaringan Terminal Kendaraan secara Terintegrasi di Indonesia untuk Mengurangi Biaya Logistik dan Meningkatkan Perdagangan."

"Develop Integrated Car Terminal Network in Indonesia to Reduce Logistic Cost & Energize



Penjelasan Visi:

"Pelanggan dan Mitra"
Meningkatkan kualitas layanan dan produk dengan menggunakan teknologi dan kapabilitas termutakhir dan memaksimalkan aksesibilitas melalui integrasi produk untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan mitra.

"Pemegang Saham"
Memaksimalkan penciptaan nilai bagi pemegang saham melalui peningkatan kinerja keuangan dan optimalisasi manajemen tata kelola melalui *best practice* GCG.

"Karyawan"
Memaksimalkan kepuasan pegawai dengan berfokus pada kapabilitas dan meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memperkuat integritas dan inovasi.

Mission Explanation

"Customers and Partners"
Improving the quality of services and products by using the latest technology and capabilities and maximizing accessibility through product integration to meet customer and partner satisfaction.

"Shareholders"
Maximizing value creation for shareholders through improving financial performance and optimizing governance management through GCG best practices.

"Employee"
Maximizing employee satisfaction by focusing on capabilities and improving employee welfare by strengthening integrity and innovation.

REVIEW VISI DAN MISI OLEH DIREKSI/ DEWAN KOMISARIS

Visi dan misi Perusahaan ditetapkan dan ditinjau secara berkala dengan melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan jajaran manajemen lainnya untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan lingkungan bisnis Perusahaan.

REVIEW OF VISION AND MISSION BY THE BOARD OF DIRECTORS/BOARD OF COMMISSIONERS

The Company's vision and mission are determined and reviewed periodically by involving the Board of Directors, Board of Commissioners and other management levels to ensure their relevance to developments in the Company's business environment.

STRATEGI PENCAPAIAN VISI DAN MISI

VISION AND MISSION ACHIEVEMENT STRATEGY

Area fokus utama

2021
Baseline

Baseline Bisnis

- Pemetaan & operatorship terminal kendaraan di area kerja Pelindo
- Mendukung program merger Pelindo dan pemetaan peluang bisnis
- Menguatkan firm infrastructure untuk mendukung transformasi perusahaan

2022
Grab Business

Optimalisasi Bisnis

- Transfer operatorship terminal kendaraan di area kerja Pelindo
- Transformasi terminal dengan standarisasi terminal kendaraan best practices
- Optimalisasi sistem & eksplorasi kemitraan
- Memetakan peluang pertumbuhan organik & anorganik

2023 – 2024
Enhancement & Expansion

Kemitraan & Ekspansi

- Transfer operatorship terminal kendaraan di area kerja Pelindo
- Integrasi & standarisasi operasi dengan fokus pada digitalisasi & sistemasi
- Layanan dan operasi terintegrasi dengan fungsi dan enabler terpusat
- Penambahan kapasitas
- Car Distribution Management (CDM)
- Digitalisasi proses bisnis
- Peningkatan Company value dan kinerja harga saham melalui buyback
- Full dedicated car terminal (fase 1)
- Opsi divestasi/likuidasi MKO MTKI

2025
Integrated Connectivity

Pertumbuhan Jaringan

- Melanjutkan tema periode sebelumnya
- Memperkuat bisnis melalui interkoneksi terminal kendaraan
- Kolaborasi dengan pemilik barang yang terlibat dalam rantai ekosistem logistik
- Full dedicated car terminal (fase 2)
- Investasi di Pelabuhan Patimban

Stretegi Visi dan Misi IPCC disusun dan dituangkan ke dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021-2025. Sejalan dengan RJPP, tahun 2023 dan 2024 merupakan tahun Enhancement & Expansion dengan tema strategis, yaitu “Kemitraan dan Ekspansi”.

Strategi kemitraan dan ekspansi sebagai tindak lanjut program 2022 dengan implementasi transfer operatorship terminal kendaraan di area kerja Pelindo. Integrasi dan standardisasi operasi, dengan fokus pada digitalisasi dan sistemisasi serta Car Distribution Management (CDM).

Adapun fokus strageti IPCC dalam menjalin kemitraan dan melakukan ekspansi, sebagai berikut:

a. Transfer operatorship terminal kendaraan di area kerja Pelindo
b. Integrasi & standarisasi operasi, dengan focus pada digitalisasi & sistemasi
c. Layanan dan operasi terintegrasi dengan fungsi dan enabler terpusat
d. Penambahan kapasitas car distribution management (CDM)
e. Digitalisasi proses bisnis
f. Peningkatan Company value dan kinerja harga saham melalui buyback
g. Full dedicated car terminal (fase 1)
h. Opsi divestasi/likuidasi MKO MTKI Budaya Perusahaan

Perusahaan menyadari pentingnya penerapan budaya perusahaan karena dapat mendongkrak kinerja perusahaan secara signifikan. Perusahaan senantiasa memastikan bahwa budaya kerja perusahaan tetap relevan dengan lingkungan eksternal dan ekosistem bisnis yang dinamis dan berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Sebagai bagian dari entitas usaha milik negara atau BUMN, Budaya Perusahaan saat ini adalah AKHLAK yang secara berurutan merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta diikuti dengan penjelasan panduan perilaku, framework, dan tahapan implementasi AKHLAK sebagai fondasi dari budaya perusahaan Perusahaan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-7/MBU/07/2020 mengenai Pedoman Kerja Budaya Badan Usaha Milik Negara beserta anak perusahaannya.

The IPCC Vision and Mission Strategy was prepared and outlined in the Company’s Long Term Plan (RJPP) 2021-2025. In line with the RJPP, 2023 and 2024 are Enhancement & Expansion years with a strategic theme, namely “Partnership and Expansion”.

The partnership and expansion strategy is a follow-up to the 2022 program by implementing the transfer of operatorship of Car Terminal in Pelindo work areas. Integration and standardization of operations, with a focus on digitalization and systemization as well as Car Distribution Management (CDM).

The IPCC strategy focus on establishing partnerships and expanding is as follows:

a. Transfer operatorship of Car Terminal in Pelindo work areas
b. Integration & standardization of operations, with a focus on digitalization & systemization
c. Integrated services and operations with centralized functions and enablers
d. Additional car distribution management (CDM) capacity
e. Digitalization of business processes
f. Increasing Company value and share price performance through buybacks
g. Full dedicated car terminal (phase 1)
h. MKO MTKI divestment/liquidation option Company Culture

The Company realizes the importance of implementing Company culture because it can significantly boost company performance. The Company always ensures that the company’s work culture remains relevant to the external environment and business ecosystem which is dynamic and changes along with developments in time and technology.

As part of a state-owned business entity or State-Owned Enterprises, the current Company Culture is AKHLAK which is an acronym for Amanah, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive and Collaborative and is followed by an explanation of the behavioral guidelines, framework and implementation stages of AKHLAK as the foundation of the culture. Company company. This is in accordance with the Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SE-7/MBU/07/2020 concerning Guidelines for the Cultural Work of State-Owned Enterprises and their subsidiaries.

BUDAYA PERUSAHAAN

Perusahaan menyadari pentingnya penerapan budaya perusahaan karena dapat mendongkrak kinerja perusahaan secara signifikan. Perusahaan senantiasa memastikan bahwa budaya kerja perusahaan tetap relevan dengan lingkungan eksternal dan ekosistem bisnis yang dinamis dan berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Sebagai bagian dari entitas usaha milik negara atau BUMN, Budaya Perusahaan saat ini adalah AKHLAK yang secara berurutan merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta diikuti dengan penjelasan panduan perilaku, *framework*, dan tahapan implementasi AKHLAK sebagai fondasi dari budaya perusahaan Perusahaan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-7/MBU/07/2020 mengenai Pedoman Kerja Budaya Badan Usaha Milik Negara beserta anak perusahaannya.

COMPANY CULTURE

The Company realizes the importance of implementing Company culture because it can significantly boost company performance. The Company always ensures that the company's work culture remains relevant to the external environment and business ecosystem which is dynamic and changes along with developments in time and technology.

As part of a state-owned business entity or State-Owned Enterprises, the current Company Culture is AKHLAK which is an acronym for Amanah, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive and Collaborative and is followed by an explanation of the behavioral guidelines, framework and implementation stages of AKHLAK as the foundation of the culture. Company company. This is in accordance with the Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SE-7/MBU/07/2020 concerning Guidelines for the Cultural Work of State-Owned Enterprises and their subsidiaries.

AKHLAK

Amanah

Amanah berarti memegang teguh kepercayaan yang diberikan, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Memenuhi janji dan komitmen
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

TRUST

Trust means holding firmly to the trust given, with the following expected behavior:

- Meeting promises and commitments
- Responsible for tasks, decisions and actions taken
- Adhere to moral and ethical values

Kompeten

Kompeten berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

COMPETENT

Competent means continuing to learn and develop capabilities, with the following expected behavior:

- Improve personal competence to answer ever-changing challenges
- Help others learn
- Complete tasks with the best quality

Harmonis

Harmonis berarti saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

HARMONIOUS

Harmony means caring for each other and respecting differences, with the following expected behavior:

- Respect everyone regardless of background
- Likes to help other people
- Building a conducive work environment

Loyal

Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
- Patuh pada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etik

LOYAL

Loyal means being dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State, with the expected behavior as follows:

- Maintain the reputation of fellow employees, leaders, SOEs and the State
- Willing to sacrifices to achieve bigger goals
- Obey the leadership as long as it is not against the law and ethics

Adaptif

Adaptif berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- Bertindak proaktif

ADAPTIVE

Adaptive means continuing to innovate and be enthusiastic in driving or facing change, with the following expected behavior:

- Quickly adapt to get better
- Continuously make improvements following technological developments
- Act proactively

Kolaboratif

Kolaboratif berarti membangun kerjasama yang sinergis dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka bekerja sama menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

COLLABORATIVE

Collaborative means building synergistic cooperation with the following expected behavior:

- Provide opportunities for various parties to contribute
- Open to working together to produce added value
- Mobilize the utilization of various resources for common goals

Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Perusahaan

IPCC senantiasa berupaya melakukan internalisasi serta meningkatkan pemahaman mengenai budaya "AKHLAK" yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Divisi Budaya.

IPCC melakukan sosialisasi sebagai suatu upaya untuk memperkenalkan, menyebarluaskan informasi mengenai budaya "AKHLAK" kepada seluruh Pegawai maupun pihak eksternal Perusahaan dengan tujuan agar setiap individu paham dan mengerti serta dapat mengimplementasikan budaya tersebut.

Socialization and Internalization of Company Culture

The IPCC always strives to internalize and increase understanding of the "AKHLAK" culture, the implementation of which is coordinated by the Culture Division.

IPCC carries out outreach as an effort to introduce and disseminate information regarding the "AKHLAK" culture to all employees and external parties of the Company with the aim of ensuring that each individual understands and understands and can implement this culture.

Kegiatan Usaha
Business Activities



KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR TERAKHIR

Berdasarkan Pasal 3, ayat 2. Akta Anggaran Dasar PT Kendaraan Terminal Indonesia Tbk Nomor 45 tanggal 18 Juli 2023, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H.M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-010146 tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha kegiatan pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan mengutamakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.

BUSINESS ACTIVITIES ACCORDING TO THE LATEST ARTICLES OF ASSOCIATION

Based on Article 3, paragraph 2. Deed of Articles of Association of PT Kendaraan Terminal Indonesia Tbk Number 45 dated July 18, 2023, made before Ashoya Ratam, S.H.M.Kn., notary in the Administrative City of South Jakarta and has received Approval for Amendments to the Articles of Association from the Minister of Law and Rights Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-010146 concerning Notification of Amendments to the Articles of Association of PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk, the aim and objective of the Company is to carry out sea port service activities, which relate to water transportation for passengers, animals or goods, such as the operation of facilities terminals, for example ports and docks, navigation, inspection of cargo in cargo and/or containers by prioritizing sources of ionizing radiation (radioactive substances and ionizing radiation generators), shipping and berthing activities, mooring services, pilotage and towing services.



KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU

Untuk mencapai maksud dan tujuan yang tertera pada Anggaran Dasar Perusahaan tersebut, kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2023 antara lain adalah:

BUSINESS ACTIVITIES CARRIED OUT IN THE FISCAL YEAR

To achieve the purposes and objectives stated in the Company's Articles of Association, the business activities carried out by the Company in 2023 include:

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on the Articles of Association	Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pada Tahun 2023 Information on Implementation of Business Activities in 2023	
	Sudah Already	**Belum** Not yet
Kegiatan Usaha Utama Main Business Activities		
1. Menjalankan kegiatan usaha penyediaan dan /atau pelayanan usaha bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, serta receiving/delivery atas kendaraan, alat berat dan suku cadang, termasuk namun tidak terbatas mendirikan/ menjalankan anak perusahaan dan usaha lainnya yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha utama, Penyediaan clan pengembangan fasilitas pelabuhan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki IKT untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait bidang usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yaitu sebagai berikut: Carrying out business activities of providing and/or loading and unloading business services to and from ships at the port which includes stevedoring, cargodoring, and receiving/delivery of vehicles, heavy equipment and spare parts, including but not limited to establishing/running subsidiaries and other businesses that has a direct or indirect relationship with the main business activities, Providing and developing port facilities and optimizing the use of resources owned by IKT to produce goods and/or services of high quality and strong competitiveness to obtain/pursue profits to increase the value of the Company as long as appropriate and does not conflict with the provisions of applicable laws and regulations, especially regarding the maritime port services business sector, namely as follows:	V	
2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat; Provision and/or dock services for mooring;	v	
3. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih; Provision and/or fuel filling services and clean water services;	v	
4. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan Provision and/or service of boarding and disembarking facilities for passengers and/or vehicles	v	
5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas; Provision and/or dock services for carrying out loading and unloading activities of goods and containers;		x
6. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; Providing and/or providing warehouse and goods storage services, loading and unloading equipment and port equipment;	v	
7. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro; Provision and/or services for container, liquid bulk, dry bulk and ro-ro terminal services;	v	
8. Penyediaan dan/atau jasa bongkar muat barang; Provision and/or loading and unloading services for goods;	v	
9. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang. Provision and/or services for distribution centers and goods consolidation.	v	
Kegiatan Usaha Penunjang/Pendukung Supporting/Supporting Business Activities		
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yaitu Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal. To achieve the purposes and objectives mentioned above, the Company can carry out supporting business activities, namely the provision and/or service of ship towing services.		x

PRODUK DAN/ATAU JASA YANG DIHASILKAN

Sesuai dengan Laporan Keuangan IPCC yang telah menerapkan PSAK 5 tentang Segmen Operasi, jasa pelayanan yang telah berkontribusi terhadap pendapatan operasi Perusahaan adalah:

1. Pelayanan Jasa Terminal
2. Pelayanan Jasa Barang
3. Pelayanan Rupa-rupa Usaha
4. Pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik.

Pelayanan Jasa Terminal

Pelayanan jasa terminal adalah pelayanan untuk kegiatan bongkar muat mobil, alat berat, truk/bus, motor dan general cargo yang sebagian besar merupakan part dari alat berat yang berstatus *Completely Knock Down* (CKD) maupun *Completely Build Unit* (CBU). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Terminal Internasional dan Terminal Domestik yang meliputi wilayah dermaga domestik Perusahaan, dermaga eks. Presiden, dermaga 107–109, MKO Gresik area Pelabuhan Pontianak, Belawan, Medan, Makassar dan Balikpapan.

Pelayanan jasa terminal meliputi:

1. **Stevedoring**
   Stevedoring adalah pelayanan operasi pembongkaran atau pemuatan kargo dari kapal ke lapangan penumpukan atau sebaliknya baik di terminal Internasional maupun Domestik. Pelayanan Stevedoring ini dilakukan di dalam terminal dengan didukung oleh sistem yang terintegrasi.

2. **Cargodoring**
   Cargodoring adalah pelayanan operasi pemindahan kargo dari lapangan penumpukan dan gedung parkir menuju *buffer area* atau sebaliknya baik di terminal Internasional maupun Domestik. Pelayanan cargodoring ini dilakukan di dalam terminal dengan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi..

3. **Storage Area**
   Storage area adalah suatu hamparan lahan yang digunakan Perusahaan sebagai area lapangan penumpukan cadangan sebelum cargo masuk kedalam area terminal.

4. **Receiving**
   Sementara Receiving adalah kegiatan penerimaan unit secara sistem CARTOS dengan *Auto Gate System*, verifikasi dokumen oleh pihak Bea Cukai, supervisi kegiatan penurunan kargo/unit di stall car carrier oleh driver, pemeriksaan kargo di Central Inspection Facilities oleh LQ gate, pemberian marking pada setiap kargo sesuai negara tujuan dan kapal yang mengangkutnya.

PRODUCTS AND/OR SERVICES PRODUCED

In accordance with the IPCC Financial Statements which has implemented PSAK 5 concerning Operating Segments, services that have contributed to the Company's operating income are:

1. Terminal Services
2. Cargo Services
3. Miscellaneous Services
4. Land, buildings, water and electricity.

Terminal Services

Terminal services are services for loading and unloading of cars, heavy equipment, trucks/buses, motorbikes and general cargo, most of which are parts of heavy equipment with Completely Knock Down (CKD) status or Completely Built Unit (CBU). These activities are carried out at the International Terminal and Domestic Terminal which includes the Company's domestic dock area, ex-pier. President, pier 107–109, MKO Gresik Pontianak, Belawan, Medan, Makassar and Balikpapan Port areas.

Terminal services include:

1. **Stevedoring**
   Stevedoring is an operational service for unloading or loading cargo from ships to the stacking yard or vice versa at both international and domestic terminals. Stevedoring services are carried out in the terminal and are supported by an integrated system.

2. **Cargodoring**
   Cargodoring is an operational service for moving cargo from the stacking yard and parking building to the buffer area or vice versa at both international and domestic terminals. This cargodoring service is carried out in the terminal and is supported by certified Human Capital.

3. **Receiving and Delivery**
   Receiving is an activity of receiving units using the Storage area is a stretch of land that the Company uses as a reserve storage area before cargo enters the terminal area.

4. **Receiving**
   Meanwhile Receiving is the activity of receiving units using the CARTOS system with the Auto Gate System, document verification by Customs, supervision of cargo/unit unloading activities at the car carrier stall by the driver, inspection of cargo at the Central Inspection Facilities by LQ gate, marking of each cargo according to destination country and the ship carrying it.

5. **Delivery**
   Kegiatan pemindahan unit dari *last point of rest* ke *load line* dan pengecekan unitnya, supervisi proses pemuatan unit ke car carier oleh driver, proses *thread in unit* ke sarana pengangkut di sistem cartos, *print out* surat jalan dan verified kargo di sistem cartos di saat *auto gate open* dan unit dinyatakan *left terminal*.

Pelayanan Jasa Terminal IPCC memiliki keunggulan, antara lain:

- Kargo di terminal dapat dilacak secara online
- Informasi kargo dapat diterima dari awal
- Mengurangi biaya logistik
- Semua aktifitas di IPCC diasuransikan
- Terintegrasi dengan CARTOS sehingga pengiriman informasi lebih cepat
- Mempercepat waktu untuk memutar balik sehingga meningkatkan jumlah ritase car carrier dan pengiriman
- IPCC membantu proses perizinan dengan Bea Cukai
- IPCC membantu mencarikan pengangkutan untuk membawa kargo dari dan ke terminal

Pelayanan Jasa Barang

Pelayanan jasa barang, adalah pelayanan jasa bongkar muat mobil, motor, alat berat, truck, bus, dan general cargo. Barang tersebut didistribusikan melalui dermaga umum baik untuk keperluan ekspor maupun impor di Terminal Internasional untuk perdagangan luar negeri serta kegiatan bongkar dan muat di Terminal Domestik pada perdagangan dalam negeri.

Pelayanan Jasa Rupa-rupa Usaha

Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan, Perusahaan juga memberikan Pelayanan rupa-rupa usaha atau *Value Added Service* kepada produk yang ditangani oleh Perusahaan. Terminal Kendaraan ini tidak hanya sekadar memuat dan menampung debit kendaraan, Perusahaan juga menawarkan *finishing*, perbaikan dan layanan *retrofitting*, menginstal peralatan khusus individu atau perakitan akhir yang semuanya akan dikerjakan di Ruang VPC. Jasa tersebut dilaksanakan dalam rangka menyediakan *one stop service* di lingkungan pelabuhan. Berikut ini merupakan daftar atas jasa yang dilakukan Perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan:

- Perbaikan minor (menghilangkan goresan kecil dengan pemolesan/pengecatan)
- *Fitting* Aksesoris (memasang aksesoris tambahan seperti kaca film, *mudguard*, talang air dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan-biasanya dilakukan untuk kargo impor)
- Pencucian (mencuci mobil menggunakan *automatic car wash*)
- Manajemen Suku Cadang (menyediakan gudang untuk penyimpanan suku cadang mobil)

5. **Delivery**
   Activities of moving the unit from the last point of rest to the load line and checking the unit, supervising the process of loading the unit onto the car carrier by the driver, threading the unit to the means of transport using the Cartos system, printing out the waybill and verifying the cargo in the Cartos system at the auto gate. open and the unit is declared left terminal.

IPCC Terminal Services has advantages, including:

- Cargo at the terminal can be tracked online
- Cargo information can be received from the start
- Reduce logistics costs
- All activities in the IPCC are insured
- Integrated with CARTOS so that information delivery is faster
- Speed up the time to turn around thereby increasing the number of car carrier and delivery routes
- IPCC assists with the customs clearance process
- IPCC helps find transport to carry cargo to and from the terminal

Cargo Services

Goods services are loading and unloading services for cars, motorbikes, heavy equipment, trucks, buses and general cargo. These goods are distributed through public docks for both export and import purposes at the International Terminal for International Trade as well as loading and unloading activities at the Domestic Terminal for domestic trade.

Miscellaneous Business Services

To provide the best service to customers, the Company also provides various business services or Value Added Services for products handled by the Company. This Car Terminal does not just load and accommodate vehicle discharges, the Company also offers finishing, repair and retrofitting services, installing individual special equipment or final assembly which will all be done in the VPC Room. This service is carried out in order to provide one stop service in the port environment. The following is a list of services provided by the Company to meet various customer needs:

- Minor repairs (removing minor scratches by polishing/painting)
- Fitting Accessories (installing additional accessories such as window film, mudguards, water gutters and others according to needs - usually done for imported cargo)
- Washing (washing the car using an automatic car wash)
- Spare Parts Management (providing a warehouse for storing car spare parts)

- *Marking* dan *Labelling* (memasang label pada kargo yang bertuliskan nomor rangka, nomor mesin dan tujuan kargo)
- *Pre Delivery Inspection* (melakukan pengecekan interior dan eksterior kargo untuk mempertahankan kualitas sesuai dengan yang diinginkan automaker)
- *Port Stock* (menyediakan lapangan penumpukan *non-bounded – cargo* yang belum memiliki surat)

- Marking and Labeling (putting a label on the cargo that says the frame number, engine number and destination of the cargo)
- Pre Delivery Inspection (checking the interior and exterior of the cargo to maintain the quality as desired by the automaker)
- Port Stock (provides a non-bounded storage yard – cargo that does not yet have documents)

Pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik.
Dalam rangka memanfaatkan aset yang dimiliki secara optimal, Perusahaan melakukan jasa pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik berupa sewa ruangan kantor yang mencakup fasilitas air dan listrik.

Land, buildings, water and electricity.
In order to optimally utilize the assets it owns, the Company provides land, building, water and electricity management services in the form of office space rental which includes water and electricity facilities.

KEUNGGULAN PRODUK DAN/ATAU JASA LAYANAN IPC ADVANTAGES OF IPCC PRODUCTS AND/OR SERVICES

KEUNGGULAN PRODUK DAN/ATAU JASA LAYANAN IPC ADVANTAGES OF IPCC PRODUCTS AND/OR SERVICES



Dalam memberikan pelayanan jasa terminal dan jasa barang, Perusahaan menyiapkan Tenaga Kerja yang profesional dan berpengalaman dibidangnya. Tenaga kerja yang disiapkan juga bersertifikasi dan memiliki produktivitas yang tinggi (125 unit/jam). Untuk menunjang aktivitas bongkar muat, Perusahaan juga menyiapkan alat bantu penunjang dengan kualitas yang baik dan bersertifikat. Selain itu, Perusahaan memiliki sistem berbasis IT yaitu Car Terminal Operating System (CARTOS) yang berguna untuk menyimpan data yang akurat tentang kargo ke dalam database perusahaan.

In providing terminal services and goods services, the Company prepares its workforce who are professional and experienced in their field. The workforce prepared is also certified and has high productivity (125 units/hour). To support loading and unloading activities, the Company also prepares supporting tools of good quality and certification. Apart from that, the Company has an IT-based system, namely the Car Terminal Operating System (CARTOS), which is useful for storing accurate data about cargo in the company database.

Dalam menjalankan kerja sama usaha dengan pelanggan, Perusahaan membuat perjanjian yang berisikan kontrak dengan pelanggan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang kerja sama yang terjadi antara Perusahaan dengan pelanggan. Perjanjian tersebut

In carrying out business cooperation with customers, the Company enters into an agreement containing a contract with the customer relating to the applicable provisions regarding the cooperation between the Company and

berisi tentang ruang lingkup pekerjaan, Jangka Waktu Pelaksanaan Perjanjian, Hak dan Kewajiban, Tarif, Tata Cara Pembayaran, Asuransi dan hal-hal lainnya yang terkait tentang hubungan kerjasama antara Perusahaan dan pelanggan. Adapun seandainya ada perubahan atau penambahan poin pada perjanjian, dapat dituangkan ke dalam Addendum perjanjian.

the customer. The agreement contains the scope of work, period of implementation of the agreement, rights and obligations, tariffs, payment procedures, insurance and other matters related to the cooperative relationship between the Company and customers. If there are changes or additional points to the agreement, they can be included in the Addendum to the agreement.

PASAR YANG DILAYANI

Perdagangan Luar Negeri
Ekspor

MARKETS SERVED

International Trade
Export



Penjelasan:

1. Proses pembuatan CBU (*Completely Build Up*) di perusahaan manufaktur.
2. Pengiriman CBU dari perusahaan manufaktur dengan menggunakan *car carrier* ke pelabuhan.
3. Proses pengurusan dokumen perizinan bea cukai barang dan administrasi oleh logistik kemudian dilakukan proses *Receiving/Delivery* oleh Perusahaan, Kargo masuk ke Pelabuhan dengan *car carrier*, kemudian kargo dioperasikan oleh Tenaga Kerja Perusahaan/*Forwarder* dari *car carrier* menuju lapangan penumpukan.
4. Kemudian kargo yang akan dikirim akan dilakukan *quality check* oleh tenaga kerja Perusahaan bagaimana kualitas kargo, apakah ada cacat atau tidak dan kargo dipindahkan ke dermaga (cargodoring)
5. Proses *Loading cargo* ke kapal dilakukan oleh Tenaga Kerja Perusahaan (*stevedoring*)

Explanation:

1. The process of making a CBU (Completely Build Up) in a manufacturing company.
2. Delivery of CBU from manufacturing companies using car carriers to the port.
3. The process of processing customs clearance documents for goods and administration by logistics is then carried out by the Receiving/Delivery process by the Company, the Cargo enters the Port by car carrier, then the cargo is operated by the Company's Workers/ Forwarders from the car carrier to the stacking yard.
4. Then the cargo to be sent will be quality checked by the Company's workforce regarding the quality of the cargo, whether there are defects or not and the cargo will be moved to the dock (cargodoring)
5. The process of loading cargo onto the ship is carried out by Company workers (stevedoring)

Impor

Import

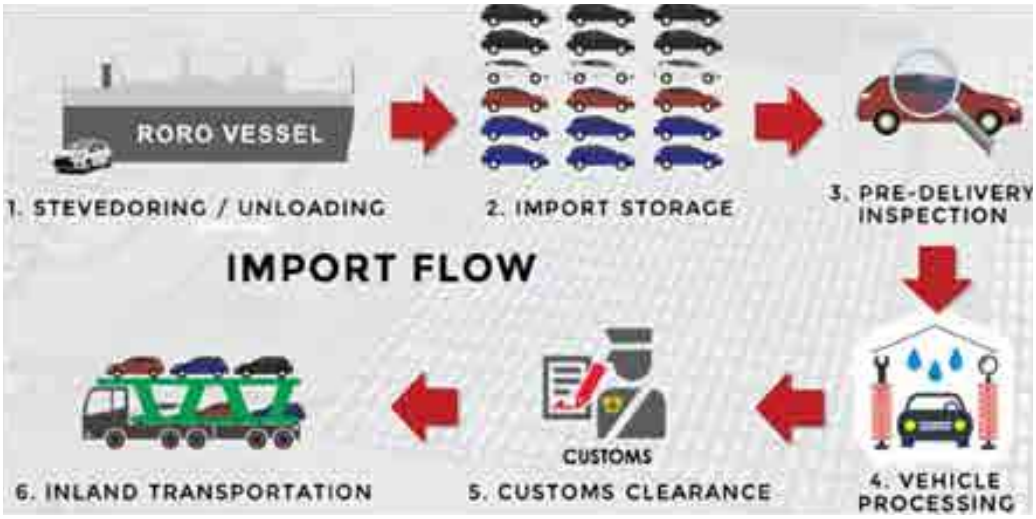

Penjelasan:

1. Proses *Unloading* kargo dari Kapal oleh Tenaga Kerja Perusahaan ke dermaga (*Stevedoring*).
2. Kemudian kargo dipindahkan oleh Tenaga Kerja Perusahaan dari dermaga ke lapangan penumpukan (cargodoring) khusus kargo impor.
3. Selanjutnya dilakukan inspeksi atas kondisi kargo oleh Tenaga Kerja Perusahaan.
4. Setelah itu dilakukan proses pembersihan / pencucian kargo oleh Perusahaan (fasilitas ini adalah fasilitas penunjang dari Perusahaan, pelayanan ini dapat difasilitasi sesuai permintaan pelanggan)
5. Pengurusan dokumen perizinan bea cukai barang dan administrasi oleh perusahaan logistik, kemudian dilakukan Receiving/Delivery oleh Perusahaan.
6. Terakhir, proses loading cargo ke Car Carrier dilakukan oleh Tenaga Kerja Perusahaan/*Forwarder*
7. dan dikirim ke *cargo owner/receiver*.

Adapun barang yang dilayani Perusahaan, yaitu mobil, alat berat, dan sparepart.

Explanation:

1. Process of unloading cargo from the ship by the Company's workers to the dock (Stevedoring).
2. Then the cargo is moved by the Company's workers from the dock to the cargo loading yard specifically for imported cargo.
3. Next, an inspection of the condition of the cargo is carried out by the Company's workforce.
4. After that, the cargo cleaning/washing process is carried out by the Company (this facility is a supporting facility from the Company, This service can be facilitated according to customer requests)
5. Processing of customs clearance documents for goods and administration by the logistics company, then Receiving/Delivery is carried out by the Company.
6. Lastly, the process of loading cargo onto the Car Carrier is carried out by the Company's Workers/Forwarders
7. and sent to the cargo owner/receiver.

The goods served by the Company are cars, heavy equipment and spare parts.

Perdagangan Dalam Negeri

Pelayanan yang diberikan pada Domestik memiliki standar pelayanan yang sama dengan Pelayanan Internasional baik dari segi operasional atau administrasi. Namun, pada Pelayanan Domestik tidak diperlukan dokumen perizinan bea cukai sehingga pelayanan domestik memiliki arus perpindahan barang yang lebih cepat.

Setelah tiba di Perusahaan dengan muatan kendaraan, dilaksanakan inspeksi truk untuk dilaksanakan serah terima kargo dari pengemudi truk ke Perusahaan dengan didampingi oleh perwakilan dari pelayaran. Setelah kapal tiba, perusahaan bongkar muat/driver melaksanakan pemuatan diatas kapal. Setelah sampai di atas kapal, pihak kapal melaksanakan kegiatan lashing.

Domestic Trade

The services provided domestically have the same service standards as international services both in terms of operations and administration. However, for Domestic Services there is no need for customs clearance documents so that domestic services have a faster flow of goods movement.

After arriving at the Company with the vehicle load, the truck is inspected to hand over the cargo from the truck driver to the Company accompanied by a representative from the shipping company. After the ship arrives, the loading and unloading company/driver carries out the loading on the ship. After arriving on the ship, the ship carries out lashing activities.

Pihak pelayaran mengajukan jadwal kedatangan kapal dan kargonya kepada perencanaan Perseroaan. Lalu, perencanaan Perusahaan menetapkan lokasi penumpukan dan waktu alokasi tambat kapal. Setelah kapal tiba dipelabuhan dilaksanakan pelayanan pandu dan tunda menuju dermaga Perusahaan. Setelah kapal merapat, dilaksanakan pengikatan tali kapal ke border dermaga dan ramp door siap untuk dibuka.

1. Melaksanakan kegiatan pengiriman dokumen perencanaan kapal dan kargo 48 jam sebelum kapal tiba.
2. 5Melaksanakan kegiatan rapat kapal dan kargo.
3. Penetapan alokasi waktu tambat kapal dan penumpukan

The shipping company submits the arrival schedule of the ship and its cargo to the Company's planning company. Then, the Company's planning determines the storage location and allocation time for the ship's mooring. After the ship arrives at the port, a guide and tug service is carried out to the Company's dock. After the ship docks, the ship's rope is tied to the dock border and the ramp door is ready to be opened.

1. Carry out activities for sending ship planning documents and cargo 48 hours before the ship arrives.
2. Carry out ship and cargo meeting activities.
3. Determining the allocation of ship mooring and stacking times

PENGENDALIAN KUALITAS LAYANAN

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggannya. Pelayanan tersebut akan senantiasa dijaga dan dikembangkan kualitasnya demi meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Beberapa pengendalian kualitas layanan yang dilakukan Perusahaan antara lain dengan memastikan bahwa jasa pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten, dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan terverifikasi oleh pelanggan.

Selain itu Perusahaan juga menyediakan sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan bongkar muat, sehingga apabila dalam suatu waktu terdapat arus barang yang tinggi, tidak terjadi penumpukkan di lapangan ataupun di kapal. Kecepatan dalam membongkar muat barang juga dilakukan dengan standar kecepatan yang tinggi, yaitu 125 CBU per jam. Hal ini juga dikendalikan dengan pengawasan dari supervisor perencanaan pengendalian barang, pelayanan operasi, peralatan dan keuangan. Keempat supervisor tersebut bertugas mengawasi seluruh kegiatan usaha Perusahaan agar dapat berjalan dengan baik serta memberikan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Disamping sumber daya manusia yang memadai, Perusahaan juga terus melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap peralatan yang digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan sehari-hari. Untuk pemeliharaan, umumnya dilakukan secara berkala yang dilakukan oleh pihak ketiga. Selain itu, peralatan yang digunakan juga diuji kelayakannya secara berkala yang dilakukan oleh instansi pihak ketiga yang kompeten. Pengadaan atas peralatan tersebut juga dilakukan secara ketat, dengan memperhatikan kualitas dan keamanan dari peralatan tersebut.

Selain itu, Perusahaan juga saat ini telah membangun jaring debu untuk menahan debu atau partikel yang dapat merusak kendaraan, sehingga kendaraan yang melalui pelabuhan Perusahaan akan terjaga kualitasnya.

SERVICE QUALITY CONTROL

The Company is committed to providing the best service to its customers. The quality of these services will always be maintained and developed in order to increase customer satisfaction. Some of the service quality controls carried out by the Company include ensuring that the services provided by the Company are carried out by competent Human Capital, with a certificate issued by the Manpower Service and verified by the customer.

Apart from that, the Company also provides sufficient Human Capital to carry out loading and unloading, so that if at any time there is a high flow of goods, there will be no build-up in the field or on the ship. Speed in loading and unloading goods is also carried out at a high speed standard, namely 125 CBU per hour. This is also controlled with supervision from the supervisor of planning, control of goods, operational services, equipment and finance. The four supervisors are tasked with supervising all of the Company's business activities so that they can run well and provide established service standards.

Apart from adequate Human Capital, the Company also continues to supervise and maintain the equipment used for the Company's daily operational activities. Maintenance is generally carried out periodically by a third party. Apart from that, the equipment used is also periodically tested for suitability by competent third party agencies. Procurement of this equipment is also carried out strictly, paying attention to the quality and safety of the equipment.

Apart from that, the Company has also currently built a dust net to contain dust or particles that could damage vehicles, so that the quality of vehicles passing through the Company's ports will be maintained.

WILAYAH OPERASIONAL
OPERATIONAL AREAS



1

Kantor Pusat
Head Office

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Jalan Sindang Laut No. 100
Customer Care : +62 811933 9930
Tel. : +62 21 4394 2251
Web : www.indonesiacarterminal.co.id
Email : corsec@indonesiacarterminal.co.id

2

Kantor Manajemen Kerjasama Operasi
Operations Cooperation Management Office:

Kantor MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia

Jalan Beta Kawasan Industri Maspion V
Sukomulyo, Manyar Gresik - Jawa TImur
Tel. : +62 21 4394 2251
Web : www.indonesiacarterminal.co.id
Email : corsec@indonesiacarterminal.co.id

3

Kantor Satelit
Satellite Office

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk | Pelabuhan Pontianak/Pontianak Port

Jalan Pak Kasih No. 11, Pontianak Kota,
Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78112
Customer Care : (123) 456 - 7890
Tel. : +62 21 4393 2251
Web : www.indonesiacarterminal.co.id
Email : corsec@indonesiacarterminal.co.id



4

Kantor Satelit
Satellite Office

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk | Pelabuhan Belawan/Belawan Port

Jalan Sumatera, Belawan I,
Medan Kota Belawan, Kota Medan,
Sumatera Utara 20411
Tel. : +62 21 4394 2251
Web : www.indonesiacarterminal.co.id
Email : corsec@indonesiacarterminal.co.id

5

Kantor Satelit
Satellite Office

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk | Pelabuhan Makassar/Makassar Port

Jalan Makassar
Makassar, Sulawesi Selatan
Tel. : +62 21 4394 2251
Web : www.indonesiacarterminal.co.id
Email : corsec@indonesiacarterminal.co.id

6

Kantor Satelit
Satellite Office

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Pelabuhan Semayang, Balikpapan/ Semayang Port

Jl. Yos Sudarso No.30
Balikpapan, Kalimantan Timur
Tel. : +62 21 4394 2251
Web : www.indonesiacarterminal.co.id
Email : corsec@indonesiacarterminal.co.id /
info@indonesiacarterminal.co.id



Struktur Organisasi Perusahaan

Organizational Structure of The Company

Sejalan dengan dinamika bisnis yang terus berkembang dan berubah, IPCC terus melakukan penguatan struktur organisasi dan diharapkan setiap lini organisasi mampu menjalankan fungsi-fungsinya demi mencapai tujuan bersama. Struktur Organisasi Perusahaan per 31 Desember 2023, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. HK.36/1/5/IKT-21 tanggal 1 April 2021 sebagaimana terlampir di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK PER 31 DESEMBER 2023



In line with business dynamics that continue to develop and change, the IPCC continues to strengthen its organizational structure and it is hoped that each line of the organization will be able to carry out its functions to achieve common goals. The Company's Organizational Structure as of December 31, 2023, has been determined through Board of Directors' Decree No. HK.36/1/5/IKT-21 dated April 1, 2021 as attached below.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK AS OF DECEMBER 31, 2023

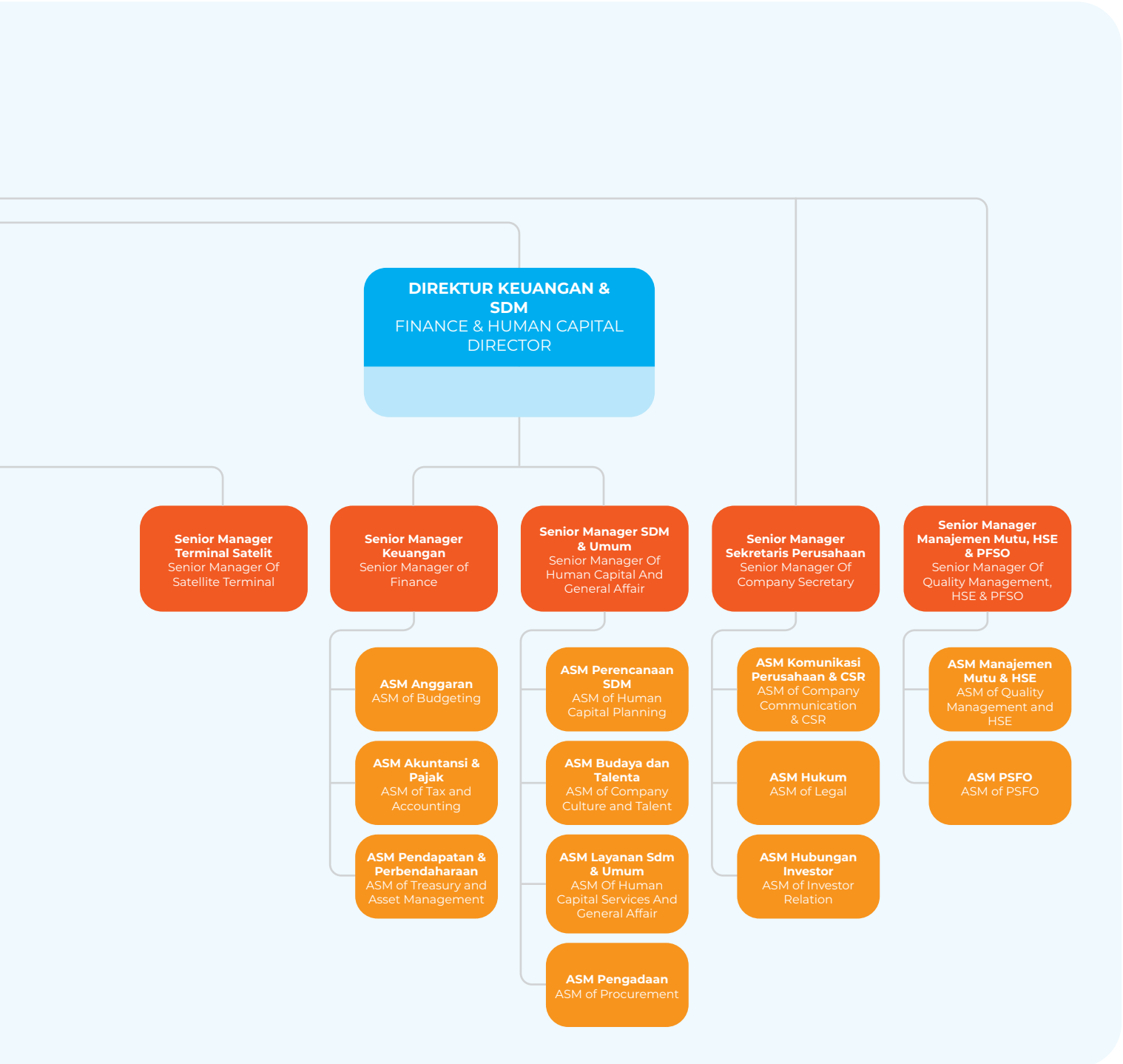

Keanggotaan pada Asosiasi
Association Membership



Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kepelabuhanan, terkhusus pengelolaan terminal kendaraan pelabuhan, Perusahaan terus memperluas jaringan bisnis serta menjalin komunikasi yang lebih luas dengan berpartisipasi secara aktif sebagai anggota asosiasi dan organisasi serta diharapkan juga dapat meningkatkan kredibilitas Perusahaan di industri sejenis.

Keanggotaan dalam asosiasi dan organisasi ini juga menjadi bagian dari upaya pelibatan pemangku kepentingan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan operasional. Hingga tahun 2023, Perusahaan telah tergabung dalam keanggotaan asosiasi industri, yakni sebagai berikut:

As a company operating in the field of port services, especially the management of port Car Terminal, the Company continues to expand its business network and establish wider communications by actively participating as a member of associations and organizations and is also expected to increase the Company's credibility in similar industries.

Membership in these associations and organizations is also part of efforts to involve stakeholders in resolving any problems faced in carrying out operational activities. Until 2023, the Company has joined the membership of industry associations, namely as follows:

Daftar Keanggotan Asosiasi
Association Membership List

Nama Asosiasi Association Name	Status	Lingkup Asosiasi Association Scope
Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia Association of Indonesia Port Business Entities	Anggota Aktif Active member	Nasional National
Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia DKI Jakarta Association of Indonesia Stevedoring and Unloading Companies DKI Jakarta	Anggota Aktif Active member	Nasional National
Asosiasi Emiten Indonesia Association of Indonesia Issuers	Anggota Aktif Active member	Nasional National
Asosiasi Sekretaris Perusahaan Indonesia Association of Indonesia Company Secretaries	Anggota Aktif Active member	Nasional National


3
2

Profil Direksi

Board of Directors Profile

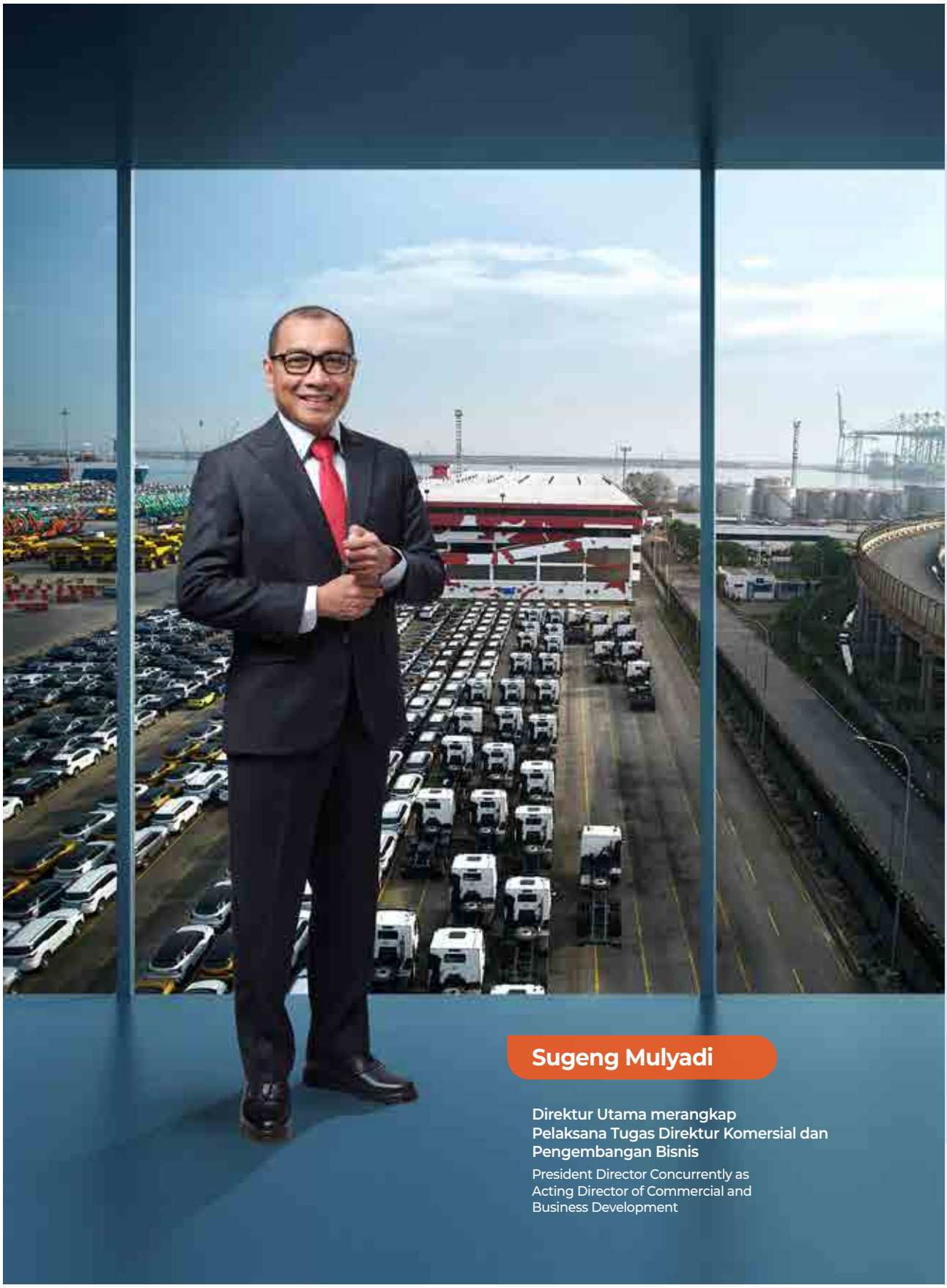

Sugeng Mulyadi

Direktur Utama merangkap Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis

President Director Concurrently as Acting Director of Commercial and Business Development

Periode Jabatan:
2023-2025 , Periode Ke-1

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 51 tahun per 31 Desember 2023
Kelahiran Jombang, 5 April 1972

Domisili
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Akta Nomor 44 tanggal 18 April 2023

Riwayat Pendidikan
- Master of Shipping and Transport from Netherland Maritime University, Rotterdam-Netherlands, in 2013
- Master of Finance from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, in 2008
- Bachelor of Economic Management from Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, in 1996

Sertifikasi
- Certified Risk Management Professional (CRMP)
- Certified Integrity Development Policy Expert

Riwayat Pekerjaan
- Director at PT Pelindo Investama on 2020 – 2023
- Director of Finance and Human Capital at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk on 2018 – 2019
- VP Keuangan di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk 2017 – 2018

Rangkap Jabatan
Di IPCC
Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis

Di Lembaga/Perusahaan lain
Tidak ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Kepemilikan Saham IPCC
354.000 Lembar saham (0,02%)

Term of Office:
2023-2025, 1st Period

Personal Data
Indonesia citizens
Age 51 years old as of December 31, 2023
Born in Jombang, April 5 1972

Domicile
Jakarta, Indonesia

Legal Basis of Appointment
Deed Number 44 dated April 18, 2023

Educational Background
- Master of Shipping and Transport from Netherland Maritime University, Rotterdam-Netherlands, in 2013
- Master of Finance from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, in 2008
- Bachelor of Economic Management from Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, in 1996

Certification
- Certified Risk Management Professional (CRMP)
- Certified Integrity Development Policy Expert

Work Experience
- Director at PT Pelindo Investama on 2020 – 2023
- Director of Finance and Human Capital at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk in 2018 – 2019
- VP of Finance at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk 2017 – 2018

Concurrent Position
At IPCC
Acting Director of Commercial and Business Development

In other Institutions/Companies
None

Affiliated Relationships
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or Directors.

IPCC Share Ownership
354,000 shares (0.02%)

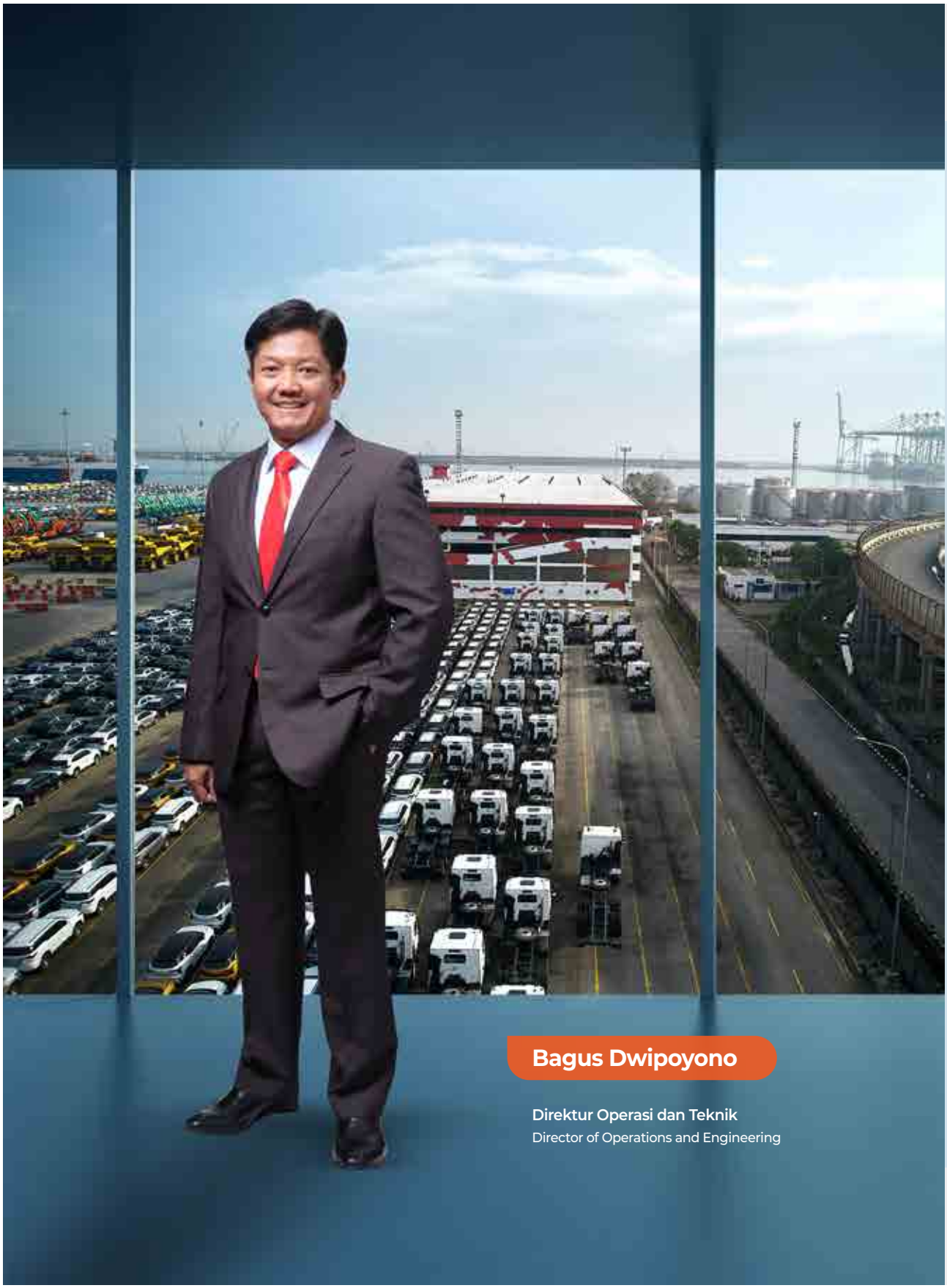

Bagus Dwipoyono

Direktur Operasi dan Teknik
Director of Operations and Engineering

Periode Jabatan:
2023 - 2025 , Periode Ke- 1

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 51 tahun per 31 Desember 2023
Kelahiran Surabaya, 21 Desember 1072

Domisili
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Akta Nomor 44 tanggal 18 April 2023

Riwayat Pendidikan
- Engineering Profession Program from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, in 2020
- Master of International Transport and Logistic from Shanghai Maritime University, China, in 2011
- Master of Management from Sekolah Tinggi Manajemen IMMI, Jakarta, in 2002
- Bachelor Industrial Engineering from Universitas Pasundan, Bandung, in 1996

Sertifikasi
-

Riwayat Pekerjaan
- President Director at PT Menara Maritime Indonesia on 2018 – 2023
- Director at PT Terminal Petikemas Indonesia on 2016 – 2018
- Manager Operation Support 1 at PT Pelabuhan Tanjung Priok on 2015 – 2016
- ASM Pengembangan dan Pengendalian I at PT PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Main Office in 2012 – 2015

Rangkap Jabatan
Di IPCC
Tidak ada

Di Lembaga/Perusahaan lain
Tidak ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Kepemilikan Saham IPCC
200.000 Lembar saham (0,01%)

Term of Office:
2023 - 2025, 1st Period

Personal Data
Indonesia citizens
Age 51 years old as of December 31, 2023
Born in Surabaya, 21 December 1072

Domicile
Jakarta, Indonesia

Legal Basis of Appointment
Deed Number 44 dated April 18, 2023

Educational Background
- Engineering Profession Program from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, in 2020
- Master of International Transport and Logistics from Shanghai Maritime University, China, in 2011
- Master of Management from IMMI College of Management, Jakarta, in 2002
- Bachelor of Industrial Engineering from Universitas Pasundan, Bandung, in 1996

Certification
-

Work Experience
- President Director at PT Menara Maritime Indonesia on 2018 – 2023
- Director at PT Terminal Petikemas Indonesia on 2016 – 2018
- Manager Operation Support 1 at PT Pelabuhan Tanjung Priok on 2015 – 2016
- ASM Development and Control I at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Main Office in 2012 – 2015

Concurrent Position
At IPCC
None

In other Institutions/Companies
None

Affiliated Relationships
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or Directors.

IPCC Share Ownership
200,000 shares (0.01%)

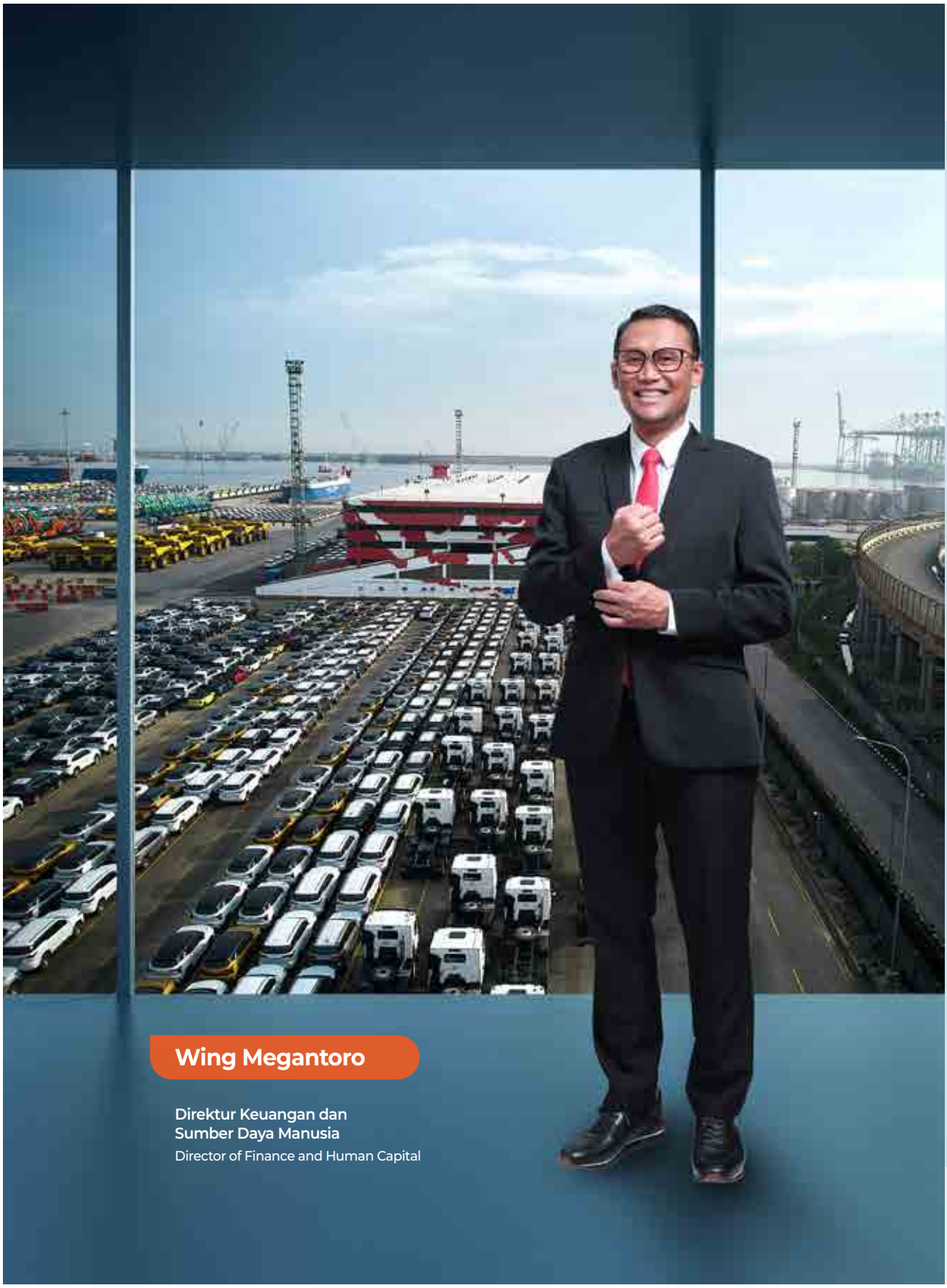

Wing Megantoro

Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia
Director of Finance and Human Capital

Periode Jabatan:
2023 - 2025 , Periode Ke- 1

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 51 tahun per 31 Desember 2023
Kelahiran Semarang, 6 Juli 1972

Domisili
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Akta Nomor 06 tanggal 5 September 2023

Riwayat Pendidikan
- Master of Business Administration from Kuhne Logistic University, in 2015
- Bachelor of Accountancy from University of Jayabaya, in 1997

Sertifikasi
-

Riwayat Pekerjaan
- Regional Division Head Management of Finance & Tax Regional 2 at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on 2021 - 2023
- SVP of Finance Management at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) on 2019 – 2021
- SVP of Finance Control & Planning at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) on 2018 – 2019
- VP of Finance Services at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) on 2016 – 2019

Rangkap Jabatan
Di IPCC
Tidak ada

Di Lembaga/Perusahaan lain
Tidak ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Kepemilikan Saham IPCC
Tidak ada

Term of Office:
2023 - 2025, 1st Period

Personal Data
Indonesia citizens
Age 51 years old as of December 31, 2023
Born in Semarang, July 6 1972

Domicile
Jakarta, Indonesia

Legal Basis of Appointment
Deed Number 06 dated September 5, 2023

Educational Background
- Master of Business Administration from Kuhne Logistic University, in 2015
- Bachelor of Accountancy from Universitas Jayabaya, in 1997

Certification
-

Work Experience
- Regional Division Head Management of Finance & Tax Regional 2 at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on 2021 - 2023
- SVP of Finance Management at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) on 2019 – 2021
- SVP of Finance Control & Planning at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) on 2018 – 2019
- VP of Finance Services at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) on 2016 – 2019

Concurrent Position
At IPCC
None

In other Institutions/Companies
None

Affiliated Relationships
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or Directors.

IPCC Share Ownership
None

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Hingga akhir tahun 2023, terdapat 2 (dua) kali perubahan susunan dan komposisi Direksi, dengan penjelasan sebagai berikut:

Periode 1 Januari 2023-18 April 2023

Periode 1 Januari 2023-18 April 2023, Direksi IPCC berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis, dan 2 (dua) orang Direktur masing masing Direktur Operasi dan Teknik dan Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND REASONS FOR THE CHANGES

Until the end of 2023, there were 2 (two) changes to the structure and composition of the Board of Directors, with the following explanation:

Period January 1, 2023-April 18, 2023

For the period January 1, 2023-April 18, 2023, the IPCC Board of Directors consists of 3 (three) people consisting of 1 (one) President Director who is also Director of Commercial and Business Development, and 2 (two) Directors each Director of Operations and Engineering and Director of Finance and Human Capital.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Periode 1 Januari 2023-18 April 2023
Table of Composition and Basis for Appointment of Directors for the Period 1 January 2023-18 April 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Length of service	Periode Jabatan Period of Office
Rio Theodore Natalianto Lasse	Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director and Director of Commercial and Business Development	Akta No. 27 tanggal 14 Juni 2021 Deed No. 27 dated June 14, 2021	2021 – RUPS Tahunan 2026 2021 – Annual GMS 2026	1
Andi Hamdani	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Engineering	Akta No. 27 tanggal 14 Juni 2021 Deed No. 27 dated June 14, 2021	2021 – RUPS Tahunan 2026 2021 – Annual GMS 2026	1
Sumarno	Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Director of Finance and Human Capital	Akta No. 3 tanggal 4 April 2022 Deed No. 3 dated April 4, 2022	2022 – RUPS Tahunan 2027 2022 – 2027 Annual GMS	1

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Periode 18 April 2023- 5 September 2023
Table of Composition and Basis for Appointment of Directors for the Period 18 April 2023- 5 September 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Length of service	Periode Jabatan Period of Office
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama President Director	Akta Nomor 44 tanggal 18 April 2023 Deed Number 44 dated 18 April 2023	April 2023-RUPS Tahunan 2028 April 2023-2028 Annual GMS	1
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Engineering	Akta Nomor 44 tanggal 18 April 2023 Deed Number 44 dated 18 April 2023	April 2023-RUPS Tahunan 2028 April 2023-2028 Annual GMS	1
Sumarno	Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Director of Finance and Human Capital	Akta No. 3 tanggal 4 April 2022 Deed No. 3 April 4, 2022	2022 – RUPS Tahunan 2027 2022 – 2027 Annual GMS	1

Periode 5 September 2023-31 Desember 2023

Pada Periode 5 September 2023, kembali terjadi pergantian Direksi yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada 5 September 2023. RUPS Luar Biasa menerima pengunduran diri Bapak Sumarno sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia sejak tanggal pengundurannya, sekaligus menyetujui pengangkatan Bapak Wing Meganntoro sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

Dengan demikian, susunan dan komposisi Anggota Direksi IPCC terdiri dari 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang Direktur Utama yang merangkap Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis, dan 2 (dua) orang Direksi, masing-masing Direktur Operasi dan Teknik dan Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia. Berikut susunan dan komposisi anggota Direksi per 31 Desember 2023.

Period 5 September 2023-31 December 2023

In the period 5 September 2023, there was another change of Directors which was carried out through the Extraordinary General Meeting of Shareholders which was held on 5 September 2023. The Extraordinary GMS accepted the resignation of Mr Sumarno as Director of Finance and Human Capital from the date of his resignation, while also approving the appointment of Mr Wing Meganntoro as Director of Finance and Human Capital.

Thus, the structure and composition of the IPCC Board of Directors consists of 3 (three) people, 1 (one) President Director concurrently Acting Director of Commercial and Business Development, and 2 (two) Directors, respectively Director of Operations and Engineering and Director of Finance and Human Capital. The following is the structure and composition of members of the Board of Directors as of December 31, 2023.

Tabel Susunan dan Komposisi Direksi Per 31 Desember 2023
Table of Structure and Composition of the Board of Directors As of December 31, 2023

Nama Name	**Jabatan** Position	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Period of Office	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama merangkap Plt Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director concurrently Acting Director of Commercial and Business Development	April 2023	1	Akta Nomor 44 tanggal 18 April 2023 Deed Number 44 dated April 18, 2023
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Engineering	April 2023	1	Akta Nomor 44 tanggal 18 April 2023 Deed Number 44 dated April 18, 2023
Wing Megantoro	Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Director of Finance and Human Capital	September 2023	1	Akta Nomor 06 tanggal 5 September 2023 Deed Number 06 dated September 5, 2023

PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

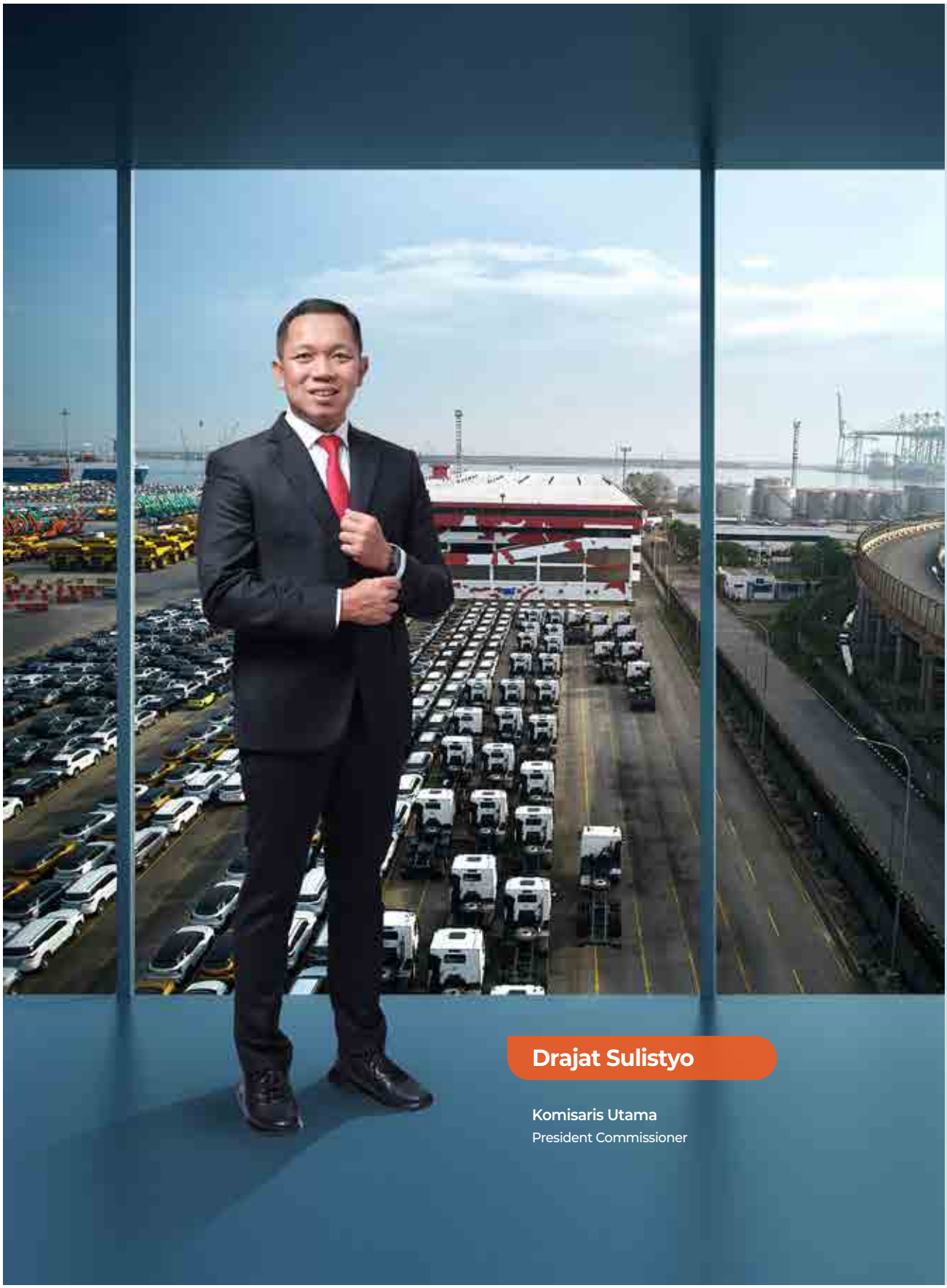

Drajat Sulistyo

Komisaris Utama
President Commissioner

Periode Jabatan:
April 2022-RUPS Tahunan 2027, Periode Pertama

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 44 tahun per 31 Desember 2023
Kelahiran Purworejo 27 Oktober 1979

Domisili
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Akta Berita Acara RUPSLB No. 27 Tanggal 13 April 202

Riwayat Pendidikan
- Diploma Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada (2002)
- Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Jakarta (2012)
- Master in Logistic dari Kuhne Logistic University (2014)

Sertifikasi
-

Riwayat Pekerjaan
- Staf Direktorat Teknik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Kantor Pusat (2003 – 2006)
- Staf Proyek Pembangunan Car Terminal Tanjung Priok (2006 2010)
- Supervisor Teknik Sipil PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi (2009 – 2010)
- Asisten Manager Teknik Sipil PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur (Januari 2010 – Juni 2010)
- Manager Teknik dan Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Bengkulu (2010 – 2012)
- Manager Proyek PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2012 – 2013)
- Manager Teknik dan Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur (2013 – 2015)
- Manager Teknik dan Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang (2015 – 2016).
- General Manager PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Bengkulu (2016 – 2018)
- General Manager PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Lampung (2020 – 2021).
- Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020 – September 2021)
- Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal periode oktober 2021-maret 2023
- Regional Head 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Februari 2023 – Sekarang

Rangkap Jabatan
Di IPCC
Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis

Di Lembaga/Perusahaan lain
Executive Directors Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Kepemilikan Saham IPCC
Tidak ada

Term of Office:
April 2022-2027 Annual GMS, First Period

Personal Data
Indonesia citizens
Age 44 years old as of December 31, 2023
Born in Purworejo October 27, 1979

Domicile
Jakarta, Indonesia

Legal Basis of Appointment
Deed of EGMS Minutes No. 27 April 13, 2022.

Educational Background
- Diploma in Civil Engineering from Universitas Gadjah Mada (2002)
- Bachelor of Civil Engineering from the Universitas Jakarta (2012)
- Master in Logistics from Kuhne Logistic University (2014)

Certification
-

Work Experience
- Staff of the Technical Directorate of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Head Office (2003 – 2006)
- Tanjung Priok Car Terminal Construction Project Staff (2006 - 2010)
- Civil Engineering Supervisor of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Jambi Branch (2009 – 2010)
- Assistant Civil Engineering Manager of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Teluk Bayur Branch (January 2010 – June 2010)
- Engineering and Information Systems Manager of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bengkulu Branch (2010 – 2012)
- Project Manager PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2012 – 2013)
- Engineering and Information Systems Manager of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Teluk Bayur Branch (2013 – 2015)
- Engineering and Information Systems Manager of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Palembang Branch (2015 – 2016).
- General Manager of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bengkulu Branch (2016 – 2018)
- General Manager of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Panjang Lampung Branch (2020 – 2021).
- President Director of PT Tanjung Priok Port (2020 – September 2021)
- President Director of PT Pelindo Multi Terminal for the period october 2021-march 2023
- Regional Head 2 at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) February 2023 – Present

Concurrent Position
At IPCC
Acting Director of Commercial and Business Development

In other Institutions/Companies
Executive Director of Regional 2 at PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Affiliated Relationships
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or Directors.

IPCC Share Ownership
None

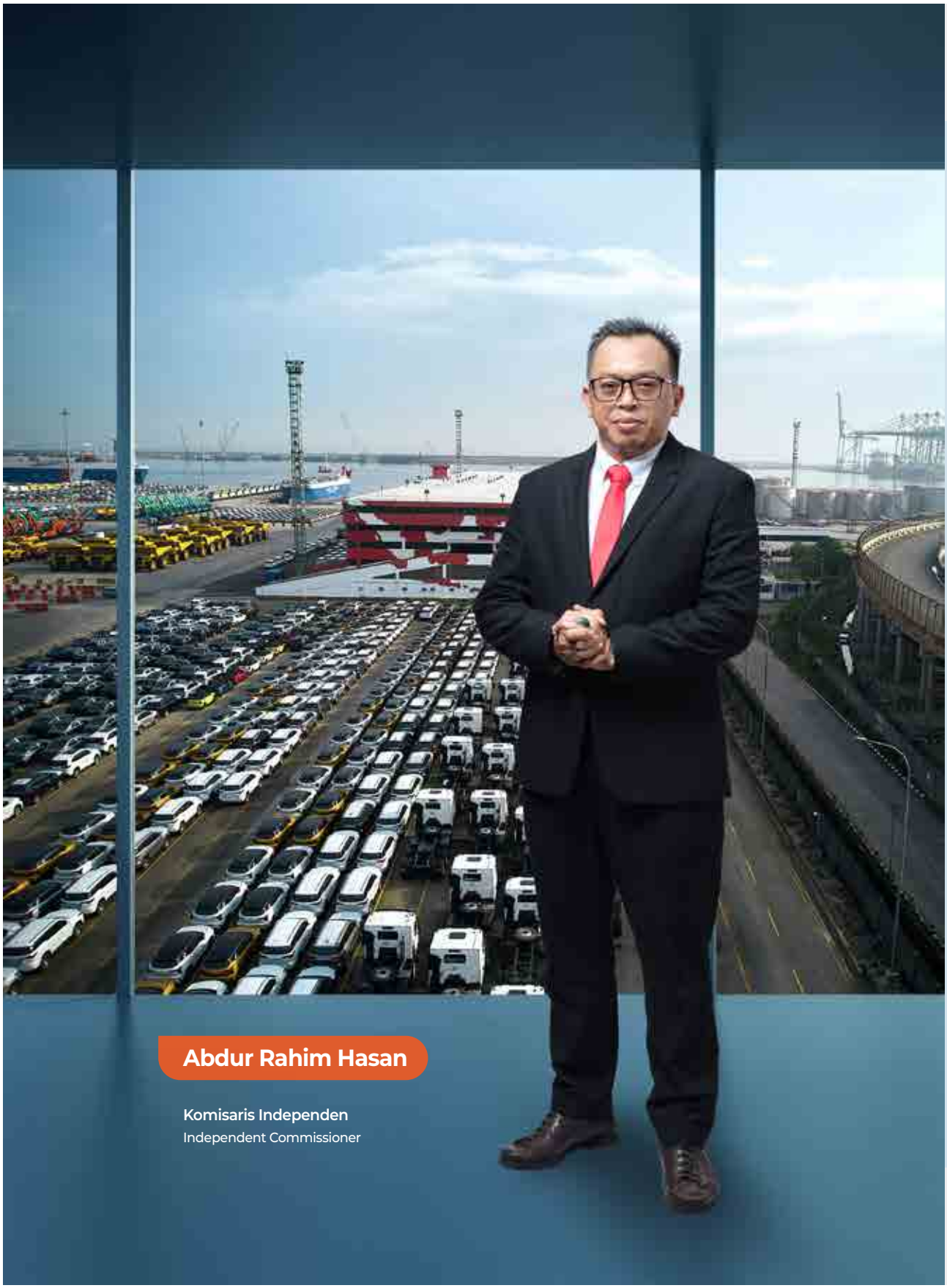

Abdur Rahim Hasan

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode Jabatan:
4 Agustus 2020- RUPS Tahunan Tahun 2025,

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 44 tahun per 31 Desember 2023
Kelahiran Purbalingga 13 Januari 1979

Domisili
Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Menjabat sebagai Komisaris Independen IPCC berdasarkan Akta Notaris Nomor: 48 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Hukum Universitas Azzahra Jakarta (2012)

Sertifikasi
-

Riwayat Pekerjaan
- Dewan Komisaris PT Srandil Steel (2012-2014)
- Dewan Komisaris PT PT Raja Tiga Sila (2014-2015)
- Dewan Komisaris PT Madina Mitra Teknik (2014-2019)
- Dewan Komisaris PT JPPI (2014-2018)
- Komisaris Utama/ PT JPPI (2018-2019)
- Dewan Komisaris/ PT JPPI (2019-2020)

Rangkap Jabatan
Di IPCC
Tidak ada

Di Lembaga/Perusahaan lain
Tidak ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Kepemilikan Saham IPCC
Tidak ada

Term of Office:
August 4, 2020- 2025 Annual GMS, First Period

Personal Data
Indonesia citizens
Age 44 years old as of December 31, 2023
Born in Purbalingga January 13, 1979

Domicile
North Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Legal Basis of Appointment
Appointed as Independent Commissioner of the IPCC based on Notarial Deed Number: 48 dated August 26, 2020 concerning Statement of Meeting Resolutions of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Educational Background
- Bachelor of Laws from Universitas Azzahra Jakarta (2012

Certification
-

Work Experience
- Board of Commissioners of PT Srandil Steel (2012-2014)
- Board of Commissioners of PT PT Raja Tiga Sila (2014-2015)
- Board of Commissioners of PT Madina Mitra Teknik (2014-2019)
- PT JPPI Board of Commissioners (2014-2018)
- President Commissioner/ PT JPPI (2018-2019)
- Board of Commissioners/ PT JPPI (2019-2020)

Concurrent Position
At IPCC
None

In other Institutions/Companies
None

Affiliated Relationships
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or Directors.

IPCC Share Ownership
None

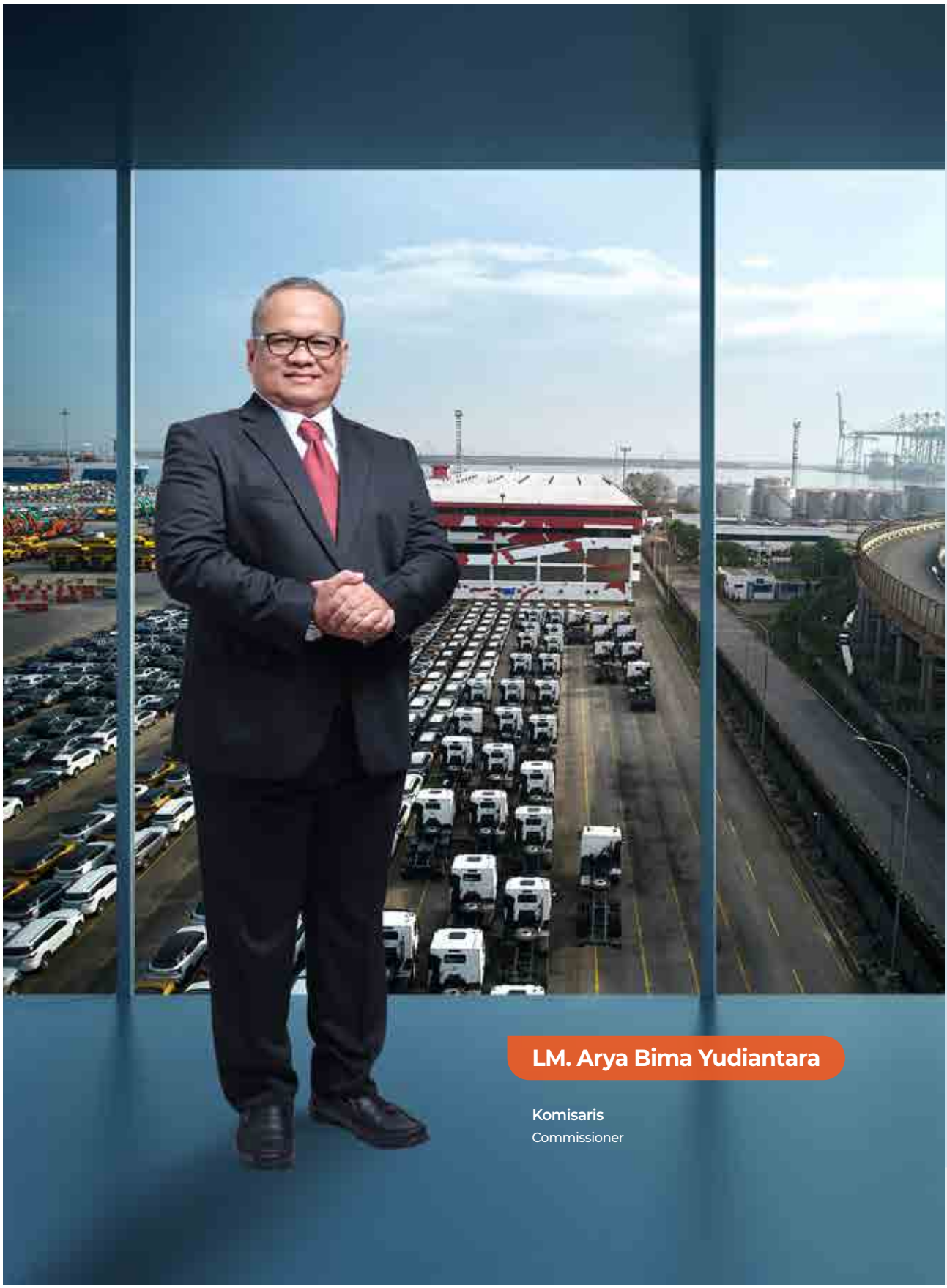

LM. Arya Bima Yudiantara

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan:
Juni 2021- RUPS Tahunan Tahun 2026, Periode Pertama,

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 56 tahun per 31 Desember 2023
Kelahiran Surakarta 19 Agustus 1967

Domisili
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Menjabat sebagai Komisaris Independen IPCC berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: 27 tanggal 14 Juni 2021.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Hukum dari Universitas Atmajaya (1997)

Sertifikasi
-

Riwayat Pekerjaan
- HRD PT Ning Pacific Motor, PT Wallsin Lippo Cikarang, PT Lippo Land, PT KYMCO Group (1997 – 2007)
- Direktur PT Prada Yasa (September 2007 – Agustus 2009)
- Manager Operasional PT Lumbung Mas (September 2009 – Juli 2014)
- VP Marketing Project PT Gistec Prima (September 2014 – 2021)

Rangkap Jabatan
Di IPCC
Tidak ada

Di Lembaga/Perusahaan lain
Tidak ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Kepemilikan Saham IPCC
Tidak ada

Term of Office:
June 2021- Annual GMS 2026, First Period

Personal Data
Indonesia citizens
Age 56 years old as of December 31, 2023
Born in Surakarta August 19, 1967

Domicile
West Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Legal Basis of Appointment
Appointed as Independent Commissioner of the IPCC based on the Deed of Minutes of the Extraordinary GMS of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number: 27 dated 14 June 2021.

Educational Background
- Bachelor of Laws from Universitas Atmajaya (1997)

Certification
-

Work Experience
- HRD of PT Ning Pacific Motor, PT Wallsin Lippo Cikarang, PT Lippo Land, PT KYMCO Group (1997 – 2007)
- Director of PT Prada Yasa (September 2007 – August 2009)
- Operations Manager at PT Lumbung Mas (September 2009 – July 2014)
- VP Marketing Project at PT Gistec Prima (September 2014 – 2021)

Concurrent Position
At IPCC
None

In other Institutions/Companies
None

Affiliated Relationships
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or Directors.

IPCC Share Ownership
None

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Selama tahun 2023, komposisi Dewan Komisaris IPCC tidak mengalami perubahan. Adapun susunan dan komposisi Dewan Komisaris IPCC terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan rincian 1 (satu) orang Komisaris Utama, dan 2 (dua) orang Komisaris Independen

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND REASONS FOR THE CHANGES

During 2023, the composition of the IPCC Board of Commissioners did not change. The structure and composition of the IPCC Board of Commissioners consists of 3 (three) people, with details of 1 (one) President Commissioner, and 2 (two) Independent Commissioners.

Tabel Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Per 31 Desember 2023
Table of Structure and Composition of the Board of Commissioners As of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Drajat Sulistyo	Komisaris Utama President Commissioner	April 2022-RUPST 2027 April 2022-AGM 2027	Ke-1 First	Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 27 Tanggal 13 April 2022 Deed of Extraordinary GMS Minutes No. 27 April 13, 2022
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Agutsus 2020- RUPST 2025 August, 2020-AGMS 2025	Ke-1 First	Menjabat sebagai Komisaris Independen IPCC berdasarkan Akta Notaris Nomor: 48 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Appointed as Independent Commissioner of the IPCC based on Notarial Deed Number: 48 dated August 26, 2020 concerning Statement of Meeting Resolutions of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
LM. Arya Bima Yudiantara	Komisaris Independen Independent Commissioner	Juni 2021-RUPST 2026 June 2021-AGMS 2026	Ke-1 First	Menjabat sebagai Komisaris Independen IPCC berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: 27 tanggal 14 Juni 2021. Appointed as Independent Commissioner of the IPCC based on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number: 27 dated June 14, 2021.

PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG TERJADI SETELAH TAHUN BUKU BERAKHIR

Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG TERJADI SETELAH TAHUN BUKU BERAKHIR

Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officers Profile

DIREKTORAT UTAMA
MAIN DIRECTORATE



Kamal Akhyar

Senior Manager SPI dan Manajemen Risiko
Senior Manager of SPI and Risk Management

Menjabat sejak 1 Januari 2023
Serving since January 1, 2023

Kewarganegaraan Citizens	:	Indonesia
Usia Age	:	47 tahun per 31 Desember 2023 47 year old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Jakarta Utara,DKI Jakarta, Indonesia North Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Join the company	:	1 Januari 2023 January 1, 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	• Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Sumatra Utara (1998) • Magister Sains dari Universitas Sumatra Utara (2005) • Magister Manajemen Transportasi dari Universitas Trisakti (2010) • Bachelor of Economics majoring in Management from Universitas Sumatra Utara (1998) • Master of Science from Universitas Sumatra Utara (2005) • Master of Transportation Management from Universitas Trisakti (2010)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Staf Kepala Urusan Umum Cabang Pelabuhan Belawan (1999) • Staf Umum Junior pada Divisi Umum Cabang Belawan (1999-2002) • Staf Penataan Administrasi Pesonalia Direktorat Pum Kantor Pusat (2002-2003) • Staf Pelatihan dan Pengembangan SDM Junior Tingkat I pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Organisasi dan SDM Kantor Pusat (2003-2005) • Asisten Manajer Personalia Cabang Pelabuhan Dumai (2005-2010) • Manajer Umum Cabang Pelabuhan Tanjung Balai Karimun (2010-2014) • Staf Bidang Project Manajement Office (PMO) Pengelolaan Alur PT Oiltanking di Cabang Pelabuhan TBK Senior pada Kantor Pusat (2014) • Sekretaris Project Manajement Office (PMO) Pengelolaan Alur Pelayaran (2014-2016) • Pengawas Bidang Khusus pada Satuan Pengawasan Internal Kantor Pusat (2016-2019) • Wakil Kepala Satuan Pengawasan Internal Kantor Pusat (2019-2020) • Deputy Seinor Vice President SPI Pengawasan SDM dan Umum (2020-2021) • Vice President Pengendalian Internal Supporting SPI pada Subholding Pelindo Multi Terminal (2021-2022) • Staff of the Head of General Affairs of the Belawan Port Branch (1999) • Junior General Staff at the Belawan Branch General Division (1999-2002) • Personnel Administration Structuring Staff of the Central Office Public Works Directorate (2002-2003) • Level I Junior HR Training and Development Staff in the field of Organizational and Planning Development Sector and Human Capital Head Office (2003-2005) • Assistant Personnel Manager Dumai Port Branch (2005-2010) • General Manager of Tanjung Balai Karimun Port Branch (2010-2014) • Project Management Office (PMO) Staff for PT Oiltanking Flow Management at the TBK Port Branch, Senior at • Head Office (2014) • Secretary of Project Management Office (PMO) Shipping Flow Management (2014-2016) • Special Field Supervisor at the Head Office Internal Monitoring Unit (2016-2019) • Deputy Head of Internal Monitoring Unit at Head Office (2019-2020) • Deputy Seinor Vice President SPI Human Capital and General Supervision (2020-2021) • Vice President Internal Control Supporting SPI at Pelindo Multi Terminal Subholding (2021-2022)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Manager Audit Internal dan Manajemen Risiko berdasarkan surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/1/1/1/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 1 Januari 2023 Served as Senior Manager of Internal Audit and Risk Management based on Board of Directors' Decree No. KP.10.02/1/1/1/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 1, 2023



Chandra Irawan

Senior Manager Sekretaris Perusahaan
Senior Manager of Corporate Secretary

Menjabat sejak 1 Februari 2022
Serving since February 1, 2022

Kewarganegaraan Citizens	:	Indonesia
Usia Age	:	42 tahun per 31 Desember 2023 42 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Pondok Bahar Permai C / 35, RT 04/ RW 03 Kelurahan Pondok Bahar, Karang Tengah, Kota Tangerang Pondok Bahar Permai C / 35, RT 04/ RW 03 Pondok Bahar Village, Karang Tengah, Tangerang City
Bergabung di Perusahaan Join the company	:	1 Febuari 2022 February 1, 2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	• Magister Manajemen dari Universitas Trisakti (2009) • Master of Science in International Transport and Logistics dari World Maritime University in collaboration with Shanghai Maritime University (2013) • Master of Management from Universitas Trisakti (2009) • Master of Science in International Transport and Logistics from World Maritime University in collaboration with Shanghai Maritime University (2013)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Senior Manager Corporate Secretary di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2023-Sekarang) • Senior Manager Marketing & Customer Relation di PT Pelabuhan Tanjung Priok (2021-2023) • Senior Deputy Vice President Institutional Relations di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2019-2021) Merangkap jabatan sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2019-2021) • di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2016-2019) Merangkap jabatan sebagai Sekretaris Dewan Komisaris di PT Integrasi Logistic Cipta Solusi (2016-2019) • Manager Terminal Penumpang di PT Pelabuhan Tanjung Priok (2014-2016) • Senior Manager of Corporate Secretary at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2023-Present) • Senior Manager of Marketing & Customer Relations at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2021-2023) • Senior Deputy Vice President of Institutional Relations at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2019-2021) concurrently serving as Secretary to the Board of Commissioners of PT Developer Pelabuhan Indonesia (2019-2021) • at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2016-2019) concurrently serving as Secretary to the Board of Commissioners at PT Integration Logistic Cipta Solusi (2016-2019) • Manager of Passenger Terminal at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2014-2016)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Manager Sekretaris Perusahaan berdasarkan surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/1/2/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 1 Februari 2023 Serves as Senior Manager of Corporate Secretary based on Board of Directors' Decree No. KP.10.02/1/2/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated 1 February 2023



Wasistianto

Senior Manager, Manajemen Mutu, HSE dan PFSO
Senior Manager, Quality Management, HSE and PFSO

Menjabat sejak 1 Oktober 2021
Serving since October 1, 2021

Kewarganegaraan Citizens	:	Indonesia
Usia Age	:	52 tahun per 31 Desember 2023 52 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Bekasi, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Join the company	:	1 Febuari 2012 February 1, 2012
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Manajemen Transportasi Laut dari STIE Kampus Ungu Jakarta (2006) Bachelor of Marine Transportation Management from Institute of Economic Science of Kampus Ungu Jakarta (2006)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Kepala Unit NKO PT Indonesia Kendaraan Terminal (2018) • Senior Manager, Manajemen Mutu, HSE dan PFSO (2021-2023) • Head of NKO Unit at PT Indonesia Kendaraan Terminal (2018) • Senior Manager, Quality Management, HSE and PFSO (2021-2023)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Manager Manajemen Mutu, HSE, dan PSFSO berdasarkan surat Keputusan Direksi No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 Serves as Senior Manager for Quality Management, HSE, and PSFSO based on Board of Directors' Decree No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021

DIREKTORAT KOMERSIAL DAN PENGEMBANGAN BISNIS
DIRECTORATE OF COMMERCIAL AND BUSINESS DEVELOPMENT



Roro Endah Dwi Liesly Puspita Sari

Senior Manager Strategi dan Pengembangan Bisnis
Senior Manager of Strategy and Business Development

Menjabat sejak 1 September 2022
Serving since September 1 2022

Kewarganegaraan Citizens	:	Indonesia
Usia Age	:	43 tahun per 31 Desember 2023 43 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Jakarta Timur, Indonesia, Indonesia East Jakarta, Indonesia, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Join the company	:	1 September 2022 September 1, 2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	• S1 Manajemen Universitas Gadjah Mada (2004) • S2, Erasmus Universteit Rotterdam, 2014 • Bachelor of Management from Universitas Gadjah Mada (2004) • Masters, Erasmus Universteit Rotterdam, 2014
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Asmen Komersial & Pengembangan Bisnis Tanjung Priok (2014) • Asmen Customer Service PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015) • Junior Analyst yang diperbantukan pada PT Pelabuhan Tanjung Priok (2018) • Deputy Vice President Pelayanan Pelanggan PT Pelabuhan Tanjung Priok (2018) • Deputy Vice President Hubungan Palnggan Non Peti Kemas Kantor Pusat (2019) • Departement Head Pemasaran Regional (2021). • ASM of Tanjung Priok Commercial & Business Development (2014) • ASM of Customer Service at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015) • Junior Analyst seconded to PT Pelabuhan Tanjung Priok (2018) • Deputy Vice President of Customer Service at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2018) • Deputy Vice President for Non-Container Customer Relations Head Office (2019) • Department Head of Regional Marketing (2021).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Manager Strategi dan Pengembangan Bisnis berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/1/9/3/RKTK/SDM A/PLND-22 tanggal 1 September 2022 Served as Senior Manager of Strategy and Business Development based on Board of Directors' Decree No. KP.10.02/1/9/3/RKTK/SDM A/PLND-22 dated September 1, 2022



Nugroho Atmosudiro

Senior Manager KomersialSenior Manager of Commercial

Menjabat sejak 1 Oktober 2021
Serving since October 1, 2021

Kewarganegaraan Citizens	:	Indonesia
Usia Age	:	39 tahun per 31 Desember 2023 39 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Cilincing,DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Join the company	:	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	S2, Netherlands Maritime University, 2014
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Senior Manager Komersial, Asisten Manager Lini II dan VAS PT Pelabuhan Tanjung Priok (2014-2018) • Asisten Senior Manager Pengembangan Bisnis Pendukung PT IPC • Terminal Petikemas (2018-2020) • Deputy General Manager Komersial Cabang Pelabuhan Panjang PT pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021). • Senior Manager of Commercial, Assistant Manager of Line II and VAS PT Pelabuhan Tanjung Priok (2014-2018) • Assistant Senior Manager of Supporting Business Development at PT IPC • Terminal Petikemas (2018-2020) • Deputy General Manager of Commercial for the Panjang Port Branch of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Manager Komersial berdasarkan surat Keputusan Direksi No. KP.10.01/1/10/1/ SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 Served as Senior Commercial Manager based on Board of Directors' Decree No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/ PLND-21 dated October 1, 2021

DIREKTORAT OPERASI DAN TEKNIK
DIRECTORATE OF OPERATIONS AND ENGINEERING



Wasistianto

Plt. Senior Manager Operasi
Acting Senior Manager of Operations

Menjabat sejak 29 Desember 2023
Serving since December 29, 2023

Kewarganegaraan Citizens	:	Indonesia
Usia Age	:	52 tahun per 31 Desember 2023 52 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Bekasi, Jawa Barat Indonesia Bekasi, West Java Indonesia
Bergabung di Perusahaan Join the company	:	01 Oktober 1994 October 1, 1994
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Manajemen Transportasi Laut dari STIE Kampus Ungu Jakarta (2006) Bachelor of Marine Transportation Management from Institute of Economic Science of Kampus Ungu Jakarta (2006)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Manajer Operasi Car Terminal (2012) • Kepala Unit MKO Perseroan (2015) • Senior Manager Manajemen Mutu, HSE dan PFSO (2021) • Operations Manager of Car Terminal (2012) • Head of the Company's MKO Unit (2015) • Senior Manager of Quality Management, HSE and PFSO (2021)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Pelaksana Harian Senior Manager Operasi dan Teknik berdasarkan Surat Perintah Nomor: KP.20.01/29/12/3/SDMU/DIRKEU/IKT-23 tanggal 29 Desember 2023 Served as Daily Acting Senior Manager of Operations and Engineering based on Order Number: KP.20.01/29/12/3/SDMU/DIRKEU/IKT-23 dated December 29, 2023



Tatan Sontana

Senior Manager Teknik dan Sistem Informasi
Senior Manager of Engineering and Information Systems

Menjabat sejak 1 Desember 2022
Serving since December 1, 2022

Kewarganegaraan Citizens	:	Indonesia
Usia Age	:	52 tahun per 31 Desember 2023 52 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Bogor, Jawa Barat, Indonesia Bogor, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Join the company	:	1 Desember 2022 December 1, 2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	S1, Universitas Persada Indonesia YAI, 2001 Bachelor Degree at Universitas Persada Indonesia YAI, 2001
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Strategi Bisnis & Manajemen Informasi Kantor Pusat (2014 – 2015) • Manager Sistem Informasi IPC Terminal Petikemas (2016) • Senior Manager Sistem Informasi IPC Terminal Petikemas (2017) • Project Manager Kantor Pusat (2020). • Head Office Business Strategy & Information Management (2014 – 2015) • Information System Manager of IPC Terminal Petikemas (2016) • Senior Manager of IPC Terminal Petikemas Information Systems (2017) • Head Office Project Manager (2020).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Manager Teknik dan SI berdasarkan surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/28/11/6/RKTK/SDMA/PLND-22 tanggal 28 November 2022 Served as Senior Manager of Engineering and SI based on Board of Directors' Decree No. KP.10.02/28/11/6/RKTK/SDMA/PLND-22 dated November 28, 2022



Kusno Utomo

Senior Manager Terminal Satelit
Senior Manager of Satellite Terminal

Menjabat sejak 1 Oktober 2021
Serving since October 1, 2021

Kewarganegaraan Citizens	:	Indonesia
Usia Age	:	53 tahun per 31 Desember 2023 53 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Bekasi, Jawa Barat Indonesia Bekasi, West Java Indonesia
Bergabung di Perusahaan Join the company	:	1 Juli 2017 July 1, 2017
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	S1, Ekonomi Universitas Jember, 1995 Bachelor of Economics, Universitas Jember, 1995

Pengalaman Kerja Work Experience	:	• VP Terminal Domestik PT Indonesia Kendaraan Terminal (2017) • Senior Manager Terminal Satelit (2021) • VP Domestic Terminal at PT Indonesia Kendaraan Terminal (2017) • Senior Manager of Satellite Terminal (2021)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Manager Terminal Satelit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UT MA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 Serves as Senior Manager of Satellite Terminal based on Board of Directors' Decree No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UT MA/PLND-21 dated October 1, 2021

DIREKTORAT KEUANGAN DAN SDM
DIRECTORATE OF FINANCE AND HC



Agus Wahyudi

Senior Manager Keuangan
Senior Manager of Finance

Menjabat sejak 01 Oktober 2021
Serving since October 1, 2021

Kewarganegaraan Citizens	:	Indonesia
Usia Age	:	49 tahun per 31 Desember 2023 49 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Bogor, Jawa Barat, Indonesia Bogor, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Join the company	:	22 Desember 2000 December 22, 2000
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	S1 Akuntasi, Universitas Muhammadiyah, 1999 Bachelor of Accounting, Universitas Muhammadiyah, 1999
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Vice President Keuangan (2020) • DVP Pajak PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2018-2020) • DGM Keuangan dan SDM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi (2017-2018) • Vice President of Finance (2020) • DVP Tax PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2018-2020) • DGM Finance and Human Capital PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Jambi Branch (2017-2018)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Manager Keuangan berdasarkan surat Keputusan Direksi No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 Served as Senior Finance Manager based on Board of Directors Decree No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021



Safrial

Senior Manager SDM dan Layanan Umum
Senior Manager of HC and General Services

Menjabat sejak 1 Mei 2022
Serving since May 1, 2022

Kewarganegaraan Citizens	:	Indonesia
Usia Age	:	52 tahun per 31 Desember 2023 52 years old as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Join the company	:	1 Januari 1999 January 1, 1999
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	• S1 Teknik & Manajemen Industri dari Universitas Sumatera Utara (1997) • S2, Universitas Gadjah Mada, 2013 • Bachelor's Degree in Industrial Engineering & Management from Universitas Sumatera Utara (1997) • Masters at Universitas Gadjah Mada, 2013
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Senior Manager Perencanaan & Pengembangan Usaha (2013-2018) • Senior Manager Pembinaan Anak Perusahaan (2018-2019) • SVP Pengadaan (2019-2021) • Senior Vice President Kerjasama Usaha dan Pembinaan Perusahaan pada divisi Kerjsama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan-Direktorat Strategi dan Komersial (2021-2022) • Senior Manager of Business Planning & Development (2013-2018) • Senior Manager of Subsidiary Development (2018-2019) • SVP Procurement (2019-2021) • Senior Vice President for Business Cooperation and Corporate Development in the Business Cooperation and Subsidiary Development division-Directorate of Strategy and Commercial (2021-2022)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Manager SDM dan Umum berdasarkan surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/3/1/1/ RKTK/UTMA/PLND-23 tanggal 1 Januari 2023 Served as Senior Manager of HR and General Affairs based on Board of Directors' Decree No. KP.10.02/3/1/1/ RKTK/UTMA/PLND-23 dated January 1, 2023

DEMOGRAFI KARYAWAN

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS



Sumber Daya Manusia merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan mendukung Perusahaan dalam mewujudkan tujuan Perusahaan. Untuk itu, IPCC secara berkesinambungan melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM. IPCC juga berusaha menciptakan organisasi yang efektif, efisien, serta kuat dan mampu menjawab setiap tantangan dalam dunia bisnis. Seiring pertumbuhan usaha Perusahaan, peningkatan jumlah karyawan pun terjadi.

Per 31 Desember 2023, jumlah pegawai Perusahaan mencapai 435 orang pegawai, mengalami peningkatan sebanyak 4,07% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 418 orang pegawai. Peningkatan tersebut terjadi karena karena ekspansi bisnis di terminal Balikpapan dan kebutuhan karyawan di IPCC Jakarta. Berikut data demografi karyawan IPCC per 31 Desember 2023 dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya.

Human Capital is an important component in improving performance and supporting the Company in realizing the Company's goals. For this reason, the IPCC continuously develops and improves the quality and capabilities of Human Capital. The IPCC also tries to create an organization that is effective, efficient, and strong and is able to answer every challenge in the business world. As the Company's business grows, the number of employees also increases.

As of December 31, 2023, the Company's number of employees reached 435 employees, an increase of 4.07% from the previous year which amounted to 418 employees. This increase occurred due to business expansion at the Balikpapan terminal and the need for employees at IPCC Jakarta. The following is IPCC employee demographic data as of December 31, 2023 and the comparison with the previous year.

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Ketenagakerjaan (Orang)
Number and Composition of Employees by Employment Status (Person)

Status	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L/M	P/F	Jumlah (orang) Total (person)	Komposisi Composition (%)	L/M	P/F	Jumlah (orang) Total (person)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Total (person)	Persentase Percentage (%)	
Organik Organic	74	11	85	19,54	64	11	75	17,42	10	13,33%	▲
Kontrak Contract	1	-	1	0,23	3	-	3	0,67	(2)	-66,67%	▼
Alih Daya Outsourcing	331	18	349	80,23	327	13	340	81,29	9	2,65%	▲
Jumlah Total	**406**	**29**	**435**	**100,00**	**394**	**24**	**418**	**100,00**	**17**	**4,07%**	▲

L=Laki-laki; P=Perempuan
M=Male; F=Female

Jumlah dan Komposisi Karyawan Organik Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang)
Number and Composition of Organic Employees by Education Level (Person)

Pendidikan Education	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L/M	P/F	Jumlah (orang) Total (person)	Komposisi Composition (%)	L/M	P/F	Jumlah (orang) Total (person)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Total (person)	Persentase Percentage (%)	
S2 – Pascasarjana Master's Degree - Postgraduate	13	3	16	18,83	11	3	14	17,33	2	14,29%	▲
S1 – Sarjana Bachelor's Degree	30	7	37	43,53	24	7	31	44,00	6	19,35%	▲
Diploma	8	1	9	10,58	8	1	9	10,67	-	-	-
SLTA dan SLTP High School and Junior High School	23	-	23	27,06	21	-	21	28,00	2	9,52%	▲
Jumlah Total	**74**	**11**	**85**	**100,00**	**64**	**11**	**75**	**100,00**	**10**	**13,33%**	▲

L=Laki-laki; P=Perempuan
M=Male; F=Female

Jumlah dan Komposisi Karyawan Organik Berdasarkan Usia (Orang)
Number and Composition of Organic Employees by Age (Person)

Rentang Usia Age Range	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L/M	P/F	Jumlah (orang) Total (person)	Komposisi Composition (%)	L/M	P/F	Jumlah (orang) Total (person)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Total (person)	Persentase Percentage (%)	
>55 tahun/years old	1	-	1	1,17	1	-	1	1,33	-	-	
51-55 tahun/years old	14	-	14	16,47	12	-	12	16,00	2	16,67	▲
47-50 tahun/years old	10	-	10	11,76	6	-	6	8,00	4	66,67	▲
37-46 tahun/years old	39	4	43	50,58	25	4	29	38,67	14	48,28	▲
26-36 tahun/years old	10	7	17	20,00	20	7	27	36,00	(10)	(37,04)	▼
<26 tahun/years old	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Total	**74**	**11**	**85**	**100,00**	**64**	**11**	**75**	**100,00**	**10**	**13,33**	▲

L=Laki-laki; P=Perempuan
M=Male; F=Female

Jumlah dan Komposisi Karyawan Organik Berdasarkan Golongan/Jabatan
Number and Composition of Organic Employees by Rank

Golongan Group	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L/M	P/F	Jumlah (orang) Total (person)	Komposisi Composition (%)	L/M	P/F	Jumlah (orang) Total (person)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Total (person)	Persentase Percentage (%)	
3	-	-	-	-	1	-	1	1,33	-	-	-
4	2	-	2	2,35	-	-	-	-	2	100%	▲
5	3	-	3	3,53	2	-	2	2,67	1	50,00%	▲
6	2	-	2	2,35	1	-	1	1,33	1	100%	▲
7	5	1	6	7,06	5	1	6	8,00	-	-	-
8	2	-	2	2,35	1	-	1	1,33	1	100,00%	▲
9	12	7	19	22,36	5	1	6	8,00	13	216,67%	▲
10	9	1	10	11,77	12	7	19	25,33	-9	-47,37%	▼
11	4	1	5	5,88	5	1	6	8,00	-1	-16,67%	▼
12	4	-	4	4,70	3	-	3	4,00	1	33,33%	▲
13	4	1	5	5,88	3	1	4	5,33	1	25,00%	▲
14	14	-	14	16,47	13	-	13	17,33	1	7,69%	▲
15	10	-	10	11,77	10	-	10	13,33	-	-	-
16	2	-	2	2,35	2	-	2	2,67	-	-	-
18	1	-	1	1,18	1	-	1	1,33	-	-	-

L=Laki-laki; P=Perempuan
M=Male; F=Female

Jumlah dan Komposisi Karyawan Organik Berdasarkan Unit Kerja (Orang)
Number and Composition of Organic Employees Based on Work Unit (Person)

Unit Kerja Work Unit	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L/M	P/F	Jumlah (orang) Total (person)	Komposisi Composition (%)	L/M	P/F	Jumlah (orang) Total (person)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Total (person)	Persentase Percentage (%)	
Direksi Board of Directors	3	-	3	3,53	3	-	-	4,00	3	100%	▲
Audit Internal & Manajemen Risiko Internal Audit & Risk Management	3	2	5	5,88	-	2	2	2,67	3	150,00%	▲
Sekretaris Perusahaan Company Secretary	1	2	3	3,53	-	2	2	2,67	1	50,00%	▲
Divisi Manajemen Mutu, HSE & PFSO Quality Management Division, HSE & PFSO	3	1	4	4,70	3	1	4	5,33	-	-	-
MKO – MTKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divisi Komersial Commercial Division	3	1	4	4,70	3	1	4	5,33	-	-	-
Divisi Strategi & Pengembangan Bisnis Strategy & Business Development Division	1	2	3	3,53	1	2	3	4,00	-	-	-
Divisi Operasi Operations Division	23	-	23	27,06	-	-	-	-	23	100%	▲
Divisi Terminal Satelit Satellite Terminal Division	21	-	21	24,71	15	-	15	20,00	6	40,00%	▲
Divisi Teknik & Sistem Informasi Engineering & Information Systems Division	7	-	7	8,24	7	-	7	9,33	-	-	-
Divisi Keuangan Finance Division	3	3	6	7,06	3	3	6	8,00	-	-	-
Divisi SDM dan Umum HC and General Division	6	-	6	7,06	5	-	5	6,67	1	20,00%	▲
Jumlah Total	**74**	**11**	**85**	**100,00**	**64**	**11**	**75**	**100,00**	**10**	**13,33%**	▲

L=Laki-laki; P=Perempuan
M=Male; F=Female

Jumlah dan Komposisi Berdasarkan Wilayah Kerja (Orang)
Number and Composition by Working Area (Person)

Wilayah Kerja Working area	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L/M	P/F	Jumlah (orang) Total (person)	Komposisi Composition (%)	L/M	P/F	Jumlah (orang) Total (person)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Total (person)	Persentase Percentage (%)	
Kantor Pusat di Jakarta Head Office in Jakarta	62	11	72	84,70	52	11	62	82,67	10	16,13%	▲
Kantor Manajemen Kerja Sama Operasi di Gresik Operations Cooperation Management Office in Gresik	-	-	1	1,18	-	-	1	1,33	-	-	-
Kantor Satelit di Makassar Satellite Office in Makassar	7	-	7	8,24	7	-	7	9,33	-	-	-
Kantor Satelit di Pontianak Satellite Office in Pontianak	3	-	3	3,53	3	-	3	4,00	-	-	-
Kantor Satelit di Medan Satellite Office in Medan	2	-	2	2,35	2	-	2	2,67	-	-	-
Jumlah Total	**74**	**11**	**85**	**100,00**	**64**	**11**	**75**	**100,00**	**10**	**13,33%**	▲

L=Laki-laki; P=Perempuan
M=Male; F=Female

Jumlah dan Komposisi Berdasarkan Jenis Kelamin (Orang)
Number and Composition by Gender (Person)

Jenis Kelamin Gender	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase(Decrease)		
	L/M	P/F	Jumlah (orang) Total (person)	Komposisi Composition (%)	L/M	P/F	
Laki-laki Male	74	87,05	64	85,33	10	15,63%	▲
Perempuan Female	11	12,95	11	14,67	-	-	-
Jumlah Total	**85**	**100,00**	**75**	**100,00**	**10**	**13,33%**	▲

L=Laki-laki; P=Perempuan
M=Male; F=Female



Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Structure and Composition

Kepemilikan Saham IPCC
IPCC Share Ownership

Pemegang Saham Shareholders	31 Desember 2023 December 31, 2023			1 Januari 2023 January 1, 2023		
	Jumlah Saham (lembar) Number of shares (shares)	**Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp-ribu)** Issued and Fully Paid-up Capital (Rp-thousand)	**Persentase Kepemilikan** Ownership Percentage **(%)**	**Jumlah Saham (lembar)** Number of shares (shares)	**Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp-ribu)** Issued and Fully Paid-up Capital (Rp-thousand)	**Persentase Kepemilikan** Ownership Percentage **(%)**
Nilai Nominal Saham = Rp100/lembar saham Nominal Value of Shares = Rp100/share						
Kepemilikan saham 5% atau lebih Share ownership of 5% or more						
PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT")	129.614.475	1.296.144.749	71,28%	129.614.475	1.296.144.749	71,28%
PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	10.068.260	100.682.600	0,72%	10.068.260	100.682.600	5,54%
Kepemilikan di bawah 5% Ownership below 5%						
PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")	1.309.237	13.092.371	5,54%	1.309.237	13.092.371	0,72%
Publik (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%) Public (respectively with ownership below 5%)	40.846.510	408.465.100	22,46%	40.846.510	408.465.100	22,46%
Jumlah Total	**181.838.482**	**1.818.384.820**	**100%**	**181.838.482**	**1.818.384.820**	**100%**

Komposisi Pemegang Saham IPCC Per 31 Desember 2023
Composition of IPCC Shareholders as of December 31, 2023

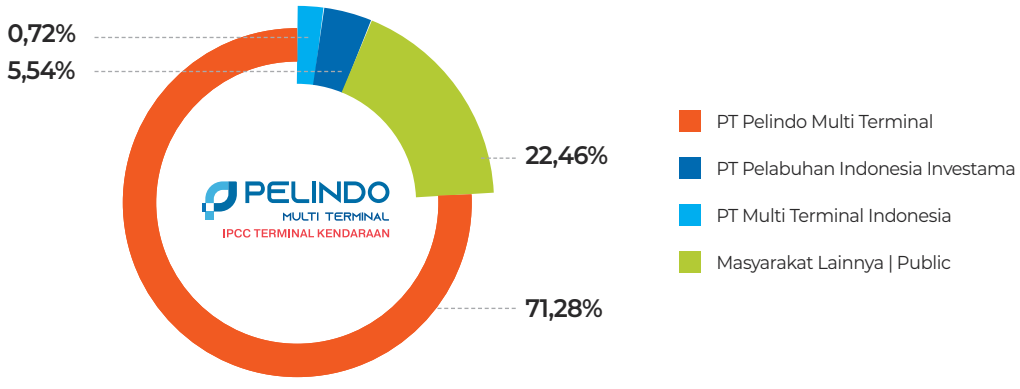

Informasi Persentase Kepemilikan Tidak Langsung atas Saham IPCC oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada Awal dan Akhir Tahun Buku

Information on the Percentage of Indirect Ownership of IPCC Shares by the Board of Directors and Board of Commissioners at the Beginning and End of the Fiscal Year

Nama Name	Jabatan Position	1 Januari 2023 January 1, 2023				31 Desember 2023 December 31, 2023			
		Kepemilikan Langsung Direct Ownership		Kepemilikan Tidak Langsung Indirect Ownership		Kepemilikan Langsung Direct Ownership		Kepemilikan Tidak Langsung Indirect Ownership	
		Jumlah Saham (lembar) Number of shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
Direksi Board of Directors									
Rio T.N Lasse*	Direktur Utama President Director	-	-	-	-	-	-	-	-
Andi Hamdani*	Direktur Utama President Director	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumarno*	Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Director of Finance and Human Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama President Director	-	-	-	-	354.000	0,02	-	-
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Engineering	-	-	-	-	200.000	0,01	-	-
Wing Megantoro	Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Director of Finance and Human Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Dewan Komisaris Board of Commissioner									
Drajat Sulistyo	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-	-	-	-	-	-
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-	-
LM. Arya Bima Yudiantara	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-	-

Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan Per Akhir Tahun Buku
Number of Shareholders and Percentage of Ownership as of the End of the Fiscal Year

Status Pemilik Owner Status	31 Desember 2023 December 31, 2023			1 Januari 2023 January 1, 2023		
	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of shares(shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
Pemodal Nasional National Investor						
Ritel Domestik Domestic Retail	Ritel Domestik Domestic Retail	Ritel Domestik Domestic Retail	Ritel Domestik Domestic Retail	Ritel Domestik Domestic Retail	Ritel Domestik Domestic Retail	Ritel Domestik Domestic Retail
PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS	PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS	PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS	PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS	PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS	PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS	PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS
Institusi Domestik Domestic Institutions	Institusi Domestik Domestic Institutions	Institusi Domestik Domestic Institutions	Institusi Domestik Domestic Institutions	Institusi Domestik Domestic Institutions	Institusi Domestik Domestic Institutions	Institusi Domestik Domestic Institutions
LEMBAGA INDONESIA INDONESIAN INSTITUTION	LEMBAGA INDONESIA INDONESIAN INSTITUTION	LEMBAGA INDONESIA INDONESIAN INSTITUTION	LEMBAGA INDONESIA INDONESIAN INSTITUTION	LEMBAGA INDONESIA INDONESIAN INSTITUTION	LEMBAGA INDONESIA INDONESIAN INSTITUTION	LEMBAGA INDONESIA INDONESIAN INSTITUTION
Sub Total	Sub Total	Sub Total	Sub Total	Sub Total	Sub Total	Sub Total
Pemodal Asing Foreign Investors	Pemodal Asing Foreign Investors	Pemodal Asing Foreign Investors	Pemodal Asing Foreign Investors	Pemodal Asing Foreign Investors	Pemodal Asing Foreign Investors	Pemodal Asing Foreign Investors
Ritel Asing Foreign Retail	Ritel Asing Foreign Retail	Ritel Asing Foreign Retail	Ritel Asing Foreign Retail	Ritel Asing Foreign Retail	Ritel Asing Foreign Retail	Ritel Asing Foreign Retail
Institusi/Badan Usaha Asing Foreign Institutions/ Business Entities	Institusi/Badan Usaha Asing Foreign Institutions/ Business Entities	Institusi/Badan Usaha Asing Foreign Institutions/ Business Entities	Institusi/Badan Usaha Asing Foreign Institutions/ Business Entities	Institusi/ Badan Usaha Asing Foreign Institutions/ Business Entities	Institusi/Badan Usaha Asing Foreign Institutions/ Business Entities	Institusi/Badan Usaha Asing Foreign Institutions/ Business Entities
Sub Total	Sub Total	Sub Total	Sub Total	Sub Total	Sub Total	Sub Total
Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
Pemodal Nasional National Investor						
PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS	PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS	PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS	PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS	PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS	PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS	PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS
Institusi Domestik Domestic Institutions	Institusi Domestik Domestic Institutions	Institusi Domestik Domestic Institutions	Institusi Domestik Domestic Institutions	Institusi Domestik Domestic Institutions	Institusi Domestik Domestic Institutions	Institusi Domestik Domestic Institutions
LEMBAGA INDONESIA INDONESIAN INSTITUTION	LEMBAGA INDONESIA INDONESIAN INSTITUTION	LEMBAGA INDONESIA INDONESIAN INSTITUTION	LEMBAGA INDONESIA INDONESIAN INSTITUTION	LEMBAGA INDONESIA INDONESIAN INSTITUTION	LEMBAGA INDONESIA INDONESIAN INSTITUTION	LEMBAGA INDONESIA INDONESIAN INSTITUTION
PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS	PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS	PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS	PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS	PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS	PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS	PERORANGAN INDONESIA INDONESIAN INDIVIDUALS

Rincian Nama Pemegang Saham yang Meliputi 20 Pemegang Saham Terbesar dan Persentase Kepemilikannya
Details of Shareholder Names including the 20 Largest Shareholders and the Ownership Percentage

Per 1 Januari 2023
January 1, 2023

No	Nama Pemegang Saham Name of Shareholders	Status	Jumlah Saham (lembar) Number of shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
1	PT Pelindo Multi Terminal	Perusahaan Terbatas Limited Liability Company	1296,144,749	71.28
2	PT Pelabuhan Indonesia Investama	Perusahaan Terbatas Limited Liability Company	100,682,600	5.54
3	PT Pelindo Multi Terminal	Perusahaan Terbatas Limited Liability Company	1296,144,749	71.28
4	PT Pelabuhan Indonesia Investama	Perusahaan Terbatas Limited Liability Company	100,682,600	5.54

Per 31 Desember 2023
December 31, 2023

No	Nama Pemegang Saham Name of Shareholders	Status	Jumlah Saham (lembar) Number of shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
1	PT Pelindo Multi Terminal	Perusahaan Terbatas Limited Liability Company	1296,144,749	71.28
2	PT Pelabuhan Indonesia Investama	Perusahaan Terbatas Limited Liability Company	100,682,600	5.54
3	BNYM RE ENSIGN PEAK ADV, INC.	Lembaga - Asing Institution - Foreign	4,466,200	0.25
4	Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom S/A Bahana Tcw	Yayasan Foundation	4,200,500	0.23
5	Banque Pictet And Cie Sa /Permodalan Nasional Berhad	Lembaga - Asing Institution - Foreign	3,576,600	0.20

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI PERUSAHAAN, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, SAMPAI KEPADA PEMILIK INDIVIDU

PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT") merupakan pemegang saham utama IPCC dengan kepemilikan sebesar 71,28%. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo) memiliki 99,99% saham SPMT dan menjadi pemegang saham utama SPMT. Sementara Pemerintah Indonesia merupakan pemegang saham utama Pelindo dengan kepemilikan sebesar 100% Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemilik akhir dari IPCC.

MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDERS OF THE COMPANY, BOTH DIRECTLY AND INDIRECTLY, UP TO INDIVIDUAL OWNERS

PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT") is the major shareholder of IPCC with ownership of 71.28%. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo) owns 99,99% of SPMT shares and is the major shareholder of SPMT. Meanwhile, the Government of Indonesia is the major shareholder of Pelindo with ownership of 100% Thus, the Government of the Republic of Indonesia is the final owner of IPCC.



Nama Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura Bersama

Name of Subsidiaries, Associates, Joint Venture Company

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, perusahaan ventura bersama. Perusahaan memiliki entitas operasi bersama, yaitu Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia dengan kepemilikan sebesar 45,00%.

Until the end of 2023, the Company does not have any subsidiaries, associates, or joint venture companies. The Company has a joint operating entity, namely the Maspion Indonesia Car Terminal Operational Cooperation Management with ownership of 45.00%.

Nama Perusahaan Company Name	**Tempat Kedudukan** Domicile	**Kegiatan Usaha** Business Activities	**Tahun Pendirian** Year of Establishment	**Tahun Penyertaan** Year of Participation	**Persentase Kepemilikan** Ownership Percentage	**Aset** Asset		**Status Operasi** Operation Status
						2023 (Rp-juta) (Rp-million)	**2022 (Rp-juta)** (Rp-million)	
Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia ("MKO MTKI") Management of Maspion Indonesia Car Terminal Operation Cooperation ("MKO MTKI")	Gresik, Jawa Timur/ East Java	Terminal Kendaraan	2015	2015	45%	3.213	2.752	Beroperasi Operating

Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Kendaraan Terminal Indonesia

Maspion Operational Cooperation Management for Indonesia Terminal Car



Pada 21 Agustus 2015, Perusahaan dan PT Maspion Industrial Estate ("MIE") membentuk perusahaan joint operation bernama Manajemen Kerja Sama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia ("MKO Maspion") yang berkedudukan di Gresik. Porsi kepemilikan saham Perusahaan terhadap MKO Maspion adalah sebesar 45%.

On August 21, 2015, the Company and PT Maspion Industrial Estate ("MIE") formed a joint operation company named Maspion Terminal Kendaraan Indonesia Operation Cooperation Management ("MKO Maspion") which is domiciled in Gresik. The Company's share ownership portion of MKO Maspion is 45%.



Struktur Grup Perusahaan

Company Group Structure

Perusahaan adalah bagian dari Pelindo Group dimana pasca merger Pelindo, posisi Perusahaan berada di bawah *Sub Holding* PT Pelindo Multi Terminal yang merupakan bagian dari kluster Non Peti Kemas. Berikut adalah skema struktur grup Pelindo:

The Company is part of the Pelindo Group where after the Pelindo merger, the Company's position is under the PT Pelindo Multi Terminal Sub Holding which is part of the Non Container Cluster. The following is the Pelindo group structure scheme:



Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham

Chronology of Share Issuance and/or Listing

Penawaran Saham Perdana

17 April 2018

Perusahaan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Indonesia Kendaraan Terminal Tahun 2018 melalui Surat No. PR09/4117/IKT-18 tertanggal 17 April 2018 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta.

Penyampaian tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM") dan perubahan-perubahannya, antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

28 Juni 2018

Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK.

9 Juli 2018

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/"IPO") sebanyak 509.147.700 lembar saham biasa atas nama, atau sebesar 28% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100/lembar saham, dan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.640/lembar saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS).

Perusahaan memperoleh dana sebesar Rp835.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dari aksi korporasi ini. Seluruh dana tersebut sudah digunakan sebagai modal kerja Perusahaan.
Uraian tabel kronologis saham Perusahaan dapat dilihat pada Bab Ikhtisar Kinerja.

Initial Public Offering

April 17, 2018

The Company submitted a Registration Statement in connection with the 2018 Initial Public Offering of Indonesia Terminal Vehicle Shares through Letter No. PR09/4117/IKT-18 dated April 17, 2018 to the Financial Services Authority ("OJK") in Jakarta.

This submission is in accordance with the requirements stipulated by Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 dated November 10, 1995 concerning Capital Markets, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 64 of 1995, Supplement No. 3608 along with its implementing regulations ("UUPM") and amendments, including OJK Regulation no. 7/POJK.04/2017 concerning Registration Statement Documents for the Public Offering of Equity Securities, Debt Securities, and/or Sukuk and OJK Regulation no. 8/POJK.04/2017 concerning Form and Content of Prospectus and Abridged Prospectus for Public Offerings of Equity Securities.

June 28, 2018

The Company received an effective statement from OJK.

July 9, 2018

The Company conducted an Initial Public Offering (IPO) of 509,147,700 ordinary shares in its name, or 28% of the total issued and fully paid capital with a nominal value of Rp100/share, and offered it to the public at a price Offer Rp1,640/share, which must be paid in full when submitting the Share Purchase Order Form (FPPS).

The Company obtained funds amounting to Rp835,000,000,000 (eight hundred thirty-five billion Rupiah) from this Company action. All of these funds have been used as working capital for the Company.
A description of the chronological table of the Company's shares can be seen in the Performance Overview Chapter.

Kronologis Penerbitan Efek Lainnya

Chronology of Other Securities Issuance

Hingga 31 Desember 2022, Perusahaan tidak menerbitkan efek lain dalam bentuk apapun selain yang telah dijelaskan pada Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham di atas. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai kronologis pencatatan efek, *Company action*, perubahan jumlah efek, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan, serta peringkat efek.

Until December 31, 2022, the Company did not issue other securities in any form other than those described in the Share Issuance and Listing Chronology above. Therefore, there is no information regarding the chronology of securities listings, Company actions, changes in the number of securities, names of exchanges where other securities are listed, and securities ratings.

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Public Accounting and Public Accounting Firm

Kantor Akuntan Publik
Public Accounting Firm

Akuntan Publik Public Accountant	**Moch. Dadang Syachruna**
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Purwantono, Sungkoro & Surja
Alamat Address	Gedung bursa efek indonesia, tower II, lt. 7, Jl Jendral Sudriman Kav52-53, Jakarta Selatan
Jasa Audit Audit Services	Penetapan Pelaksana Pekerjaan Audit atas Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 Determination of the Audit Work Implementer for the Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2023
Jasa Lainnya Other Services	Tidak ada None
Periode Penugasan Assignment Period	Tahun buku 2023 Fiscal Year 2023
Biaya (Rp) Fee (Rp)	1.265.400.000

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Institutions and/or Supporting Professionals

Biro Administrasi Efek dan informasi pencatatan saham
Securities Administration Bureau and share registration information

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/Profession	**PT Elektronik Data Intercharge Indonesia**
Alamat Address	Jl Yos Sudarso Kav 85 No 89 Sunter Jaya, Kec Tj Priok Jak Utara
Jasa yang Diberikan Services Provided	Pencatatan Daftar Pemegang Saham dan Jasa Administrasi di Pasar Modal Registration of Shareholder Register and Administration Services in the Capital Market
Periode Penugasan Assignment Period	2018
Biaya (Rp) Fee (IDR)	38.500.000

Kustodian
Custodian

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/Profession	**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, Lantai 5 Jl. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia Tel: +62 21 515 2855 Fax: +62 21 529 91199 *Website*: www.ksei.co.id *E-mail*: helpdesk@ksei.co.id
Jasa yang Diberikan Services Provided	Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek Central custodian and settlement of securities transactions
Periode Penugasan Assignment Period	2018-2024
Biaya (Rp) Fee (IDR)	10.000.000

Notaris
Notary

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/Profession	**Ashoya Ratam, SH, MKN.**
Alamat Addres	Jalan Suryo Nomor 54, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180
Jasa yang Diberikan Services Provided	• Pendampingan dan penyusunan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 18 April 2023 dengan biaya Jasa Rp25.530.000,- (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPn 11%; • Pendampingan dan penyusunan Akta RUPST dan RUPSLB tanggal 27 Juni 2023 dengan biaya jasa Rp61.605.000,- (enam puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah) sudah termasuk PPn 11%; • Pendampingan dan penyusunan Akta tanggal 5 Sept 2023 RUPSLB tanggal 27 Juni 2023 dengan biaya jasa Rp25.530.000,- (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPn 11% • Assistance and preparation of the Deed of Statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on April 18, 2023 with a service fee of Rp25,530,000 (twenty-five million five hundred and thirty thousand rupiah) including 11% VAT; • Facilitation and preparation of the AGMS and EGMS Deeds dated June 27, 2023 with service fees of Rp61,605,000 (sixty-one million six hundred and five thousand rupiah) including 11% VAT; • Assistance and preparation of the Deed dated September 5, 2023 EGMS dated June 27, 2023 with service fees of Rp25,530,000 (twenty five million five hundred and thirty thousand rupiah) including 11% VAT
Periode Penugasan Assignment Period	2023
Biaya (Rp) Fee (IDR)	112.665.000

Informasi Pada *Website* Perusahaan

Information on The Company Website



Perusahaan memiliki situs web resmi dengan alamat www.indonesiacarterminal.co.id . Situs web ini merupakan portal resmi Perusahaan yang dapat diakses secara terbuka, kapan saja, dan di mana saja, dengan mudah dan sederhana, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif, akurat dan aktual tentang Perusahaan kepada khalayak luas, sesuai dengan Prinsip Keterbukaan sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Company Governance*) khususnya kepada pemegang saham, pelanggan, masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.

The Company has an official website at www.indonesiacarterminal.co.id. This website is the Company's official portal which can be accessed openly, anytime and anywhere, easily and simply, with the aim of providing comprehensive, accurate and current information about the Company to a wide audience, in accordance with the Principles of Openness as mandated by Law no. 8 of 1995 concerning Capital Markets and improving the implementation of good Company governance, especially towards shareholders, customers, society, government and other stakeholders.

Situs web resmi Perusahaan yang disajikan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, juga telah sesuai dengan amanat Pasal 6, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.4/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, yang mewajibkan menyampaikan informasi mengenai, antara lain:

1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi Bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan;
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

The Company's official website, which is presented in two languages, namely Indonesia and English, is also in accordance with the mandate of Article 6, Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8/POJK.4/2015 concerning Issuer or Public Company Websites, which requires the submission of information regarding, among other things:

1. General Information on Issuers or Public Companies;
2. Information for Investors or Investors;
3. Company Governance Information;
4. Company Social Responsibility Information.

Website Perusahaan terdiri dari 6 (enam) kanal dengan konten sebagai berikut:

- **Tentang Kami**
  Section ini menampilkan beragam informasi mengenai Perusahaan, Budaya Perusahaan, Company Roadmap, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pencapaian, Anak Perusahaan, e-procurement dan Hasil Survei Kepuasan Pelanggan.
- **Layanan**
  Section ini menampilkan beragam informasi mengenai Stevedoring, Cargodoring, Receiving and Delivery, Value Added Services, dan Standard Operating Procedure.
- **Hubungan Investor**
  Section ini menampilkan beragam informasi mengenai Relasi Media, Informasi keuangan, Penerapan GCG, Pelanggan kami, Informasi Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- **GCG**
  Section ini menampilkan beragam informasi mengenai Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, Kode Etik Whistleblowing System, Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Akuntan Publik, Manajemen Risiko, dan Anggaran Dasar.
- **CSR**
  Section ini menampilkan beragam informasi mengenai IPCC Peduli, Penghargaan CSR, Pendidikan dan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial, Lingkungan dan Segmen Lainnya.
- **Pelayanan Costumer**
  Section ini menampilkan pelayanan konsumen, kritik & saran, pelanggan kami, form pengambilan gambar.

The Company's website consists of 6 (six) channels with the following content:

- **About Us**
  This section displays various information regarding the Company, Company Culture, Company Roadmap, Company Social Responsibility, Achievements, Subsidiaries, e-procurement and Customer Satisfaction Survey Results.
- **Service**
  This section displays various information regarding Stevedoring, Cargodoring, Receiving and Delivery, Value Added Services, and Standard Operating Procedures.
- **Investor Relations**
  This section displays various information regarding Media Relations, Financial Information, GCG Implementation, our Customers, Share Information and General Meeting of Shareholders.
- **GCG**
  This section displays various information regarding the Company's Board of Commissioners and Directors Guidelines, Whistleblowing System Code of Ethics, Implementation of State Administrators' Wealth Reports (LHKPN), Public Accountants, Risk Management, and Articles of Association.
- **CSR**
  This section displays various information regarding IPCC Care, CSR Awards, Education and Religion, Health and Social, Environment and Other Segments
- **Customer Service**
  This section displays customer service, criticism and suggestions, our customers, image taking form.

Pengungkapan Keterbukaan Informasi di Website
Disclosure of Information on the Website

No	Informasi yang Wajib ditampilkan dalam Website Information that must be displayed on the Website	Keterangan Description
1	Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu. Shareholder information up to individual ultimate owners.	√
2	Kode Etik. Code of Conducts.	√
3	Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) at least includes material on the agenda discussed in the GMS, a summary of the minutes of the GMS, and information on important dates, namely the date of the announcement of the GMS, the date of the invitation to the GMS, the date of the GMS, the date on which the summary of the minutes of the GMS is announced	√
4	Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir). Separate annual Financial Statements (last 5 years).	√
5	Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors	√
6	Piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan Satuan Kerja Audit Internal Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees and Internal Audit Unit	√

04

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



Di tengah himpitan perekonomian global, perekonomian Indonesia mampu menunjukkan stabilitasnya. Hal ini kemudian berdampak terhadap perdagangan dan arus barang di pelabuhan.

In the midst of the global economic pressure, the Indonesia economy is able to demonstrate its stability. This then has an impact on trade and the flow of goods at the port.


PELINDO

Tinjauan Perekonomian dan Industri

Overview of Economic and Industrial

Perekonomian dunia di tahun 2023 memberikan gambaran atas tantangan yang terus terjadi, khususnya terkait pemulihan atas pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 dan dinyatakan telah menjadi endemi pada pertengahan tahun 2023. Berdasarkan data yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF) dalam dokumen *World Economic Outlook* (WEO), perekonomian global tahun 2023 diproyeksikan tumbuh hanya sebesar 3%, melambat dari tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 3,5%. Berbagai gejolak mewarnai perekonomian dunia di sepanjang tahun 2023, seperti inflasi yang masih terus terjadi sejak tahun 2022 terutama akibat rentannya pasokan komoditas global pasca pandemi COVID-19, hingga krisis geopolitik baik di Rusia-Ukraina maupun Timur Tengah.

The world economy in 2023 provides an illustration of the challenges that continue to occur, especially regarding recovery from the COVID-19 pandemic which has occurred since 2020 and was declared to have become endemic in mid-2023. Based on data released by the International Monetary Fund (IMF) in the World document Economic Outlook (WEO), the global economy in 2023 is projected to grow by only 3%, slowing down from 2022 with growth of 3.5%. Various turmoil will characterize the world economy throughout 2023, such as inflation which will continue to occur since 2022, especially due to the vulnerability of global commodity supplies after the COVID-19 pandemic, to the geopolitical crisis in both Russia-Ukraine and the Middle East.

IMF juga memperkirakan perekonomian negara-negara maju mengalami perlambatan dari 2,6% pada tahun 2022 menjadi 1,5% pada tahun 2023, di mana faktor inflasi memicu serangkaian pengetatan kebijakan moneter. Demikian pula perekonomian negara-negara berkembang diperkirakan mengalami stagnansi, dari 4,1% pada tahun 2022 menjadi 4% pada tahun 2023. Meskipun IMF mencatat adanya penurunan inflasi dunia, faktor inflasi masih menjadi tantangan serius yang berdampak terhadap perekonomian dunia dalam beberapa waktu ke depan. Inflasi global diperkirakan akan terus menurun, dari 8,7% pada tahun 2022 menjadi 6,9% pada tahun 2023.

The IMF also estimates that the economies of developed countries will experience a slowdown from 2.6% in 2022 to 1.5% in 2023, which the inflation factor triggers a series of monetary policy tightening. Likewise, the economies of developing countries are predicted to experience stagnation, from 4.1% in 2022 to 4% in 2023. Even though the IMF recorded a decline in world inflation, inflation is still a serious challenge that will impact the world economy for some time in the future. Global inflation is expected to continue to decline, from 8.7% in 2022 to 6.9% in 2023.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah antisipatif. Di samping berbagai kebijakan yang berupaya mendorong penguatan sektor industri dan pelaku UMKM, kunci penting dari respon Pemerintah Indonesia terlihat dari kebijakan inflasi nasional yang menunjukkan tren normalisasi dengan perlambatan inflasi terjadi lebih cepat dari perkiraan. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2023 ditutup di level 2,61% dengan inflasi inti yang rendah pada level 1,80%, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi IHK tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,51%.

Facing these conditions, the Indonesia Government took various anticipatory steps. Apart from various policies that seek to encourage the strengthening of the industrial sector and MSME players, the key importance of the Indonesian Government's response can be seen from the national inflation policy which shows a normalization trend with inflation slowing down faster than expected. Consumer Price Index (CPI) inflation in December 2023 closed at 2.61% with low core inflation at 1.80%, lower than CPI inflation in 2022 which was recorded at 5.51%.

Menurut data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia di tahun 2023 mencatat pertumbuhan sebesar 5,05%, sedikit melambat dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,31%. Meskipun mengalami perlambatan, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan jauh di atas perekonomian dunia. Industri nasional secara keseluruhan mampu tumbuh

According to data published by the Central Statistics Agency (BPS), the Indonesian economy in 2023 recorded growth of 5.05%, a slight slowdown compared to 2022 of 5.31%. Despite experiencing a slowdown, the Indonesian economy recorded growth far above the world economy. National industry as a whole was able to grow well even though most experienced a slowdown compared to

dengan baik meskipun sebagian besar mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%, diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 7,59%, Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,12%, Konstruksi sebesar 4,91%, serta Perdagangan, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 4,85%. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya tumbuh 4,64%.

Menariknya, di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu, Indonesia berupaya membentuk fondasi pembangunan ke depan melalui pengembangan ekosistem ketenagalistrikan berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung tercapainya target Pemerintah Indonesia untuk dapat menurunkan sumber daya energi berbasis fosil yang pada akhirnya mampu mewujudkan *net zero emission* yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2060.

Peta Jalan Usaha 2020-2024 dan Kebijakan Strategis Tahun 2023

Arah dan Kebijakan Strategis 2020-2024

Sebagai salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang Pengelola Terminal Kendaraan, IPCC menyadari peran strategisnya sebagai pintu utama ekspor dan impor kendaraan di Indonesia yang dikelola melalui layanan Terminal Kendaraan. Spesifikasi dan spesialisasi kegiatan usaha IPCC telah menciptakan peluang untuk menjadikan IPCC sebagai pengelola Terminal Kendaraan berkelas dunia. Hal ini sejalan dengan Visi IPCC di 2024, yaitu menjadi *World Class Car Terminal Ecosystem*. Untuk mendukung pencapaian visi 2024 tersebut, IPCC memiliki pilar sebagaimana tercantum dalam Rencana Jangka Panjang IPCC periode 2020-2024, antara lain sebagai berikut:

the previous year. In terms of production, the highest growth occurred in the Transportation and Warehousing business sector at 13.96%, followed by Information and Communication at 7.59%, Mining and Quarrying at 6.12%, Construction at 4.91%, and Trading, Car Repair and Motorcycles by 4.85%. Meanwhile, the processing industry, which has a dominant role in forming Gross Domestic Product (GDP), only grew 4.64%.

Interestingly, in the midst of uncertain economic conditions, Indonesia is trying to form the foundation for future development through developing an electricity ecosystem based on New and Renewable Energy (EBT). This is done as an effort to support the achievement of the Indonesian Government's target of reducing fossil-based energy resources which will ultimately be able to realize net zero emissions which is targeted to be achieved by 2060.

Business Roadmap 2020-2024 and Strategic Policy for 2023

Strategic Direction and Policy 2020-2024

As one of the companies in Indonesia which operates in the field of Vehicle Terminal Management, IPCC is aware of its strategic role as the main door for vehicle exports and imports in Indonesia which are managed through Vehicle Terminal services. The specifications and specialization of IPCC's business activities have created opportunities to make IPCC a world-class Vehicle Terminal manager. This is in line with the IPCC Vision in 2024, namely to become a World Class Car Terminal Ecosystem. To support the achievement of the 2024 vision, the IPCC has pillars as stated in the IPCC Long Term Plan for the 2020-2024 period, including the following:

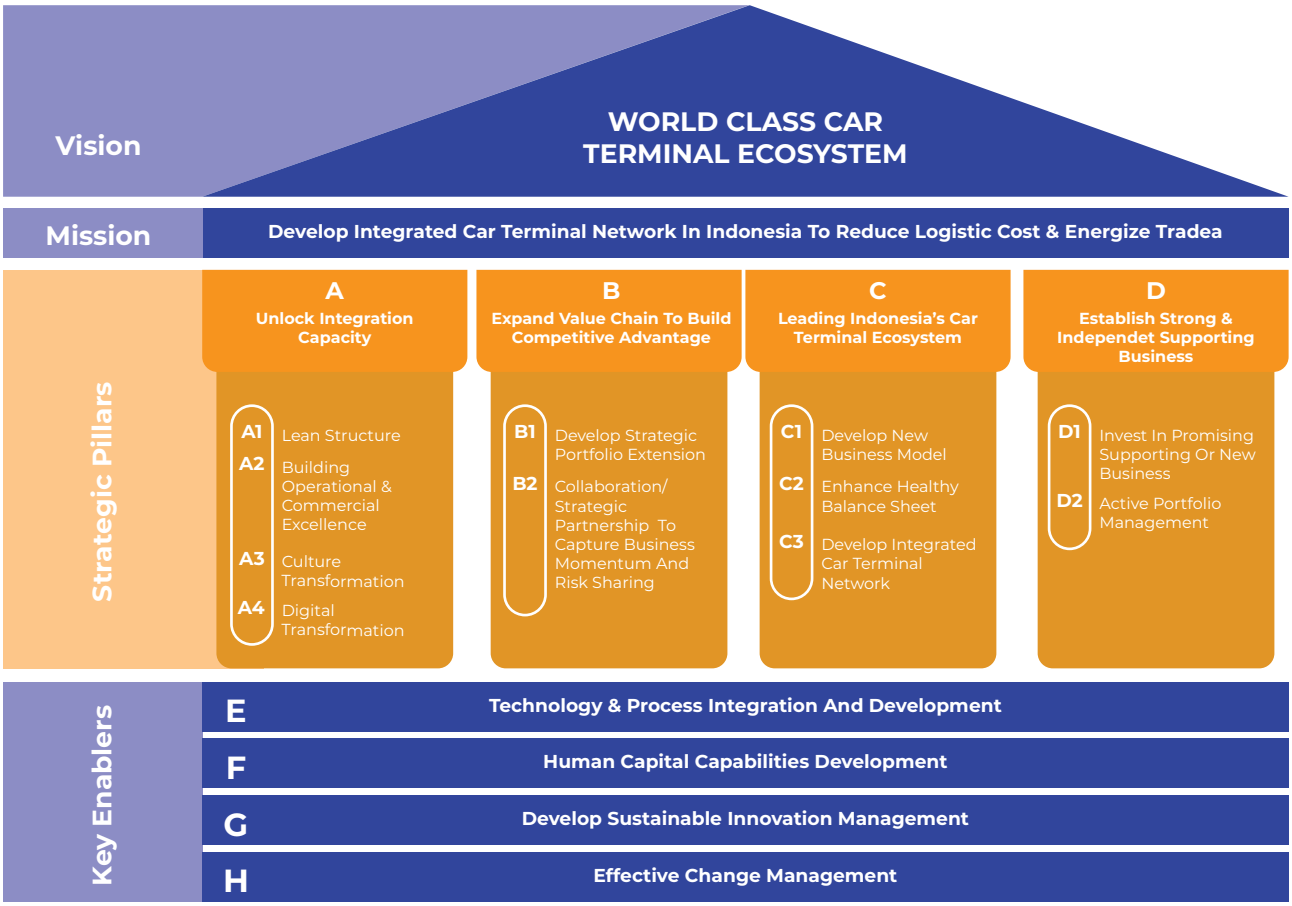

Sumber: RJPP IPCC 2020-2024 | Source: 2020-2024 RJPP of IPCC

Pada Rumah Strategi RJPP periode 2020-2024, misi Perusahaan adalah *Develop Integrated Car Terminal Network in Indonesia to Reduce Logistic Cost & Energize Trade*. Dalam Rumah Strategi tersebut terdapat 4 (empat) *strategic pillars* yaitu:

1. *Unlock Integration Capacity*
2. *Expand Value Chain To Build Competitive Advantage*
3. *Leading Indonesia's Car Terminal Ecosystem*
4. *Establish Strong & Independent Supporting Business.*

Sedangkan pencapaian strategi tersebut dapat tercapai dengan adanya 4 (empat) *enablers*, yaitu:

1. *Technology & Process Integration And Development*
2. *Human Capital Capabilities Development*
3. *Develop Sustainable Innovation Management*
4. *Effective Change Management*Inisiatif dan Kebijakan Strategis 2023

In the RJPP Strategy House for the 2020-2024 period, the Company's mission is to Develop an Integrated Car Terminal Network in Indonesia to Reduce Logistic Cost & Energize Trade. In the Strategy House there are 4 (four) strategic pillars, namely:

1. Unlock Integration Capacity
2. Expand Value Chain To Build Competitive Advantage
3. Leading Indonesia's Car Terminal Ecosystem
4. Establish Strong & Independent Supporting Business.

Meanwhile, the achievement of this strategy can be achieved with the existence of 4 (four) enablers, namely:

1. Technology & Process Integration And Development
2. Human Capital Capabilities Development
3. Develop Sustainable Innovation Management
4. Effective Change Management

Inisiatif dan Kebijakan Strategis 2023

Tahun 2023 dan 2024 adalah program strategi kemitraan dan ekspansi sebagai tindak lanjut program 2022 dengan implementasi transfer operatorship terminal kendaraan di area kerja Pelindo. Integrasi & standardisasi operasi, dengan fokus pada digitalisasi & sistemisasi serta Car Distribution Management (CDM).

IKT berfokus menjalin kemitraan dan melakukan ekspansi bisnis. Sesuai tema Perusahaan, area fokus utama Perusahaan adalah:

1. Transfer operatorship terminal kendaraan di area kerja Pelindo
2. Integrasi & standarisasi operasi, dengan focus pada digitalisasi & sistemasi
3. Layanan dan operasi terintegrasi dengan fungsi dan enabler terpusay
4. Penambahan kapasitas car distribution management (CDM)
5. Digitalisasi proses bisnis
6. Peningkatan corporate value dan kinerja harga saham melalui buyback
7. Full dedicated car terminal (fase 1)
8. Opsi divestasi/likuidasi MKO MTKI

Rincian Masalah yang Timbul di Tahun 2023

Ekspansi kegiatan usaha IPCC di tahun 2023 tentu diwarnai dengan perjalanan lika liku dalam proses pendekatan dengan sejumlah pihak hingga sampai terjadi kesepakatan. Dalam menghadapi kendala tersebut, IPCC terus berupaya menjalin komunikasi yang efektif dan harmonis dengan para pihak yang berkepentingan. IPCC secara intensif melakukan berbagai upaya pendekatan dan memberikan penjelasan yang meyakinkan bahwa hasil akhir dari pengembangan bisnis tidak hanya memberikan nilai tambah semata namun juga membawa dampak positif bagi pihak-pihak lain. Upaya ini terbukti membuahkan hasil positif dimana rencana ekspansi bisnis IPCC dapat berjalan dengan baik di tahun 2023.

Tantangan baru pun muncul yaitu pesaing baru yang memiliki layanan yang sama, termasuk layanan terminal internasional yg sebelumnya di monopoli oleh Perusahaan.

Tantangan lainnya hadir dari *gap* pengembangan SDM dan organisasi yang terlihat dari kurang cepatnya unit kerja dalam beradaptasi dengan perubahan model bisnis baru dan kompetensi SDM yang belum merata.

Strategic Initiatives and Policies 2023

2023 and 2024 are a partnership and expansion strategy program as a follow-up to the 2022 program with the implementation of vehicle terminal operatorship transfers in Pelindo work areas. Integration & standardization of operations, with a focus on digitalization & systemization as well as Car Distribution Management (CDM).

IKT focuses on establishing partnerships and expanding business. In line with the Company's theme, the Company's main focus areas are:

1. Transfer operatorship of vehicle terminals in Pelindo work areas
2. Integration & standardization of operations, with a focus on digitalization & systemization
3. Integrated services and operations with centralized functions and enablers
4. Additional car distribution management (CDM) capacity
5. Digitalization of business processes
6. Increasing corporate value and share price performance through buybacks
7. Full dedicated car terminal (phase 1)
8. MKO MTKI divestment/liquidation option

Details of Issues Arising in 2023

The expansion of IPCC's business activities in 2023 will certainly be marked by twists and turns in the process of approaching a number of parties until an agreement is reached. In facing these obstacles, the IPCC continues to strive to establish effective and harmonious communication with interested parties. The IPCC intensively carries out various approaches and provides convincing explanations that the final results of business development do not only provide added value but also have a positive impact on other parties. This effort has proven to produce positive results which IPCC's business expansion plans can run well in 2023.

New challenges have emerged, namely new competitors who have the same services, including international terminal services which were previously monopolized by the Company.

Another challenge arises from the gap in HC and organizational development which can be seen from the lack of speed in work units adapting to changes in new business models and uneven HC competencies.

Untuk itu, Perseroan secara kontinu menanamkan pemikiran yang kuat kepada semua karyawan akan pentingnya meningkatkan kompetensi diri dan menggali potensi yang dimiliki di tengah era persaingan ketat yang dihadapi saat ini. Langkah konkret IPCC dalam mengatasi tantangan di bidang SDM ditunjukkan melalui penyediaan program pelatihan dan pengembangan SDM yang berkesinambungan untuk semua karyawan dari berbagai tingkatan manajerial apapun. Kami senantiasa memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dalam mengevaluasi seluruh tantangan ataupun kendala yang dihadapi di lapangan, selain menerima laporan evaluasi kerja dari unit-unit kerja, Direksi selaku jajaran Manajemen Puncak juga melakukan *management walkthrough* untuk melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan dan berkomunikasi dengan sejumlah pihak yang terlibat didalamnya, baik karyawan maupun mitra bisnis untuk mengetahui secara langsung permasalahan yang seringkali dihadapi. Dengan adanya keterlibatan aktif Direksi, maka proses pengambilan keputusan untuk mencegah atau memitigasi potensi risiko yang dapat terjadi dapat berjalan lebih cepat.

For this reason, the Company continuously instills strong thinking in all employees regarding the importance of improving their personal competence and exploring their potential in the current era of intense competition. The IPCC's concrete steps in overcoming challenges in the HC sector are demonstrated through the provision of continuous HC training and development programs for all employees at all managerial levels. We always provide equal space and opportunities for all employees to take part in available training activities according to their individual needs.

In evaluating all the challenges or obstacles faced in the field, apart from receiving work evaluation reports from work units, the Board of Directors as the Top Management also conducts management walkthroughs to see directly the conditions that occur in the field and communicate with a number of parties involved in it, both employees and business partners to find out directly about the problems they often face. With the active involvement of the Board of Directors, the decision-making process to prevent or mitigate potential risks that may occur can run more quickly.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operational Review by Business Segment

SEGMEN USAHA

Laporan Keuangan Perusahaan telah menerapkan PSAK 5 tentang Segmen Operasi, di mana Perusahaan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam beberapa segmen yang menyediakan jasa pelayanan terminal, jasa pelayanan barang, jasa rupa-rupa dan pengusahaan fasilitas dan utilitas.

BUSINESS SEGMENT

The Company's Financial Statement has implemented PSAK 5 concerning Operating Segments, which the Company operates and manages business in several segments which provide terminal services, goods services, miscellaneous services and the operation of facilities and utilities.

Segmen Usaha IPCC
IPCC Business Segments

Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang Terminal Services and Goods Services	Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas Business Services, Facilities and Utilities	Non Segmen Non-Segment

Untuk dapat memberikan gambaran awal tentang skala bisnis masing-masing segmen dan kontribusinya terhadap Perusahaan, berikut disampaikan pendapatan serta nilai aset Perusahaan yang dikontribusikan oleh masing-masing segmen.

In order to provide an initial overview of the business scale of each segment and its contribution to the Company, below is the income and value of the Company's assets contributed by each segment.

Jumlah dan Kontribusi Pendapatan Segmen Usaha Terhadap Pendapatan Operasi IPCC
Amount and Contribution of Business Segment Revenue to IPCC Operating Income

Segmen Usaha Business Segments	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3 = 1-2)	(3/2)	
Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang Terminal Services and Goods Services	711.763	96,81	709.507	97,65	2.255	0,32	?
Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas Business Services, Facilities and Utilities	23.442	3,19	17.066	2,35	6.376	37,36	?
Non Segmen Non-Segment	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Pendapatan Operasi Total Operating Income	735.205	100,00	726.573	100,00	8.632	1,19	?

Komposisi Pendapatan Segmen Usaha Terhadap Pendapatan Operasi IPCC
Composition of Business Segment Revenue to IPCC Operating Income

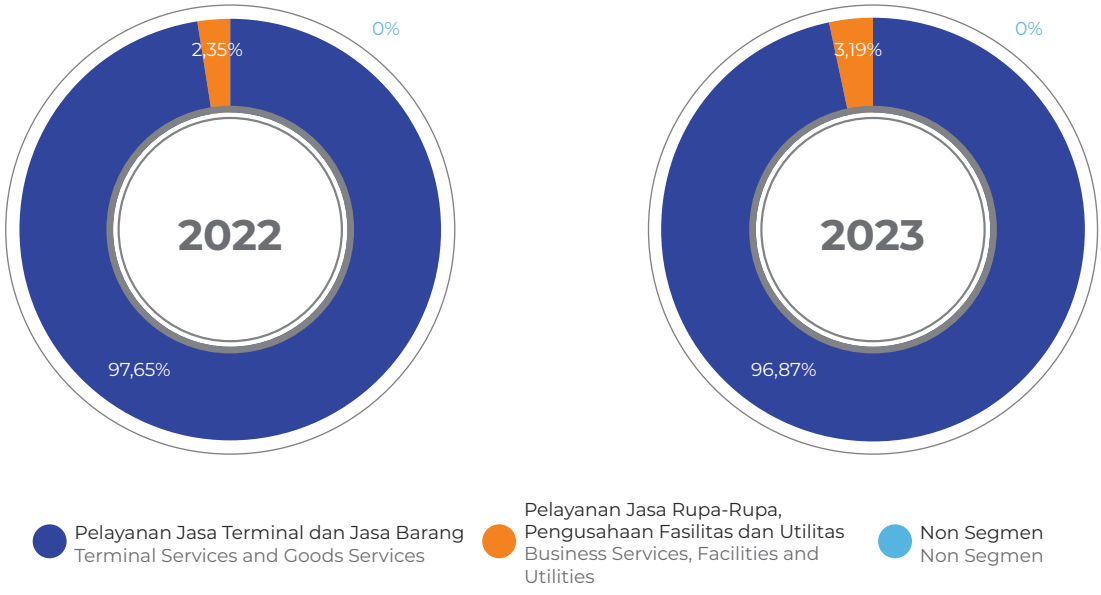

Jumlah dan Kontribusi Aset Segmen Usaha Terhadap Aset IPCC
Amount and Contribution of Business Segment Assets to IPCC Assets

Segmen Usaha Business Segments	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3 = 1-2)	(3/2)	
Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang Terminal Services and Goods Services	1.031.623	57,69	1.102.628	50,31	(71.005)	(6,44)	?
Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas Business Services, Facilities and Utilities	8.322	0,47	7.085	0,32	1.237	17,45	?
Non Segmen Non-Segment	748.369	41,85	1.082.115	49,37	(333.746)	(30,84)	?
Jumlah Aset Segmen Total Segment Assets	1.788.314	100,00	2.191.828	100,00	(403.514)	(18,41)	?

Komposisi Aset Segmen Usaha Terhadap Aset IPCC
Composition of Business Segment Assets to IPCC Assets

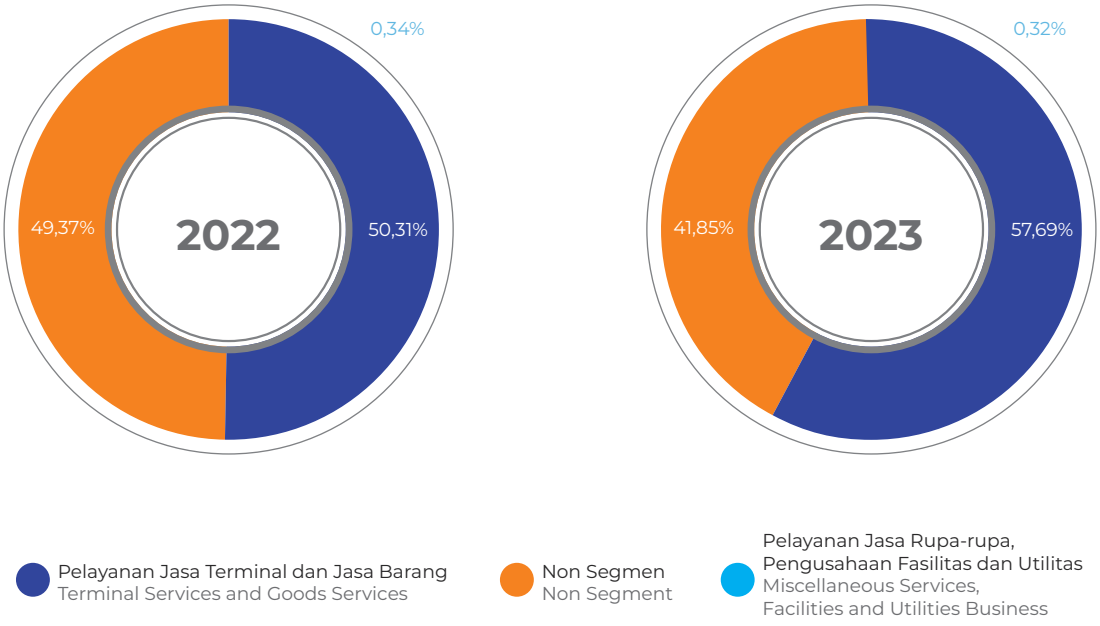

Dari tabel dan bagan di atas, dapat dilihat bahwa segmen Pelayanan Utilitas Jasa Terminal dan Jasa Barang menjadi segmen yang menopang bisnis inti Perusahaan. Berikut disampaikan rincian kegiatan operasi dan profitabilitas dari masing-masing segmen usaha.

From the table and chart above, it can be seen that the Utility Terminal Services and Goods Services segments are segments that support the Company's core business. Below are details of the operational activities and profitability of each business segment.

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page intentionally left blank.

Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang

Terminal Services and Goods Services

Pelayanan Jasa Terminal

IPCC menyediakan pelayanan jasa terminal untuk kegiatan bongkar muat mobil, alat berat, truk/bus, motor dan general cargo yang sebagian besar merupakan part dari alat berat yang berstatus *Completely Knock Down* (CKD). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Terminal Internasional dan Terminal Domestik yang meliputi wilayah dermaga domestik Perusahaan, dermaga eks. Presiden, dermaga 107–109, area Pelabuhan Pontianak, Balikpapan, Medan dan Makassar. Realisasi pelayanan jasa terminal dalam tiga tahun terakhir ditunjukkan dalam tabel berikut:

Terminal Services

IPCC provides terminal services for loading/unloading of cars, heavy equipment, trucks/buses, motorcycle and general cargo, most of which are parts of heavy equipment with Completely Knock Down (CKD) status. These activities are carried out at the International Terminal and Domestic Terminal which includes the Company's domestic dock area, ex-pier. President, pier 107–109, Pontianak, Balikpapan, Medan and Makassar Port areas. The realization of terminal services in the last three years is shown in the following table:

Realisasi Segmen Pelayanan Jasa Terminal di Terminal Satelit Pontianak 2022-2023
Realization of the Terminal Services Segment at the Pontianak Satellite Terminal 2022-2023

Perihal Description	Satuan Unit	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Nominal	Persentase Percentage (%)
Bongkar Muat Mobil Car Loading/Unloading	Unit	25.819	28.466	(2.647)	(9,30) ▼
Kendaraan Berat (Alat Berat/Truk/Bus) Heavy vehicle (Heavy Equipment/Truck/Bus)	Unit	27.203	28.423	(1.220)	(4,29) ▼
	m3	1.073.078	1.123.168	(50.090)	(4,46) ▼
General Cargo	PKGS	47.085	-	47.085	-
	m3	47.085	-	47.085	-
Bongkar Muat Motor Motorcycle Loading/Unloading	Unit	99.966	111.311	(11.345)	(10,19) ▼

Pada tahun 2023, Perusahaan melaksanakan pelayanan terminal kendaraan Pontianak berupa bongkar muat mobil sebanyak 25.819 unit, mengalami penurunan 9,30% atau setara dengan 2.647 unit dibandingkan tahun 2022 sebanyak 28.466 unit. Hal ini disebabkan oleh menurunnya penjualan akibat masyarakat beralih ke moda transportasi lainnya paska pandemi covid 19.

In 2023, the Company carried out Pontianak vehicle terminal services in the form of loading/unloading of cars was 25,819 units, a decrease of 9.30% or the equivalent of 2,647 units compared to 2022 of 28,466 units. This is due to the decline in sales due to people switching to other modes of transportation after the Covid 19 pandemic.

Realisasi pelayanan terminal untuk Kendaraan Berat (Alat Berat, Truk, Bus) tahun 2023 sebanyak 27.203 unit, mengalami penurunan 4,29% atau setara dengan 1.220 unit dibandingkan tahun 2022 sebanyak 28.423 unit. Hal ini disebabkan oleh permintaan terhadap kebutuhan alat berat mengalami penurunan walaupun produksi barang tambang meningkat.

The realization of terminal services for Heavy Vehicles (Heavy Equipment, Trucks, Buses) in 2023 was 27,203 units, a decrease of 4.29% or the equivalent of 1,220 units compared to 2022 of 28,423 units. This is because the demand for heavy equipment has decreased even though the production of mining goods has increased.

Sementara itu, realisasi pelayanan terminal bongkar muat motor khususnya pada Terminal Domestik sebanyak 99.966 unit, mengalami penurunan 10,19% atau setara dengan 11.345 unit dibandingkan tahun 2022 sebanyak 111.311 unit motor. Hal ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 jika di proyeksikan dengan pertumbuhan di tahun 2022.

Meanwhile, the realization of motorbike loading/unloading terminal services, especially at the Domestic Terminal, was 99,966 units, experiencing a decrease of 10.19% or the equivalent of 11,345 units compared to 2022 of 111,311 motorbike units. This is caused by slowing economic growth in 2023 if projected with growth in 2022.

Realisasi Segmen Pelayanan Jasa Terminal di Terminal Satelit Makassar 2022-2023
Realization of the Terminal Services Segment at the Makassar Satellite Terminal 2022-2023

Perihal Description	**Satuan** Unit	**2023**	**2022**	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		
				Nominal	**Persentase** Percentage **(%)**	
Bongkar Muat Mobil Car Loading/Unloading	Unit	86.853	60.424	26.429	43,74	▲
Kendaraan Berat (Alat Berat/Truk/Bus) Heavy vehicle (Heavy Equipment/Truck/Bus)	Unit	24.796	15.050	9.746	64,76	▲
	m3	862.002	760.576	101.426	13,34	▲
General Cargo	PKGS	-	-	-	-	
	m3	-	-	-	-	
Bongkar Muat Motor Motorcycle Loading/Unloading	Unit	117.186	84.966	32.220	37,92	▲

Terminal Kendaraan Makassar mulai dioperasikan oleh pada bulan Mei tahun 2022. Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan pelayanan jasa terminal berupa bongkar muat mobil sebanyak 86.853 unit, mengalami kenaikan 43,74% atau setara dengan 26.429 unit dibandingkan tahun 2022 sebanyak 60.424 unit. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah yaitu PPnBM sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi bagi tipe mobil electric dan LCGC.

Makassar Vehicle Terminal began operating in May 2022. In 2023, the Company provided terminal services in the form of loading/unloading of cars totaling 86,853 units, an increase of 43.74% or the equivalent of 26,429 units compared to 2022 of 60,424 units. This is caused by the policy issued by the government, namely PPnBM as a stimulus for economic growth for electric cars and LCGC types.

Realisasi pelayanan jasa terminal untuk Kendaraan Berat (Alat Berat, Truck, Bus) sepanjang tahun 2023 telah dilakukan bongkar muat sebanyak 24.796 unit, mengalami kenaikan 64,76% atau setara dengan 9.746 unit dibandingkan tahun 2022 sebanyak 15.050 unit. Hal ini disebabkan tingginya aktivitas pertambangan di wilayah Sulawesi Selatan, utamanya di komoditas nikel, besi dan baja.

The realization of terminal services for Heavy Vehicles (Heavy Equipment, Trucks, Buses) throughout 2023 has seen loading/unloading of 24,796 units, an increase of 64.76% or the equivalent of 9,746 units compared to 2022 of 15,050 units. This is due to the high mining activity in the South Sulawesi region, especially in nickel, iron and steel commodities.

Realisasi pelayanan jasa terminal untuk motor sepanjang tahun 2023 telah dilakukan bongkar muat sebanyak 117.186 unit, mengalami kenaikan 37,92% atau setara dengan 32.220 unit dibandingkan tahun 2022 sebanyak 84.966 unit. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan mengalami kenaikan sebesar 4,51%.

The realization of terminal services for motorbikes throughout 2023 has been carried out loading/unloading of 117,186 units, an increase of 37.92% or the equivalent of 32,220 units compared to 2022 of 84,966 units. This was caused by economic growth in South Sulawesi increasing by 4.51%.

Realisasi Segmen Pelayanan Jasa Terminal di Terminal Satelit Belawan 2022-2023
Realization of the Terminal Services Segment at the Belawan Satellite Terminal 2022-2023

Perihal Description	Satuan Unit	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Nominal	Persentase Percentage (%)	
Bongkar Muat Mobil Car Loading/Unloading	Unit	64.210	66.019	(1.809)	(2,74)	▼
Kendaraan Berat (Alat Berat/Truk/Bus) Heavy vehicle (Heavy Equipment/Truck/Bus)	Unit	2.696	2.508	188	7,50	▲
	m3	123.479	108.315	15.164	14,00	▲
General Cargo	PKGS	-	-	-	-	
	m3	-	-	-	-	
Bongkar Muat Motor Motorcycle Loading/Unloading	Unit	351	391	(40)	(10,23)	▼

Terminal Kendaraan Belawan mulai dioperasikan pada bulan Januari tahun 2022. Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan pelayanan jasa terminal berupa bongkar muat mobil sebanyak 64.210 unit, mengalami penurunan 2,74% atau setara dengan 1.809 unit dibandingkan tahun 2022 sebanyak 66.019 unit. Hal ini disebabkan karena penjualan mobil di pasar domestik cenderung fluktuatif, terutama di wilayah sumatra utara dan Nanggroe Aceh Darussalam.

The Belawan Vehicle Terminal began operating in January 2022. In 2023, the Company provided terminal services in the form of loading/unloading of cars totaling 64,210 units, a decrease of 2.74% or the equivalent of 1,809 units compared to 2022 of 66,019 units. This is because car sales in the domestic market tend to fluctuate, especially in the North Sumatra and Nanggroe Aceh Darussalam regions.

Realisasi pelayanan jasa terminal untuk Kendaraan Berat (Alat Berat, Truck, Bus) sepanjang tahun 2023 telah dilakukan bongkar muat sebanyak 2.696 unit, mengalami kenaikan 7,50% atau setara dengan 188 unit dibandingkan tahun 2022 sebanyak 2.508 unit. Hal ini disebabkan oleh pemerintah melakukan program untuk mendorong pembagunan infrastruktur, salah satunya tol yang menyambungkan Belawan-Medan-Tanjung Morawa. Dan juga pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 5,04% (y-o-y).

The realization of terminal services for Heavy Vehicles (Heavy Equipment, Trucks, Buses) throughout 2023 has been carried out loading/unloading of 2,696 units, an increase of 7.50% or the equivalent of 188 units compared to 2022 of 2,508 units. This is because the government is carrying out a program to encourage infrastructure development, one of which is the toll road connecting Belawan-Medan-Tanjung Morawa. And also economic growth increased by 5.04% (y-o-y).

Realisasi pelayanan jasa terminal untuk motor sepanjang tahun 2023 telah dilakukan bongkar muat sebanyak 351 unit, mengalami penurunan 10,23% atau setara dengan 40 unit dibandingkan tahun 2022 sebanyak 391 unit. Hal ini disebabkan karena beberapa jenis motor memilih moda tranportasi darat untuk pengiriman ke daerah sumatra utara dan sekitarnya.

The realization of terminal services for motorbikes throughout 2023 has been carried out loading/unloading of 351 units, a decrease of 10.23% or the equivalent of 40 units compared to 2022 of 391 units. This is because several types of motorbikes choose land transportation mode for deliveries to North Sumatra and surrounding areas.

Pelayanan Jasa Barang

IPCC melakukan pelayanan jasa barang, antara lain mobil, motor, alat berat, truck, bus, dan general cargo. Barang tersebut didistribusikan melalui dermaga umum baik untuk keperluan ekspor maupun impor di Terminal Internasional untuk perdagangan luar negeri serta kegiatan bongkar dan muat di Terminal Domestik pada perdagangan dalam negeri. Realisasi pelayanan jasa barang berdasarkan perdagangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Cargo Services

IPCC provides goods services, including cars, motorbikes, heavy equipment, trucks, buses and general cargo. These goods are distributed through public docks for both export and import purposes at the International Terminal for international trading as well as loading/unloading activities at the Domestic Terminal for domestic trading. Realization of cargo services by trading in the last 3 (three) years is as shown in the following table:

	Satuan Unit	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Jumlah Total	(%)	
Bongkar Unloading						
Mobil Car	Unit	180.808	147.999	32.809	22,17	▲
Kendaraan Berat (Alat Berat/Truk/Bus) Heavy vehicle (Heavy Equipment/Truck/Bus)	Unit	52.841	45.044	7.797	17,31	▲
	m3	1.984.515	1.702.134	282.381	16,59	▲
General Cargo	PKGS	46.610	168	46.442	27.644,05	▲
	m3	59.401	2.198	57.203	2.602,50	▲
Motor Motorcycle	Unit	213.459	192.033	21.426	11,16	▲
Muat Loading						
Mobil Car	Unit	165.290	160.871	4.419	2,75	▲
Kendaraan Berat (Alat Berat/Truk/Bus) Heavy vehicle (Heavy Equipment/Truck/Bus)	Unit	56.658	53.117	3.541	6,67	▲
	m3	2.117.940	2.164.431	(46.491)	(2,15)	▼
General Cargo	PKGS	1.089	257	832	323,74	▲
	m3	12.890	14.856	(1.966)	(13,23)	▼
Motor Motorcycle	Unit	102.054	114.271	(12.217)	(10,69)	▼

Realisasi arus impor alat berat, truck dan bus tahun 2023 secara jumlah unit mengalami penurunan 23,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan

The realization of flow of imports of heavy equipment, trucks and buses in 2023 in terms of the number of units decreased by 23.67% compared to the previous year. This

faktor tahun politik, turunnya harga komoditas, serta menurunnya aktivitas konstruksi di Tanah Air.

Begitu juga dengan arus ekspor alat berat, truck dan bus tahun 2023 yang mengalami penurunan 13,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan faktor tahun politik, turunnya harga komoditas, serta menurunnya aktivitas konstruksi di Tanah Air.

is due to the political year, falling commodity prices, and the decline in construction activity in the country.

Likewise, the export flow of heavy equipment, trucks and buses in 2023 decreased by 13.13% compared to the previous year. This is due to the political year, falling commodity prices, and the decline in construction activity in the country.

	Satuan Unit	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Jumlah Total	(%)	
Bongkar Unloading						
Mobil Car	Unit	180.808	147.999	32.809	22,17	▲
Kendaraan Berat (Alat Berat/Truk/Bus) Heavy vehicle (Heavy Equipment/Truck/Bus)	Unit	52.841	45.044	7.797	17,31	▲
	m3	1.984.515	1.702.134	282.381	16,59	▲
General Cargo	PKGS	46.610	168	46.442	27.644,05	▲
	m3	59.401	2.198	57.203	2.602,50	▲
Motor Motorcycle	Unit	213.459	192.033	21.426	11,16	▲
Muat Loading						
Mobil Car	Unit	165.290	160.871	4.419	2,75	▲
Kendaraan Berat (Alat Berat/Truk/Bus) Heavy vehicle (Heavy Equipment/Truck/Bus)	Unit	56.658	53.117	3.541	6,67	▲
	m3	2.117.940	2.164.431	(46.491)	(2,15)	▼
General Cargo	PKGS	1.089	257	832	323,74	▲
	m3	12.890	14.856	(1.966)	(13,23)	▼
Motor Motorcycle	Unit	102.054	114.271	(12.217)	(10,69)	▼

Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas

Miscellaneous Services, Facilities and Utilities Business

Pelayanan Rupa-rupa Usaha

Perusahaan juga melakukan pelayanan rupa-rupa usaha yang diperoleh dari Mitra yang melakukan sewa ruangan serta kelengkapannya di kantor IPCC. Pada tahun 2023, Pendapatan Pelayanan Jasa Rupa-Rupa sebesar Rp9,14 miliar, mengalami kenaikan 3,77% atau setara dengan Rp332 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp8,81 miliar pada 2022. Kenaikan ini disebabkan adanya ekspansi area yang digunakan sebagai lapangan penumpukan cadangan, sehingga menambah kapasitas penyimpanan. Dimana hal ini dapat terlihat dari layanan pre distribution center antara IPCC dengan Hyundai Motor Indonesia.

Sementara itu, Pendapatan Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas yang meliputi sewa tempat dan ruangan di kantor IPCC bagi para mitra dibukukan sebesar Rp14,30 miliar, mengalami kenaikan 73,25% atau setara dengan Rp6,04 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp8,25 miliar pada tahun 2022. Kenaikan ini disebabkan oleh terpakainya seluruh ruangan yang di alokasikan kepada mitra perusahaan di antaranya TMMIN, ADM, BKJ, dan mitra lainnya.

Rincian Pendapatan Pelayanan Rupa-Rupa dalam dua tahun terakhir sebagai berikut.

Miscellaneous Business Services

The company also provides miscellaneous business services obtained from partners who rent space and equipment at the IPCC office. In 2023, Miscellaneous Services Revenue was Rp9.14 billion, an increase of 3.77% or the equivalent of Rp332 million compared to 2022 which was Rp8.81 billion in 2022. This increase was due to the expansion of the area used as a reserve storage yard, thereby increasing storage capacity. This can be seen from the pre-distribution center service between IPCC and Hyundai Motor Indonesia.

Meanwhile, Facilities and Utilities Business Revenue which includes renting premises and space at the IPCC office for partners was recorded at Rp14.30 billion, an increase of 73.25% or the equivalent of Rp6.04 billion compared to 2022 of Rp8.25 billion in 2022. This increase was caused by the use of all rooms allocated to company partners including TMMIN, ADM, BKJ and other partners.

Details of Miscellaneous Service Revenue in the last two years are as follows.

Realisasi Segmen Pelayanan Rupa-Rupa Usaha 2022-2023
Realization of Miscellaneous Business Services Segment 2022-2023

	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan Pelayanan Jasa Rupa-Rupa Miscellaneous Services Revenue	9.145	8.813	332	3,77	▲
Pendapatan Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas (sewa ruangan kantor) Facilities and Utilities Business Revenue (Office Rent Services)	14.298	8.253	6.045	73,25	▲

Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas

Dalam rangka memanfaatkan aset yang dimiliki secara optimal, Perusahaan melakukan jasa pengusahaan fasilitas dan utilitas berupa sewa ruangan kantor yang mencakup fasilitas air dan listrik. Rincian jasa pengusahaan fasilitas dan utilitas dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Facilities and Utilities Business

In order to optimally utilize the assets it owns, the Company provides facilities and utilities management services in the form of office rent services which includes water and electricity facilities. Details of facility and utility business services in the last three years are as follows:

Realisasi segmen Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas 2022-2023
Realization of the Facilities and Utilities Business segment 2022-2023

	Satuan Unit	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Jumlah Amount	(%)	
Sewa Ruangan Kantor Office Rent Services	m3	182	203	9	10%	▼

Realisasi ruangan kantor yang disewakan selama tahun 2023 adalah seluas sebanyak 182 m², mengalami penurunan 10% dibandingkan tahun 2022 seluas 269 m2. Ruangan kantor tersebut disewakan 9 (sembilan) mitra Perusahaan dengan luas masing-masing ruangan berukuran 24 m2, serta dalam bentuk sewa lahan kepada satu mitra dengan luasan 14 m².

Realization of office space for rent during 2023 was 182 m², a decrease of 10% compared to 2022 of 269 m2. The office space is rented for 9 (nine) Company partners with each room measuring 24 m2, and in the form of land rental to one partner with an area of 14 m².

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas

Profitabilitas dan kinerja keuangan segmen Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Profitability and Financial Performance of the Miscellaneous Services, Facilities and Utilities Business Segment

The profitability and financial performance of the Miscellaneous Services, Facilities and Utilities Business segment can be seen in the table below.

Kinerja Keuangan Segmen Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas Financial Performance of the Miscellaneous Services, Facilities and Utilities Business Segment	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income					
Pendapatan operasi segmen Segment Operating Income	23.442	17.066	6.376	37,36	▲
Beban pokok pendapatan Cost of Revenue	(2.723)	(3.530)	807	(22,85)	▼
Laba bruto Gross Profit	20.719	13.536	7.183	53,07	▲
Beban umum dan administrasi General and Administrative Expenses	-	-	-	-	
Pendapatan operasi lainnya Other Operating Income	-	-	-	-	
Beban operasi lainnya Other Operating Expenses	-	-	-	-	
Laba usaha Operating Profit	20.719	13.536	7.183	53,07	▲
Pendapatan keuangan Financial Income	-	-	-	-	
Beban keuangan Financial Expense	-	-	-	-	
Laba sebelum pajak penghasilan badan Profit before corporate income tax	20.719	13.536	7.183	53,07	▲

Kinerja Keuangan Segmen Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas Financial Performance of the Miscellaneous Services, Facilities and Utilities Business Segment	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Posisi Keuangan Financial Position					
Aset segmen Segment Assets	8.322	7.085	1.237	17,45	▲
Liabilitas segmen Segment Liabilities	-	64	(64)	-	
Informasi Lainnya Other Information					
Pengeluaran modal Capital Expenditure	-	3.437	(3.437)	-	
Penyusutan dan amortisasi segmen Segment depreciation and amortization	295	309	(14)	(4,63)	▼
Rasio-rasio Profitabilitas Profitability Ratios					
Margin Laba Bruto (%) Gross Profit Margin (%)	88,38	79,32	9,07		▲
Margin Laba Usaha (%) Operating Profit Margin (%)	88,38	79,31	9,07		▲
Imbal Hasil Aset (%) Return on Assets (%)	281,68	240,86	40,83		▲

Non Segmen

Profitabilitas dan kinerja keuangan segmen Non Segmen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Non-Segment

Profitabilitas dan kinerja keuangan segmen Non Segmen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Profitabilitas dan kinerja keuangan segmen Non Segmen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
The profitability and financial performance of the Non-Segment segment can be seen in the table below.

Kinerja Keuangan Non Segmen Non-Segment Financial Performance	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income					
Pendapatan operasi segmen Segment Operating Income	-	-	-	-	
Beban pokok pendapatan Cost of Revenue	-	-	-	-	
Laba bruto Gross Profit	-	-	-	-	
Beban umum dan administrasi General and Administrative Expenses	(76.343)	(88.904)	12.560	(14,13)	▼
Pendapatan operasi lainnya Other Operating Income	3.781	286	3.495	1.222,78	▲
Beban operasi lainnya Other Operating Expenses	(8.706)	(13.172)	4.466	(33,90)	▼
Laba usaha Operating Profit	(81.269)	(101.790)	20.521	(20,16)	▼

Profitabilitas dan kinerja keuangan segmen Non Segmen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
The profitability and financial performance of the Non-Segment segment can be seen in the table below.

Kinerja Keuangan Non Segmen Non-Segment Financial Performance	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan keuangan Financial Income	38.037	26.528	11.509	43,38	▲
Beban keuangan Financial Expense	(46.424)	(58.598)	12.174	(20,77)	▼
Laba sebelum pajak penghasilan badan Profit before corporate income tax	(89.657)	(133.860)	44.203	(33,02)	▼
Posisi Keuangan Financial Position					
Aset segmen Segment Assets	748.369	1.082.115	(333.746)	(30,84)	▼
Liabilitas segmen Segment Liabilities	80.055	87.871	(7.817)	(8,90)	▼
Informasi Lainnya Other Information					
Pengeluaran modal Capital Expenditure	-	803	(803)	-	
Penyusutan dan amortisasi segmen Segment depreciation and amortization	3.337	3.148	189	6,02	▲
Rasio-rasio Profitabilitas Profitability Ratios					
Margin Laba Bruto (%) Gross Profit Margin (%)	-	-	-		-
Margin Laba Usaha (%) Operating Profit Margin (%)	-	-	-		-
Imbal Hasil Aset (%) Return on Assets (%)	-	-	-		-

Segmen Geografis
Geographic Segment

Di samping segmen usaha, Laporan Keuangan Perusahaan juga menyajikan informasi terkait segmen geografis yang menggambarkan persebaran kegiatan operasi dan usaha IPCC.

In addition to business segments, the Company's Financial Statements also presents information related to geographic segments which describes the distribution of IPCC's operations and business activities.

Jumlah dan Kontribusi Pendapatan Segmen Geografis Terhadap Pendapatan Operasi IPCC
Amount and Contribution of Geographic Segment Revenue to IPCC Operating Income

Segmen Geografis Geographic Segment	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3 = 1-2)	(3/2)	
Tanjung Priok, Jakarta	687.409	93,50	701.429	96,54	(14.021)	(2,00)	▼
Belawan, Sumatra Utara Belawan, North Sumatra	23.183	3,15	13.197	1,82	9.987	75,67	▲
Makassar, Sulawesi Selatan Makassar, South Sulawesi	15.668	2,13	5.514	0,76	10.154	184,14	▲
Pontianak, Kalimantan Barat Pontianak, West Kalimantan	6.316	0,86	4.946	0,68	1.370	27,70	▲
Balikpapan, Kalimantan Timur Balikpapan, East Kalimantan	1.761	0,24	-	-	1.761	-	
Panjang, Lampung	-	-	1.219	0,17	(1.219)	-	
Gresik, Jawa Timur Gresik, East Java	868	0,12	267	0,04	601	224,65	▲
Jumlah Pendapatan Operasi Total Operating Income	735.205	100,00	726.573	100,00	8.632	1,19	▲

Komposisi Pendapatan Segmen Geografis Terhadap Pendapatan Operasi IPCC
Composition of Geographic Segment Revenue to IPCC Operating Income

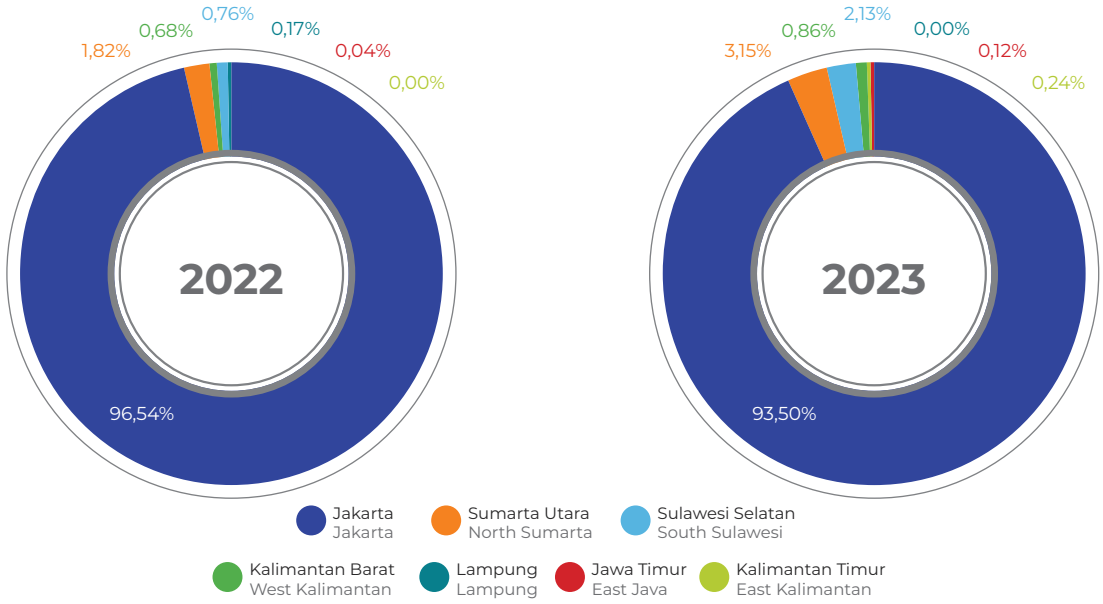

Jumlah dan Kontribusi Aset Tidak Lancar Segmen Geografis Terhadap Aset Tidak Lancar IPCC
Amount and Contribution of Geographic Segment Non-Current Assets to IPCC Non-Current Assets

Segmen Geografis Geographic Segment	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3 = 1-2)	(3/2)	
Jakarta	1.022.459	99,35	1.088.727	99,35	(66.268)	(6,09)	▾
Gresik, Jawa Timur Gresik, East Java	6.733	0,65	7.124	0,65	(390)	(5,48)	▾
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	1.029.192	100,00	1.095.851	100,00	(66.659)	(6,08)	▾

Komposisi Aset Tidak Lancar Segmen Geografis Terhadap Aset Tidak Lancar IPCC
Composition of Geographic Segments Non-Current Assets to IPCC Non-Current Assets

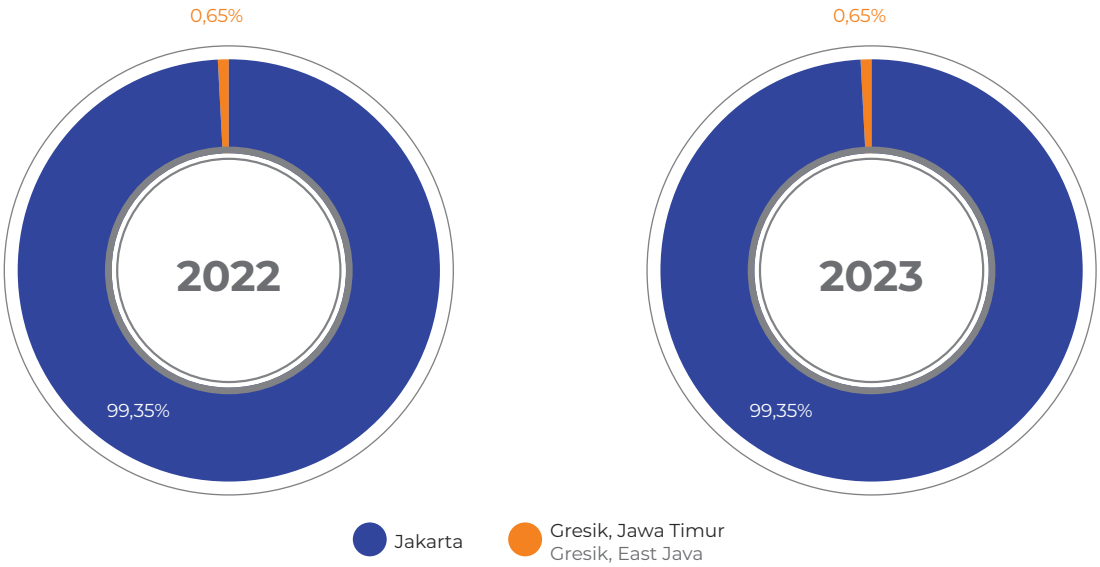

Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

Segmentasi, Target dan *Positioning*

Perusahaan didirikan sebagai terminal kendaraan komersial yang secara konsisten melayani kebutuhan *customer* untuk penanganan kegiatan bongkar muat, penumpukan, dan *receiving/delivery* kargo kapal Ro-Ro dan *Pure Car Carrier* berupa CBU/mobil, motor, truk/bus, alat berat, *sparepart*, dan kargo lainnya baik untuk layanan Internasional maupun Domestik.

Perusahaan menargetkan pelanggan tidak hanya skala nasional namun juga skala internasional, karena telah memiliki jasa pelayanan berbasis digital yang terstandarisasi, baik untuk Domestik maupun Internasional. Diantaranya *car maker, shipping line, user* dari *makers*, dan lain-lain.

Sejalan dengan segmentasi dan target pelanggan yang dipilih, Perusahaan memposisikan diri sebagai pilihan utama dan khusus untuk pelayanan bongkar muat kendaraan di Indonesia yang terstandarisasi dan memenuhi keinginan pelanggan dengan memberikan kepastian dan kualitas dalam melaksanakan pelayanan kargo kendaraan.

Pangsar Pasar

Dalam mewujudkan visi sebagai Operator Terminal Kendaraan Berkelas Dunia, IPCC terus berupaya meningkatkan jumlah pangsa pasar yang dimiliki. Upaya tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan program pengembangan bisnis berjangka pendek, menengah, dan panjang yang telah disusun. Berikut gambaran pangsa pasar IPCC untuk pangsa pasar CBU, Motor, Bus/*Truck*, dan Alat Berat selama tahun 2023.

Segmentation, Targeting and Positioning

The company was established as a commercial vehicle terminal that consistently serves customer needs for handling loading/unloading activities, stacking, and receiving/delivery of Ro-Ro and Pure Car Carrier cargo in the form of CBU/cars, motorbikes, trucks/buses, heavy equipment, spare parts, and other cargo for both international and domestic services.

The company targets the customers not only on a national scale but also on an international scale, because it has standardized digital-based services, both domestic and international. These include car makers, shipping lines, users from makers, and others.

In line with the selected customer segmentation and targets, the Company positions itself as the main and special choice for vehicle loading and unloading services in Indonesia which are standardized and fulfill customer desires by providing certainty and quality in carrying out vehicle cargo services.

Market Share

In realizing its vision as a World Class Vehicle Terminal Operator, IPCC continues to strive to increase the market share it has. These efforts are realized by implementing short, medium and long term business development programs that have been prepared. The following is an overview of the IPCC market share for CBU, Motorcycle, Bus/Truck and Heavy Equipment market shares during 2023.

Informasi *Market Share* Internasional
Informasi Market Share Internasional

NO	NAMA BRAND	THROUGHPUT CBU JANUARI-DESEMBER	PERSEN
1.	Toyota	107.135	23,75%
2.	Mitsubishi	92.314	20,47%
3.	Daihatsu	86,618	19,20%
4.	Hyundai	48.920	10,85%
5.	Suzuki	61.085	13,54%
6.	Honda	29.248	6,48%
7.	Isuzu	8.759	1,94%
8.	Mazda	6.050	1,34%
9.	Subaru	747	0,17%
10.	Others	10.163	2.25%
	Jumlah	451.039	100%

NO	NAMA BRAND	THROUGHPUT BUS/TRUCK JANUARI-DESEMBER	PERSEN
1.	Volvo	1.694	28.45%
2.	Mercedes	1.359	22.82%
3.	Scania	724	12.16%
4.	Caterpillar	330	5.54%
5.	Iveco	325	5.46%
6.	Renault	318	5.34%
7.	Hino	272	4.57%
8.	Tata	110	1.85%
9.	Ud	87	1.46%
10.	Others	736	12.36%
	Jumlah	5.955	100%

NO	NAMA BRAND	THROUGHPUT ALAT BERAT JANUARI-DESEMBER	PERSEN (Jan-Des)
1.	Caterpillar	1.535	22.79%
2.	Hitachi	1.366	20.28%
3.	Kobelco	1.190	17.67%
4.	Komatsu	786	11.67%
5.	Sumitomo	749	11.12%
6.	Linkbelt	241	3.58%
7.	Doosan	221	3.28%
8.	Case	103	1.53%
9.	Volvo	94	1.40%
10.	Others	450	6.68%
	Jumlah	6.735	100%

Market Share Kargo Kendaraan Internasional
Market Share Kargo Kendaraan Internasional

Handling Cargo Internasional (per Des 2023)
(per Des 2023)

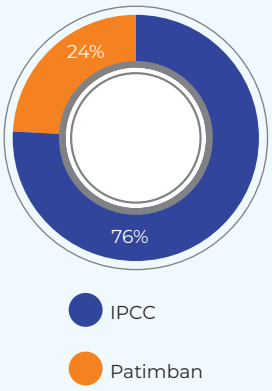

Terminal Terminal	Total (unit)
IPC	451.039
Patimban	141.396
Total Cargo International	**592.435**

Handling Ekspor Kendaraan Indonesia (per Des 2023)
(per Des 2023)

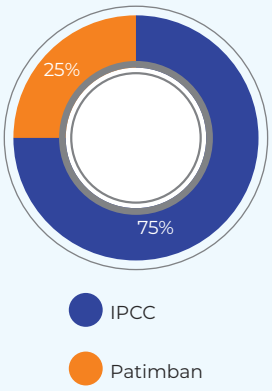

Terminal Terminal	Total (unit)
IPCC	380.872
Patimban	124.413
Total Ekspor	**505.285**

Handling Impor Kendaraan Indonesia (per Des 2023)
(per Des 2023)

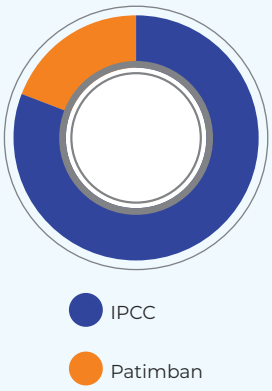

Terminal Terminal	Total (unit)
IPC	70.167
Patimban	16.983
Lainnya Lainnya	1.765
Total Impor	**84.348**

- **Untuk pasar internasional (ekspor – impor) IPCC telah menghandle 76% dari total cargo kendaraan di Indonesia.**
- **Cargo ekspor yang ditangani di Patimban adalah cargo dengan tujuan Kawasan ASEAN, dibawa oleh Kapal MV Siem Copernicus, NYK Lines dengan kargo Toyota, Hino, Daihatsu, Honda, dan Mitsubishi.**
- **Sedangkan untuk cargo impor di Patimban, adalah cargo dari negara Brunei, Filipina, dan Jepang.**

- Untuk pasar internasional (ekspor – impor) IPCC telah menghandle 76% dari total cargo kendaraan di Indonesia.
- Cargo ekspor yang ditangani di Patimban adalah cargo dengan tujuan Kawasan ASEAN, dibawa oleh Kapal MV Siem Copernicus, NYK Lines dengan kargo Toyota, Hino, Daihatsu, Honda, dan Mitsubishi.
- Sedangkan untuk cargo impor di Patimban, adalah cargo dari negara Brunei, Filipina, dan Jepang.

Strategi Pemasaran

Perusahaan terus menyempurnakan strategi pemasaran sejalan dengan program dalam Rencana Kerja Manajemen dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelanggan. Beberapa strategi pemasaran sebagai fokus Perusahaan pada tahun 2023 diantaranya adalah:

1. Kegiatan Marketing

Marketing Strategy

The Company continues to refine its marketing strategy in line with the programs in the Management Work Plan and the Company's Work Plan and Budget which are prepared in accordance with developments in customer needs. Several marketing strategies as the Company's focus in 2023 include:

1. Marketing Activities

Tanggal Date	Kegiatan Activity	Maksud dan Tujuan Purpose and Objective
8 Agustus 2023 August 8, 2023	Penandatanganan Perjanjian Layanan Operasi Unit CBU Hyundai dengan PT Glovis Indonesia International Signing of Hyundai CBU Unit Operation Services Agreement with PT Glovis Indonesia International	Memberikan layanan *Vehicle Distribution Center* (VDC) sebelum kargo kendaraan didistribusikan ke *dealer*. Providing Vehicle Distribution Center (VDC) services before vehicle cargo is distributed to dealers.
4 September 2023 September 4, 2023	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Jasa Pelayanan Kepelabuhanan dengan PT Suzuki Indomobil Motor Signing of Port Services Cooperation Agreement with PT Suzuki Indomobil Motor	Memberikan layanan operasi yang terdiri dari Penumpukan, *Cargodoring*, dan *Receiving*. Providing operational services consisting of Stacking, Cargodoring and Receiving.

Tanggal Date	Kegiatan Activity	Maksud dan Tujuan Purpose and Objective
4 September 2023 September 4, 2023	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Jasa Pelayanan Kepelabuhanan dengan PT Suzuki Indomobil Sales Signing of Port Services Cooperation Agreement with PT Suzuki Indomobil Sales	Memberikan layanan operasi yang terdiri dari Penumpukan, *Cargodoring*, dan *Delivery*. Providing operational services consisting of Stacking, Cargodoring and Delivery.
13 Oktober 2023 October 13, 2023	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Jasa Pelayanan Kepelabuhanan dengan PT Plaza Auto Mega (Subaru) Signing of Port Services Cooperation Agreement with PT Plaza Auto Mega (Subaru)	Memberikan layanan operasi yang terdiri dari Penumpukan, *Cargodoring*, dan *Delivery*. Providing operational services consisting of Stacking, Cargodoring and Delivery.
13 Oktober 2023 October 13, 2023	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Layanan Operasi CBU Subaru dengan PT Plaza Auto Mega (Subaru) Signing of the Subaru CBU Operational Services Cooperation Agreement with PT Plaza Auto Mega (Subaru)	Memberikan layanan *Vehicle Distribution Center* (VDC) sebelum kargo kendaraan didistribusikan ke *dealer*. Providing Vehicle Distribution Center (VDC) services before vehicle cargo is distributed to dealers.
1 November 2023 November 1, 2023	Penandatanganan Perjanjian Pelayanan Kepelabuhanan Pelayanan Bongkar Muat oleh IPCC dengan Hyundai Glovis Co., Ltd Signing of Port Services Agreement for Loading/Unloading Services by IPCC with Hyundai Glovis Co., Ltd	Memberikan layanan bongkar muat untuk kargo kendaraan Hyundai. Providing loading/unloading services for Hyundai vehicle cargo.
22 Desember 2023 December 22, 2023	Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Kerja Sama dengan PT Isuzu Astra Motor Indonesia Signing of Minutes of Cooperation Extension Agreement with PT Isuzu Astra Motor Indonesia	Memberikan layanan operasi yang terdiri dari Penumpukan, *Cargodoring*, dan *Delivery*. Providing operational services consisting of Stacking, Cargodoring and Delivery.
27 Desember 2023 December 27, 2023	Penandatanganan Perjanjian Penanganan dan Penumpukan Kargo di Terminal Internasional dengan PT Glovis Indonesia Logistics Signing of Cargo Handling and Stacking Agreement at the International Terminal with PT Glovis Indonesia Logistics	Memberikan layanan operasi yang terdiri dari Penumpukan, *Cargodoring*, dan *Receiving/Delivery*. Providing operational services consisting of Stacking, Cargodoring, and Receiving/Delivery.

2. Retensi Customer

2. Customer Retention

Tanggal Date	Kegiatan Activity	Maksud dan Tujuan Purpose and Objective
1 Desember 2023 December 1, 2023	Digitalisasi *Customer Care Station* Digitalization of Customer Care Station	Peningkatan layanan Perusahaan berupa digitalisasi penanganan keluhan sehingga lebih mudah untuk diakses dan digunakan oleh pelanggan serta *follow up* dan *record* data yang lebih baik. Improvement of the Company's services in the form of digitalization of complaint handling so that it is easier for customers to access and use as well as better follow-up and data records.
1 Desember 2023 December 1, 2023	Survei Kepuasan Pelanggan Customer satisfaction survey	Survei yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasaan pelanggan serta mendapatkan saran dan masukan dari pelanggan terhadap layanan Perusahaan. Surveys are conducted to measure the level of customer satisfaction and obtain suggestions and input from customers regarding the Company's services.

PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL ATAU PENUGASAN LAIN

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki penugasan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

IMPLEMENTATION OF NATIONAL STRATEGIC PROJECTS OR OTHER ASSIGNMENTS

Until the end of 2023, the Company has no assignments in implementing National Strategic Projects (PSN).

TEKNOLOGI

Bagi IPCC, Teknologi Informasi (TI) memiliki peran penting dalam menunjang proses bisnis. Oleh karena itu, penerapan TI yang optimal dapat mendorong IPCC menjadi lebih produktif, kompetitif, dan cepat beradaptasi terhadap perubahan serta tantangan bisnis, sehingga mampu membawa IPCC dalam mencapai percepatan pertumbuhan bisnis. Dengan demikian, keberadaan TI diharapkan mampu mendukung target-target yang telah ditentukan.

Organisasi Penanggung Jawab Pengelola Teknologi Informasi

Pengelolaan TI di lingkungan IPCC dijalankan oleh Divisi Teknik dan Sistem Informasi yang berada di bawah naungan Direktorat Operasi dan Teknik. Fungsi perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan dukungan layanan TI berada di bawah tanggung jawab Divisi Teknik dan Sistem Informasi, meliputi:

1. Perencanaan strategis dan operasional sistem informasi yang meliputi program perencanaan dan penggunaan optimal dari sumber daya teknologi informasi.
2. Pengembangan sistem dan implementasi solusi teknologi informasi meliputi pengelolaan proyek sistem informasi, pengembangan sistem, serta pengujian dan validasi sistem.
3. Dukungan layanan Sistem Informasi yang berkualitas dan layanan yang memadai kepada pengguna muliputi layanan monitoring operasional TI, dukungan keamanan sistem, dan layanan kontinuitas bisnis.

Strategi Teknologi Informasi

Strategi pengembangan dan implementasi TI harus selaras dan mendukung strategi korporasi Pelindo, Sub Holding SPMT, dan IPCC sebagai operator untuk Terminal Kendaraan agar dapat memberikan dampak dalam peningkatan kualitas dan efisiensi proses bisnis serta dapat memberikan dukungan informasi kepada manajemen perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan.

TECHNOLOGY

For IPCC, Information Technology (IT) has an important role in supporting business processes. Therefore, optimal IT implementation can encourage IPCC to be more productive, competitive and quickly adapt to changes and business challenges, so that it can bring IPCC to achieve accelerated business growth. Thus, the existence of IT is expected to be able to support the targets that have been determined.

Organization Responsible for Information Technology Management

IT management within the IPCC environment is carried out by the Engineering and Information Systems Division which is under the auspices of the Operations and Engineering Directorate. The functions of planning, developing, managing and supporting IT services are under the responsibility of the Engineering and Information Systems Division, including:

Strategic and operational planning of information systems which includes planning programs and optimal use of information technology resources.

System development and implementation of information technology solutions including information system project management, system development, and system testing and validation.

Quality Information System service support and adequate services to users including IT operational monitoring services, system security support and business continuity services.

Information Technology Strategy

The IT development and implementation strategy must be in line with and support the corporate strategy of Pelindo, SPMT Sub Holding, and IPCC as operators for Car Terminals so that they can have an impact on improving the quality and efficiency of business processes and can provide information support to company management in making decisions.

IPCC memiliki 5 (lima) elemen program standarisasi pada strategi TI dalam menjalankan bisnisnya, di mana pada tahun 2022 IPCC mulai melakukan persiapan transformasi holistik pada 5 (lima) elemen tersebut secara bertahap, sebagai berikut:

The IPCC has 5 (five) elements of a standardization program for IT strategy in running its business, which in 2022 the IPCC began to carry out holistic transformation preparations for these 5 (five) elements in stages, as follows:

5 (Lima) Elemen Standarisasi
5 (Five) Elements of Standardisation

Proses Bisnis Business process	**Infrastruktur & Peralatan** Infrastructure & Equipment	**Sumber Daya** Resource	**Teknologi Informasi** Techology Information	**HSSE** HSSE
Standardisasi proses bisnis **Standardization of business processes** Berdasarkan P&C untuk meningkatkan kinerja operasional Standardisasi komersial Based on P&C to improve operational performance Commercial standardization	**Standardisasi infrastruktur, sarana dan peralatan** **Standardization of infrastructure, facilities and equipment** Untuk mengakomodasi atau pelanggan atau komoditas yang ditargetkan To accommodate or target customers or commodities	Mengembangkan skills dan kompetensi dalam organisasi untuk menyelaraskan dengan standar industri serta mendukung organisasi berbasis P&C Develop skills and competencies within the organization to align with industry standards and support P&C-based organizations	Standardisasi teknologi informasi untuk mendukung arus informasi & operasi Technology standardisation information technology standardisation to support the flow of information & operations	Membangun budaya kesehatan dan keselamatan di terminal melalui standardisasi praktik keselamatan Building a culture of health and safety in the terminal through standardizing safety practices
Implementasi Planning & Control **Implementation of Planning & Controlling** di seluruh proses bisnis: 1. Flow bongkar-muat yang terstandar untuk kecepatan 2. Kinerja operasional 3. Yord preferred area 4. Deployment of equipment 5. Rostering dan deployment tenaga kerja 6. Control untuk memastikan target kinerja tercapai operasional Standardisasi komersial Across business processes: 1. Standardized loading and unloading flow for speed 2. Operational performance 3. Berthing window 4. Yard preferred area 5. Deployment of equipment 6. Rostering and deployment of workforce 7. Control to ensure performance targets are achieved	**Infrastruktur** **Infrastructure** Yang andal dengan desain dan tata letak yang dioptimalkan berdasarkan model operasi standar (misalnya kedalaman draf, ketersediaan penyimpanan) Reliable infrastructure with optimized design and layout based on standard operating models (e.g. draft depth, storage availability)	Pelatihan khusus/ bersertifikat dan essential skills Special/certified training and essential skills	**Sistem** **Sistem** Untuk memfasilitasi kelancaran pertukaran informasi To facilitate the smooth exchange of information	Alat Pelindung Diri (APD) Personal Protective Equipment (PPE)
		Pelatihan Advanced Knowledge Advanced Knowledge Traini		Terminal steril dengan sistem keamanan modern Sterile terminal with modern security system
Komersial: **Comersial:** Standardisasi penawaran kualitas layanan, tariff, Kerjasama dengan PBM luar Pelindo untuk single billing dan agreement fee/revenue sharing Standardisation of offer-ings service quality, tariffs, Cooperation with PBM outside Pelindo for single billing and agreement fee/revenue sharing agreement	**Peralatan Pelabuhan** **Harbour Equipment** Industri yang andal den-gan produktivitas lebih tinggi dan O&M yang lebih rendah Reliable industrial port equipment with higher productivity and lower O&M	Pelatihan Kepemimpinan untuk Manajer & Supervisor Terminal Leadership Training for Terminal Managers & Supervisors	**Persyaratan minimum** **Persyaratan minimum** Standar teknologi (misalnya sensor, sistem operasi terminal) untuk mendukung operasi terminal Technology standards (e.g. sensors, terminal terminal operating system) to support operation terminal	Rencana Tanggap Darurat (emergency response plan) Emergency Response Plan (emergency response plan)
		Pelatihan dasar terminal non-kontainer Non-container terminal basic training		Induksi dan Pelatihan Keselamatan Induction and Safety Training
		Struktur organisasi berdasarkan P&C Organizational structure based on P&C		

Tahapan Transformasi
Transformation Stages

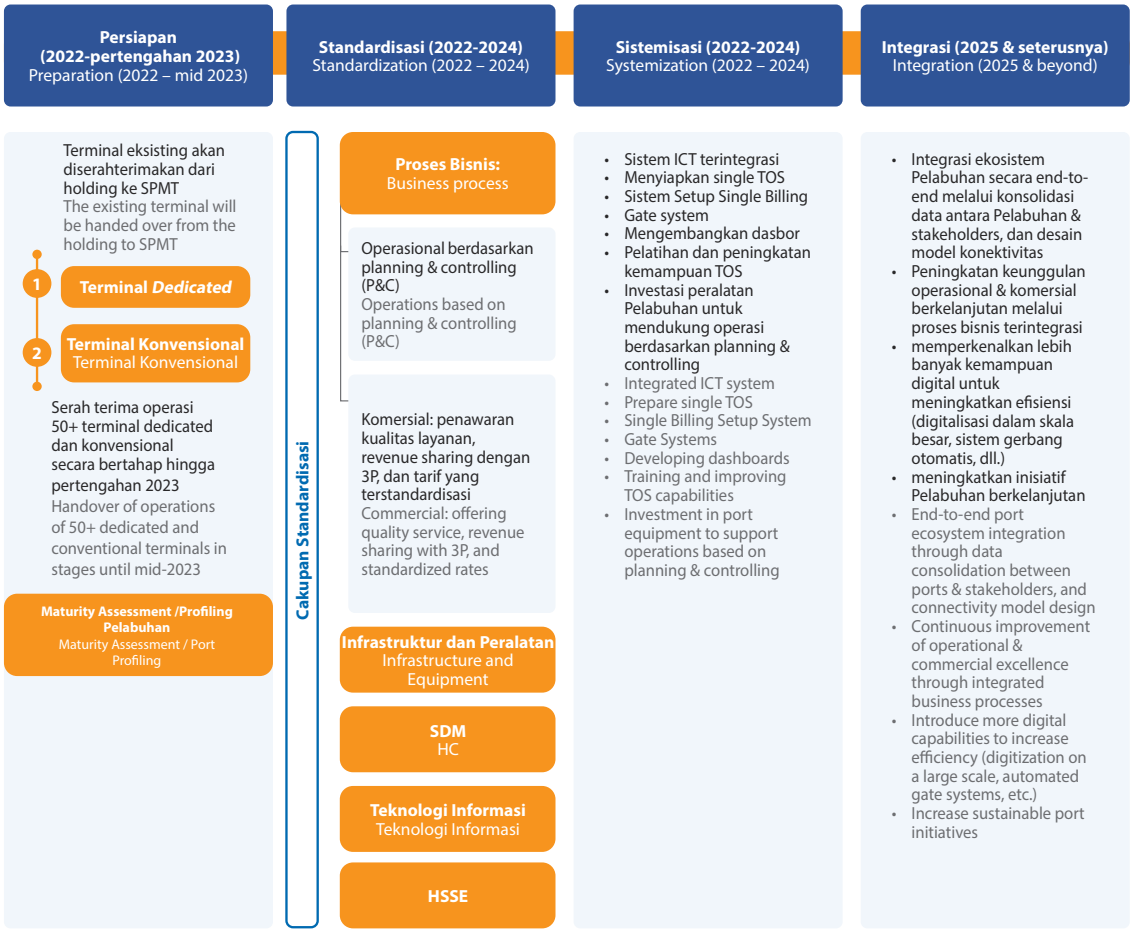

Visi dan Misi Penerapan Sistem Teknologi Informasi di Perusahaan

Vision and Mission for Implementing Information Technology Systems in Companies

VISI | VISION

Tersedianya ekosistem layanan bisnis dan operasional Car Terminal kelas dunia dengan pondasi Teknologi Informasi yang terintegrasi, adaptif serta agile mengikuti perkembangan dan kebutuhan bisnis serta trend teknologi.
Availability of a world-class Car Terminal business and operational services ecosystem with an integrated, adaptive and agile Information Technology foundation following developments and business needs and technological trends.

MISI | MISSION

- **Mendukung transformasi dan terwujudnya ekosistem Car Terminal dengan implementasi program digitalisasi system.**
- **Melakukan pengembangan dan penerapan integrasi layanan-layanan IT untuk ekosistem Car Terminal.**
- **Peningkatan dan pemenuhan Human Capital IT yang memiliki kompetensi untuk mengikuti perkembangan bisnis dan kebutuhan bisnis berbasis teknologi informasi.**
- Supporting the transformation and realization of the Car Terminal ecosystem by implementing a system digitalization program.
- Develop and implement integrated IT services for the Car Terminal ecosystem.
- ncreasing and fulfilling IT Human Capital which has the competence to keep up with business developments and information technology-based business needs.

Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi

Roadmap pengembangan dan implementasi TI mengacu terhadap Corporate Roadmap 2020-2024, di mana pada tahun 2023 IPCC memasuki fase "*Value Chain Expansion*" yang merupakan fase tahapan bagi IPCC untuk fokus kepada pengembangan lokasi bisnis di area terminal lainnya dan pengembangan sistem operasional untuk mendukung ekspansi bisnis tersebut.

Roadmap of Information Technology Development

The roadmap of IT development and implementation refers to the 2020-2024 Corporate Roadmap, which in 2023 the IPCC will enter the "Value Chain Expansion" phase, which is a phase for the IPCC to focus on developing business locations in other terminal areas and developing operational systems to support the business expansion.







2020	2021	2022	2023	2024
Business Stabilization	**Synergy & Improvement**	**Growth Through Integration**	**Value Chain Expansion**	**Value Chain Integration**
• Implementasi digital surveillance system guna meningkatkan control dan monitoring di Terminal • Implementasi aplikasi sistem cost accounting (akuntansi biaya) • Pembangunan dan implementasi autogate system pada terminal internasional yang terintegrasi dengan sistem pengguna jasa • Pengembangan dan implementasi aplikasi fixed asset • Pengembangan aplikasi SIMPER & SIMKEU khususnya terkait payroll pegawai. • Pengembangan dan implementasi aplikasi TPS Online sebagai portal pelaporan terkait dokumen kepabeanan • Implementation of a digital surveillance system to improve control and monitoring at the Terminal • mplementation of cost accounting system applications (cost accounting) • Development and implementation of an autogate system at international terminals that is integrated with service user systems • Development and implementation of fixed asset applications • Development of the SIMPER & SIMKEU application, especially regarding employee payroll • Development and implementation of the TPS Online application as a reporting portal related to customs documents	• Revitalisasi backbone infrastruktur IT (fiber optic & wireless access point) berbasis redundancy guna meningkatkan availability layanan • Pemenuhan terhadap perangkat end-user (handheld, HT, Radio ng) guna menjamin kelancaran kegiatan operasional • Implementasi aplikasi TOS Domestik yang berbasis planning control dan terintegrasi dengan sistem ERP • Peningkatan aplikasi TOS internasional yang terintegrasi dengan Portal Agen Pemerintahan (NLE, CEISA dan INSW) • Pengembangan dan implementasi aplikasi layanan keuangan (e-invoice, autocollection & AR Netting) • Revitalization of IT infrastructure backbone (fiber optic & wireless access points) based on redundancy to increase service availability • Fulfillment of end-user devices (handheld, HT, Radio rig) to ensure smooth operational activities • Implementation of a Domestic TOS application based on planning control and integrated with the ERP system • Improved international TOS applications that are integrated with the Government Agent Portal (NLE, CEISA and INSW) • Development and implementation of financial service applications (e-invoice, autocollection & AR Netting)	• Re-engineering terminal operating system (TOS) untuk Terminal Interasional berbasis trend teknologi terkini (cloud-based computing) • Pengembangan dan implementasi yang berorientasi kepada customer experience (Single Customer Portal & Customer Relationship Management System) • Peningkatan keamanan teknologi informasi terhadap kerentanan Cyber-Attack • Pengembangan dan implementasi Executive Information System Dashboard • Pengembangan teknologi RFID untuk optimalisasi kegiatan operasional di Terminal • Re-engineering Terminal Operating System (TOS) for International Terminals based on the latest technology trends (cloud-based computing) • Development and implementation oriented towards customer experience (Single Customer Portal & Customer Relationship Management System) • Increasing information technology security against Cyber-Attack vulnerabilities • Development and implementation of the Executive Information System Dashboard • Development of RFID technology to optimize operational activities at the Terminal	• Pengembangan aplikasi Terminal Operating System Domestik untuk seluruh wilayah satelit (cabang Perusahaan) • Re-engineering billing engine kebutuhan terminal operating system • Implementasi smart digital surveillance system untuk otomasi monitoring dan control kegiatan di Terminal • Adopsi latest trend dan teknologi (Cloud computing, IoT dan mobile devices) • Development of Domestic Terminal Operating System applications for all satellite areas (company branches) • Re-engineering billing engine terminal operating system requirements • Implementation of a smart digital surveillance system to automate monitoring and control of activities at the Terminal • Adoption of the latest trends and technology (Cloud computing, IoT and mobile devices)	• Implementasi single TOS dan single billing layanan car terminal • Integrasi dan otomasi layanan digital untuk seluruh proses bisnis di Car Terminal berbasis "single truth of data" • Layanan teknologi informasi yang terintegrasi kepada seluruh stakeholders (car maker sampai dengan government agency) • Implementation of single TOS and single billing for car terminal services • Integration and automation of digital services for all business processes at the Car Terminal based on "single truth of data" • Integrated information technology services to all stakeholders (car makers to government agencies)

Program Teknologi Informasi dan Realisasi Tahun 2023

Untuk tahun 2023, IPCC telah merencakan pengembangan sistem informasi yang dan sesuai dengan fase "*Value Chain Expansion*" pada *Corporate Roadmap*, yaitu sebagai berikut:

Information Technology Program and Realization in 2023

For 2023, the IPCC has planned the development of an information system that is in accordance with the "Value Chain Expansion" phase in the Corporate Roadmap, namely as follows:

1. Peningkatan layanan CCTV *digital surveillance system* guna mendukung kebutuhan pengamanan terminal.
2. Pengembangan dan implementasi aplikasi e-Audit sebagai program digitalisasi kegiatan internal audit di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
3. Pengembangan dan implementasi Aplikasi SIM Risk.
4. Pengembangan sistem *customer portal* untuk Terminal Domestik.
5. *Enhancement* sistem TOS dan *Billing platform*.
6. Transformasi digital melalui implementasi TOS CARDOM di terminal satelit.
7. *Integrase* laporan keuangan untuk wilayah operasional di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
8. Pengembangandan implementasi aplikasi e-Audit yang meliputi sistem e-Office (PEO), sistem pengadaan (e-Procurement), *platform* KPI individu dan sistem pengarsipan (e-Arsip).

Adapun realisasi tahun 2023 dari rencana program tersebut di atas, sebagai berikut:
1. Implementasi sistem *Single* ERP-SAP.
2. Pembangunan Ruang *Integrated Terminal Terminal Monitoring Sistem* (ITMS).
3. Implementasi Sistem Billing Praya.
4. Pembangunan Portal *Customer Care System* (CCS).
5. Pengembangan SDWAN dan Peningkatan *Security Network*.
6. Implementasi Aplikasi PEO, PCICO, Portaverse.

1. Improved CCTV digital surveillance system services to support terminal security needs.
2. Development and implementation of the e-Audit application as a digitalization program for internal audit activities within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
3. Development and implementation of the SIM Risk Application.
4. Development of a customer portal system for Domestic Terminals.
5. Enhancement of the TOS system and Billing platform.
6. Digital transformation through the implementation of TOS CARDOM at satellite terminals.
7. Integrate financial reports for operational areas at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
8. Development and implementation of e-Audit applications which include e-Office systems (PEO), procurement systems (e-Procurement), individual KPI platforms and archiving systems (e-Arsip).

The realization in 2023 of the program plan above is as follows:
1. Implementation of the Single ERP-SAP system.
2. Construction of an Integrated Terminal Monitoring System (ITMS) room.
3. Implementation of the Praya Billing System.
4. Development of a Customer Care System (CCS) Portal.
5. SDWAN Development and Network Security Improvement.
6. Implementation of PEO, PCICO, Portaverse Applications.

Investasi Teknologi Informasi

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah melakukan investasi untuk pengembangan TI, antara lain sebagai berikut:

Information Technology Investment

Throughout 2023, the Company has invested in IT development, including the following:

No.	Investasi Teknologi Informasi Information Technology Investment	Biaya Cost (Rp)
1	Pengadaan dan instalasi penambahan perangkat *Automated Gate* di Terminal Domestik Tanjung Priok Procurement and installation of additional Automated Gate devices at the Tanjung Priok Domestic Terminal	839.037.649
	Jumlah Total	**839.037.649**

Adapun jumlah investasi TI selama tahun 2023 sebesar Rp839,04 juta, mengalami kenaikan 16,37% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp721,00 juta. Hal ini terutama disesuaikan dengan kebutuhan program pengembangan teknologi informasi.

The total IT investment during 2023 is Rp839.04 million, an increase of 16.37% compared to the previous year of IDR 721.00 million. This is mainly tailored to the needs of the information technology development program.

Penelitian dan Pengembangan

Research and Development

KAJIAN POLA DISTRIBUSI CARGO RORO KENDARAAN DAN PENUMPANG SERTA POTENSI PENGEMBANGAN BISNIS IPCC DI WILAYAH INDONESIA TIMUR

Dalam rangka persiapan penjajakan potensi ekspansi di wilayah Pelindo Regional 3 dan 4, pada tahun 2023, IPCC melaksanakan kajian terkait potensi pengembangan bisnis dan ditribusi kargo kendaraan dan RORO di wilayah Indonesia bagian Timur. Kajian ini akan menjadi dasar strategi IPCC dalam melakukan ekspansi wilayah dan layanan di wilayah tersebut, termasuk penentuan tahap awal prioritas wilayah yang paling potensial bagi IPCC untuk mengembangkan bisnisnya. Selain dari kajian ini, IPCC juga tetap mempertimbangkan arahan dari Pelindo dalam melakukan penjajakan bisnis untuk melanjutkan ekspansi di tahun 2024.

Dalam rangka penguatan nilai tambah layanan jasa terminal berbasis RORO di wilayah Indonesia Timur, IPCC memiliki potensi untuk meningkatkan fasilitasnya pada layanan RORO dan Penumpang, konsolidasi cargo RORO, termasuk penyediaan layanan pendukung konektivitas dari sumber cargo menuju ke terminal maupun sebaliknya. IPCC memiliki kekuatan jejaring terminal (satelit) dalam Pelindo Group menjadi salah satu nilai plus sebagai penyediaan jasa. Pengembangan fasilitas layanan terminal dari lini terminal dan layanan pendukung distribusi cargo RORO dapat dilakukan dengan kolaborasi bersama mitra-mitra bisnis, termasuk pemiliki cargo dan pelayaran.

STUDY OF RORO VEHICLE AND PASSENGER CARGO DISTRIBUTION PATTERNS AND POTENTIAL FOR IPCC BUSINESS DEVELOPMENT IN THE EASTERN INDONESIA REGION

In preparation for exploring expansion potential in the Pelindo Regional 3 and 4 areas, in 2023, the IPCC is carrying out a study regarding the potential for business development and distribution of vehicle cargo and RORO in the Eastern part of Indonesia. This study will be the basis for IPCC's strategy in expanding its territory and services in the region, including determining the initial priority stages of areas with the most potential for IPCC to develop its business. Apart from this study, the IPCC also continues to consider directions from Pelindo in conducting business assessments to continue expansion in 2024.

In order to strengthen the added value of RORO-based terminal services in the Eastern Indonesia region, IPCC has the potential to improve its facilities for RORO and Passenger services, consolidate RORO cargo, including providing connectivity support services from the cargo source to the terminal and vice versa. IPCC has the strength of the terminal (satellite) network within the Pelindo Group, which is a plus for providing services. Development of terminal service facilities from terminal lines and RORO cargo distribution support services can be carried out in collaboration with business partners, including cargo and shipping owners.

Analisis Kinerja Keuangan

Laporan keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja dan telah mendapatkan opini laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Financial Performance Analysis

The financial statements of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja and have obtained an opinion that the financial statements are presented fairly in all material respects, the financial position of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk as of December 31, 2023, as well as its financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan

Financial Position Statement

Posisi Keuangan memberikan gambaran sekilas tentang kekuatan aset dan permodalan IPCC. Di tahun 2023, Jumlah Aset Perusahaan mencapai Rp1,79 triliun. Sedangkan struktur permodalan Perusahaan terdiri dari Liabilitas sebesar 31,62% dan Ekuitas sebesar 63,38%."
Financial Position provides a glimpse into the strength of IPCC's assets and capital. In 2023, the Company's Total Assets reached Rp1.79 trillion. Meanwhile, the Company's capital structure consists of Liabilities of 31.62% and Equity of 63.38%.

	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Aset Asset					
Aset Lancar Current Assets	759.122	1.095.977	(336.855)	(30,74)	▼
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	1.029.192	1.095.851	(66.659)	(6,08)	▼
Jumlah Aset Total Assets	1.788.314	2.191.828	(403.514)	(18,41)	▼
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity					
Liabilitas Liabilities					
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	205.968	634.871	(428.904)	(67,56)	▼
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	359.480	394.987	(35.507)	(8,99)	▼
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	565.448	1.029.858	(464.411)	(45,09)	▼
Ekuitas Equity					
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.222.867	1.161.970	60.897	5,24	▲
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**1.788.314**	**2.191.828**	**(403.514)**	**(18,41)**	▼

Aset
Assets

Total Aset Perusahaan tahun 2023 mencapai Rp1,79 triliun, turun 18,41% dibandingkan Total Aset tahun 2022 sebesar Rp2,19 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 2019-2023, Total Aset Perusahaan mengalami pertumbuhan 9,04%

The Company's Total Assets in 2023 reached Rp1.79 trillion, a decrease of 18.41% compared to Total Assets in 2022 of Rp2.19 trillion. At the Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2019-2023, the Company's Total Assets grew by 9.04%

Total Aset 2019-2023
Total Assets 2019-2023

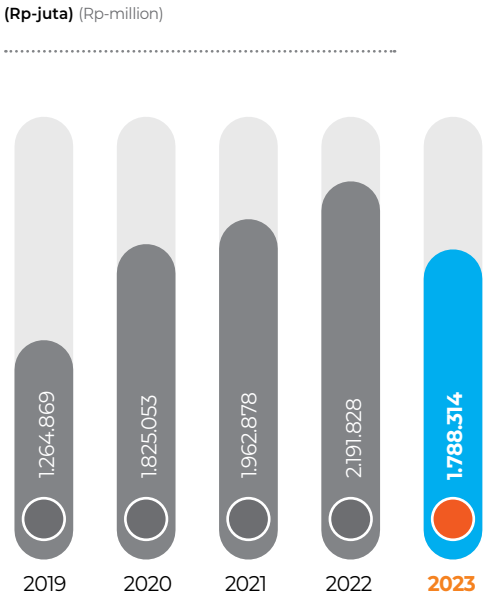

Aset Tahun 2022-2023
Assets in 2022-2023

	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Aset Lancar Current Assets	759.122	42,45	1.095.977	50,00	(336.855)	(30,74)	▾
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	1.029.192	57,55	1.095.851	50,00	(66.659)	(6,08)	▾
Jumlah Aset Total Assets	1.788.314	100,00	2.191.828	100,00	(403.514)	(18,41)	▾

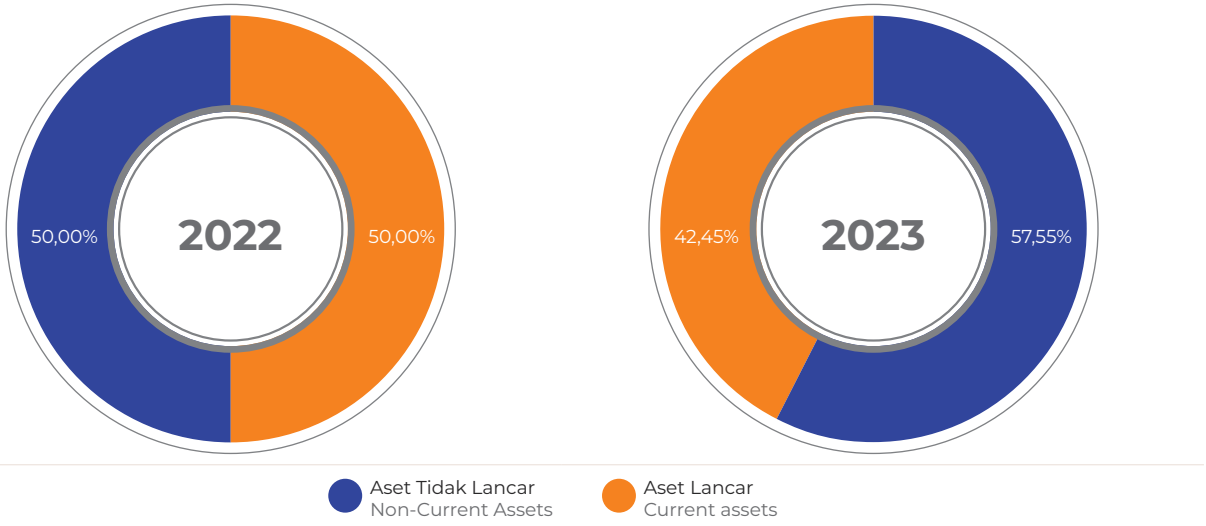

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 dibukukan sebesar Rp1,79 triliun, mengalami penurunan 18,41% atau setara dengan Rp403,51 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2,19 triliun.

Total assets as of December 31, 2022 were recorded at Rp1.79 trillion, a decrease of 18.41% or the equivalent of Rp403.51 billion compared to 2022 of Rp2.19 trillion.

Aset Lancar
Current Assets

Aset Lancar Tahun 2022-2023
Current Assets in 2022-2023

	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	670.182	1.019.761	(349.579)	(34,28)	▼
Piutang Usaha Pihak Ketiga – Neto Third Party Trade Receivable - Net	61.624	65.853	(4.229)	(6,42)	▼
Piutang Lain-lain Other receivables	-	289	(289)	-	
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka Advances and Prepaid Expenses	1.350	1.518	(167)	(11,03)	▼
Pendapatan Masih akan Diterima Accrued Income	9.572	6.310	3.262	51,71	▲
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	16.393	2.246	14.147	629,78	▲
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	759.122	1.095.977	(336.855)	(30,74)	▼

Pada akhir Desember 2023, jumlah aset lancar Perusahaan sebesar Rp759,12 miliar, mengalami penurunan 30,74% atau setara dengan Rp336,85 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,10 triliun. Penurunan ini disebabkan adanya pembayaran liabilitas sewa atas sewa aset pelabuhan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 sehingga berdampak signifikan pada penurunan kas dan setara kas tahun 2023.

At the end of December 2023, the Company's current assets amounted to Rp759.12 billion, a decrease of 30.74% or the equivalent of Rp336.85 billion compared to 2022 of Rp1.10 trillion. This decrease was caused by the payment of lease liabilities for the lease of port assets to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 so it has a significant impact on the decline in cash and cash equivalents in 2023.

Kas dan Setara Kas Tahun 2022-2023
Kas dan Setara Kas Tahun 2022-2023

Pos Akun Account Post	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Kas Cash	99	0,01	124	0,01	(25)	(20,08)	▼
Kas pada Bank Cash in Banks	35.083	5,23	19.637	1,93	15.446	78,65	▲
Deposito Berjangka Time Deposits	635.000	94,75	1.000.000	98,06	(365.000)	(36,50)	▼
Jumlah Total	670.182	100,00	1.019.761	100,00	(349.579)	(34,28)	▼

Posisi kas dan setara kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp670,18 miliar, mengalami penurunan 34,28% atau setara dengan Rp349,58 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,02 triliun. Penurunan ini disebabkan pembayaran liabilitas sewa atas sewa aset pelabuhan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 sebesar Rp443.918 juta.

Piutang Usaha Pihak Ketiga-Neto

Per 31 Desember 2022, jumah Piutang Usaha Pihak Ketiga-Neto dibukukan sebesar Rp61,62 miliar, mengalami penurunan 6,42% atau setara dengan Rp4,23 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp65,85 miliar. Penurunan ini sejalan dengan upaya manajemen perusahaan untuk percepatan proses penagihan dan pelunasan terhadap piutang usaha kepada pelanggan.

Piutang Lain-lain

Pada tahun 2023 Perusahaan tidak memiliki piutang lain-lain, sementara pada tahun 2022 Perusahaan membukukan piutang lain-lain sebesar Rp289,01 juta. Hal ini disebabkan karena terdapat pelunasan dari pihak ketiga.

Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka

Perusahaan tidak membukukan adanya nilai Uang Muka di sepanjang tahun 2023. Namun, pada tahun 2022 terdapat adanya nilai Uang Muka yang dibukukan Perusahaan sebesar Rp1,26 miliar. Hal ini disebabkan seluruh permintaan uang muka sudah dipertanggungjawabkan di akhir tahun 2023.

Sementara itu Beban Dibayar di Muka pada akhir 2023 tercatat sebesar Rp1,35 miliar, mengalami kenaikan 432,38% atau setara dengan Rp1,10 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp253,67 juta. Kenaikan ini disebabkan karena terdapat pembayaran atas kerja sama optimalisasi aset PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok untuk periode 1 Oktober 2023 s/d 30 September 2024.

The position of cash and cash equivalents as of December 31, 2022 was Rp670.18 billion, a decrease of 34.28% or the equivalent of Rp349.58 billion compared to 2022 of Rp1.02 trillion. This decrease was caused by the payment of lease liabilities for the lease of port assets to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 amounting to Rp443,918 million.

Third Party Trade Receivable-Net

As of December 31, 2022, the amount of Net Third Party Trade Receivables was recorded at Rp61.62 billion, a decrease of 6.42% or the equivalent of Rp4.23 billion compared to 2022 of Rp65.85 billion. This decrease is in line with the company management's efforts to accelerate the process of collecting and

Other Receivables

In 2023 the Company had no other receivables, while in 2022 the Company recorded other receivables amounting to Rp289.01 million. This was due to the payment from a third party.

Advances and Prepaid Expenses

The Company did not record any Advance Payment value throughout 2023. However, in 2022 the Company recorded an Advance Payment value of Rp1.26 billion. This was due to all requests for advances have been accounted at the end of 2023.

Meanwhile, Prepaid Expenses at the end of 2023 were recorded at Rp1.35 billion, an increase of 432.38% or the equivalent of Rp1.10 billion compared to 2022 of Rp253.67 million. This increase was due to payments for cooperation in optimizing the assets of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok for the period October 1, 2023 to September 30, 2024.

Pendapatan Masih akan Diterima

Pendapatan Masih Akan Diterima tahun 2023 sebesar Rp9,57 miliar, mengalami kenaikan 51,71% atau setara dengan Rp3,26 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp6,31 miliar. Kenaikan ini disebabkan karena belum diterbitkan nota pendapatan kegiatan akhir tahun.

Pajak Dibayar di Muka

Pajak Dibayar di Muka tahun 2023 sebesar Rp16,39 miliar, mengalami kenaikan 629,78% atau setara dengan Rp14,15 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2,25 triliun. Kenaikan ini disebabkan karena terdapat pembayaran pembayaran sewa aset termin ii periode 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2027.

Accrued Income

Accrued Income in 2023 was Rp9.57 billion, an increase of 51.71% or the equivalent of Rp3.26 billion compared to 2022 of Rp6.31 billion. This increase was due to the year-end activity revenue notes had not been issued.

Prepaid Taxes

Prepaid Taxes in 2023 amount to Rp16.39 billion, an increase of 629.78% or the equivalent of Rp14.15 billion compared to 2022 of Rp2.25 trillion. This increase was due to the payment of term II asset lease payments for the period January 1, 2023 to December 31, 2027.

Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

Aset Tidak Lancar Tahun 2022-2023
Non-Current Assets in 2022-2023

	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Aset Tetap – Neto Fixed Assets - Net	359.356	362.665	(3.309)	(0,91)	▼
Aset Tak Berwujud – Neto Intangible Assets - Net	4.631	3.594	1.037	28,86	▲
Aset Hak Guna – Neto Right-of-Use-Assets - Net	606.287	675.417	(69.129)	(10,24)	▼
Aset Pajak Tangguhan – Neto Deferred Tax Assets - Net	55.763	51.020	4.742	9,30	▲
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	3.155	3.155	(66.659)	(6,08)	▼
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	1.029.192	1.095.851	(403.514)	(18,41)	▼

Per 31 Desember 2023, jumlah aset tidak lancar dibukukan sebesar Rp1,03 triliun, mengalami penurunan 18,41% atau setara dengan Rp403,51 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,10 triliun.

ASET TETAP-NETO

Aset Tetap-Neto tahun 2023 dibukukan sebesar sebesar Rp359,36 miliar, mengalami penurunan 0,91% atau setara dengan Rp3,31 miliar dibandingkan tahun 2022 Rp362,66 miliar. Penurunan ini disebabkan terutama disebabkan oleh penurunan nilai buku aset tetap atas penyusutan selama tahun 2023.

ASET TAK BERWUJUD-NETO

Aset Tak Berwujud diamortisasi selama umur manfaat ekonomi aset dan dievaluasi apabila terdapat indikator adanya penurunan nilai untuk Aset Tak Berwujud.

Pada akhir Desember 2023, jumlah Aset Tak Berwujud-Neto dibukukan sebesar Rp4,63 miliar, mengalami kenaikan 28,86% atau setara dengan Rp1,04 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp3,59 miliar. Kenaikan ini disebabkan karena penambahan 2 item aset tak berwujud.

As of December 31, 2023, total non-current assets were recorded at Rp1.03 trillion, a decrease of 18.41% or the equivalent of Rp403.51 billion compared to 2022 of Rp1.10 trillion.

FIXED ASSETS-NET

Net Fixed Assets in 2023 were recorded at Rp359.36 billion, a decrease of 0.91% or the equivalent of Rp3.31 billion compared to Rp362.66 billion in 2022. This decrease was mainly due to a decrease in the book value of fixed assets due to depreciation during 2023.

INTANGIBLE ASSETS-NET

Intangible Assets are amortized over the useful economic life of the asset and evaluated if there are indicators of impairment for Intangible Assets.

At the end of December 2023, the amount of Net Intangible Assets was recorded at Rp4.63 billion, an increase of 28.86% or the equivalent of Rp1.04 billion compared to 2022 of Rp3.59 billion. This increase was due to the addition of 2 items of intangible assets.

ASET HAK GUNA-NETO

Perusahaan membukukan Aset Hak Guna-Neto tahun 2023 sebesar Rp606,29 miliar, mengalami penurunan 10,24% atau setara dengan Rp69,13 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp675,42 miliar. Penurunan ini disebabkan penurunan nilai buku asethak guna atas penyusutan selama tahun 2023.

ASET PAJAK TANGGUHAN-NETO

Nilai Aset Pajak Tangguhan-Neto per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp55,76 miliar, mengalami kenaikan 9,30% atau setara dengan Rp4,74 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp51,02 miliar. Kenaikan ini disebabkan karena terdapat penambahan aset tetap di tahun 2023, selain itu terdapat penambahan kerjasama sewa.

ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset Tidak Lancar Lainnya tahun 2023 dibukukan sebesar Rp3,15 miliar, tidak mengalami perubahan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,15 miliar. Hal ini disebabkan karena tidak ada penambahan atas uang jaminan dari vendor.

RIGHT-OF-USE ASSETS-NET

The company recorded Net Right-of-Use Assets in 2023 of Rp606.29 billion, a decrease of 10.24% or the equivalent of Rp69.13 billion compared to 2022 of Rp675.42 billion. This decrease was due to a decrease in the book value of usable assets due to depreciation during 2023.

DEFERRED TAX ASSETS-NET

The value of Net Deferred Tax Assets as of 31 December 2023 was recorded at Rp55.76 billion, an increase of 9.30% or the equivalent of Rp4.74 billion compared to 2022 of Rp51.02 billion. This increase is due to the addition of fixed assets in 2023, moreover the addition of lease cooperation.

OTHER NON-CURRENT ASSETS

Other Non-Current Assets in 2023 were recorded at Rp3.15 billion, unchanged from the previous year which amounted to Rp3.15 billion. This is due to no addition to the security deposit from the vendor.

Liabilitas
Liabilities

Total Liabilitas Perusahaan tahun 2023 mencapai Rp565,45 miliar, turun 45,09% dibandingkan Total Liabilitas tahun 2022 sebesar Rp1,03 triliun.

The Company's Total Liabilities in 2023 reached Rp565.45 billion, a decrease of 45.09% compared to Total Liabilities in 2022 of Rp1.03 trillion.

Total Liabilitas 2019-2023
Total Liabilities in 2019-2023

(Rp-juta) (Rp-million)

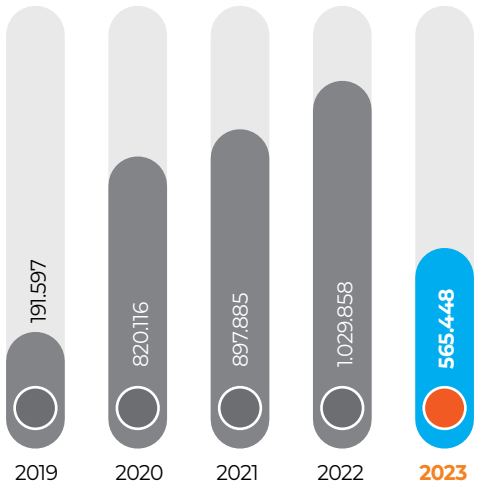

Liabilitas 2022-2023
Liabilities in 2022-2023

	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	205.968	36,43	634.871	61,65	(428.904)	(67,56)	▾
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	359.480	63,57	394.987	38,35	(35.507)	(8,99)	▾
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	565.448	100,00	1.029.858	100,00	(464.411)	(45,09)	▾

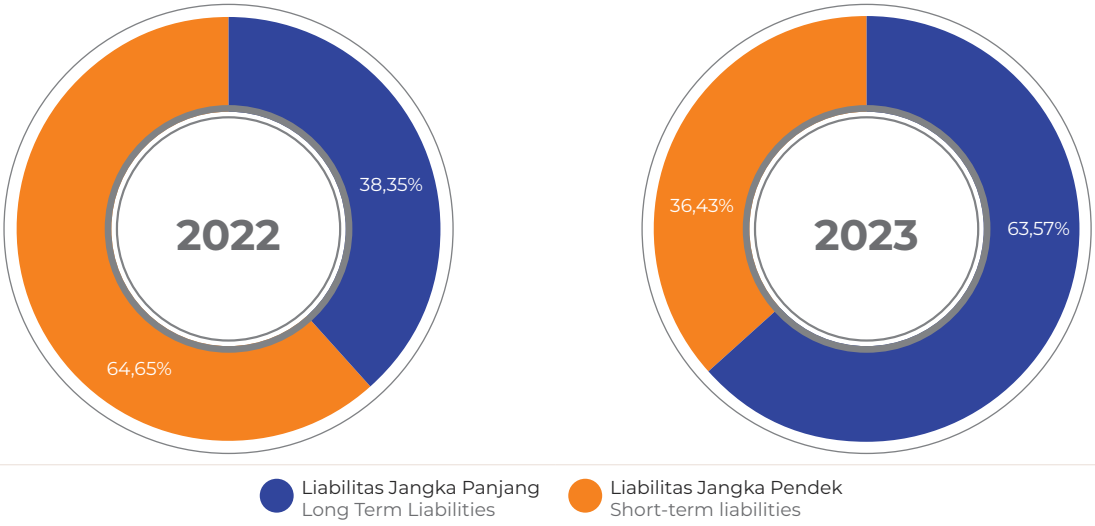

Jumlah Liabilitas Perusahaan di akhir Desember 2023 sebesar Rp565,45 miliar, mengalami penurunan 45,09% atau setara dengan Rp464,41 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,03 triliun.

The Company's Total Liabilities at the end of December 2023 amounted to Rp565.45 billion, a decrease of 45.09% or the equivalent of Rp464.41 billion compared to 2022 of Rp1.03 trillion.

Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2022-2023
Current Liabilities in 2022-2023

	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Utang Usaha Trade Payable	45.873	92.475	(46.602)	(50,39)	▼
Utang Lain-lain Other Payable	13.692	13.587	105	0,77	▲
Beban Akrual Accrued Expenses	42.363	54.608	(12.246)	(22,42)	▼
Utang Pajak Tax Payable	14.748	38.224	(23.476)	(61,42)	▼
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Other Current Liabilities	47.165	28.129	19.036	67,67	▲
Bagian Lancar atas Liabilitas Sewa Current Portion of Lease Liabilities	42.127	407.847	(365.720)	(89,67)	▼
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	205.968	634.871	(428.904)	(67,56)	▼

Pada akhir Desember 2023, jumlah Liabilitas Jangka Pendek dibukukan sebesar Rp205,97 miliar, mengalami penurunan 67,56% atau setara dengan Rp428,90 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp634,87 miliar.

Utang Usaha

Utang Usaha Perusahaan tahun 2023 sebesar Rp45,87 miliar, mengalami penurunan 50,39% atau setara dengan Rp46,60 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp92,47 miliar. Penurunan ini disebabkan terdapat realisasi tagihan dari vendor yang sudah dibayarkan.

Utang Lain-lain

Utang Lain-Lain Perusahaan tahun 2023 sebesar Rp13,69 miliar, mengalami kenaikan 0,77% atau setara dengan Rp104,84 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp13,59 miliar. Kenaikan ini disebabkan karena adanya investasi aset yang ditahun sebelumnya tidak ada.

At the end of December 2023, total Current Liabilities were recorded at Rp205.97 billion, a decrease of 67.56% or the equivalent of Rp428.90 billion compared to 2022 of Rp634.87 billion.

Trade Payable

The Company's Trade Payable in 2023 amounted to Rp45.87 billion, a decrease of 50.39% or the equivalent of Rp46.60 billion compared to 2022 of Rp 92.47 billion. This decrease was caused by the realization that bills from vendors had been paid.

Other Payable

The Company's Other Payable in 2023 amounted to Rp13.69 billion, an increase of 0.77% or the equivalent of Rp104.84 million compared to 2022 which amounted to Rp13.59 billion. 1This increase was due to investment in assets that did not exist in the previous year.

Beban Akrual

Accrued Expenses

Beban Akrual 2022-2023
Accrued Expenses in 2022-2023

	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Kerja Sama Mitra Usaha Business Partnerships	18.680	35.218	(16.539)	(46,96)	▼
Pegawai Employees	13.278	13.980	(702)	(5,02)	▼
Umum General	7.983	2.063	5.920	286,97	▲
Pemeliharaan Maintenance	5	1.949	(1.944)	(99,76)	▼
Administrasi Kantor Office Administration	1.466	1.363	102	7,51	▲
Bahan Material	951	35	916	2.620,23	▲
Jumlah Beban Akrual Total Accrued Expenses	42.363	54.608	(12.246)	(22,42)	▼

Per 31 Desember 2023, Beban Akrual Perusahaan dibukukan sebesar Rp42,36 miliar, mengalami penurunan 22,42% atau setara dengan Rp12,25 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp54,61 miliar. Penurunan ini disebabkan karena pencatatan akrual yang tercatat sudah terealisasi.

As of December 31, 2023, the Company's Accrual Expenses were recorded at Rp42.36 billion, a decrease of 22.42% or the equivalent of Rp12.25 billion compared to 2022 of Rp54.61 billion. This decrease was caused by the recorded accruals that had been realized.

Utang Pajak

Pada akhir Desember 2023, nilai Utang Pajak Perusahaan sebesar Rp14,75 miliar, mengalami penurunan 61,42% atau setara dengan Rp23,48 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp38,22 miliar. Penurunan ini disebabkan karena penurunan koreksi positif fiskal karena beberapa faktor seperti pembayaran sewa 5 tahunan, menyebabkan pembebanan terkait PSAK 73 menurun, pendapatan deposito lebih tinggi dari tahun lalu, sehingga pendapatan kena pajak lebih kecil dibandingkan tahun dan kredit pajak PPh pasal 25 (angsuran) yang lebih tinggi karena perhitungan berdasarkan laba rugi setiap triwulan tahun 2023, dan tahun 2023 terdapat kenaikan pendapatan.

Tax Payable

At the end of December 2023, the value of Company Tax Payable was Rp14.75 billion, a decrease of 61.42% or the equivalent of Rp23.48 billion compared to 2022 of Rp38.22 billion. This decrease was caused by a decrease in positive fiscal corrections due to several factors such as 5-year lease payments, causing expense related to PSAK 73 to decrease, deposit income was higher than last year, so that taxable income was smaller compared to last year and tax credit for PPh article 25 (installments) which was higher because the calculation is based on profit and loss every quarter in 2023, and in 2023 there was an increase in income.

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Liabilitas Jangka pendek Lainnya terdiri dari sewa diterima di muka dan uang titipan. Pada akhir Desember 2023, Liabilitas Jangka Pendek Lainnya dibukukan sebesar Rp47,16 miliar, mengalami kenaikan 67,67% atau setara dengan Rp19,04 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp28,13 miliar. Kenaikan ini disebabkan karena pengakuan utang atas deviden interim.

Other Current Liabilities

Other Current Liabilities consist of rent received in advance and deposits. At the end of December 2023, Other Current Liabilities were recorded at Rp47.16 billion, an increase of 67.67% or the equivalent of Rp19.04 billion compared to 2022 of Rp28.13 billion. This increase is due to the recognition of debt for interim dividends.

Bagian Lancar atas Liabilitas Sewa

Per 31 Desember 2023, Bagian Lancar atas Liabilitas Sewa dibukukan sebesar Rp42,13 miliar, mengalami penurunan 89,67% atau setara dengan Rp365,72 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp407,85 miliar. Penurunan ini disebabkan karena terdapat pembayaran termin ii atas sewa aset hak guna.

Current Portion of Lease Liabilities

As of December 31, 2023, the Current Portion of Lease Liabilities was recorded at Rp42.13 billion, a decrease of 89.67% or the equivalent of Rp365.72 billion compared to 2022 of Rp407.85 billion. This decrease was caused by the second term payment for the lease of the right-of-use asset.

Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2022-2023
Non-Current Liabilities in 2022-2023

	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	359.480	394.987	(35.507)	(8,99)	▼
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	359.480	394.987	(35.507)	(8,99)	▼

Liabilitas Jangka Panjang tercatat sebesar Rp359,48 miliar, mengalami penurunan 8,99% atau setara dengan Rp35,51 miliar dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp394,99 miliar. Hal ini terutama disebabkan disebabkan karena terdapat pembayaran termin ii atas sewa aset hak guna.

Non-Current Liabilities were recorded at Rp359.48 billion, a decrease of 8.99% or equivalent to Rp35.51 billion compared to 2022 which was recorded at Rp394.99 billion. This is mainly due to a second term payment for the lease of the right-of-use asset.

Ekuitas
Equity

Total Ekuitas Perusahaan tahun 2023 mencapai Rp1,22 triliun, meningkat 5,24% dibandingkan Total Ekuitas tahun 2022 sebesar Rp1,16 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 2019-2023, Total Ekuitas Perusahaan mengalami pertumbuhan 3,32%

Total Company's Equity in 2023 reached Rp1.22 trillion, an increase of 5.24% compared to Total Equity in 2022 of Rp 1.16 trillion. At the 2019-2023 Compound Annual Growth Rate (CAGR), the Company's Total Equity grew by 3.32%

Total Ekuitas 2019-2023
Total Equity in 2019-2023

(Rp-juta) (Rp-million)

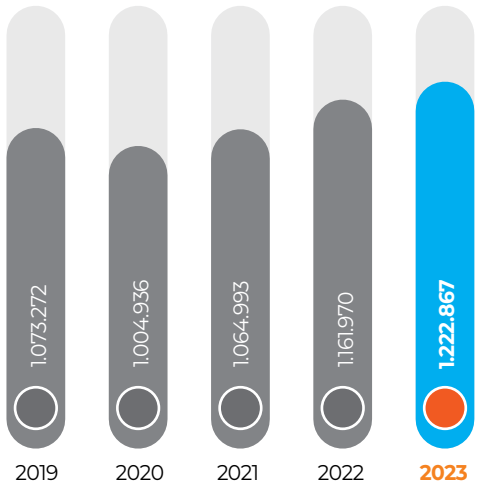

Ekuitas 2022-2023
Equity in 2022-2023

	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Modal Saham Share Capital	931.299	931.299	-	-	
Saldo Laba Retained Earning	291.568	230.671	60.897	26,40	▲
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.222.867	1.161.970	60.897	5,24	▲

Ekuitas Perusahaan pada akhir Desember 2023 sebesar Rp1,22 triliun, mengalami kenaikan 5,24% atau setara dengan Rp60,90 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,16 triliun. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan laba tahun berjalan.

The Company's equity at the end of December 2023 was Rp1.22 trillion, an increase of 5.24% or the equivalent of Rp60.90 billion compared to 2022 of Rp1.16 trillion. This was mainly due to an increase in profit for the year.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

"Pertumbuhan laba bersih menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam menjaga aspek fundamental dan nilai tambah bagi pemegang saham"
"Net profit growth shows the Company's ability to maintain fundamental aspects and add value for shareholders"

	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan Operasi Operating Revenues	735.205	726.573	8.632	1,19	▲
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(408.728)	(379.727)	(29.001)	7,64	▲
Laba Bruto Gross Profit	326.477	346.847	(20.370)	(5,87)	▼
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(76.343)	(88.904)	12.560	(14,13)	▼
Pendapatan Operasi Lainnya Other Operating Income	3.781	286	3.495	1.222,78	▲
Beban Operasi Lainnya Other Operating Expenses	(8.706)	(13.172)	4.466	(33,90)	▼
Laba Usaha Operating Profit	245.208	245.057	151	0,06	▲
Pendapatan Keuangan Financial Income	38.037	26.528	11.509	43,38	▲
Beban Keuangan Financial Expense	(46.424)	(58.598)	12.174	(20,77)	▼
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Profit Before Corporate Income Tax	236.820	212.987	23.834	11,19	▲
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax Benefits (Expense)					
Kini Current	(50.708)	(62.002)	11.294	(18,22)	▼
Tangguhan Deferred	4.742	10.740	(5.997)	(55,84)	▼
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	190.855	161.725	29.130	18,01	▲
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	-	-	-	-	-
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Profit for the Year	190.855	161.725	29.130	18,01	▲
Laba per Saham Dasar (Nilai Penuh) Basic Earnings per Share (Full Amount)	104,96	88,94	16,02	18,01	▲

Pendapatan Operasi

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan berhasil mencatat Pendapatan Operasi sebesar Rp735,20 miliar, mengalami kenaikan 1,19% atau setara dengan Rp8,63 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp726,57 miliar. Kenaikan ini disebabkan karena peningkatan trafik kapal yang salah satunya disebabkan oleh kenaikan pada Troughput Truck/ Bis dan General Cargo serta adanya

Operating Revenues

Throughout 2023, the Company managed to record Operating Revenues of Rp735.20 billion, an increase of 1.19% or the equivalent of Rp8.63 billion compared to 2022 of Rp726.57 billion. This increase is due to an increase in ship traffic, one of which was caused by an increase in Truck/Bus and General Cargo throughput as well as the addition of a satellite terminal in the Balikpapan area. In addition, there is an increase in revenue for PT Glovis

penambahan terminal satelit di wilayah Balikpapan. Selain itu, terdapat peningkatan pendapatan untuk PT Glovis Indonesia International, untuk Layanan Operasi Unit CBU Hyundai di KBN ("Kawasan Berikat Nasional") yang dimulai pada tahun 2022 dan diperpanjang pada Agustus 2023.

Beban Pokok Pendapatan

Seiring dengan meningkatnya pendapatan operasi yang menyebabkan kenaikan pada kerja sama mitra usaha, maka beban pokok pendapatan tahun 2023 turut mengalami kenaikan 7,64% sehingga dibukukan menjadi sebesar Rp408,73 miliar dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar Rp379,73 miliar. Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan beban depresiasi tahun 2023 oleh karena adanya penambahan aset tetap dan aset hak-guna tahun 2023, peningkatan beban gaji pada tahun 2023 oleh karena adanya penambahan pegawai selama tahun 2023, terutama pegawai di Terminal Satelit Semayang, Balikpapan, dan terdapat peningkatan beban konsesi pada tahun berjalan 2023 yang mana sejalan dengan peningkatan pendapatan tahun 2023. Selain itu, terdapat peningkatan beban Kerja Sama Usaha (KSMU) yaitu kenaikan KSMU Tenaga Kerja atas terminal satelit Semayang, Balikpapan yang beroperasi di tahun 2023 dan Terminal Satelit lainnya.

Laba Bruto

Dengan memperhitungkan pendapatan operasi dan beban pokok pendapatan selama 2023, maka Laba Bruto Perusahaan dibukukan sebesar Rp326,48 miliar, mengalami penurunan 5,87% atau setara dengan Rp20,37 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp346,85 miliar. Penurunan ini seiring dengan peningkatan beban pokok pendapapatan terutama atas biaya kerjasama mitra usaha dan konsesi.

Beban Umum dan Administrasi

Sepanjang 2023, Beban Umum dan Administrasi Perusahaan sebesar Rp76,34 miliar, mengalami penurunan 14,13% atau setara dengan Rp12,56 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp88,90 miliar. Penurunan ini disebabkan Penurunan beban Pemeliharaan disebabkan terkait pemeliharaan Fasilitas Bangunan Pelabuhan sampai dengan Desember 2023 yang belum terlaksana sebagai berikut:

1. Perluasan Lapangan & Single Gate Car Terminal Belawan;
2. Perbaikan Lapangan Eks Presiden Sisi Selatan;
3. Aspal & Marka Eks Service Point;

Indonesia International, for Hyundai CBU Unit Operation Services in KBN ("National Bonded Area") which starts in 2022 and is extended in August 2023.

Cost of Revenue

In line with the increase in operating income which led to an increase in business partner collaboration, the cost of revenue in 2023 also increased by 7.64% so that it was recorded at Rp408.73 billion from the previous year in 2022 of Rp379.73 billion. This increase is due to an increase in depreciation expenses in 2023, caused by the addition of fixed assets and right-of-use assets in 2023, an increase in salary expenses in 2023 due to additional employees during 2023, especially employees at the Semayang Satellite Terminal, Balikpapan, and there was an increase in concession expenses in the current year 2023 which is in line with an increase in income in 2023. In addition, there is an increase in Business Cooperation expenses (KSMU), namely an increase in KSMU for Labor for the Semayang, Balikpapan satellite terminals operating in 2023 and other Satellite Terminals.

Gross profit

Considering the operating revenue and cost of revenue for 2023, the Company's Gross Profit was recorded at Rp326.48 billion, a decrease of 5.87% or the equivalent of Rp20.37 billion compared to 2022 of Rp346.85 billion. This decrease was in line with an increase in the cost of revenue, especially costs for cooperation with business partners and concessions.

General and Administrative Expenses

Throughout 2023, the Company's General and Administrative Expenses amounted to Rp76.34 billion, a decrease of 14.13% or the equivalent of Rp12.56 billion compared to 2022 of Rp88.90 billion. This decrease was caused by a decrease in maintenance expenses due to maintenance of port building facilities until December 2023 which had not been carried out as follows:

1. Expansion of Belawan Field & Single Gate Car Terminal;
2. Repair of the South Side of the Ex-President's Field;
3. Ex-Service Point Asphalt & Markings;

4. Dilatasi Cat Terminal Makasar;
5. Penggantian Log CIF.

Pendapatan Operasi Lainnya

Sepanjang 2023, Pendapatan Operasi Lainnya dibukukan sebesar Rp3,78 miliar, mengalami kenaikan 1.222,78% atau setara dengan Rp3,49 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp285,80 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pendapatan diluar usaha lain-lain akibat dari penyesuaian atas penghapusan utang dan BYMH berumur lama.

Beban Operasi Lainnya

Beban Operasi Lainnya tercatat sebesar Rp8,71 miliar, mengalami penurunan 33,90% atau setara dengan Rp4,47 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp13,17 miliar. Penurunan ini disebabkan dikarenakan terdapat penurunan atas beban penghapusan aset tetap, beban denda pajak, dan beban pajak dibayar dimuka yang tidak dapat dikreditkan.

Laba Usaha

Pada tahun 2023, Perusahaan berhasil mencatatkan laba usaha sebesar Rp245,21 miliar, mengalami kenaikan 0,06% atau setara dengan Rp151,43 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp245,06 miliar. Kenaikan ini seiring dengan penurunan beban umum dan administrasi terutama pada biaya pemeliharaan.

Laba Tahun Berjalan

Selama 2023, Perusahaan berhasil mencatat perolehan laba bersih sebesar Rp190,85 miliar, mengalami kenaikan 18,01% atau setara dengan Rp29,13 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp161,72 miliar. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan laba sebelum pajak penghasilan badan yang meningkat karena kenaikan pendapatan keuangan.

4. Makasar Terminal Paint Dilation;
5. CIF Log Replacement.

Other Operating Revenues

Throughout 2023, Other Operating Revenues was recorded at Rp3.78 billion, an increase of 1,222.78% or the equivalent of Rp3.49 billion compared to 2022 of Rp285.80 million. This increase was due to an increase in income outside other businesses as a result of adjustments to debt write-offs and BYMH's long life.

Other Operating Expenses

Other Operating Expenses were recorded at Rp8.71 billion, a decrease of 33.90% or equivalent to Rp4.47 billion compared to 2022 of Rp13.17 billion. This decrease was due to a decrease in fixed asset write-off costs, tax fines and prepaid taxes that could not be credited.

Operating Profit

In 2023, the Company managed to record an operating profit of Rp245.21 billion, an increase of 0.06% or the equivalent of Rp151.43 million compared to 2022 of Rp245.06 billion. This increase is in line with a decrease in general and administrative expenses, especially maintenance costs.

Profit for the Year

During 2023, the Company managed to record a net income of Rp190.85 billion, an increase of 18.01% or the equivalent of Rp29.13 billion compared to 2022 of Rp161.72 billion. This increase is in line with the increase in profit before corporate income tax which increased due to the increase in financial income.

Laporan Arus Kas
Cash Flow Statement

"Arus Kas memberikan gambaran tentang jumlah pemasukan dan pengeluaran Perusahaan dalam suatu periode tertentu."

"Cash Flow provides an overview of the Company's income and expenses in a certain period."

Perkembangan Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 2019-2023
Development of Cash and Cash Equivalents at the End of the Year 2019-2023

(Rp-juta) (Rp-million)

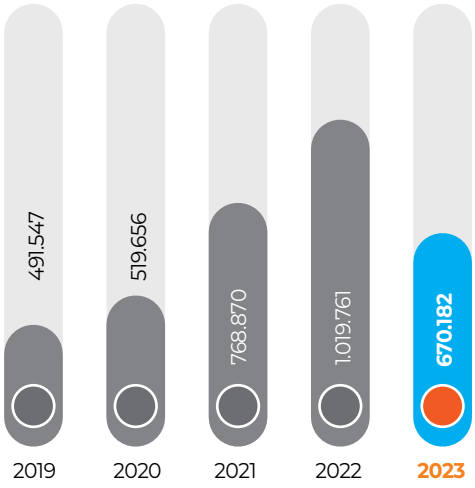

Kas dan setara kas akhir periode 2022 menunjukkan penurunan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Cash and cash equivalents at the end of the 2022 period showed a decline as seen in the table below.

Arus Kas 2022-2023
Cash Flow in 2022-2023

	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Arus kas dari aktivitas operasi Cash flow from operating activities	249.113	343.943	(94.830)	(27,57)	▼
Arus kas dari aktivitas investasi Cash flow from investing activities	(27.239)	(32.880)	5.640	(17,15)	▼
Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash flow from financing activities	(571.453)	(60.172)	(511.281)	849,70	▲
Kenaikan/(Penurunan) neto kas dan setara kas Increase/(Decrease) in net cash and cash equivalents	(349.579)	250.891	(600.470)	(239,33)	▼
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	1.019.761	768.870	250.891	32,63	▲
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	670.182	1.019.761	(349.579)	(34,28)	▼

Posisi Kas dan Setara Kas Perusahaan di akhir tahun 2023 dibukukan sebesar Rp670,18 miliar, mengalami penurunan 34,28% atau setara dengan Rp349,58 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,02 triliun. Hal ini terutama disebabkan adanya pembayaran sewa termin II ke Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, pembayaran deviden interim tahun 2022 dan pembayaran deviden tahun 2022.

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2023, Perusahaan mencatatkan perolehan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp249,11 miliar, mengalami penurunan 27,57% atau setara dengan Rp94,83 miliar dibandingkan tahun 2022 di mana Perusahaan mencatatkan perolehan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp343,94 miliar. Penurunan ini disebabkan Penurunan ini disebabkan adanya pembayaran pajak atas sewa termin II dan pembayaran gaji atas penambahan karyawan area Balikpapan serta 2 orang karyawan dibagian SPI.

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Perusahaan membukukan pengunaan kas bersih untuk aktivitas investasi di tahun 2023 sebesar Rp27,24 miliar, mengalami penurunan 17,15% atau setara dengan Rp5,64 miliar dibandingkan tahun 2022 di mana Perusahaan mencatatkan penggunaan kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar Rp32,88 miliar. Penurunan ini sebenarnya tidak mencerminkan penurunan realisasi aset investasi di tahun 2023 namun lebih kepada realisasi penggunaan kas bersih atas aset investasi tahun 2023 yang dibayarkan di awal tahun 2024.

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tercatat sebesar Rp571,45 miliar, mengalami kenaikan 849,70% atau setara dengan Rp511,28 miliar dibandingkan tahun 2022 di mana Perusahaan mencatat penggunaan kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp60,17 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya pembayaran sewa termin II ke Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, pembayaran deviden interim tahun 2022 ke Pelindo Multi Terminal (SPMT) dan Multi Terminal Indonesia dan pembayaran deviden tahun 2022 ke Pelindo Multi Terminal (SPMT), Multi Terminal Indonesia dan ke PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

The Company's Cash and Cash Equivalents position at the end of 2023 was recorded at Rp670.18 billion, a decrease of 34.28% or equivalent to Rp349.58 billion compared to 2022 of Rp1.02 trillion. This is mainly due to the payment of term II rent to the Tanjung Priok Port Branch, payment of interim dividends in 2022 and payment of dividends in 2022.

Net Cash Obtained from Operating Activities

In 2023, the Company recorded net cash proceeds from operating activities of Rp 249.11 billion, a decrease of 27.57% or equivalent to Rp 94.83 billion compared to 2022 which the Company recorded net cash proceeds from operating activities of Rp 343.94 billion. This decrease was due to this decrease being due to tax payments on rent for term II and salary payments for additional employees in the Balikpapan area as well as 2 employees in the SPI section.

Net Cash Used in Investing Activities

The Company recorded net cash used in investing activities in 2023 of Rp 27.24 billion, a decrease of 17.15% or equivalent to Rp 5.64 billion compared to 2022 where the Company recorded net cash use for investment activities of Rp 32.88 billion. This increase was due to this increase being due to the second term rental payment to the Tanjung Priok Port Branch, interim dividend payments in 2022 to Pelindo Multi Terminal (SPMT) and Multi Terminal Indonesia and dividend payments in 2022 to Pelindo Multi Terminal (SPMT), Multi Terminal Indonesia and to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Net Cash Used in Financing Activities

Net cash used in financing activities was recorded at Rp 571.45 billion, an increase of 849.70% or equivalent to Rp 511.28 billion compared to 2022 where the Company recorded net cash used for financing activities of Rp 60.17 billion. This increase was due to this increase being due to the second term rental payment to the Tanjung Priok Port Branch, interim dividend payments in 2022 to Pelindo Multi Terminal (SPMT) and Multi Terminal Indonesia and dividend payments in 2022 to Pelindo Multi Terminal (SPMT), Multi Terminal Indonesia and to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Profitabilitas dan Kemampuan Perusahaan dalam Menghasilkan Keuntungan

Profitability and Company Ability to Generate Profits

Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba diukur dengan menggunakan rasio-rasio profitabilitas yang tercermin pada tabel di bawah ini.

The Company's ability to generate profits is measured using profitability ratios which are reflected in the table below.

Rasio Profitabilitas 2022-2023
Profitability Ratios in 2022-2023

	Satuan Unit	2023	2022	Selisih Difference	
Margin Laba Bruto (%) Gross Profit Margin (%)	%	44,41	47,74	(3,33)	▼
Margin Laba Usaha (%) Operating Profit Margin (%)	%	33,35	33,73	(0,38)	▼
Margin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	%	25,96	22,26	3,70	▲
Imbal Hasil Ekuitas Return on Equity	%	15,61	14,52	1,09	▲
Imbal Hasil Aset Return on Assets	%	10,67	7,38	3,29	▲

Kemampuan Membayar Utang
Solvency

Utang Jangka Panjang dan Jangka Pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi Perusahaan. Oleh sebab itu, Perusahaan telah menerapkan kebijakan pengelolaan utang dan melakukan *monitoring* ketat melalui pengukuran indikator kemampuan membayar utang sebagai berikut:

The current and non-current liabilities are obligations that must be paid off by the Company. Therefore, the Company has implemented a debt management policy and carried out strict monitoring by measuring debt repayment indicators as follows:

Rasio Solvabilitas

Kemampuan Perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek Total dapat diukur dengan rasio solvabilitas, yang setidaknya terdiri dari *Debt to Total Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER).

Solvency Ratio

The Company's ability to pay all its liabilities, both long-term and short-term, can be measured by the solvency ratio, which at least consists of the Debt to Total Assets Ratio (DAR) and the Debt to Equity Ratio (DER).

Solvabilitas 2022-2023
Solvency in 2022-2023

	Satuan Unit	2023	2022	Selisih Difference	
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset Debt to Assets Ratio	%	31,62	46,99	(15,37)	▼
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas Debt to Equity Ratio	%	46,24	88,63	(42,39)	▼

Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset, atau *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian aktiva yang digunakan dalam menjamin keseluruhan kewajiban atau utang. Pada 2023, nilai DAR dibukukan sebesar 31,62%, lebih rendah 15,37% dibandingkan tahun 2022 sebesar 46,99%. Hal ini disebabkan perjanjian rental fee atau sewa lahan terhadap PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dicatat dengan Standar Akuntansi IFRS PSAK 73 sehingga atas sewa tersebut pencadangan pembayaran dicatat di liabilitis atau hutang tahun 2023 terdapat pembayaran rental fee kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atas perjanjian tersebut sehingga mengurangi pencadangan hutang Perusahaan.

Debt to Asset Ratio (DAR)

This ratio is used to measure the portion of assets used to guarantee overall liabilities or debt. In 2023, the DAR value was recorded at 31.62%, 15.37% lower than in 2022 of 46.99%. This is because the rental fee or land rental agreement with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is recorded using IFRS PSAK 73 Accounting Standards so that for the rental the provision for payment is recorded in liabilities or payables in 2023 there is a rental fee payment to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the agreement. thereby reducing the Company's debt reserves.

Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas, atau *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian modal yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan kewajiban atau utang. Nilai perhitungan DER Perusahaan pada tahun 2023 diperoleh sebesar 46,24%, lebih rendah 42,39% dibandingkan tahun 2022 sebesar 88,63%. Hal ini disebabkan perjanjian rental fee atau sewa lahan terhadap PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dicatat dengan Standar Akuntansi IFRS PSAK 73 sehingga atas sewa tersebut pencadangan pembayaran dicatat di liabilitis atau hutang tahun 2023 terdapat pembayaran rental fee kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atas perjanjian tersebut sehingga mengurangi pencadangan hutang Perusahaan.

Debt to Equity Ratio (DER)

This ratio is used to measure the portion of capital used as collateral for overall obligations or debt. The Company's DER calculation value in 2023 was obtained at 46.24%, 42.39% lower than in 2022 which was 88.63%. This is because the rental fee or land rental agreement with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is recorded using IFRS PSAK 73 Accounting Standards so that for the rental the provision for payment is recorded in liabilities or payables in 2023 there is a rental fee payment to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the agreement. thereby reducing the Company's debt reserves.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang dipakai untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Pengukuran terhadap likuiditas Perusahaan dapat dilihat dari hasil perhitungan *Cash Ratio, Quick Ratio,* dan *Current Ratio.* Semakin tinggi nilai dari rasio-rasio tersebut menandakan bahwa Perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang akan jatuh tempo.

Liquidity Ratio

The liquidity ratio is a ratio used to measure the Company's ability to settle its short-term obligations. Measurement of the Company's liquidity can be seen from the results of calculating the Cash Ratio, Quick Ratio and Current Ratio. The higher the value of these ratios indicates that the company has the ability to meet its maturing obligations.

Likuiditas 2022-2023
Liquidity in 2022-2023

	Satuan Unit	2023	2022	Selisih Difference	
Rasio Kas Cash Ratio	Kali Times	3,25	1,61	1,64	▲
Rasio Cepat Quick Ratio	Kali Times	3,69	1,73	1,96	▲
Rasio Lancar Current Ratio	Kali Times	3,69	1,73	1,96	▲

Rasio Kas

Rasio Kas digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam melunasi kewajiban yang sudah jatuh tempo dari kas yang dimiliki. Posisi Rasio Kas Perusahaan pada tahun 2023 dibukukan sebesar 3,25 kali, lebih besar 1,64 kali dibandingkan tahun 2022 sebesar 1,61 kali. Hal ini terutama disebabkan walaupun pencadangan hutang perjanjian rental fee telah dibayarkan tetapi dari sisi pendapatan Perusahaan tahun 2023 meningkat dan terdapat penurunan piutang ditahun 2023 sehingga pencatatan kas lebih besar dan beberapa faktor hutang perusahan yang telah dibayarkan atau sudah lunas.

Cash Ratio

The Cash Ratio is used to measure the Company's ability to settle its maturing obligations from its own cash. The Company's Cash Ratio position in 2023 was recorded at 3.25 times, 1.64 times higher than in 2022 which was 1.61 times. This is mainly because even though the rental fee agreement debt provision has been paid, the company's income in 2023 will increase and there will be a decrease in receivables in 2023 so that cash records are greater and several factors of the company's debt have been paid or have been paid off.

Rasio Cepat

Rasio Cepat adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya dengan aktiva-aktivanya yang paling likuid. Pada tahun 2023, nilai Rasio Cepat Perusahaan sebesar 3,69 kali, lebih tinggi 1,96 kali dibandingkan tahun 2022 sebesar 1,73 kali. Hal ini terutama disebabkan pendapatan Perusahaan tahun 2023 meningkat dan terdapat penurunan piutang ditahun 2023.

Quick Ratio

The Quick Ratio is a ratio used to measure the Company's ability to settle its short-term debt with its most liquid assets. In 2023, the Company's Quick Ratio value was 3.69 times, 1.96 times higher than in 2022 which was 1.73 times. This is mainly due to this mainly due to the Company's revenue increasing in 2023 and there being a decrease in receivables in 2023.

Rasio Lancar

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan mengandalkan Aset Lancar yang dimiliki dapat diukur dari indikator Rasio Lancar. Pada 2023, Perusahaan mencatatkan nilai Rasio Lancar sebesar 3,69 kali, meningkat 1,96 kali dibandingkan tahun 2022 sebesar 1,73 kali. Hal ini terutama disebabkan pendapatan Perusahaan tahun 2023 meningkat dan terdapat penurunan piutang ditahun 2023.

Current Ratio

The Company's ability to meet its short-term obligations by relying on its Current Assets can be measured from the Current Ratio indicator. In 2023, the Company recorded a Current Ratio of 3.69 times, an increase of 1.96 times compared to 2022 of 1.73 times. This is mainly due to this mainly due to the Company's revenue increasing in 2023 and there being a decrease in receivables in 2023.

Rata-rata Kolektibilitas Piutang Usaha atau Perputaran Piutang Usaha

Tingkat kolektibilitas piutang usaha (*trade receivables turnover*) digunakan untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang dari para

Trade Receivable Collectibility Average

The collectibility level of trade receivables (trade receivables turnover) is used to assess the Company's ability to collect receivables from customers. This ratio is used to measure how

pelanggan. Rasio ini dipakai untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau bahkan berapa kali dana yang tertanam dalam piutang.

long it takes to collect receivables during one period or even how many times the funds are embedded in receivables.

Adapun nilai rata-rata Perputaran Piutang Usaha (*Average Collection Period*) Perusahaan pada tahun 2023 adalah selama 31,48 hari, lebih cepat 1,99 hari dibandingkan tahun 2023 selama 29,49 hari. Hal ini disebabkan percepatan penagihan piutang dan juga pembayaran dari customer.

The average value of the Company's Accounts Receivable Turnover (Average Collection Period) in 2023 is 31.48 days, 1.99 days faster than in 2023 which was 29.49 days. This is due to the acceleration of collection of receivables and also payments from customers.

Kolektibilitas Piutang 2022-2023
Receivable Collectibility in 2022-2023

Perihal Description	**Satuan** Unit	**2023**	**2022**	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
				Jumlah Amount	**Persentase** Percentage **(%)**
Kolektibilitas Piutang Receivable Collectibility	kali times	11,59	12,38	(0,79)	(6,38) ▼
Rata-Rata Hari Kolektibilitas Piutang Average Days of Receivables Collectibility	hari days	31,48	29,49	1,99	6,75 ▲

Umur piutang usaha Perusahaan dan upaya Perusahaan dalam pengelolaan piutang usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The age of the Company's trade receivables and the Company's efforts in managing trade receivables can be seen in the table below.

Umur Piutang Usaha 2022-2023
Trade Receivable Age in 2022-2023

Umur Piutang Usaha Trade Receivable Age	**2023**		**2022**		**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	**Kontribusi Contribution** (%)	**Jumlah (Rp-juta)** Amount (Rp-million)	**Kontribusi** Contribution **(%)**	**Nominal (Rp-juta)** (Rp-million)	**Persentase** Percentage **(%)**
Belum Jatuh Tempo Not Yet Due	1.567	1,62	4.565	4,53	(2.998)	(65,67) ▼
Telah Jatuh Tempo Overdue						
1 - 30 hari/days	38.628	39,96	43.307	42,97	(4.679)	(10,80) ▼
31 - 60 hari/days	10.928	11,30	10.322	10,24	606	5,87 ▲
61 - 90 hari/days	4.679	4,84	4.292	4,26	387	9,02 ▲
91 - 180 hari/days	6.687	6,92	4.164	4,13	2.523	60,59 ▲
Lebih dari 180 hari More than 180 days	34.183	35,36	34.122	33,86	61	0,18 ▲
Sub Jumlah Sub Total	96.672	100,00	100.772	100,00	(4.100)	(4,07) ▼
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Less: Allowance for Impairment	(35.048)		(34.919)		(129)	0,37 ▲
Jumlah Piutang Usaha – Bersih Total Trade Receivable – Net	61.624		65.853		(4.229)	(6,42) ▼

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha cukup memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang. Tidak terdapat piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan.

Management believes that the allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover possible losses from uncollectible receivables. There are no trade receivables used as collateral.

Struktur Modal Perusahaan dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Company Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Tujuan Pengelolaan Permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimumkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Perusahaan dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Struktur Modal Perusahaan

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki utang berbasis bunga. Seluruh pendanaan untuk operasi dan pengembangan usaha didapatkan dari ekuitas atau permodalan sendiri.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Struktur modal berpengaruh terhadap pengembangan bisnis terutama dalam sumber dan penggunaan dana. Hal ini mendorong Manajemen Perusahaan untuk senantiasa meninjau komposisi struktur modal agar mencapai kondisi yang optimal. Perusahaan lebih memilih Ekuitas untuk membiayai Aset. Meskipun demikian, penggunaan Utang di Perusahaan juga mengalami peningkatan sehingga dipandang mampu meminimalkan (*Weighted Average Cost of Capital*/WACC) karena biaya utang (*cost of debt*) lebih murah dari biaya modal sendiri (*cost of equity*). Penggunaan utang juga akan mengurangi biaya kena pajak sehingga akan terjadi penghematan pajak. Akan tetapi, peningkatan utang berdampak terhadap biaya beban bunga yang meningkat sehingga mengurangi nilai Perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penggunaan utang dan modal senantiasa dikelola oleh Perusahaan sehingga diperoleh kondisi yang optimum. Perusahaan juga senantiasa melakukan *monitoring* terhadap rasio likuiditas karena semakin tinggi rasio likuiditas maka struktur modal akan optimal.

Capital Management Objectives

The main objective of the Company's capital management is to ensure the maintenance of sound capital ratios to support the business and maximize shareholders returns.

The Company manages capital to maintain its business continuity in order to maximize shareholder wealth and benefits to other parties with an interest in the Company and tries to maintain a balance between borrowing rate and equity position to maintain an optimal capital structure to reduce capital costs.

Company Capital Structure

Until the end of 2023, the Company has no interest-based debt. All funding for operations and business development is obtained from equity or own capital.

Management Policy on Capital Structure

Capital structure affects business development, especially in the source and use of funds. This encourages Company Management to continually review the composition of the capital structure in order to achieve optimal conditions. Companies prefer Equity to finance Assets. However, the use of debt in companies has also increased so that it is seen as being able to minimize the Weighted Average Cost of Capital (WACC) because the cost of debt is cheaper than the cost of its own equity. Using debt will also reduce taxable costs, which resulted in tax saving. However, increasing debt has an impact on increasing interest costs, thereby reducing the overall value of the Company. Therefore, the use of debt and capital is always managed by the Company so that optimum conditions are obtained. The company also continuously monitors the liquidity ratio because the higher the liquidity ratio, the more optimal the capital structure will be.

Investasi Barang Modal
Capital Expenditures

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak mencatatkan adanya perikatan material untuk investasi barang modal.

Material Commitment for Capital Expenditures

Throughout 2023, the Company did not record any material commitment for capital expenditures.

Realisasi Investasi Barang Modal

Pada tahun 2023 jumlah penambahan investasi barang modal tercatat sebesar Rp40,35 miliar, mengalami kenaikan 31,23% atau setara dengan Rp9,60 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp30,75 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh perbaikan dermaga, pengembangan dukungan teknologi informasi, dan renovasi jaring penahan debu.

Berikut ini adalah rincian investasi barang modal selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu:

Realization of Capital Expenditures

In 2023, the amount of additional investment in capital goods was recorded at Rp40.35 billion, an increase of 31.23% or the equivalent of Rp9.60 billion compared to 2022 of Rp30.75 billion. This increase was caused by improvements to the dock, development of information technology support, and renovation of dust containment nets.

The following are details of investment in capital goods for the last 2 (two) years, namely:

Penambahan Investasi Barang Modal dalam bentuk Aset Tetap Tahun 2022-2023
Additional Capital Expenditures in the form of Fixed Assets in 2022-2023

Jenis Aset Tetap Types of Fixed Assets	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) (Rp-million) 2022-2023		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Pesentase Percentage (%)	
Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan Port Facility Equipment	1.283	-	1.283	-	▲
Instalasi Fasilitas Pelabuhan Port Facility Installation	50	50	-	-	
Bangunan Fasilitas Pelabuhan Port Facility Building					
Investasi Investment	15.275	23.141	(7.866)	(33,99)	▼
Pemeliharaan Maintenance	3.924	4.065	(141)	(3,47)	▼
Jalan dan Bangunan Roads and Buildings					
Investasi Investment	12.828	891	11.937	1.339,73	▲
Pemeliharaan Maintenance	2.279	1.170	1.109	94,79	▲
Peralatan Equipment	-	-	-	-	
Emplasemen Emplacement					
Investasi Investment	187	-	187	-	
Pemeliharaan Maintenance	4.025	932	3.093	331,87	▲
Non-Fisik Non physical	500	500	-	-	
Total Penambahan Total Addition	40.351	30.749	9.602	31,23	▲

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts Subsequent to the Accountant Report Date

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (26 Maret 2024) hingga ditandatanganinya laporan tahunan ini (30 April 2024).

There was no material information and facts that occurred after the date of the accountant's report (March 26, 2024) until the signing of this annual report (April 30, 2024).

Pencapaian Target Tahun 2023

Target Achievement in 2023

	Realisasi 2023 Realization 2023	**Target 2023**	**Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2023** Achievement of Realization of the 2023 Target *(%)*
	1	**2**	**(1:2)**
Arus Barang Perdagangan Luar Negeri Flow of Foreign Trade Goods			
Bongkar Muat Mobil (Unit) Car Loading/Unloading (Unit)	451.039	378.908	119,04
Kendaraan Berat (Alat Berat dan Truk/Bus) Heavy Vehicles (Heavy Equipment and Trucks/Buses)			
Dalam unit In units	12.690	13.854	91,60 -
Dalam m3 In m3	1.131.082	1.338.435	84,51 -
Sparepart			
Dalam PKGS In PKGS	9.167	4.449	206,05
Dalam m3 In m3	73.297	38.489	190,44
Pendapatan Operasi (Rp-juta) Operating Revenue (Rp-million)	735.205	689.165	106,68
Laba Bersih Tahun Berjalan (Rp-juta) Net Profit for the Year (IDR -million)	190.855	131.201	145,47
Aset (Rp-juta) Assets (IDR -million)	1.788.314	1.648.663	108,47
Ekuitas (Rp-juta) Equity (IDR -million)	1.222.867	1.035.099	118,14
Pengelolaan Struktur Modal Capital Structure Management		Dipenuhi melalui pendanaan sendiri Accomplished through self-funding	
Jumlah Karyawan (Orang) Number of Employees (People)	541	533	101,50

Pencapaian target Perusahaan tahun 2023 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hampir seluruh operasi Perusahaan menunjukkan pencapaian di atas target yang telah ditetapkan. Adanya deviasi pada target dalam kendaraan berat terutama disebabkan belum optimalnya sektor pertambangan dalam negeri yang berpengaruh pada kebutuhan alat berat di sektor tambang. Namun, realisasi bongkar muat mobil dan sparepart dengan pencapaian di atas target memberikan dorongan positif bagi pencapaian pendapatan dan laba Perusahaan yang juga membukukan pencapaian positif.

Pada struktur modal, Perusahaan tetap menggunakan modal sendiri dalam memenuhi kebutuhan investasi dan operasinya. Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tetap merealisasikan untuk tidak menggunakan utang berbasis bunga untuk memenuhi kebutuhan investasinya.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Di tahun 2023, Perusahaan belum melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan akan dilakukan pada tahun 2024.

Prospek Usaha Tahun 2024

Di tahun 2023, Perusahaan belum melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan akan dilakukan pada tahun 2024.

Achievement of the Company's target in 2023 shows quite good performance. Almost all of the Company's operations show achievements above the targets that have been set. The deviation in targets for heavy vehicles is mainly due to the suboptimal domestic mining sector which has an impact on the need for heavy equipment in the mining sector. However, the realization of loading and unloading of cars and spare parts with achievements above the target provided a positive impetus for the Company's revenue and profit achievement which also recorded positive achievements.

In terms of capital structure, the Company continues to use its own capital to meet its investment and operational needs. Until the end of 2023, the Company will continue to realize that it will not use interest-based debt to meet its investment needs.

Company Soundness Level

In 2023, the Company has not yet carried out an assessment of the Company's Soundness Level as regulated in SOE Ministerial Regulation No. PER-/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. The Company Soundness Level Assessment will be carried out in 2024.

Business Prospects for 2024

In 2023, the Company has not yet carried out an assessment of the Company's Soundness Level as regulated in SOEs Ministerial Regulation No. PER-/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. The Company Soundness Level Assessment will be carried out in 2024.



Tahun 2024 masih akan menjadi tahun yang menantang bagi perekonomian global dan nasional. Dampak peperangan dan geopolitik masih akan terus mempengaruhi pergerakan ekonomi pada tahun 2024. Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) periode Januari 2024, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global hanya akan sebesar 3,1% dari perkiran bulan Oktober 2023 sebesar 2,9%. Sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global hanya tumbuh 2,4 persen, lebih rendah dari kinerja perekonomian global 2023.

2024 will still be a challenging year for the global and national economy. The impact of war and geopolitics will continue to influence economic movements in 2024. Based on the World Economic Outlook (WEO) for the January 2024 period, the IMF predicts that global economic growth will only be 3.1% from the October 2023 estimate of 2.9%. Meanwhile, the World Bank predicts that the global economy will only grow 2.4 percent, lower than the performance of the global economy in 2023.

Berbeda dengan proyeksi IMF, Bank Indonesia (BI) justru optimis dalam memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh cukup kuat di 2024 dengan laju pertumbuhan berada pada kisaran 4,7%-5,5% (yoy). Fundamental ekonomi yang tetap solid pada 2024 didasarkan pada kinerja perekonomian Indonesia yang terus menunjukkan perbaikan. BI juga memprediksi inflasi tahunan Indonesia akan lebih tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%.

In contrast to the IMF's projections, Bank Indonesia (BI) is actually optimistic in estimating that the Indonesian economy will grow quite strongly in 2024 with a growth rate in the range of 4.7%-5.5% (yoy). Economic fundamentals that remain solid in 2024 are based on the performance of the Indonesian economy which continues to show improvement. BI also predicts that Indonesia's annual inflation will be more maintained within the target range of 2.5 ± 1%.

Sejalan dengan proyeksi positif terhadap perkembangan ekonomi domestik ke depan, mengawali tahun 2024 industri otomotif Indonesia juga sudah menorehkan catatan positif. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), kinerja ekspor kendaraan bermotor roda empat CBU unit untuk bulan Januari 2024 tercatat sebanyak 33.009 unit. Hal ini menunjukan bahwa aktivitas ekspor otomotif di awal 2024 khususnya dalam bentuk CBU sudah berjalan dengan sangat baik.

In line with positive projections for future domestic economic development, starting 2024 the Indonesian automotive industry has also made a positive note. Based on data from the Association of Indonesian Automotive Industries (Gaikindo), the export performance of CBU units of four-wheeled motorized vehicles for January 2024 was recorded at 33,009 units. This shows that automotive export activity in early 2024, especially in the form of CBU, is going very well.

Rencana Strategis dan Proyeksi Kinerja Perusahaan Tahun 2024

Strategic Plan and Company Performance Projections for 2024

Proyeksi Tahun 2024 terhadap Realisasi Tahun 2023
Projections for 2024 against Realization in 2023

Perihal Description	**Proyeksi 2024 Terhadap Realisasi 2023** 2024 Projections Against 2023 Realization
Pertumbuhan *throughput* Throughput growth	3% s.d 5%
Pendapatan Operasi Operating Revenue	5% s.d 10%
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	5% s.d 10%
Pengelolaan Struktur Modal Capital Structure Management	Dipenuhi melalui pendanaan sendiri Accomplished through self-funding
Pembayaran Dividen di Tahun 2024 (untuk Hasil Usaha tahun 2023) Dividend Payment in 2024 (for 2023 Operating Results)	60% s.d 70% dari laba bersih 60% to 70% of net profit

Optimisme Perusahaan di tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel di atas terutama dipengaruhi pengiriman kargo kendaraan roda 4 ke luar negeri yang akan meningkat, pengoperasian terminal satelit Balikpapan yang akan dicatat dalam periode 1 (satu) tahun penuh, adanya penagihan piutang yang akan berdampak pada pendapatan, serta perluasan lahan untuk dapat memenuhi kebutuhan akan penumpukan kendaraan. Hal ini akan berimbas pada meningkatnya pendapatan serta pertumbuhan laba yang cukup baik, yang akan memperkuat aspek fundamental dalam operasi dan bisnis Perusahaan.

The Company's optimism in 2024 as seen in the table above is mainly influenced by shipments of 4-wheeled vehicle cargo abroad which will increase, the operation of the Balikpapan satellite terminal which will be recorded over a period of 1 (one) full year, the collection of receivables which will have an impact on revenue, as well as expanding land to meet the need for vehicle storage. This will have an impact on increasing revenues and quite good profit growth, which will strengthen fundamental aspects of the Company's operations and business.

Sebagai bagian dari rantai pasok industri yang memanfaatkan bongkar muat dalam aktivitas produksi dan distribusi kendaraan, bisnis terminal kendaraan tidak bisa berdiri sendiri karena saling berkaitan dengan perkembangan berbagai industri di sekitarnya. Dengan pencapaian kinerja ekspor yang gemilang dari sektor otomotif, IPCC percaya kegiatan usaha akan terus menguat di tahun 2024. Tidak hanya mengandalkan otomotif, IPCC juga memiliki peluang bisnis yang cukup besar dari pengiriman kendaraan berat yang biasanya digunakan oleh industri pertambangan untuk mengangkut komoditas CPO, alat-alat konstruksi, dan lainnya.

As part of the industrial supply chain that utilizes loading and unloading in vehicle production and distribution activities, the vehicle terminal business cannot stand alone because it is interrelated with the development of various surrounding industries. By achieving brilliant export performance from the automotive sector, IPCC believes business activities will continue to be strong in 2024. Not only relying on automotive, IPCC also has quite large business opportunities from shipping heavy vehicles which are usually used by the mining industry to transport CPO commodities, equipment -construction tools, and others.

Dengan mengusung semangat tersebut, IPCC berencana menerapkan strategi *Develop Strategic Portfolio Extension* pada tahun 2024 agar posisi Perusahaan sebagai pengelola Terminal Kendaraan semakin kuat dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Selain itu, IPCC juga berkomitmen untuk mengembangkan portofolio perusahaan melalui investasi pada bisnis lain.

Carrying this spirit, IPCC plans to implement the Develop Strategic Portfolio Extension strategy in 2024 so that the Company's position as a Vehicle Terminal manager becomes stronger compared to other competitors. Apart from that, IPCC is also committed to developing the company portfolio through investment in other businesses.

Agenda rencana bisnis berikutnya, IPCC menaruh fokus pada *Collaboration/Strategic Partnership to Capture Business Momentum and Risk Sharing* di mana IPCC akan membangun kerja sama strategis (*inorganic*) untuk mendukung bisnis baru dengan sejumlah pihak yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi IPCC dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Terakhir, IPCC juga berencana akan menjalanan strategi Terminal Capacity Expansion yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas terminal kendaraan untuk mengantisipasi kenaikan *throughput*.

The next business plan agenda, the IPCC focuses on Collaboration/Strategic Partnership to Capture Business Momentum and Risk Sharing where the IPCC will build strategic (inorganic) cooperation to support new businesses with a number of parties which are expected to provide added value for the IPCC and other parties. other interests. Lastly, the IPCC also plans to implement a Terminal Capacity Expansion strategy which is carried out by increasing vehicle terminal capacity to anticipate an increase in throughput.

2023-2024
Enhancement & Expansion

Kemitraan & Ekspansi
- Transfer operatorship terminal kendaraan di area kerja Pelindo
- Integrasi & standarisasi operasi, dengan fokus pada digitalisasi & sistemasi
- Layanan dan operasi terintegrasi dengan fungsi dan enabler terpusat
- Penambahan kapasitas
- Car Distribution Management (CDM)
- Digitalisasi proses bisnis
- Peningkatan corporate value dan kinerja harga saham melalui buyback
- Full dedicated car terminal (fase 1)
- Opsi divestasi/likuidasi MKO MTKI

Partnerships & Expansion
- Transfer of car terminal operatorship in the Pelindo work area
- Integration & standardization of operations, with a focus on digitalization & systemization
- Integrated services and operations with centralized functions and enablers
- Increased capacity
- Car Distribution Management (CDM)
- Digitalization of business processes
- Increasing corporate value and share price performance through buybacks
- Full dedicated car terminal (phase 1)
- MKO MTKI divestment/liquidation option

Kebijakan Dividen dan Pembagiannya

Dividend Policy and Distribution

Kebijakan Dasar tentang Pembagian Dividen

Kebijakan dividen yang diterapkan di Perusahaan mengacu pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana pembagian dividen disetujui dan ditetapkan oleh pemegang saham di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jumlah dividen yang dibagikan senantiasa memperhatikan sejumlah aspek, di antaranya tingkat kesehatan keuangan, kecukupan modal, dan kebutuhan pendanaan untuk ekspansi bisnis. Manajemen Perusahaan mengajukan usulan laba bersih setelah pajak untuk dividen kepada Pemegang Saham yang akan disetujui dalam RUPS.

Dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan yang diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2018, disebutkan bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham dengan nilai sekurang-kurangnya 30,0% dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2019 berdasarkan laba bersih tahun buku 2018, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Pembagian Dividen yang Dilakukan di Tahun 2023 dan Kronologis Pembagian Dividen

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 yang diselenggarakan pada 27 Juni 2023, pemegang saham memutuskan menetapkan penggunaan Laba Bersih/Laba Tahun Berjalan IPCC tahun buku 2022 sebesar Rp161.724.766.795,00 sebagai berikut:

- sebesar Rp113.207.336.756,- atau ekuivalen sebesar 70,00% akan digunakan sebagai dividen dan akan dibayarkan kepada pemegang saham sesuai dengan presentase kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham dimana sebanyak Rp22.707.904.362,00 telah dibagikan sebagai dividen interim sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan berjumlah Rp90.499.432.395,00 atau setara dividen per lembar saham sebesar Rp49,77.

Basic Policy on Dividend Distribution

The dividend policy implemented in the Company refers to Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which the distribution of dividends is approved and determined by shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS). The amount of dividends distributed always consider a number of aspects, including the level of financial health, capital adequacy and funding needs for business expansion. Company Management submits a proposal for net profit after tax for dividends to Shareholders which will be approved at the GMS.

In the Company's Initial Public Offering prospectus published on July 2, 2018, it is stated that after this Initial Public Offering, the Board of Directors plans to distribute cash dividends to shareholders with a value of at least 30.0% of the net profit for the relevant financial year, starting from 2019 based on net profit for the 2018 financial year, taking into account the decisions of shareholders at the GMS. If the GMS approves the distribution of dividends, then the dividends will be distributed to all shareholders registered on the date of the list of shareholders entitled to dividends, considering the income tax and withholding taxes in accordance with applicable regulations, if any. The Board of Directors can make changes to the dividend policy at any time, subject to approval from shareholders through the GMS.

Dividend Distribution Carried Out in 2023 and Chronology of Dividend Distribution

Based on the results of the resolutions of the Annual GMS for the 2022 fiscal year held on June 27, 2023, shareholders decided to determine the use of IPCC Net Income/Profit for the 2022 fiscal year amounting to Rp161,724,766,795.00 as follows:

- amounting to Rp113,207,336,756,- or the equivalent of 70.00% will be used as dividends and will be paid to shareholders in accordance with the share ownership percentage of each shareholder where Rp22,707,904,362.00 has been distributed as interim dividends so that the remainder in the form of final dividends that will be distributed is Rp 90,499,432,395.00 or the equivalent of dividends per share of Rp49.77.

- sebesar Rp2.000.000.000,00 atau ekuivalen sebesar 1,24% akan digunakan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- sebesar Rp46.517.430.038,00 atau ekuivalen sebesar 28,76% akan digunakan sebagai laba ditahan.

Menindaklanjuti hasil keputusan RUPS tersebut, Perusahaan telah membayarkan dividen sebesar Rp39.458.744.693,5 pada tanggal 12 Januari 2024.

Selain itu, pada tanggal 14 Desember 2023, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen interim untuk kinerja tahun buku 2023 sebesar Rp39,46 miliar dan telah dibayarkan pada tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp11,05 miliar kepada publik dan pada tanggal 1 Maret 2024 sebesar Rp28,13 miliar kepada SPMT. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, pembagian dividen interim senilai Rp284,10 juta kepada MTI belum dibayarkan.

Kronologis pembagian dan pembayaran Dividen tahun 2019 hingga 2023 adalah sebagai berikut:

- amounting to Rp2,000,000,000.00 or the equivalent of 1.24% will be used as Mandatory Reserves to fulfill Article 70 paragraph 1 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- amounting to Rp46,517,430,038.00 or the equivalent of 28.76% will be used as retained earnings.

Following up on the results of the GMS decision, the Company has paid dividends amounting to Rp39,458,744,693.5 on January 12, 2024.

In addition, on December 14, 2023, the Company announced the distribution of interim dividends for the 2023 financial year performance amounting to Rp39.46 billion and was paid on January 10 2024 amounting to Rp11.05 billion to the public and on March 1, 2024 amounting to IDR 28.13 billion to SPMT. As of the completion date of the financial report, the distribution of interim dividends worth Rp284.10 million to MTI has not been paid.

The chronology of dividend distribution and payments from 2019 to 2023 is as follows:

Pembagian Dividen Tahun 2019-2023
Dividend Distribution for 2019-2023

Tahun Pembagian Distribution Year	**Tahun Dividen** Dividend Fiscal Year	**Tanggal Pengumuman** Announcement Date	**Tanggal Pembayaran** Payment Date	**Dividen Kas yang Dibagikan (Rp-juta)** Distributed Cash Dividends (Rp-million)	**Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham)** Dividends per Share (Rp/share)	**Rasio Pembagian Dividen** Dividend Distribution Ratio (%)
2024	2023	14 Desember 2023 (interim) December 14, 2023 (interim)	10 Januari dan 1 Maret 2024 January 10 and March 1, 2024	39.459	21,70	27,8
2023	2022	27 Juni 2023 June 27, 2023	26 dan 27 Juli 2023 July 26 and 27, 2023	90.499	49,77	70,00
		16 Desember 2022 (interim) December 16, 2022 (interim)	13 Januari, 31 Maret, dan 31 Juli 2023 January 13, March 31, and July 31, 2023	22.708	12,49	50,00
2022	2021	30 Juni 2022 June 30, 2022	3, 29, dan 30 Agustus 2022 August 3, 29, and 30, 2022	42.039	23,12	70,00
2021	2020	14 Juni 2021	IPCC tidak membagikan dividen sesuai hasil keputusan RUPS IPCC did not distribute dividends according to the results of the GMS resolution			
2020	2019	4 Agustus 2020 August 4, 2020	7 September 2020 September 7, 2020	38.076	20,94	28,00
		19 Desember 2019 (interim) December 19, 2019 (interim)	10 Januari 2020 January 10, 2020	63.397	34,86	70,00
2019	2018	19 Juni 2019 June 19, 2019	17 Juli 2019 July 17, 2019	102.108	56,15	60,00

Kontribusi kepada Negara
Contribution to the Nations

Pembayaran Pajak kepada Negara

Sebagai wajib pajak dan pemotong pajak, Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai Wajib Pajak, Perusahaan melakukan pembayaran PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara tepat waktu. Komitmen ini sekaligus menjadi bentuk konkret Perusahaan dalam berkontribusi bagi pendapatan negara.

Hingga akhir 2023, kontribusi Perusahaan kepada negara melalui setoran pajak sebesar Rp124,15 miliar, mengalami kenaikan 28,28% atau setara Rp27,37 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp96,78 miliar.

Berikut ini adalah setoran pajak yang sudah dibayarkan Perusahaan kepada negara dalam kurun tiga tahun terakhir, yaitu:

Tax Payments to the Nations

As a taxpayer and tax withholder, the Company is committed to carrying out all its tax obligations with full responsibility. As a Taxpayer, the Company pays Corporate Income Tax, Value Added Tax (VAT), Land and Building Tax (PBB) in a timely manner. This commitment is also a concrete form of the Company's contribution to state revenues.

Until the end of 2023, the Company's contribution to the Nation through tax payments amounted to Rp124.15 billion, an increase of 28.28% or the equivalent of Rp27.37 billion from the previous year of Rp96.78 billion.

The following are the tax payments that the Company has paid to the state in the last three years, namely:

Setoran Pajak 2022-2023
Tax Deposit in 2022-2023

	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Pajak Penghasilan Income tax					
PPh 21 Income Tax 21	11.814	12.141	(327)	(2,69)	▼
PPh 23 Income Tax 23	3.210	3.216	(6)	(0,18)	▼
PPh 25 Income Tax 25	38.827	21.148	17.678	83,59	▲
PPh 4 (2) Income Tax 4 (2)	48.853	3.428	45.425	1.325,24	▲
Jumlah Setoran Pajak Penghasilan Total Income Tax Deposit	102.704	39.933	62.771	157,19	▲
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Value Added Tax (VAT)	14.262	49.945	(35.683)	(71,44)	▼
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Land and Building Tax (PBB)	7.183	6.904	279	4,04	▲
Jumlah Setoran Pajak Total Tax Deposit	124.149	96.782	27.367	28,28	▲

Sementara sebagai pemotong pajak, Perusahaan secara aktif berperan serta dalam melakukan pemotongan terhadap setiap objek kena pajak yang meliputi PPh Pasal 4 ayat 2; PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi; dan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan.

Meanwhile, as a tax withholder, the Company actively participates in making deductions for every taxable object which includes PPh Article 4 paragraph 2; Income Tax Article 21 on income received by individual taxpayers; and Income Tax Article 23 on income received by corporate taxpayers.

Jenis PNBP Type of Non-tax State Income (PNBP)	**2023 (Rp-juta) (Rp-million)**	**2022 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	**Persentase** Percentage **(%)**	
PNBP Konsesi Concession PNBP	25.507	9.126	16.381	179,50	▲

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, Restruktursiasi Utang dan/atau Modal

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, Debt Restructuring and/or Capital

Informasi Material Mengenai Ekspansi

Pada tanggal 29 September 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengoperasian Terminal RORO Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan pemegang saham, SPMT. PKS ini menandai ekspansi Perusahaan untuk pengoperasian Terminal RORO Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur, yang merupakan kolaborasi dengan Subholding SPMT. Pengoperasian Terminal RORO Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur oleh Perusahaan efektif berlaku sejak 1 Oktober 2023.

Material Information Regarding Expansion

On September 29, 2023, the Company signed a Cooperation Agreement (PKS) for the Operation of the Semayang RORO Terminal, Balikpapan, East Kalimantan, with the shareholder, SPMT. This PKS marks the Company's expansion to operate the Semayang RORO Terminal, Balikpapan, East Kalimantan, which is a collaboration with SPMT Subholding. The Company's operation of the Semayang RORO Terminal, Balikpapan, East Kalimantan has been effective since October 1, 2023.

Informasi Lainnya Mengenai Investasi, Divestasi, Akuisisi, Restruktursiasi Utang dan/atau Modal

Di sepanjang tahun 2023, tidak terdapat informasi material mengenai investasi, divestasi, akuisisi, restruktursiasi utang dan/atau modal yang dilakukan Perusahaan.

Other Information Regarding Investment, Divestment, Acquisition, Debt Restructuring and/or Capital

Throughout 2023, there was no material information regarding investments, divestments, acquisitions, debt and/or capital restructuring carried out by the Company.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties/Related Parties

Alasan Dilakukannya Transaksi

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak.

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga Perusahaan menganggap bahwa semua transaksi masih dalam batas wajar sesuai dengan PSAK No.7 (Revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Semua transaksi dengan pihak yang berelasi, dilakukan dengan persyaratan, tingkat harga, dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang terkait, yaitu CALK No. 27.

Pernyataan Direksi atas Transaksi Afiliasi Tahun 2023

Direksi berpendapat bahwa seluruh transaksi material dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan Perusahaan selama tahun 2023 sudah dilaksanakan pada nilai yang wajar (*arm's length*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila transaksi serupa dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi.

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Mengawasi Jalannya Prosedur Transaksi Afiliasi

Sebagai organ pengawas, Dewan Komisaris dan Komite Audit bersikap objektif dan independen dalam mengawal usulan maupun realisasi transaksi material antara Perusahaan dengan pihak terafiliasi. Pengawasan ini mencakup aktivitas audit internal maupun audit eksternal untuk menjamin bahwa semua transaksi tersebut tidak mengandung konflik kepentingan yang menguntungkan salah satu pihak, serta sudah dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah dan standar akuntansi yang berlaku.

Reason for Transaction

In normal business activities, the Company carries out transactions with affiliated parties, which are executed at the same price and terms agreed by both parties.

Explanation of Transaction Fairness

All transactions with affiliated parties are in accordance with the policies and conditions agreed by both parties, so that the Company considers that all transactions are still within reasonable limits in accordance with PSAK No.7 (Revised 2010) concerning Disclosures of Related Parties. All transactions with related parties are carried out with normal terms, price levels and conditions as those carried out with third parties and have been disclosed in the related Notes to Financial Statements (CALK), namely CALK No. 27.

Board of Directors' Statement on Affiliated Transactions in 2023

The Board of Directors considers that all material transactions with affiliated parties carried out by the Company during 2023 have been carried out at fair value (arm's length) in accordance with the same terms and conditions as if similar transactions were carried out with unaffiliated parties.

The role of the Board of Commissioners and Audit Committee in supervising the implementation of affiliated transaction procedures

As supervisory body, the Board of Commissioners and Audit Committee act objectively and independently in overseeing proposals and realization of material transactions between the Company and affiliated parties. This supervision includes internal audit activities and external audits to ensure that all transactions do not contain conflicts of interest that benefit either party, and have been carried out transparently and can be accounted for in accordance with applicable accounting rules and standards.

Nama Pihak Bertransaksi dan Sifat Hubungan Afiliasi

Name of Transaction Party and Nature of Affiliated Relationship

Pengungkapan Pihak Berelasi
Related Party Disclosures

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Pelabuhan Indonesia	Entitas induk PT Pelindo Multi Terminal Parent entity of PT Pelindo Multi Terminal	Imbalan kerja, konsesi, sewa, dan kerjasama mitra usaha Employee benefits, concessions, rent, and Business Partnership
PT Pelindo Multi Terminal	Entitas induk Parent entity	Dividen, kerjasama mitra usaha Dividends, Business Partnership
PT Menara Maritim Indonesia	Entitas sepengendalian Pelindo Entities under common control of Pelindo	Layanan sewa ruang kantor Office rent services
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	Entitas sepengendalian Pelindo Entities under common control of Pelindo	Layanan teknologi informasi Information technology services
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Entitas sepengendalian Pelindo Entities under common control of Pelindo	Penyedia listrik Electricity provider
PT Electronic Data Interchange	Entitas sepengendalian Pelindo Entities under common control of Pelindo	Layanan sistem informasi Information system services
PT Pendidikan Maritim dan Logistik	Entitas sepengendalian Pelindo Entities under common control of Pelindo	Pendidikan dan pelatihan Education and training
PT Pelabuhan Indonesia Investama	Entitas sepengendalian Pelindo Entities under common control of Pelindo	Dividen Dividend
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	Entitas sepengendalian Pelindo Entities under common control of Pelindo	Pemeliharaan alat Equipment maintenance
PT IPC Terminal Petikemas	Entitas sepengendalian Pelindo Entities under common control of Pelindo	Kerjasama mitra usaha Business Partnership
PT Intan Sejahtera Utama	Entitas sepengendalian Pelindo Entities under common control of Pelindo	Penyedia Tenaga Alih Daya Outsourcing
PT Pelindo Daya Sejahtera	Entitas sepengendalian Pelindo Entities under common control of Pelindo	Penyedia Tenaga Alih Daya Outsourcing
PT Lamong Energi Indonesia	Entitas sepengendalian Pelindo Entities under common control of Pelindo	Penyedia listrik Electricity provider
PT Pelabuhan Tanjung Priok	Entitas sepengendalian Pelindo Entities under common control of Pelindo	Kerjasama mitra usaha Business Partnership
PT Multi Terminal Indonesia	Entitas sepengendalian Pelindo Entities under common control of Pelindo	Dividen, kerjasama mitra usaha Dividends, Business Partnership
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia Entities under common control of Government of the Republic of Indonesia	Transaksi keuangan Financial Transaction

Pengungkapan Pihak Berelasi
Related Party Disclosures

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia Entities under common control of Government of the Republic of Indonesia	Transaksi keuangan Financial Transaction
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia Entities under common control of Government of the Republic of Indonesia	Transaksi keuangan Financial Transaction
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia Entities under common control of Government of the Republic of Indonesia	Transaksi keuangan Financial Transaction
PT BNI Life Insurance	Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia Entities under common control of Government of the Republic of Indonesia	Asuransi tenaga kerja Employee Insurance
PT Rumah Sakit Pelabuhan	Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia Entities under common control of Government of the Republic of Indonesia	Layanan kesehatan Health Services
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia Entities under common control of Government of the Republic of Indonesia	Lain-lain Others
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia Entities under common control of Government of the Republic of Indonesia	Sewa Rent

Realisasi Saldo dan Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Realisasi saldo dan transaksi Pihak-Pihak Berelasi terhadap kinerja keuangan Perusahaan dapat disampaikan sebagai berikut.

Realization of Balances and Related Party Transactions

The realization of balances and transactions of Related Parties on the Company's financial performance can be presented as follows.

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset
Related Party Balances in Assets

	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Aset Percentage of Total Assets		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			2023 (%)	2022 (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Kas dan Kas Di Bank Cash and Cash in Bank	35.083	19.637	1,96	0,90	15.446	78,65	▲
Deposito Berjangka Time Deposit	635.000	1.000.000	35,51	45,62	(365.000)	(36,50)	▼
Piutang usaha Trade Receivable	50	606	0,00	0,03	(556)	(91,79)	▼
Pendapatan masih akan diterima Accrued Income	2.069	-	0,12	-	2.069	-	

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset
Related Party Balances in Assets

	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Aset Percentage of Total Assets		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			2023 (%)	2022 (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	3.155	3.155	0,18	0,14	-	-	
Total Aset kepada Pihak-Pihak Berelasi Total Assets to Related Parties	675.357	1.023.398	37,76	46,69	(348.041)	(34,01)	▼
Total Aset Total Assets	1.788.314	2.191.828			(403.514)	(18,41)	▼

Saldo Pihak Berelasi dalam Liabilitas
Related Party Balances in Liabilities

	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Aset Percentage of Total Assets		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			2023 (%)	2022 (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Utang Usaha Trade Payable	40.148	82.238	7,10	7,99	(42.091)	(51,18)	▼
Utang Lain-lain Other Payables	1.804	4.744	0,32	0,46	(2.940)	(61,98)	▼
Sewa Diterima Dimuka Deferred Rent	-	20	-	0,00	(20)	-	
Utang Titipan Deposit Payable	1.183	1.070	0,21	0,10	114	10,61	▲
Utang dividen Dividends Payable	30.595	18.696	5,41	1,82	11.899	63,64	▲
Total Liabilitas kepada Pihak-Pihak Berelasi Total Liabilities to Related Parties	73.730	106.768	13,04	10,37	(33.038)	(30,94)	▼
Total Liabilitas Total Liabilities	565.448	1.029.858			(464.411)	(45,09)	▼

Saldo Pihak Berelasi dalam Pendapatan
Related Party Balances in Revenue

	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Aset Percentage of Total Assets		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			2023 (%)	2022 (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan Revenue	2.253	1.667	0,31	0,23	586	35,16	▲
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	135.782	108.188	18,47	14,89	27.594	25,51	▲
Total Pendapatan kepada Pihak-Pihak Berelasi Total Revenues to Related Parties	138.035	109.855	18,78	15,12	28.180	25,65	▲
Total Pendapatan Total Revenues	735.205	726.573			8.632	1,19	▲W

Kebijakan Perusahaan Terkait Mekanisme Review atas Transaksi Mekanisme review atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor. Mekanisme ini tertuang dalam PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Pemenuhan peraturan dan ketentuan mengenai transaksi dengan pihak-pihak berelasi dipastikan telah memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Uraian lengkap akan hal ini juga telah disajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2023.

Seluruh pengungkapan informasi di atas juga telah dilaporkan kepada regulator sebagai bentuk pemenuhan terhadap POJK No. 42/POJK.04/2021 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Company Policy Regarding Review Mechanisms for Transactions Mechanisms for reviewing transactions with related parties through an audit process carried out by both internal auditors and external auditors. In an effort to ensure the level of fairness of transactions and conformity with generally accepted accounting standards in Indonesia, the affiliate transaction reports above have been audited by the Auditor. This mechanism is contained in PSAK 7 (revised 2014) concerning "Related Party Disclosures".

Compliance with Related Rules and Regulations

Compliance with the rules and regulations regarding transactions with related parties is ensured to comply with Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, namely PSAK 7 (revised 2014) concerning "Related Party Disclosures". A complete description of this matter has also been presented in the Company's Annual Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2023, which is an integral part of the 2023 Annual Report and Sustainability Report.

All disclosures of the information above have also been reported to the regulator as a form of compliance with POJK No. 42/POJK.04/2021 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian bersifat luar biasa dan jarang terjadi di sepanjang tahun 2023.

There was no financial information containing extraordinary and rare events throughout 2023.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Terhadap Perusahaan

Amendment of Law And Regulations That Have an Influence on the Company

Hingga akhir tahun 2023 tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap Perusahaan.

Until the end of 2023 there was no amendment to laws and regulations that affect the Company.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan

Amendment of Accounting Policies and Its Impact on the Company

Perusahaan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan Perusahaan:

The Company applies for the first time all new and/or revised standards that are effective for periods beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that affect the Company's financial statements:

Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Amendment to PSAK 1: Presentation of financial statements - Disclosure of Accounting Policies		
Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan Explanation of Changes in Accounting Policies Implemented	:	Amandemen ini memberikan panduan untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan dalam mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas menjadi persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi. This amendment provides guidance to help entities apply materiality considerations in accounting policy disclosures. The amendments aim to help entities provide more useful accounting policy disclosures by replacing requirements for disclosing an entity's 'significant' accounting policies with requirements for disclosing an entity's 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures. .
Dampaknya Terhadap Perusahaan Impact on the Company	:	Amandemen tersebut berdampak pada pengungkapan kebijakan akuntansi Perusahaan, namun tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian hal apa pun dalam laporan keuangan Perusahaan. These amendments have an impact on the disclosure of the Company's accounting policies, but have no impact on the measurement, recognition or presentation of any matter in the Company's financial statements.

Amandemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan Amendment to PSAK 16: Fixed Assets - Results Before Intended Use		
Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan Explanation of Changes in Accounting Policies Implemented	:	Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi. This amendment does not allow an entity to deduct any proceeds from the sale of items produced when bringing the asset to the location and condition necessary for the asset to operate in accordance with management's intentions from the acquisition cost of a fixed asset. Instead, the entity recognizes the proceeds from the sale of those items, and the costs of producing those items, in profit or loss.
Dampaknya Terhadap Perusahaan Impact on the Company	:	Perusahaan menerapkan amandemen tersebut secara retrospektif hanya untuk aset tetap yang dibuat supaya aset siap digunakan pada atau setelah awal periode penyajian paling awal ketika entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut. Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan Perusahaan karena tidak terdapat penjualan atas item-item yang dihasilkan aset tetap yang menjadi tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal periode sajian paling awal. The Company applies the amendments retrospectively only to fixed assets that are made ready for use at or after the beginning of the earliest period presented when the entity first applies the amendments. This amendment has no impact on the Company's financial statements because there were no sales of resulting items of property, plant and equipment that became available for use at or after the beginning of the earliest period presented.

Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi Amendments to PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors related to the Definition of Accounting Estimates		
Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan Explanation of Changes in Accounting Policies Implemented	:	Amandemen PSAK 25 memperjelas perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi. Amendments to PSAK 25 clarify the differences between changes in accounting estimates, changes in accounting policies and error corrections. The amendments also clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.
Dampaknya Terhadap Perusahaan Impact on the Company	:	Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan. This amendment has no impact on the Company's financial statements.

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal Amendment to PSAK 46: Income Tax - Deferred Tax Related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction		
Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan Explanation of Changes in Accounting Policies Implemented	:	Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama dan perbedaan temporer kena pajak dan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning. Amendments to PSAK 46 Income Tax narrow the scope of the initial recognition exception, so that it no longer applies to transactions that give rise to deductible temporary differences in the same amount and taxable temporary differences such as leases and decommissioning liabilities.
Dampaknya Terhadap Perusahaan Impact on the Company	:	Amandemen ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan. This amendment has no impact on the Company's financial statements.

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional Ketentuan Model Pilar Dua Amendment to PSAK 46: Income Tax - International Tax Reform Pillar Two Model Provisions		
Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan Explanation of Changes in Accounting Policies Implemented	:	Amandemen PSAK 46 ini diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aturan Model Pilar Dua yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), dan mencakup: • Pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua; dan • Persyaratan pengungkapan bagi entitas yang terkena dampak untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut, terutama sebelum tanggal berlakunya undang-undang tersebut. Pengecualian tersebut, yang penggunaannya harus diungkapkan, segera berlaku saat penerbitan amandemen ini. Persyaratan pengungkapan lainnya berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, namun tidak untuk periode interim yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2023. This amendment to PSAK 46 was introduced in response to the Pillar Two Model regulations issued by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), and includes: • Exceptions to the recognition and disclosure of information regarding deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income tax; And • Disclosure requirements for affected entities to help users of financial statements better understand the entity's exposure to Pillar Two income taxes arising from the law, particularly prior to the effective date of the law. Such exceptions, the use of which must be disclosed, are effective immediately upon publication of this amendment. Other disclosure requirements apply to annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023, but not to interim periods ending on or before December 31, 2023.

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional Ketentuan Model Pilar Dua Amendment to PSAK 46: Income Tax - International Tax Reform Pillar Two Model Provisions		
Dampaknya Terhadap Perusahaan Impact on the Company	:	Pada tanggal 31 Desember 2023, perundang-undangan terkait pajak penghasilan Pilar Dua belum diberlakukan atau secara substantif belum diberlakukan di Indonesia tempat Perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, Perusahaan masih dalam proses melakukan penilaian atas potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua. Potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua, jika ada, saat ini tidak diketahui atau dapat diperkirakansecara wajar. Amandemen tersebut tidak berdampak pada laporan keuangan Perusahaan karena tidak termasuk dalam cakupan aturan model Pilar Dua karena pendapatannya kurang dari EUR750 juta/tahun. As of December 31, 2023, legislation related to Pillar Two income tax has not yet been implemented or has not been substantively implemented in Indonesia where the Company operates. Therefore, the Company is still in the process of assessing the potential exposure to Pillar Two income taxes. Potential Pillar Two income tax exposure, if any, is not currently known or can be reasonably estimated. The amendment has no impact on the Company's financial statements as it does not fall within the scope of the Pillar Two model rules due to its revenues being less than EUR750 million/year.


VOLVO
KOBELCO

05

Fungsi Penunjang Bisnis

Business Supporting Function

Kami memahami, meraih kepercayaan dari para Pemangku Kepentingan sejatinya bukanlah suatu serta merta, akan tetapi merupakan buah dari pengejawantahan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh Insan IPCC. Direksi yang didukung oleh Dewan Komisaris serta semua jajaran Perusahaan, senantiasa berupaya dan bekerja keras dalam mencapai target-target Perusahaan.

We understand that gaining the trust of the Stakeholders is not something that happens immediately, but is the result of serious efforts from all IPCC People. The Board of Directors, supported by the Board of Commissioners and all levels of the Company, always strive and work hard to achieve the Company's targets.


PELINUG
EPSON

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Human Capital Management

IPCC meyakini bahwa pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkoordinasi dengan baik dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Memiliki SDM yang andal, loyal dan berkompeten merupakan modal utama Perseroan guna meraih visi, misi, dan kesuksesan usaha yang berkelanjutan. Integrasi antara pengelolaan SDM dengan strategi perusahaan dapat dicapai dengan memiliki sistem pengelolaan SDM yang memastikan bahwa perusahaan memiliki SDM berkualitas yang lebih baik dibandingkan kompetitor, dengan mengembangkan pelatihan yang berfokus pada pembelajaran organisasi dan manajemen. Oleh karena itu, kompetensi setiap pegawai, termasuk kinerja yang unggul, produktivitas, fleksibilitas, terhadap perubahan organisasi, inovasi dan kemampuan untuk menghasilkan layanan yang baik dari setiap individu, dapat memberikan nilai tambah dalam meningkatkan daya saing perusahaan.

Kunci utama dalam menciptakan SDM yang turut meningkatkan daya saing dan akselerasi kinerja perusahaan adalah proses rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan talenta serta kompetensi. Serangkaian proses mulai dari memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia, mengadakan seleksi calon Pegawai sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Perseroan, serta memfasilitasi pelatihan kepada pegawai sesuai dengan karakter dan kompetensi masing-masing. Setiap pegawai memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan karier sesuai bidangnya, dengan tidak membedakan penerapannya berdasarkan gender. Melalui pelatihan dan pengembangan pegawai yang dilakukan, Perseroan secara berkelanjutan menerapkan dan memantau strategi pengelolaan SDM untuk mendapatkan talenta yang berkualitas dan mendorong seluruh pegawai untuk merespon tantangan dan dinamika bisnis dalam industri pelabuhan, khususnya jasa layanan terminal kendaraan.

The IPCC believes that well-coordinated Human Capital (HC) management can support the achievement of company goals. Having reliable, loyal and competent Human Capital is the Company's main capital to achieve its vision, mission and sustainable business success. Integration between HC management and company strategy can be achieved by having an HC management system that ensures that the company has better quality Human Capital than competitors, by developing training that focuses on organizational and management learning. Therefore, the competency of each employee, including excellent performance, productivity, flexibility, organizational change, innovation and the ability to produce good service from each individual, can provide added value in increasing the company's competitiveness.

The main key in creating Human Capital that contribute to increasing competitiveness and accelerating company performance is the recruitment, selection, training and talent and competency development process. A series of processes starting from providing complete and clear information regarding available job vacancies, selecting prospective employees according to the qualifications required by the Company, as well as facilitating training for employees according to their respective character and competencies. Every employee has the same right to receive training and career development according to their field, without differentiating its application based on gender. Through employee training and development, the Company continuously implements and monitors HC management strategies to obtain quality talent and encourages all employees to respond to challenges and business dynamics in the port industry, especially vehicle terminal services.

VISI DAN MISI PENGELOLAAN SDM

Visi
Memiliki SDM yang andal, loyal dan berkompeten.

Misi
- Peningkatan kompetensi SDM
- Manajemen SDM yang mandiri
- Transformasi organisasi dan manajemen SDM
- Peningkatan talent management
- Peningkatan produktivitas pekerja di atas rata rata industri

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA SDM
Pengelolaan SDM di Perseroan dilaksanakan oleh Divisi *Human Capital* (HC) yang bertugas dan bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan SDM secara keseluruhan. Secara struktural, Divisi Human Capital bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan dan SDM. Divisi Human Capital melakukan pengelolaan perencanaan, perencanaan kebijakan, hinggga penembangan SDM sesuai dengan strategi dan tujuan Persroan.

Struktur Organisasi Divisi Human Capital IPCC

HC MANAGEMENT VISION AND MISSION

Vision
Have reliable, loyal and competent human capital.

Mission
- Increasing HC competency
- Independent HC management
- Organizational transformation and H management
- Improved talent management
- Increased worker productivity above the industry average

HC MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE
HC management in the Company is carried out by the Human Capital (HC) Division which is tasked and responsible for overall HC management. Structurally, the Human Capital Division is directly responsible to the Director of Finance and HC. The Human Capital Division carries out planning management, policy planning, and HC development in accordance with the Company's strategy and objectives.

Organizational Structure of the IPCC Human Capital Division

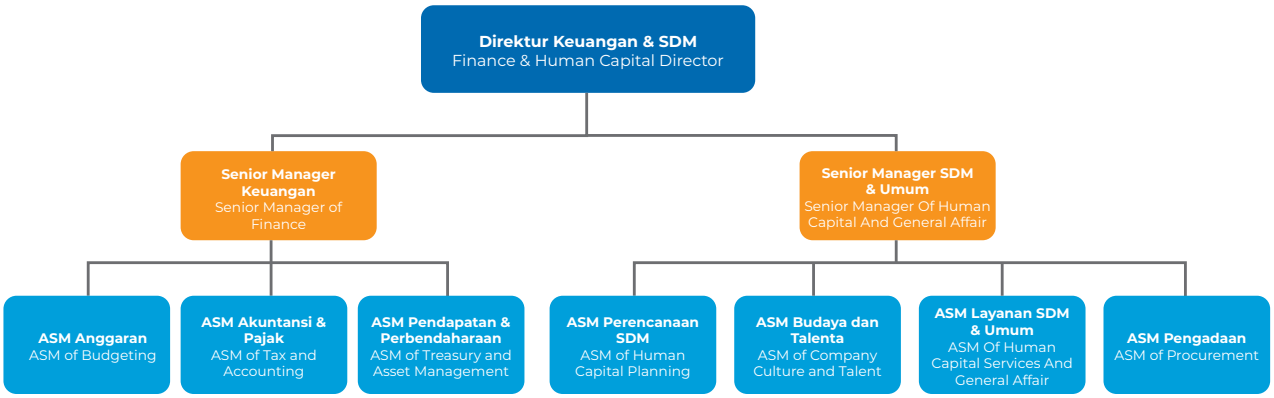

Hingga akhir tahun 2023, Divisi Human Capital dipimpin oleh Safrial sebagai Senior Manager Sumber Daya Manusia dan Layanan Umum, ditunjuk melalui Surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/3/1/1/RKTK/UTMA/PLND-23 tanggal 1 Januari 2023.

Until the end of 2023, the Human Capital Division has been led by Safrial as Senior Manager of Human Capital and Public Services, appointed through Board of Directors Decree No. KP.10.02/3/1/1/RKTK/UTMA/PLND-23 dated January 1, 2023.



Safrial
Senior Manager Sumber Daya dan Layanan Umum
Senior Manager of General Resources and Services

Menjabat Sejak : 1 Mei 2022
Serving since: May 1, 2022

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia, 52 tahun, domisili di DKI Jakarta Indonesia
Personal Data

Personal Data
Indonesian citizen, 52 years old, domiciled in DKI Jakarta Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Direksi No. KP.10.02/3/1/1/RKTK/UTMA/PLND-23 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Legal Basis for Appointment
Board of Directors Decree No. KP.10.02/3/1/1/RKTK/UTMA/PLND-23 concerning Transfer of Worker Duties/Positions within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Riwayat Pendidikan
- S1 Teknik & Manajemen Industri dari Universitas Sumatera Utara (1997)
- S2 Marketing dari Universitas Gadjah Mada (2003)

Education background
- Bachelor's Degree in Industrial Engineering & Management from Universitas Sumatera Utara (1997)
- Master of Marketing from Universitas Gadjah Mada(2003)

Riwayat Pekerjaan
- Staf Audit Mutu (1999-2002)
- Quality MR (2022-2006)
- ASM Perencanaan Investasi (2006-2013)
- Senior Manager Perencanaan & Pengembangan Usaha (2013-2018)
- Senior Manager Pembinaan Anak Perusahaan (2018-2019)
- SVP Pengadaan (2019-2021), dan SVP Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan pada Divisi Kerjasam Usaha dan Peminaan Anak Perusahaan, Direktorat Strategi dan Komersial (2021-2022)

Work Experience
- Quality Audit Staff (1999-2002)
- Quality MR (2022-2006)
- ASM Investment Planning (2006-2013)
- Senior Manager Business Planning & Development (2013-2018)
- Senior Manager of Subsidiary Development (2018-2019)
- SVP Procurement (2019-2021), and SVP Business Cooperation and Subsidiary Development in the Business Cooperation and Subsidiary Development Division, Strategy and Commercial Directorate (2021-2022)

PERENCANAAN PENGELOLAAN SDM

Perencanaan SDM didasarkan pada kebutuhan organisasi Perseroan dengan senantaisa memperhatikan jumlah, kualitas, dan kualifikasi secara tepat dan memadai. Perseroan meyakini bahwa implentasi perencanaan SDM yang tepat dapat menghasilkan pegawai unggul yang bertalenda dan profesional. Hal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi bisnis Perseroan dalam merealisasikan visi, misi, dan target tahunan, serta untuk mendukung keberlangsungan bisnis Perseroan di masa mendatang, sehingga Perseroan harus memastikan ketersediaan pekerja sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Dalam menyusun perencanaan kebutuhan pekerja sesuai dengan RKAP yang telah dicanangkan di awal tahun, Perseroan melakukan koordinasi dengan Direktorat SDM PT Pelindo Multi Terminal. Hasil perencanaan SDM tersebut berupa daftar kebutuhan pekerja yang menjadi acuan pelaksanaan rekrutmen pekerja dan memudahkan proses penempatan pekerja menjadi lebih tepat.

REALISASI PROGRAM KERJA SDM 2023

Pada tahun 2023 pengembangan SDM berfokus pada peningkatan kapabilitas setiap individu guna menghadapi dinamika perkembangan teknologi dunia internasional sehingga tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis dan menjadi pengelola terminal kendaraan berstandar global dan memiliki nilai tambah bagi para pelanggan dapat terwujud. Adapun berbagai program yang telah terealisasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Implementasi KPI Individu;
2. Implementasi Aplikasi Pelindo E Office (PEO);
3. Implementasi E-Procurement PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada IPCC;
4. Internalisasi Budaya Akhlak;
5. .Terealisasinya Personil Operasi untuk Kegiatan Bongkar Muat;
6. Penerapan Reward and Punishment.

HC MANAGEMENT PLANNING

HC planning is based on the Company's organizational needs by always paying attention to quantity, quality and qualifications appropriately and adequately. The Company believes that the implementation of proper HC planning can produce excellent employees who are talented and professional. This is an inseparable part of the Company's business strategy in realizing its vision, mission and annual targets, as well as to support the sustainability of the Company's business in the future, so the Company must ensure the availability of workers in accordance with business needs.

In preparing worker needs planning in accordance with the RKAP which was announced at the beginning of the year, the Company coordinated with the HC Directorate of PT Pelindo Multi Terminal. The results of HC planning are in the form of a list of worker needs which becomes a reference for implemeTnting worker recruitment and makes the worker placement process easier to be more precise.

REALIZATION OF 2023 HC WORK PROGRAM

In 2023, human capital development focuses on increasing the capabilities of each individual to face the dynamics of international technological developments so that the company's goal of expanding its business and becoming a global standard car terminal manager that has added value for customers can be realized. The various programs realized in 2023 are as follows:

1. Implementation of Individual KPIs;
2. Implementation of the Pelindo E Office (PEO) Application;
3. mplementation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) E-Procurement at the IPCC;
4. Internalization of AKHLAK Culture;
5. Realization of Operation Personnel for Loading and Unloading Activities;
6. Implementation of Reward and Punishment

KEBIJAKAN REKRUTMEN KARYAWAN

Dalam mendukung pemenuhan SDM yang unggul dan kompeten dalam organisasi perusahaan, Pereroan melakukan proses rekrutmen yang dilakukan dengan menjunjung asas kewajaran dan kesetaraan dan senantiasa mempertimbangkan kecocokan antara kompetensi dan keahlian dari insan Perseroan dengan jabatan yang diisi.

Proses rekrutmen mempengaruhi kualitas pekerja yang akan menempati posisi yang tersedia, sehingga diharapkan mampu mencetak pekerja yang dapat memberikan keunggulan kompetitifnya bagi Perseroan. Perseroan menerapkan prinsip bahwa setiap kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier di Perseroan berdasarkan kompetensi dan bidang keahlian masing-masing tanpa diskriminasi gender, ras, suku, dan agama.

Program rekrutmen dilaksanakan secara komprehensif. Setiap kandidat akan melalui proses evaluasi yang ketat, meliputi pengkajian latar belakang, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, media sosial, dan kondisi kesehatan calon pegawai. Proses seleksi juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan kuantitas dan kompetensi yang dimiliki oleh kandidat.

Perseroan menerapkan dua jalur metode rekrutmen karyawan yaitu internal dan eksternal. Promosi dan mutasi pekerja menjadi bagian dari rekrutmen jalur internal.

EMPLOYEE RECRUITMENT POLICY

In supporting the fulfillment of excellent and competent Human Capital in the company organization, the Company carries out a recruitment process that is carried out by upholding the principles of fairness and equality and always considering the compatibility between the competencies and skills of the Company's people and the positions being filled.

The recruitment process influences the quality of workers who will occupy the available positions, so it is hoped that it will be able to produce workers who can provide a competitive advantage for the Company. The Company applies the principle that every candidate has the same opportunity to develop a career in the Company based on their respective competencies and areas of expertise without discrimination of gender, race, ethnicity and religion.

The recruitment program is implemented comprehensively. Each candidate will go through a strict evaluation process, including an assessment of the prospective employee's background, educational history, work history, social media and health conditions. The selection process is also carried out in accordance with the quantity and competency requirements possessed by the candidate.

The Company applies two employee recruitment methods, namely internal and external. Promotion and transfer of workers is part of internal recruitment.

KEBIJAKAN REMUNERASI DAN PEMBERIAN MANFAAT BAGI KARYAWAN

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam mengelola karyawan sebagai mitra penting bagi Perseroan, maka seluruh jajaran manajemen senantiasa mematuhi perundang-undangan dan regulasi yang berlaku yang mengatur tentang tenaga kerja terutama dalam hal ketentuan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/K) yang berlaku di wilayah masing-masih unit kerja Perseroan.

Perseroan juga menetapkan kompensasi program kesejahteraan dan fasilitas bagi karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas setiap karyawan, seperti:

7. Gaji Merit;
8. Tunjangan Perumahan;
9. Tunjangan Transport;

REMUNERATION AND BENEFITS POLICY FOR EMPLOYEES

As part of the Company's commitment to managing employees as important partners for the Company, all levels of management always comply with applicable laws and regulations governing labor, especially in terms of applicable Provincial/Regency/City Minimum Wage (UMP/K) provisions. in the area of each Company's work unit.

The Company also determines welfare program compensation and facilities for employees to improve the welfare and productivity of each employee, such as:

7. Merit Salary;
8. Housing Allowance;;
9. Transport Allowance;

10. Tunjanagn Jabatan;
11. Tunjangan Fasilitas Kendaraan;
12. Lumpsum BBM;
13. Insentif Performansi;
14. Lumpsum Pulsa;
15. Tunjangan Hari Raya;
16. Bonus Tahunan;
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
18. *Employee Gathering*.

10. Position Allowances;
11. Vehicle Facility Allowance;
12. Fuel lump sum;
13. Performance Incentives;
14. Internet credit lump sum;
15. Holiday allowance;
16. Annual bonus;
17. Health Service Facilities;
18. Employee Gatherings.

SISTEM MANAJEMEN KINERJA

Adapun tujuan penerapan sistem manajemen kinerja adalahuntuk mengelola proses pencapaian kinerja pekerja secara objektif. Salah satu proses dalam sistem manajemen kinerja, yaitu penilaian kinerja perkerja. Perseroan melaksanakan proses penilaian kinerja pekerja menggunakan indikator kinerja yang mengacu pada Kebijakan Penilaian Performansi Bulanan (P2B) PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM

The aim of implementing a performance management system is to manage the process of achieving employee performance objectively. One of the processes in the performance management system is employee performance assessment. The Company carries out an employee performance assessment process using performance indicators that refer to the Monthly Performance Assessment Policy (P2B) of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

TURNOVER KARYAWAN

Sebagai upaya memperoleh SDM berkualitas untuk mendukung pencapaian kinerja agar semakin optimal, Perseroan menyelenggarakan proses rekrutmen sebagai tindak lanjut pemenuhan sumber daya di beberapa posisi serta adanya perputaran karyawan yang disebabkan masuknya masa pensiun, mengundurkan diri, maupun penambahan personel dalam rangka menciptakan komposisi pegawai yang proposional.

Hingga akhir 2023, terdapat penambahan/pengurangan karyawan dengan uraian sebagai berikut:

EMPLOYEE TURNOVER

In an effort to obtain quality Human Capital to support optimal performance achievement, the Company carries out a recruitment process as a follow-up to the fulfillment of resources in several positions as well as employee turnover due to retirement, resignation or additional personnel in order to create a proportional employee composition.

Until the end of 2023, there were additions/reductions in employees with the following description:

Alasan Keluar Reason of Termination	**2023**	**2022**	**2021**
Mengundurkan diri Resign	1	0	0
Pensiun Retire	0	3	1
Meninggal Dunia Passed Away	0	0	0
Habis Masa Kontrak End of contract	0	1	0
Pemutusan Hubungan Kerja Termination of Employment	0	0	0
Jumlah Total	**1**	**4**	**1**

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Perseroan harus memiliki SDM yang berkualitas. Peresroan mengenali SDM sebagai mitra utama dan strategis Perseroan untuk menuju jasa terminal kendaraan dengan pelayanan yang berkualitas dan berstandar internasional. Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan SDM yang memiliki integritas tinggi, memiliki kompetensi yang berstandar internasional, produktivitas yang tinggi, serta berorientasi kepada pelayanan pelanggan.

Oleh karena itu, Perseroan memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi di seluruh aspek operasional Perusahaan secara terencana dan berkelanjutan. Upaya peningkatan kompetensi ini diselenggarakan dengan menjunjung tinggi pemberian kesempatan yang setara sesuai dengan kode etik Perseroan.

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan yang diselenggaran oleh pihak internal maupun eksternal Perusahaan dengan realisasi biaya pelatihan yang ditanggung oleh Perseroan.

Berikut pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Perusahaan sepanjang tahun 2023:

- Proxsis Expo and Conference 2023 - Business Insight 2023 Resilience Mode On
- Workshop Procurement and Fraud Asia Anti Fraud Key Risk Indicator
- Effective Business Communication
- Conference Indonesia Leadership Forum 2023
- Pelatihan Effective Business Negotitation Skills for Leaders
- HR Development Program and Designing Performance Plan (KPI)
- Konferensi dan Workshop The 8th PR Indonesia Awards (PRIA)
- Pelatihan Coaching for Corporate
- Konferensi Auditor Internal (KAI) tahun 2023
- Pelatihan Penyusunan Knowledge Map
- Konferensi Auditor Internal (KAI) tahun 2023
- Workshop Design Thinking
- Service Excellence Training bersama Shaqnas Haque
- Excellence Public Speaking Training bersama Shaqnas Haque
- Safety Awareness Training - QCC Session
- Pelindo E-Talks (Empowering Talks) Vol.5 “Ingraining AKHLAK, Igniting Business Growth”
- Refreshment Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

EMPLOYEE TRAINING AND COMPETENCE DEVELOPMENT

To achieve the stated goals, the Company must have quality Human Capital. The Company recognizes HC as the Company’s main and strategic partner to achieve vehicle terminal services with quality services and international standards. The Company is committed to developing Human Capital who have high integrity, have international standard competencies, high productivity, and are customer service oriented.

Therefore, the Company provides training and competency development in all aspects of the Company’s operations in a planned and sustainable manner. This competency improvement effort is carried out by upholding the provision of equal opportunities in accordance with the Company’s code of ethics.

Throughout 2023, the Company has organized training and development programs organized by internal and external parties with the realization of training costs borne by the Company.

The following trainings were organised by Company throughout 2023:

- Proxsis Expo and Conference 2023 - Business Insight 2023 Resilience Mode On
- Workshop of Procurement and Fraud Asia Anti Fraud
- Key Risk Indicators
- Effective Business Communication
- Conference Indonesia Leadership Forum 2023
- Effective Business Negotiation Skills for Leaders training
- HR Development Program and Designing Performance Plan (KPI)
- The 8th PR Indonesia Awards (PRIA) Conference and Workshop
- Coaching for Corporate Training
- Internal Auditor Conference (KAI) in 2023
- Knowledge Map Preparation Training
- Internal Auditor Conference (KAI) in 2023
- Design Thinking Workshop
- Service Excellence Training with Shaqnas Haque
- Excellence Public Speaking Training with Shaqnas Haque
- Safety Awareness Training - QCC Session
- Pelindo E-Talks (Empowering Talks) Vol.5 “Ingraining AKHLAK, Igniting Business Growth”
- Refreshment of ISO 9001:2015 Quality Management System

- Workshop Subject Matter Expert (SME) & Community of Practice (COP)
- GRC Summit Tahun 2023 "Building Resilient Future Through GRC and ESG"
- Pelatihan Coaching & Mentoring oleh Kuncie
- Pelatihan Ready to Retire batch 1 Tahun 2023
- Mentoring Coaching Bersama Kuncie
- Pelatihan Toyota Way & TPS Training for TLC Top Management
- Pelatihan Ready to Retire Batch II Tahun 2023
- Coffee Connect Day
- Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis PT Pelindo Multi Terminal
- Training modul perencanaan & kontrol aplikasi CARDOM
- Pelatihan Safety Champion SPMT Group 2023
- Pelatihan Enterprise Risk Management Fundamentals
- Pelatihan Individual Development Program (IDP) Batch 1
- Pelatihan Commercial Academy Pelindo (Level Basic)
- Assessment Pre-Sertifikasi Training for Trainer (TfT)

- Subject Matter Expert (SME) & Community of Practice (COP) Workshop
- GRC Summit 2023 "Building Resilient Future Through GRC and ESG"
- Coaching & Mentoring Training by Kuncie
- Ready to Retire training batch 1 in 2023
- Mentoring Coaching with Kuncie
- Toyota Way & TPS Training for TLC Top Management
- Ready to Retire Batch II Training in 2023
- Coffee Connect Day
- Preparation of PT Pelindo Multi Terminal Technical Competency Dictionary
- CARDOM application planning & control module training
- SPMT Group 2023 Safety Champion Training
- Enterprise Risk Management Fundamentals training
- Batch 1 Individual Development Program (IDP) training
- Pelindo Commercial Academy Training (Basic Level)
- Training for Trainer (TfT) Pre-Certification Assessment

Biaya Pengembangan Kompetensi
Competency Development Costs

	2023	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference (Rp)	Persentase Percentage (%)
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	Rp 986.876.042	Rp 581.000.000	405.876.042	69,85%

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perseroan membangun hubungan industrial dengan menjamin keberadaan serikat pekerja (SP) di lingkungan kerja Perseroan sebagai bagian dari hak berserikat karyawan. Serikat pekerja di lingkungan Perseroan bernama Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) dan telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 2410/III/SP/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021.

Peseroan mendukung aktivitas Serikat Pekerja. Hubungan yang harmonis dan konstruktif yang saling menghormati tersebut dimanifestasikan dalam bentuk butir-butir kesepakatan dan aturan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang ditinjau dan diperbaharui secara berkala serta ditandatangani oleh Manajemen dan Serikat Pekerja.

INDUSTRIAL RELATIONS

The Company builds industrial relations by guaranteeing the existence of Labor Unions (SP) in the Company's work environment as part of employee association rights. The workers' union within the Company is called Indonesia Port Workers Union (SPPI) and has been registered with the Department of Manpower and Transmigration based on Decree of the Minister of Manpower No. 2410/III/SP/X/2021 date 06 October 2021.

The Company supports the activities of Labor Unions. This harmonious and constructive relationship that respects each other is manifested in the form of points of agreement and rules as stated in the Collective Labour Agreement (CLA), which is reviewed and updated periodically and signed by Management and Trade Unions.

Perseroan mendayagunakan hubungan konstruktif dengan Serikat Pekerja dengan menyelenggarakan pertemuan berkala guna mensosialisasikan kebijakan dan program Manajemen serta untuk penyelesaian permasalahan hubungan industrial maupun penyelesaian keluhan karyawan.

KEBIJAKAN REWARD DAN PUNISHMENT

Pemberlakuan *Reward* dan *Punishment* bertujuan untuk meningkatkan kinerja setiap pekerja. *Reward* diberikan untuk memotivasi pekerja dalam mencapai target kinerja secara optimal sehingga mendukung pencapaian sasaran Perseroan.

Perseroan memberikan *reward,* baik bersifat finansial maupun non finansial, yang disesuaikan dengan kemampuan Perseroan. Insentif performansi adalah salah satu bentuk *reward* yang diberikan Perseroan kepada pekerja berdasarkan hasil Penilaian Performansi Bulanan dan pencapaian target *Key Performance Indicator* (KPI) yang dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori dengan persentase kelas jabatan. Perseroan juga memberikan apresiasi bagi pekerja yang berkinerja istimewa berupa sertifkat dan paket ibadah umrah atau sejenisnya.

Sementara itu, punishment diterapkan Perseroan guna mencegah segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja sehingga hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran aktivitas kerja dapat dihindari.

Perseroan memberikan punishment sesuai tingkat dan jenis sanksi yang berlaku, yang meliputi teguran, surat peringatan, dan sanksi lainnya yang disesuaikan dengan Tingkat pelanggaran.

The Company utilizes constructive relationships with the Labor Union by holding regular meetings to socialize Management policies and programs as well as to resolve industrial relations problems and resolve employee complaints.

REWARD AND PUNISHMENT POLICY

The implementation of Rewards and Punishments aims to improve the performance of each worker. Rewards are given to motivate workers to achieve optimal performance targets so as to support the achievement of the Company's targets.

The Company provides rewards, both financial and non-financial, which are adjusted to the Company's capabilities. Performance incentives are a form of reward given by the Company to workers based on the results of the Monthly Performance Assessment and achievement of Key Performance Indicator (KPI) targets which are grouped into 5 (five) categories with percentage of position class. The company also provides appreciation for employees with exceptional performance in the form of certificates and Umrah packages or similar.

Meanwhile, punishment is applied by the Company to prevent all forms of violations committed by workers so that things that can hinder or disrupt the smooth running of work activities can be avoided.

The Company provides punishment according to the level and type of sanctions applicable, which includes reprimands, warning letters and other sanctions adjusted to the level of violation.

RENCANA PENGEMBANGAN SDM 2024

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global di tahun 2024 dimana kondisi geo politik internasional yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan, penyiapan SDM melalui peningkatan kompetensi teknis spesifik melalui berbagai program pilihan dengan menyesuaikan bidang usaha perusahaan serta melakukan sertifikasi keahlian bagi bidang-bidang bisnis yang memerlukan keahlian khusus dengan menggandeng lembaga keahlian yang kredibel.

Sebagai langkah aktif Perusahaan di tahun 2024, telah disusun action plan guna memenuhi kinerja perusahaan baik disisi operasional maupun komersial seperti : Pembuatan perencanaan sertifikasi tahun 2024 berdasarkan kebutuhan kompetensi, melakukan survey dan evaluasi kebutuhan training, refreshment tenaga operasional yang membutuhkan keahlian tertentu, verifikasi lembaga training yang kredible serta mapping waktu pelaksanaan training dengan mengoptimalkan jam kerja.

HC DEVELOPMENT PLAN 2024

In facing the dynamics of the global economy in 2024 which the international geo-political conditions can affect the Company's performance, preparing human capital through increasing specific technical competencies through various selected programs by adapting the company's business fields as well as carrying out expertise certification for business fields that require special skills by collaborating with credible expertise institution.

As an active step for the Company in 2024, an action plan has been prepared to meet the company's performance both on the operational and commercial side, such as: Making a certification plan for 2024 based on competency needs, conducting surveys and evaluating training needs, refreshing operational staff who require certain skills, verifying training institutions which is credible as well as mapping the training implementation time by optimizing working hours.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Penerapan teknologi informasi (TI) yang optimal dapat mendorong Perseroan menjadi lebih produktif, kompetitif, dan cepat beradaptasi terhadap perubahan serta tantangan bisnis, sehingga mampu membawa Perseroan dalam mencapai percepatan pertumbuhan bisnis.
Sistem TI Perseroan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja dengan melakukan otomasi berbagai proses operasional, meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif dengan mengutamakan inovasi yang berkelanjutan, dan selalu memperhatikan kebutuhan bisnis perusahaan di bidang operasional dan fungsional. Sistem TI di lingkup IPCC juga dilengkapi dengan SDM unggul yang berperan dalam mengawasi dan mengendalikan sistem tersebut. Adapun visi dan misi IPCC dalam pemanfaatan TI untuk mendukung kinerja dan perkembangan Perseroan adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

Optimal application of information technology (IT) can encourage the Company to become more productive, competitive and quickly adapt to changes and business challenges, so as to enable the Company to achieve accelerated business growth.

The Company's IT system is expected to increase work efficiency by automating various operational processes, increasing competitiveness and competitive advantage by prioritizing sustainable innovation, and always paying attention to the company's business needs in the operational and functional areas. The IT system within the scope of the IPCC is also equipped with excellent Human Capital who play a role in supervising and controlling the system. The IPCC's vision and mission in utilizing IT to support the Company's performance and development are as attached below.

VISI TI
IT VISION

Tersedianya ekosistem layanan bisnis dan operasional Car Terminal kelas dunia dengan pondasi Teknologi Informasi yang terintegrasi, adaptif serta *agile* mengikuti perkembangan dan kebutuhan bisnis serta trend teknologi.
Availability of a world-class Car Terminal business and operational services ecosystem with an integrated, adaptive and agile Information Technology foundation following developments and business needs and technological trends.

MISI TI
IT MISSION

- Mendukung transformasi dan terwujudnya ekosistem Car Terminal dengan implementasi program digitalisasi system.
- Melakukan pengembangan dan penerapan integrasi layanan- layanan IT untuk ekosistem Car Terminal.
- Peningkatan dan pemenuhan Human Capital IT yang memiliki kompetensi untuk mengikuti perkembangan bisnis dan kebutuhan bisnis berbasis teknologi informasi.
- Supporting the transformation and realization of the Car Terminal ecosystem by implementing a system digitalization program.
- Develop and implement integrated IT services for the Car Terminal ecosystem.
- Increasing and fulfilling IT Human Capital which has the competence to keep up with business developments and information technology-based business needs.

KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan nilai tambah, IPCC telah mengembangkan teknologi tepat untuk melakukan akselerasi bisnis dengan pendekatan dan kebijakan strategis di bidang TI. Strategi pengembangan dan implementasi teknologi informasi harus selaras dan mendukung strategi korporasi Pelindo, Sub-Holding SPMT dan IPCC sebagai operator untuk Terminal Kendaraan agar dapat memberikan dampak dalam peningkatan kualitas dan efisiensi proses bisnis serta dapat memberikan dukungan informasi kepada manajemen perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan.

Penerapan dan pengembangan TI di lingkup IPCC mengacu pada Dokumen IT Master Plan PT. Indonesia Kendaraan Terminal periode 2020 – 2024

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sistem TI di lingkup Perseroan, dikelola oleh Divisi Teknik dan Sistem Informasi yang berada di bawah naungan Direktorat Operasi dan Teknik, yang bertanggung jawab terhadap segala proses pengelolaan dan pengembangan TI Perseroan.

INFORMATION TECHNOLOGY POLICY AND GOVERNANCE

In order to meet the need to realize added value, IPCC has developed the right technology to accelerate business with strategic approaches and policies in the IT sector. The information technology development and implementation strategy must be in line with and support the corporate strategy of Pelindo, SPMT Sub-Holding and IPCC as operators for Vehicle Terminals so that they can have an impact on improving the quality and efficiency of business processes and can provide information support to company management in making decisions.

The implementation and development of IT within the scope of the IPCC refers to PT's IT Master Plan Document. Indonesia Kendaraan Terminal for the period 2020 – 2024

RESPONSIBLE FOR INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

The IT system within the Company is managed by the Engineering and Information Systems Division which is under the auspices of the Operations and Engineering Directorate, which is responsible for all the Company's IT management and development processes.

Struktur Organisasi Pengelola Sistem Informasi TI IPCC per 31 Januari 2023
Organizational Structure of IPCC IT Information Systems Management as of January 31, 2023



Peran tugas dan tanggung jawab Sub Divisi Sistem Informasi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan strategis dan operasional sistem informasi yang meliputi program perencanaan dan penggunaan optimal dari sumber daya teknologi informasi.
2. Pengembangan sistem dan implementasi solusi teknologi informasi meliputi pengelolaan proyek sistem informasi, pengembangan sistem, serta pengujian dan validasi sistem.
3. Dukungan layanan Sistem Informasi yang berkualitas dan layanan yang memadai kepada pengguna muliputi layanan monitoring operasional TI, dukungan keamanan sistem, dan layanan kontinuitas bisnis.

The roles and responsibilities of the Information Systems Sub Division are as follows:

1. Strategic and operational planning of information systems which includes planning programs and optimal use of information technology resources.
2. System development and implementation of information technology solutions including information system project management, system development, and system testing and validation.
3. Quality Information System service support and adequate services to users including IT operational monitoring services, system security support and business continuity services.

TRANSFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI IPCC

Teknologi informasi telah menjadi bagian penting di dalam kelancaran kegiatan bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC. Strategi pengembangan dan implementasi teknologi informasi harus selaras dan mendukung strategi korporasi Pelindo, Sub Holding SPMT dan IPCC sebagai operator untuk Terminal Kendaraan agar dapat memberikan dampak dalam peningkatan kualitas dan efisiensi proses bisnis serta dapat memberikan dukungan informasi kepada manajemen perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan.

Berikut standardisasi program transformasi pada 5 (lima) elemen untuk transformasi holistik:

IPCC INFORMATION TECHNOLOGY TRANSFORMATION

Information technology has become an important part in the smooth business activities of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk or IPCC. The strategy for developing and implementing information technology must be in line with and support the corporate strategy of Pelindo, SPMT Sub Holding and IPCC as operators for Vehicle Terminals so that it can have an impact on improving the quality and efficiency of business processes and can provide information support to company management in making decisions.

The following is the standardization of the transformation program on 5 (five) elements for holistic transformation:

Proses Bisnis Business process	**Infrastruktur & Peralatan** Infrastructure & Equipment	**Sumber Daya** Resource	**Teknologi Informasi** Technology Information	**HSSE** HSSE
Standardisasi proses bisnis **Standardization of business processes** Berdasarkan P&C untuk meningkatkan kinerja operasional Standardisasi komersial Based on P&C to improve operational performance Commercial standardization	**Standardisasi infrastruktur, sarana dan peralatan** **Standardization of infrastructure, facilities and equipment** Untuk mengakomodasi atau pelanggan atau komoditas yang ditargetkan To accommodate or target customers or commodities	Mengembangkan skills dan kompetensi dalam organisasi untuk menyelaraskan dengan standar industri serta mendukung organisasi berbasis P&C Develop skills and competencies within the organization to align with industry standards and support P&C-based organizations	Standardisasi teknologi informasi untuk mendukung arus informasi & operasi Standardisation of information technology to support the flow of information & operations	Membangun budaya kesehatan dan keselamatan di terminal melalui standardisasi praktik keselamatan Building a culture of health and safety in the terminal through standardizing safety practices
Implementasi Planning & Control **Implementation of Planning & Controlling** di seluruh proses bisnis: 1. Flow bongkar-muat yang terstandar untuk kecepatan 2. Kinerja operasional 3. Yord preferred area 4. Deployment of equipment 5. Rostering dan deployment tenaga kerja 6. Control untuk memastikan target kinerja tercapai operasional Standardisasi komersial Across business processes: 1. Standardized loading and unloading flow for speed 2. Operational performance 3. Berthing window 4. Yard preferred area 5. Deployment of equipment 6. Rostering and deployment of workforce 7. Control to ensure performance targets are achieved	**Infrastruktur** **Infrastructure** Yang andal dengan desain dan tata letak yang dioptimalkan berdasarkan model operasi standar (misalnya kedalaman draf, ketersediaan penyimpanan) Reliable infrastructure with optimized design and layout based on standard operating models (e.g. draft depth, storage availability)	Pelatihan khusus/ bersertifikat dan essential skills Special/certified training and essential skills	**Sistem** **Sistem** Untuk memfasilitasi kelancaran pertukaran informasi To facilitate the smooth exchange of information	Alat Pelindung Diri (APD) Personal Protective Equipment (PPE)
		Pelatihan Advanced Knowledge Advanced Knowledge Traini		Terminal steril dengan sistem keamanan modern Sterile terminal with modern security system
	Peralatan Pelabuhan **Port Equipment** Industri yang andal dengan produktivitas lebih tinggi dan O&M yang lebih rendah Reliable industrial port equipment with higher productivity and lower O&M	Pelatihan Kepemimpinan untuk Manajer & Supervisor Terminal Leadership Training for Terminal Managers & Supervisors	**Persyaratan minimum** **Persyaratan minimum** Standar teknologi (misalnya sensor, sistem operasi terminal) untuk mendukung operasi terminal Technology standards (e.g. sensors, terminal terminal operating system) to support operation terminal	Rencana Tanggap Darurat (emergency response plan) Emergency Response Plan (emergency response plan)
Komersial: **Commercial:** Standardisasi penawaran kualitas layanan, tariff, Kerjasama dengan PBM luar Pelindo untuk single billing dan agreement fee/revenue sharing Standardisation of offerings service quality, tariffs, Cooperation with PBM outside Pelindo for single billing and agreement fee/revenue sharing agreement		Pelatihan dasar terminal non-kontainer Non-container terminal basic training		Induksi dan Pelatihan Keselamatan Induction and Safety Training
		Struktur organisasi berdasarkan P&C Organizational structure based on P&C		

Tahapan Transformasi
Stages of Transformation

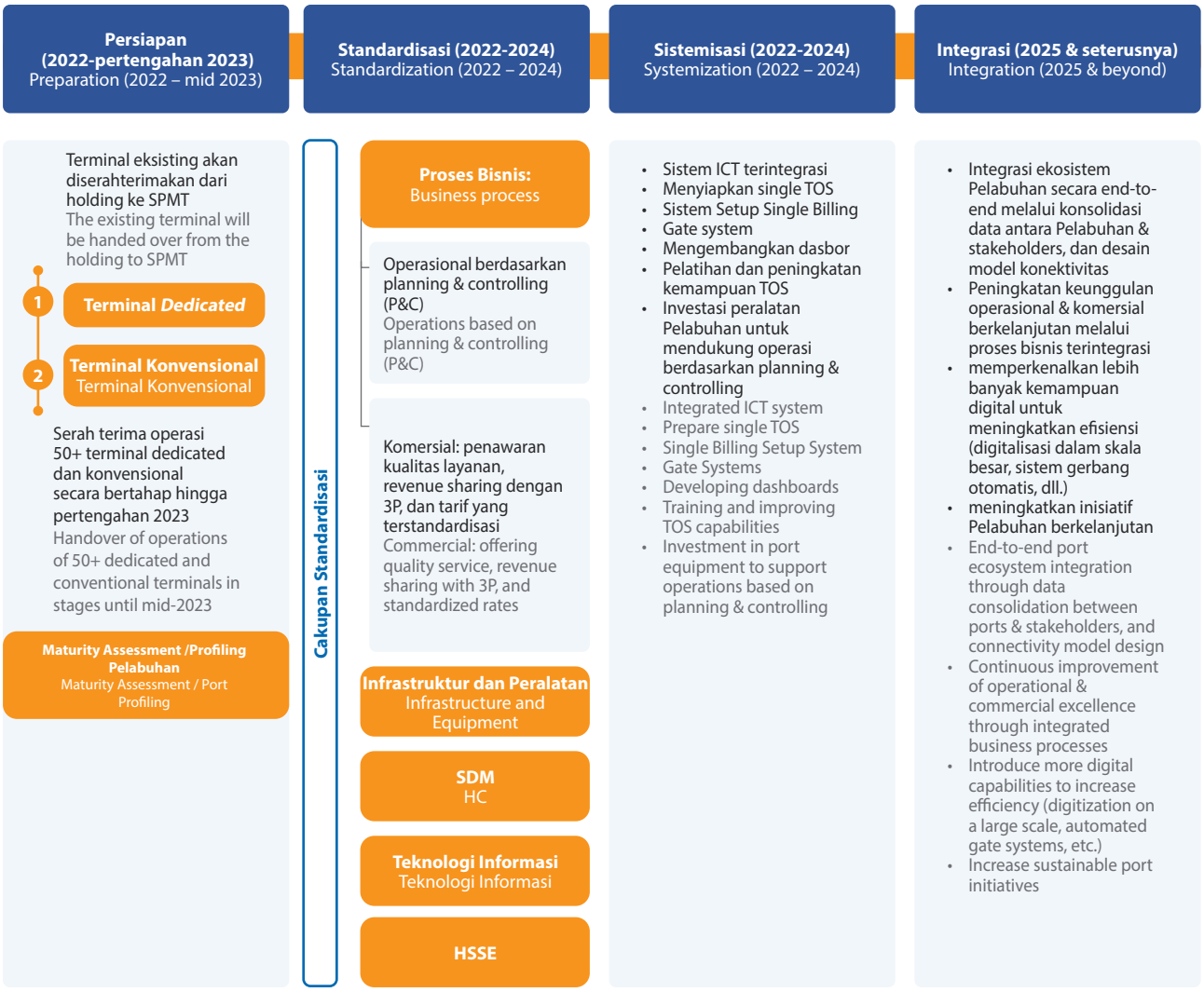

ROADMAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Roadmap pengembangan dan implementasi teknologi informasi mengacu terhadap Corporate Roadmap 2020 – 2024 dimana pada tahun 2023 IPCC memasuki fase "*Value Chain Expansion*" dimana tahapan tersebut fokus kepada pengembangan lokasi bisnis di area terminal lainnya dan pengembangan sistem operasional untuk mendukung ekspansi bisnis tersebut.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT ROADMAP

The roadmap for the development and implementation of information technology refers to the Corporate Roadmap 2020 - 2024 where in 2023 the IPCC enters the "Value Chain Expansion" phase where this stage focuses on developing business locations in other terminal areas and developing operational systems to support business expansion.











2020

Business Stabilization

- Implementasi digital surveillance system guna meningkatkan control dan monitoring di Terminal
- Implementasi aplikasi sistem cost accounting (akuntansi biaya)
- Pembangunan dan implementasi autogate system pada terminal internasional yang terintegrasi dengan sistem pengguna jasa
- Pengembangan dan implementasi aplikasi fixed asset
- Pengembangan aplikasi SIMPER & SIMKEU khususnya terkait payroll pegawai.
- Pengembangan dan implementasi aplikasi TPS Online sebagai portal pelaporan terkait dokumen kepabeanan
- Implementation of a digital surveillance system to improve control and monitoring at the Terminal
- mplementation of cost accounting system applications (cost accounting)
- Development and implementation of an autogate system at international terminals that is integrated with service user systems
- Development and implementation of fixed asset applications
- Development of the SIMPER & SIMKEU application, especially regarding employee payroll
- Development and implementation of the TPS Online application as a reporting portal related to customs documents

2021

Synergy & Improvement

- Revitalisasi backbone infrastruktur IT (fiber optic & wireless access point) berbasis redundancy guna meningkatkan availability layanan
- Pemenuhan terhadap perangkat end-user (handheld, HT, Radio ng) guna menjamin kelancaran kegiatan operasional
- Implementasi aplikasi TOS Domestik yang berbasis planning control dan terintegrasi dengan sistem ERP
- Peningkatan aplikasi TOS internasional yang terintegrasi dengan Portal Agen Pemerintahan (NLE, CEISA dan INSW)
- Pengembangan dan implementasi aplikasi layanan keuangan (e-invoice, autocollection & AR Netting)
- Revitalization of IT infrastructure backbone (fiber optic & wireless access points) based on redundancy to increase service availability
- Fulfillment of end-user devices (handheld, HT, Radio rig) to ensure smooth operational activities
- Implementation of a Domestic TOS application based on planning control and integrated with the ERP system
- Improved international TOS applications that are integrated with the Government Agent Portal (NLE, CEISA and INSW)
- Development and implementation of financial service applications (e-invoice, autocollection & AR Netting)

2022

Growth Through Integration

- Re-engineering terminal operating system (TOS) untuk Terminal Interasional berbasis trend teknologi terkini (cloud-based computing)
- Pengembangan dan implementasi yang berorientasi kepada customer experience (Single Customer Portal & Customer Relationship Management System)
- Peningkatan keamanan teknologi informasi terhadap kerentanan Cyber-Attack
- Pengembangan dan implementasi Executive Information System Dashboard
- Pengembangan teknologi RFID untuk optimalisasi kegiatan operasional di Terminal
- Re-engineering Terminal Operating System (TOS) for International Terminals based on the latest technology trends (cloud-based computing)
- Development and implementation oriented towards customer experience (Single Customer Portal & Customer Relationship Management System)
- Increasing information technology security against Cyber-Attack vulnerabilities
- Development and implementation of the Executive Information System Dashboard
- Development of RFID technology to optimize operational activities at the Terminal

2023

Value Chain Expansion

- Pengembangan aplikasi Terminal Operating System Domestik untuk seluruh wilayah satelit (cabang Perusahaan)
- Re-engineering billing engine kebutuhan terminal operating system
- Implementasi smart digital surveillance system untuk otomasi monitoring dan control kegiatan di Terminal
- Adopsi latest trend dan teknologi (Cloud computing, IoT dan mobile devices)
- Development of Domestic Terminal Operating System applications for all satellite areas (company branches)
- Re-engineering billing engine terminal operating system requirements
- Implementation of a smart digital surveillance system to automate monitoring and control of activities at the Terminal
- Adoption of the latest trends and technology (Cloud computing, IoT and mobile devices)

2024

Value Chain Integration

- Implementasi single TOS dan single billing layanan car terminal
- Integrasi dan otomasi layanan digital untuk seluruh proses bisnis di Car Terminal berbasis "single truth of data"
- Layanan teknologi informasi yang terintegrasi kepada seluruh stakeholders (car maker sampai dengan government agency)
- Implementation of single TOS and single billing for car terminal services
- Integration and automation of digital services for all business processes at the Car Terminal based on "single truth of data"
- Integrated information technology services to all stakeholders (car makers to government agencies)

Pengembangan Terminal Operating System Terminal Kendaraan IKT
Development of the IKT Vehicle Terminal Operating System

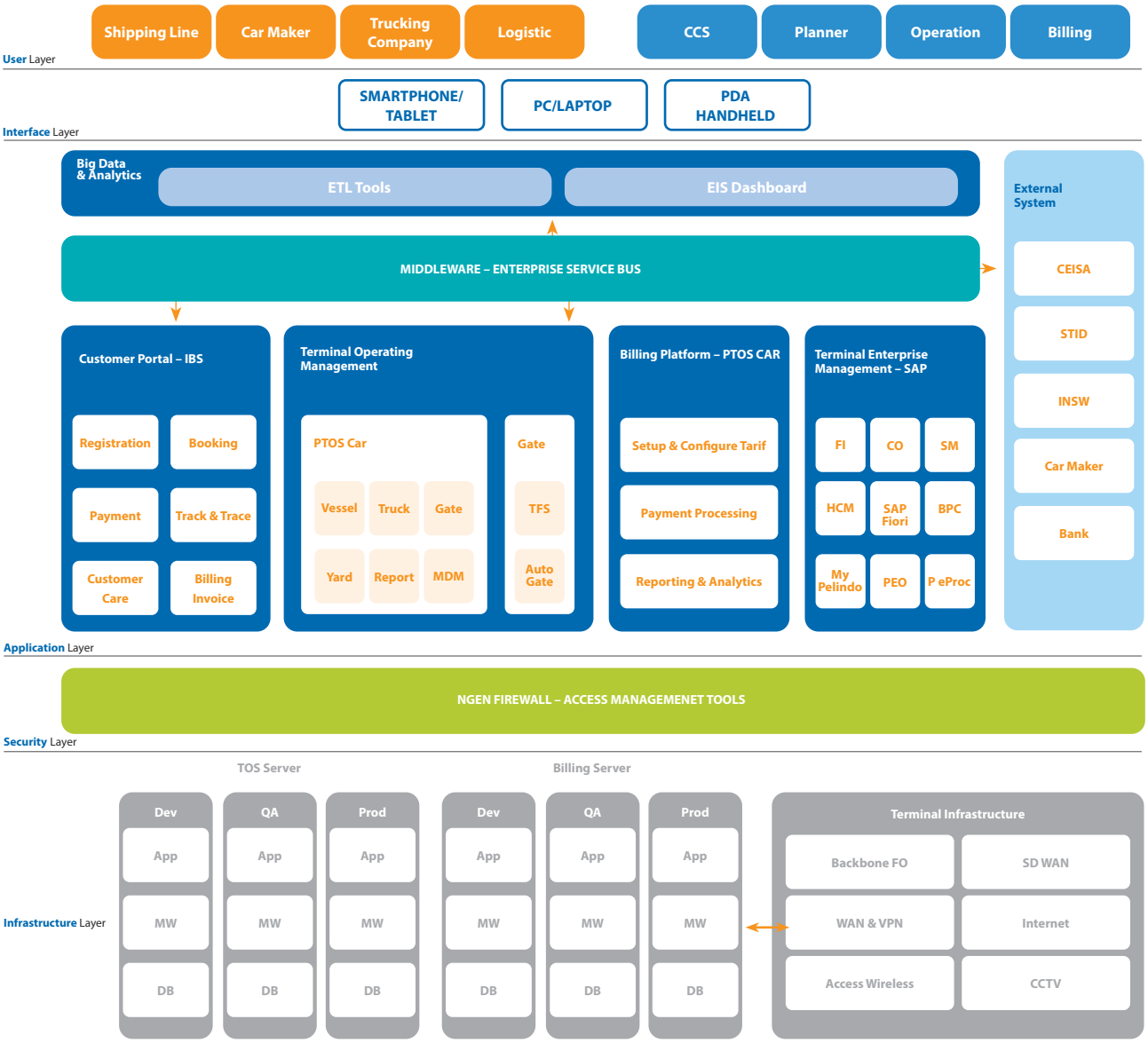

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Enterprise Architecture adalah *blueprint* yang bersifat konspetual dan mendefiniskan struktur dan operasi sebuah organisasi pada suatu waktu. Tujuan dari sebuah Enterprise Architecture adalah untuk menentukan bagaimana sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya saat ini dan di masa datang dengan cara yang paling efektif. Kebutuhan akan Enterprise Architecture didorong oleh perkembangan teknologi dan integrasi serta kolaborasi yang main meningkat, dan juga perubahan yang akin cepat dan kebutuhan untuk mengelola risiko.

INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE

Enterprise Architecture is a blueprint that is conceptual and defines the structure and operations of an organization at a time. The goal of an Enterprise Architecture is to determine how an organization can achieve its current and future goals in the most effective way. The need for Enterprise Architecture is driven by technological developments and increasing integration and collaboration, as well as increasingly rapid change and the need to manage risk.

Terdapat 4 (empat) domain di dalam enterprise architecture, antara lain:

There are 4 (four) domains in enterprise architecture, including:

Arsitektur bisnis | Business architecture

- **Konsep blueprint yang menggambarkan kapabilitas bisnis**
- **Memberikan pandangan terhadap seluruh segmen bisnis, fungsi-gunsi utama, dan ringkasan aktifitas yang dilakukan oleh masing-masing fungsi**
- Blueprint concept that describes business capabilities
- Provides a view of all business segments, main functions, and a summary of activities carried out by each function

Arsitektur Aplikasi | Application Architecture

- **Konsep blueprint yang menggambarkan paltform aplikasi TI**
- **Memberikan pandangan terhadap kelompok aplikasi yang terdapat di dalam organisasi, selaras dengan blueprint bisnis beserta**
- Concept blueprint that describes the TI application platform
- Provides a view of the application groups within the organization, in line with the business blueprint and information

Arsitektur Infrastruktur | Infrastructure Architecture

- **Konsep blueprint yang menggambarkan infrastruktur dan perangkat keras TI**
- **Memberikan pandangan terhadap platform infrastruktur yang mendukung aplikasi digunakan dalam organisasi Infrastructure Architecturea**
- Concept blueprint that describes IT infrastructure and hardware
- Provides insight into the infrastructure platforms that support applications used within the organizationProvides a view of the application groups within the organization, in line with the business blueprint and information

Arsitektur Data | Data Architecture

- **Konsep blueprint yang menggambarkan alur data dan informasi**
- **Memberikan pandangan terhadap objek informasi utama yang tersirkulasi dalam organisasi**
- Blueprint concept that describes the flow of data and information
- Provides a view of the main information objects circulating within the organization

Enterprise Architecture juga mendeskripsikan peta kebutuhan bisnis dan dukungan teknologi informasi terhadap bisnis untuk domain aplikasi, infrastruktur, dan data. Dengan adanya Enterprise Architecture juga dapat menggambarkan gap antara kebutuhan bisnis dan dukungan teknologi informasi guna memudahkan perencanaan pengembangan teknologi informasi.

Enterprise Architecture also describes a map of business needs and information technology support for the business for application, infrastructure and data domains. With Enterprise Architecture, it can also illustrate the gap between business needs and information technology support to facilitate information technology development planning.

Berikut ini merupakan gambaran *high-level Enterprise Architecture* IPCC:

The following is an overview of the IPCC high-level Enterprise Architecture:

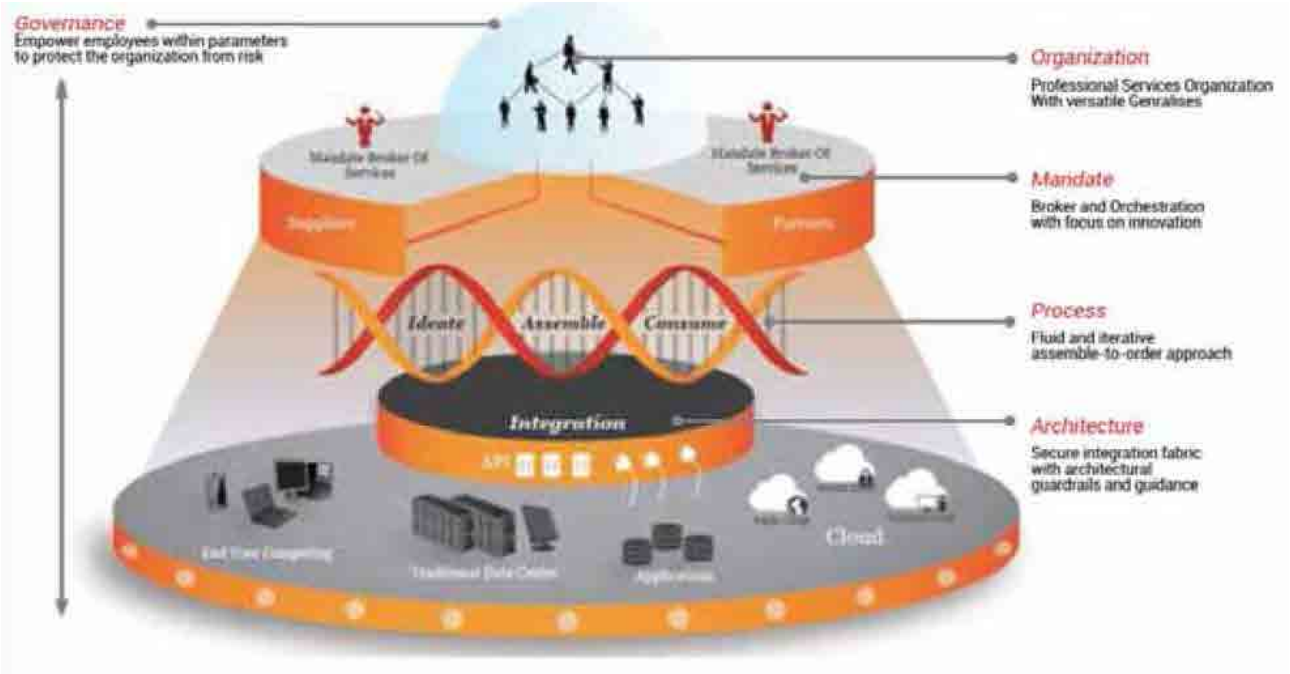

IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI IPCC

IPCC mengadopsi 3 (tiga) solusi teknologi informasi yang ditujukan untuk meningkatkan efektifitas serta efisiensi proses, yaitu:

1. *Terminal Operation Management;*
2. *Terminal Enterprise Management*; dan
3. Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi.

Hingga periode pelaporan, IPCC terus melakukan pengembangan dan implementasi terknologi informasi, khususnya untuk mendukung ekspansi bisnis perusahaan yang bertujuan untuk engintegrasikan seuruh layanan terminal guna memberikan kemudahan bagi seluruhh pelanggan IPCC.

Terminal Operation Management

Terminal Operation Management (TOM) merupakan *cluster* aplikasi yang berfungsi untuk mendukung layanan inti (*core business*) Perseroan. Aplikasi yang terdapat pada *cluster* ini berperan untuk meningkatkan kegiatan operasi melalui pencatatan transaksi terminal secara real time, integrasi pertukaran data dengan system aplikasi *government* (CEISA Beacukai) dan *car maker* untuk mempercepat kegiatan di Terminal. Adapun aplikasi-aplikasi apda cluster ini, antara lain:

IMPLEMENTATION OF IPCC INFORMATION TECHNOLOGY

The IPCC adopted 3 (three) information technology solutions aimed at increasing process effectiveness and efficiency, namely:

1. Terminal Operation Management;
2. Terminal Enterprise Management; And
3. Information Technology Infrastructure and Security.

Until the reporting period, IPCC continued to develop and implement information technology, especially to support the company's business expansion which aims to integrate all terminal services to provide convenience for all IPCC customers.

Terminal Operations Management

Terminal Operation Management (TOM) is an application cluster that functions to support the Company's core services (core business). The applications in this cluster play a role in improving operational activities by recording terminal transactions in real time, integrating data exchange with government application systems (CEISA Customs) and car makers to speed up activities at the Terminal. The applications in this cluster include:

Car Terminal Operating System (CARTOS)

CARTOS merupakan asplikasi yang berfungsi untuk mencatat seluruh kegiatan operasional di Terminal secara real-time. Mulai dari proses announcement cargo sampai dengan cargo tersebut keluar terminal dicatatkan dengan menggunakan perangkat handheld dengan memindai informasi cargo atau vehicle identification number (VIN) dalam bentuk barcode. Aplikasi ini mengelaborasi seluruh kegiatan terminal mulai dari kegiatan truck, terminal dan kapal menjadi rangkaian proses yang terintegrasi sehingga mengoptimalkan perencanaan, pengaturan dan pemantauan kegiatan di terminal. Aplikasi CARTOS juga telah terintegrasi dengan aplikasi milik beacukai (CEISA) dan aplikasi milik *car maker* guna mengotomasi proses clearance document. Selain itu, dengan pencatatan secara *real-time* pemilik cargo dapat mengetahui pergerakan cargo yang ada di dalam terminal dan dapat dikirimkan ke sistem milik pemilik barang dalam hal ini carmaker melalui intgrasi aplikasi. Hasil akhir dari aplikasi ini adalah reporting kegiatan untuk setiap kapalnya (realisasi bongkar-muat) yang selanjutnya diintegrasikan dengan sistem *billing* untuk penerbitan *invoice.*

Secara umum, sistem aplikasi ini memiliki tiga fungsi, yaitu:

1. Mengelola arus kargo kendaraan di terminal dengan rencana penempatan yang tepat sehingga diperoleh efisiensi proses bongkar muat;
2. Membuat jadwal rencana loading/unloading dan yard optimizing dengan mengacu kepada informasi yang dikirimkan oleh shipping companies yang memuat posisi kargo pada kapal yang akan berlabuh;
3. Mengolah informasi pengiriman kargo menuju terminal yang dikirimkan oleh transportation companies.

Billing CARTOS

Billing CARTOS adalahaplikasi billing berbasis web, Billing CARTOS berfungsi untuk membuat Pranota dan Nota berdasarkan RBM (Realisasi Bongkar Muat) yang telah dibuat sebelumnya, yang dimana data RBM tersebut dibuat secara otomatis berdasarkan sistem Terminal Operating System milik IPCC yaitu CARTOS. Pranota dan Nota akan terbuat secara otomatis pada Billing CARTOS Ketika CARTOS mengirimkan data RBM melalui enterprise service bus untuk dibuatkan Pranota dan Nota secara Otomatis, lalu akan dikirimkan ke dalam Billing CAR TOS untuk di validasi Pranota dan Nota yang telah dibuat oleh petugas. Selanjutnya Nota ini akan dikirimkan ke aplikasi ERP Finance untuk dilakukan proses pencatatan oleh Divisi Keuangan.

Car Terminal Operating System (CARTOS)

CARTOS is an application that functions to record all operational activities in the Terminal in real-time. Starting from the cargo announcement process until the cargo leaves the terminal, it is recorded using a handheld device by scanning the cargo information or vehicle identification number (VIN) in the form of a barcode. This application elaborates all terminal activities starting from truck, terminal and ship activities into a series of integrated processes so as to optimize planning, regulation and monitoring of activities at the terminal. The CARTOS application has also been integrated with customs applications (CEISA) and car maker applications to automate the document clearance process. Apart from that, by real-time recording the cargo owner can find out the movement of cargo in the terminal and it can be sent to the goods owner's system, in this case the carmaker, through application integration. The final result of this application is activity reporting for each ship (loading and unloading realization) which is then integrated with the billing system for issuing invoices.

In general, this application system has three functions, namely:

1. Manage the flow of vehicle cargo at the terminal with appropriate placement plans to obtain efficiency in the loading and unloading process;
2. Make a loading/unloading plan and yard optimization schedule by referring to the information sent by shipping companies which contains the position of cargo on the ship that will dock;
3. Process information on cargo delivery to the terminal sent by transportation companies.

Billing CARTOS

CARTOS Billing is a web-based billing application, CARTOS Billing functions to create Notes and Notes based on previously created RBM (Loading and Unloading Realization), where the RBM data is created automatically based on the IPCC's Terminal Operating System, namely CARTOS. Notes and Notes will be created automatically in CARTOS Billing. When CARTOS sends RBM data via the enterprise service bus to automatically create Notes and Notes, then it will be sent to CAR TOS Billing for validation of the Notes and Notes that have been made by the officer. Next, this note will be sent to the ERP Finance application for the recording process by the Finance Division.

Automatic Gate

1. **Terminal Internasional**
   IPCC mengembangkan automatic gate di Terminal Internasional sebagai upaya untuk mempermudah kontrol akses masuk dan keluar angkutan tanpa bantuan operator gate yang terintegrasi dengan Terminal Operating System (TOS) Terminal Internasional IPCC. Fungsi Automatic Gate adalah melakukan verifikasi data perencanaan truck dan cargo apakah data sudah sesuai dengan perencanaan atau belum, serta mela kukan pengecekan dokumen kepabea nan untuk setiap cargo yang diangkut oleh sarana pengangkut untuk memastikan bahwa setiap cargo yang akan masuk ke IPCC sudah memiliki dokumen kepabeanan. Selain itu, proses tersebut dapat meningkatkan keama nan dan keselamatan, produktivitas semakin baik, pelayanan operasional menjadi efisien, serta mengurangi fraud/kecurangan dari operator.

2. **Terminal Domestik**
   Pada bulan September 2022 IPCC resmi mengimplementasikan automatic gate di Terminal Domestik sebagai upaya untuk mempermudah kontrol akses masuk dan keluar angkutan tanpa bantuanoperator gate. Fungsi Automatic Gate di terminal domestik untuk memverifikasi data perencanaan truk dan kargo. Selain itu, proses tersebut dapat meningkatkan keamanan, keselamatan dan peningkatan produktivitas, efisiensi proses pelayanan operasional, serta mengurangi *fraud*/kecurangan dari operator.

E-Ticket System

Sistem E-ticket me rupakan layanan digital PCC untuk permintaan pelayanan jasa di Terminal. Sistem ini akan memberikan elektronik tiket/pass kepada pengguna jasa yang ingin menggunakan layanan di Terminal Internasional IPCC E-Ticket berisikan informasi mengenai sarana pengangkut, list kargo, dan dokumen kepabeanan.

E-Ticket akan di validasi dan diverifikasi oleh Terminal Operating System melalui perantara system auto gate untuk memastikan kebenaran data yang dikirim. Pada E-ticket juga terdapat proses validasi data dokumen kepabeanan lewat integrasi ke sistem milik Bea Cukai (CEISA) secara Online, Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen terse but sesuai atau tidak.

Automatic Gate

1. **International Terminal**
   IPCC developed automatic gates at the International Terminal as an effort to make it easier to control entry and exit access for transport without the assistance of a gate operator which is integrated with the IPCC International Terminal Terminal Operating System (TOS). The function of the Automatic Gate is to verify truck and cargo planning data whether the data is in accordance with the planning or not, as well as checking customs documents for each cargo transported by the transport facility to ensure that each cargo that will enter the IPCC already has customs documents. Apart from that, this process can improve security and safety, improve productivity, make operational services efficient, and reduce fraud from operators.

2. **Domestic Terminal**
   In September 2022, the IPCC officially implemented automatic gates at Domestic Terminals as an effort to make it easier to control access for incoming and outgoing transport without the assistance of gate operators. Automatic Gate function in domestic terminals to verify truck and cargo planning data. Apart from that, this process can improve security, safety and increase productivity, efficiency of operational service processes, and reduce fraud from operators.

E-Ticket System

The E-ticket system is a PCC digital service for requesting services at the Terminal. This system will provide electronic tickets/passes to service users who wish to use services at the IPCC International Terminal. E-Ticket contains information regarding means of transport, cargo list and customs documents.

The E-Ticket will be validated and verified by the Terminal Operating System through an intermediary auto gate system to ensure the correctness of the data sent. In E-tickets there is also a customs document data validation process through integration with the Customs and Excise system (CEISA) online. This process aims to ensure that the documents are appropriate or not.

TPS *Online*

TPS Online adalah sistem pertukaran data elektronik antara tempat penimbunan sementara dengan Bea Cukai. Sistem ini diimplernentasikan guna memenuhi dan mematuhi kewajiban memiliki aplikasi pengelolaan barang di tempat penimbunan sementara, dan menyediakan media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan aplikasi kepabeanan Kantor Pabean.

Fungsi TPS Online adalah untuk melaporkan kegiatandi TPS dan menerima dokumen izin pemasukan dan pengeluaran barang secara Online. Penerapan sistem ini menjadikan IPCC sebagai terminal berbasis sistern informasi.

Car Terminal Operating System Domestic (CARDOM)

CARDOM adalah Car Terminal Operating System Domestic yang dib-lat berdasarkan SOP yang ada pada Ter minal Domestik IPCC yang berfungsi untuk menunjang dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dan proses penyajian data/informasi di back-Office Perseroan. Dukungan teknologi informasi dalam proses bisnis tersebut juga diharapkan menjadi sarana untuk membantu Manajemen IPCC dalam mengelola dan meminimalisir risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan operasional.

Secara umum sistem aplikasi ini memiliki tiga fungsi yaitu:

1. Mengelola arus kargo kendaraan di terminal dengan rencana penempatan ya ng tepat sehingga diperoleh efisiensi proses bongkar muat;
2. Membuat jadwal rencana *loading/unloading* dan *yard optimizing* dengan mengacu kepada informasi yang dikirimkan oleh *shipping companies* yang memuat posisi kargo pada kapal yang akan berlabuh;
3. Mengolah informasi pengiriman kargo menuju terminal yang dikirimkan oleh *transportation companies.*

Billing CARDOM

Billing CARDOM merupakan aplikasi billing berbasis web, Billing CARDOM berfungsi untuk membuat Pranota dan Nota berdasarkan RBM (Realisasi Bongkar Muat) yang telah dibuat sebelumnya, yang dimana data RBM tersebut dibuat secara otomatis berdasarkan Terminal Operating System milik IPCC yaitu TOS CARDOM. Pranota dan Nota akan terbuat secara otomatis pada Billing CARDOM Ketika

Online TPS

TPS Online is an electronic data exchange system between temporary storage places and Customs. This system was implemented to fulfill and comply with the obligation to have a goods management application in temporary storage areas, and provide electronic data communication media that is connected to the Customs Office customs application.

The function of TPS Online is to report activities at the TPS and receive documents permitting the entry and release of goods online. The implementation of this system makes the IPCC an information system-based terminal.

Car Terminal Operating System Domestic (CARDOM)

CARDOM is a Domestic Car Terminal Operating System which is developed based on the SOP in the IPCC Domestic Terminal which functions to support and provide convenience for customers and the process of presenting data/information in the Company's back-office. Information technology support in business processes is also expected to be a means to assist IPCC Management in managing and minimizing risks that may arise in operational activities.

In general, this application system has three functions, namely:

1. Manage the flow of vehicle cargo at the terminal with appropriate placement plans to obtain efficiency in the loading and unloading process;
2. Make a loading/unloading plan and yard optimization schedule by referring to the information sent by shipping companies which contains the position of cargo on the ship that will dock;
3. Process information on cargo delivery to the terminal sent by transportation companies.

CARDOM Billing

Billing CARDOM is a web-based billing application, Billing CARDOM functions to create notes and notes based on the RBM (Realization of Loading and Unloading) that has been previously created, where the RBM data is created automatically based on the IPCC's Terminal Operating System, namely TOS CARDOM. Notes and Notes will be created automatically in the Billing CARDOM. When TOS CARDOM sends RBM data via the enterprise service bus

TOS CARDOM mengirimkan data RBM melalui enterprise service bus untuk dibuatkan Pranota dan Nota secara Otomatis, lalu akandikirmkan kedalam Billing CAR DOM untuk di validasi Pranota dan Nota yang telah dibuat oleh petugas. Selanjutnya Nota ini akan dikirimkan ke aplikasi ERP Finance untuk dilakukan proses pencatatan oleh Divisi Keuangan.

Aplikasi RFID

Sejak tahun 2021, Perseroan bersama PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan *soft launching* penggunaan Aplikasi RFID (Radio Frequency Identification (RFID) pada unit yang dibawa oleh TMMIN, yaitu Toyota.

Penggunaan RFID ini merupakan bagiandari perjalanan digitalisasi Perseroan yang di awali dengan implementasi TOS Internasional, Billing Engine, dan ERP di tahun 2015, dilanjutkan dengan TOS Domestik di tahun 2018 dan berlanjut dengan pengembangan sistem CEISA, Auto N PE, dan *Autogate Management System Dashboard* di tahun 2021.

Penggunaan RFID diharapkan dapat mendukung terciptanya *car logistic ecosystem* yang nanti dapat memberikan nilai tambah Perseroan, tapi juga kepada para pelanggan.

Dashboard

1. Dashboard Operasional
   Dashboard Operasional merupakan aplikasi berbasis web untuk mendukung kegia tan operasional IPCC yang berfungsi sebagai dashboard atau monitoring tools, agar data hasil transaksi kegiatan operasional dapat ditampilkan sebagai informasi dalam bentuk Sisi trafik produksi maupun kinerja.

   Dashboard ini juga diharapkan untuk membantu management dalam mengambil keputusan bisnis.

2. Dashboard Strategi dan Pengembangan Bisnis
   Dashboard Strategi dan Pengembangan Bisnis merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai dashboard atau monitoring tools, untuk menyajikan data operasional dan keuangan secara dinamis dan interaktif agar data hasil pendapatan dan persebaran cargo yang pernah melakukan kegiatan di IPCC dapat ditampilkan sebagai informasi dalam bentuk grafik sehingga dapatdigunakandalam pengambilan keputusan komersial dan pengembangan bisnis sehingga perusahaan dapat cepat dan tepat bereaksi memenuhi kebutuhan pasar dan perkembangan industri.

to automatically create Notes and Notes, then they will be sent to the Billing CAR DOM for validation of the Notes and Notes that have been made by the officer. Next, this note will be sent to the ERP Finance application for the recording process by the Finance Division.

RFID Application

Since 2021, the Company together with PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) have carried out a soft launch of the use of the RFID (Radio Frequency Identification (RFID) Application on units brought by TMMIN, namely Toyota.

The use of RFID is part of the Company's digitalization journey which began with the implementation of International TOS, Billing Engine and ERP in 2015, continued with Domestic TOS in 2018 and continued with the development of the CEISA, Auto N PE and Autogate Management System Dashboard systems in 2018. 2021.

The use of RFID is expected to support the creation of a car logistics ecosystem which will later provide added value to the Company, but also to customers.

Dashboards

1. Operational Dashboard
   The Operational Dashboard is a web-based application to support IPCC operational activities which functions as a dashboard or monitoring tool, so that data from operational activity transactions can be displayed as information in the form of production traffic and performance.

   This dashboard is also expected to help management in making business decisions.

2. Strategy and Business Development Dashboard
   The Strategy and Business Development Dashboard is a web-based application that functions as a dashboard or monitoring tool, to present operational and financial data dynamically and interactively so that data on income results and cargo distribution that have carried out activities at the IPCC can be displayed as information in graphical form so that it can be used in making decisions. commercial decisions and business development so that companies can quickly and precisely react to meet market needs and industrial developments.

Terminal Enterprise Management

Terminal Enterprise Management (TEM) merupakan *cluster* aplikasi yang berfungsi mendukung kegiatan back-office atau pendukung layanan inti (core business) Perusahaan. Aplikasi ini terutama berfungsi sebagai Enterprise Resource Planning (ERP) untuk bidang keuangan dan SD M dengan tujuan menggantikan proses manual kedalam bentuk digital ataupun mengotomasi proses agar lebih efektif dan efisien. Adapun aplikasi-aplikasi yang terdalam di dalam cluster ini antara lain:

Enterprise Resource Planning (ERP) Finance & HC

Enterprise Resource Planning (ERP) Finance & HC merupakan sebuah Aplikasi ya ng diba ngun da n diimplementasikan dengan tujuan mengoptimalkan kegiatan transaksi dan manajemen keuangan serta pengelolaan sumber daya manusia. Sistem ini dapat meningkatkan akurasi informasi keuangan untuk seluruh transaksi di perusahaan. Adapun fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem ini antara lain General Ledger, Account Payable & Receivable, asset management, collection management, *employe management*, dan *revenue management*. Sistem E RP juga dapat mempermudah proses pengendalian dan pemantauan proses bisnis, sehingga proses bisnis dapat berjalan lebih sederhana dan responsif.

Fixed Asset

Fixed Asset merupakan sistem yang digunakan untuk mengoptimalisasi manajemen aset tetap sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam perhitungan, pencatatan, manajemen,jadwal pemeliharaan dan asuransi aset.

Project Costing

Project Costing Manajement atau biasa disebutdengan manajemen biaya merupakan sebua h metode yang menggunakan teknologi untuk mengukur biaya dan produktivitas melalui siklus hidup penuh proyek tingkat Perseroan. Project Cost Manajemen meliputi beberapa fungsi khusus manajemen proyek yang mencakup kontrol pekerjaan memperkirakan, pengumpulan data lapangan, penjadwalan, akuntansi dan desain.

Budget Control

Budget Control merupakan sistem yang digunakan untuk mengoptimalisasi modul Oracle Financial dan Oracle HRMS dengan melakukan Improvement Sistem Budget Control, Uang Muka, SPPD, Insentif dan Update PPh 21. Dengan menggunakan sistem budget control ini diharapakan IPCC dapat:

Enterprise Management Terminal

Terminal Enterprise Management (TEM) is an application cluster that functions to support back-office activities or support the Company's core services. This application primarily functions as Enterprise Resource Planning (ERP) for the financial and SD M sectors with the aim of replacing manual processes into digital form or automating processes to make them more effective and efficient. The deepest applications in this cluster include:

Enterprise Resource Planning (ERP) Finance & HC

Enterprise Resource Planning (ERP) Finance & HC is an application that was built and implemented with the aim of optimizing transaction activities and financial management as well as Human Capital management. This system can increase the accuracy of financial information for all transactions in the company. The functions contained in this system include General Ledger, Accounts Payable & Receivable, asset management, collection management, employee management, and revenue management. The E RP system can also simplify the process of controlling and monitoring business processes, so that business processes can run more simply and responsively.

Fixed Assets

Fixed Asset is a system used to optimize fixed asset management so that it can increase efficiency and effectiveness in calculations, recording, management, maintenance schedules and asset insurance.

Project Costing

Project Costing Management or commonly referred to as cost management is a method that uses technology to measure costs and productivity through the full life cycle of company level projects. Project Cost Management includes several specific project management functions that include estimating work control, field data collection, scheduling, accounting and design.

Budget Control

Budget Control is a system used to optimize the Oracle Financial and Oracle HRMS modules by improving the Budget Control System, Advance Payments, SPPD, Incentives and PPh 21 Updates. By using this budget control system, it is hoped that the IPCC can:

1. Melakukan proses optimalisasi modul berupa konfigurasi dan kustomisasi modul Budget Control System terintegrasi dengan Purchasing dan *General Ledger*;
2. Melakukan proses optimalisasi berupa konfigurasi dan kustomisasi modul dan fungsi Uang Muka dan SPPD;
3. Melakukan proses optimalisasi berupa konfigurasi dan kustomisasi modul Insentif, Payroll BOD, dan Payroll Tax (PPh21).

1. Carry out the module optimization process in the form of configuration and customization of the Budget Control System module integrated with Purchasing and General Ledger;
2. Carry out an optimization process in the form of configuration and customization of Down Payment and SPPD modules and functions;
3. Carry out an optimization process in the form of configuration and customization of the Incentive, Payroll BOD and Payroll Tax (PPh21) modules.

Sistem Akuntansi Biaya

Sistem Akuntasi Biaya merupa kan salah satu cabang akuntansi yang menyajikan data mengenai penentuan Harga pokok (Cost) atas suatu produk/jasa atau dijual baik itu untuk pemenuhan pesanan dari para pemesan ataupun untuk dijadikan persediaan barang dagang yang nantinya dijual. Dengan adanya sistem akuntasi biaya ini, diharapakan IPCC dapat:

1. Melakukan penyusunan dan implementasi SOP Akuntasi Biaya
2. Melakukan trasnformasijurnal akuntasidari ledger keuangan ke SIM AKBI dengan dukungandata dan atau sistem operasional
3. Pembuatan laporan dan dashboard akuntasi biaya

E-Office

E-Office merupakan a plikasi yang mentransformasikan seluruh proses korespondensi yang bersifat kedinasan, dari yang asalnya berbasis kertas menjadi berbasis elektronik. Korespondensi yang bersifat kedinasan ini mencakup Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Undangan, Memo dan Disposisi. Dengan E-Office, proses mulai pembuatan draft, persetujuan berjenjang, penomoran hingga distribusi dilakukan secara elektronik.

Cost Accounting System

The Cost Accounting System is a branch of accounting that presents data regarding the determination of the cost price (Cost) for a product/service or sale, either to fulfill orders from customers or to be used as inventory for merchandise that will later be sold. With this cost accounting system, it is hoped that the IPCC can:

1. Prepare and implement Cost Accounting SOPs
2. Transforming accounting journals from the financial ledger to SIM AKBI with the support of data and/or operational systems
3. Creation of cost accounting reports and dashboards

E-Office

E-Office is an application that transforms the entire official correspondence process, from being paper-based to electronic-based. This official correspondence includes Incoming Letters, Outgoing Letters, Official Notes, Invitations, Memos and Dispositions. With E-Office, the process from drafting, tiered approval, numbering to distribution is done electronically.

E-Invoice

E-Invoice adalah aplikasi yang mendukung pengiriman nota dan lampiran pendukung nota dalam bentuk digital guna meningkatkan kecepatan proses penagihandan sebagai jembatan antara aplikasi *billing* dan ERP dimana aplikasi tersebut juga digunakan untuk mengirimkan invoice kepada pengguna jasa dalam bentuk elektronik.

Portal Customer Care Station (CCS)

Portal CCS adalah aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana Customer Portal. Portal CCS memiliki fungsi yang dapat mengakomodir kebutuhan pelanggan, mulai dari pendaftaran pelanggan, pelaporan keluhan pelanggan, hingga booking layanan kegiatan di IPCC. Portal CCS dapat diakses secara online menggunakan mobile phone atau komputer sehingga memudahkan pelanggan untuk mengakses layanan yang ada IPCC.

INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI

Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi menggunakan Framework NIST (National Institute of Standards and Technology).

E-Invoice

E-Invoice is an application that supports sending notes and attachments supporting notes in digital form to increase the speed of the billing process and as a bridge between billing applications and ERP where the application is also used to send invoices to service users in electronic form.

Customer Care Station (CCS) Portal

CCS Portal is a web-based application that is used as a Customer Portal facility. The CCS portal has functions that can accommodate customer needs, starting from customer registration, reporting customer complaints, to booking activity services at the IPCC. The CCS portal can be accessed online using a mobile phone or computer, making it easier for customers to access IPCC services.

INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE AND SECURITY

Information Technology Infrastructure and Security uses the NIST (National Institute of Standards and Technology) Framework.

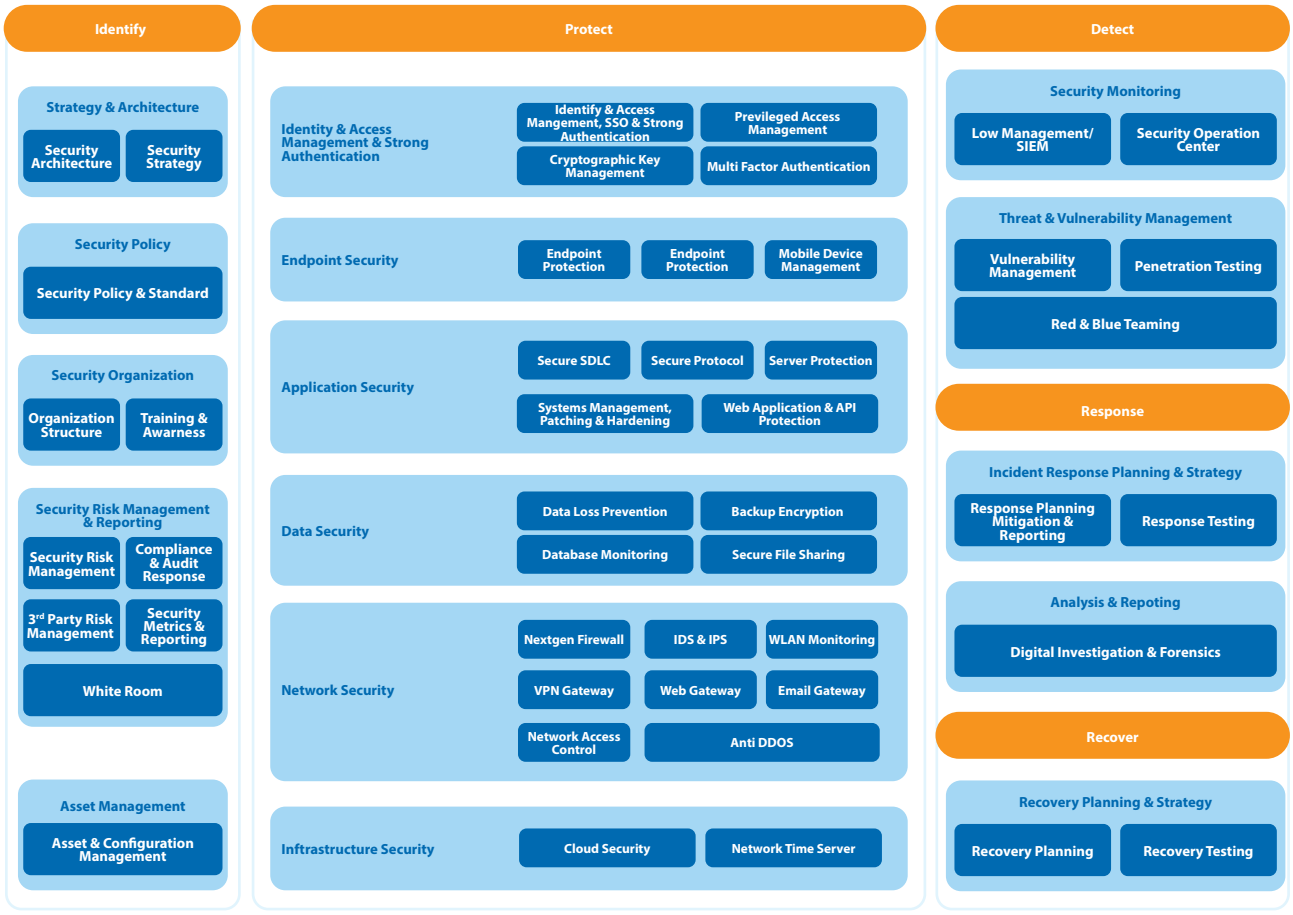

Architecture

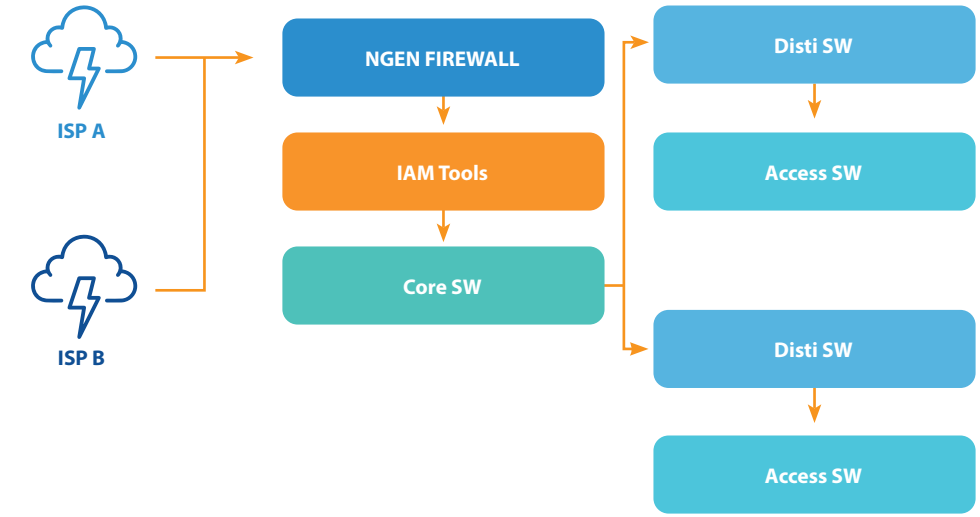

INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah melakukan investasi untuk pengembangan teknologi informasi, TI, antara lain sebagai berikut:

INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT

Throughout 2023, the Company has invested in the development of information technology, TI, including the following:

No	**Investasi Teknologi Informasi** Information Technology Investment	**Biaya** Cost **(Rp)**
1	Pengadaan dan Installasi Penambahan Perangkat Automated Gate di Terminal Domestik Tanjung Priok Procurement and Installation of Additional Automated Gate Devices at the Tanjung Priok Domestic Terminal	839,037,649
Total		**839,037,649**

REALISASI PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk tahun 2023, Perseroan telah merencakan pengembangan sistem informasi yang dan sesuai dengan fase value chain expansion pada corporate roadmap adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan cctv digital *surveillance system* guna mendukung kebutuhan pengamanan terminal;
2. Pengembangan dan implementasi aplikasi *e-audit* sebagai program digitalisasi kegiatan internal audit di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
3. Pengembangan dan implementasi Aplikasi SIM Risk;
4. Pengembangan sistem *customer portal* untuk Terminal Domestik;
5. Enhancement sistem TOS dan Billing platform;
6. Transformasi digital melalui implementasi TOS CARDOM di terminal satelit;
7. Integrase laporan keuangan untuk wilayah operasional di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
8. Pengembangandan implementasi aplikasi e-audit yang meliputi sistem e-office (PEO), sistem pengadaan (e-procurement), platform KPI individu dan sistem pengarsipan (e-arsip).

Adapun realisasi rencana program tersebut, sebagai berikut:

1. Implementasi sistem Single ERP-SAP
   Sesuai dengan *roadmap* pengembangan sistem informasi dari Holding Pelindo terkait dengan Implementasi Single ERP, IPCC akan mengimplementasikan aplikasi SAP dengan target pemakaian di tanggal 1 Januari 2024, sehingga diperlukan *roll-out* implementasi sistem ERP-SAP dan pendampingan untuk penyiapan data migrasi dari Sistem ERP Oracle ke dalam sistem SAP HANA di tahun 2023.

   Pekerjaan implementasi Sistem ERP-SAP bertujuan agar dapat bersinergi dan saling mendukung setiap tahapan yang dijalankan oleh Tim Satuan Kerja SAP Holding dan Vendor Pelaksana Implementasi Single ERP Pelindo Holding, sehingga target implementasi sistem ERP SAP pada bulan tersebut dapat dicapai dengan baik.

REALIZATION OF THE INFORMATION TECHNOLOGY PROGRAM

For 2023, the Company has planned information system development that is in accordance with the value chain expansion phase in the corporate roadmap as follows:

1. Increasing CCTV digital surveillance system services to support terminal security needs;
2. Development and implementation of an e-audit application as a digitalization program for internal audit activities within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
3. Development and implementation of the SIM Risk Application;
4. Development of a customer portal system for Domestic Terminals;
5. Enhancement of TOS system and Billing platform;
6. Digital transformation through the implementation of TOS CARDOM in satellite terminals;
7. Integration of financial reports for operational areas at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
8. Development and implementation of e-audit applications which include e-office systems (PEO), procurement systems (e-procurement), individual KPI platforms and archiving systems (e-archive).

The realization of the program plan is as follows:

1. Implementation of the Single ERP-SAP system
   In accordance with the information system development roadmap from Holding Pelindo related to Single ERP Implementation, IPCC will implement the SAP application with a usage target on January 1 2024, so a roll-out of the ERP-SAP system implementation and assistance is required for preparing migration data from the Oracle ERP System to in the SAP HANA system in 2023.

   The ERP-SAP System implementation work aims to be able to synergize and support each other at every stage carried out by the SAP Holding Work Unit Team and the Single ERP Implementation Vendor Pelindo Holding, so that the SAP ERP system implementation target for that month can be achieved well.

Implementasi Sistem - Single ERP & Integrasi Sistem Surrounding
System Implementation – Single ERP & Surrounding System Integration

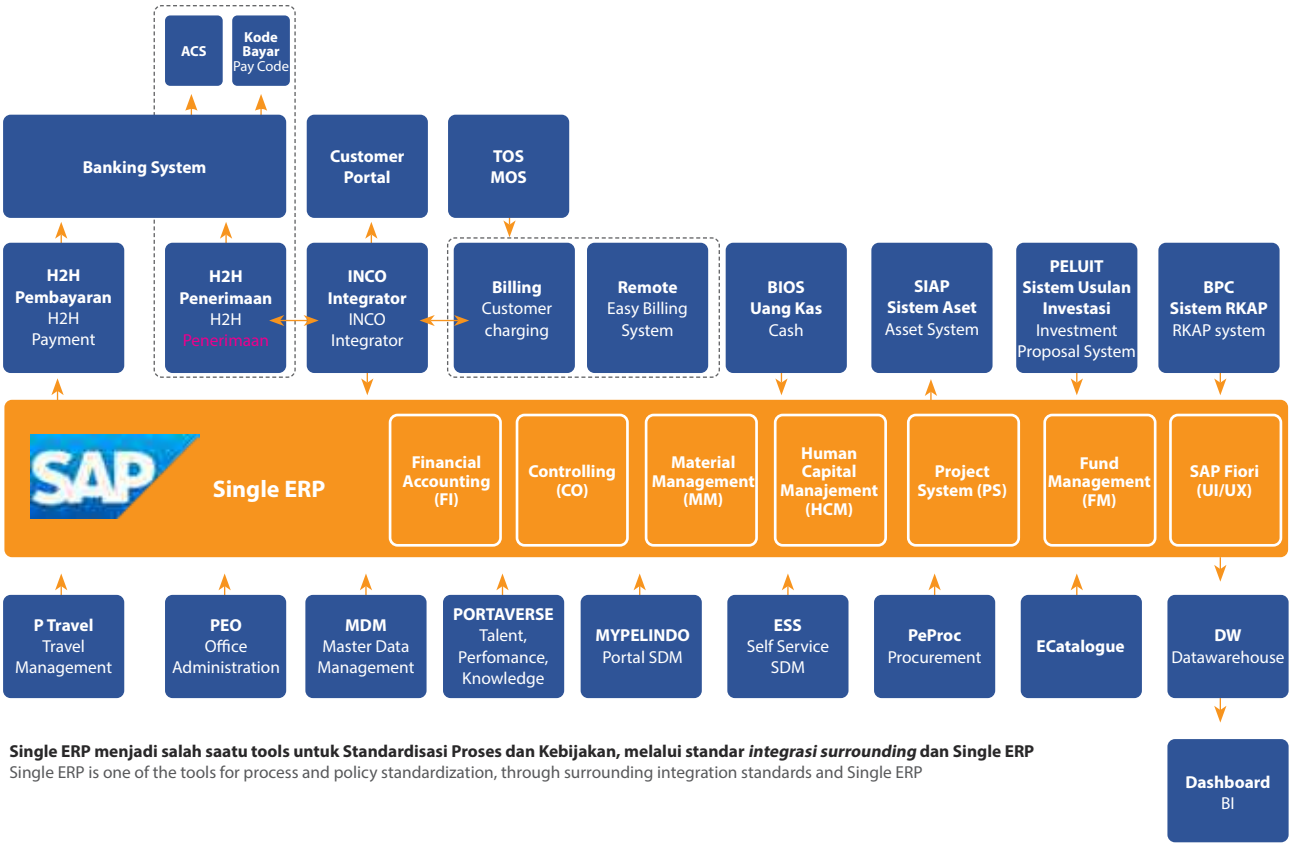

Single ERP menjadi salah saatu tools untuk Standardisasi Proses dan Kebijakan, melalui standar *integrasi surrounding* dan Single ERP
Single ERP is one of the tools for process and policy standardization, through surrounding integration standards and Single ERP

Adapun benefit dari penerapan Single ERP-SAP, antara lain:

- Standarisasi proses pengelolaan keuangan di seluruh Pelindo Group
- Standarisasi pengelolaan layanan Sumber Daya Manuasia
- Standaraisasi proses pengandaan barang dan jasa serta perencanaan investasi.
- Pengurangan berkas/kertas atau dokumen *hardcopy*, *approval* dokumen melalui SAP fiori.

The benefits of implementing Single ERP-SAP include:

- Standardization of financial management processes throughout the Pelindo Group
- Standardization of Human Capital service management
- Standardization of goods and services procurement processes and investment planning.
- Reducing files/paper or hardcopy documents, document approval via SAP Fiori.

2. Pembangunan Ruang Integrated Terminal Terminal Monitoring Sistem (ITMS)
   Dalam rangka meningkatkan dan memberikan standar layanan diseluruh wilayah operasional, perusahaan telah melaksanakan program transformasi dan standarisasi terminal berbasis planning and control dengan didukung oleh pengembangan dan implementasi Teknologi Informasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan garansi kecepatan, transparansi dan kemudahan akses terhadap layanan melalui implementasi *customer portal*, *automated gate*, TOS & Billing, Sistem ERP dan peningkatan

2. Construction of an Integrated Terminal Monitoring System (ITMS) room
   In order to improve and provide service standards in all operational areas, the company has implemented a planning and control-based terminal transformation and standardization program supported by the development and implementation of Information Technology. This is done with the aim of providing guarantees of speed, transparency and ease of access to services through the implementation of customer portals, automated gates, TOS & Billing, ERP systems and infrastructure improvements where one of the

infrastruktur dimana salah satu programnya adalah implementasi CCTV *Digital Surveillance System* yang sangat berperan dalam fungsi *monitoring* dan *controlling* kegiatan di Terminal.

Dengan cakupan wilayah yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, maka dibutuhkan solusi *tools* yang dapat menampilkan seluruh kegiatan di setiap terminal pada Kantor Pusat yang berlokasi di Tanjung Priok. Sehingga dibutuhkan pembangunan *Integrated Terminal Monitoring Station* yang berfungsi sebagai *centralized monitoring* dan *controlling* kegiatan operasional di lingkungan IPCC.

programs is the implementation of a CCTV Digital Surveillance System which plays a very important role in monitoring and monitoring functions. controlling activities at the Terminal.

With area coverage spread across several regions in Indonesia, a tools solution is needed that can display all activities in each terminal at the Head Office located in Tanjung Priok. So it is necessary to build an Integrated Terminal Monitoring Station which functions as centralized monitoring and controlling operational activities within the IPCC.





Layout Kamera CCTV Terminal
Terminal CCTV Camera Layout



Infrastructure

Peningkatan Infrastruktur Terminal
Terminal Infrastructure Improvement

- Pemenuhan fasilitas minimum Terminal kendaraan (penyediaan area buffer apabila dimungkinkan)
- Pemenuhan rambu dan marka
- Peningkatan physical appearance Terminal Kendaraan
- Peningkatan status menjadi Dedicated Terminal
- Fulfillment of minimum vehicle terminal facilities (provision of buffer areas if possible)
- Compliance with signs and markings
- Improved physical appearance of Vehicle Terminals
- Increased status to Dedicated Terminal

Adapun benefit dari Pembangunan Ruang Integrated Terminal Terminal Monitoring Sistem (ITMS), antara lain:

- Tersedia ruang perencanaan dan pengenalian kegiatan kegiatan operasional yang terintegrasi dengan monitoring pengamanan operasional.
- Effisiensi dalam penempatan personil PFSO untuk pengawasan kegiatan operasional terminal.
- Visibilitas pengawasan area operasional oleh petugas operasional maupun petugas PFSO menjadi lebih baik

The benefits of building an Integrated Terminal Monitoring System (ITMS) space include:

- There is space for planning and identifying operational activities that are integrated with operational security monitoring.
- Efficiency in the placement of PFSO personnel to supervise terminal operational activities.
- The visibility of operational area monitoring by operational officers and PFSO officers is better

3. Implementasi Sistem Billing Praya
   Sesuai dengan rencana kerja manajemen (RKM) tahun 2023 dalam rangka program Digitalisasi layanan operasional terminal kendaraan dan untuk kebutuhan sistem billing terminal yang aandal maka akan diimplementasikan sistem Billing yang dapat terintegrasi dengan sistem lainnya terutama sistem keuangan perusahaan maupun secara holding. Sistem Billing merupakan sistem yang dibangun untuk operasional pelayanan kendaraan, alat berat, *general cargo* dan kebutuhan pelaporan keuangan. Diharapkan dengan diimplementasikannya sistem billing Praya dapat mempermudah kegiatan billing terminal, meningkatkan transparansi layanan dan menigkatkan kualitas data transaksi kegiatan terminal

3. Implementation of the Praya Billing System
   In accordance with the management work plan (RKM) for 2023, within the framework of the digitalization program for vehicle terminal operational services and for the need for a reliable terminal billing system, a billing system will be implemented that can be integrated with other systems, especially corporate and holding financial systems. The Billing System is a system built for vehicle service operations, heavy equipment, general cargo and financial reporting needs. It is hoped that the implementation of the Praya billing system can simplify terminal billing activities, increase service transparency and improve the quality of terminal activity transaction data.

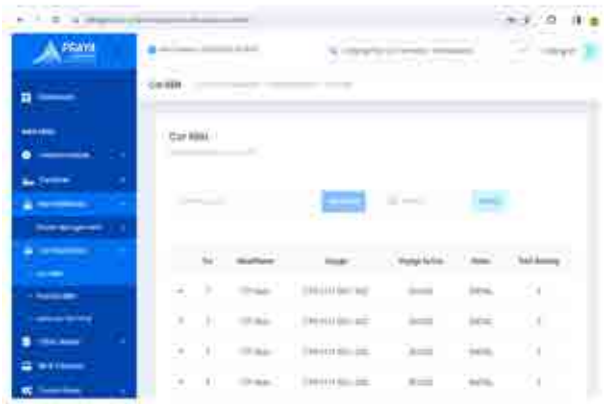





Adapun benefit dari Implementasi Sistem Billing Praya, antara lain:

- Terintegrasi dengan system ERP-SAP
- Mengakomodir semua layanan tagihan billing ke customer baik domestic maupun internasional.
- Terintegrasi dengan sistem pembayaran payment host to host (H2H) Pelindo *Pay* dan *Customer Portal* CCS

Pengguna aplikasi ini adalah Divisi Operasi, Divisi Keuangan, dan Terminal Satelit

The benefits of implementing the Praya Billing System include:

- Integrated with the ERP-SAP system
- Accommodate all billing services to customers both domestic and international.
- Integrated with Pelindo Pay host to host (H2H) payment system and CCS Customer Portal

Users of this application are the Operations Division, Finance Division and Satellite Terminal

4. Pembangunan Portal Customer Care System (CCS)

Dalam peningkatan pelayanan kegiatan bongkar muat kendaraan, diperlukan adanya media layanan pelanggan untuk dapat melakukan layanan monitoring tagihan nota, pelacakan cargo kendaraan, simulasi tarif hingga menerima keluhan pelanggan.

Proses bisnis untuk layanan pelanggan tersebut masih dilakukan secara manual dan belum dapat mengakomodir pelayanan pelanggan secara optimal baik dari penyampaian data maupun secara operasional maka dibutuhkan sistem yang dapat mengakomodir layanan tersebut agar seluruh permintaan layanan pelanggan dan operasional dapat diakomodir dalam suatu sistem yang dapat berfungsi untuk mempermudah layanan antara PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) dengan pelanggan maupun antar Internal IPCC.

4. Development of a Customer Care System (CCS) Portal

In order to improve services for vehicle loading and unloading activities, it is necessary to have customer service media to be able to provide services for monitoring billing bills, tracking vehicle cargo, simulating tariffs and receiving customer complaints.

The business process for customer service is still carried out manually and cannot accommodate optimal customer service both in terms of data delivery and operations, So a system is needed that can accommodate these services so that all customer and operational service requests can be accommodated in a system that can function to facilitate services between PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) and customers as well as between IPCC Internals.

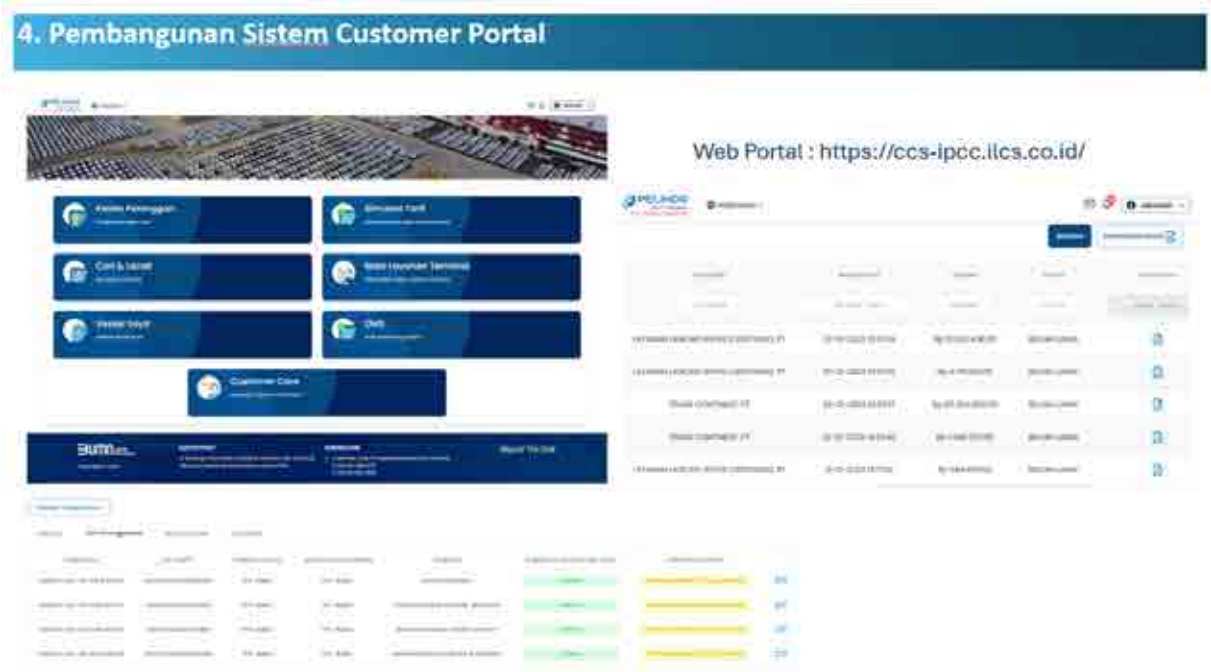

Benefit :

- Terintegrasi dengan sistem Billing Praya.
- Customer mempunyai akses untuk melihat nota, pranota yang sudah terbit.
- Customer dapat melakukan simulasi tarif dan tracing kendaraan di terminal
- Customer dapat menyampaikan keluhan pelanggan sendiri.

Pengguna :
Keuangan, Komersial - Customer Care, dan Semua Customer IPCC

Benefits:

- Integrated with the Praya Billing system.
- Customers have access to view notes and notes that have been issued.
- Customers can simulate fares and vehicle tracing at the terminal
- Customers can submit their own customer complaints.

User :
Finance, Commercial - Customer Care, and All IPCC Customers

5. Pengembangan SDWAN dan Peningkatan Security Network

Dalam rangka implementasi asistem ERP (Enterprise Resouce Planning) yaitu ERP-SAP di seluruh kawasan PT Pelabuhan Indonesia serta dan meningkatkan keamanan cyber dari serangan luar atau *cyber attcak*, perusahaan sedang melaksanakan program transformasi dan standarisasi terminal berbasis planning and control dengan didukung oleh pengembangan dan implementasi Teknologi Informasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan garansi kecepatan, dan juga keamanan perangkat yang ada di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Sehubungan dengan hali itu, maka dibutuhkan peningkatan keamana jaringan yang mencakup area selauruh wilayah di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk maka dibutuhkan solusi tools yang dapat menampilkan seluruh kegiatan di setiap terminal pada Kantor Pusat yang berlokasi di Tanjung Priok. Sehingga dibutuhkan keamanan jaringan yang berfungsi sebagai pengamanan jaringan di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

5. SDWAN Development and Network Security Improvement

In order to implement the ERP (Enterprise Resource Planning) system, namely ERP-SAP, in all PT Pelabuhan Indonesia areas and improve cyber security from external attacks or cyber attacks, the company is implementing a planning and control-based terminal transformation and standardization program supported by development and implementation Information Technology. This is done with the aim of providing a speed guarantee and also the security of devices within the PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk environment.

In connection with this, it is necessary to increase network security covering the entire area at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, so a tools solution is needed that can display all activities at each terminal at the Head Office located in Tanjung Priok. So network security is needed which functions as network security within the PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk environment

Existing Network Topology

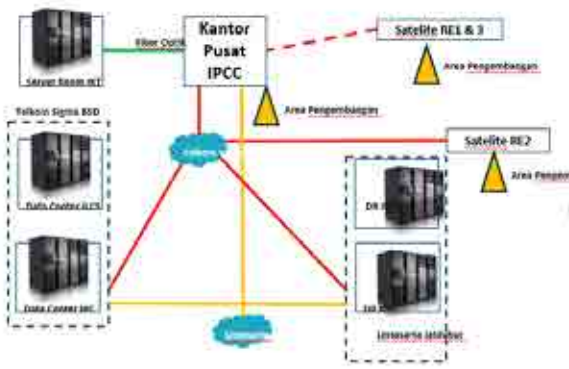

To-Be Network Topology

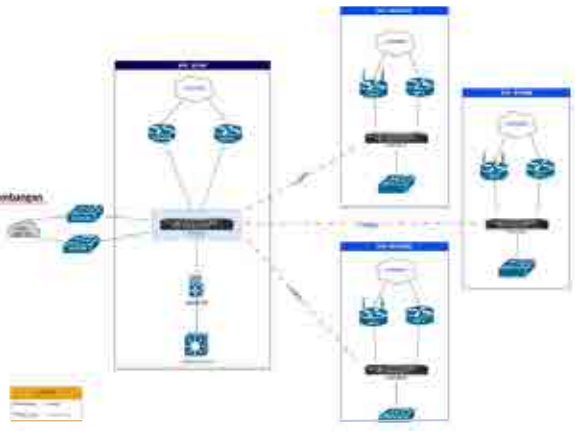

Benefit :

- Adanya integrasi network WAN pusat dengan terminal satelit PT. IKT.
- Meningkatkan fungsi controlling & monitoring jaringan network di lingkungan PT. IKT.
- Meningkatkan maturity level infrastruktur terminal untuk program standarisasi terminal pada aspek Infrastruktur.
- Perlindungan dari serangan virus komputer yang berbahaya

Benefits:

- There is integration of the central WAN network with the PT IKT satellite terminal.
- Improve the network controlling & monitoring function within PT. IKT.
- Increase the maturity level of terminal infrastructure for the terminal standardization program in the Infrastructure aspect.
- Protection from dangerous computer virus attacks

Pengguna :
Semua pengguna jaringan komputer dan Laptop di lingkungan IPCC dan Terminal Satelit

6. Implementasi Aplikasi PEO, PCICO, Portaverse

Dalam rangka standarisasi administrasi perkantoran di seluruh PT Pelabuhan Indonesia grup PT. IKT telah melakukan implementasi sistem administrasi surat menyurat yaitu dengan menggunakan Aplikasi PEO, perusahaan juga telah melaksanakan program standarisasi administrasi kehadiran pekerja dengan menggunakan aplikasi PCICO, serta telah melakukan implementasi Aplikasi Portaverse yang digunakan untuk sharing pengetahuan, pembelajaran dan penilaian performasi pekerja sehingga memudahkan pekerja dan personil administrasi sdm dalam melakukan tugas administrasi perkantoran dan pemantauan performasi pekerja.

User :
All computer and laptop network users in the IPCC and Satellite Terminal environment

6. Implementation of PEO, PCICO, Portaverse Applications

In order to standardize office administration throughout the PT Pelabuhan Indonesia group PT. IKT has implemented a correspondence administration system, namely using the PEO Application, the company has also implemented a standardization program for employee attendance administration using the PCICO application, and has implemented the Portaverse Application which is used for sharing knowledge, learning and evaluating employee performance, making it easier for workers and personnel. HC administration in carrying out office administration tasks and monitoring worker performance.



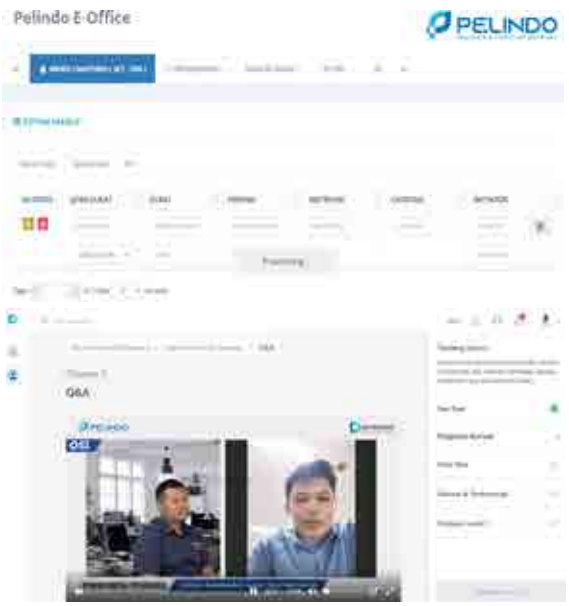

FOKUS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 2024

Rencana Program Kerja Manajemen dan *alligment* terhadap IT Master Plan IPCC pada tahun 2024 adalah melakukan beberapa pengembangan teknologi sistem informasi, yaitu:

1. Pembangunan Sistem Pelindo Terminal Operating Sistem untuk Kendaraan
   IPCC merupakan perusahaan yang terdedikasi menyediakan layanan Terminal RoRo/Kendaraan yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan sejumlah Pelabuhan lainnya di wilayah Indonesia. Layanan yang diberikan meliputi *Terminal Handling* serta *Value Added Services* lainnya dengan standar kualitas pelayanan kelas dunia.

   Dalam upaya untuk terus mengikuti perkembangan teknologi informasi kepelabuhanan serta melakukan *continuous improvement* baik dari sisi pelayanan dan proses bisnis, IPCC berinisatif untuk melakukan pengembangan terhadap Sistem Operasi Terminal eksisting. Hal ini selaras dengan:
   a. Arahan untuk melakukan Standarisasi Pola Operasi berbasis Planning & Control di seluruh area Terminal di lingkungan Pelindo.
   b. Implementasi *single terminal operating system* di lingkungan Pelindo.
   c. *Key Performance Indicator* (KPI) IPCC tahun 2023-2024 yaitu Digitalisasi Aktivitas Operasional.
   d. Rencana Kerja Manajemen (RKM) tahun 2023-2024 yaitu *Enhancement* Sistem Operasional Terminal Internasional.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOCUS IN 2024

The Management Work Program plan and alignment to the IPCC IT Master Plan in 2024 is to carry out several information system technology developments, namely:

1. Development of the Pelindo Terminal Operating System for Vehicles
   IPCC is a company dedicated to providing RoRo/Vehicle Terminal services operating at Tanjung Priok Port, Jakarta, and a number of other ports in Indonesia. The services provided include Terminal Handling and other Value Added Services with world class service quality standards.

   In an effort to continue to follow developments in port information technology and carry out continuous improvement in terms of both services and business processes, IPCC took the initiative to develop the existing Terminal Operating System. This is in line with:
   a. Directions for standardizing Operational Patterns based on Planning & Control in all Terminal areas within Pelindo.
   b. Implementation of a single terminal operating system in the Pelindo environment.
   c. IPCC Key Performance Indicator (KPI) for 2023-2024, namely Digitalization of Operational Activities.
   d. Management Work Plan (RKM) for 2023-2024, namely Enhancement of the International Terminal Operational System.

Tahapan Transformasi Terminal Kendaraan (PCC)
Stages of Car Terminal Transformation (PCC)

Program transformasi setiap Terminal Pelabuhan akan disesuaikan dengan hasil pemetaan maturity level

The transformation program for each Port Terminal will be adjusted to the results of the maturity level mapping



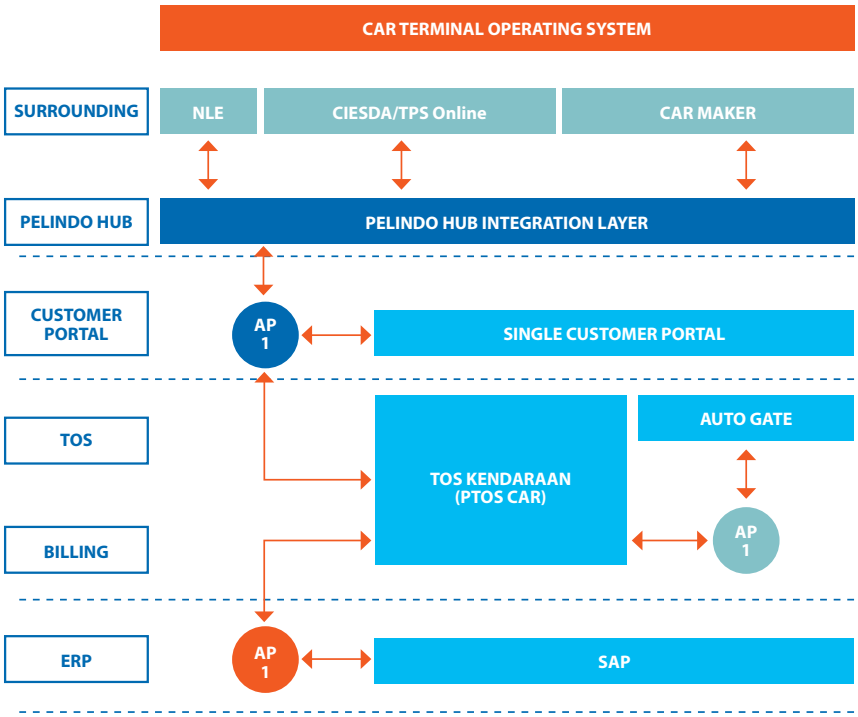

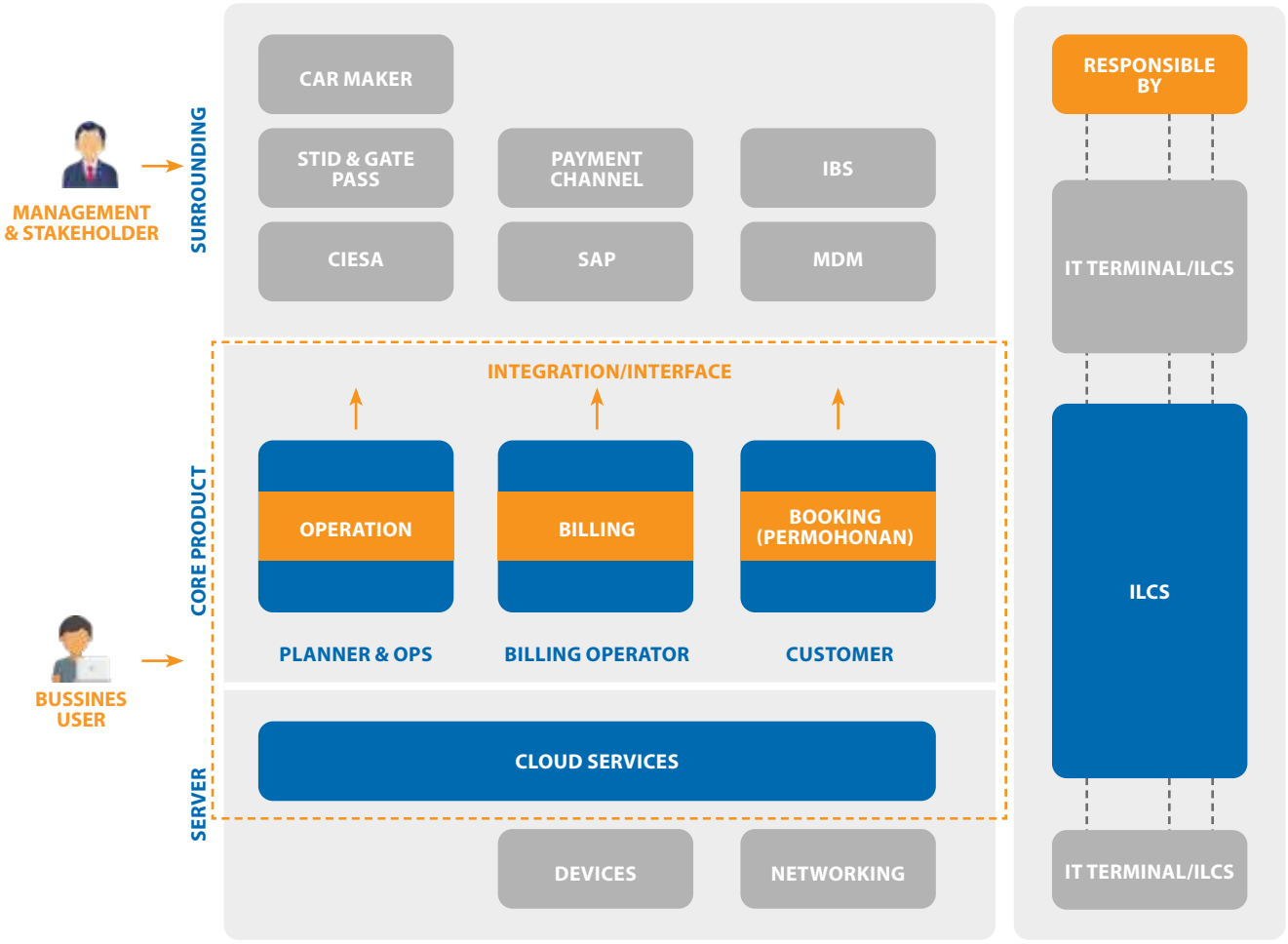

2. Pembangunan CCTV Surveilance System dan Perangkat Pendukung.

   Dalam rangka peningkatan kapasitas terminal dan mendukung program kerja Manajemen IPCC tahun 2024, yaitu program standarisasi operasional non petikemas serta program sistemisasi dan digitalisasi proses bisnis non petikemas, diperlukan pengembangan dan penambahan perangkat CCTV dan perangkat pendukungnya yang akan diimplementasikan di lingkungan IPCC termasuk juga di Area Terminal Satelit.

2. Construction of a CCTV Surveillance System and Supporting Devices.

   In order to increase terminal capacity and support the 2024 IPCC Management work program, namely the non-container operational standardization program as well as the systemization and digitization program for non-container business processes, it is necessary to develop and add CCTV equipment and supporting equipment which will be implemented in the IPCC environment including in the Terminal Satellite Area.



No	Tahapan	Tahun 2024											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
1	Assesment Kebutuhan Perangkat Device Needs Assessment												
2	Gap Analisis Gap Analysis												
3	Desain & Mapping Design & Mapping												
4	Administrasi Pengadaan Procurement Administration												
5	Pengadaan Perangkat Device Procurement												
6	Pengiriman Perangkat Device Delivery												
7	Instalasi Perangkat Device Installation												
8	Setup & Configuration												
9	Testing & Commisioning												
10	Monitoring & Reporting												

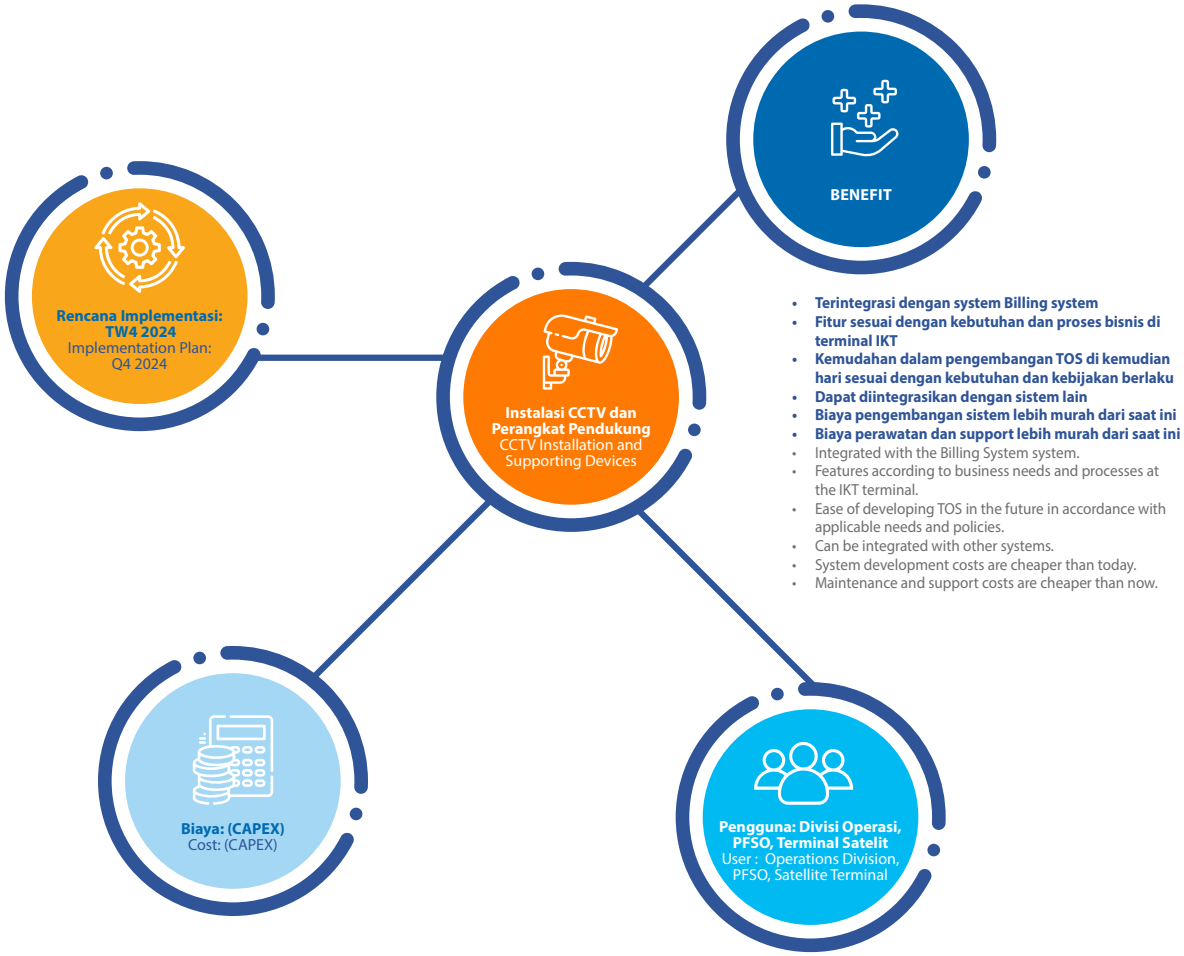

PENYUSUNAN IT MASTER PLAN 2025-2030.

Pada tahun 2023, IPCC menyusun IT Master Plan 2025-2030 yang berisi rencana strategis dan target arsitektur TI, di antaranya, arsitektur data, aplikasi, infrastuktur (DC-DRC, *Server-Storage, Network, End User Device*) dan *security* yang akan dibangun secara proaktif dan *holistic* untuk periode 2025-2030.

IT Master Plan ini akan menjadi acuan bagi arah pengembangan sumber daya dan organisasi TI untuk mendukung bisnis dalam mencapai visi dan misi Perseroan serta untuk menghadapi perubahan pasar, teknologi, dan kepatuhan regulasi yang terjadi/akan terjadi.

PREPARATION OF IT MASTER PLAN FOR 2025-2030.

In 2023, the IPCC has prepared the IT Master Plan 2025-2030 which contains strategic plans and IT architecture targets, including data architecture, applications, infrastructure (DC-DRC, Server-Storage, Network, End User Device) and security that will be built proactively and holistically for the 2025-2030 period.

This IT Master Plan will be a reference for the direction of development of IT resources and organizations to support business in achieving the Company's vision and mission as well as to face changes in markets, technology and regulatory compliance that are occurring/will occur.

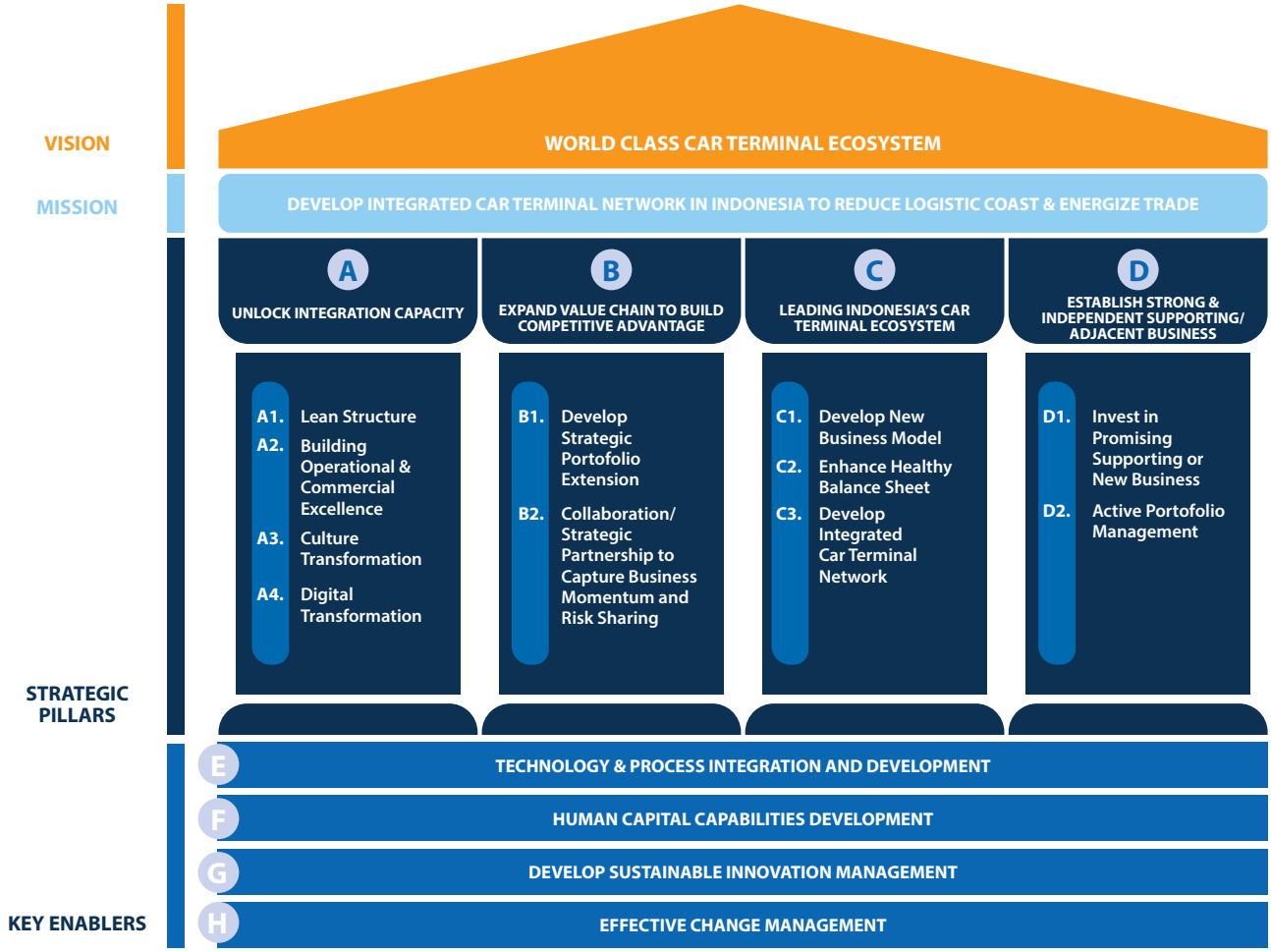

Tujuan penyusunan Dokumen IT Master Plan 2025-2030, antara lain:

1. Membuat kebijakan IT roadmap yang selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perusahaan;
2. Melakukan assesment infrastruktur TI saat ini dan rencana usulan pengembangan;
3. Memenuhi persyaratan terkait pelaksanaan Sistem Informasi oleh Stakeholder dan Customer.
4. Melakukan Alignment dengan roadmap IT Master Plan PT. SPMT, dan Holding Pelindo.

The objectives of preparing the 2025-2030 IT Master Plan Document include:

1. Create an IT roadmap policy that is in line with the Company's Long Term Plan (RJPP);
2. Conduct an assessment of the current IT infrastructure and proposed development plans;
3. Fulfill requirements related to the implementation of the Information System by Stakeholders and Customers.
4. Alignment with PT's IT Master Plan roadmap. SPMT, and Pelindo Holding.

06

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Upaya peningkatan kualitas penerapan GCG dilakukan IPCC secara terus menerus, agar mampu mendorong pertumbuhan Perseroan yang sehat, kuat, dan dapat menciptakan nilai tambah Perseroan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Efforts to improve the quality of GCG implementation carried out by the IPCC continuously, in order to be able to encourage the Company's soundness, strong growth and to create added value of the Company for all stakeholders.


IPC
PELINDO
DAYA SEJAHTERA
KENNY PRIMA PUTRA

PERNYATAAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION STATEMENT

GOVERNANCE OUTCOME: PRESTASI TERBAIK PENERAPAN GCG 2023

Penerapan dan penegakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) secara komprehensif dan konsisten berdampak positif terhadap penciptaan nilai tambah Perusahaan. Hal ini tercermin dari berbagai prestasi yang diraih PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IPCC" atau "Perusahaan") berbagai aspek.

GOVERNANCE OUTCOME: BEST ACHIEVEMENTS IN GCG IMPLEMENTATION 2023

Implementing and enforcing the principles of good corporate governance (GCG) comprehensively and consistently has a positive impact on the creation of added value for the Company. This is reflected in the various achievements achieved by PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IPCC" or "Company") in various aspects.

Pencapaian Terbaik Penerapan Tata Kelola Perusahaan 2023 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Best Achievement in the Implementation of Corporate Governance 2023 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Skor ASEAN CG *Scorecad*

107,26 point

"Excellent" "Leadership in corporate governance (ASEAN Asset Class)"

ASEAN CG Scorecard scores
107,26 point "Excellent"
"Leadership in corporate governance
(ASEAN Asset Class)"

Skor Asessment PUGKI

70

Rekomendasi dari 81 rekomendasi telah diterapkan

PUGKI Assessment Score
70 Rekomendasi dari 81 rekomendasi telah diterapkan

Skor GRC 2023

2,6 Managed

GRC Scores 2023
2,6 Managed

Skor Risk Management Index (RMI) 2023

3,09 Managed

Skor Risk Management Index (RMI) 2023
3,09 Managed

Public Relation Indonesia Award

Sektor Anak Usaha BUMN 2023

Kategori Laporan Tahunan sub kategori Annual Report

SOE Subsidiary Sector 2023
Sektor Anak Usaha BUMN 2023
Annual Report Category Annual Report subcategory

Penghargaan Award

Terminal Operator dengan kinerja terbaik

Otoritas Pelabuhan

Operator Terminal with the best performance
Port Authority

Terminal Pendukung Kampanye Anti Korupsi.

Otoritas Pelabuhan

Anti-Corruption Campaign Support Terminal
Port Authority

ASEAN GRC AWARD 2023

Runner Up

ERMA (*Enterprise Risk Management* Academy)

ASEAN GRC AWARD 2023
Runner Up

ERMA (Enterprise Risk Management Academy)

Terminal Umum dalam Mendukung Green Port

Otoritas Pelabuhan

Public Terminal in Support of Green Port Port Authority

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN

IPCC senantiasa memperkuat komitmen untuk mengimplementasikan standar terbaik dalam penerapan prinsip-prinsip GCG secara komprehensif dan berkelanjutan, mematuhi setiap peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, dan selalu terbuka dalam hal perbaikan sesuai dengan *best practice* agar selaras dengan tujuan, visi, dan misi Perseroan serta mampu tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan menciptakan nilai tambah Peseroan bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas. Lebih lanjut, komitmen atas penerapan GCG juga bertujuan untuk memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Dalam kegiatan operasional IPCC, GCG tidak hanya merupakan kewajiban atau keharusan melainkan suatu kebutuhan. Oleh karena itu, IPCC berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Adapun tujuan penerapan GCG di IPCC, antara lain:

- Meningkatkan pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, efisien, serta mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi;
- Meningkatkan stakeholders' value dengan memperhatikan kepentingan seluruh Stakeholders. Pemenuhan nilaijkepentingan seluruh stakeholders {Pelanggan, Pekerja, Pemegang Saham, dan Masyarakat) dilakukan dengan membuat kebijakan yang meminimalkan biaya dan limbah sambil meningkatkan kualitas jasa, meningkatkan keterampilan dan kepuasan Pekerjanya dan berkontribusi terhadap pengembangan dan kesejahteraan Masyarakat;

COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE CORPORATE GOVERNANCE

IPCC always strengthens its commitment to implement the best standards in implementing GCG principles in a comprehensive and sustainable manner, complying with all applicable regulations and Law Regulations, and always being open to improvements in accordance with best practice so that it is in line with the Company's goals, vision and mission as well as able to grow in a healthy, sustainable manner and create added value for the Company for Shareholders and other stakeholders.

These principles are a reference for responsible decision making, avoiding conflicts of interest, optimizing performance, and increasing accountability. Furthermore, the commitment to implementing GCG also aims to provide adequate protection and fair treatment to Shareholders and other Stakeholders as well as increasing compliance with laws and regulations.

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

In IPCC operational activities, GCG is not only an obligation or necessity but a necessity. Therefore, the IPCC is committed to implementing GCG principles consistently and sustainably. The objectives of implementing GCG at the IPCC include:

- Improving the management of the Company in a professional, transparent, efficient manner, as well as encouraging the empowerment of the functions and independence of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors;
- Increase stakeholders' value by paying attention to the interests of all stakeholders. Fulfilling the values and interests of all stakeholders {Customers, Workers, Shareholders and the Community) is carried out by creating policies that minimize costs and waste while improving service quality, increasing the skills and satisfaction of workers and contributing to the development and welfare of the community;

- Meningkatkan daya saing Perseroan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

LANDASAN PENERAPAN GCG

Dalam melaksanakan penerapan praktik GCG, Perusahaan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);
- Prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); dan
- ASEAN Corporate Governance Scorecard.

PENDEKATAN PENERAPAN GCG

Tata kelola perusahaan yang baik diterapkan di IPCC dengan pendekatan-pendekatan berikut ini:

- IPCC sebagai institusi/emiten dalam memenuhi peraturan-peraturan sebagai wujud etika bisnis. Pendekatan ini menempatkan IPCC sebagai institusi/emiten dalam memenuhi peraturan-peraturan sebagai wujud etika bisnis. Penerapan ini mencakup 2 aspek, yaitu:
- Aspek legal normatif adalah aspek penerapan GCG yang bertujuan untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku *(compliance)*, hal ini merupakan unsur enforcement dari tata kelola perusahaan.

- Increase the Company's competitiveness nationally and internationally, thereby increasing market confidence which can encourage investment flows and sustainable national economic growth.

BASIS OF GCG IMPLEMENTATION

In implementing GCG practices, the Company refers to several laws and regulations in force in Indonesia, namely:

- Law of the Republic of Indonesia no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (PT);
- Law of the Republic of Indonesia no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN);
- Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Determination of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN), as amended by Minister of BUMN Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012;
- Financial Services Authority Regulation no. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines;
- Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines;
- Indonesian GCG Guidelines developed by the National Governance Policy Committee (KNKG);
- Corporate Governance principles developed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); And
- ASEAN Corporate Governance Scorecard.

APPROACH TO GCG IMPLEMENTATION

Good corporate governance is implemented at the IPCC with the following approaches:

- IPCC as an institution/issuer fulfills regulations as a form of business ethics. This approach places the IPCC as an institution/issuer in fulfilling regulations as a form of business ethics. This implementation includes 2 aspects, namely:
- The normative legal aspect is the aspect of implementing GCG which aims to fulfill compliance with applicable laws and regulations (compliance), this is an enforcement element of corporate governance.

- Aspek *corporate behavior* adalah semua kegiatan perusahaan yang diperlukan untuk mencapai target dan sasaran perusahaan. Pendekatan ini juga memandang bagaimana IPCC berinteraksi dengan para Pemangku Kepentingan.
- IPCC dalam melakukan penerapan dan internalisasi prinsip-prinsip GCG sebagai etika dan perilaku mendasar yang melekat pada setiap karyawan dan diterjemahkan dalam bentuk *code of conduct.*

Pendekatan ini menilai bagaimana perilaku karyawan IPCC sesuai dengan norma-norma etika yang berlaku di masyarakat dan bagaimana perilaku karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.

- The corporate behavior aspect is all company activities necessary to achieve company targets and objectives. This approach also looks at how the IPCC interacts with Stakeholders.
- IPCC in implementing and internalizing GCG principles as fundamental ethics and behavior that are inherent in every employee and translated in the form of a code of conduct.

This approach assesses how the behavior of IPCC employees is in accordance with ethical norms that apply in society and how employees behave in carrying out their daily duties and responsibilities.

Pendekatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance Approach



PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN

SUSTAINABLE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Upaya peningkatan kualitas penerapan GCG dilakukan IPCC secara terus menerus, agar mampu mendorong pertumbuhan Perseroan yang sehat, kuat, dan dapat menciptakan nilai tambah Perseroan bagi seluruh pemangku kepentingan. Adapun upaya tersebut, tercermin dalam bagan siklus peningkatan kualitas penerapan GCG di IPCC berikut ini:

Efforts to improve the quality of GCG implementation are carried out by IPCC continuously, in order to be able to encourage the Company's healthy, strong growth and to create added value for the Company for all stakeholders. These efforts are reflected in the following cycle chart for improving the quality of GCG implementation at the IPCC:

Siklus Peningkatan Kualitas Penerapan GCG IPCC
IPCC GCG Implementation Quality Improvement Cycle



Dari bagan di atas dapat dijelaskan siklus peningkatan kualitas penerapan GCG IPCC meliputi:

1. Penetapan standar kualitas penerapan GCG;
2. Penerapan prinsip-prinsip GCG;
3. Pemantauan atau pengawasan penerapan GCG;
4. Pengukuran/penilaian penerapan GCG;
5. Peningkatan kualitas penerapan GCG dan *Benchmarking*.

From the chart above, it can be explained that the IPCC GCG implementation quality improvement cycle includes:

1. Determination of quality standards for GCG implementation;
2. Implementation of GCG principles;
3. Monitoring or supervising the implementation of GCG;
4. Measurement/assessment of GCG implementation;
5. Improving the quality of GCG and Benchmarking implementation.

PENETAPAN STANDAR KUALITAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

IPCC mengadopsi standar terbaik yang berlaku di Indonesia maupun global dengan harapan dapat meningkatkan kualitas penerapan GCG di IPCC. Standar-standar tersebut, yaitu:

1. Peraturan perundang-undang Republik Indonesia, khususnya mengenai Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan; dan
5. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* untuk *State Owned Company* yang dikembangkan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD);
6. ASEAN Corporate Governance Scorecard;
7. Penerapan GCG dengan melihat indeks terkait tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).
8. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang dikembangkan oleh KNKG tahun 2021.

Dari acuan-acuan tersebut kemudian ditetapkan Pedoman GCG IPCC, Kode Etik, serta kebijakan-dan pedoman lainnya terkait penerapan GCG di IPCC.

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG DI IPCC

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IPCC"), IPCC menerapkan prinsip-prinsip GCG yang didasarkan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2021, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan standar ASEAN Scorecard.

ESTABLISHMENT OF QUALITY STANDARDS FOR THE CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The IPCC adopts the best standards applicable in Indonesia and globally with the hope of improving the quality of GCG implementation at the IPCC. These standards are:

1. The laws and regulations of the Republic of Indonesia, especially regarding Limited Liability Companies;
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 dated 20 March 2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises;
4. Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Implementing Corporate Governance; And
5. Corporate Governance Principles for State Owned Companies developed by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD);
6. ASEAN Corporate Governance Scorecard;
7. Implementation of GCG by looking at indices related to corporate governance or the Corporate Governance Perception Index (CGPI).
8. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance developed by KNKG in 2021.

From these references, the IPCC GCG Guidelines, Code of Conduct , and other policies and guidelines related to the implementation of GCG at the IPCC are then established.

IMPLEMENTATION OF GCG PRINCIPLES AT IPCC

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IPCC"), IPCC applies GCG principles which are based on Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for the Implementation of Corporate Governance, General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) developed by the National Committee for Governance Policy (KNKG) in 2021, as well as the implementation of good corporate governance based on ASEAN Scorecard standards.

Penerapan TARIFT

Prinsip-prinsip GCG di IPCC terdiri dari 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, *fairness* atau kewajaran, dan tepercaya disingkat TARIFT.

TARIFT Implementation

The GCG principles in the IPCC consist of 5 (five) basic principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, fairness or reasonableness, and trusted, abbreviated as TARIFT.

Prinsip-Prinsip GCG di IPCC
GCG Principles at IPCC



Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG di IPCC sebagai berikut:

The implementation of GCG principles in the IPCC is as follows:

Komitmen Commitment	Implementasi Implementation
Transparansi Transparency	
Perseroan menjamin keterbukaan informasi secara jelas dan akurat bagi para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai transparansi informasi perusahaan. The Company guarantees the disclosure of clear and accurate information for Shareholders and Stakeholders, while still paying attention to applicable statutory provisions regarding transparency of company information.	1. Pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan informasi lainnya secara jelas, memadai, akurat, dapat dibandingkan dan tepat waktu serta mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan. Semua informasi tersebut dapat diakses pada situs web Perusahaan: www.indonesiacarterminal.co.id. 2. Menyampaikan pelaporan secara berkala kepada regulator yang mana hal ini merupakan bagian dari kepatuhan Perusahaan dalam hal transparansi informasi IPCC sebagai perusahaan terbuka. informasi tersebut dapat diakses pada situs web Bursa Efek Indonesia. 3. Mengadakan Public Expose Tahunan yang pada tahun ini telah dilakukan pada tanggal 28 April 2022; 4. Transparansi informasi yang dilakukan IPCC selalu memperhatikan kebijakan perlindungan terhadap informasi rahasia mengenai Perusahaan dan Pelanggan serta Mitra Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 1. Disclosure of material and relevant information regarding performance, financial condition and other information in a clear, adequate, accurate, comparable and timely manner and easily accessible to Stakeholders. All this information can be accessed on the Company's website: www.indonesiacarterminal.co.id. 2. Submit regular reports to regulators, which is part of the Company's compliance with IPCC information transparency as a public company. This information can be accessed on the Indonesian Stock Exchange website. 3. Holding an Annual Public Expose which this year was held on April 28, 2022; 4. Information transparency carried out by the IPCC always pays attention to the policy of protecting confidential information regarding the Company, Customers and Work Partners in accordance with applicable laws and regulations

Komitmen Commitment	Implementasi Implementation
Akuntabilitas Accountability	
Perseroan menetapkan pembagian fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban yang jelas dari masing-masing organ sehingga pengelolaan bisnis IPCC senantiasa dapat berjalan efektif dan efisien. The Company determines a clear division of functions, structures, systems and responsibilities for each organ so that IPCC business management can always run effectively and efficiently.	1. Masing-masing organ utama maupun organ pendukung IPCC menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda sebagaimana tercantum dalam Board Manual ataupun piagam yang telah disahkan; 2. Seluruh insan IPCC bekerja sesuai dengan kompetensi, kemampuan, dan keahlian yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi Perseroan; 3. Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Pemegang Saham di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 1. Each main organ and supporting organs of the IPCC carry out different duties and responsibilities as stated in the Board Manual or ratified charter; 2. 2. All IPCC personnel work in accordance with their competencies, abilities and expertise so that they can provide their best contribution to the Company; 3. 3. The Board of Commissioners and Directors are accountable for their performance to Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS).
Tanggung Jawab Responsibility	
Pelaksanaan aktivitas operasional bisnis IPCC senantiasa mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. The implementation of IPCC's business operational activities always complies with applicable laws and regulations.	1. IPCC menjamin kesesuaian antara implementasi aktivitas bisnis sehari-hari dengan prinsip-prinsip korporasi sehat dan ketentuan peraturan yang berlaku; 2. Perseroan selalu update mengikuti perkembangan regulasi terkini khususnya yang relevan dengan bisnis perusahaan dan regulasi pasar modal; 3. Perseroan mengikutsertakan karyawan di dalam kegiatan sosialisasi peraturan ataupun regulasi yang diselenggarakan oleh regulator; 4. Perseroan menjalankan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR) secara berkesinambungan setiap tahunnya. 1. IPCC guarantees conformity between the implementation of daily business activities with healthy corporate principles and applicable regulatory provisions; 2. The Company is always updated following the latest regulatory developments, especially those relevant to the company's business and capital market regulations; 3. The Company involves employees in the socialization of rules and regulations organized by the regulator; 4. The Company carries out Corporate Social Responsibility (CSR) programs and activities on an ongoing basis every year.
Independensi Independence	

Komitmen Commitment	Implementasi Implementation
Pengelolaan kegiatan usaha perusahaan dilakukan secara profesional dan mandiri serta bebas dari benturan kepentingan ataupun intervensi dari pihak-pihak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The management of the company's business activities is carried out professionally and independently and free from conflicts of interest or intervention from parties that are not in accordance with applicable laws and regulations.	1. Dalam rangka menjamin independensi, IPCC memiliki Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan 2. Melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan pendukung GCG agar implementasi GCG di IPCC dapat sejalan dengan *best practice*. 1. In order to ensure independence, the IPCC has an Audit Committee, Risk Management Committee and Nomination and Remuneration Committee to assist in carrying out the duties of the Board of Commissioners; And 2. Make improvements to GCG supporting policies so that GCG implementation at the IPCC can be in line with best practice.
Kewajaran Fairness	
Perseroan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The Company upholds the principles of justice and equality in fulfilling the rights of Stakeholders that arise based on agreements and applicable laws and regulations.	1. IPCC menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingan; 2. IPCC berkomitmen untuk memperlakukan seluruh karyawan secara adil tanpa membeda-bedakan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak terkait. 1. The IPCC guarantees fair and equal treatment in fulfilling the rights of Stakeholders; 2. The IPCC is committed to treating all employees fairly without discriminating against ethnicity, religion, origin, gender or other unrelated matters.
Tepercaya (*Trusted*) Trusted	
Perusahaan mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh Pemangku Kepentingan. The Company has full trust and support from all Stakeholders.	Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi ekspektasi Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan sehingga Perusahaan mendapatkan kepercayaan yang tercermin dari pengelolaan perusahaan berdasarkan sistem yang menjamin kualitas dan mutu yang berstandar internasional, diantaranya adalah ISO 9001: 2015 yang merupakan standar Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001: 2015 yang merupakan standar Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 37001: 2016 yang merupakan standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dan juga berdasarkan ISO 45001: 2018 The Company is committed to meeting the expectations of Shareholders and all stakeholders so that the Company gains trust which is reflected in the management of the company based on a system that guarantees quality and international standards, including ISO 9001: 2015 which is a Quality Management System standard, ISO 14001: 2015 which is a Environmental Management System standard, ISO 37001: 2016 which is an Anti-Bribery Management System standard, as well as an Occupational Safety and Health Management System based on Government Regulation Number 50 of 2012 concerning Implementation of an Occupational Safety and Health Management System and also based on ISO 45001: 2018

Penerapan Pilar Govenansi PUGKI

Sejalan dengan perkembangan bisnis yang semakin kompleks, maka implementasi prinsip-prinsip GCG Perseroan mengalami pengembangan sebagaimana tercantum dalam PUKGI yang diterbitkan oleh KNKG pada 2021. PUGKI terdiri dari prinsip, rekomendasi, dan panduan yang mendorong praktik governansi korporat yang baik. Masing-masing korporasi menerapkan PUGKI tersebut dengan menjalankan prinsip, rekomendasi, dan panduan serta mengungkapkannya.

Prinsip-prinsip dalam PUGKI beserta rekomendasi dan panduan di dalamnya dijiwai oleh 4 (empat) pilar governansi korporat, yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Penerapan empat pilar governansi korporat Indonesia diharapkan dapat mendorong terciptanya nilai korporasi dalam jangka panjang.

Implementation of the PUGKI Govenance Pillars

In line with increasingly complex business developments, the implementation of the Company's GCG principles is undergoing development as stated in the PUKGI published by KNKG in 2021. PUGKI consists of principles, recommendations and guidelines that encourage good corporate governance practices. Each corporation implements PUGKI by implementing principles, recommendations and guidelines and disclosing them.

The principles in PUGKI along with the recommendations and guidelines contained therein are inspired by 4 (four) pillars of corporate governance, namely ethical behavior, accountability, transparency and sustainability. The implementation of the four pillars of Indonesian corporate governance is expected to encourage the creation of corporate value in the long term.

Pilar Governansi Korporat Indonesia
Pillars of Indonesian Corporate Governance



IPCC telah melakukan pemetaan terkait penerapan prinsip, rekomendasi, dan panduan. IPCC berupaya mengimplementasikan keempat pilar tersebut dengan harapan dapat terus beradaptasi dengan perkembangan terkini terkait governansi korporat, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, keberagaman dewan, digitalisasi dan *investor stewardship/engagement*, disamping terus memperkuat landasan dalam menangani benturan kepentingan untuk isu utama governansi korporat di Indonesia, seperti penanganan benturan kepentingan, kebijakan anti korupsi, dan Pedoman Kode Etik Bisnis, evaluasi kinerja, independensi serta remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Berikut penjelasan penerapan PUGKI di lingkup IPCC:

The IPCC has carried out mapping regarding the implementation of principles, recommendations and guidelines. The IPCC seeks to implement these four pillars in the hope of continuing to adapt to the latest developments related to corporate governance, including social and environmental responsibility based on the principles of sustainable development, board diversity, digitalization and investor stewardship/engagement, as well as continuing to strengthen the foundation for handling conflicts of interest on key issues. corporate governance in Indonesia, such as handling conflicts of interest, anti-corruption policies, and Business Ethics Code Guidelines, performance evaluation, independence and remuneration of Directors and Board of Commissioners.

The following is an explanation of the application of PUGKI within the scope of the IPCC:

Prinsip Dasar Basic Principles	**Penjelasan** Explanation	**Implementasi** Implementation
Perilaku Beretika Ethical Behavior	Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (respect), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Perseroan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. In carrying out its activities, the Company always prioritizes honesty, treating all parties with respect, fulfilling commitments, building and maintaining moral values and trust consistently. The Company pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality and is managed independently so that each company organ does not dominate the other and cannot be intervened by other parties.	• IPCC memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. • IPCC memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) • The IPCC treats all parties with respect, fulfills commitments, builds and maintains moral values and beliefs consistently. • The IPCC pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality.
Akuntabilitas Accountability	Perseroan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. The Company can be accountable for its performance transparently and fairly. For this reason, the Company must be managed correctly, measurably and in accordance with the interests of the Company while still considering the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite for achieving sustainable performance.	• IPCC mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. • Pengelolaan usaha IPCC dilaksanakan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. • The IPCC is accountable for its performance in a transparent and fair manner. • IPCC business management is carried out correctly, measurably and in accordance with the interests of the Company while still considering the interests of shareholders and stakeholders.

Prinsip Dasar Basic Principles	Penjelasan Explanation	Implementasi Implementation
Transparansi Transparency	Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, Perseroan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perseroan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. To maintain objectivity in conducting business, the Company provides material and relevant information in a way that is easily accessible and understood by stakeholders. The Company takes the initiative to disclose not only issues required by statutory regulations, but also matters that are important for decision making by shareholders, creditors and other stakeholders.	• IPCC menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, salah satu caranya dengan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. • IPCC memiliki insiatif dalam pengungkapan informasi kepada publik melalui press release. • The IPCC maintains objectivity in conducting business, one way is by providing material and relevant information in a way that is easily accessible and understood by stakeholders. • IPCC has the initiative in disclosing information to the public through press releases.
Keberlanjutan Continuity	Perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. The Company complies with statutory laws and regulations and committed to carrying out its responsibilities towards society and the environment in order to contribute to sustainable development by collaborating with all relevant stakeholders to improve their lives in a way that is in line with business interests and the sustainable development agenda.	• IPCC senantiasa patuh dan memenuhi segala hal yang telah diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh regulator. • IPCC memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. • IPCC senantiasa berupaya untuk memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. • The IPCC always comply and meet everything that has been regulated in the regulations set by the regulator. • The IPCC has a high commitment to carrying out its responsibilities towards society and the environment. • The IPCC continually strives to contribute to sustainable development by working with all relevant stakeholders to improve their lives in ways that align with business interests and the sustainable development agenda.

PEMANTAUAN PENERAPAN GCG

Penanggung Jawab Penerapan GCG

Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG dijalankan secara konsisten dan komprehensif yang disertai dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi IPCC melalui Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor: HK.56/1/5/IKT-21 tentang Struktur Organisasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk menugaskan Sekretaris Perusahaan sebagai penanggung jawab penerapan GCG di lingkup IPCC, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memonitor penerapan etika kerja dan bisnis serta tata kelola perusahaan yang baik GCG di IPCC.

MONITORING GCG IMPLEMENTATION

Responsible for GCG Implementation

To ensure that GCG principles are implemented consistently and comprehensively accompanied by compliance with applicable laws and regulations, the IPCC Board of Directors through the Decree of the Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Number: HK.56/1/5/IKT-21 concerning Organizational Structure PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk assigned the Corporate Secretary as the person responsible for implementing GCG within the IPCC, who is responsible for implementing and monitoring the implementation of work and business ethics as well as good corporate governance GCG at the IPCC.

PENGUKURAN/PENILAIAN PENERAPAN GCG

Perseroan secara berkala melakukan pengukuran/penilaian/evaluasi terhadap penerapan GCG untuk mengetahui sejauh mana efektivitas GCG diterapkan di lingkungan Perseroan. Penilaian dilakukan setiap tahun oleh pihak internal (*self assesment*) yang didampingi oleh pihak independen. *Self assesment* GCG yang digunakan oleh Perseroan untuk tahun buku 2023 menggunakan parameter yang berlaku baik secara nasional maupun internasional, meliputi:

1. ASEAN *Corporate Governance Scorecard*;
2. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI);

Evaluasi yang dilakukan Perseroan, bertujuan untuk:

1. Menguji dan menilai penerapan GCG di Perusahaan melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan dengan kondisi nyata yang diterapkan di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG;
2. Menilai kesenjangan (gap) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah tersebut;
3. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk sejalan dengan *best practices*;
4. Memantau konsistensi penerapan GCG di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dan mendapatkan masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

MEASUREMENT/ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

The Company periodically measures/assesses/evaluates the implementation of GCG to determine the extent to which the effectiveness of GCG is implemented within the Company. The assessment is carried out every year by an internal party (self assessment) accompanied by an independent party. The GCG self-assessment used by the Company for the 2023 financial year uses parameters that apply both nationally and internationally, including:

1. ASEAN Corporate Governance Scorecard.
2. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI);

The evaluation carried out by the Company aims to:

1. Test and assess the implementation of GCG in the Company through elaboration of the conditions for implementing GCG and with the real conditions implemented at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, through providing scores/values for the implementation of GCG and categories for the quality of GCG implementation;
2. Assess the gap between GCG criteria and GCG implementation at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, and propose recommendations for improvement to reduce this gap;
3. Provide recommendations for improvements to gaps found in the implementation of GCG at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk in line with best practices;
4. Monitor the consistency of GCG implementation at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk and obtain input for improving and developing GCG policies within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Skor Assessment IPCC 2023
IPCC Assessment Score for 2023

SK-16 Kementerian BUMN SK-16 Ministry of State-Owned Enterprises	ACGS
70 Rekomendasi dari 81 rekomendasi telah diterapkan Recommendations from 81 recommendations have been implemented	**107,26** point "Excellent" "Leadership in corporate governance (ASEAN Asset Class)"

Assessment Penerapan GCG Berdasarkan Rekomendasi PUGKI

IPCC menyambut baik pengembangan Pedoman Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) yang dirilis pada tahun 2021 dan menjadi standar penerapan GCG korporasi Indonesia. PUGKI terdiri dari 8 (delapan) prinsip, 8 (delapan) Prinsip yang diturunkan menjadi 28 (dua puluh delapan) bagian, serta 81 (delapan puluh satu) Rekomendasi. Prinsip-prinsip dalam PUGKI beserta rekomendasi dan panduan di dalamnya dijiwai oleh 4 (empat) pilar governansi korporat, yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan.

Dalam rangka mendorong terciptanya peningkatan nilai Perseroan dalam jangka panjang, IPCC telah menerapkan Pedoman PUGKI. Oleh karena itu, IPCC melakukan assessment berdasarkan Rekomendasi PUGKI sebagai bahan evaluasi agar dapat melakukan perbaikan ke depannya.

Assessment Penerapan GCG Berdasarkan Rekomendasi PUGKI

The IPCC welcomes the development of the Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI) by the National Committee for Governance Policy (KNKG) which released in 2021 and become the standard for implementing GCG for Indonesian corporations. PUGKI consists of 8 (eight) principles, 8 (eight) Principles which are reduced to 28 (twenty eight) parts, and 81 (eighty one) Recommendations. The principles in PUGKI along with the recommendations and guidelines contained therein are inspired by 4 (four) pillars of corporate governance, namely ethical behavior, accountability, transparency and sustainability.

In order to encourage the creation of increased Company value in the long term, the IPCC has implemented the PUGKI Guidelines. Therefore, the IPCC carries out an assessment based on the PUGKI Recommendations as evaluation material so that it can make improvements in the future.

Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2023
Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2023

Jenis Penilaian Type of Assessment	:	*Assessment*
Pendamping Penilaian Appraiser	:	Kim Consult
Tahun Ukur Measurement Year	:	2024
Periode Penerapan Implementation Period	:	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 January 1, 2023 to December 31, 2023
Tempat Venue	:	Kantor Pusat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Head Office of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Hasil Penilaian

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, terdapat 71 (tujuh puluh satu) Rekomendasi yang telah diterapkan (*apply*), 10 (sepuluh) Rekomendasi yang tidak diterapkan dan memerlukan penjelasan, sebagaimana tabel berikut:

Assessment Result

Based on the assessment that has been carried out, there are 71 (seventy one) recommendations that have been implemented (applied), 10 (ten) recommendations that have not been implemented and require explanation, as in the following table:

PRINSIP PRINCIPLES		REKOMENDASI RECOMMENDATION	KETERANGAN DESCRIPTION	
			APPLY/ TERAPKAN	EXPLAIN/ JELASKAN
1.	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris** Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners			
1.1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi Roles and Responsibilities of the Board of Directors	9	8	1
1.2	Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya Performance Assessment – Board of Directors and Members	2	2	0
1.3	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners	13	11	2
1.4	Pembentukan Komite Committee Formation	3	3	0
1.5	Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya Performance Assessment - Board of Commissioners and Members	1	1	0
1.6	Benturan Kepentingan Conflict of Interest	2	1	1
1.7	Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris improving the Competency of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners	1	1	0
	NILAI PRINSIP 1 **PRINCIPAL VALUE 1**	**31**	**27**	**4**
2.	**Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners			
2.1	Komposisi Direksi Composition of the Board of Directors	8	7	1
2.2	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration of Directors and Board of Commissioners	3	3	0
	NILAI PRINSIP 2 **VALUE PRINCIPLE 2**	**11**	**10**	**1**
3.	**Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris** Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners			
3.1	Sifat Hubungan Kerja Nature of Employment Relationships	3	3	0
3.2	Akses informasi Dewan Komisaris Access information on the Board of Commissioners	1	1	0
3.3	Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi Responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structure on the Corporation	1	1	
	NILAI PRINSIP 3 **VALUE PRINCIPLE 3**	**5**	**5**	**0**

	PRINSIP PRINCIPLES	REKOMENDASI RECOMMENDATION	KETERANGAN DESCRIPTION	
			APPLY/ TERAPKAN	EXPLAIN/ JELASKAN
4.	**Perilaku Etis dan bertanggung jawab** Ethical and responsible behavior			
4.1	Pedoman Etika dan Perilaku Code of Ethics and Conduct	2	2	0
4.2	Nilai – nilai dan Budaya Organisasi Organizational Values and Culture	1	1	0
4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya Communication and Enforcement of Ethics, Values and Culture Guidelines	1	1	0
	NILAI PRINSIP 4 VALUE PRINCIPLE 4	4	4	0
5.	**Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan** Risk Management, Internal Control and Compliance			
5.1	Pengendalian Internal dan Kepatuhan Internal Control and Compliance	1	1	0
5.2	Manajemen Risiko Risk management	2	2	0
5.3	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Integration of Governance, Risk Management and Compliance	2	2	0
5.4	Audit Internal Internal Audit	1	1	0
	NILAI PRINSIP 5 **VALUE PRINCIPLE 5**	**6**	**6**	**0**
6.	**Pengungkapan dan Transparansi** Disclosure and Transparency			
6.1	Kebijakan Pengungkapan Disclosure Policy	2	2	0
6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial and Sustainability Reports	4	4	0
6.3	Diseminasi Informasi Information Dissemination	3	3	0
	NILAI PRINSIP 6 **VALUE PRINCIPLE 6**	**9**	**9**	**0**
7.	**Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham** Protection of Shareholder Rights			
7.1	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	3	3	0
7.2	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Equal Treatment of Shareholders	3	0	3
7.3	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	5	3	2
	NILAI PRINSIP 7 **VALUE PRINCIPLES 7**	**11**	**7**	**4**
8.	**Pemangku Kepentingan Lainnya** Other Stakeholders			

	PRINSIP PRINCIPLES	REKOMENDASI RECOMMENDATION	KETERANGAN DESCRIPTION	
			APPLY/ TERAPKAN	EXPLAIN/ JELASKAN
8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (stakeholder engagement) Key Stakeholder Engagement (stakeholder engagement)	1	1	0
8.2	Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis Integration of Sustainability in Business Models	1	1	0
8.3	Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan Protection of Stakeholders	2	2	0
	NILAI PRINSIP 8 **VALUE PRINCIPLES 7**	**4**	**4**	**0**
TOTAL		**81**	**71**	**10**

Adapun Rekomendasi PUGKI yang telah diterapkan dan belum diterapkan disampaikan pada lampiran Bab Tata Kelola Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

The PUGKI recommendations that have been implemented and have not yet been implemented are presented in the attachment to the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

Assessment Penerapan GCG berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard

Untuk tahun buku 2023, Perusahaan kembali melakukan *self assesment* penerapan GCG dengan menggunakan kriteria dan metodologi ASEAN Corporate Governance Scorecard (”*ASEAN CG Scorecard*” atau ”ACGS”) terkini sesuai hasil kesepakatan ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dalam *39th ACMF Chairs Meeting* di Bali tanggal 16 Oktober 2023.

Assessment of GCG Implementation based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard

For the 2023 fiscal year, The company again carried out a self-assessment on GCG implementation of GCG using the latest ASEAN Corporate Governance Scorecard (“ASEAN CG Scorecard” or “ACGS”) criteria and methodology in accordance with the results of the ASEAN Capital Market Forum (ACMF) agreement at the 39th ACMF Chairs Meeting in Bali on October 16, 2023.

Jenis Penilaian Type of Assessment	:	*Self assesment /Penilaian Independen* *Self assesment*
Pendamping Penilaian Appraiser	:	PT Kharisma Integrasi Manajemen (”KIM Consult”) Epicentrum Walk, South 529 Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Tahun Ukur Measurement Year	:	2023
Periode Penerapan Implementation Period	:	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 January 1, 2023 to December 31, 2023
Tempat Venue	:	Kantor Pusat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Head Office of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Waktu Pengukuran Measurement Time	:	Dua bulan Two months

Adapun batasan penilaian adalah dengan mengevaluasi kinerja Perusahaan dalam menerapkan praktik-praktik Tata Telola yang Baik yang diungkapkan kepada publik

The assessment limits are by evaluating the Company’s performance in implementing Good Governance practices that will be disclosed to the public in 2023, with a focus on:

tahun 2023, dengan fokus kepada:
1. Hak-hak dan perlakukan yang sama terhadap pemegang saham;
2. Keberlanjutan dan ketangguhan terkait dengan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG);
3. Pengungkapan dan transparansi; serta
4. Pertanggung jawaban Dewan (Direksi dan Dewan Komisaris).

Metode analisa, sesuai dengan standar yang berlaku dilakukan berdasarkan informasi dan dokumen publik termasuk informasi melalui Website Perseroan maupun Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia dan media *online* lainya. Selain itu juga terhadap Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Kebijakan-kebijakan internal, pelaksanaan RUPS dan lain-lain yang dipublikasikan tahun 2023 dengan Bahasa Indonesia dan sekurang-kurangnya juga dalam Bahasa Inggris.

Berdasarkan hasil penilaian, Perusahaan telah mencapai pencapaian yang luar biasa (*excellent*) dalam penerapan tata kelola perusahaan yang secara umum dapat kami sampaikan bahwa:
1. Perusahaan berhasil melakukan hak-hak dan perlindungan yang sama terhadap pemegang saham, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta hak untuk berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan memberikan suara dan hak-hak lainnya.
2. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan telah diterapkan secara adil dan setara terhadap semua pemegang saham, tanpa memihak kepada pihak tertentu.
3. Perusahaan memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan positif dalam masyarakat dan lingkungan sekitar. Mengakui adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian integral dari operasional bisnis Perseroan. Melalui kebijakan dan program-program khusus, secara aktif berupaya untuk meminimalkan dampak lingkungan, mendukung inisiatif sosial, dan memastikan praktik tata kelola perusahaan yang baik.
4. Perusahaan menunjukkan pemahaman yang baik terhadap peran pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Kolaborasi aktif dengan pemangku kepentingan memastikan terciptanya nilai jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.
5. Perusahaan memenuhi standar tinggi dalam hal pengungkapan dan transparansi. Informasi terkait dengan kinerja keuangan, risiko, dan kebijakan tata kelola perusahaan tersedia dengan jelas dan mudah diakses oleh publik.

1. Equal rights and treatment for shareholders;
2. Sustainability and resilience related to Environment, Social and Governance (ESG);
3. Disclosure and transparency; as well as
4. Accountability of the Board (Board of Directors and Board of Commissioners).

The analysis method, in accordance with applicable standards, is carried out based on public information and documents including information via the Company's Website and Information Disclosure on the Indonesian Stock Exchange and other online media. Apart from that, the Annual Report, Sustainability Report, internal policies, implementation of the GMS and others will be published in 2023 in Indonesian and at least also in English.

Based on the assessment results, the Company has achieved extraordinary achievements (excellent) in implementing corporate governance, which in general we can say is:
1. The Company has succeeded in exercising the same rights and protection for shareholders, including the right to obtain accurate and timely information, as well as the right to participate in the General Meeting of Shareholders and cast votes and other rights.
2. Corporate governance principles have been applied fairly and equally to all shareholders, without favoring any particular party.
3. The company has a strong commitment to making positive changes in society and the surrounding environment. Recognizing social and environmental responsibility as an integral part of the Company's business operations. Through specific policies and programs, it actively seeks to minimize environmental impacts, support social initiatives, and ensure good corporate governance practices.
4. The company shows a good understanding of the roles of stakeholders, including employees, customers and society. Active collaboration with stakeholders ensures the creation of long-term value for all parties involved.
5. The company meets high standards in terms of disclosure and transparency. Information related to financial performance, risks and corporate governance policies is clearly available and easily accessible to the public.

6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab dengan baik dalam menjalankan fungsinya. Proses pengambilan keputusan, struktur organisasi, dan pemantauan kinerja manajemen diintegrasikan secara efektif.

6. The Board of Directors and Board of Commissioners are responsible for carrying out their functions properly. The decision-making process, organizational structure, and management performance monitoring are integrated effectively.

Skor Penilaian

Pencapaian hasil *self assesment* GCG IPCC berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Assessment Score

Achievement of IPCC GCG self-assessment results based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2023 are as follows:

Level 1 Part	No of uestions (minus N/A)	No of Comply	Score
A: Rights and Equitable Treatment of Shareholders	30	23	15,33
B: Sustainabilty and Resilience	22	21	14,32
C: Disclosure and transparancy	34	30	22,06
D: Responsibility of the Board	62	52	33,55
Sub Total	**148**	**126**	**85,26**
Level 2			
Bonus	18	11	24,00
Penalty	26	1	(2,00)
Sub total	**44**		**22,00**
Total level 1 + level 2	**192**		**107,26**

Skor akhir *self assesment ASEAN CG Scorecard* (Level 1 dan Level 2) adalah 107,26 *point,* dengan predikat "*Excellent*", artinya "*Leadership in corporate governance (ASEAN Asset Class)*" dengan tingkat pencapaian 76,61%.

Jika dibandingkan dengan skor tahun 2022 sebesar 93,21 dengan tingkat pencapaian 71,70%, maka terdapat peningkatan skor sebesar 4,91%. Pencapaian tersebut merupakan nilai yang sangat luar biasa, Perseroan berhasil menerapkan prinsip, struktur, dan mekanisme penerapan tata kelola Perusahaan dengan baik dan berkesinambungan.

ASEAN CG Scorecard self-assessment final score (Level 1 and Level 2) is 107.26 points, with the predicate "Excellent", meaning "Leadership in corporate governance (ASEAN Asset Class)" with an achievement level of 76.61%.

When compared with the 2022 score of 93.21 with an achievement level of 71.70%, there is an increase in score of 4.91%. This achievement is an extraordinary value, the Company has succeeded in implementing the principles, structure and mechanisms for implementing corporate governance well and continuously.

Perkembangan Skor Assessment ACGS IPCC
Development of IPCC ACGS Assessment Scores

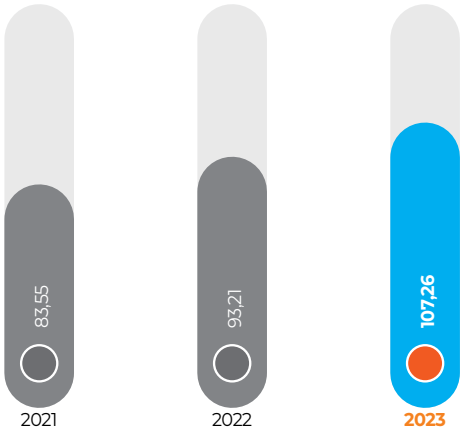

Rekomendasi/Area of Improvement

REKOMENDASI SECARA UMUM

1. *Website* sebagai salah satu sarana publikasi yang murah, mudah, cepat, tepat dan efisien dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan penggunaannya semaksimal mungkin.
2. Tetap dilakukan pemantauan berkala terhadap Website Perseroan dimana setiap folder harus bersesuaian dengan materi, dan dipastikan materi tersebut merupakan informasi publik yang valid/terkini.
3. Seluruh informasi dan materi yang diunggah di Website agar dalam 2 bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris).
4. Melengkapi kebijakan internal, dan pengungkapan pada Laporan Tahunan terhadap beberapa hal yang masih belum comply.
5. Pelaksanaan RUPS dan Penyusunan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keberlanjutan agar memperhatikan POJK terkait dan standar yang dikeluarkan Panitia Annual Report Award, serta penerapan praktik praktik GCG termasuk parameter ASEAN CG Scorecard sehingga lebih komprehensif.
6. Memanfaatkan hasil penilaian independen ini sebagai upaya untuk mempertahankan parameter ASEAN CG Scorecard yang sudah comply, dan memperhatikan rekomendasi yang masih harus diperbaiki.

Recommendations/Areas of Improvement

GENERAL RECOMMENDATIONS

1. Websites as a means of publication that are cheap, easy, fast, precise and efficient can be utilized and optimized for use as much as possible.
2. Regular monitoring of the Company's Website continues to be carried out, where each folder must correspond to the material, and it is ensured that the material is valid/up-to-date public information.
3. All information and materials uploaded on the Website must be in 2 languages (Indonesian and English).
4. Completing internal policies and disclosures in the Annual Report regarding several matters that are still not in compliance.
5. Implementation of the GMS and preparation of the Annual Report including the Sustainability Report to pay attention to the relevant POJK and standards issued by the Annual Report Award Committee, as well as the implementation of GCG practices including the ASEAN CG Scorecard parameters so that it is more comprehensive.
6. Utilize the results of this independent assessment as an effort to maintain ASEAN CG Scorecard parameters that are in compliance, and pay attention to recommendations that still need to be improved.

REKOMENDASI UNTUK PART A: *RIGHTS OF SHAREHOLDERS*

Dari *self assesment* yang dilakukan terhadap part A (*Rights and Equitable Treatment of Shareholders*), KIM Consult merekomendasikan:

1. Setiap adanya pembayaran dividen mengacu kepada: Dividen Final dibayarkan selambatnya 30 hari setelah keputusan RUPS Tahunan. Dividen Interim dibayarkan selambatnya 30 hari setelah pengumuman keputusan mengenai akan dibagikannya Dividen Interim.
2. Setiap pengangkatan/pengangkatan kembali Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilakukan pengangkatan secara individual (dilakukan voting satu per satu).
3. Risalah keputusan RUPS dipublikasikan pada hari kerja berikutnya.
4. Profil Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik dipublikasikan sebelum dilakukan penunjukan di RUPS.
5. Ada maupun tidak ada transaksi saham Perseroan oleh Direksi/Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan (tidak hanya kepemilikan saham saja).
6. Menambahkan klausul dalam kebijakan tertentu yang mewajibkan Komite yang terdiri dari Komisaris Independen untuk melakukan review materi Transaksi Pihak Terkait untuk menentukan apakah transaksi tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
7. Sebaiknya ada kebijakan mengenai pinjaman yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan ketentuan yang wajar (*arm's length*).

REKOMENDASI UNTUK PART B: *SUSTAINABILITY AND RESILIENCE*

Dari *self assesment* yang dilakukan terhadap part B (*Sustainability and Resilience*), KIM Consult merekomendasikan:

1. Sebaiknya ada kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja Perseroan di luar ukuran keuangan jangka pendek (program jangka panjang).

REKOMENDASI UNTUK PART C: *DISCLOSURE AND TRANPARENCY*

Dari *self assesment* yang dilakukan terhadap part C (*Disclosure and Tranparency*), KIM Consult merekomendasikan:

1. Disarankan dalam Laporan Tahunan ditambahkan pengungkapan mengenai ada/tidak adanya kepemilikan saham oleh Senior Management (pejabat 1 tingkat dibawah Direksi);

RECOMMENDATIONS FOR PART A: RIGHTS OF SHAREHOLDERS

From the self-assessment carried out on part A (Rights and Equitable Treatment of Shareholders), KIM Consult recommends:

1. Every dividend payment refers to: Final Dividend is paid no later than 30 days after the decision of the Annual GMS. Interim Dividends are paid no later than 30 days after the announcement of the decision regarding the distribution of Interim Dividends.
2. Every appointment/reappointment of the Board of Directors and/or Board of Commissioners is carried out individually (voted one by one).
3. Minutes of GMS decisions are published on the following working day.
4. The profile of the Public Accountant/Public Accounting Firm is published before the appointment is made at the GMS.
5. Whether or not there are transactions in Company shares by the Directors/Board of Commissioners are disclosed in the Annual Report (not just share ownership).
6. Add a clause in certain policies that requires a Committee consisting of Independent Commissioners to review Related Party Transaction material to determine whether the transaction is in the best interests of the company and shareholders.
7. There should be a policy regarding loans given to the Board of Directors and Board of Commissioners with reasonable terms (arm's length).

RECOMMENDATIONS FOR PART B: SUSTAINABILITY AND RESILIENCE

From the self-assessment carried out on part B (Sustainability and Resilience), KIM Consult recommends:

1. There should be a reward/compensation policy that takes into account the Company's performance beyond short-term financial measures (long-term program).

RECOMMENDATIONS FOR PART C: DISCLOSURE AND TRANPARENCY

From the self-assessment carried out on part C (Disclosure and Transparency), KIM Consult recommends:

1. It is recommended that the Annual Report add disclosure regarding the presence/absence of share ownership by Senior Management (officials 1 level below the Board of Directors);

2. Disarankan dalam Laporan Tahunan ditambahkan pengungkapan mengenai statement lebih spesifik bahwa "berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun menunjukan adanya "tingkat kepatuhan terhadap kebijakan Tata Kelola Perusahaan sangat baik" misalnya;
3. Sebaiknya dalam Laporan Tahunan ditambahkan pengungkapkan khusus mengenai ada/tidak adanya insider trading.
4. Sebaiknya mengungkapkan alamat lengkap Investor Relation baik di Laporan Tahunan atau Website.

REKOMENDASI UNTUK PART D: *RESPONSIBILITIES OF THE BOARD*

Dari *self assesment* yang dilakukan terhadap part D (*Responsibilities of the Board*), KIM Consult merekomendasikan:

1. Sebaiknya dalam Anggaran Dasar atau *Board Manual* ditambahkan ayat mengenai masa jabatan Komisaris Independen 2 periode (atau 9 tahun).
2. Upayakan tingkat kehadiran masing-masing Direksi dalam Rapat Direksi minimal 75%.
3. Ketentuan Kuorum Rapat sebaiknya 3/4 (75%), dan dalam Laporan Tahunan juga sebaiknya dilengkapi pengungkapan Kuorum Rapat Direksi maupun Dewan Komisaris.
4. Sebaiknya bahan-bahan mata acara Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris diberikan kepada peserta Rapat selambatnya 5 hari kerja sebelum Rapat.
5. Sebaiknya ada pengungkapan kebijakan mengenai standar yang terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja dari Direksi maupun eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan (misalnya bonus yang ditangguhkan).
6. Perlu ada kebijakan (Anggaran Dasar atau *Board Manual*) atau setidaknya diungkapkan dalam Lapran Tahunan mengenai tugas dan tanggung jawab Komiaris Utama.
7. Dalam hal Komisaris Utama adalah non-Independen, maka sebaiknya dari 2 Komisaris Independen salah satunya harus ditunjuk sebagai *Leader/Senior* Komisaris Independen yang diungkapkan di Laporan Tahunan.
8. Sebaiknya ada pengungkapan dalam Laporan Tahunan secara spesifik mengenai proses perencanaan suksesi Direktur Utama /CEO dan manajemen inti.
9. Sebaiknya ada pengungkapan dalam Laporan Tahunan mengenai penilaian khusus terhadap CEO/ Direktur Utama termasuk kriteria penilaian.

2. It is recommended that in the Annual Report, disclosure regarding a more specific statement be added that "based on the results of assessments carried out every year, it shows that there is a "very good level of compliance with Corporate Governance policies" for example;
3. It is recommended that the Annual Report add special disclosure regarding the presence/absence of insider trading.
4. It is best to disclose the complete address of Investor Relations either in the Annual Report or on the Website.

RECOMMENDATIONS FOR PART D: RESPONSIBILITIES OF THE BOARD

From the self-assessment carried out on part D (Responsibilities of the Board), KIM Consult recommends:

1. It is recommended that the Articles of Association or Board Manual add a paragraph regarding the term of office of an Independent Commissioner of 2 terms (or 9 years).
2. Strive for the attendance level of each Director at the Directors' Meeting to be at least 75%.
3. The meeting quorum requirement should be 3/4 (75%), and the Annual Report should also include disclosure of the Board of Directors and Board of Commissioners' meeting quorum.
4. It is recommended that agenda materials for the Board of Directors Meeting and Board of Commissioners Meeting be given to Meeting participants no later than 5 working days before the Meeting.
5. There should be policy disclosure regarding measurable standards to align performance-based remuneration of Directors and senior executives with the long-term interests of the company (for example deferred bonuses).
6. There needs to be a policy (Articles of Association or Board Manual) or at least disclosed in the Annual Report regarding the duties and responsibilities of the Main Commissioner.
7. In the event that the Main Commissioner is non-Independent, it is advisable that one of the 2 Independent Commissioners be appointed as Leader/ Senior Independent Commissioner as disclosed in the Annual Report.
8. There should be specific disclosures in the Annual Report regarding the succession planning process for the President Director/CEO and core management.
9. There should be disclosure in the Annual Report regarding the special assessment of the CEO/President Director including the assessment criteria.

REKOMENDASI LEVEL 2, *BONUS and PENALTY*

1. Pemanggilan RUPS disertai dengan perincian agenda dan penjelasan masing-masing agenda dilakukan 28 hari sebelum RUPS.
2. Laporan Keberlanjutan sebaiknya divalidasi oleh Pihak Eksternal Independen.
3. Disarankan Whistleblowing System ditangani oleh Pihak Eksternal yang Independen.
4. Disarankan publikasi Laporan Keuangan Tahunan dipublikasikan paling lambat akhir Februari (60 hari setelah tutup buku).
5. Disarankan diangkat 1 atau lebih Komisaris Independen Perempuan.
6. Disarankan proses penjaringan kandidat Direksi/Komisaris dilakukan oleh lembaga eksternal yang independen (*head hunter*).

Sedangkan untuk items *Penalty*, KIM Consult menyampaikan agar Perseroan tetap menghindari hal-hal yang sebelumnya telah dihindari dan berdampak terhadap *penalty* (pengurangan nilai).

LEVEL 2 RECOMMENDATIONS, BONUS and PENALTY

1. The summons for the GMS accompanied by detailed agendas and explanations for each agenda item shall be made 28 days before the GMS.
2. Sustainability Reports should be validated by Independent External Parties.
3. It is recommended that the Whistleblowing System be handled by an Independent External Party.
4. It is recommended that the Annual Financial Report be published no later than the end of February (60 days after closing the books).
5. It is recommended that 1 or more female independent commissioners be appointed.
6. It is recommended that the selection process for Directors/Commissioners candidates be carried out by an independent external institution (head hunter).

Meanwhile, for Penalty items, KIM Consult said that the Company should continue to avoid things that had previously been avoided and had an impact on penalties (reduction in value).

Assessment GCG Tahun Buku 2022

Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022: Hasil, Rekomendasi, dan Tindak Lanjutnya di Tahun 2023
Penilaian penerapan GCG periode 2022 berhasil memperoleh skor sebesar 95,02% dengan predikat "Sangat Baik".

GCG Assessment for Fiscal Year 2022

Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2022: Results, Recommendations and Follow-up in 2023
The assessment of GCG implementation for the 2022 period succeeded in obtaining a score of 95.02% with the predicate "Very Good".

***Assessment* Penerapan GCG Tahun Buku 2022**
Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2022

Jenis Penilaian Type of Assessment	:	*Self Assessment*/Penilaian Mandiri
Penilai Pendamping Appraiser	:	Kim Consult
Periode Penerapan Implementation Period	:	2022
Tahun Ukur Measurement Year	:	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 January 1, 2022 to December 31, 2022
Tempat Venue	:	Kantor Pusat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Head Office of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Waktu Pengukuran Measurement Time	:	30 Januari – 31 Maret 2023 January 30 – March 31, 2023

Hasil Penilaian GCG Tahun 2022
GCG Assessment Results 202

Aspek Pengujian GCG GCG Assessment Aspects	Bobot Weight	Capaian Tahun 2022 Achievements in 2022		Penjelasan Description
		Skor Score	Pencapaian Achievement	
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	6,94	99,19%	Sangat Baik Very good
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	7,79	86,58%	Sangat Baik Very good
Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,00	34,90	99,72%	Sangat Baik Very good
Direksi Board of Directors	35,00	33,88	96,81*	Sangat Baik Very good
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	9,00	99,95%	Sangat Baik Very good
Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	2,50	-	Sangat Baik Very good
Total Skor Total Score	**100,00**	**95,02**	**95,02%**	**Sangat Baik Very good**
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG Classification of GCG Implementation Quality		**Sangat Baik Very good**		

Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Assessment GCG tahun buku 2022 menghasilkan 35 rekomendasi atau area of improvement (AoI) yang harus ditindaklanjuti. Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan telah menindaklanjuti setiap rekomendasi.

Recommendations and Follow-up
The GCG Assessment for fiscal year 2022 resulted in 35 recommendations or areas of improvement (AoI) that must be followed up. Until the end of 2023, the Company has followed up on each recommendation.

No	Rekomendasi Recommendation	Status Tindak Lanjut Follow-up Status	Periode Tindak Lanjut Follow-up Period	Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti Form of Follow-up/Reasons for Not Yet Followed Up
Aspek 1: Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Aspect 1: Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance				

No	Rekomendasi Recommendation	Status Tindak Lanjut Follow-up Status	Periode Tindak Lanjut Follow-up Period	Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti Form of Follow-up/Reasons for Not Yet Followed Up
1	Perseroan agar memastikan seluruh rekomendasi atas assessment GCG (area of improvement) dapat ditindaklanjuti. The Company must ensure that all recommendations for GCG (area of improvement) assessments can be followed up.	√	2022/2023	Perseroan telah mengirimkan: 1. Surat Nomor SK.01.02/7/7/1/SKPR/DIRUT/IKT-23 pada tanggal 07 Juli 2023 perihal Penyampaian Laporan Penilaian GCG dan Temuan Area of Improvement AOI Tahun Buku 2022 kepada Dewan Komisaris; 2. Surat Nomor SK.01.02/17/7/1/SKPR/DIRUT/IKT-23 pada tanggal 17 Juli 2023 perihal Penyampaian Laporan Penilaian GCG dan Temuan Area of Improvement AOI Tahun Buku 2022 kepada Pemegang Saham Mayoritas. The Company has sent: 1. Letter Number SK.01.02/7/7/1/SKPR/DIRUT/IKT-23 dated 07 July 2023 regarding Submission of GCG Assessment Report and AOI Area of Improvement Findings for Financial Year 2022 to the Board of Commissioners; 2. Letter Number SK.01.02/17/7/1/SKPR/DIRUT/IKT-23 dated 17 July 2023 regarding Submission of GCG Assessment Report and AOI Area of Improvement Findings for Financial Year 2022 to Majority Shareholders.
Aspek 2: Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Aspect 2: Shareholders and GMS/Capital Owners				
1	Pemegang Saham agar menetapkan anggota Direksi yang definitive oleh RUPS/Pemilik Modal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir. Shareholders are required to appoint definitive members of the Board of Directors by the GMS/Capital Owners no later than 30 (thirty) days after the term of office ends.	√	2022/2023	Pada pelaksanaan RUPS tahun 2023 yang memuat pergantian Direksi, Pemegang Saham selalu menetapkan anggota Direksi yang definitive disaat bersamaan dengan pemberhentian Direksi. At the AGM in 2023, which included the replacement of the Board of Directors, the Shareholders always appointed definitive members of the Board of Directors at the same time as the dismissal of the Board of Directors.

No	Rekomendasi Recommendation	Status Tindak Lanjut Follow-up Status	Periode Tindak Lanjut Follow-up Period	Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti Form of Follow-up/Reasons for Not Yet Followed Up
2	Pemegang Saham agar mengisi jabatan Direksi yang kosong untuk menyesuaikan jumlah Direksi dengan kebutuhan Perseroan. Shareholders are required to fill vacant Director positions to adjust the number of Directors to the Company's needs.	√	2022/2023	Pada tahun 2023, terhadap jabatan Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis yang kosong dirangkap jabatannya oleh Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 45 tanggal 18 April 2023 dibuat oleh dan di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi RI tanggal berdasarkan surat Nomor: AHU-AH.01.09-0117443 tanggal 9 Mei 2023 juncto Risalah Rapat Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tanggal 17 Juli 2023. In 2023, the vacant position of Commercial and Business Development Director was concurrently held by the President Director as stipulated in the Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders Number 45 dated 18 April 2023 made by and before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, as notification of changes in company data has been received and recorded in the Legal Entity Administration system of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated based on letter Number: AHU-AH.01.09-0117443 dated 9 May 2023 juncto Minutes of the Meeting of the Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dated 17 July 2023.
3	Pemegang Saham agar mengatur mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap yang menimbulkan benturan kepentingan, yang pengunduran diri tersebut paling lambat 30 hari sejak terjadi perangkapan jabatan. Shareholders are required to arrange a mechanism for resignation from Concurrent Position s which creates a conflict of interest, with such resignation no later than 30 days after the Concurrent Position occurs.	√	2022/2023	Mekanisme pengunduran diri dari oleh sebab apapun telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. The mechanism for resignation from any cause is regulated in the Company's Articles of Association.

No	Rekomendasi Recommendation	Status Tindak Lanjut Follow-up Status	Periode Tindak Lanjut Follow-up Period	Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti Form of Follow-up/Reasons for Not Yet Followed Up
4	Pemegang Saham agar memuat alasan pemberhentian dalam Keputusan RUPS terkait pemberhentian anggota Direksi. Shareholders must include the reasons for dismissal in the GMS Resolution regarding the dismissal of members of the Board of Directors.	√	2022/2023	Pada RUPS tahun 2023, telah termuat alasan pemberhentian dalam Keputusan RUPS terkait pemberhentian anggota Direksi, yang disebabkan oleh adanya alih tugas dalam Group, sebagaimana dimuat dalam Akta Risalah RUPS LB No. 44 Tanggal 18 April 2023, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., di Jakarta Selatan. At the GMS in 2023, the reason for dismissal was stated in the GMS Resolution related to the dismissal of members of the Board of Directors, due to the transfer of duties within the Group, as stated in the Deed of Minutes of LB GMS No. 44 Dated 18 April 2023, made by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., in South Jakarta.
5	Pemegang Saham agar dalam Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris mengatur mengenai (a) penjaringan atau nominasi calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (b) penilaian bagi calon anggota Dewan Komisaris. Shareholders request that the Guidelines for the Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners regulate (a) the selection or nomination of candidates for members of the Board of Commissioners/Supervisory Board; (b) assessment of prospective members of the Board of Commissioners.	√	2022/2023	Mengikuti pedoman dari Pelindo Holding yaitu Peraturan Direksi Nomor: HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan Following the guidelines of Pelindo Holding, namely the Board of Directors Regulation Number: HK.01/16/2/SPAP/UTMA/PLND-24 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors / Executive Board and Board of Commissioners / Supervisory Board within the Company's Business Group.
6	Pemegang Saham agar mengatur terkait jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Shareholders must regulate the maximum number of positions on the Board of Commissioners and Supervisory Board that may be held by a member of the Board of Commissioners.	√	2022/2023	Mengikuti pedoman dari Pelindo Holding yaitu Peraturan Direksi Nomor: HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan Following the guidelines of Pelindo Holding, namely the Board of Directors Regulation Number: HK.01/16/2/SPAP/UTMA/PLND-24 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors / Executive Board and Board of Commissioners / Supervisory Board within the Company's Business Group.

No	Rekomendasi Recommendation	Status Tindak Lanjut Follow-up Status	Periode Tindak Lanjut Follow-up Period	Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti Form of Follow-up/Reasons for Not Yet Followed Up
7	Pemegang Saham agar menetapkan mengenai jabatan-jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan terkait jabatan Dewan Komisaris. Shareholders are required to determine positions that give rise to conflicts of interest related to the position of the Board of Commissioners.	√	2022/2023	Mengikuti pedoman dari Pelindo Holding yaitu Peraturan Direksi Nomor: HK.01/22/9/SPAP/UTMA/PLND-23 tentang Pedoman Tata Kelola Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. Following the guidelines of Pelindo Holding, namely the Board of Directors Regulation Number: HK.01/22/9/SPAP/UTMA/PLND-23 concerning Guidelines for Governance of Supporting Organs of the Board of Commissioners / Supervisory Board within the Company's Business Group.
8	Pemegang Saham agar menetapkan pedoman penyusunan RJPP. Shareholders are required to determine guidelines for preparing the RJPP.	√	2022/2023	Mengikuti pedoman dari Pelindo Holding yaitu Peraturan Direksi Nomor: HK.01/14/12/1/PRKP/UTMA/PLND-21 tentang Pedoman Penyusunan RJPP di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan Following the guidelines of Pelindo Holding, namely the Board of Directors Regulation Number: HK.01/14/12/1/PRKP/UTMA/PLND-21 concerning Guidelines for the Preparation of RJPP within the Company's Business Group.
9	Pemegang Saham agar menetapkan Pedoman Penyusunan RKAP. Shareholders to determine Guidelines for Preparing RKAP.	√	2022/2023	Mengikuti pedoman dari Pelindo Holding yaitu Peraturan Direksi Nomor: HK.01/11/3/1/PKPN/UTMA/PLND-22 tentang Pedoman Penyusunan RKAP, Pengendalian Anggaran dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. Following the guidelines of Pelindo Holding, namely the Board of Directors Regulation Number: HK.01/11/3/1/PKPN/UTMA/PLND-22 concerning Guidelines for Preparation of RKAP, Budget Control and Performance Reporting in the Company's Business Group Environment
10	Pemegang Saham agar memiliki sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu). Shareholders must have a system/guideline for assessing the performance of Directors (collegial and individual).	√	2022/2023	Mengikuti pedoman dari Pelindo Holding yaitu Peraturan Direksi Nomor: HK.01/11/3/1/PKPN/UTMA/PLND-22 tentang Pedoman Penyusunan RKAP, Pengendalian Anggaran dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan Following the guidelines of Pelindo Holding, namely the Board of Directors Regulation Number: HK.01/11/3/1/PKPN/UTMA/PLND-22 concerning Guidelines for Preparation of RKAP, Budget Control and Performance Reporting in the Company's Business Group Environment

No	Rekomendasi Recommendation	Status Tindak Lanjut Follow-up Status	Periode Tindak Lanjut Follow-up Period	Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti Form of Follow-up/Reasons for Not Yet Followed Up
11	Pemegang Saham agar memiliki sistem/ pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris (majelis), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. Shareholders must have a performance assessment system/guideline for the Board of Commissioners (assembly), which contains at least key performance indicators and success criteria.	√	2022/2023	Mengikuti pedoman dari Pelindo Holding yaitu Peraturan Direksi Nomor: HK.01/22/9/SPAP/UTMA/ PLND-23 tentang Pedoman Tata Kelola Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan Following the guidelines of Pelindo Holding, namely the Board of Directors Regulation Number: HK.01/22/9/SPAP/UTMA/PLND-23 concerning Guidelines for Governance of Supporting Organs of the Board of Commissioners / Supervisory Board within the Company's Business Group.
12	Pemegang Saham agar memiliki Pedoman gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris, di antaranya memuat tentang: (1) formula perhitungan gaji/ honorarium; (2) Formula perhitungan gaji/ honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang memperhatikan standar industri, kondisi persaingan usaha, atau kompleksitas usaha, serta ketersediaan Sumber Daya Manusia. Shareholders must have guidelines for salaries/honorariums, allowances and facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners, including: (1) salary/ honorarium calculation formulas; (2) Formula for calculating salary/honorarium, allowances, and facilities that consider industry standards, business competition conditions, or business complexity, as well as the availability of Human Capital.	√	2022/2023	Mengikuti pedoman dari Pelindo Holding yaitu Peraturan Direksi Nomor: HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/ PLND-24 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/ Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan Following the guidelines of Pelindo Holding, namely the Board of Directors Regulation Number: HK.01/16/2/SPAP/UTMA/PLND-24 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors / Executive Board and Board of Commissioners / Supervisory Board within the Company's Business Group.
13	Pemegang Saham agar memiliki Pedoman tantiem/insentif kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, di antaranya memuat tentang: (1) Formula perhitungan tantiem/insentif kinerja; (2) Formula perhitungan tantiem/insentif kinerja yang mempertimbangkan pencapaian target, tingkat kesehatan, dan faktor-faktor lain yang relevan (merit system). Shareholders must have guidelines for performance bonuses/incentives for the Board of Commissioners and Directors, which include: (1) Formula for calculating performance bonuses/incentives; (2) Performance bonus/ incentive calculation formula that considers target achievement, soundness level and other relevant factors (merit system).	√	2022/2023	Mengikuti pedoman dari Pelindo Holding yaitu Peraturan Direksi Nomor: HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/ PLND-24 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/ Dewan Pengurus dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan Following the guidelines of Pelindo Holding, namely the Board of Directors Regulation Number: HK.01/16/2/SPAP/UTMA/PLND-24 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors / Executive Board and Board of Commissioners / Supervisory Board within the Company's Business Group.

No	Rekomendasi Recommendation	Status Tindak Lanjut Follow-up Status	Periode Tindak Lanjut Follow-up Period	Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti Form of Follow-up/Reasons for Not Yet Followed Up
14	Pemegang Saham agar memiliki pedoman penyusunan laporan tahunan (annual report) dan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Pemegang Saham/RUPS. Shareholders must have guidelines for preparing annual reports and reports on the supervisory duties of the Board of Commissioners as determined by the Shareholders/GMS.	√	2022/2023	Mengikuti pedoman dari Pelindo Holding yaitu Peraturan Direksi Nomor: HK.01/22/9/SPAP/UTMA/PLND-23 tentang Pedoman Tata Kelola Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan Following the guidelines of Pelindo Holding, namely the Board of Directors Regulation Number: HK.01/22/9/SPAP/UTMA/PLND-23 concerning Guidelines for Governance of Supporting Organs of the Board of Commissioners / Supervisory Board within the Company's Business Group.
Aspek 3: Dewan Komisaris Aspect 3: Board of Commissioners				
1	Dewan Komisaris agar memasukkan dalam rencana kerja Dewan Komisaris terkait pembahasan kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga. The Board of Commissioners should include in the Board of Commissioners' work plan discussions regarding the Board of Directors' compliance with laws and regulations and agreements with third parties.	√	2022/2023	Telah dipenuhi rencana kerja dekom tahun 2023 The decommissioning work plan for 2023 has been fulfilled
2	Dewan Komisaris agar menindaklanjuti area of improvement hasil assessment/review GCG yang menjadi kewenangannya. The Board of Commissioners must follow up on areas of improvement resulting from GCG assessments/reviews which fall under its authority.	√	2022/2023	Telah dilakukan tindak lanjut atas AOI assessment GCG tahun 2022 Follow-up has been carried out on the AOI GCG assessment in 2022
Aspek 4: Direksi Aspect 4: Board of Directors				
1	Perseroan agar segera melakukan penempatan karyawan sehingga tidak terdapat kekosongan jabatan. The company must immediately place employees so that there are no vacancies.	√	2022/2023	Pada tahun 2023 jabatan-jabatan yang kosong Perseroan telah melakuan penempatan karyawan sebagai berikut: • Kepala Satuan Pengawas Internal; serta • Senior Manager SDM dan Umum. In 2023, the Company has made the following employee placements for vacant positions: • Head of Internal Supervisory Unit; and • Senior Manager of Human Resources and General Affairs.

No	Rekomendasi Recommendation	Status Tindak Lanjut Follow-up Status	Periode Tindak Lanjut Follow-up Period	Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti Form of Follow-up/Reasons for Not Yet Followed Up
2	Perseroan agar mendorong Pemegang Saham untuk dapat melibatkan manajemen IPCC dalam hal penempatan karyawan pada setiap level jabatan sehingga tingkat obyektivitas dan transparansi dapat terpenuhi The Company encourages Shareholders to involve IPCC management in the placement of employees at each position level so that the level of objectivity and transparency can be met	√	2022/2023	Dalam proses pengisian jabatan kosong dalam Perseroan, Manajemen mengirimkan surat usulan pengisian jabatan kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk penempatan/ penugasan karyawan secara definitif. In the process of filling vacant positions in the Company, Management sends a proposal letter to the Majority Shareholder for definitive placement/assignment of employees.
3	Direksi agar melakukan peninjauan terhadap Kebijakan remunerasi secara komprehensif dan disempurnakan secara berkala (periode tertentu). The Board of Directors should review the remuneration policy comprehensively and refine it periodically (certain period).	√	2022/2023	Pada tahun buku 2023, Perseroan tidak melakukan peninjauan terhadap Kebijakan remunerasi, namun demikian peninjauan terhadap Kebijakan remunerasi dilakukan secara berkala oleh Perseroan setiap 2 tahun sekali atau terakhir telah dilakukan pada tahun 2022, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: HK.56.2.7/IKT-22 tentang Insentif Produktivitas Pekerja di Lingkungan PT Indoenesia Kendaraan Terminal Tbk. Sehingga peninjauan terhadap kebijakan remunerasi akan dilaksanakan pada tahun buku 2024 In the financial year 2023, the Company did not conduct a review of the remuneration policy, however, the review of the remuneration policy is carried out periodically by the Company every 2 years or the last one was carried out in 2022, with the issuance of the Decree of the Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number: HK.56.2.7/IKT-22 concerning Worker Productivity Incentives within PT Indoenesia Kendaraan Terminal Tbk. Therefore, the review of the remuneration policy will be conducted in the financial year 2024
4	Direksi agar menerbitkan internal control report yang mencakup: a. pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai. b. penilaian atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku perusahaan. The Board of Directors must issue an internal control report which includes: a. a statement that management is responsible for establishing and maintaining an adequate internal control structure and financial reporting procedures. b. assessment of the effectiveness of the internal control structure and financial reporting procedures at the end of the company's fiscal year.	√	2022/2023	a. Internal Control Report diterbitkan pada setiap triwulan dalam bentu Laporan Manajemen yang disampaikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris; a. Internal Control Report is published quarterly in the form of a Management Report submitted and approved by the Board of Commissioners;

No	Rekomendasi Recommendation	Status Tindak Lanjut Follow-up Status	Periode Tindak Lanjut Follow-up Period	Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti Form of Follow-up/Reasons for Not Yet Followed Up
5	Perseroan agar memiliki kebijakan terkait metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan. The company must have a policy regarding assessment methods to measure employee satisfaction.	√	2022/2023	Pada Tahun 2023, telah melaksanakan survei kepuasan karyawan pada tanggal 19 Desember 2023 s/d 10 Januari 2024 dengan hasil indeks kepuasan karyawan adalah sebesar 4,40 dengan kategori sangat puas dan meningkat 0,02 poin jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022. In 2023, an employee satisfaction survey was conducted on 19 December 2023 to 10 January 2024 with the result that the employee satisfaction index was 4.40 with a very satisfied category and an increase of 0.02 points when compared to the achievement in 2022.
6	Perseroan agar memiliki kebijakan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sebagai penjabaran Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Companies must have policies regarding corporate social and environmental responsibility, as an elaboration of Article 74 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.	√	2022/2023	Perseroan memiliki Pedoman Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: HK.56/9/15/IKT-17. The Company has a Guideline for Activity Management and Social and Environmental Responsibility through the Decree of the Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number: HK.56/9/15/IKT-17.
7	Perseroan agar memiliki kebijakan pembinaan usaha kecil. The company must have a small business development policy.	√	2022/2023	Perseroan belum memiliki kebijakan pembinaan usaha kecil. The Company does not yet have a small business development policy.
8	Perseroan agar memiliki rencana kerja untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan, yang termuat dalam RKAP. The company must have a work plan to implement corporate social responsibility, which is contained in the RKAP.	√	2022/2023	Pada tahun buku 2023 Perseroan menganggarakan Rp.1.575.000.000 untuk menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, dengan realisasi Rp.1.524.980.080 atau terealisasi sebesar 96,8% dari RKAP. In fiscal year 2023, the Company budgeted Rp.1,575,000,000 to be part of corporate social responsibility, with a realisation of Rp.1,524,980,080 or 96.8% of the RKAP.

No	Rekomendasi Recommendation	Status Tindak Lanjut Follow-up Status	Periode Tindak Lanjut Follow-up Period	Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti Form of Follow-up/Reasons for Not Yet Followed Up
9	Perseroan agar menganggarkan Rencana kerja implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan bukan sebagai distribusi laba. Companies should budget for the work plan for implementing corporate social responsibility in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), and not as profit distribution.	√	2022/2023	Untuk tahun buku 2023, Perseroan masih mengambil bagian dari taksasi laba bersih Perseroan pada tahun 2022 sebanyak 2,5% sebagai biaya anggaran untuk program tanggung jawab sosial perusahaan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) For the financial year 2023, the Company still takes part of the estimated net profit of the Company in 2022 as much as 2.5% as budget costs for corporate social responsibility programmes in the Company's Work Plan and Budget (RKAP)
10	Perseroan agar melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial sesuai dengan rencana yang ditetapkan. The Company must carry out social responsibility activities in accordance with established plans.	√	2022/2023	Pada tahun 2023 Perseroan memiliki program kegiatan tanggung jawab sosial sebanyak 32 program yang seluruhnya telah dilaksanakan sebagaimana disampaikan dalam Laporan Manajemen pada setiap triwulan yang disetujui oleh Dewan Komisaris In 2023, the Company has a social responsibility programme of 32 programmes, all of which have been implemented as submitted in the quarterly Management Report approved by the Board of Commissioners.
11	Perseroan agar melakukan evaluasi atas pencapaian indikator keberhasilan CSR dengan target-targetnya. Companies should evaluate the achievement of CSR success indicators with their targets.	√	2022/2023	Sebagaimana disampaikan dalam laporan keuangan audited 2023, dalam KPI Perseroan, capaian target CSR adalah 100% As stated in the 2023 audited financial report, in the Company's KPI, the CSR target achievement is 100%.
12	Perseroan agar menyesuaikan jumlah tenaga auditor dengan kebutuhan Perseroan. The Company must adjust the number of auditors to the Company's needs.	√	2022/2023	Perseroan telah menyesuaikan jumlah tenaga auditor dengan kebutuhan Perseroan, dimana telah dilakukan penempatan karyawan di Divisi SPI sebanyak 2 orang pada posisi Auditor/Jr. Auditor The Company has adjusted the number of auditors to the needs of the Company, where 2 employees have been placed in the SPI Division in the position of Auditor/Jr. Auditor
Aspek 5: Pengungkapan Informasi dan Transparansi Aspect 5: Information Disclosure and Transparency				
1	Perseroan agar memuat dalam Laporan Tahunan, Struktur Organisasi dalam bentuk bagan meliputi nama dan jabatan. The Company must include in its Annual Report the Organizational Structure in chart form including names and positions.	√	2022/2023	Telah ditindaklanjuti dalam pembuatan Laporan Tahunan 2023 Has been followed up in the preparation of the 2023 Annual Report

No	**Rekomendasi** Recommendation	**Status Tindak Lanjut** Follow-up Status	**Periode Tindak Lanjut** Follow-up Period	**Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti** Form of Follow-up/Reasons for Not Yet Followed Up
2	Perseroan agar memuat dalam Laporan Tahunan, Jumlah Karyawan untuk masing-masing level organisasi. The Company must include in its Annual Report the Number of Employees for each level of the organization.	√	2022/2023	Telah ditindaklanjuti dalam pembuatan Laporan Tahunan 2023 Has been followed up in the preparation of the 2023 Annual Report
3	Perseroan agar memuat dalam Laporan Tahunan, Pelatihan Karyawan yang telah dan akan dilakukan. The Company must include in its Annual Report the employee training that has been and will be carried out.	√	2022/2023	Telah ditindaklanjuti dalam pembuatan Laporan Tahunan 2023 Has been followed up in the preparation of the 2023 Annual Report
Aspek 6: Aspek Lainnya Aspect 6: Other Aspects				
1	Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. There are deviations from the principles of good corporate governance.	x/√	2022/2023	Pada tahun 2023, Perseroan tidak memiliki catatan berupa teguran baik dari otoritas pemerintah ataupun regulator terhadap penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. In 2023, the Company had no record of reprimands from either government or regulatory authorities for deviations from the principles of Good Corporate Governance.

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Perseroan terus berupaya dalam memenuhi rekomendasi Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pada Surat Edaran No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola merupakan standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang harus diterapkan Perseroan untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola. Berikut uraian penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka di lingkup IPCC:

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE ASPECTS AND PRINCIPLES IN ACCORDANCE WITH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY PROVISIONS

The Company continues to strive to fulfill the recommendations of OJK Regulation no. 21/POJK.04/2014 concerning Guidelines for Implementing Public Company Governance and OJK Circular Letter No. 32/ SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines.

In Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines includes 5 (five) aspects, 8 (eight) principles and 25 (twenty five) recommendations for implementing aspects and principles of good corporate governance. Recommendations for implementing aspects and principles of good corporate governance in the Governance Guidelines are standards for implementing aspects and principles of good corporate governance that must be implemented by the Company to implement governance principles. The following is a description of the implementation of the Public Company Governance Guidelines within the scope of the IPCC:

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	
1	**Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham;** Aspect 1: Public Company Relationship with Shareholders in Guaranteeing Shareholder Rights;		
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS Principle 1 Increasing the Value of Holding GMS	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Public Companies have technical methods or procedures for collecting votes, both openly and privately, that prioritize independence and the interests of shareholders.	
		Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS.	
		Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. A summary of the GMS minutes is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.	

	Keterangan Rekomendasi OJK Description of OJK Recommendations	Penjelasan Penerapan di IPCC Explanation of Implementation in the IPCC
	Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara *(voting)* tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan *electronic voting*. Each share with voting rights issued has one voting right (one share one vote). Shareholders can use their voting rights when making decisions, especially when making decisions by collecting votes. However, the decision-making mechanism by means of voting, both openly and privately, has not been regulated in detail. Public Companies are recommended to have voting procedures in making decisions on a GMS agenda. The voting procedure must maintain the independence or freedom of shareholders. For example, voting is done openly by raising hands in accordance with the choice instructions offered by the chairman of the GMS. Meanwhile, closed voting is carried out on decisions that require confidentiality or at the request of shareholders, by using voting cards or by using electronic voting.	Telah terpenuhi. RUPS Tahunan Perseroan dilakukan secara sirkuler sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Comply. The Company's Annual GMS is conducted circularly in accordance with the procedures regulated in the Company's Articles of Association.
	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS. The presence of all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of Public Companies aims to ensure that each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners can pay attention to, explain and answer directly problems that occur or questions raised by shareholders regarding the agenda at the GMS.	Telah terpenuhi. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menghadiri RUPS Tahunan yang diselenggarakan tanggal 27 Juni 2023 Comply. All members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners attended the Annual GMS which was held on June 27, 2023
	Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut. Public Companies are required to prepare a summary of the minutes of the GMS in Indonesian and a foreign language (at least in English), and announce it 2 (two) working days after the GMS is held to the public, one of which is via the Public Company Website. The availability of a summary of the GMS minutes on the Public Company Website provides an opportunity for shareholders who are not present to obtain important information in holding the GMS easily and quickly. Therefore, the provisions regarding the minimum period for the availability of a summary of the GMS minutes on the Website are intended to provide sufficient time for shareholders to obtain this information.	Telah terpenuhi. Ringkasan risalah RUPS selama 3 tahun terakhir tersedia di situs resmi Perseroan: www.indonesiacarterminal.co.id/risalahrups-ringkasan-risalah-rups Comply A summary of the minutes of the GMS for the last 3 years is available on the Company's official website: www.indonesiacarterminal.co.id/risalahrups-ringkasan-risalah-rups

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	
	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2 Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Public Companies have a communication policy with shareholders or investors.	
		Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. The Public Company discloses the Public Company's communication policy with shareholders or investors on the Website.	
II	**Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris** Aspect 2: Functions and Roles of the Board of Commissioners		
	Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Principle 3 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determining the number of members of the Board of Commissioners considering the conditions of the Public Company.	

	Keterangan Rekomendasi OJK Description of OJK Recommendations	Penjelasan Penerapan di IPCC Explanation of Implementation in the IPCC
	Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. There are the communication between Public Companies and shareholders or investors is intended to ensure that shareholders or investors gain a clearer understanding of information that has been published to the public, such as periodic reports, information disclosure, business conditions or prospects and performance, as well as Implementation of Public Company Governance . Apart from that, shareholders or investors can also submit input and opinions to the management of the Public Company. Communication policy with shareholders or investors shows the Public Company's commitment to implementing communication with shareholders or investors. This policy may include strategies, programs and timing for implementing communications, as well as guidelines that support shareholders or investors in participating in such communications.	Telah terpenuhi. Perseroan secara rutin menyelenggarakan rapat dengan para pemegang saham untuk memberikan informasi terkini tentang kondisi dan kinerja Perseroan. Comply The Company regularly holds meetings with shareholders to provide the latest information about the Company's condition and performance.
	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka. Disclosure of communication policies is a form of transparency regarding the Public Company's commitment to providing equality to all shareholders or investors regarding the implementation of communications. Disclosure of this information also aims to increase the participation and role of shareholders or investors in implementing Public Company communication programs.	Telah terpenuhi. Saat ini, Perseroan belum memiliki kebijakan yang dimaksud. Comply Currently, the Company does not yet have the policy in question.
	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. The number of members of the Board of Commissioners can influence the effectiveness of the implementation of the duties of the Board of Commissioners. Determining the number of members of the Board of Commissioners of a Public Company must refer to the provisions of applicable laws and regulations, consisting of at least 2 (two) people based on the provisions of OJK regulations concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. Apart from that, it is also necessary to consider the conditions of Public Companies, which include, among other things, characteristics, capacity and size, as well as achieving goals and meeting different business needs between Public Companies. However, the number of members of the Board of Commissioners that is too large has the potential to disrupt the effectiveness of the implementation of the Board of Commissioners' functions.	Telah terpenuhi. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 3 (tiga) orang. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris IPCC telah mempertimbangkan kondisi dan dinamika bisnis Perseroan. Comply The number of members of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2023 is 3 (three) people. The number and composition of the IPCC Board of Commissioners has taken into account the conditions and dynamics of the Company's business.

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	
		Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determining the composition of members of the Board of Commissioners considering the diversity of skills, knowledge and experience required.	
4	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4 Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.	
		Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Public Company's Annual Report.	

	Keterangan Rekomendasi OJK Description of OJK Recommendations	Penjelasan Penerapan di IPCC Explanation of Implementation in the IPCC
	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. The composition of the Board of Commissioners is a combination of characteristics both in terms of the organs of the Board of Commissioners and individual members of the Board of Commissioners, in accordance with the needs of the Public Company. These characteristics can be reflected in determining the skills, knowledge and experience required in carrying out supervisory duties and providing advice by the Board of Commissioners of a Public Company. A composition that consider the needs of Public Companies is a positive thing, especially regarding decision making in the context of implementing the supervisory function which is carried out by considering various broader aspects.	Telah terpenuhi. Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan sudah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Pengungkapan tersebut dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di dalam Laporan Tahunan ini. Comply. The composition of the members of the Company's Board of Commissioners has taken into account diversity of expertise, knowledge and experience. This disclosure can be seen in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.
	Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. *Self Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya *Self Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. The Board of Commissioners' Self Assessment Policy is a guideline used as a form of accountability for the collegial assessment of the Board of Commissioners' performance. Self Assessment or self-assessment is carried out by each member to assess the implementation of the performance of the Board of Commissioners in a collegial manner, and not to assess the individual performance of each member of the Board of Commissioners. With this Self Assessment, it is hoped that each member of the Board of Commissioners can contribute to improving the performance of the Board of Commissioners on an ongoing basis. This policy may include assessment activities carried out along with their aims and objectives, the timing of their implementation on a regular basis, and the benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations provided by the nomination and remuneration function of the Public Company, where the existence of this function is required in the Regulations. OJK regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.	Telah terpenuhi. Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan sudah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Pengungkapan tersebut dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di dalam Laporan Tahunan ini. Comply The composition of the members of the Company's Board of Commissioners has considered diversity of expertise, knowledge and experience. This disclosure can be seen in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.
	Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Dewan Komisaris. Disclosure of the Self Assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of their duties, but also, to provide confidence, especially to shareholders or investors regarding the efforts that need to be made to improve the performance of the Board of Commissioners. With this disclosure, shareholders or investors know the check and balance mechanism for the performance of the Board of Commissioners.	Telah terpenuhi. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh NRC. Comply The performance assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out by the NRC.

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	
		Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. 10. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.	
		Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. 11. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function prepares a succession policy in the Nomination process for members of the Board of Directors.	
III	**Aspek 3: FUNGSI DAN PERAN DIREKSI** Aspect 3: FUNCTION AND ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS		
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. 12. Determining the number of members of the Board of Directors consider the condition of the Public Company and effectiveness in decision making.	

	Keterangan Rekomendasi OJK Description of OJK Recommendations	Penjelasan Penerapan di IPCC Explanation of Implementation in the IPCC
	Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. The policy of resigning members of the Board of Commissioners who are involved in financial crimes is a policy that can increase stakeholders' trust in Public Companies, so that the company's integrity will be maintained. This policy is needed to help the legal process run smoothly and so that the legal process does not interfere with the running of business activities. Apart from that, from a morality perspective, this policy builds an ethical culture within the Public Company environment. These policies can be included in the Guidelines or Code of Conduct that apply to the Board of Commissioners. Furthermore, what is meant by being involved in a financial crime is the existence of a convicted member of the Board of Commissioners from the competent authority. Financial crimes include manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities as well as criminal acts of money laundering as intended in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.	Telah terpenuhi. Kebijakan penilaian (self-assessment) Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh NRC. Comply The self-assessment policy of the Board of Commissioners and Directors is determined by the NRC.
	Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan. Based on the provisions of the OJK Regulations concerning Nomination and Remuneration Committees for Issuers or Public Companies, the committee that carries out the nomination function has the task of formulating the policies and criteria required in the nomination process for prospective members of the Board of Directors. One policy that can support the nomination process as intended is the succession policy for members of the Board of Directors. The policy regarding succession aims to maintain the continuity of the leadership regeneration or cadre process in the company in order to maintain business continuity and the company's long-term goals.	Telah terpenuhi. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana telah diatur di dalam Board Manual Perseroan. Comply The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners as regulated in the Company's Board Manual
	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi. As a company organ with authority to manage the company, determining the number of Directors greatly influences the performance of a Public Company. Thus, determining the number of members of the Board of Directors must be carried out through careful consideration and must refer to the provisions of applicable laws and regulations, which based on OJK Regulations regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies consists of at least 2 (two) people. Apart from that, determining the number of Directors must be based on the need to achieve the aims and objectives of the Public Company and adjusted to the conditions of the Public Company, including the characteristics, capacity and size of the Public Company as well as how effective the Board of Directors' decision making is achieved.	Telah terpenuhi. Jumlah anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 3 (tiga) orang. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris IPCC telah mempertimbangkan kondisi dan dinamika bisnis Perseroan. Comply The number of members of the Company's Board of Directors as of December 31, 2023 is 3 (three) people. The number and composition of the IPCC Board of Commissioners has taken into account the conditions and dynamics of the Company's business.

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	
		Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. 13. Determining the composition of members of the Board of Directors consider the diversity of skills, knowledge and experience required.	
		Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in the field of accounting.	

	Keterangan Rekomendasi OJK Description of OJK Recommendations	Penjelasan Penerapan di IPCC Explanation of Implementation in the IPCC
	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial. As with the Board of Commissioners, diversity in the composition of members of the Board of Directors is a combination of desirable characteristics both in terms of the Board of Directors and individual members of the Board of Directors, in accordance with the needs of the Public Company. This combination is determined by considering the appropriate skills, knowledge and experience in the division of duties and functions of the Board of Directors in achieving the goals of the Public Company. Thus, consideration of the combination of characteristics referred to will have an impact on the accuracy of the process of nominating and appointing individual members of the Board of Directors or collegial Directors.	Telah terpenuhi. Komposisi anggota Direksi Perseroan sudah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Pengungkapan tersebut dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini Comply The composition of the members of the Company's Board of Directors has taken into account the diversity of skills, knowledge and experience required. This disclosure can be seen in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.
	Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait. Financial Statement is a management accountability report for the management of resources owned by a Public Company, which must be prepared and presented in accordance with generally accepted Financial Accounting Standards in Indonesia and also related OJK regulations, including laws and regulations in the Capital Market sector that regulate regarding the presentation and disclosure of Public Company Financial Reports. Based on statutory regulations in the Capital Markets sector which regulate the responsibility of the Board of Directors for Financial Reports, the Board of Directors is jointly and severally responsible for the Financial Reports, which are signed by the President Director and members of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance. Thus, the disclosure and preparation of financial information presented in financial reports will greatly depend on the expertise and/or knowledge of the Board of Directors, especially members of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance. The existence of qualifications of expertise and/or knowledge in the field of accounting that at least members of the Board of Directors have can provide confidence in the preparation of Financial Reports, so that the Financial Reports can be relied upon by stakeholders as a basis for making economic decisions regarding the Public Company in question. These skills and/or knowledge can be proven by educational background, training certification and/or related work experience.	Telah terpenuhi. Perseroan memiliki anggota Direksi yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan. Penegasan ini dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, Sub Bab Profil Direksi, dalam Laporan Tahunan ini. Comply The Company has members of the Board of Directors who have competence in accounting or finance. This confirmation can be seen in the Company Profile Chapter, Directors Profile Sub-Chapter, in this Annual Report.

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	
6	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6 Improving the Quality of Implementation of Board of Directors' Duties and Responsibilities.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment)* untuk menilai kinerja Direksi. 15. The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.	
		Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment)* untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. 16. The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Directors is disclosed in the Public Company's annual report.	

	Keterangan Rekomendasi OJK Description of OJK Recommendations	Penjelasan Penerapan di IPCC Explanation of Implementation in the IPCC
	Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. *Self Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya *Self Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. As with the Board of Commissioners, the Directors' Self Assessment policy is a guideline used as a form of accountability for the collegial assessment of the Directors' performance. Self-assessment or self-assessment is carried out by each member of the Board of Directors to assess the implementation of the performance of the Board of Directors in a collegial manner, and not to assess the individual performance of each member of the Board of Directors. With this Self Assessment, it is hoped that each member of the Board of Directors can contribute to improving the performance of the Board of Directors on an ongoing basis. This policy may include assessment activities carried out along with their aims and objectives, the timing of their implementation on a regular basis, and the benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations provided by the nomination and remuneration function of the Public Company, where the establishment of this function has been required in the Regulations. OJK regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.	Telah terpenuhi. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh NRC. Comply The performance assessment of the Board of Commissioners and Directors is carried out by the NRC.
	Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Direksi. Disclosure of the Self Assessment policy on the performance of the Board of Directors is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of their duties, but also to provide important information regarding improvement efforts in the management of Public Companies. This information is very useful for providing confidence to shareholders or investors that there is certainty that company management will continue to be carried out in a better direction. With this disclosure, shareholders or investors know the check and balance mechanism for the performance of the Board of Directors.	Telah terpenuhi. Kebijakan penilaian (self-assessment) Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Comply The self-assessment policy of the Board of Commissioners and Directors is determined by the Nomination and Remuneration Committee

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	
		Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. 17. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes.	
IV	**Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan** Aspect 4: Stakeholder Participation		
	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7 Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading.* 18. Public Companies have policies to prevent insider trading.	
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud.* Public Companies have anti-corruption and anti-fraud policies.	

	Keterangan Rekomendasi OJK Description of OJK Recommendations	Penjelasan Penerapan di IPCC Explanation of Implementation in the IPCC
	Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. The policy of resigning members of the Board of Directors who are involved in financial crimes is a policy that can increase stakeholders' trust in Public Companies, so that the company's integrity will be maintained. This policy is needed to help the legal process run smoothly and so that the legal process does not interfere with the running of business activities. Apart from that, from a morality perspective, this policy will build an ethical culture within the Public Company environment. These policies can be included in the Guidelines or Code of Conduct that apply to the Board of Directors. Furthermore, what is meant by being involved in a financial crime is that a member of the Board of Directors has a convicted status from the authorized party. Financial crimes include manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities as well as criminal acts of money laundering as intended in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.	Telah terpenuhi. Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus yang berkaitan dengan aktivitas *insider trading*. Namun demikian dalam menjalankan usahanya Perseroan senantiasa mencegah adanya insider trading. Comply The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors as disclosed in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.
	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya *insider trading* tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien. A person who has inside information is prohibited from carrying out securities transactions using inside information as intended in the Law on Capital Markets. Public Companies can minimize the occurrence of insider trading through prevention policies, for example by strictly separating confidential data and/or information from public ones, as well as dividing duties and responsibilities for managing the information in question proportionally and efficiently.	Telah terpenuhi. Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus yang berkaitan dengan aktivitas *insider trading*. Namun demikian dalam menjalankan usahanya Perseroan senantiasa mencegah adanya insider trading. Comply The Company does not have a specific policy relating to insider trading activities. However, in carrying out its business, the Company always prevents insider trading.
	Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, *prudent*, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain Anti-corruption policies are useful for ensuring that Public Company business activities are carried out legally, prudently and in accordance with the principles of good governance. This policy can be part of a Code of Conduct , or in its own form. This policy may include, among other things, programs and procedures carried out to overcome corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Public Companies. The scope of the policy must describe the Public Company's prevention of all corrupt practices whether giving or receiving from other parties	Telah terpenuhi. Perseroan telah memiliki kebijakan tentang anti-korupsi dan anti-fraud sebagaimana telah diungkapkan pada Bab Tata Kelola Perusahaan, di Laporan Tahunan ini. Comply The Company has anti-corruption and anti-fraud policies as disclosed in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*. Public Companies have policies regarding the selection and improvement of supplier or vendor capabilities.	
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Public Companies have policies regarding the fulfillment of creditor rights.	
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. 22. Public Companies have a whistleblowing system policy.	

	Keterangan Rekomendasi OJK Description of OJK Recommendations	Penjelasan Penerapan di IPCC Explanation of Implementation in the IPCC
	Kebijakan tentang seleksi pemasok atau *vendor* bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor* bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau *vendor* dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas *output* perusahaan. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau *vendor*, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau *vendor*. Policies regarding supplier or vendor selection are useful for ensuring that Public Companies obtain the required goods or services at competitive prices and good quality. Meanwhile, the policy of increasing supplier or vendor capabilities is useful for ensuring that the supply chain runs efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors to supply/fulfill the goods or services required by the company will affect the quality of the company's output. Implementation of these policies can guarantee continuity of supply, both in terms of quantity and quality required by Public Companies. The scope of this policy includes criteria for selecting suppliers or vendors, transparent procurement mechanisms, efforts to increase the capabilities of suppliers or vendors, and fulfillment of rights related to suppliers or vendors.	Telah terpenuhi. Perseroan telah memiliki kebijakan tentang seleksi pemasok. Comply The Company has a policy regarding supplier selection
	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur. Policies regarding the fulfillment of creditors' rights are used as guidelines in making loans to creditors. The objectives of the policy in question is to ensure the fulfillment of rights and maintain creditors' trust in Public Companies. This policy includes considerations in entering into agreements, as well as follow-up actions in fulfilling the Public Company's obligations to creditors.	Telah terpenuhi. Perseroan telah memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Comply The Company has a policy regarding fulfilling creditor rights.
	Kebijakan sistem *whistle blowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan system tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem *whistle blowing* mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistle blowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. A well-drafted whistle blowing system policy will provide certainty of protection for witnesses or whistleblowers regarding indications of violations committed by employees or management of a Public Company. The implementation of this system policy will have an impact on the formation of a good corporate governance culture. The whistle blowing system policy covers, among other things, the types of violations that can be reported through the whistle blowing system, how to make complaints, protection and guarantee of confidentiality of the reporter, handling of complaints, parties who manage complaints, and the results of handling and follow-up on complaints.	Telah terpenuhi. Perseroan memiliki kebijakan sistem *whistleblowing* sebagaimana telah diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini. Comply The Company has a whistle blowing system policy as described in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan 23. Public Companies have a policy of providing long-term incentives to Board of Directors and employees	
V	**Aspek 5 : KETERBUKAAN INFORMASI** Aspek 5: INFORMATION DISCLOSURE		
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8 Improving the Implementation of Information Disclosure.	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. 24. Public Companies make wider use of information technology apart from Websites as a medium for information disclosure.	

	Keterangan Rekomendasi OJK Description of OJK Recommendations	Penjelasan Penerapan di IPCC Explanation of Implementation in the IPCC
	Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk menigkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada. Long-term incentives are incentives that are based on long-term performance achievements. Long-term incentive plans are based on the premise that the company's long-term performance is reflected by the growth in the value of shares or other long-term company targets. Long-term incentives are useful in order to maintain loyalty and provide motivation to Directors and employees to improve their performance or productivity which will have an impact on improving company performance in the long term. The existence of a long-term incentive policy is a real commitment of the Public Company to encourage the implementation of providing long-term incentives to Directors and Employees with terms, procedures and forms that are adapted to the long-term goals of the Public Company. The policy in question may include, among other things: the aims and objectives of providing long-term incentives, conditions and procedures for providing incentives, as well as conditions and risks that Public Companies must pay attention to when providing incentives. The policy may also be included in the Public Company's existing remuneration policy.	Telah terpenuhi. Perseroan memiliki kebijakan pemberian bonus dan tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Uraian lengkap mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan, sub-bab Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, di dalam Laporan Tahunan ini. Comply The Company has a policy of providing bonuses and bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners. A complete description of this can be seen in the Corporate Governance Chapter, sub-chapter Remuneration for Directors and Board of Commissioners, in this Annual Report.
	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan. The use of information technology can be useful as a medium for information disclosure. The information disclosure carried out is not only information disclosure that has been regulated in statutory regulations, but also other information related to Public Companies which is felt to be useful for shareholders or investors to know. By utilizing information technology more widely apart from websites, it is hoped that companies can increase the effectiveness of disseminating company information. However, the use of information technology still consider the company's benefits and costs.	Telah terpenuhi. Selain mengandalkan situs web Perseroan, IPCC juga menyampaikan laporan keterbukaan informasi secara patuh melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) IDX (dapat diakses dengan memasukkan kode saham: “IPCC”) dan e.KSEI. Comply Apart from relying on the Company’s website, IPCC also submits information disclosure reports compliantly through the IDX Electronic Reporting System (SPE) (can be accessed by entering the stock code: “IPCC”) and e.KSEI.

Penerapan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	
		Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. 25. The Public Company's Annual Report discloses the ultimate beneficial owner in Public Company share ownership of at least 5% (five percent), in addition to disclosure of the ultimate beneficial owner in Public Company share ownership through the major and controlling shareholders.	

	Keterangan Rekomendasi OJK Description of OJK Recommendations	Penjelasan Penerapan di IPCC Explanation of Implementation in the IPCC
	Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali. Laws and Regulations in the Capital Market sector which regulates the submission of annual reports of Public Companies has regulated the obligation to disclose information regarding shareholders who own 5% (five percent) or more shares of a Public Company as well as the obligation to disclose information regarding the major and controlling shareholders of Public Companies either directly or indirectly up to the last beneficial owner in ownership of the shares. In these Governance Guidelines it is recommended to disclose the ultimate beneficial owner of Public Company share ownership of at least 5% (five percent), in addition to disclosing the ultimate beneficial owner of share ownership by the major and controlling shareholders.	.....

INISIATIF STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN GCG

Perseroan terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan GCG melalui perbaikan dan pengembangan dengan mengacu pada standar terbaik nasional maupun global tentang penerapan GCG. Adapun upaya tersebut, antara lain:

- Penerapan GCG di Perusahaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan
- *Self Assessment* GCG yang dilaksanakan setiap tahun dengan didampingi oleh konsultan independen;
- Penerapan ISO 37001:2016 yang merupakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan:
- Optipmalisasi penerapan Whsitleblowing System.

Sosialisasi GCG dan Membangun *Awarness*

- Dilaksanakannya penandatanganan pakta integritas serta komitmen anti penyuapan antara IPCC dengan seluruh mitra dan customer Perseroan pada tanggal 17 November 2023.
- Sosialiasasi dan refreshment penerapan GCG di lingkup PT Pelabuhan Indonesia (Persero) qq IPCC melalui website https://pgood.pelindo.co.id/, yaitu website yang digunakan oleh Insan lingkup PT Pelabuhan Indonesia (Persero) qq IPCC sebagai alat untuk mempelajari, memahami, mengevaluasi pemahaman selluruh perkerja terhadap tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)
- Penandatanganan pakta integritas secara elektronik melalui sistem pgood dalam website https://pgood.pelindo.co.id/
- Pemantauan gratifikasi, pungli, dan WBS hingga Desember 2023 hasilnya nihil sebagaimana disampaikan dalam:
  a. Nota Dinas Nomor Nomor: PW.03/4/1/1/SKPR/SKPR-24 tanggal 04 Januari 2024, perihal Laporan Pelaksanaan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Gratifikasi, Pungutan Liar dan Whistle Blowing System di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk s/d Desember 2023, yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan sebagai Ketua Tim Unit Pengendali Gratifikasi kepad Direktur Utama;
  b. Surat Nomor HK.03/24/1/2/HUKM/SKPR/IKT-24 tanggal 24 Januari 2024, perihal Laporan Penerimaan dan Pemberian Suap Serta Gratifikasi Pada Hari Raya Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, yang disampaikan Perseroan kepada Pemegang Saham Mayoritas.

STRATEGIC INITIATIVES TO IMPROVE THE QUALITY OF GCG IMPLEMENTATION

The Company continues to strive to improve the quality of GCG implementation through improvement and development by referring to the best national and global standards regarding GCG implementation. These efforts include:

- Implementation of GCG in the Company in a sustainable and continuous manner
- GCG Self Assessment which is carried out every year accompanied by an independent consultant;
- Implementation of ISO 37001:2016 which is an Anti-Bribery Management System:
- Optimizing the implementation of the Whistleblowing System.

GCG Socialization and Building Awareness

- The signing of an integrity pact and anti-bribery commitment between the IPCC and all of the Company's partners and customers on November 17, 2023.
- Socialization and refreshment of GCG implementation within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) qq IPCC via the website https://pgood.pelindo.co.id/, which is a website used by personnel within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) qq IPCC as a tool for study, understand, evaluate the understanding of all employees regarding good corporate governance (Good Corporate Governance)
- Signing the integrity pact electronically via the pgood system on the website https://pgood.pelindo.co.id/
- Monitoring of gratuities, extortion and WBS until December 2023 has zero results as stated in:
  a. Service Memorandum Number: PW.03/4/1/1/SKPR/SKPR-24 dated January 4, 2024, regarding the Report on the Implementation of the System for Preventing and Controlling Gratification, Illegal Levies and the Whistle Blowing System in the Environment of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk until December 2023, submitted by the Corporate Secretary as Chair of the Gratification Control Unit Team to the President Director;
  b. Letter Number HK.03/24/1/2/HUKM/SKPR/IKT-24 dated January 24, 2024, regarding Reports on Receiving and Giving Bribes and Gratuities on Christmas Day 2023 and New Year 2024, which was submitted by the Company to the Majority Shareholders .

STRUKTUR DAN MEKANISME GCG

GCG STRUCTURE AND MECHANISMS

STRUKTUR GCG

Perusahaan didirikan dan diatur sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), di mana disebutkan bahwa struktur tata kelola Perseroan terdiri atas tiga organ utama yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Kolaborasi antar organ perusahaan yang optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan lain.

Masing-masing organ Perusahaan menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sehingga mampu menentukan arah dan kualitas dari kinerja Perseroan. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Komisaris dibantu dibantu oleh organ pendukung seperti Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sedangkan Direksi dibantu oleh organ pendukung seperti Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal.

Untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terpenuhinya asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Perusahaan terutama dari aspek keuangan, Peruahaan melakukan audit eksternal terhadap laporan keuangan Perusahaan. Audit eksternal ini dilakukan oleh Akuntan Publik dengan pemilihan melalui mekanisme organisasi yang berlaku. Hasil audit eksternal diharapkan mampu mencerminkan kinerja usaha secara obyektif sebagai faktor paling fundamental.

GCG STRUCTURE

The company was established and regulated in accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT), where it is stated that the Company's governance structure consists of three main organs, namely the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors. Optimal collaboration between company organs in carrying out their duties, functions and responsibilities for the benefit of the Company is carried out in accordance with the provisions of the Laws, Articles of Association and other provisions.

Each Company organ carries out its duties, functions and responsibilities so that it is able to determine the direction and quality of the Company's performance. In carrying out its functions, the Board of Commissioners is assisted by supporting organs such as the Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee. Meanwhile, the Board of Directors is assisted by supporting organs such as the Corporate Secretary and Internal Audit.

To fulfill compliance with applicable laws and regulations as well as fulfill the principles of transparency and accountability in Company management, especially from the financial aspect, the Company carries out an external audit of the Company's financial reports. This external audit is carried out by Public Accountants by selection through the applicable organizational mechanisms. The results of external audits are expected to objectively reflect business performance as the most fundamental factor.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan IPCC
IPCC Corporate Governance Organ Structure

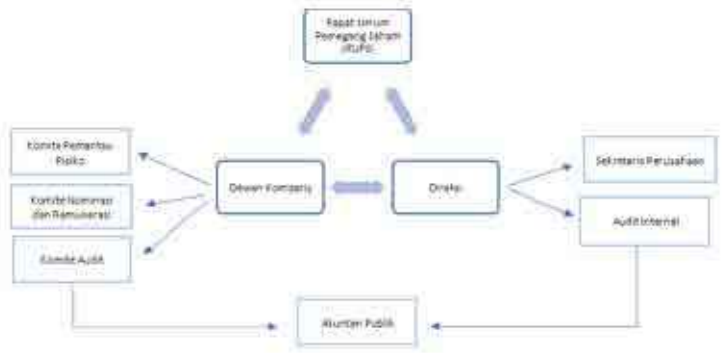

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)	**Dewan Komisaris** Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menduduki posisi tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan dan memiliki wewenang yang tidak dapat didelegasikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku. RUPS berfungsi sebagai wadah formal bagi Pemegang Saham dalam mengambil keputusan strategis terkait pengelolaan IPCC baik untuk kepentingan jangka pendek ataupun jangka panjang. The General Meeting of Shareholders (GMS) occupies the highest position in the corporate governance structure and has authority that cannot be delegated to the Board of Directors or Board of Commissioners, in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable laws. The GMS functions as a formal forum for Shareholders to make strategic decisions regarding the management of the IPCC for both short and long term interests.	Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait pelaksanaan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga bertugas untuk memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi dalam menentukan arah tujuan pencapaian kinerja IPCC. Segala pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar IPCC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja yang tertuang dalam Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners carries out a supervisory function regarding the implementation of the Company's management carried out by the Board of Directors. Apart from that, the Board of Commissioners is also tasked with providing direction and advice to the Board of Directors in determining the direction of achieving IPCC performance goals. All implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners refers to the IPCC Articles of Association and applicable laws and regulations. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has a Work Code of Conduct which is contained in the Board of Commissioners Work Manual.	Direksi memiliki fungsi utama dalam pengelolaan bisnis IPCC terutama dalam mencapai target-target tahunan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja Perusahaan. Pelaksanaan tugas Direksi mengacu pada Anggaran Dasar IPCC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada Tata Tertib Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi. The Board of Directors has the main function in managing the IPCC business, especially in achieving the annual targets that have been set and improving the Company's performance. The implementation of the duties of the Board of Directors refers to the IPCC Articles of Association and applicable laws and regulations and is guided by the Working Relations Code between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Organ Pendukung Struktur GCG
GCG Structure Supporting Organs

Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris Committees Council Supporter Commissioner	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of the Board Commissioner	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary		Audit Internal Internal Audit	
		Fungsi Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Functions	Fungsi Kepatuhan Compliance Function	Fungsi Audit Internal Internal Audit Function	Fungsi Manajemen Risiko Risk Management Function
Organ pendukung yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, yaitu terdiri dari: Komite Audit; Komite Nominasi dan Remunerasi; Komite Pemantau Manajemen Risiko The supporting organs established to assist the implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners consist of: Audit Committee; Nomination and Remuneration Committee; Risk Management Monitoring Committee	Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, serta dibantu oleh seorang staf karyawan Sekretariat Dewan Komisaris. The Secretary of the Board of Commissioners is appointed and is directly responsible to the Board of Commissioners, and is assisted by a staff employee of the Secretariat of the Board of Commissioners.	Organ pendukung Direksi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan keterbukaan informasi Perusahaan. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga berperan dalam mengelola dan menjaga komunikasi antara pihak internal dengan pihak eksternal termasuk Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan. Supporting organ of the Board of Directors which is responsible for the implementation of the Company's information disclosure. Apart from that, the Corporate Secretary also plays a role in managing and maintaining communication between internal parties and external parties including Shareholders and Stakeholders.	Secara fungsional unit kerja yang membawahi wewenang dan tanggung jawab atas kepatuhan dan pengendalian kinerja berada di bawah pengawasan langsung Direksi dan bertugas untuk memastikan bahwa IPCC telah memenuhi aspek-aspek kepatuhan (compliance) yang dipersyaratkan regulasi untuk mencapai kinerja terbaik Perseroan. Functionally, the work unit that oversees the authority and responsibility for compliance and performance control is under the direct supervision of the Board of Directors and is tasked with ensuring that the IPCC has fulfilled the compliance aspects required by regulations to achieve the Company's best performance.	Dalam struktur organisasi, unit kerja ini berada di bawah pengawasan langsung Direksi. Unit Audit Internal bertugas untuk memberikan masukan yang independen dan objektif terkait pengendalian internal dan proses tata kelola perusahaan. In the organizational structure, this work unit is under the direct supervision of the Board of Directors. The Internal Audit Unit is tasked with providing independent and objective input regarding internal control and corporate governance processes.	Satuan kerja manajemen risiko berfungsi melakukan pengelolaan terhadap risiko-risiko yang ada, sehingga risiko-risiko tersebut dapat teratasi dan terkendali. The risk management work unit functions to manage existing risks, so that these risks can be resolved and controlled.

SOFT-STRUCTURE GCG

Perseroan terdiri dari perangkat kebijakan dan pedoman internal yang lengkap. Kebijakan ini diperlukan untuk memperkuat kesadaran seluruh insan Perseroan dan menjadi pedoman dalam perilaku yang berbudaya.

Kebijakan GCG Perseroan disusun dengan memperhatikan peraturan atau regulasi yang berlaku, visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan, serta merujuk pada best practice lainnya. Hingga akhir 2023, Perseroan telah menyusun beberapa *Governance Soft Structure*, antara lain:

GCG SOFT-STRUCTURE

The Company consists of a complete set of internal policies and guidelines. This policy is needed to strengthen the awareness of all Company personnel and serve as a guideline for cultural behavior.

The Company's GCG policy is prepared by considering applicable rules or regulations, the Company's vision, mission and values, as well as referring to other best practices. Until the end of 2023, the Company has prepared several Governance Soft Structures, including:

Soft-Struktur/Kebijakan IPCC IPCC Soft-Structure/Policies	**Pemberlakuan** Enforcement
Anggaran Dasar Articles of Association	Akta No. 45 tanggal 27 Juni 2023 Deed No. 45 dated June 27, 2023
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Guidelines	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.56/3/7/IKT-22 tanggal 19 Desember 2022 Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.56/3/7/IKT-22 dated December 19, 2022
Pedoman Tata Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) Guidelines for Work Procedures for the Relationship between the Board of Commissioners and Directors	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.56/3/6/IKT-22 tanggal 19 Desember 2022 tentang Tata Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. HK.56/3/6/IKT-22 dated 19 December 2022 concerning Work Procedures for the Relationship between the Board of Commissioners and Directors (Board Manual)
Pedoman Manajemen Risiko Risk Management Guidelines	Peraturan Direksi No: HK.01/16/11/1/AMR/DIRUT/IKT-23 tanggal 16 November 2023 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Directors Regulation No: HK.01/16/11/1/AMR/DIRUT/IKT-23 dated November 16, 2023 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar dan Penerapan Whistle Blowing System (WBS) Guidelines for Gratification Management, Reporting of Illegal Levies and Implementation of the Whistle Blowing System (WBS)	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.56/2/2/IKT-21 tentang Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS) Dewan Komisaris, Direksi serta Pekerja di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. HK.56/2/2/IKT-21 concerning Management of the Whistle Blowing System (WBS) of the Board of Commissioners, Directors and Workers within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Pedoman Kode Etik Bisnis Business Ethics Code Guidelines	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.56/3/4/IKT-2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Pedoman Kode Etik dan Bisnis Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. HK.56/3/4/IKT-2022 dated 12 December 2022 concerning Code of Conduct Guidelines
Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Asset Reporting Guidelines for the Board of Commissioners and Directors	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.56/3/5/IKT-22 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. HK.56/3/5/IKT-22 dated 19 December 2022 concerning Guidelines for Reporting Assets for the Board of Commissioners and Directors
Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Guidelines for Implementing Social and Environmental Responsibility Programs (TJSL)	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.56/3/3/IKT-22 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. HK.56/3/3/IKT-22 dated 19 December 2022 concerning Guidelines for Implementing Social and Environmental Responsibility Programs
Kebijakan Pelaporan atas Kepemilikan Saham Oleh Dewan Komisaris dan Direksi Reporting Policy on Share Ownership by the Board of Commissioners and Directors	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.56/3/2/IKT-23 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pelaporan atas Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. HK.56/3/2/IKT-23 dated 13 February 2023 concerning Reporting on Share Ownership by the Board of Commissioners and Directors
Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	Disahkan dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada 3 November 2020 Ratified and signed by the Board of Directors and Board of Commissioners on November 3 2020
Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Charter	Dimutakhirkan pada 1 Oktober 2022 Updated on October 1, 2022

Mohon informasi bila terdapat pembaruan atau penambahan soft struktur IPCC di tahun 2023

Seluruh kebijakan dan pedoman-pedoman di atas disosialisasikan secara berkala kepada seluruh karyawan dan apabila diperlukan dapat diperbaharui agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi dan disesuaikan dengan dinamika usaha yang terjadi.

MEKANISME GCG

Mekanisme GCG adalah cara, prosedur, aturan untuk menghasilkan sebuah tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat memberikan berbagai keuntungan bagi Perseroan. Didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur GCG, Perseroan yakin dapat menghasilkan outcome penerapan GCG yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan. Pada praktiknya, penerapan GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar governance structure, melainkan dibutuhkan adanya soft structure yang jelas dalam proses mekanisme. Proses dan mekanisme penerapan GCG melekat pada struktur GCG sebagaimana yang terlihat dari Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan.

Secara garis besar, berikut ini adalah gambaran alur atau mekanisme GCG yang diterapkan di Perusahaan, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham
   Sebagai perusahaan terbuka, penyelenggaraan RUPS Perseroan dilakukan sesuai dengan waktu dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan POJK No. 15/ POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi
   Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana termaktub pada Pedoman Tata Tertib Kerja atau Board Manual. Dewan Komisaris dan Direksi juga memastikan bahwa segala keputusan yang ditetapkan dalam RUPS sudah ditindaklanjuti dengan baik. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi selanjutnya dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Komite-Komite atau Perangkat di Bawah Dewan Komisaris dan Direksi
   Komite-komite dan perangkat lain di bawah Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya untuk mendukung pencapaian

All of the above policies and guidelines are regularly socialized to all employees and, if necessary, can be updated to remain relevant to the organization's needs and adapted to current business dynamics.

GCG MECHANISM

GCG mechanisms are methods, procedures, rules to produce good corporate governance so that it can provide various benefits for the Company. Supported by adequate GCG structure and infrastructure, the Company is confident that it can produce GCG implementation outcomes that are in line with Stakeholder expectations. In practice, implementing GCG is not enough just to rely on the governance structure pillars, but requires a clear soft structure in the mechanism process. The processes and mechanisms for implementing GCG are embedded in the GCG structure as can be seen from the Corporate Governance Organ Structure.

In general, the following is an overview of the GCG flow or mechanism implemented in the Company, namely:

1. General Meeting of Shareholders
   As a public company, the Company's GMS is held in accordance with the time and procedures stipulated in POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies and POJK No. 15/ POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies.

2. Implementation of the Functions, Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners and Directors
   The Board of Commissioners and Directors carry out their functions, duties and responsibilities in accordance with applicable regulations and Law Regulations as stated in the Work Code Guidelines or Board Manual. The Board of Commissioners and Directors also ensure that all decisions made at the GMS have been followed up properly. The next performance assessment of the Board of Commissioners and Directors is carried out in accordance with the established rules.

3. Implementation of the Functions, Duties and Responsibilities of Committees or Devices under the Board of Commissioners and Directors
   Committees and other organs under the Board of Commissioners and Directors carry out their functions, duties and responsibilities to support the achievement

kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dan penerapan pelaksanaan tata kelola perusahaan.

4. Pelaksanaan Kegiatan Usaha IPCC
   Seluruh aktivitas usaha IPCC dilakukan sesuai dengan pedoman internal yang dimiliki berdasarkan prinsip-prinsip GCG, yang mengacu pada pencapaian visi dan misi IPCC.

5. Dokumentasi Proses
   Seluruh proses kegiatan IPCC didokumentasikan dengan baik sebagai bukti pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Evaluasi Hasil
   Selanjutnya, IPCC melakukan evaluasi terhadap kinerja dan pencapaian berhasil diraih dengan tujuan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

of the performance of the Board of Commissioners and Directors and the implementation of corporate governance.

4. Implementation of IPCC Business Activities
   All IPCC business activities are carried out in accordance with internal guidelines based on GCG principles, which refer to achieving the IPCC vision and mission.

5. Process Documentation
   The entire process of IPCC activities is well documented as proof that the implementation of activities has been carried out in accordance with applicable laws and regulations.

6. Results Evaluation
   Furthermore, the IPCC evaluates the performance and achievements achieved with the aim of improvement and improvement in the future.

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("GMS")

KEDUDUKAN RUPS

RUPS merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola Perusahaan yang berfungsi sebagai wadah formal bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan secara wajar, transparan, dan untuk kepentingan perusahaan. RUPS mempunyai kewenangan yang tidak dapat diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. RUPS juga berguna sebagai forum bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, kinerja dan juga rencana kerjanya kepada Pemegang Saham.

GMS POSITION

The GMS is the highest organ in the Company's governance structure which functions as a formal forum for Shareholders to make decisions fairly, transparently and in the interests of the company. The GMS has authority that cannot be given to the Board of Commissioners or Directors within the limits specified in the statutory regulations and the Articles of Association. The GMS is also useful as a forum for the Board of Commissioners and Directors to report and account for the implementation of their duties, performance and work plans to Shareholders.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham adalah adalah orang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Perusahaan. Dalam rangka mewujudkan praktik operasi yang adil bagi para Pemangku Kepentingan, Perusahaan senantiasa berupaya menjunjung tinggi hak-hak Pemegang Saham tanpa membedakan jumlah saham yang dimilikinya.

Hingga akhir tahun 2023, pemegang saham Perusahaan adalah PT Pelindo Multi Terminal kepemilikan saham sebesar 71,28%, PT Pelabuhan Indonesia Investama kepemilikan saham sebesar 5,54%, dan Masyarakat kepemilikan saham sebesar 23, 18%3.

SHAREHOLDERS

Shareholders are people or legal entities who legally own one or more shares in the Company. In order to realize fair operating practices for Stakeholders, the Company always strives to uphold the rights of Shareholders regardless of the number of shares they own.

Until the end of 2023, the Company's shareholders are PT Pelindo Multi Terminal with a share ownership of 71.28%, PT Pelabuhan Indonesia Investama with a share ownership of 5.54%, and the public with a share ownership of 23.18%3.

Hak Pemegang Saham

- Hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS;
- Hak untuk meminta informasi tentang mata acara RUPS;
- Hak untuk mengajukan usul-usul untuk dibahas dalam acara RUPS;
- Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS;
- Hak untuk memperoleh informasi mengenai Perseroan, secara tepat waktu dan teratur;
- Hak untuk menerima sebagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntungkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya.

Shareholder Rights

- The right to request a GMS to be held;
- The right to request information about the GMS agenda;
- The right to submit proposals for discussion at the GMS;
- The right to attend and vote at the GMS;
- The right to obtain information regarding the Company, in a timely and regular manner;
- The right to receive a portion of the Company's profits that are beneficial to Shareholders in the form of dividends and other profit sharing.

Kewenangan Pemegang Saham melalui RUPS

1. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Pemegang Saham melalui RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris atau Direksi;
2. Tindakan-tindakan di bawah ini memerlukan persetujuan RUPS yang nilai transaksinya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak:
   a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
   b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan.
3. Perbuatan-perbuatan di bawah ini memerlukan persetujuan RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris:
   a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
   b. Melakukan penyertaan modal dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada perseroan lain yang harus disetujui oleh Pemegang Saham;
   c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
   d. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
   e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
   f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalisf*);
   g. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BOwT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS;
   h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
   i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun yang harus disetujui oleh Pemegang Saham;
   j. Menetapkan *blue print* organisasi Perseroan;
   k. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
   l. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan sebagaimana ketentuan yang dimaksud yang belum ditetapkan dalam RKAP;

Authority of Shareholders through the GMS

1. Based on applicable laws and regulations, Shareholders through the GMS hold all authority that is not delegated to the Board of Commissioners or Directors;
2. The actions below require approval from the GMS where the transaction value is more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not:
   a. Transferring the Company's assets; or
   b. Provide collateral for the Company's assets.
3. The actions below require approval from the GMS after receiving a written response from the Board of Commissioners:
   a. Pledge fixed assets for medium/long term credit withdrawals;
   b. Make capital participation and reduce the percentage of capital participation in other companies which must be approved by the Shareholders;
   c. Establishing subsidiaries and/or joint ventures;
   d. Releasing capital participation in subsidiaries and/or joint ventures;
   e. Carrying out mergers, consolidations, takeovers, separations and dissolution of subsidiaries and/or joint ventures;
   f. Binding the Company as guarantor (borg or avalisf);
   g. Establish cooperation with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operation (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOwT) , Build Transfer Operate (BTO) and other collaborations with a value or period exceeding the GMS determination;
   h. Do not collect any more bad debts that have been written off;
   i. Release and write off the Company's fixed assets except for movable fixed assets with an economic life which is generally applicable in the industry in general, up to 5 (five) years which must be approved by the Shareholders;
   j. Determine the Company's organizational blue print;
   k. Determine and change the Company's logo;
   l. Carry out other actions and actions as stipulated in the provisions in question which have not been stipulated in the RKAP;

m. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang berdampak bagi Perseroan;
n. Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;
o. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
p. Melakukan investasi dan pembiayaan jangka panjang;
q. Melakukan penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh Perseroan.

Kewajiban dan Akuntabilitas Pemegang Saham

- Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilaksanakan oleh Pemegang Saham sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
- Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam proses pengelolaaan Perusahaan.
-

Akses Informasi Kepada Pemagang Saham

Perusahaan menyediakan akses informasi kepada Pemegang Saham sehingga Pemegang Saham mendapatkan hak dan dapat melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun akses informasi yang disediakan, antara lain *website* Perusahaan, *website* IDX, media sosial Perusahaan, dan email Perusahaan.

m. Forming foundations, organizations and/or associations either directly or indirectly related to the Company which have an impact on the Company;
n. Charging of fixed and routine Company costs for activities of organizational foundations and/or associations either directly or indirectly related to the Company;
o. Proposing representatives of the Company to become candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in joint venture companies and/or subsidiaries that provide significant contributions to the Company and/or have strategic value as determined by the General Meeting of Shareholders.
p. Investing and long-term financing;
q. Issuing bonds and other debt securities by the Company.

Shareholder Obligations and Accountability

- Shareholders do not interfere with the Company's operational activities which are the responsibility of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations;
- Good Corporate Governance is implemented by Shareholders in accordance with their authority and responsibility;
- Shareholders have the responsibility to monitor the implementation of Good Corporate Governance principles in the Company's management process.

Access to Information for Shareholders

The Company provides access to information to Shareholders so that Shareholders obtain rights and can carry out their responsibilities and obligations in accordance with applicable regulations. The access to information provided includes the Company website, IDX website, Company social media, and Company email.

PENYELENGGARAAN RUPS

IPCC wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tahun, Perseroan dapat menyelenggarakan 2 (dua) jenis RUPS, yakni:

- RUPS Tahunan Rapat bersama Pemegang Saham yang wajib diselenggarakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir.
- RUPS Luar Biasa Rapat bersama Pemegang Saham yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kepentingan Perusahaan.

Prosedur dan tata cara penyelenggaraan RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan juga mematuhi ketentuan penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 15/2020.

Ketentuan Kuorum

- Kuorum kehadiran untuk Mata Acara dari Rapat sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 butir 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
- Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan harus disetujui oleh pemegang saham atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, IPCC menyelenggarakan RUPS sebanyak 4 (empat) kali yang terdiri dari 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa. Hasil Keputusan ketiga RUPS tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan diumumkan pada situs web IPCC (https://indonesiacarterminal.co.id/) dan situs web BEI (www.idx.co.id).

GMS IMPLEMENTATION

The IPCC is obliged to hold a General Meeting of Shareholders (GMS). This is as mandated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. Every year, the Company can hold 2 (two) types of GMS, namely:

- Annual GMS Meeting with Shareholders which must be held every year no later than 6 (six) months after the last Fiscal Year.
- Extraordinary GMS Meeting with Shareholders which can be held at any time according to the needs and interests of the Company.

The procedures and procedures for holding the Company's Annual GMS (AGMS) and Extraordinary GMS (EGMS) have been regulated in the Company's Articles of Association which have been adapted to Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. As a public company, the Company also complies with the provisions for holding a GMS as regulated in the provisions of POJK 15/2020.

Quorum Provisions

The attendance quorum for the Meeting Agenda in accordance with Article 14 paragraph 2 point 1 letter a of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph 1 letter c POJK 15/2020, requires the presence of shareholders or their authorized representatives who together represent more from 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights; And
In accordance with the provisions of Article 14 paragraph 2 point 1 letter c of the Company's Articles of Association, decisions must be approved by the shareholders or their authorized representatives who together represent more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights. legally present at the Meeting.

GMS IMPLEMENTATION IN 2023

Throughout 2023, the IPCC held 4 (four) GMS consisting of 1 (one) Annual GMS and 2 (two) Extraordinary GMS. The results of the resolutionss of the three GMS have been reported to the OJK and announced on the IPCC website (https://indonesiacarterminal.co.id/) and the BEI website (www.idx.co.id).

RUPS LUAR BIASA, 18 APRIL 2023

RUPS Luar Biasa yang pertama diselenggarakan pada 18 April 2023, pukul 14.25 WIB-15.06 WIB di Ruang Serbaguna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310.

EXTRAORDINARY GMS, APRIL 18, 2023

The first Extraordinary GMS was held on April 18, 2023, at 14.25 WIB-15.06 WIB in the Multipurpose Room, Indonesian Maritime Museum, 2nd Floor, Jalan Raya Pelabuhan Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta 14310.

Tahapan Pelaksanaan RUPS Luar Biasa, 18 April 2023
Stages of Implementation of the Extraordinary GMS, April 18, 2023

Kegiatan Activity	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Keterangan Infomation
Pemberitahuan RUPS Luar Biasa kepada Regulator Notification of Extraordinary GMS to Regulators	3 Maret 2023 March 3, 2023	Perusahaan telah menyampaikan Pemberitahuan kepada OJK tentang rencana akan diselenggarakannya Rapat melalui surat Perseroan tertanggal 3 Maret 2023 nomor HM.608/3/3/1/IKT-23. The Company has submitted Notification to the OJK regarding plans to hold a Meeting via the Company's letter dated March 3, 2023 number HM.608/3/3/1/IKT-23.
Pengumuman RUPS Luar Biasa Announcement of Extraordinary GMS	10 Maret 2023 March 10, 2023	Perusahaan telah menyampaikan Pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham melalui publikasi pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan. The Company has delivered the Extraordinary GMS Announcement to Shareholders through publication on the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") website, the Indonesian Stock Exchange ("BEI") website and the Company's website.
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Luar Biasa. Recording Date List of Shareholders entitled to attend the Extraordinary GMS.	24 Maret 2023 March 24, 2023	Tercatat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS Luar Biasa. Recorded 1 (one) working day before the Invitation to the Extraordinary GMS.
Pemanggilan dan Informasi penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa Invitation and information explaining the Extraordinary GMS agenda	27 Maret 2023 March 27, 2023	Perusahaan menyampaikan Pemanggilan RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham, melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web. The Company conveys the Invitation to the Extraordinary GMS to Shareholders, via the KSEI website, IDX website and website.
Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Implementation of the Extraordinary GMS	18 April 2023 April 18, 2023	RUPS Luar Biasa Ruang Serbaguna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Extraordinary GMS Multipurpose Room, Indonesian Maritime Museum 2nd Floor, Jalan Raya Harbor Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta 14310.
Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Summary of Extraordinary GMS Minutes	26 April 2023 April 26, 2023	Tercatat Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa dilaporkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS Luar Biasa Sehubungan dengan terdapat libur sejak 19-25 April 2023, sehingga pelaporan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa dilakukan pada 26 April 2023 It is recorded that the Summary of Minutes of the Extraordinary GMS is reported 2 (two) working days after the Extraordinary GMS Due to the holiday from 19-25 April 2023, reporting of the Extraordinary GMS Minutes Summary carried out on April 26, 2023

Tahapan Pelaksanaan RUPS Luar Biasa, 18 April 2023
Stages of Implementation of the Extraordinary GMS, April 18, 2023

Kegiatan Activity	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Keterangan Infomation
Akta Risalah RUPS Luar Biasa Deed of Extraordinary GMS Minutes	16 Mei 2023 May 16, 2023	Akta Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS dilaksanaka The Deed of GMS Minutes shall be submitted to the OJK no later than 30 (thirty) calendar days after the GMS held.

Proses Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa, 18 April 2023
Process of holding the Extraordinary GMS, April 18 2023

Tanggal dan Waktu Date and Time	18 April 2023, pukul 14.25 WIB-15.06 WIB April 18, 2023 , 14.25 WIB-15.06 WIB
Lokasi Venue	Ruang Serbaguna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Multipurpose Room, Indonesian Maritime Museum Floor 2, Jalan Raya Harbor Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta 14310.
Kuorum Quorum	Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") sejumlah 1.417.321.345 saham atau merupakan 77,94% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.818.384.820 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum kehadiran untuk Mata Acara dari Rapat sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 butir 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini telah terpenuhi dan Rapat diselenggarakan hari ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. The Meeting was attended and/or represented by the Company's shareholders who were present physically or electronically via the KSEI Electronic General Meeting System (hereinafter referred to as "eASY.KSEI") totaling 1,417,321,345 shares or representing 77.94% of the total shares issued by Company, namely 1,818,384,820 shares; considering the Register of Shareholders as of March 24 2023 until 16.00 WIB. Thus, the attendance quorum for the Meeting Agenda is in accordance with Article 14 paragraph 2 point 1 letter a of the Company's Articles of Association, the quorum for holding this Meeting has been fulfilled and the Meeting held today is valid and has the right to make binding decisions.
Pimpinan RUPS Tahunan Chairman of the Annual GMS	Drajat Sulistyo selaku Komisaris Utama IPCC berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor DK/10/04/01/IPCC-23 tertanggal 10 April 2023. Drajat Sulistyo as President Commissioner of the IPCC based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk regarding the Determination of the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders number DK/10/04/01/IPCC-23 dated 10 April 2023.
Kehadiran Dewan Komisaris Attendance of the Board of Commissioners	- Komisaris Utama/President Commissioner : Drajat Sulistyo - Komisaris Independen/Independent Commissioner : Abdur Rahim Hasan
Kehadiran Direksi Attendance of the Board of Directors	- Direktur Operasi dan Teknik/Director of Operations and Engineering : Andi Hamdani - Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia/Director of Finance and Human Capital: Sumarno
Pihak Independen Penghitung Suara Independent Vote Counting Party	PT EDI Indonesia

Keputusan RUPS Luar Biasa 18 April dan Tindak Lanjutnya
Resolutions of the Extraordinary GMS April 18 and its Follow-up

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan Changes in the Composition of Company Management
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan No Shareholders asked questions

Keputusan RUPS Luar Biasa 18 April dan Tindak Lanjutnya
Resolutions of the Extraordinary GMS April 18 and its Follow-up

Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	1.411.092.045 = 99,56 %	1.244.700 = 0,09 %	4.984.600 = 0,35 %

Keputusan Rapat
Meeting Resolutions

1. Menerima pengunduran diri Bapak Rio Theodore Natalianto Lasse sebagai Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan terhitung sejak tanggal pengunduran dirinya, yang sebelumnya diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 14 Juni 2021, sebagaimana dimuat dalam akta nomor 27 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana.
2. Memberhentikan Bapak Andi Hamdani sebagai Direktur Operasi dan Teknik terhitung sejak ditutupnya Rapat, yang sebelumnya diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 14 Juni 2021, sebagaimana dimuat dalam akta nomor 27 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana.
3. Menyetujui untuk mengangkat:
   a. Bapak SUGENG MULYADI sebagai Direktur Utama; dan
   b. Bapak BAGUS DWIPOYONO sebagai Direktur Operasi dan Teknik,

   Terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan jangka waktu masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Direksi terdahulu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2025 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

   Dengan adanya pengunduran diri, pemberhentian dan pengangkatan tersebut maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

   DEWAN KOMISARIS
   - Komisaris Utama : DRAJAT SULISTYO
   - Komisaris Independen : ABDUR RAHIM HASAN
   - Komisaris Independen : LM. ARYA BIMA YUDIANTARA

   DIREKSI
   - Direktur Utama : SUGENG MULYADI
   - Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : Lowong
   - Direktur Operasi dan Teknik : BAGUS DWIPOYONO
   - Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia: SUMARNO

4. Pengisian jabatan kosong sementara Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan akan ditentukan dalam Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan Mata Acara Rapat dan memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keputusan RUPS Luar Biasa 18 April dan Tindak Lanjutnya
Resolutions of the Extraordinary GMS April 18 and its Follow-up

1. Accept the resignation of Mr. Rio Theodore Natalianto Lasse as President Director concurrently Director of Commercial and Business Development of the Company as of the date of his resignation, who was previously appointed based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 14, 2021, as contained in deed number 27 dated June 14, 2021 made in the presence of Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta with gratitude for all contributions of energy and thoughts while serving, and providing payment and release of responsibility for all actions and/or deeds carried out while carrying out duties and authority of the position (acquit et de charge), as long as the action is ratified at the Annual General Meeting of Shareholders for the relevant Fiscal Year and does not constitute an unlawful act and/or criminal act.
2. Dismissed Mr. Andi Hamdani as Director of Operations and Engineering as of the closing of the Meeting, who was previously appointed based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 14, 2021, as contained in deed number 27 dated June 14, 2021 made before Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, with gratitude for all contributions of energy and thoughts while serving, and granting repayment and release of responsibility for all actions and/or deeds carried out while carrying out the duties and authority of his position (acquit et de charge), as long as the action is ratified at the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year concerned and does not constitute an unlawful act and/or criminal act.
3. Agree to appoint:
   a. Mr. SUGENG MULYADI as President Director; And
   b. Mr BAGUS DWIPOYONO as Director of Operations and Engineering,
   Starting from the closing of the Meeting with the term of office continuing the remaining term of office of the previous Directors until the closing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders without reducing the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
4. With the resignation, dismissal and appointment, the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Directors becomes as follows:

   BOARD OF COMMISSIONERS
   - President Commissioner: DRAJAT SULISTYO
   - Independent Commissioner: ABDUR RAHIM HASAN
   - Independent Commissioner: LM. ARYA BIMA YUDIANTARA

   BOARD OF DIRECTORS
   - President Director: SUGENG MULYADI
   - Director of Commercial and Business Development: Vacancy
   - Director of Operations and Engineering: BAGUS DWIPOYONO
   - Director of Finance and Human Capital: SUMARNO

5. Filling the temporary vacant position of Director of Commercial and Business Development of the Company will be determined at the Board of Directors Meeting with approval from the Board of Commissioners.
6. Grant power of attorney with substitution rights to the Company's Directors, either individually or jointly, to declare in a separate notarial deed the decisions on the Meeting Agenda and notify changes to the Company's data to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up to Meeting Resolutions	• Pembuatan salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 45 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan • Telah ditetapkannya Peraturan Direksi No. HK.01/20/6/1/SDMU/DIRUT/IKT-23 Tanggal 20 Juni 2023 tengang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. • Making a copy of the Deed of Meeting Resolution Statement No. 45 dated July 18, 2023 made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta. • The Board of Directors Regulation No. HK.01/20/6/1/SDMU/DIRUT/IKT-23 Dated 20 June 2023 regarding Guidelines for Procurement of Goods and Services within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
Status	Telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0117443 tanggal 9 Mei 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088933.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 9 Mei 2023 It has been notified to the Minister of Law and Human Rights in accordance with the Letter of Acceptance of Notification of Changes to Company Data No. AHU-AH.01.09-0117443 dated May 9, 2023 and has been registered in the Company Register No. AHU-0088933.AH.01.11.Year 2023 dated May 9, 2023

Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda	Penetapan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan Determination of Guidelines for Procurement of Company Goods and Services		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan No Shareholders asked questions		
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	1.411.091.945 = 99,56 %	1.224.800 = 0,09 %	4.984.600 = 0,35 %
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Menyetujui pengukuhan (ratifikasi) Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor HK.01/18/11/PGDN/DIRU/PLMT-22 tanggal 18 November 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal, berikut perubahan dan/atau penambahannya dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan di kemudian hari, dan untuk selanjutnya terhadap pembaharuannya melimpahkan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Mayoritas. Approved the confirmation (ratification) of PT Pelindo Multi Terminal Board of Directors Regulation Number HK.01/18/11/PGDN/DIRU/PLMT-22 dated November 18, 2022 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services within PT Pelindo Multi Terminal, including changes and/or additions thereto while still paying attention to the interests of the Company in the future, and for further renewal, delegating the authority of the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners after consulting with the Majority Shareholders.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up to Meeting Resolutions	Pembuatan salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 45 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan Making a copy of the Deed of Meeting Resolution Statement No. 45 dated July 18, 2023 made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta		
Status	Telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0117443 tanggal 9 Mei 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088933.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 9 Mei 2023 It has been notified to the Minister of Law and Human Rights in accordance with the Letter of Acceptance of Notification of Changes to Company Data No. AHU-AH.01.09-0117443 dated May 9, 2023 and has been registered in the Company Register No. AHU-0088933.AH.01.11.Year 2023 dated May 9, 2023		

RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2022, 27 JUNI 2023

RUPS Tahunan diselenggarakan pada 27 Juni 2023, pukul 14.28 WIB-15.22 WIB, di Ruang Serbaguna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310.

ANNUAL GMS FOR FISCAL YEAR 2022, JUNE 27, 2023

The Annual GMS was held on June 27, 2023, at 14.28 WIB-15.22 WIB, in the Multipurpose Room, Indonesian Maritime Museum, 2nd Floor, Jalan Raya Pelabuhan Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta 14310.

Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan 27 Juni 2023
Stages of Implementation of the Annual GMS June 27, 2023

Kegiatan Activity	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Keterangan Information
Pemberitahuan RUPS Tahunan kepada Regulator Annual GMS Notification to Regulators	11 Mei 2023 May 11, 2023	Perusahaan telah menyampaikan Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEi") melalui Sistem Pelaporan Elektronik ("SPE") dengan surat Perseroan nomor SK.03/11/5/1/SKPR/SKPR/IKT-23. The Company has submitted Notification to the Financial Services Authority ("OJK") and the Indonesian Stock Exchange ("BEi") via the Electronic Reporting System ("SPE") with Company letter number SK.03/11/5/1/SKPR/ SKPR/ IKT-23.

Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan 27 Juni 2023
Stages of Implementation of the Annual GMS June 27, 2023

Kegiatan Activity	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Keterangan Information
Pengumuman RUPS Tahunan Annual GMS Announcement	19 Mei 2023 May 19, 2023	Perusahaan telah menyampaikan Pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham melalui publikasi pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan. The Company has delivered the Extraordinary GMS Announcement to Shareholders through publication on the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") website, the Indonesian Stock Exchange ("BEI") website and the Company's website.
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan. Recording Date List of Shareholders entitled to attend the Annual GMS.	31 Mei 2023 May 31, 2023	Tercatat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS Luar Biasa. Recorded 1 (one) working day before the Invitation to the Extraordinary GMS.
Pemanggilan dan Informasi penjelasan mata acara RUPS Tahunan Invitation and information explaining the agenda of the Annual GMS	5 Juni 2023 June 5, 2023	Perusahaan menyampaikan Pemanggilan RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham, melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web. The Company conveys the Invitation to the Extraordinary GMS to Shareholders, via the KSEI website, IDX website and website.
Pelaksanaan RUPS Tahunan Implementation of the Annual GMS	27 Juni 2023 June 27, 2023	Ruang Serbaguna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Multipurpose Room, Indonesian Maritime Museum Floor 2, Jalan Raya Harbor Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta 14310.
Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Summary of Annual GMS Minutes	3 Juli 2023 July 3, 2023	Tercatat Ringkasan Risalah RUPS dilaporkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS Sehubungan dengan terdapat libur 28-29 Juni 2023, sehingga pelaporan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa dilakukan pada 3 Juli 2023 It is recorded Summary of the GMS Minutes is reported 2 (two) working days after the GMS Due to the holiday from 28-29 June 2023, reporting of the Extraordinary GMS Minutes Summary carried out on July 3, 2023
Akta Risalah RUPS Tahunan Deed of Annual GMS Minutes	3 Oktober 2023 October 3, 2023	Akta Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS dilaksanakan. The Deed of GMS Minutes is submitted to the OJK no later than 30 (thirty) calendar days after the GMS held.

Proses Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa 18 April 2023
Process in holding the Extraordinary GMS April 18, 2023

Tanggal dan Waktu Date and Time	27 Juni 2023, pukul 14.28 WIB-15.22 WIB June 27, 2023 , 14.28 WIB – 15.22 WIB
Lokasi Venue	Ruang Serbaguna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Multipurpose Room, Indonesian Maritime Museum Floor 2, Jalan Raya Harbor Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta 14310.

Proses Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa 18 April 2023
Process in holding the Extraordinary GMS April 18, 2023

Tanggal dan Waktu Date and Time	**27 Juni 2023, pukul 14.28 WIB-15.22 WIB** June 27, 2023 , 14.28 WIB – 15.22 WIB
Kuorum Quorum	Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") sejumlah 1.334.582.541 saham atau merupakan 73,39%dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.818.384.820 saham; dengan memperhatilcan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB, karenanya kuorum Rapat sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) butir 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengilkat. The Meeting was attended and/or represented by the Company's shareholders who were present physically or electronically via the KSEI Electronic General Meeting System (hereinafter referred to as "eASY.KSEI") totaling 1,334,582,541 shares or representing 73.39% of the total shares issued by Company, namely 1,818,384,820 shares; By considering the Register of Shareholders as of May 31, 2023 until 16.00 WIB, the quorum for the Meeting in accordance with Article 14 paragraph (2) point 1 letter a of the Company's Articles of Association, has been fulfilled and the Meeting is valid and has the right to make valid and clear decisions.
Pimpinan RUPS Tahunan Chairman of Annual GMS	Rapat dipimpin oleh ABDUR RAHIM HASAN selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk nomor DK/31/06/02/IPCC-23 tertanggal 31 Mei 2023. The meeting was chaired by ABDUR RAHIM HASAN as Independent Commissioner of the Company based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk regarding the Determination of the Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Fiscal Year and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk number DK/31/06/02 /IPCC-23 dated 31 May 2023.
Kehadiran Dewan Komisaris Attendance of the Board of Commissioners	- Komisaris Independen/Independent Commissioner : Abdur Rahim Hasan - Komisaris Independen/Independent Commissioner : LM Arya Bima Yudiantara
Kehadiran Direksi Attendance of the Board of Directors	- Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis/President Director concurrently Director of Commercial and Business Development : Sugeng Mulyadi - Direktur Operasi dan Teknik/Director of Operations and Engineering : Bagus Dwipoyono - Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia/Director of Finance and Human Capital: Sumarno
Pihak Independen Penghitung Suara Independent Vote Counting Party	PT EDI Indonesia
Pihak Independen Independent Party	Notaris /Notary : Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Biro Administrasi Efek /Securities administration Bureau : PT EDI Indonesia Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm : : Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG Public Accounting Firm (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG

Rincian Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan Tindak Lanjutnya
Details of the 2022 Annual GMS Resolutions and Follow-up Actions

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	**Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022** Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Report for the 2022 Fiscal Year		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	1 (satu) pertanyaan. 1 (one) question.		
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	1.333.826.541 = 99,94%	695.100 = 0,052%	60.900 = 0,005%

Rincian Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan Tindak Lanjutnya
Details of the 2022 Annual GMS Resolutions and Follow-up Actions

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	**Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022** Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Report for the 2022 Fiscal Year
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	• Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. • Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanton0, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sebagaimana diuraikan dalam laporannya Nomor: 00419/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. • Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2022 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 . • Approve the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year ending December 31, 2022. • Ratify the Company's Financial Report for the Fiscal Year ending December 31, 2022 which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwanton0, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) as described in its report Number: 00419/2.1032/AU.1/06/ 0697-3/1/III/2023 dated 27 March 2023 with the opinion "Fair in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2022, as well as its financial performance and cash flows for the year ended on that date, is in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia. • With the approval of the Annual Report, including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and ratification of the Company's Financial Report, the Meeting granted full release and release of responsibility (Acquit et de charge) to the Company's Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions in the 2022 Fiscal Year throughout the actions This is reflected in the Company's Financial Report for the Fiscal Year ending December 31, 2022.
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up to Meeting Resolutions	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 25 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Making a copy of the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 25 dated June 27, 2023 made before Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta
Status	Telah dilaksanakan Has been realized

Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda	**Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022** Determination of the Use of the Company's Net Profit/Loss for the 2022 Fiscal Year		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Nothing		
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	1.333.826.541 = 99,94%	695.100 = 0,052%	60.900 = 0,005%

Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda	Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 Determination of the Use of the Company's Net Profit/Loss for the 2022 Fiscal Year
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih/Laba Tahun Berjalan Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp161.724.766.795,00 (seratus enam puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam pulah enam ribu tujah ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagai berikut: a. sebesar Rp113.207.336.756,- (seratus tiga belas miliar dua ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam Rupiah) atau ekuivalen sebesar 70,00% (tujuh puluh koma nol nol persen) akan digunakan sebagai dividen dan akan dibayarkan kepada pemegang saham sesuai dengan presentase kepemilikan saham dari masing masing pemegang saham dimana sebanyak Rp22.707.904.362,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) telah dibagikan sebagai dividen interim sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan berjumlah Rp90.499.4 32.395,00 (sembilan puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) atau setara dividen per lembar saham sebesar Rp49,77 (empat puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh rupiah). b. sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) atau ekuivalen sebesar 1,24% (satu koma dua empat persen) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. c. sebesar Rp46.517.430.038,00 (empat puluh enam miliar lima ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu tiga puluh delapan Rupiah) atau ekuivalen sebesar 2 8,76% (dua puluh delapan koma tujub enam persen) akan digunakan sebagai Laba ditahan Perseroan. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham. 1. Determine the use of the Company's Net Profit/Profit for the Year for the 2022 Fiscal Year amounting to Rp161,724,766,795.00 (one hundred and sixty one billion seven hundred twenty four million seven hundred and six thousand seven hundred and ninety five rupiah) as follows: a. amounting to Rp113,207,336,756,- (one hundred thirteen billion two hundred seven million three hundred thirty six thousand seven hundred and fifty six Rupiah) or the equivalent of 70.00% (seventy point zero zero percent) will be used as dividends and will be paid to shareholders in accordance with the share ownership percentage of each shareholder which a total of Rp22,707,904,362.00 (twenty two billion seven hundred seven million nine hundred four thousand three hundred and sixty two rupiah) has been distributed as interim dividends so that the remainder in the form of final dividends to be distributed amounting to Rp90,499.4 32,395.00 (ninety billion four hundred ninety-nine million four hundred thirty-two million three hundred and ninety-five rupiah) or the equivalent of dividends per share of Rp49.77 (forty nine point seventy seven rupiah). b. amounting to Rp2,000,000,000.00 (two billion Rupiah) or the equivalent of 1.24% (one point two four percent) will be used as Mandatory Reserves to fulfill Article 70 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. c. amounting to Rp46,517,430,038.00 (forty six billion five hundred seventeen million four hundred thirty thousand thirty eight Rupiah) or the equivalent of 2 8.76% (twenty eight point seven six percent) will be used as Retained Earnings Company. 2. Grant authority and power to the Company's Board of Directors with the right of substitution to further regulate the procedures and implementation of cash dividend distribution in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, including rounding up for dividend payments per share.
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up to Meeting Resolutions	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 25 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Making a copy of the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 25 dated June 27, 2023 made before Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta
Status	Telah dilaksanakan Has been realized

Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda	Penunjukan Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 Appointment of a Public Accountant to Audit the Company's Annual Financial Report for the 2023 Fiscal Year
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Nothing

Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda	Penunjukan Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 Appointment of a Public Accountant to Audit the Company's Annual Financial Report for the 2023 Fiscal Year		
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	1.333.816.541 = 99,943 %	695.100 = 0,052 %	70.900 = 0,0053 %
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, apabila dianggap perlu termasuk Audit Kinerja, Audit KPI dan Audit Kepatuhan Tahun Buku 2023. 2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut termasuk untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanton0, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan laionya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. 1. Appoint the Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) Public Accounting Firm (KAP) to provide audit services for the Company's Financial Report for the Fiscal Year ending 31 December 2023 and other periods in the 2023 Fiscal Year for the purposes and interests of the Company, if deemed necessary including Performance Audit, KPI Audit and Compliance Audit for Fiscal Year 2023. 2. Granting delegation of authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of compensation for audit services, additional scope of work required and other reasonable requirements for the public accounting firm including to determine a replacement Public Accounting Firm in the case of the Purwanton0, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (Ernst & Young) for whatever reason was unable to complete the audit of the Company's Financial Statements, including determining fees for audit services and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up to Meeting Resolutions	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 25 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Making a copy of the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 25 dated June 27, 2023 made before Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta		
Status	Telah dilaksanakan Has been realized		

RUPS LUAR BIASA, 27 JUNI 2023
EXTRAORDINARY GMS, 27 JUNE 2023

Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan 27 Juni 2023
Stages of Implementation of the Annual GMS 27 June 2023

Kegiatan Activity	Tanggal Pelaksanaan Implementation date	Keterangan Information
Pemberitahuan RUPS Luar Blasa kepada Regulator Extraordinary GMS Notification to Regulators	11 Mei 2023 May 11, 2023	Perusahaan telah menyampaikan Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEi") melalui Sistem Pelaporan Elektronik ("SPE") dengan surat Perseroan nomor SK.03/11/5/1/SKPR/SKPR/IKT-23. The Company has submitted Notification to the Financial Services Authority ("OJK") and the Indonesian Stock Exchange ("BEi") via the Electronic Reporting System ("SPE") with Company letter number SK.03/11/5/1/SKPR/ SKPR/ IKT-23.

Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan 27 Juni 2023
Stages of Implementation of the Annual GMS 27 June 2023

Kegiatan Activity	Tanggal Pelaksanaan Implementation date	Keterangan Information
Pengumuman RUPS Luar Biasa Announcement of Extraordinary GMS	19 Mei 2023 May 19, 2023	Perusahaan telah menyampaikan Pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham melalui publikasi pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan. The Company has delivered the Extraordinary GMS Announcement to Shareholders through publication on the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") website, the Indonesian Stock Exchange ("BEI") website and the Company's website.
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Luar Blasa. Recording Date List of Shareholders entitled to attend the Extraordinary GMS.	31 Mei 2023 May 31, 2023	Tercatat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS Luar Biasa. Recorded 1 (one) working day before the Invitation to the Extraordinary GMS.
Pemanggilan dan Informasi penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa Invitation and information explaining the Extraordinary GMS agenda	5 Juni 2023 June 5, 2023	Perusahaan menyampaikan Pemanggilan RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham, melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web. The Company conveys the Invitation to the Extraordinary GMS to Shareholders, via the KSEI website, IDX website and website.
Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Implementation of the Extraordinary GMS	27 Juni 2023 June 27, 2023	Ruang Serbaguna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Multipurpose Room, Indonesian Maritime Museum Floor 2, Jalan Raya Harbor Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta 14310.
Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Summary of Extraordinary GMS Minutes	3 Juli 2023 July 3, 2023	Tercatat Ringkasan Risalah RUPS dilaporkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS Sehubungan dengan terdapat libur 28-29 Juni 2023, sehingga pelaporan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa dilakukan pada 3 Juli 2023 It is recorded Summary of the GMS Minutes is reported 2 (two) working days after the GMS Due to the holiday from 28-29 June 2023, reporting of the Extraordinary GMS Minutes Summary carried out on July 3, 2023
Akta Risalah RUPS Luar Biasa Deed of Extraordinary GMS Minutes	27 Juni 2023 June 27, 2023	Akta Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS dilaksanakan The Deed of GMS Minutes has been submitted to the OJK no later than 30 (thirty) calendar days after the GMS held

Proses Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa 27 Juni 2023
Process in holding the Extraordinary GMS 27 June 2023

Tanggal dan Waktu Date and Time	27 Juni 2023, pukul 15.30 WIB-15.50 WIB June 27, 2023 , 15.30 WIB – 15.50 WIB
Lokasi Venue	Ruang Serbaguna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Multipurpose Room, Indonesian Maritime Museum Floor 2, Jalan Raya Harbor Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta 14310.
Kuorum Quorum	Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") sejumlah 1.334.582.541 saham atau merupakan 73,39%dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.818.384.820 saham; dengan memperhatilcan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB, karenanya kuorum Rapat sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) butir 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengilkat. The Meeting was attended and/or represented by the Company's shareholders who were present physically or electronically via the KSEI Electronic General Meeting System (hereinafter referred to as "eASY.KSEI") totaling 1,334,582,541 shares or representing 73.39% of the total shares issued by Company, namely 1,818,384,820 shares; By considering the Register of Shareholders as of 31 May 2023 until 16.00 WIB, the quorum for the Meeting in accordance with Article 14 paragraph (2) point 1 letter a of the Company's Articles of Association, has been fulfilled and the Meeting is valid and has the right to make valid and clear decisions.
Pimpinan RUPS Tahunan Chairman of the Annual GMS	Rapat dipimpin oleh Abdur Rahim Hasan selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk nomor DK/31/06/02/IPCC-23 tertanggal 31 Mei 2023. The meeting was chaired by Abdur Rahim Hasan as Independent Commissioner of the Company based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk regarding the Determination of the Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Fiscal Year and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk number DK/31/06/02 /IPCC-23 dated 31 May 2023.
Kehadiran Dewan Komisaris Attendance of the Board of Commissioners	- Komisaris Independen/Independent Commissioner : Abdur Rahim Hasan - Komisaris Independen/Independent Commissioner : LM Arya Bima Yudiantara
Kehadiran Direksi	- Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis/President Director concurrently Director of Commercial and Business Development : Sugeng Mulyadi - Direktur Operasi dan Teknik/Director of Operations and Engineering : Bagus Dwipoyono - Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia/Director of Finance and Human Capital: Sumarno
Pihak Independen Penghitung Suara Independent Vote Counting Party	Notaris/ Notary : Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Biro Administrasi Efek/ Securities administration Bureau : PT EDI Indonesia Kantor Akuntan Publik/ Public Accounting Firm : Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG) Public Accounting Firm (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG)

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa 27 Juni 2023 dan Tindak Lanjutnya
Results of Extraordinary GMS Resolutions 27 June 2023 and Follow-up Actions

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	Perubahan Anggaran Dasar Amendment to the Articles of Association		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diberikan oleh Pemegang Saham. There are no questions and/or opinions provided by Shareholders.		
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	1.317.133.741 = 99,405 %	688.100 = 0,052 %	7.194.300 = 0,543 %

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa 27 Juni 2023 dan Tindak Lanjutnya
Results of Extraordinary GMS Resolutions 27 June 2023 and Follow-up Actions

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	**Perubahan Anggaran Dasar** Amendment to the Articles of Association
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu: a. Pasal 11 ayat 9 tentang Rapat Umum Pemegang Saham; b. Pasal 16 ayat 14 tentang Tugas dan Wewenang Direksi; c. Pasal 21 ayat 9 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. 1. Approved changes to the Company's Articles of Association, namely: a. Article 11 paragraph 9 concerning General Meeting of Shareholders; b. Article 16 paragraph 14 concerning Duties and Authorities of the Board of Directors; c. Article 21 paragraph 9 concerning Work Plans, Fiscal Year and Annual Report. 2. Grant power and authority to the Company's Directors with rights substitute to carry out all necessary actions relating to decisions on the Meeting agenda, including drafting and restating the entire Articles of Association in a Notarial Deed and submit them to authorized agency to obtain notification receipt changes to the Company's Articles of Association, doing everything that is deemed necessary and useful for these purposes with no one anything that is excluded, including for making additions and/or changes to the Company's Articles of Association if p is required by the competent authority.
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up to Meeting Resolutions	Telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 45 tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Amendments have been made to the Company's Articles of Association based on the Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution Statement Number 45 dated July 18, 2023, which was made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta
Status	Pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi RI tanggal berdasarkan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0101406 tanggal 24 Juli 2023 Notification of changes to company data has been received and recorded in the Legal Entity Administration system of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated based on letter Number: AHU-AH.01.03-0101406 dated July 24, 2023

Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda	**Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diberikan oleh Pemegang Saham.		
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	1.324.144.441 = 99.934 %	690.000 = 0,052 %	181.700 = 0,014 %

Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda	Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tabun 2023 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran tantiem bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas. 1. Grant authority and power to the Majority Shareholders to determine remuneration for members of the Company's Board of Commissioners for in 2023. 2. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration for members of the Company's Board of Directors for 2023 after consultation with the Majority Shareholders. 3. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of tantiem for members of the Company's Directors and the Board Commissioner of the Company for the 2022 Fiscal Year after consultation with Majority Shareholder.
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up to Meeting Resolutions	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 25 tahun 27 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Making a copy of the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 25 dated June 27, 2023 made before Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta
Status	Telah dilaksanakan Has been realized

Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda	Laporan Penggunaan Hasil Penawaran Umum Perdana Report on the Use of Initial Public Offering Proceeds		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diberikan oleh Pemegang Saham. There are no questions and/or opinions provided by Shareholders.		
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	-	-	-

Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda	Laporan Penggunaan Hasil Penawaran Umum Perdana Report on the Use of Initial Public Offering Proceeds
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Direksi Perseroan melaporkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, telah dipergunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut: • Dari total peroleban dana IPO sebesar Rp835.002.228.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebanyak Rp34.627. l 74.064 (tiga puluh empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu enam puluh empat Rupiah) telah digunakan untuk biaya penawaran umum saham Perseroan sehingga diperoleb dana bersib basil yang didapatkan dari Penawaran Umum PerdanaSaham (IPO) Perseroan sebesar Rp800.375.053.936,00 (delapan ratus miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), dan telah digunakan sebagai berikut: a. Sebesar Rp407.742.392.222,00 (empat ratus tujuh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) telah dialokasikan untuk Belanja Modal/*Capital Expenditure* (CAPEX). b. Sebesar Rp320.590.260.568,00 (tiga ratus dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) telah digunakan untuk Sewa Lahan Dibayar Dimuka 5 Tahun. c. Sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh mi liar rupiah) telah digunakan untuk Modal Kerja (*Working Capital*). Dengan demikian sisa dana hasil penawaran urnum perdana sampai dengan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adaJah sebesar Rp62.042.401.146,00 (enam puluh dua miliar empat puluh dua juta empat ratus satu ribu seratus empat puluh enam rupiah). The Company's Directors report that the Company has used the proceeds from the Initial Public Offering up to the Fiscal Year ending 31 December 2022 with the following details: • Of the total proceeds from the IPO of Rp. 835,002,228,000.00 (eight hundred thirty-five billion two million two hundred and twenty-eight thousand rupiah) it was Rp. 34,627. l 74,064 (thirty-four billion six hundred twenty-seven million one hundred seventy-four thousand and sixty-four Rupiah) has been used for the costs of the Company's public offering of shares so that the successful proceeds obtained from the Company's Initial Public Offering (IPO) of Rp. 800,375,053 ,936.00 (eight hundred billion three hundred and seven twenty-five million fifty-three thousand nine hundred thirty-six rupiah), and has been used as follows: a. An amount of Rp407,742,392,222.00 (four hundred seven billion seven hundred forty two million three hundred ninety two thousand two hundred twenty two rupiah) has been allocated for Capital Expenditure (CAPEX). b. An amount of Rp. 320,590,260,568.00 (three hundred twenty billion five hundred ninety million two hundred sixty thousand five hundred and sixty eight rupiah) has been used for 5 year prepaid land rent. c. Rp10,000,000,000.00 (ten million rupiah) has been used for Working Capital. Thus, the remaining funds from the initial public offering until the Fiscal Year ending December 31, 2022 are Rp62,042,401,146.00 (sixty-two billion forty-two million four hundred one thousand one hundred and forty-six rupiah).
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up to Meeting Resolutions	Pembuatan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 25 tahun 27 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Making a copy of the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 25 dated June 27, 2023 made before Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta
Status	Telah dilaksanakan Has been realized

RUPS LUAR BIASA, 5 SEPTEMBER 2023
EXTRAORDINARY GMS, 5 SEPTEMBER 2023

Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan 5 September 2023
Stages of Implementation of the Annual GMS 5 September 2023

Kegiatan Activity	Tanggal Pelaksanaan Implementation date	Keterangan Information
Pemberitahuan RUPS Luar Blasa kepada Regulator Extraordinary GMS Notification to Regulators	21 Juli 2023 July 21, 2023	Perusahaan telah menyampaikan Pemberitahuan Mata Acara Rapat mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEi") melalui Sistem Pelaporan Elektronik ("SPE") dengan surat Perseroan nomor SK.03/21/7/1/SKPR/SKPR/IKT-23 The Company has submitted Notice of Meeting Agenda regarding plans to hold a Meeting to the Financial Services Authority ("OJK") and the Indonesian Stock Exchange ("BEi") via the Electronic Reporting System ("SPE") with Company letter number SK.03/21/7 /1/SKPR/SKPR/IKT-23
Pengumuman RUPS Luar Biasa Announcement of Extraordinary GMS	28 Juli 2023 July 28, 2023	Pengumuman rencana Rapat kepada para pemegang saham melalui situs web SPE OJK, BEI, situs web eASY-KSEI, dan situs web Perseroan. Announcement of the Meeting plan to shareholders via the SPE OJK website, BEI, eASY-KSEI website, and the Company website.
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Luar Blasa. Recording Date List of Shareholders entitled to attend the Extraordinary GMS.	11 Agustus 2023 August 11, 2023	Tercatat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS Luar Biasa. Recorded 1 (one) working day before the Invitation to the Extraordinary GMS.
Pemanggilan dan Informasi penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa Invitation and information explaining the Extraordinary GMS agenda	14 Agustus 2023 August 14, 2023	Perusahaan menyampaikan Pemanggilan RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham, melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web. The Company conveys the Invitation to the Extraordinary GMS to Shareholders, via the KSEI website, IDX website and website.
Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Implementation of the Extraordinary GMS	5 September 2023 September 5, 2023	Ruang Serbaguna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Multipurpose Room, Indonesian Maritime Museum Floor 2, Jalan Raya Harbor Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta 14310.
Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Summary of Extraordinary GMS Minutes	7 September 2023 September 7, 2023	Tercatat Ringkasan Risalah RUPS dilaporkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS It is recorded Summary of the GMS Minutes is reported 2 (two) working days after the GMS
Akta Risalah RUPS Luar Biasa Deed of Extraordinary GMS Minutes	27 Juni 2023 June 27, 2023	Akta Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS dilaksanakan The Deed of GMS Minutes has been submitted to the OJK no later than 30 (thirty) calendar days after the GMS held

Proses Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa 5 September 2023
Process in holding the Extraordinary GMS September 5, 2023

Tanggal dan Waktu Date and Time	**5 September 2023, pukul 14.27 WIB-14.54 WIB** September 5, 2023 , 14.47 WIB – 14.54 WIB
Lokasi Venue	Ruang Serbaguna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Multipurpose Room, Indonesian Maritime Museum Floor 2, Jalan Raya Harbor Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta 14310.
Kuorum Quorum	Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") sejumlah 1.419.585.652 saham atau merupakan 78,068% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.818.384.820 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum kehadiran untuk Mata Acara dari Rapat sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroanjuncto Pasal 41 ayat (I) huruf a POJK 15/2020, kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini telah terpenuhi dan Rapat diselenggarakan hari ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. The Meeting was attended and/or represented by the Company's shareholders who were present physically or electronically via the KSEI Electronic General Meeting System (hereinafter referred to as "eASY.KSEI") totaling 1,419,585,652 shares or representing 78.068% of the total shares issued by the Company, namely a total of 1,818,384,820 shares; considering the Register of Shareholders as of August 11, 2023 until 16.00 WIB. Thus the attendance quorum for the Meeting Agenda is in accordance with Article 14 paragraph (2) number 1 letter a of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph (I) letter a POJK 15/2020, the quorum for holding this Meeting has been fulfilled and the Meeting being held today is valid and entitled to make binding decisions.
Pimpinan RUPS Tahunan Chairman of the Annual GMS	Rapat dipimpin oleh Drajat Sulistyo selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor DK/01/09/01/IPCC-23 tertanggal 1 September 2023. The meeting was chaired by Drajat Sulistyo as President Commissioner of the Company based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk regarding the Determination of the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders number DK/01/09/01/IPCC-23 dated 1 September 2023.
Kehadiran Dewan Komisaris Attendance of the Board of Commissioners	- Komisaris Independen/Independent Commissioner : Abdur Rahim Hasan - Komisaris Independen/Independent Commissioner : LM Arya Bima Yudiantara
Kehadiran Direksi Attendance of the Board of Directors	- Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director concurrently Director of Commercial and Business Development : Sugeng Mulyadi - Direktur Operasi dan Teknik/Director of Operations and Engineering : Bagus Dwipoyono - Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia/Director of Finance and Human Capital: Sumarno
Pihak Independen Penghitung Suara Independent Vote Counting Party	Notaris / Notary : Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2023 No. 21/MPDN.JAK-SEL/CT/VII/2023, selaku pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., based on Letter Decision of the South Jakarta Administrative City Notary Regional Supervisory Council dated July 12, 2023 No. 21/MPDN.JAK-SEL/CT/VII/2023, as replacement for Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta Biro Administrasi Efek /Securities administration Bureau : PT Edi Indonesia Kantor Akuntan Publik/Public accounting firm : Purwantono, Sungkoro & Surja

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa dan Tindak Lanjutnya
Results of Extraordinary GMS Resolutions and Follow-Ups

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Changes in the Composition of the Company's Management		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diberikan oleh pemegang saham. There are no questions and/or opinions provided by shareholders.		
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	1.410.398.252 = 99,353%	15.700 = 0,001%	9.171.700 = 0,646%

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa dan Tindak Lanjutnya
Results of Extraordinary GMS Resolutions and Follow-Ups

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	**Perubahan Susunan Pengurus Perseroan** Changes in the Composition of the Company's Management
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Menerima pengunduran diri Bapak Sumarno sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia terhitung sejak tanggal pengunduran dirinya, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana; 2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Wing Megantoro sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan jangka waktu masa jabatan mencruskan sisa masa jabatan Direksi yang digantikan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2025 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu; 3. Dengan adanya pengunduran diri dan pengangkatan tersebut maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama : Drajat Sulistyo - Komisaris Independen : Abdur Rahim Hasan - Komisaris Independen : LM. Arya Bima Yudiantara DIREKSI - Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : Sugeng Mulyadi - Direktur Operasi dan Teknik : Bagus Dwipoyono - Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : Wing Megantoro 4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan keputusan Mata Acara satu-satunya dari Rapat dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 1. Accept Mr. Sumarno's resignation as Director of Finance and Human Capital as of the date of his resignation, with gratitude for all the contributions of energy and thoughts while serving, and provide payment and release of responsibility for all actions and/or deeds he carried out while carrying out the duties and authority of his position (acquit et de charge), as long as the action is ratified at the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year concerned and does not constitute an unlawful act and/or criminal act; 2. Approved to appoint Mr. Wing Megantoro as Director of Finance and Human Capital, starting from the closing of the Meeting with the term of office extending to the remaining term of office of the Directors being replaced until the closing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time; 3. With the resignation and appointment, the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Directors will become as follows: BOARD OF COMMISSIONERS President Commissioner: Drajat Sulistyo Independent Commissioner: Abdur Rahim Hasan Independent Commissioner: LM. Arya Bima Yudiantara BOARD OF DIRECTORS President Director concurrently Director of Commercial and Business Development: Sugeng Mulyadi Director of Operations and Engineering: Bagus Dwipoyono Director of Finance and Human Capital: Wing Megantoro 4. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Directors, either individually or jointly, to declare the decision on the sole agenda of the Meeting in a separate notarial deed and notify changes in the composition of the Company's Board of Directors to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa dan Tindak Lanjutnya
Results of Extraordinary GMS Resolutions and Follow-Ups

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Changes in the Composition of the Company's Management
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up to Meeting Resolutions	Telah membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 07 tanggal 5 September 2023 yang dibuat dihadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2023 No. 21/MPDN. JAK-SEL/CT/VII/2023, selaku pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan Has made a Deed of Statement of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 07 dated September 5, 2023 made before Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., based on the Decree of the Regional Supervisory Council of South Jakarta Administrative City Notaries dated July 12, 2023 No. 21/ MPDN.JAK-SEL/CT/VII/2023, as replacement for Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta
Status	Telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimtaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0162246 tanggal 7 September 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0180059.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 September 2023 It has been notified to the Minister of Law and Human Rights in accordance with the Letter of Receipt of Notification of Changes to Company Data No. AHU-AH.01.09-0162246 dated September 7, 2023 and has been registered in the Company Register No. AHU-0180059.AH.01.11.Year 2023 dated September 7, 2023

RUPS TAHUN 2022

Pada tahun 2022, Perseroan menyelenggarakan 4 (empat) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2021, dan 3 (tiga) kali RUPS Luar biasa.

Hasil Keputusan dan Tindak Lanjut RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 diselenggarakan pada 30 Juni 2022 jam 09.25WIB-10.22 WIB di Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310. Berikut hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan tindak lanjutnya.

GMS 2022

In 2022, the Company held 4 (four) GMS, namely the Annual GMS for the 2021 Fiscal Year, and 3 (three) Extraordinary GMS.

Results of Resolutions and Follow-up to the Annual GMS for Fiscal Year 2021

The 2021 Fiscal Year Annual GMS was held on June 30, 2022 at 09.25 WIB-10.22 WIB at the Indonesian Maritime Museum, 2nd Floor, Jalan Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, North Jakarta, 14310. The following are the results of the 2021 Annual GMS Resolutions and the follow-up.

Mata Acara Pertama First Agenda	Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 Approval of the Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Report for the 2021 Fiscal Year		
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	1.424.816.540 saham/shares (99,8958%)	1.486.700 saham/shares (0,1042%)	0 saham/share (0%)

Mata Acara Pertama First Agenda	**Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021** Approval of the Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Report for the 2021 Fiscal Year
Keputusan Resolutions	1. Menerima dengan baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2021 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 4. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 00371/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/111/2022 tanggal 28 Maret 2022. 1. Receive properly the Directors' Management Report and the Board of Commissioners' Supervision regarding the running of the Company and the Company's administration for the Fiscal Year ending December 31, 2021. 2. Provide full repayment and release of responsibility (Acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions in the 2021 Fiscal Year as long as these actions are reflected in the Company's Financial Report for the Fiscal Year ending December 31, 2021. 3. Receive the Company's Annual Report for the Fiscal Year ending December 31, 2021. 4. Ratify the Company's Financial Report for the Fiscal Year ending December 31, 2021 which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) with a fair opinion in all material matters as described in report No. 00371/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/111/2022 dated 28 March 2022.
Tahun Realisasi Year of Realization	2022

Mata Acara Kedua Second Agenda	**Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021** Determination of the Use of the Company's Net Profit/Loss for the 2021 Fiscal Year		
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	1.425.266.540 saham/shares (99,9273%)	1.036.700 saham/shares (0,0727%)	0 saham/share (0%)

Mata Acara Kedua Second Agenda	Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021 Determination of the Use of the Company's Net Profit/Loss for the 2021 Fiscal Year
Keputusan Resolutions	1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp60.056.173.039 sebagai berikut: a. Sebesar Rp42.039.321.127 atau ekuivalen dengan 70,00% akan digunakan sebagai dividen dan akan dibayarkan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham; b. Sebesar Rp2.000.000.000 atau ekuivalen dengan 3,33% akan digunakan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan c. Sebesar Rp16.016.851.912 atau ekuivalen dengan 26,67% akan digunakan sebagai Laba ditahan Perseroan. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham. 1. Determine the use of the Company's Net Profit for the 2021 Fiscal Year amounting to Rp60,056,173,039 as follows: a. Amount of Rp42,039,321,127 or equivalent to 70.00% will be used as dividends and will be paid to shareholders according to the share ownership percentage of each shareholder; b. Rp2,000,000,000 or the equivalent of 3.33% will be used as Mandatory Reserves to fulfill Article 70 paragraph 1 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; And c. Rp16,016,851,912 or equivalent to 26.67% will be used as the Company's retained earnings. 2. Grant authority and power to the Company's Board of Directors with the right of substitution to further regulate the procedures and implementation of cash dividend distribution in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, including rounding up for dividend payments per share.
Tahun Realisasi Year of Realization	2022

Mata Acara Ketiga Third Agenda	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan KeuanganTahunan untuk Tahun Buku 2022 Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Annual Financial Report for the 2022 Fiscal Year		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
Voting Results	1.425.266.540 saham/shares (99,9273%)	1.036.700 saham/shares 0,0727%	0 saham/share (0%)

Mata Acara Ketiga Third Agenda	**Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan KeuanganTahunan untuk Tahun Buku 2022** Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Annual Financial Report for the 2022 Fiscal Year
Keputusan Resolutions	1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, termasuk Audit Kinerja, Audit KPI, dan Audit Kepatuhan Tahun Buku 2022. 2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan, dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut, termasuk untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik setelah berkoordinasi dengan Pemegang Saham Mayoritas, PT Pelindo Multi Terminal, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. 1. Appoint the Purwantono, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young) Public Accounting Firm (KAP) to provide audit services for the Company's Financial Report for the Fiscal Year ending December 31, 2022 and other periods in the 2022 Fiscal Year for the purposes and interests of the Company, including Performance Audit, KPI Audit, and Compliance Audit for Fiscal Year 2022. 2. Grant delegation of authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of compensation for audit services, additional scope of work required, and other reasonable requirements for the public accounting firm, including to determine a replacement Public Accounting Firm in the case of the Purwantono Public Accounting Firm, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young) for whatever reason was unable to complete the audit of the Company's Financial Statements, including determining fees for audit services and other requirements for the replacement Public Accounting Firm. 3. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm after coordinating with the Majority Shareholder, PT Pelindo Multi Terminal, to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the 2022 Fiscal Year for the purposes and interests of the Company.
Tahun Realisasi Year of Realization	2022

Mata Acara Keempat Fourth Agenda	**Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021 dan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022** Determination of Tantiem for the 2021 Fiscal Year and Remuneration for Members of the Company's Board of Commissioners and Directors for the 2022 Fiscal Year		
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	1.425.264.440 saham/shares (99,9272%)	1.038.800 saham/shares (0,0728%)	0 saham/share (0%)
Keputusan Resolutions	1. Memberikan wewenang dan memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022. 2. Memberikan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas. 3. Memberikan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran tantiem bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas. 1. Give authority and grant power to the Majority Shareholders to determine remuneration for members of the Company's Board of Commissioners for 2022. 2. Give authority and grant power to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration for members of the Company's Board of Directors for 2022 after consultation with the Majority Shareholders. 3. Give authority and grant power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of bonuses for members of the Company's Board of Directors and the Company's Board of Commissioners for the 2021 Fiscal Year after consultation with the Majority Shareholders.		
Tahun Realisasi Year of Realization	2022		

Mata Acara Kelima Fifth Agenda	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Report on Use of Funds from Initial Public Offering

Oleh karena Mata Acara Rapat Kelima merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan, dimana Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebagai berikut:

Dari total perolehan dana Initial Public Offering (IPO) sebesar Rp835.002.228.099 sebanyak Rp34.627.174.064 telah digunakan untuk biaya penawaran umum saham Perseroan sehingga diperoleh dana bersih hasil yang didapatkan dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan sebesar Rp800.375.053.935, dan telah digunakan sebagai berikut:
1. Sebesar Rp380.241.065.458 telah dialokasikan untuk Belanja Modal/Capital Expenditure (CAPEX).
2. Sebesar Rp320.590.260.568 telah digunakan untuk Sewa Lahan Dibayar di Muka 5 Tahun.
3. Sebesar Rp10.000.000.000 telah digunakan untuk Modal Kerja (Working Capital).

Dengan demikian sisa dana hasil penawaran umum perdana sampai dengan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp89.543.727.910.

Because the Fifth Meeting Agenda is a report, there is no decision making, which the Company's Board of Directors have submitted a report on the use of funds from the Initial Public Offering up to the Fiscal Year ending December 31, 2021, as follows:

From the total funds from the Initial Public Offering (IPO) amounting to Rp835,002,228,099, Rp. 34,627,174,064 has been used for the costs of the Company's public offering of shares so that the net proceeds obtained from the Company's Initial Public Offering (IPO) amounted to Rp800,375,053 .935, and has been used as follows:
1. Rp380,241,065,458 has been allocated for Capital Expenditure (CAPEX).
2. Rp320,590,260,568 has been used for 5 year prepaid land rent.
3. Rp10,000,000,000 has been used for Working Capital.

Thus, the remaining funds from the initial public offering until the Fiscal Year ending December 31 2021 are Rp89,543,727,910.

Tahun Realisasi Year of Realization	2022

Hasil Keputusan dan Tindak Lanjut RUPS Luar Biasa 4 April 2022

Pada 4 April 2022 jam 10.36 – 10.55 WIB Perseroan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang bertempat di Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310. Berikut hasil keputusan dan tindak lanjutnya:

Results of Resolutions and Follow-up to the Extraordinary GMS April 4, 2022

On April 4, 2022 at 10.36 – 10.55 WIB the Company held an Extraordinary GMS which took place at the Indonesian Maritime Museum, 2nd Floor, Jalan Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, North Jakarta, 14310. Following are the results of the resolutions and the follow-up:

Mata Acara Pertama First Agenda	**Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.** Changes in the Composition of the Company's Management.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
Voting Results	1.397.847.959 saham/shares (99,99405%)	73.600 saham/shares (0,01%)	9.600 saham/shares (0,00069%)
Keputusan Resolutions	1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri sekaligus memberhentikan dengan hormat, Ibu Dwijanti Tjahjaningsih sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2022. Yang sebelumnya diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 26 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0380185 tanggal 1 September 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0143650.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 1 September 2020 dan diangkat kembali berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat oleh Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0422342 tanggal 6 Juli 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119041.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (acquit et de charge), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana. 2. Memberhentikan dengan hormat: a. Bapak Mega Satria sebagai Komisaris Utama. b. Bapak Feri Irawan sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia. c. Yang sebelumnya diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat oleh Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHUAH.01.03-0422342 tanggal 6 Juli 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119041.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya *(acquit et de charge)*, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana. 3. Terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, menyetujui untuk mengangkat: a. Bapak Drajat Sulistyo sebagai Komisaris Utama. b. Bapak Sumarno sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia.		

Mata Acara Pertama First Agenda	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Changes in the Composition of the Company's Management.
	4. 4. Dengan telah diangkatnya Pengurus Perseroan tersebut, maka menyetujui dan menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris • Komisaris Utama: Drajat Sulistyo. • Komisaris Independen: Abdur Rahim Hasan. • Komisaris Independen: LM. Arya Bima Yudiantara. Direksi • Direktur Utama: Rio Theodore Natalianto Lasse • Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis: Agus Hendrianto. • Direktur Operasi dan Teknik: Andi Hamdani. • Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia: Sumarno. • Dengan jangka waktu masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi terdahulu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2025. 5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai seluruh atau sebagian isi dari keputusan ini dan melakukan pelaporan data perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mata Acara Pertama First Agenda	**Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.** Changes in the Composition of the Company's Management.
	1. Approve and accept the resignation and respectfully dismissal of Mrs. Dwijanti Tjahjaningsih as Commissioner of the Company, effective February 8, 2022. Previously appointed based on the Deed of Meeting Resolutions Statement No. 48 dated August 26, 2020, made before Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of Acceptance of Notification of Changes to Company Data No. AHU-AH.01.03-0380185 dated 1 September 2020 and has been registered in the Company Register No. AHU-0143650.AH.01.11 of 2020 dated September 1, 2020 and reappointed based on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 27 dated June 14, 2021, made by Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of Acceptance of Notification of Changes to Company Data No. AHU-AH.01.03-0422342 dated 6 July 2021 and has been registered in the Company Register No. AHU-0119041.AH.01.11 of 2021 dated July 6, 2021, with gratitude for all contributions of energy and thoughts while serving, and providing full repayment and release of responsibility for all actions and/or deeds carried out while carrying out the duties and authority of his position (acquit et de charge), as long as the action is not an unlawful act and/or a criminal act. 2. Dismiss with honor: a. Mr. Mega Satria as President Commissioner. b. Mr. Feri Irawan as Director of Finance and Human Capital. c. Previously appointed based on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 27 dated June 14, 2021, made by Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of Acceptance of Notification of Changes to Company Data No. AHUAH.01.03-0422342 dated 6 July 2021 and has been registered in the Company Register No. AHU-0119041.AH.01.11 of 2021 dated July 6, 2021, with gratitude for all contributions of energy and thoughts while serving, and providing full repayment and release of responsibility for all actions and/or deeds carried out while carrying out the duties and authority of his position (acquit et de charge), as long as the action is not an unlawful act and/or a criminal act. 3. Starting from the closing of the Meeting, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time, agree to appoint: a. Mr. Drajat Sulistyo as President Commissioner. b. Mr Sumarno as Director of Finance and Human Capital. 4. With the appointment of the Company's Management, the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company is approved and determined as follows: Board of Commissioners · President Commissioner: Drajat Sulistyo. · Independent Commissioner: Abdur Rahim Hasan. · Independent Commissioner: LM. Arya Bima Yudiantara. Board of Directors · President Director: Rio Theodore Natalianto Lasse · Director of Commercial and Business Development: Agus Hendrianto. · Director of Operations and Engineering: Andi Hamdani. · Director of Finance and Human Capital: Sumarno. With the term of office continuing the remaining terms of office of the previous members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors until the closing of the Company's Annual GMS in 2025. 5. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Directors, either individually or jointly, to declare in a separate notarial deed all or part of the contents of this resolution and to report changes to the Company's data to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
Tahun Realisasi Year of Realization	2022

Hasil Keputusan dan Tindak Lanjut RUPS Luar Biasa 30 Juni 2022

Pada tanggal 30 Juni 2022 jam 10.36 – 10.55 WIB, Perseroan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang bertempat di Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310. Berikut hasil keputusan RUPS Luar Biasa dan Realisasinya:

Results of Resolutions and Follow-up to the Extraordinary GMS June 30, 2022

On June 30, 2022 at 10.36 – 10.55 WIB, the Company held an Extraordinary GMS which took place at the Indonesian Maritime Museum, 2nd Floor, Jalan Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, North Jakarta, 14310. Following are the results of the Extraordinary GMS Resolutions and their realization:

Mata Acara Pertama First Agenda	**Perubahan dan Pengesahan Logo Baru Perseroan** Changes and Ratification of the Company's New Logo
Mata Acara Pertama merupakan penyampaian laporan Perseroan dan tidak memerlukan pengambilan keputusan. Direksi Perseroan melaporkan dengan adanya proses penggabungan yang terjadi di Pelindo Group yang mengakibatkan adanya penyesuaian logo Perseroan sesuai dengan arahan Pelindo Group, maka Perseroan akan segera menyesuaikan perubahan logo sesuai dengan arahan tersebut, penyesuaian tersebut untuk selanjutnya melalui persetujuan Dewan Komisaris. The First Agenda is the submission of the Company's report and does not require decision making. The Company's Board of Directors reported that with the merger process taking place in the Pelindo Group which resulted in adjustments to the Company's logo in accordance with Pelindo Group's directions, the Company will immediately adjust the logo changes in accordance with these directions, these adjustments will then be subject to approval by the Board of Commissioners.	
Tahun Realisasi Year of Realization	2022

Mata Acara Kedua Second Agenda	**Perubahan dan Pengesahan Pemegang Saham Perseroan** Changes and Ratification of Company Shareholders
Mata Acara Kedua merupakan penyampaian laporan Perseroan dan tidak memerlukan pengambilan keputusan. Direksi Perseroan melaporkan perubahan Pemegang Saham Mayoritas dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai pemegang saham Perseroan sebelumnya ke PT Pelindo Multi Terminal akan diajukan oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (Perseroan) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. The Second Agenda is the submission of the Company's report and does not require decision making. The Company's Board of Directors reports that the change of Majority Shareholder from PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as the Company's previous shareholder to PT Pelindo Multi Terminal will be submitted by PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (Company) to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.	
Tahun Realisasi Year of Realization	2022

Mata Acara Ketiga Third Agenda	**Perubahan Anggaran Dasar** Amendment to the Articles of Association		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	1.423.846.040 saham/Shares (99,8886%)	982.900 saham/Shares (0,0690%)	604.400 saham/Shares (0,0424%)

Mata Acara Ketiga Third Agenda	Perubahan Anggaran Dasar Amendment to the Articles of Association
Keputusan Resolutions	1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (Perseroan) tentang RBA (Risk Based Approach) 2020. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (Perseroan) dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan pada tahun 2023 dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. 1. Approved changes to Article 3 of the Articles of Association of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (the Company) regarding RBA (Risk Based Approach) 2020. 2. Agree to reconstitute the Articles of Association in connection with these changes. 3. Grant power and authority to the Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (the Company) with the right of substitution to carry out all necessary actions related to the resolutions on the agenda of the Meeting, including preparing and restating the entire Articles of Association in a Notarial Deed no later than before holding the Annual GMS in 2023 and submitting it to the authorized agency to obtain approval and/or receiving notification of changes to the Company's Articles of Association, doing everything deemed necessary and useful for these purposes with nothing being excluded, including making additions and/ or changes to the Company's Articles of Association if this is required by the authorized agency.
Tahun Realisasi Year of Realization	2022

Mata Acara Keempat Fourth Agenda	Pelimpahan kewenangan penetapan pedoman pengadaan barang dan jasa dari Pemegang Saham ke Dewan Komisaris. Delegation of authority to determine guidelines for procurement of goods and services from Shareholders to the Board of Commissioners.
Mata Acara Keempat dari Rapat tidak dibahas dan tidak diambil keputusan. The Fourth Agenda of the Meeting was not discussed and no decision was made.	

Mata Acara Kelima Fifth Agenda	Implementasi Integrasi, Harmonisasi, dan Sinergi Kebijakan Pengelolaan SDM pada PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Implementation of Integration, Harmonization and Synergy of HC Management Policies at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Mata Acara Kelima merupakan penyampaian laporan Perseroan dan tidak memerlukan pengambilan keputusan. Direksi Perseroan melaporkan pengukuhan dan ratifikasi Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal No. HK.01/29/6/1/PSOS/DIRU/PLMT-22 tanggal 29 Juni 2022 tentang Kebijakan Pengelolaan bidang SDM pada Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, dan Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal, berikut perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuannya, yang pelaksanaannya tetap memperhatikan dan memedomani Peraturan Perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan akan segera mengikuti arahan PT Pelindo Multi Terminal sebagai Pemegang Saham Mayoritas terkait dengan penyelarasan ketentuan, kebijakan, sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan SDM untuk diterapkan dalam lingkungan kerja Perseroan. The Fifth Agenda is the submission of the Company's report and does not require decision making. The Company's Board of Directors reports the confirmation and ratification of PT Pelindo Multi Terminal Board of Directors Regulation No. HK.01/29/6/1/PSOS/DIRU/PLMT-22 dated June 29, 2022 concerning HC Management Policy in Subsidiaries, Affiliated Companies and Joint Operations (KSO) within PT Pelindo Multi Terminal, including changes, additions, and/or renewals, the implementation of which still consider and guides the Company's Legislative Regulations and Articles of Association will immediately follow the directions of PT Pelindo Multi Terminal as the Majority Shareholder regarding the alignment of provisions, policies, systems, mechanisms and HC management procedures to be implemented in the Company work environment.	
Tahun Realisasi Year of Realization	2022

Mata Acara Keenam Sixth Agenda	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Changes in the Composition of the Company's Management
Mata Acara Keenam merupakan penyampaian laporan Perseroan dan tidak memerlukan pengambilan keputusan. Direksi Perseroan melaporkan bahwa pengisian jabatan lowong Dewan Komisaris Perseroan belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian BUMN berdasarkan Surat PT Pelindo Multi Terminal No.HK.02/29/6/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 tanggal 29 Juni 2022. Oleh karena itu, agenda ini tidak dibahas dan tidak diambil keputusan. The Sixth Agenda is the submission of the Company's report and does not require decision making. The Company's Board of Directors reported that the vacant position of the Company's Board of Commissioners had not received approval from the Ministry of SOE based on PT Pelindo Multi Terminal Letter No.HK.02/29/6/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 dated 29 June 2022. Therefore, This agenda was not discussed and no decision was taken.	
Tahun Realisasi Year of Realization	2022

Hasil Keputusan dan Tindak Lanjut RUPS Luar Biasa, 25 November 2022

Pada tanggal 25 November 2022, pukul 09.50 WIB-10.12 WIB, Perusahaan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang bertempat di Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310. Berikut hasil keputusan RUPS Luar Biasa dan realisasinya:

Results of Resolutions and Follow-up to the Extraordinary GMS, November 25, 2022

On November 25, 2022, at 09.50 WIB-10.12 WIB, the Company held an Extraordinary GMS which took place at the Indonesian Maritime Museum, 2nd Floor, Jalan Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, North Jakarta, 14310. Following are the results of the Extraordinary GMS Resolutions and their realization:

Mata Acara Agenda	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Changes in the Composition of the Company's Management		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
Voting Results	1.421.575.341 saham/Shares (99.99707%)	0 saham/Share (0%)	41.600 saham/Shares (0,00293%)

Mata Acara Agenda	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Changes in the Composition of the Company's Management
Keputusan Resolutions	1. Memberhentikan dengan hormat Agus Hendrianto sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan, yang sebelumnya diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 14 Juni 2021, yaitu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tertanggal 14 Juni 2021 No. 27, dibuat oleh Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0422342 tanggal 6 Juli 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0119041. AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (acquit et de charge), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana dan atau perbuatan dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tabun buku yang bersangkutan. Pengisian jabatan kosong Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan akan dirangkap oleh Direktur Utama Perseroan. 2. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Drajat Sulistyo Komisaris Independen : Abdur Rahim Hasan Komisaris Independen : LM. Arya Bima Yudiantara Direksi Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : Rio Theodore Natalianto Lasse Direktur Operasi dan Teknik : Andi Hamdani Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : Sumarno 1. Respectfully dismissed Agus Hendrianto as Director of Commercial and Business Development of the Company, who was previously appointed based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders dated June 14, 2021, namely as contained in the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dated June 14, 2021 No. 27, made by Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, which was notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of Acceptance of Notification of Changes to Company Data No.AHU-AH.01.03-0422342 dated July 6 2021 and has been registered in the Company Register No.AHU-0119041. AH.01.11.Year 2021 dated July 6, 2021, with gratitude for all the contributions of energy and thoughts while serving, and providing repayment and release from responsibility for all actions and/or deeds carried out while carrying out the duties and authority of his position (acquit et de charge), as long as the action is not an unlawful act and/or a criminal act and/or the act is contained in the Company's Financial Report and the Company's Financial Report has been ratified at the Annual General Meeting of Shareholders for the relevant Fiscal Year. The vacant position of Director of Commercial and Business Development of the Company will be filled simultaneously by the President Director of the Company. 2. With the dismissal and appointment, the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners will be as follows: Board of Commissioners President Commissioner: Drajat Sulistyo Independent Commissioner: Abdur Rahim Hasan Independent Commissioner: LM. Arya Bima Yudiantara Board of Directors President Director Concurrently Director of Commercial and Business Development: Rio Theodore Natalianto Lasse Director of Operations and Engineering: Andi Hamdani Director of Finance and Human Capital: Sumarno
Tahun Realisasi Year of Realization	2022

Direksi
BOARD OF DIRECTORS

Sebagai salah satu organ Perseroan, Direksi memiliki fungsi utama untuk mengelola perusahaan, bertanggung jawab penuh baik secara individual maupun kolektif atas jalannya pengurusan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi juga berperan sebagai wakil Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Seluruh anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh itikad baik demi tercapainya kepentingan terbaik Perseroan.

Keberadaan dan fungsi organ Direksi di IPCC telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

As one of the Company's organs, the Board of Directors has the main function of managing the company, taking full responsibility both individually and collectively for the running of the Company, in accordance with the Company's aims and objectives. The Board of Directors also acts as the Company's representative both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association. All members of the Board of Directors are obliged to carry out their duties and responsibilities in full good faith in order to achieve the best interests of the Company.

The existence and function of the Board of Directors at the IPCC is in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) concerning the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 108.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan.
- Anggaran Dasar IPCC.
- Pedoman *Good Corporate Governance* IPCC.
- Pedoman Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi IPCC.

LEGAL BASIS

- Limited Liability Company Law no. 40 of 2007 Article 108.
- Financial Services Authority Regulation no. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
- Financial Services Authority Regulation no. 75/POJK.04/2017 concerning the Responsibility of Directors for Financial Reports.
- IPCC Articles of Association.
- IPCC Good Corporate Governance Guidelines.
- Guidelines for the Working Relations of the IPCC Board of Commissioners and Directors.

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Pedoman Kerja Direksi merupakan kebijakan yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi. Board Manual ini secara umum telah mengatur tentang masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, tata tertib rapat, dan hal lainnya terkait fungsi Direksi sebagai organ utama Perseroan. Hal tersebut selaras dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 33/POJK.04/2014.

Secara garis besar, Board Manual Direksi berisi pokok-pokok sebagai berikut:

1. Kebijakan mengenai Direksi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.
2. Kebijakan mengenai Direksi berdasarkan Anggaran Dasar.

BOARD DIRECTORS WORK GUIDELINES

The Directors' Work Guidelines are policies that guide the implementation of the duties and responsibilities of members of the Board of Directors. This Board Manual generally regulates terms of office, duties and responsibilities, meeting rules and other matters related to the function of the Board of Directors as the main organ of the Company. This is in line with the provisions regulated in POJK 33/POJK.04/2014.

In general, the Board of Directors Manual contains the following points:

1. Policies regarding the Board of Directors are based on the Regulations of the Financial Services Authority and the Indonesian Stock Exchange.
2. Policy regarding the Board of Directors based on the

3. Tugas dan Wewenang Direksi.
4. Rapat Direksi.
5. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas.
6. Independensi Direksi.
7. Etika Jabatan Anggota Direksi.
8. Susunan Direksi.
9. Fungsi Pendukung Direksi.

Dengan adanya *Board Manual*, pelaksanaan tugas Direksi diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan efektif sehingga dapat menghadirkan pengelolaan perusahaan yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sebagai salah satu alat penilaian kinerja Direksi.

MASA JABATAN DIREKSI

Masa jabatan anggota Direksi Perseroan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

KRITERIA DAN PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI

Dalam proses nominasi anggota Direksi, Perseroan wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan demi tercapainya tujuan dan kepentingan terbaik Perseroan. Informasi pemenuhan kriteria masing-masing anggota Direksi diuraikan sebagai berikut:

Articles of Association.
3. Duties and Authorities of the Board of Directors.
4. Board of Directors Meeting.
5. Introduction and Capability Improvement Program.
6. Independence of the Board of Directors.
7. Position Ethics for Members of the Board of Directors.
8. Composition of the Board of Directors.
9. Supporting Functions of the Board of Directors.

With the Board Manual, it is hoped that the implementation of the Directors' duties can be more focused and effective so that company management can be implemented in accordance with GCG principles as a tool for assessing the performance of the Directors.

BOARD OF DIRECTORS TERM OF OFFICE

The term of office of a member of the Company's Board of Directors is 5 (five) years from the date determined by the GMS that appointed him and ends at the close of the 5th Annual GMS after the date of his appointment, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of Directors at any time before the term of office. his term ends. Members of the Board of Directors whose terms of office have ended can be reappointed in accordance with the GMS Resolution for 1 (one) subsequent term of office.

CRITERIA AND REQUIREMENTS FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

In the process of nominating members of the Board of Directors, the Company is obliged to ensure that all members of the Board of Directors have the competence and expertise required to achieve the goals and best interests of the Company. Information on the fulfillment of the criteria for each member of the Board of Directors is described as follows:

Kriteria/Persyaratan Criteria/Requirements	Sugeng Mulyadi	Bagus Dwipoyono	Wing Megantoro
Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik Have good character, morals and integrity	√	√	√
Cakap melakukan perbuatan hukum 2. Capable of carrying out legal actions	√	√	√
Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 3. Within 5 (five) years before appointment and during office:	√	√	√
Tidak pernah dinyatakan pailit a. Never declared bankruptcy	√	√	√

Kriteria/Persyaratan Criteria/Requirements	Sugeng Mulyadi	Bagus Dwipoyono	Wing Megantoro
Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau b. Never been a member of the Board of Directors or Board of Commissioners being found guilty of causing a Company to be declared bankrupt; or	√	√	√
Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan c. Never been convicted of committing a criminal offense that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector	√	√	√
Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: d. Never been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners while serving:	√	√	√
Tidak pernah menyelenggarakan RUPS Tahunan i) Never held an Annual GMS	√	√	√
Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris kepada RUPS. ii) The responsibilities as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners have never been accepted by the GMS or he has never provided his responsibilities as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS.	√	√	√
Tidak pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. iii) Never cause a company that obtains a permit, approval or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to the Financial Services Authority.	√	√	√
Memiliki komitmen untuk memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan. 4. Have a commitment to understand and comply with statutory regulations.	√	√	√
Memiliki pengetahuan dan atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik 5. Have knowledge and/or expertise in the field required by the Issuer or Public Company	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perusahaan tercatat yang bersangkutan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen. Has no affiliation with the Controller of the listed Company concerned for at least 6 (six) months prior to appointment as Independent Director.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Calon Perusahaan. 2. Has no affiliation with other Commissioners or Directors of the Prospective Company.	√	√	√
Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain 3. Do not work concurrently as a Director in another company	√	√	√

Kriteria/Persyaratan Criteria/Requirements	Sugeng Mulyadi	Bagus Dwipoyono	Wing Megantoro
Tidak menjadi Orang Dalam Lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Calon Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur 4. Not be a Person in an Institution or Capital Market Supporting Professional whose services are used by the Prospective Listed Company for 6 (six) months prior to appointment as Director	√	√	√

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN DIREKSI TAHUN 2023

Ketentuan mengenai komposisi dan keanggotaan Direksi Perusahaan, sebagai berikut:

- Jumlah Direksi disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas, dan rencana strategis Perusahaan;
- Dalam hal Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan diangkat seorang Wakil Direktur Utama48;
- Komposisi dan pembagian tugas serta wewenang Direksi berdasarkan struktur organisasi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS. Apabila pembagian tugas Direksi tidak ditetapkan oleh RUPS maka pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;
- Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham.

Per 31 Desember 2023, jumlah dan komposisi Direksi Perseroan berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama yang merangkap Direktur Operasi dan Teknik, Direktur Operasi dan Teknik, dan Direktur Keuangan dan SDM.

NUMBER, COMPOSITION AND STRUCTURE OF DIRECTORS IN 2023

Provisions regarding the composition and membership of the Company's Board of Directors, as follows:

- The number of Directors is adjusted to the needs, level of complexity and strategic plans of the Company;
- In the event that the Board of Directors consists of more than 1 (one) member of the Board of Directors, one of whom is appointed as President Director, and if necessary a Deputy President Director is appointed48;
- The composition and distribution of duties and authority of the Board of Directors based on the Company's organizational structure is determined by the GMS. If the division of duties of the Board of Directors is not determined by the GMS, the distribution of duties and authority among members of the Board of Directors is determined based on the decision of the Board of Directors;
- Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders (GMS) and the GMS Resolutions must be approved by the Shareholders.

As of December 31, 2023, the number and composition of the Company's Directors amounted to 3 (three) people, consisting of 1 (one) President Director who is also the Director of Operations and Engineering, Director of Operations and Engineering, and Director of Finance and HR.

Tabel Susunan dan Komposisi Direksi Per 31 Desember 2023
Table of Structure and Composition of the Board of Directors As of December 31, 2023

Nama **Name**	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Period of Office
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director concurrently Director of Commercial and Business Development	Akta nomor 44 tanggal 18 April 2023 Deed number 44 dated April 18, 2023	April 2023 s.d. penutupan RUPS tahun 2025 April 2023 until closing of the GMS in 2025	Ke-1 First

Tabel Susunan dan Komposisi Direksi Per 31 Desember 2023
Table of Structure and Composition of the Board of Directors As of December 31, 2023

Nama **Name**	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Period of Office
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Engineering	Akta nomor 44 tanggal 18 April 2023 Deed number 44 dated April 18, 2023	April 2023 s.d. penutupan RUPS tahun 2025 April 2023 until closing of the GMS in 2025	Ke-1 First
Wing Megantoro	Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Director of Finance and Human Capital	Akta nomor 6 tanggal 5 September 2023 Deed number 6 dated September 5, 2023	September 2023 s.d. penutupan RUPS tahun 2025 September 2023 until closing of the GMS in 2025	Ke-1 First

Perubahan komposisi dan susunan Direksi serta Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Changes in the composition and structure of the Board of Directors as well as the profiles of all Directors can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab Direksi yang telah diatur dalam Pedoman Tata Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi yaitu menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan Pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi bertanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam maupun luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berwenang untuk:

- Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada orang atau beberapa orang anggota Direksi;
- Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan;
- Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan;
- Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan; dan
- Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun kepemilikan kekayaan Perseroan.

DUTIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The duties and responsibilities of the Board of Directors as regulated in the Working Procedures Guidelines for the Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors are carrying out all actions related to the Management of the Company for the interests of the Company, in accordance with the aims and objectives of the Company. The Board of Directors is responsible for representing the Company both inside and outside the Court regarding all matters and all events with limitations.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors has the authority to:

- Regulate the transfer of the powers of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the court to one or several members of the Board of Directors;
- Regulate provisions regarding Company personnel;
- Appoint and dismiss Company employees;
- Appoint and dismiss the Corporate Secretary; And
- Carry out all actions and other actions regarding the management and ownership of the Company's assets.

Di samping mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, Direksi juga memiliki kewajiban untuk:

- Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris;
- Memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
- Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi;
- Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perseroan;
- Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk di audit;
- Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
- Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahun ini;
- Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan;
- Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
- Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpan dan pengawasan;
- Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
- Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- Menyusun dan menetapkan struktur organisasi Perseroan;
- Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai

In addition to carrying out the duties and responsibilities that have been determined, the Board of Directors also has the obligation to:

- Strive for and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its aims and objectives and business activities;
- Prepare in a timely manner the Company's Long Term Plan, Work Plan and Budget, and any amendments thereto and submit them to the Board of Commissioners for approval from the Board of Commissioners;
- Provide an explanation to the Board of Commissioners regarding the Company's Long Term Plan and the Company's Work Plan and Budget;
- Create a Shareholder List, Special List and Minutes of Directors' Meetings;
- Prepare an Annual Report as a form of accountability for company management, as well as company financial documents as intended in the Law on Company Documents;
- Prepare Financial Reports based on Financial Accounting Standards and submit them to the Public Accountant for audit;
- Submit the Annual Report including Financial Reports to the GMS for approval and ratification;
- Provide an explanation to the GMS regarding this year's report;
- Submit the Balance Sheet and Profit and Loss Report approved by the GMS to the Minister in charge of Law and Human Rights in accordance with the provisions of statutory regulations;
- Maintaining the Shareholders' Register, Special List, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners' Meetings and Minutes of Directors' Meetings, Annual Reports and Financial Documents of the Company;
- Store at the Company's place of residence: List of Shareholders, Special List, Minutes of GMS, Minutes of Meetings of the Board of Commissioners and Minutes of Meetings of the Board of Directors, Annual Report and financial documents of the Company;
- Develop an accounting system in accordance with Financial Accounting standards and based on internal control principles, especially the separation of management, recording, storage and supervision functions;
- Provide periodic reports according to the method and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners;
- Prepare the Company's organizational structure complete with details and duties;
- Develop and determine the Company's organizational structure;
- Carry out other obligations in accordance with the

dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

provisions stipulated in these Articles of Association and determined by the GMS based on statutory regulations.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING DIREKSI

Pembagian tugas masing-masing Direksi dilakukan guna menjamin pelaksanaan dan kesinambungan pencapaian sasaran Perseroan pada masa mendatang secara lebih sistematis, efisien, dan efektif. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi sejalan dengan Surat Keputusan No.HK.56/1/5/IKT-21 Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, sebagai berikut:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF EACH DIRECTOR

The division of duties of each Director is carried out to ensure the implementation and continuity of achieving the Company's targets in the future in a more systematic, efficient and effective manner. The scope of duties and responsibilities of each Director is in line with Decree No.HK.56/1/5/IKT-21. The division of duties and responsibilities of each Director is as follows:

Sugeng Mulyadi
Direktur Utama Merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
President Director Concurrently Director of Commercial and Business Development

Tugas dan Tanggung Jawab:
- Memutuskan dan menetapkan arah dan kebijakan pengelolaan Perseroan secara menyeluruh.
- Bertanggung jawab dalam kepemimpinan dan pengelolaan bisnis Perseroan sesuai dengan keputusan dari pemegang saham melalui Dewan Komisaris.
- Merumuskan, merencanakan dan menetapkan rencana strategis perusahaan dalam menciptakan pendapatan dan pengelolaan keuangan Perseroan.
- Bertindak sebagai perwakilan Perseroan dalam berhubungan dengan pihak eksternal.
- Berperan sebagai Koordinator Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Merumuskan, merencanakan, mengendalikan, dan mengoordinasikan strategi implementasi program kerja manajemen bidang Operasi, Teknik, dan Sistem Informasi serta Terminal Satelit.
- Bertanggung jawab dalam kepemimpinan dan pengelolaan bisnis perusahaan, sesuai arah dan strategi Perseroan.
- Bertindak sebagai perwakilan Perseroan dalam berhubungan dengan pihak eksternal Perseroan dalam bidang Operasi, Teknik dan Sistem Informasi serta Terminal Satelit.

Duties and responsibilities:
- Decide and determine the overall management direction and policies of the Company.
- Responsible for the leadership and management of the Company's business in accordance with the decisions of shareholders through the Board of Commissioners.
- Formulate, plan and determine the company's strategic plan in creating revenue and managing the Company's finances.
- Act as the Company's representative in dealing with external parties.
- Act as Coordinator of the Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Formulate, plan, control and coordinate implementation strategies for management work programs in the fields of Operations, Engineering and Information Systems and Satellite Terminals.
- Responsible for leadership and management of the company's business, in accordance with the Company's direction and strategy.
- Act as the Company's representative in dealing with external parties of the Company in the fields of Operations, Engineering and Information Systems and Satellite Terminals.

Bagus Dwipoyono
Direktur Operasi dan Teknik
Director of Operations and Engineering

Tugas dan Tanggung Jawab:
- Merumuskan, merencanakan, dan mengendalikan arah dan kebijakan pengelolaan Perseroan dalam bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
- Bertanggung jawab dalam kepemimpinan dan pengelolaan bisnis perusahaan dalam
- bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
- Mengelola dan mengimplementasikan rencana strategis Perseroan dalam bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
- Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam berhubungan dengan pihak eksternal.
- Merumuskan, merencanakan, mengendalikan, dan mengoordinasikan strategi implementasi program kerja manajemen bidang Komersial, Strategi, dan Pengembangan Bisnis.
- Bertanggung jawab dalam kepemimpinan dan pengelolaan bisnis Perseroan dalam bidang Komersial, Strategi, dan Pengembangan Bisnis sesuai arah dan strategi Perseroan.
- Mengelola dan mengimplementasikan rencana strategis Perseroan dalam bidang Komersial, Strategi, dan Pengembangan Bisnis.
- Bertindak sebagai perwakilan Perseroan dalam berhubungan dengan pihak eksternal
- Perseroan dalam bidang Komersial, Strategi, dan Pengembangan Bisnis.

Duties and responsibilities:
- Decide and determine the overall management direction and policies of the Company.
- Responsible for the leadership and management of the Company's business in accordance with the decisions of shareholders through the Board of Commissioners.
- Formulate, plan and determine the company's strategic plan in creating revenue and managing the Company's finances.
- Act as the Company's representative in dealing with external parties.
- Act as Coordinator of the Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Formulate, plan, control and coordinate implementation strategies for management work programs in the fields of Operations, Engineering and Information Systems and Satellite Terminals.
- Responsible for leadership and management of the company's business, in accordance with the Company's direction and strategy.
- Act as the Company's representative in dealing with external parties of the Company in the fields of Operations, Engineering and Information Systems and Satellite Terminals.

Wing Megantoro
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia
Director of Finance and Human Capital

Tugas dan Tanggung Jawab:
- Merumuskan, merencanakan, dan mengendalikan arah dan kebijakan pengelolaan Perseroan dalam bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
- Bertanggung jawab dalam kepemimpinan dan pengelolaan bisnis perusahaan dalam bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
- Mengelola dan mengimplementasikan rencana strategis Perseroan dalam bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
- Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam berhubungan dengan pihak eksternal.
- Merumuskan, merencanakan, mengendalikan, dan mengoordinasikan strategi implementasi program kerja manajemen bidang Komersial, Strategi, dan Pengembangan Bisnis.
- Bertanggung jawab dalam kepemimpinan dan pengelolaan bisnis Perseroan dalam bidang Komersial, Strategi, dan Pengembangan Bisnis sesuai arah dan strategi Perseroan.
- Mengelola dan mengimplementasikan rencana strategis Perseroan dalam bidang Komersial, Strategi, dan Pengembangan Bisnis.
- Bertindak sebagai perwakilan Perseroan dalam berhubungan dengan pihak eksternal Perseroan dalam bidang Komersial, Strategi, dan Pengembangan Bisnis.

Duties and responsibilities:
- Formulate, plan and control the direction and policies of the Company's management in the fields of Finance and Human Resources.
- Responsible for leadership and management of the company's business in the fields of Finance and Human Capital.
- Manage and implement the Company's strategic plans in the field of Finance and Human Capital.
- Act as a company representative in dealing with external parties.
- Responsible for leadership and management of the Company's business in the areas of Commercial, Strategy and Business Development in accordance with the Company's direction and strategy.
- Responsible for leadership and management of the Company's business in the field of Commercial, Strategy and Business Development in accordance with the Company's direction and strategy.
- Manage and implement the Company's strategic plans in the field of Commercial, Strategy and Business Development.
- Act as the Company's representative in dealing with external parties Company in the fields of Commercial, Strategy and Business Development.

INDEPENDENSI DIREKSI

Perseroan menjamin bahwa seluruh anggota Direksi melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak-pihak lain. Direksi juga senantiasa menghindari setiap aktivitas atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus Perseroan.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Dalam hal terjadi transaksi atau aktivitas yang mengandung benturan kepentingan, maka setiap anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka Direksi harus mengutamakan kepentingan Perseroan dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Perseroan.

PROGRAM ORIENTASI/PENGENALAN BAGI DIREKSI BARU TAHUN 2023

Perseroan memiliki kebijakan dan program orientasi atau pengenalan bagi anggota Direksi yang baru bergabung. Pelaksanaan program ini dimaksudkan agar semua anggota Direksi dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung kemajuan Perseroan.

Topik-topik utama yang dibahas pada program orientasi Direksi, antara lain mencakup:

- Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Perseroan;
- Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan;
- Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka panjang, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya;
- Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

BOARD OF DIRECTORS INDEPENDENCE

The Company guarantees that all members of the Board of Directors carry out their functions and duties professionally and independently, and do not have conflicts of interest with other parties. The Board of Directors also always avoids any activities or actions that are contrary to statutory regulations and could affect their independence in carrying out their duties and responsibilities as management of the Company.

MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST OF BOARD OF DIRECTORS

In the event that a transaction or activity that contains a conflict of interest occurs, each member of the Board of Directors is prohibited from taking action that could harm the Company or reduce the Company's profits and is obliged to disclose the conflict of interest in every decision. If a decision still has to be taken, the Board of Directors must prioritize the interests of the Company and avoid losses or reduction in the Company's profits.

ORIENTATION/INTRODUCTION PROGRAM FOR NEW DIRECTORS IN 2023

The Company has orientation or introduction policies and programs for new members of the Board of Directors. The implementation of this program is intended so that all members of the Board of Directors can better understand their duties and responsibilities in supporting the Company's progress.

The main topics discussed in the Directors' orientation program include:

- Implementation of Good Corporate Governance principles in the Company;
- Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors as well as other things that are not permitted;
- An overview of the Company relating to objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, long-term business plans, risks, internal control and other strategic issues;
- Information relating to delegated authority, internal and external audits, and internal control policies and the Audit Committee.

Di sepanjang tahun 2023, Perseroan melaksanakan program orientasi Direksi pada 29 Mei 2023 yang dilaksanakan di Innovation Room yang diikuti oleh seluruh Direksi, Senior Manager, dan Asisten Senior Manager.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI TAHUN 2023

Program pengembangan knowledge dan skills merupakan salah satu program penting bagi Direksi dalam mengikuti perkembangan terkini dari aktivitas Perseroan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi. Program peningkatan kapabilitas bagi anggota Direksi yang dilakukan secara berkelanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Direksi dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya.

Selama tahun 2023, Direksi telah mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut.

Throughout 2023, the Company carried out a Board of Directors orientation program on May 29, 2023 held in the Innovation Room, attended by all Directors, Senior Managers and Assistant Senior Managers.

BOARD OF DIRECTORS' COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2023

The knowledge and skills development program is an important program for the Board of Directors in following the latest developments in the Company's activities and other knowledge related to the implementation of the Board of Directors' duties. The capability improvement program for members of the Board of Directors which is carried out on an ongoing basis is intended to increase the competency and capability of the Board of Directors in carrying out their functions, duties and responsibilities.

During 2023, the Board of Directors has participated in the following training and competency development.

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2023
Table of Training and Competency Development for Directors in 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Waktu Penyelenggaraan Implementation Time	Penyelenggara Organizer
Sugeng Mulyadi (Direktur Utama merangkap Plt Direktur Komersial dan Pengembangan BIsnis) (President Director Concurrently Acting Director of Commercial and Business Development)	Live Webminar	Global Integrated Risk Management Association	15 Juli 2023 July 15, 2023	LSPMR-GIRMA
	Investor Daily Round Table	Transformasi Ekonomi di Tengah Tantangan Global Economic Transformation amidst Global Challenges	7 Agustus August 7, 2023	BTV
	GRC Summit 2023	Building Reslinet Fture through GRC and ESG	24-25 Agustus August 24-25, 2023	Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA)
	Workshop	Competition Through Innovation and Collaboration Indrawan Nugroho (CIAS) & Ary Syamsudin (TTMIN)	11 Desember 2023 December 11, 2023	CIAS & IKT
	Konfrensi Nasional National Conference	Profesional Manajemen Risiko IX Risk Management Professional IX	14-15 Desember 2023 December 14-15, 2023	LSPMR

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2023
Table of Training and Competency Development for Directors in 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Waktu Penyelenggaraan** Implementation Time	**Penyelenggara** Organizer
Bagus Dwipoyono (Direktur Operasi dan Teknik) (Director of Operations and Engineering)	GRC Summit 2023	Building Reslinet Fture through GRC and ESG	24-25 Agustus August 24-25	Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA)
	Workshop	Competition Through Innovation and Collaboration Indrawan Nugroho (CIAS) & Ary Syamsudin (TTMIN)	11 Desember 2023 December 11, 2023	CIAS & IKT
Wing Megantoro (Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia) (Director of Finance and Human Capital)	Workshop	Competition Through Innovation and Collaboration Indrawan Nugroho (CIAS) & Ary Syamsudin (TTMIN)	11 Desember 2023 December 11, 2023	CIAS & IKT

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI TAHUN 2023

Pada tahun pelaporan 2023, Direksi Perseroan telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF BOARD OF DIRECTORS' DUTIES FOR 2023

In the 2023 reporting year, the Company's Directors have carried out all their duties and responsibilities properly in accordance with those mandated in the Company's Articles of Association, with the following description:

No	**Uraian Tugas** Duties Description	**Status Realisasi** Realization Status
Terkait dengan RUPS Related to the GMS		
1	Wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan perundang-undangan. Must organize and store documents related to the GMS in accordance with statutory provisions.	Sudah Terealisasi Realized
2	Menandatangani Laporan Tahunan, dan apabila dalam hal anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya. Sign the Annual Report, and if a member of the Board of Directors does not sign the Annual Report, the reason must be stated.	Sudah Terealisasi Realized
3	Menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan. Sign the Quarterly Management Report and Annual Management Report.	Sudah Terealisasi Realized
4	Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa. Carry out the invitation and hold an Annual GMS and/or Extraordinary GMS.	Sudah Terealisasi Realized
5	Menyediakan bahan RUPS kepada Pemegang Saham. Providing GMS materials to Shareholders.	Sudah Terealisasi Realized
6	Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan, termasuk Laporan Keuangan, baik dalam bentuk Laporan Tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan kepada RUPS. Provide accountability and all information regarding the condition and running of the Company in the form of reports on the Company's activities, including Financial Statements, both in the form of Annual Reports and in the form of other periodic reports according to the method and time determined by the GMS.	Sudah Terealisasi Realized

No	Uraian Tugas Duties Description	Status Realisasi Realization Status
7	Meminta persetujuan RUPS jika akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar. Request approval from the GMS if changes to the Articles of Association are to be made.	Sudah Terealisasi Realized
8	Memberikan Risalah RUPS jika diminta oleh Pemegang Saham. Provide GMS Minutes if requested by Shareholders.	Sudah Terealisasi Realized
Terkait dengan Strategi dan Rencana Perusahaan Related to Company Strategy and Plans		
1	Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. Strive for and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its aims and objectives and business activities.	Sudah Terealisasi Realized
2	Menyiapkan RJPP dan RKAP termasuk rencana-rencana lain yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham guna mendapatkan pengesahan dalam RUPS. Prepare RJPP and RKAP including other plans related to the implementation of the Company's business and activities to be submitted to the Board of Commissioners and Shareholders for approval at the GMS.	Sudah Terealisasi Realized
3	Melaksanakan rencana bisnis secara efektif dalam pengelolaan Perseroan. Implement business plans effectively in managing the Company.	Sudah Terealisasi Realized
Terkait dengan Penyusunan RJPP Related to the preparation of RJPP		
1	Menyusun RJPP yang sekurang-kurangnya memuat: Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya; Posisi Perseroan saat ini; Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP. Prepare RJPP which at least includes: Evaluation of previous RJPP implementation; Current position of the Company; Assumptions used in preparing the RJPP.	Sudah Terealisasi Realized
2	Penetapan Visi, Misi, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kerja Rencana Jangka Panjang. Determination of Vision, Mission, Targets, Strategy, Policies and Long Term Plan Work Programs.	Sudah Terealisasi Realized
3	Bersama dengan Dewan Komisaris menandatangani RJPP yang telah disepakati dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham. Together with the Board of Commissioners, sign the agreed RJPP and submit it to the Shareholders.	Sudah Terealisasi Realized
4	Dalam hal terjadi perubahan faktor internal dan eksternal Perseroan dikarenakan terdapat perubahan material yang berada di luar kendali Direksi, Direksi melakukan kajian terhadap kemungkinan revisi RJPP yang berlaku. In the event that there are changes in the Company's internal and external factors due to material changes that are beyond the control of the Board of Directors, the Board of Directors will conduct a study of possible revisions to the applicable RJPP.	Sudah Terealisasi Realized
5	Dalam hal diperlukan revisi RJPP, maka Direksi harus menyampaikan RJPP hasil revisi kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan tanggapan dan persetujuan untuk diajukan kepada RUPS. In the event that a revision of the RJPP is required, the Directors must submit the revised RJPP to the Board of Commissioners to obtain responses and approval for submission to the GMS.	Sudah Terealisasi Realized
Terkait dengan Penyusunan RKAP Related to the preparation of RKAP		
1	Kinerja Perseroan tahun berjalan. Company performance for the current year.	Sudah Terealisasi Realized
2	Rencana kerja Perseroan. Company work plan.	Sudah Terealisasi Realized
3	Anggaran Perseroan. Company Budget.	Sudah Terealisasi Realized
4	Proyeksi keuangan Perseroan. Company financial projections.	Sudah Terealisasi Realized

No	Uraian Tugas Duties Description	Status Realisasi Realization Status
5	Proyek keuangan anak perusahaan. Subsidiary financial projects.	Sudah Terealisasi Realized
6	Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS. Other matters that require a GMS Resolution.	Sudah Terealisasi Realized
7	Direksi menyerahkan RKAP kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan sebelum diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. The Board of Directors submits the RKAP to the Board of Commissioners for feedback before submitting it to the GMS for approval.	Sudah Terealisasi Realized
Terkait dengan Laporan Tahunan Related to the Annual Report		
1	Menyusun Laporan Tahunan Perusahaan dan bersama dengan Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan Perusahaan dimaksud. Prepare the Company's Annual Report and together with the Board of Commissioners sign the Company's Annual Report.	Sudah Terealisasi Realized
2	Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham. Submitting Annual Reports to Shareholders.	Sudah Terealisasi Realized
Terkait dengan Pengelolaan Manajemen Risiko Related to Risk Management		
Mengembangkan sistem manajemen risiko dan melaksanakannya secara konsisten, dengan tahapan sebagai berikut: Develop a risk management system and implement it consistently, with the following stages:		
1	Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis-jenis risiko yang relevan dan berpotensi terjadi. Risk Identification, namely the process of recognizing the types of risks that are relevant and have the potential to occur.	Sudah Terealisasi Realized
2	Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak dan probabilitas untuk setiap risiko yang telah teridentifikasi. Risk Measurement, namely the process of measuring the magnitude of impact and probability for each risk that has been identified.	Sudah Terealisasi Realized
3	Evaluasi Risiko, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang dilakukan di dalam Perseroan. Risk Evaluation, namely the process of reviewing the adequacy of all risk management activities carried out within the Company.	Sudah Terealisasi Realized
4	Penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani risiko potensial. Risk Management, namely the process of determining efforts that can be taken to handle potential risks.	Sudah Terealisasi Realized
5	Pemantauan Risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan terhadap berbagai faktor yang diduga dapat mengerahkan kemunculan risiko. Risk Monitoring, namely the process of monitoring various factors that are thought to cause the emergence of risks.	Sudah Terealisasi Realized
6	Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Perseroan beserta pengungkapannya pada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Reporting and Disclosure, namely the process of reporting the risk management system implemented by the Company along with its disclosures to related parties in accordance with applicable regulations.	Sudah Terealisasi Realized
Terkait dengan Pengendalian Intern Related to Internal Control		
1	Menetapkan kebijakan tentang sistem pengendalian intern yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan Perseroan. Establish policies regarding an effective internal control system to ensure the achievement of the Company's objectives.	Sudah Terealisasi Realized

No	Uraian Tugas Duties Description	Status Realisasi Realization Status
2	Sistem pengendalian internal mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Lingkungan pengendalian internal; 2. Penetapan rencana kerja dan target-target perusahaan; 3. Identifikasi dan evaluasi risiko; 4. Penilaian risiko; 5. Mitigasi risiko; 6. Aktivitas pengendalian; 7. Informasi dan komunikasi; 8. Monitoring. The internal control system includes the following: 1. Internal control environment; 2. Determination of work plans and company targets; 3. Risk identification and evaluation; 4. Risk assessment; 5. Risk mitigation; 6. Control activities; 7. Information and communication; 8. Monitoring.	Sudah Terealisasi Realized
Keterbukaan Informasi Information Disclosure		
1	Mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan kepada pihak terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan objektif. Disclose important information in the Company's Annual Report and Financial Reports to related parties in accordance with applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner.	Sudah Terealisasi Realized
2	Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Take the initiative to disclose not only issues required by statutory regulations but also matters that are important for decision making by stakeholders.	Sudah Terealisasi Realized
3	Direksi harus aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip GCG dan masalah material yang dihadapi Perseroan. The Board of Directors must actively disclose the implementation of GCG principles and material problems faced by the Company.	Sudah Terealisasi Realized
Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Relationships with Stakeholders		
1	Menghormati hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pemangku kepentingan. Respect the rights of Stakeholders that arise based on applicable laws and regulations and/or agreements made by the Company with stakeholders.	Sudah Terealisasi Realized
2	Memastikan Perseroan melakukan tanggung jawab sosial. Ensure the Company carries out social responsibility.	Sudah Terealisasi Realized
3	Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Ensure that the Company's assets and business locations and other facilities comply with applicable laws and regulations regarding environmental preservation, health and work safety.	Sudah Terealisasi Realized
4	Dalam memperkerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karier, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk pegawai, Perseroan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundangan. In hiring, determining salary levels, providing training, determining career paths, and determining other work requirements for employees, the Company does not discriminate because of a person's ethnic background, religion, gender, age, physical disability, or other special circumstances. protected by statutory regulations.	Sudah Terealisasi Realized
5	Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan. Directors are obliged to provide a work environment that is free from all forms of pressure.	Sudah Terealisasi Realized

No	Uraian Tugas Duties Description	Status Realisasi Realization Status
	Tugas dan Kewajiban Lain Other Duties and Obligations	
1	Menjalankan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and determined by the GMS based on applicable laws and regulations.	Sudah Terealisasi Realized

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Hingga Laporan Tahunan 2023 dilaporkan, Direksi tidak membentuk komite-komite pendukung pelaksanaan tugas Direksi yang secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Dengan demikian, pada Laporan Tahunan ini tidak terdapat informasi tentang penilaian kinerja komite di bawah Direksi.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS AND BASIS FOR EVALUATION

Until the 2023 Annual Report is reported, the Board of Directors has not formed committees to support the implementation of the Board of Directors' duties which are structurally subordinate to and directly responsible to the Board of Directors. Thus, in this Annual Report there is no information regarding the performance assessment of committees under the Board of Directors.

Dewan Komisaris
BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris merupakan salah satu Organ Utama Tata Kelola Perusahaan yang melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan serta memberi nasihat kepada Direksi dan memastikan bahwa Perusahaan telah menerapkan GCG pada setiap jenjang organisasi. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan.

Dewan Komisaris wajib bertindak independen serta bertanggung jawab dalam hal pengawasan kebijakan operasional Perusahaan dengan mengacu kepada penerapan strategi dan rencana bisnis yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Arahan Pemegang Saham, sebagaimana telah disetujui oleh Pemegang Saham. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Commissioners is one of the Main Organs of Corporate Governance which carries out general and/or specific supervision based on the Company's Articles of Association as well as providing advice to the Board of Directors and ensuring that the Company has implemented GCG at every level of the organization. The Board of Commissioners also ensures that the Company carries out business activities in accordance with the stated aims and objectives.

The Board of Commissioners is obliged to act independently and be responsible in terms of supervising the Company's operational policies by referring to the implementation of strategies and business plans contained in the Company's Work Plan and Budget and Shareholder Directions, as approved by the Shareholders. The Board of Commissioners is also responsible for ensuring the Company's compliance with all applicable laws and regulations.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris Perusahaan merujuk pada beberapa ketentuan, antara lain:

- Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 108.
- Peraturan Menteri Sadan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Sadan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Anggaran Dasar IPCC.
- Pedoman *Good Corporate Governance* IPCC.
- Pedoman Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi IPCC.

LEGAL BASIS

The legal basis for the formation and appointment of the Company's Board of Commissioners refers to several provisions, including:

- Limited Liability Company Law no. 40 of 2007 Article 108.
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
- Financial Services Authority Regulation no. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
- IPCC Articles of Association.
- IPCC Good Corporate Governance Guidelines.
- Guidelines for the Working Relations of the IPCC Board of Commissioners and Directors.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar dan Board Manual yang mengatur terkait Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Dewan Komisaris yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang diatur dalam pedoman tersebut di antaranya: (1) Persyaratan, Komposisi dan

BOARD OF COMMISSIONERS GUIDELINES AND WORK RULES

In carrying out its duties and functions, the Board of Commissioners refers to the Articles of Association and Board Manual which regulate the Rules and Procedures for Carrying Out the Work of the Board of Commissioners which are prepared based on applicable regulations and laws. Matters regulated in these guidelines include: (1) Requirements, Composition and Membership, and Term

Keanggotaan, dan Masa Jabatan; (2) Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas; serta (3) Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Dewan Komisaris. Dengan adanya pedoman kerja Dewan Komisaris tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris akan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris.

MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- Meninggal dunia;
- Masa jabatannya berakhir;
- Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

- Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- cakap melakukan perbuatan hukum;
- dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
- tidak pernah dinyatakan pailit;
- tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

- tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
- pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/

of Office; (2) Capability Introduction and Improvement Program; and (3) Duties, Responsibilities and Obligations of the Board of Commissioners. With the existence of these work guidelines for the Board of Commissioners, it is hoped that the implementation of the Board of Commissioners' duties will be more focused and effective and can be used as a tool for assessing the performance of the Board of Commissioners.

TERM OF OFFICE

The term of office of members of the Board of Commissioners is set at 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office. Members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time based on a GMS Resolution by stating the reasons.

The term of office of a member of the Board of Commissioners ends if:

- Pass away;
- His term of office ends;
- Dismissed based on the GMS; and/or
- No longer meets the requirements as a member of the Board of Commissioners based on the Articles of Association and other statutory regulations.

REQUIREMENTS FOR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

- Individuals who can become members of the Board of Commissioners are individuals who meet the following requirements at the time of appointment and during their tenure:
- have good character, morals and integrity;
- competent to carry out legal actions;
- within 5 (five) years before appointment and during office:
- never declared bankruptcy;
- have never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
- have never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector; And
- have never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners while serving:
- never held an annual GMS;
- his accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never provided his accountability as a member

atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

- pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Emiten atau Perusahaan Publik;
- Surat pernyataan sebagaimana dimaksud wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS 2023

- Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) anggota atau lebih;
- Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama;

- Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi;
- Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham;
- Dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 20% merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.

of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS; And

- has caused a company that has obtained a permit, approval or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to the Financial Services Authority.
- have a commitment to comply with statutory regulationxs; And
- have knowledge and/or expertise in the field required by the Issuer or Public Company.
- Fulfillment of the requirements as intended must be included in a statement letter and submitted to the Issuer or Public Company;
- The statement letter as intended must be examined and documented by the Issuer or Public Company;

- Does not own shares, either directly or indirectly, in the Issuer or Public Company;

- Has no affiliation with the Issuer or Public Company, member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, or major shareholder of the Issuer or Public Company; And
- Has no direct or indirect business relationship related to the business activities of the Issuer or Public Company.

NUMBER, COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS 2023

- The Board of Commissioners consists of 1 (one) member or more;
- In the event that the Board of Commissioners consists of more than 1 (one) member, one member of the Board of Commissioners is appointed as President Commissioner;
- The appointment of members of the Board of Commissioners does not coincide with the appointment of members of the Board of Directors;
- Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS and the GMS Resolutions must be approved by the Shareholders;
- In the composition of the Board of Commissioners, at least 20% are independent members of the Board of Commissioners as determined in the appointment decision.

Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan setelah melalui proses uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Oleh karena itu seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat telah memiliki kompetensi, integritas, dan reputasi yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

The appointment of the Board of Commissioners is carried out after going through a fit and proper test process in accordance with applicable laws and regulations and GCG principles. Therefore, all serving members of the Company's Board of Commissioners have adequate competence, integrity and reputation in carrying out their duties and responsibilities.

Pada tahun 2023 tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Sampai dengan Laporan Tahunan 2023 dilaporkan, komposisi anggota Dewan Komisaris IPCC berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris Independen. Adapun komposisi dan susunan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut:

In 2023 there was no changes to the composition of members of the Board of Commissioners. As of the 2023 Annual Report, the composition of the IPCC Board of Commissioners is 3 (three) people, consisting of 1 (one) President Commissioner and 2 (two) Independent Commissioners. The composition and structure of the Board of Commissioners can be seen in the following table:

Tabel Susunan dan Komposisi Direksi Per 31 Desember 2023
Table of Structure and Composition of the Board of Directors As of December 31, 2023

Nama Name	**Jabatan** Position	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Period of Office	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
Drajat Sulistyo	Komisaris Utama President Commissioner	April 2022-RUPST 2027 April 2022-AGM 2027	Ke-1 1st	Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 27 Tanggal 13 April 2022 Deed of Extraordinary GMS Minutes No. 27 April 13, 2022
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen Independent Commissioner	4 Agutsus 2020- RUPST 2025 4 August 2020- AGMS 2025	Ke-1 1st	Menjabat sebagai Komisaris Independen IPCC berdasarkan Akta Notaris Nomor: 48 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Served as IPCC Independent Commissioner based on Notarial Deed Number: 48 dated August 26, 2020 concerning Statement of Meeting Resolutions of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
LM. Arya Bima Yudiantara	Komisaris Independen Independent Commissioner	Juni 2021- RUPST 2026 June 2021- AGMS 2026	Ke-1 1st	Menjabat sebagai Komisaris Independen IPCC berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: 27 tanggal 14 Juni 2021. Served as IPCC Independent Commissioner based on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Number: 27 dated June 14, 2021.

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan, jalannya Pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Kewajiban Dewan Komisaris

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris berkewajiban:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP Perusahaan.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;
9. Membentuk Komite Audit dan Komite lainnya (bila diperlukan);
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
12. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan perusahaan lain;

DUTIES, OBLIGATIONS AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Duties of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is tasked with supervising the Company's management policies, the running of management in general regarding both the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors as well as providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the RJPP, RKAP as well as the provisions of the Articles of Association and GMS Resolutions, as well as applicable laws and regulations. applies, in the interests of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.

Obligations of the Board of Commissioners

In relation to the implementation of the duties of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners is obliged to:

1. Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company;
2. Research and review and sign the RJPP and RKAP proposed by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association;
3. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the reasons for the Board of Commissioners signing the Company's RJPP and RKAP.
4. Follow developments in Company activities, provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important for the management of the Company;
5. Report immediately to the GMS if there are symptoms of declining Company performance;
6. Examine and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the annual report;
7. Provide explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding Annual Report, if requested;
8. Prepare an annual work program and include it in the RKAP;
9. Establish an Audit Committee and other committees (if necessary);
10. Proposing a Public Accountant to the GMS;
11. Prepare minutes of meetings of the Board of Commissioners and keep a copy;
12. Report to the Company regarding his and/or his family's share ownership in the Company and other companies;

13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Wewenang Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang digunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah serta akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu dan bebas Perseroan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan penguriusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri rapat Direksi dan membicarakan pandangan-pandangan terhadap hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Provide a report on the supervisory tasks that have been carried out during the previous Fiscal Year to the GMS;
14. Carry out other obligations within the framework of supervisory duties and providing advice, as long as it does not conflict with regulations Law Regulations, Articles of Association, and/or GMS Resolutions.

Board of Commissioner's Authority

In carrying out its supervisory duties, the Board of Commissioners has the authority to:

1. View books, letters and other documents, examine cash for verification purposes and other securities and examine the Company's assets;
2. Entering the grounds, buildings and offices used by the Company;
3. Request an explanation from the Directors and/or other officials regarding all issues relating to the management of the Company;
4. Know all policies and actions that have been and will be implemented by the Board of Directors;
5. Request the Directors and/or other officials under the Directors with the knowledge of the Directors to attend meetings of the Board of Commissioners;
6. Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary;
7. Temporarily suspend members of the Board of Directors in accordance with the provisions of these Articles of Association;
8. Form other committees besides the Audit Committee, if deemed necessary considering the Company's capabilities;
9. Using experts for certain matters and within a certain period of time and at the discretion of the Company, if deemed necessary;
10. Carry out actions to manage the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association;
11. Attend Board of Directors meetings and discuss views on matters discussed;
12. Carry out other supervisory authority as long as it does not conflict with statutory regulations, the Articles of Association, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders.

Hak Dewan Komisaris

Mendapatkan honorarium dan tunjangan/fasilitas, termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham.

Keputusan Yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Perbuatan-perbuatan Direksi yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris yaitu:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/ BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai a tau jangka waktu tertentu yang ditetapkan RUPS;
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/ panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dalam kondisi tertentu (hilang, musnah, rusak yang tidak dapat dipindahtangankan (total lost), biaya pemindahtangannnya lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari pemindahtanganan, dibongkar untuk dibangun kembali atau dibangun menjadi aktiva tetap yang lain, yang anggarannya telah ditetapkan oleh RUPS/Menteri melalui pengesahan RKAP, dan dibongkar untuk tidak dibangun kembali sehubungan dengan adanya program lain yang telah direncanakan RKAP;
6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
7. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern;
8. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.

Board of Commissioners Rights

Receive honorarium and allowances/facilities, including Post-Employment compensation, the type and amount of which is determined by the GMS by considering the provisions of the applicable laws and regulations. The GMS resolution must be approved by the Shareholders.

Decisions that require approval from the Board of Commissioners

The actions of the Board of Directors that must first be approved by the Board of Commissioners are:

1. Pledge fixed assets for short-term credit withdrawals;
2. Establish cooperation with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operation (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOwT), Build Handover (Build Transfer Operate/BTO) and other collaborations with a certain value or time period determined by the GMS;
3. Receive or provide medium/long term loans, except loans (debts or receivables) arising from business transactions, and loans provided to Subsidiaries provided that loans to Subsidiaries are reported to the Board of Commissioners;
4. Write off bad debts and dead inventory from the books;
5. Release and write off movable fixed assets under certain conditions (lost, destroyed, damaged which cannot be transferred (total lost), the cost of transfer is greater than the economic value obtained from the transfer, dismantled to be rebuilt or built into another fixed asset, whose budget has been determined by the GMS/Minister through ratification of the RKAP, and is dismantled not to be rebuilt in connection with other programs that have been planned by the RKAP;
6. Establish an organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors;
7. Appoint and dismiss the Head of the Internal Audit Unit;
8. Appoint and dismiss the Corporate Secretary.

PEMBAGIAN BIDANG TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mengatur sendiri pembagian kerja di antara para anggota dan untuk kelancaran tugasnya. Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.DK/19/12/02/IPCC-22 dan No.HK.56/3/7/IKT-22 tentang pedoman Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan.

DIVISION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners regulates the division of work among its members to ensure the smooth running of its duties. The division of duties and authority of the Board of Commissioners is regulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No.DK/19/12/02/IPCC-22 and No.HK.56/3/7/IKT-22 concerning the Company's Good Corporate Governance (GCG) guidelines.

Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The duties and authorities of the members of the Board of Commissioners are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Task field
Drajat Sulistyo	Komisaris Utama President Commissioner	Membidangi unit kerja Direktorat Utama, disamping selaku koordinator umum In charge of President Directorate work unit, besides being the general coordinator
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Membidangi SDM dan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi; Bidang Keuangan dan sebagai Ketua Komite Audit. In charge of HC and as Chair of the Nomination and Remuneration Committee; Finance Sector and as Chairman of the Audit Committee.
LM. Arya Bima Yudiantara	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang Operasi dan Teknik dan Bidang Komersial dan Pengembangan Bisnis, serta sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko. Operations and Engineering and Commercial and Business Development Sectors, as well as Chairman of the Risk Management Monitoring Committee.

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Perseroan memberikan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat agar anggota Dewan Komisaris tersebut dapat bekerja dengan optimal untuk kepentingan Perseroan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program pengenalan bagi Komisaris baru.

Program pengenalan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat antara lain:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk serta Komite Audit;

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS

The Company provides an introduction program for newly appointed members of the Board of Commissioners so that the members of the Board of Commissioners can work optimally for the interests of the Company. The Corporate Secretary is responsible for organizing the introduction program for new Commissioners.

The introduction program given to newly appointed members of the Board of Commissioners includes:

1. Implementation of GCG principles by the Company;
2. An overview of the Company relating to the objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short and long term plans, competitive position, risks and other strategic issues;
3. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;

4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit Perusahaan, dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan.Program pengenalan Perusahaan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru.

Pada tahun 2023, Perseroan tidak mengadakan program orientasi atau pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, karena tidak terdapat anggota Dewan Komisaris baru.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Program peningkatan kapabilitas merupakan salah satu program penting bagi Dewan Komisaris dalam mengikuti perkembangan terkini dari aktivitas Perseroan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Program peningkatan kapabilitas bagi Dewan Komisaris yang dilakukan secara berkelanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.
Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut.

4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors as well as things that are not permitted.

The Company's introduction program can take the form of presentations, meetings, visits to Company units, and review of documents or other programs deemed appropriate to the Company. The Company's introduction program is implemented no later than 90 calendar days after the GMS decides on the appointment of new members of the Board of Commissioners.

In 2023, the Company did not carry out an orientation or introduction program for newly appointed members of the Board of Commissioners, because there are no new members of the Board of Commissioners.

BOARD OF COMMISSIONERS COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The capability improvement program is an important program for the Board of Commissioners in following the latest developments in the Company's activities and other knowledge related to the implementation of the Board of Commissioners' duties. The capability improvement program for the Board of Commissioners which is carried out on an ongoing basis is intended to increase the competency and capability of the Board of Commissioners in carrying out its functions, duties and responsibilities.
During 2023, the Board of Commissioners has participated in the following training and competency development.

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Tahun 2023
Table of Training and Competency Development for the Board of Commissioners in 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Waktu Penyelenggaraan** Implementation Time	**Penyelenggara** Organizer
Drajat Sulistyo (Komisaris Utama) (President Commissioner)	*Workshop*	Competition Through Innovation and Collaboration Indrawan Nugroho (CIAS) & Ary Syamsudin (TTMIN)	11 Desember 2023 December 11, 2023	CIAS & IKT
Abdur Rahim Hasan (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	*Workshop*	Competition Through Innovation and Collaboration Indrawan Nugroho (CIAS) & Ary Syamsudin (TTMIN)	11 Desember 2023 December 11, 2023	CIAS & IKT
	Seminar Nasional National Seminar	Seminal Nasional Internal Auditor 2023 National Internal Auditor Seminar 2023	6-7 Desember 2023 December 6-7, 2023	YPIA

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Tahun 2023
Table of Training and Competency Development for the Board of Commissioners in 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Waktu Penyelenggaraan** Implementation Time	**Penyelenggara** Organizer
LM. Arya Bima Yudiantara (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Pelatihan Training	Program GRC Summit 2023, Building Resilient Future Through GRC and ESG GRC Summit 2023 Program, Building Resilient Future Through GRC and ESG	23 Agustus 2023 August 23, 2023	IRMAPA (Indonesia Risk Management Profesional Association)
	Pelatihan Training	Edukasi Pasar Modal: Mengenal Instrumen Investasi Pasar Modal Indoanesia Capital Market Education: Getting to Know Indonesian Capital Market Investment Instruments	24 Oktober 2023 October 24, 2023	Mirae Asset Sekuritas indonesia
	Pelatihan Training	SNIA, Trusted Advisor: Navigating the Frontier, Connecting Between Information Technology and Business Strategy	6-7 Desember 2023 December 6-7, 2023	YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit)
	Pelatihan Training	Program GRC Summit 2023, Building Resilient Future Through GRC and ESG GRC Summit 2023 Program, Building Resilient Future Through GRC and ESG	23 Agustus 2023 August 23, 2023	YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit)
	Workshop	Competition Through Innovation and Collaboration Indrawan Nugroho (CIAS) & Ary Syamsudin (TTMIN)	11 Desember 2023 December 11, 2023	CIAS & IKT

REALISASI TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Realisasi Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya terkait pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta Rencana Kerja yang ditetapkan di awal tahun, antara lain sebagai berikut:

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris tahun 2023;
2. Melaksanakan rapat rutin dengan Dewan Komisaris dalam rangka pengurusan dan pengelolaan Perseroan;
3. Melaksanakan rapat gabungan dengan Direksi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan;

REALIZATION OF THE SUPERVISORY DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Realization of the Implementation of the Board of Commissioners' Duties Throughout 2023, the Board of Commissioners has carried out its duties, responsibilities and obligations related to supervision of management policies and the running of the Company in accordance with applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, as well as the Work Plan established at the beginning of the year , are as follows:

During 2023, the Board of Commissioners has carried out various activities as follows:

1. Prepare a work plan for the Board of Commissioners for 2023;
2. Carrying out regular meetings with the Board of Commissioners in the context of administering and administering the Company;
3. Carrying out joint meetings with the Board of Directors in order to implement the supervisory function of the Company's management policies;

4. Memberikan pendapat dan saran terkait pengelolaan Perseroan;
5. Memberikan tanggapan keputusan dan persetujuan terkait pengelolaan Perseroan;
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2023.

4. Provide opinions and suggestions regarding the management of the Company;
5. Provide feedback on decisions and approvals related to the management of the Company;
6. Organizing the 2023 General Meeting of Shareholders (GMS).

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris juga diwujudkan melalui kunjungan kerja, untuk memberikan saran serta masukan/konfirmasi terhadap area/wilayah kerja IPCC. Kunjungan kerja ini juga dilakukan untuk mendorong dan memberikan motivasi kepada seluruh karyawan dan untuk memberikan gambaran bagi Dewan Komisaris atas kemajuan/perkembangan usaha Perusahaan.

Di sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan kerja:

Board of Commissioners Working Visit

The implementation of the duties and supervisory functions of the Board of Commissioners is also realized through working visits, to provide suggestions and input/confirmation regarding the IPCC's work areas/areas. This work visit is also carried out to encourage and provide motivation to all employees and to provide an overview for the Board of Commissioners of the progress/development of the Company's business.

Throughout 2023, the Board of Commissioners has carried out working visits:

No	Waktu Pelaksanaan Implementation time	Wilayah Kerja IPCC IPCC Working Areas	Peserta Kunjungan (Nama/Jabatan) Visiting Participants (Name/Position)
1	3 Maret 2023 March 3, 2023	IPCC Makassar	• Abdur Rahim Hasan • LM. Arya Bima Yudiantara

Rekomendasi Dewan Komisaris

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi Usulan Pembagian Dividen PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
2. Rekomendasi persetujuan untuk mata cara RUPS Tahunan tahun buku 2022 dan RUPS Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Recommendation of the Board of Commissioners

In 2023, the Board of Commissioners issued the following recommendations:

1. Recommendations for Proposed Dividend Distribution of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
2. Recommendations for approval of the agenda for the Annual GMS for the 2022 financial year and the Extraordinary GMS of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Kebijakan Kinerja Komite Dewan Komisaris

Penilaian kinerja komite-komite di tingkat Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap tahun, meliputi:

- Penilaian kinerja Komite Dewan Komisaris secara kolegial;
- Penilaian kinerja Komite Dewan Komisaris secara individu;
- Dan penilaian terhadap kinerja Ketua Komite Dewan komisaris.

Board of Commissioners Committee Performance Policy

Performance assessments of committees at the Board of Commissioners level are carried out periodically every year, including:

- Collegial assessment of the performance of the Board of Commissioners Committees;
- Assessment of the performance of individual Board of Commissioners Committees;
- And assessment of the performance of the Chairman of the Board of Commissioners Committee.

KOMISARIS INDEPENDEN

INDEPENDENT COMMISSIONER

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat atas jalannya pengelolaan Perseroan, maka prinsip independensi yang melekat pada Dewan Komisaris sangat penting. Dengan prinsip independen ini akan memastikan tidak adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 30% merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. Anggota Dewan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Adapun kriteria penentuan Komisaris Independen IPCC yaitu:

1. Tidak memiliki hubungan kerja dan tidak pernah bekerja dengan IPCC;
2. Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk kementerian, dan tidak menjadi anggota dewan direksi pada perusahaan yang memiliki hubungan langsung dengan Perseroan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir; dan
3. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perseroan.

In order to carry out the function of monitoring and providing advice on the management of the Company, the principle of independence inherent in the Board of Commissioners is very important. This independent principle will ensure that there are no conflicts of interest in carrying out their duties.

In the composition of the Board of Commissioners, at least 30% are members of the Board of Independent Commissioners as determined in the appointment decision. Members of the Independent Board of Commissioners do not have financial, management, share ownership or family relationships with other members of the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders or relationships with the Company, which could affect their ability to act independently. The criteria for determining the IPCC Independent Commissioner are:

1. Has no working relationship and has never worked with the IPCC;
2. Not working for the Government, including ministries, and not being a member of the board of directors of a company that has a direct relationship with the Company within the last three years; And
3. Free from business interests and activities or other relationships that could hinder or interfere with the Board of Commissioners' ability to act or think freely within the Company.

Untuk menjamin independensi tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan menandatangani pernyataan Pakta Integritas. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat ketiga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

To guarantee this independence, each member of the Board of Commissioners is required to sign an Integrity Pact statement. Each member of the Board of Commissioners does not have a family relationship up to the third degree with other members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.



PELINDO

PELINDO

TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

TRANSPARENCY OF INFORMATION ABOUT THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

KEBIJAKAN HUBUNGAN KERJA ANTARA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dan Direksi IPCC telah memiliki "Board Manual" yang berisi, antara lain, kebijakan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi. Dijelaskan bahwa terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menjadi salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ Perusahaan dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien.

Untuk itu Perseroan, dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengurus Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar.
- Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perseroan.
- Korespondensi antara Dewan Komisaris dengan Direksi menggunakan format surat yang didalamnya mengandung penjelasan maksud dan tujuan atas surat tersebut.
- Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara Anggota Dewan Komisaris dengan salah seorang Anggota Direksi harus diketahui oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.

WORKING RELATIONS POLICY BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

The IPCC Board of Commissioners and Directors have a "Board Manual" which contains, among other things, working relationship policies between the Board of Commissioners and Directors. It was explained that creating a good working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is one of the most important things so that each organ of the Company can work according to its function effectively and efficiently.

For this reason, the Company, in maintaining a good working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors, applies the following principles:

- The Board of Commissioners respects the function and role of the Board of Directors in managing the Company as regulated in statutory regulations and the Articles of Association.
- The Board of Directors respects the function and role of the Board of Commissioners in supervising and providing advice on the Company's management policies.
- Correspondence between the Board of Commissioners and the Board of Directors uses a letter format which contains an explanation of the intent and purpose of the letter.
- Every working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a formal relationship, meaning that it must always be based on a standard mechanism or correspondence that can be accounted for.
- Any informal working relationship can be carried out by each member of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, but cannot be used as a formal policy before going through an accountable mechanism or correspondence.
- Every working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is an institutional relationship in the sense that the Board of Commissioners and Directors are collective positions that represent all of its members so that every working relationship between a Member of the Board of Commissioners and a Member of the Board of Directors must be known to other Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors. .

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi harus memenuhi persyaratan yang juga tertuang dalam Board Manual Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki komposisi yang beragam baik dari segi pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin dan keahlian. Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi diperlukan sebagai upaya untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif. Hal ini dikarenakan keputusan diambil dengan memperhatikan berbagai sudut pandang.

POLICY ON DIVERSITY COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

All members of the Board of Commissioners and Directors who are appointed and dismissed by the GMS are in accordance with the Company's Articles of Association. The Board of Commissioners and Directors must fulfill the requirements which are also stated in the Company's Board Manual. The Company's Board of Commissioners and Directors have a diverse composition both in terms of education (field of study), work experience, age, gender and expertise. Diversity in the Board of Commissioners and Directors is needed as an effort to encourage more objective and comprehensive decision making. This is because decisions are taken considering various points of view.

Nama Name	**Kewarganegaraan** Citizenship	**Domisili** Domicile	**Pendidikan Terakhir** Last Education	**Latar Belakang Pendidikan** Educational Background
Direksi Director				
Sugeng Mulyadi	Indonesia	Jakarta	S2	• Master of Shipping and Transport from Netherland Maritime University, Rotterdam-Netherlands, in 2013 • Master of Finance from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, in 2008 • Bachelor of Economic Management from Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, in 1996
Bagus Dwipoyono	Indonesia	Jakarta	S2	• Engineering Profession Program from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, in 2020 • Master of International Transport and Logistic from Shanghai Maritime University, China, in 2011 • Master of Management from Sekolah Tinggi Manajemen IMMI, Jakarta, in 2002 • Bachelor Industrial Engineering from Universitas Pasundan, Bandung, in 1996
Wing Megantoro	Indonesia	Jakarta	S2	• Master of Business Administration from Kuhne Logistic University, in 2015 • Bachelor of Accountancy from University of Jayabaya, in 1997

	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender
	• Master of Shipping and Transport from Netherland Maritime University, Rotterdam-Netherlands, in 2013 • Master of Finance from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, in 2008 • Bachelor of Economic Management from Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, in 1996	Keuangan dan Pelayaran Finance and Shipping	51	L
	• President Director at PT Menara Maritime Indonesia on 2018 – 2023 • Director at PT Terminal Petikemas Indonesia on 2016 – 2018 • Manager Operation Support 1 at PT Pelabuhan Tanjung Priok on 2015 – 2016 • ASM Pengembangan dan Pengendalian I at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Main Office in 2012 – 2015 / ASM Development and Control I at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Main Office in 2012 – 2015	Managemen, transportasi internasional, dan logistik Management, international transportation and logistics	51	L
	• Regional Division Head Management of Finance & Tax Regional 2 at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on 2021 - 2023 • SVP of Finance Management at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) on 2019 – 2021 • SVP of Finance Control & Planning at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) on 2018 – 2019 • VP of Finance Services at PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero) on 2016 – 2019	Akuntansi dan administrasi bisnis Accounting and business administration	51	LP

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Domisili Domicile	Pendidikan Terakhir Last Education	Latar Belakang Pendidikan Educational Background
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Drajat Sulistyo	Indonesia	DKI Jakarta	S2	• Diploma Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada (2002) • Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Jakarta (2012) • Master in Logistic dari Kuhne Logistic University (2014) • Diploma in Civil Engineering from Universitas Gadjah Mada (2002) • Bachelor of Civil Engineering from the Universitas Jakarta (2012) • Master in Logistics from Kuhne Logistic University (2014)
Abdur Rahim Hasan	Indonesia	DKI Jakarta	S1	• Sarjana Hukum Universitas Azzahra Jakarta (2012) • Bachelor of Laws from Universitas Azzahra Jakarta (2012)
LM Arya Bima Yudiantara	Indonesia	DKI Jakarta	S1	• Sarjana Hukum dari Universitas Atmajaya (1997) • Bachelor of Laws from Universitas Atmajaya (1997)

	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender
	• Manager Teknik dan Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang (2015 – 2016). • General Manager PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Bengkulu (2016 – 2018) • General Manager PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Lampung (2020 – 2021). • Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020 – September 2021) • Regional Head 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Februari 2023 – Sekarang • • Engineering and Information Systems Manager of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Palembang Branch (2015 – 2016). • General Manager of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bengkulu Branch (2016 – 2018) • General Manager of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Panjang Lampung Branch (2020 – 2021). • President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020 – September 2021) • Regional Head 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) February 2023 – Present	Logistik dan teknik sipil Logistics and civil engineering	44	L
	• Dewan Komisaris PT Srandil Steel (2012-2014) • Dewan Komisaris PT Raja Tiga Sila (2014-2015) • Dewan Komisaris PT Madina Mitra Teknik (2014-2019) • Dewan Komisaris PT JPPI (2014-2018) • Komisaris Utama/ PT JPPI (2018-2019) • Dewan Komisaris/ PT JPPI (2019-2020) • • Board of Commissioners of PT Srandil Steel (2012-2014) • Board of Commissioners of PT Raja Tiga Sila (2014-2015) • Board of Commissioners of PT Madina Mitra Teknik (2014-2019) • PT JPPI Board of Commissioners (2014-2018) • President Commissioner/ PT JPPI (2018-2019) • Board of Commissioners/ PT JPPI (2019-2020)	Hukum Law	51	L
	• HRD PT Ning Pacific Motor, PT Wallsin Lippo Cikarang, PT Lippo Land, PT KYMCO Group (1997 – 2007) • Direktur PT Prada Yasa (September 2007 – Agustus 2009) • Manager Operasional PT Lumbung Mas (September 2009 – Juli 2014) • VP Marketing Project PT Gistec Prima (September 2014 – 2021) • • HRD PT Ning Pacific Motor, PT Wallsin Lippo Cikarang, PT Lippo Land, PT KYMCO Group (1997 – 2007) • Director of PT Prada Yasa (September 2007 – August 2009) • Operations Manager PT Lumbung Mas (September 2009 – July 2014) • VP Marketing Project PT Gistec Prima (September 2014 – 2021)	Hukum Law	56	L

ASSESSMENT GCG UNTUK ASPEK DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Assessment GCG untuk Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan dengan parameter ASEAN Corporate Governance Scorcard aspek Tanggung Jawab Dewan. Penilaian dilakukan secara independen dengan perolehan skor sebesar 33,55 point. Informasi lebih terperinci dapat dibaca pada Pembahasan Assessment Penerapan GCG berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard*, Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja Direksi baik secara kolegial maupun individual dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan target pencapaian KPI yang sudah disepakati bersama di awal tahun sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Selanjutnya, Dewan Komisaris menyampaikan hasil evaluasi atas kinerja Direksi kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan acquit de charge. Selain melalui mekanisme RUPS, penilaian kinerja Direksi juga dilakukan bersamaan dengan penilaian *(assessment)* GCG dan penilaian pencapaian KPI.

Indikator/Kriteria Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Keuangan dan Pasar
   a. *Average Collection Period* (ACP)
   b. Pertumbuhan Pendapatan Usaha
   c. EBITDA Margin
2. Fokus Pelanggan
   a. Indeks Kepuasan Pelanggan
   b. Persentase Tindak Lanjut Komplain Pelanggan
3. Efektivitas Produk dan Proses
   a. Produktivitas Bongkar Muat(T/G/H)
   b. Utilisasi Lapangan (YOR)
   c. Kinerja Proses Pengadaan Barang dan Jasa
4. Fokus Tenaga Kerja
   a. Peningkatan Kompetensi Pegawai
   b. Produktivitas Pegawai (dalam juta Rupiah)
   c. Indeks Kepuasan Pegawai
5. Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan
   a. Skor *Good Corporate Governance* (GCG)
   b. Penyerapan Investasi (Capex)
   c. Ketepatan Penyampaian Laporan Berkala

GCG ASSESSMENT FOR BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS ASPECTS

GCG assessment for the Board of Directors and Board of Commissioners is carried out using the ASEAN Corporate Governance Scorecard parameters for the Board Responsibility aspect. The assessment was carried out independently with a score of 33.55 points. More detailed information can be read in the Discussion on Assessment of GCG Implementation based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard, this Annual Report.

Performance Assessment of the Board of Directors and Board of Commissioners

Board of Directors' Performance Assessment

Assessment Procedure

The performance assessment of the Board of Directors, both collegial and individual, is carried out by the Board of Commissioners based on the KPI achievement targets that were mutually agreed upon at the beginning of the year in accordance with the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors. Furthermore, the Board of Commissioners submits the results of the evaluation of the Directors' performance to the Shareholders to obtain an acquit de charge. Apart from the GMS mechanism, the performance assessment of the Board of Directors is also carried out simultaneously with the GCG assessment and KPI achievement assessment.

Indicators/Assessment Criteria

The performance assessment of the Board of Directors is carried out by considering the following criteria:

1. Finance and Markets
   a. Average Collection Period (ACP)
   b. Business Income Growth
   c. EBITDA Margin
2. Customer Focus
   a. Customer Satisfaction Index
   b. Percentage of Customer Complaint Follow-Ups
3. Product and Process Effectiveness
   a. Loading and Unloading Productivity (T/G/H)
   b. Field Utilization (YOR)
   c. Performance of the Goods and Services Procurement Process
4. Workforce Focus
   a. Increasing Employee Competency
   b. Employee Productivity (in million Rupiah)
   c. Employee Satisfaction Index
5. Leadership, Governance and Community Responsibility
   a. Good Corporate Governance (GCG) Score
   b. Investment Absorption (Capex)
   c. Accuracy of Submission of Periodic Reports

Pihak Penilai Kinerja

Kinerja Direksi baik secara individual maupun kolegial dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris melaporkan hasilnya kepada pemegang saham di dalam RUPS. Selain melalui mekanisme RUPS, penilaian kinerja Direksi dapat diukur berdasarkan penilaian (assessment) GCG aspek Direksi dan pencapaian KPI.

Performance Appraisal Party

The performance of the Board of Directors, both individually and collectively, is evaluated periodically by the Board of Commissioners. Next, the Board of Commissioners reports the results to shareholders at the GMS. Apart from the GMS mechanism, the performance assessment of the Board of Directors can be measured based on the GCG assessment of the Board of Directors aspects and KPI achievements.

Realisasi KPI Direksi tahun 2023
Realization of Board of Directors' KPI in 2023

No.	INDIKATOR KPI KPI INDICATORS	BOBOT WEIGHT	NILAI SCORE
A. NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA A. ECONOMIC AND SOCIAL VALUE FOR INDONESIA		**42**	**38,79**
1	Pertumbuhan Pendapatan Revenue Growth	4	0,73
2	*Working Ratio*	6	6,60
3	*Net Profit Margin*	4	4,40
4	*Average Collection Periode*	6	4,05
5	Produktivitas Bongkar Muat (U/S/H) Loading/Unloading Productivity (U/S/H)	5	5,50
6	Utilisasi Lapangan (YOR) Field Utilization (YOR)	5	5,50
7	Skor *Good Corporate Governance* (GCG) Good Corporate Governance (GCG) Score	6	6,01
8	Program CSR CSR Program	6	6,00
B. INOVASI MODEL BISNIS B. BUSINESS MODEL INNOVATION		**15**	**15,37**
9	Anorganik Growth pada Bisnis Pendukung Inorganic Growth in Supporting Businesses	4	4,00
10	Ekspansi Bisnis Terminal di Luar Wilayah IKT Terminal Business Expansion Outside the IKT Area	3	3,30
11	Ekspansi Bisnis Rantai Distribusi Distribution Chain Business Expansion	3	3,00
12	Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	5	5,07
C. KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI C. TECHNOLOGY LEADERSHIP		**20**	**22,00**
12	Digitalisasi Aktivitas Operasional Digitalization of Operational Activities	10	11,00
13	Digitalisasi Teknologi Administrasi Kantor Digitalization of Office Administration Technology	10	11,00
D. PENINGKATAN INVESTASI D. IMPROVING INVESTMENT		**8**	**8,45**
14	Penyerapan Investasi (Capex) : Penyerapan Program Investment Absorption (Capex): Program Absorption	5	5,47

Realisasi KPI Direksi tahun 2023
Realization of Board of Directors' KPI in 2023

No.	INDIKATOR KPI KPI INDICATORS	BOBOT WEIGHT	NILAI SCORE
15	Penyerapan Investasi (Capex) : Penyerapan Phisik Investment Absorption (Capex): Physical Absorption	3	2,99
E. PENGEMBANGAN TALENTA E. TALENT DEVELOPMENT		**15**	**15,95**
16	Produktivitas Pegawai Employee Productivity	7	7,70
17	Peningkatan Kompetensi Pegawai Improving Employee Competency	8	8,25
TOTAL			**100**

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Penilaian

Dewan Komisaris menyampaikan dan mempertanggung-jawabkan kinerjanya kepada Pemegang Saham di dalam RUPS untuk mendapatkan acquit de charge. Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan pelaksanaan tugas kewajiban yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Pedoman Kerja, dan amanat Pemegang Saham. Selain melalui mekanisme RUPS, penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan bersamaan dengan penilaian (assessment) GCG dan penilaian pencapaian KPI.

Indikator/Kriteria Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:

- Kontribusi terhadap capaian kinerja Perseroan;
- Ketepatan waktu penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris;
- Kontribusi terhadap penerapan GCG;
- Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris;
- Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan Perseroan; dan
- Efektivitas kegiatan penunjang Dewan Komisaris.

Pihak Penilai Kinerja

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara self-assessment. Hasil penilaian kinerja secara mandiri tersebut selanjutnya disampaikan dan dipertanggungjawabkan serta dievaluasi oleh pemegang saham dalam RUPS. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang tercantum

Performance Assessment of the Board of Commissioners

Assessment Procedure

The Board of Commissioners conveys and is accountable for its performance to the Shareholders at the GMS to obtain an acquit de charge. The assessment of the performance of the Board of Commissioners is determined based on the implementation of the duties and obligations stated in the Articles of Association, Work Guidelines and Shareholder mandates. Apart from the GMS mechanism, the performance assessment of the Board of Commissioners is also carried out simultaneously with the GCG assessment and KPI achievement assessment.

Indicators/Assessment Criteria

The performance assessment of the Board of Commissioners is carried out by considering the following indicators:

- Contribution to the Company's performance achievements;
- The timeliness of submitting opinions and suggestions is the obligation of the Board of Commissioners;
- Contribution to the implementation of GCG;
- Level of attendance of members of the Board of Commissioners;
- Supervision and direction of the Board of Directors regarding the Company's plans and policies; And
- Effectiveness of the Board of Commissioners' supporting activities.

Performance Appraisal Party

The performance assessment of the Board of Commissioners is carried out through self-assessment. The results of the independent performance assessment are then submitted and accounted for and evaluated by shareholders at the GMS. The performance of the Board of Commissioners is determined based on the

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat pemegang saham.

Hasil penilaian dan evaluasi kinerja Dewan Komisaris secara kolegial maupun individual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari skema remunerasi dan kompensasi bagi anggota Dewan Komisaris serta pertimbangan bagi pemegang saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Selain melalui mekanisme RUPS, penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan bersamaan dengan penilaian *(assessment)* GCG dan penilaian pencapaian KPI (Key Performance Indicator).

KEBIJAKAN NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dasar kebijakan terkait prosedur nominasi dan pemberian remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Surat Keputusan Direksi IPCC No. HK.56/2/12/IKT-19 tanggal 21 Juni 2019 tentang Penghasilan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Keputusan RUPS PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

PROSEDUR NOMINASI DIREKSI

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan telaah terhadap pedoman dan tata cara pengangkatan Direksi dan Komisaris. Setelah itu, Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan hasil kajiannya dan memberikan rekomendasi mengenai usulan calon talent pool kepada Dewan Komisaris. Usulan tersebut kemudian ditinjau kembali oleh Dewan Komisaris dan dijadikan bahan usulan penetapan calon Direksi dan Komisaris dalam RUPS LB.

implementation of the duties and obligations stated in the applicable laws and regulations and the Articles of Association as well as the mandate of shareholders.

The results of the assessment and evaluation of the performance of the Board of Commissioners both collegial and individual are an inseparable part of the remuneration and compensation scheme for members of the Board of Commissioners as well as considerations for shareholders to dismiss and/or reappoint the members of the Board of Commissioners concerned.

Apart from the GMS mechanism, the performance assessment of the Board of Commissioners is also carried out simultaneously with the GCG assessment and KPI (Key Performance Indicator) achievement assessment.

NOMINATION AND REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

The basic policies regarding nomination procedures and providing remuneration for the Company's Directors and Board of Commissioners are as follows:

- Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- OJK Regulation no. 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committees for Issuers or Public Companies.
- IPCC Directors' Decree No. HK.56/2/12/IKT-19 dated 21 June 2019 concerning Income for the Directors and Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Resolution of the GMS of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Nomination of Directors and Board of Commissioners

BOARD OF DIRECTORS NOMINATION PROCEDURE

The Nomination and Remuneration Committee reviews the guidelines and procedures for appointing Directors and Commissioners. After that, the Nomination and Remuneration Committee submitted the results of its study and provided recommendations regarding the proposed talent pool to the Board of Commissioners. The proposal is then reviewed by the Board of Commissioners and used as material for a proposal to determine candidates for Directors and Commissioners at the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Prosedur Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemilihan Ulang Direksi

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan Direksi dilakukan setelah melalui proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.

Anggota Direksi diangkat untuk satu periode masa jabatan dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud. RUPS memiliki hak untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

PROSES PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Proses pengangkatan seorang calon anggota Dewan Komisaris mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal dengan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Pemberian Remunerasi

Atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dewan Komisaris dan Direksi berhak mendapatkan remunerasi yang layak sebagai imbal jasa atas pelaksanaan tugas dan kontribusinya terhadap kemajuan Perseroan. Remunerasi tersebut bisa berupa tetap maupun variabel.

Terkait hal ini, Perseroan telah menetapkan kebijakan, skema, prosedur, hingga besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang formulanya berlandaskan pada prinsip kehati-hatian serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Procedures for Appointment, Dismissal and Re-Election of Directors

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS. The appointment of Directors is carried out after going through a fit and proper test process in accordance with applicable laws and regulations and GCG principles.

Members of the Board of Directors are appointed for one term of office and can be reappointed in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. The maximum term of office for a member of the Board of Directors is 5 (five) years or until the closing of the annual GMS at the end of 1 (one) term of office in question. The GMS has the right to dismiss members of the Board of Directors at any time before their term of office ends, considering the provisions of the Articles of Association. The appointment and dismissal of Directors is carried out based on the principles of professionalism and Good Corporate Governance.

APPOINTMENT PROCESS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The process of appointing a prospective member of the Board of Commissioners follows a fit and proper test process held by Shareholders/GMS/Capital Owners with reference to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-03/MBU/2012 dated 29 March 2012 concerning Appointment Guidelines Member of the Board of Directors and Member of the Board of Commissioners of SOE Subsidiaries.

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Remuneration Policy

For the implementation of its duties and functions. The Board of Commissioners and Directors have the right to receive appropriate remuneration as compensation for carrying out their duties and contributing to the progress of the Company. The remuneration can be fixed or variable.

In this regard, the Company has established policies, schemes, procedures, and the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Directors, the formula of which is based on the precautionary principle and refers to applicable laws and regulations.

Di tengah pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif. Perseroan melakukan pengkajian berkala atas kebijakan remunerasi yang diterapkan di Perseroan supaya tetap sesuai dengan perkembangan industri dan strategi Perseroan serta ketentuan regulator yang berlaku.

In the midst of an increasingly competitive labor market. The Company carries out regular reviews of the remuneration policies implemented in the Company so that they remain in line with industry developments and the Company's strategy as well as applicable regulatory provisions.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Remuneration Determination Procedure

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dimulai dari proses kajian dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi mengenai best practice kebijakan dan standar remunerasi untuk jabatan tertentu pada perusahaan sejenis di pasaran (minimal sesama perusahaan yang berada dalam Pelindo Group) dengan landasan remunerasi yang ditetapkan oleh Pemegang Saham dan diberlakukan di Perseroan, tentunya dengan memperhitungkan kinerja Perseroan serta mempertimbangkan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

The procedure for determining the remuneration of the Board of Commissioners and Directors starts from the review and information gathering process carried out by the Nomination and Remuneration Committee regarding best practice policies and remuneration standards for certain positions in similar companies in the market (at least fellow companies within the Pelindo Group) with a remuneration basis that is determined by the Shareholders and implemented in the Company, of course considering the Company's performance and considering the Company's long-term targets and strategies.

Tahap selanjutnya, Komite Nominasi dan Remunerasi akan menyampaikan hasil kajian tersebut dan memberikan rekomendasi atas besaran dan struktur remunerasi kepada Dewan Komisaris untuk ditinjau kembali dan dijadikan sebagai bahan usulan penetapan remunerasi kepada Pemegang Saham di dalam RUPS Tahunan.

The next stage, the Nomination and Remuneration Committee will present the results of the study and provide recommendations on the amount and structure of remuneration to the Board of Commissioners for review and use as material for proposals for determining remuneration to Shareholders at the Annual GMS.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi dan usulan remunerasi kepada Dewan Komisaris sesuai dengan standar remunerasi untuk jabatan dan industri sejenis.

Conducting review and providing recommendations and propositions for remuneration to the Board of Commissioners according to the standards of remuneration for similar positions and industries.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OFCOMMISSIONER

Dewan Komisaris mempelajari rekomendasi dan usulan remunerasi yang disampaikan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham di dalam RUPS Tahunan.

The Board of Commissioners reassess the remuneration recommendations and propositions proposed by the Nomination and Remuneration Committee to be further submitted to the Shareholders at the Annual GMS.

RUPS TAHUNAN
ANNUAL GMS

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan hasil keputusan RUPST.

Determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with the resolutions of the AGMS.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa mempertimbangkan remunerasi yang berlaku di industri perusahaan pelabuhan dengan kegiatan dan skala

The preparation of the structure, policies and amount of remuneration for the Board of Commissioners and Directors always takes into consideration the remuneration applicable in the port company industry

usaha yang sejenis dengan Perseroan, minimal sesama perusahaan yang berada dalam Pelindo Group. Kriteria atau indikator yang dimaksud, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
2. Pencapaian target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel;
4. Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
5. Prestasi kerja kolektif dan individual;
6. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tahun 2023, Pemegang Saham melalui RUPS telah menetapkan bahwa Perseroan berkewajiban untuk memberikan paket remunerasi dan fasilitas kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

with activities and business scale similar to the Company, at least fellow companies within the Pelindo Group. The criteria or indicators in question include:

1. The implementation of the duties, responsibilities and authority of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners is linked to the achievement of the Company's objectives and performance;
2. Achievement of performance targets or performance of each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
3. Balance of allowances between fixed and variable;
4. Financial performance and fulfillment of the Company's obligations as regulated in applicable regulations;
5. Collective and individual work performance;
6. Consideration of the Company's long-term targets and strategies.

Remuneration Structure for the Board of Commissioners and Directors

In 2023, Shareholders through the GMS have determined that the Company is obliged to provide a remuneration package and facilities to the Company's Board of Commissioners and Directors, as follows:

No.	Komponen Remunerasi Remuneration Components	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Director
1	Gaji/Honorarium Salary/Honorarium	√	√
2	Tunjangan Allowance		
	Tunjangan Perumahan Housing Benefit		√
	Tunjangan Hari Raya Holiday allowance	√	√
	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	√	√
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	√	
	Tunjangan Pakaian Dinas Official Uniform Allowance	√	√
3	Fasilitas Facility		
	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities		√
	Fasilitas Club Membership Club Membership Facilities		√
	Fasilitas Perjalanan Dinas/Pelatihan Official Travel/Training Facilities	√	√
	Fasilitas Kesehatan Medical facility	√	√

No.	Komponen Remunerasi Remuneration Components	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Director
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Support Facility	√	√
	Fasilitas Keanggotaan Profesi Professional Membership Facilities	√	√
	Fasilitas Kartu Kredit Credit Card Facilities		√
4	Fasilitas Lainnya Other Facilities		
	Tantiem/Insentif Kinerja Tantiem/Performance Incentives	√	√

Jumlah Remunerasi dan Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

Pada tahun 2023, Perseroan telah melakukan kewajiban untuk memberikan remunerasi kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan uraian sebagai berikut:

Total Remuneration and Tantiem for the Board of Commissioners and Directors in 2023

In 2023, the Company has undertaken the obligation to provide remuneration to each member of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, with the following description:

Tabel Remunerasi Bulanan Dewan Komisaris Tahun 2023
Table of Monthly Remuneration for the Board of Commissioners in 2023

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Honorarium (Rp)	Tunjangan dan Fasilitas Benefits and Facilities (Rp)	Take-Home Pay per Bulan Take-Home Pay per Month (Rp)
Drajat Sulistyo	Komisaris Utama President Commissioner	Januari – Oktober November – Desember January – October November – December	31.164.300 34.650.000	13.356.129 14.850.000	31.164.300 34.650.000
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Januari – Oktober November – Desember January – October November – December	28.047.870 31.185.000	14.488.266 15.115.692	33.657.444 37.422.000
LM. Arya Bima Yudiantara	Komisaris Independen Independent Commissioner	Januari – Oktober November – Desember January – October November – December	28.047.870 31.185.000	14.488.266 15.115.692	33.657.444 37.422.000

Tabel Remunerasi Bulanan Direksi Tahun 2023
Table of Monthly Remuneration for Board of Directors in 2023

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Honorarium (Rp)	Tunjangan dan Fasilitas Benefits and Facilities (Rp)	Take-Home Pay per Bulan Take-Home Pay per Month (Rp)
Rio T.N Lasse	Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director concurrently Acting Director of Commercial and Business Development	Januari – Maret January - March	69.254.000	22.026.000	86.401.524
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director concurrently Acting Director of Commercial and Business Development	Mei – Oktober Vovember – Desember May – October November - December	69.254.000 77.000.000	21.643.000 21.643.000	87.176.457 92.728.807
Andi Hamdani	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Engineering	Januari – April January - April	58.865.900	21.643.000	69.764.001
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Engineering	Mei – Oktober Oktober – Desember May – October October - December	58.865.900 65.450.000	21.643.000 21.821.000	76.272.221 82.856.321
Sumarno	Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Director of Finance and Human Capital	Januari – Juni January - June			
Wing Megantoro		September – oktober November – Desember September October November - December	58.865.900 65.450.000	21.643.000 21.821.000	77.144.353 81.495.120

Sedangkan untuk tantiem yang menjadi hak Direksi, Perseroan telah memberikannya di tahun 2023 dengan jumlah total Rp2.195.808.160 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan.

Dari pengungkapan informasi tentang remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang telah diungkap di atas, maka dapat diketahui total nilai remunerasi dalam basis perhitungan tahunan. Uraian lebih rinci terkait pengelompokan jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi per tahun untuk masa 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Meanwhile, for bonuses which are the rights of the Directors, the Company has provided them in 2023 with a total amount of Rp2.195.808.160 for all members of the Company's Board of Directors.

From the disclosure of information regarding the remuneration of the Board of Commissioners and Directors which has been disclosed above, it is possible to know the total value of remuneration on an annual calculation basis. A more detailed description regarding the grouping of remuneration amounts paid to members of the Board of Commissioners and Directors per year for the last 3 (three) years can be seen in the following table:

Tabel Total Remunerasi Tahunan Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2023
Table of Total Annual Remuneration for the Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2023

Total Remunerasi Total Remuneration	**Jumlah Dewan Komisaris** Amount of Board of Commissioners	**Jumlah Direksi** Amount of Board of Directors
	2023	**2023**
Di atas Rp2 miliar More than Rp2 billion	-	-
Di atas Rp1 miliar hingga Rp2 miliar More than Rp1 billion to Rp2 billion	-	3
Di atas Rp500 juta hingga Rp1 miliar More than Rp500 million to Rp1 billion	2	-
Di bawah Rp500 juta Below Rp500 million	1	-

Pengungkapan Bonus Kinerja, Bonus Non-Kinerja, dan/atau Opsi Saham

Pembagian tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi sudah diatur dalam SK No. HK.56/2/12/IKT-19 tentang Penghasilan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dengan mempertimbangkan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.

Namun demikian, sampai dengan saat ini Perseroan belum memiliki kebijakan shares option atau penawaran opsi saham bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Perseroan.

Disclosure of Performance Bonuses, Non-Performance Bonuses, and/or Stock Options

The distribution of bonuses to the Board of Commissioners and Directors is regulated in Decree No. HK.56/2/12/IKT-19 concerning Income for the Directors and Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk by considering the performance of the Board of Commissioners and Directors and paying attention to the Company's financial capabilities.

However, to date the Company does not have a shares option policy or offer of share options for members of the Board of Commissioners, Directors and Executive Officers of the Company.

Rasio Gaji Karyawan Tertinggi dan Terendah

Informasi di bawah ini menjelaskan rasio perbandingan gaji, yang meliputi kompensasi yang diterima per bulan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tetap di Perseroan.

Ratio of Highest and Lowest Employee Salaries

The information below explains the salary comparison ratio, which includes compensation received per month by members of the Board of Commissioners, Directors and permanent employees in the Company.

Rasio Gaji Salary Ratio	Per 31 Desember 2023 As of December 31, 2023			Per 31 Desember 2022 As of December 31, 2022		
	Min (Rp)	Max (Rp)	Rasio Ratio	Min (Rp)	Max (Rp)	Rasio Ratio
Gaji Karyawan Tertinggi dan Terendah Highest and Lowest Employee Salaries	3.650.996	75.239.537	1:20,6	8.635.937	59.015.804	1:6,8
Gaji Anggota Direksi Tertinggi dan Terendah Highest and Lowest Salaries for Board of Directors Members	81.495.120	95.064.341	1: 1,6	78.865.900	89.254.000	1:1,1
Gaji Anggota Dewan Komisaris Tertinggi dan Terendahh Highest and Lowest Salaries for Members of the Board of Commissioners	81.495.120	95.064.341	1: 1,6	33.657.444	37.397.160	1:1,1
Gaji Anggota Direksi Yang Tertinggi dan Karyawan Tertinggi The highest salaries for members of the Board of Directors and the highest employees	75.239.537	95.064.341	1:1,3	59.015.804	89.254.000	1:1,5

RAPAT DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

1.
   a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (salah satu Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
   b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) dalam 2 (dua) bulan.

2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diatas dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi sec.ara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 3 diatas ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor 1.b dan nomor 3 diatas ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 di atas ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada nomor 5 diatas ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenarig melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners Meeting Policy

1.
   a. a. Board of Commissioners meetings can be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners or at the written request of the Board of Directors or at the request of 1 (one or more Shareholders jointly owning 1/10 (one tenth) or more of the total all shares that have been placed by the Company with valid voting rights.

   b. The Board of Commissioners is required to hold meetings at least 1 (one) every 2 (two) months.

2. The Board of Commissioners meeting as referred to in number 1 above can be held, is valid and has the right to make binding decisions if attended by more than 1/2 (one half) of the total number of members of the Board of Commissioners present or represented at the Meeting.
3. The Board of Commissioners is obliged to hold regular meetings with the Board of Directors at least once every 4 (four) months.
4. The presence of members of the Board of Commissioners at the meetings as referred to in numbers 1 and 3 above must be disclosed in the Company's annual report.
5. The Board of Commissioners must schedule the meeting as referred to in number 1.b and number 3 above for the following year before the end of the Fiscal Year.
6. At the meeting that has been scheduled as referred to in number 5 above, the meeting materials are delivered to the participants no later than 5 (five) days before the meeting is held.
7. In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared as referred to in number 5 above, the meeting materials are delivered to the meeting participants no later than before the meeting is held.
8. Summons for Board of Commissioners Meetings are carried out by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent for any reason, which does not need to be proven to a third party, 1 (one) member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner has the right and authority to summon a Board of Commissioners Meeting.

9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.

13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

14.
    a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihak harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

9. Summons for Board of Commissioners Meetings are sent by any means in written form, which summons must be sent to members of the Board of Commissioners no later than 5 (five) calendar days before the Meeting is held or within a shorter time in urgent circumstances, namely no later than 1 (one) calendar day before the Meeting without considering the date of the summons and the date of the Meeting, the urgent situation is determined by the President Commissioner. If all members of the Board of Commissioners are present at the Meeting, prior summons is not required.

10. The invitation to the meeting must include the agenda, date, time and place of the meeting.
11. Board of Commissioners meetings are held at the Company's domicile or place of business activities or at the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at any other place provided it is within the territory of the Republic of Indonesia.
12. The Board of Commissioners meeting is chaired by the President Commissioner, if the President Commissioner is not present or is unable to attend the Meeting, which does not need to be proven to a third party, then the Meeting is chaired by one of the selected members of the Board of Commissioners and from the members of the Board of Commissioners who are present at the Meeting the.
13. A member of the Board of Commissioners can only be represented at a Board of Commissioners Meeting by another member of the Board of Commissioners based on a power of attorney.
14.
    a. Each member of the Board of Commissioners has the right to cast 1 (one) and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioners he represents. Every member of the Board of Commissioners who personally, in any way, either directly or indirectly, has an interest in a proposed transaction or contract in which the Company is a party must declare the nature of the interest at a Board of Commissioners Meeting and is not entitled to participate in it. voting on matters relating to transactions or contracts.
    b. b.Voting regarding individuals is carried out using a closed ballot without a signature, while voting regarding other matters is carried out orally unless the Chairman of the Meeting determines otherwise without any objection from those present.

15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimaf dimaksud pada nomor 15 diatas ini, pengambilan keputusan dilakukan berdasar suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1h (satu per dua) dari anggota.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 diatas ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 diatas wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada nomor 17 dan nomor 18 di atas ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada nomor 17 dan nomor 18 diatas ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada nomor 17 dan nomor 18 diatas ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

15. Decision making at Board of Commissioners Meetings must be taken based on deliberation to reach consensus.
16. In the event that a consensus deliberation decision is not reached as referred to in number 15 above, the decision is made based on a majority vote, namely approved by more than 1 hour (one half) of the members.
17. The results of the meeting as referred to in number 1 above must be stated in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Commissioners present, and submitted to all members of the Board of Commissioners.
18. The results of the meeting as referred to in number 3 above must be stated in the minutes of the meeting, signed by members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who are present, and submitted to all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.
19. In the event that there are members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who do not sign the results of the meeting as referred to in numbers 17 and 18 above, the person concerned is obliged to state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.
20. Minutes of meetings as referred to in numbers 17 and 18 above must be documented by the Company.

21. The minutes of the meeting as referred to in numbers 17 and 18 above are valid evidence regarding the decisions taken at the relevant Board of Commissioners Meeting, both for members of the Board of Commissioners and for third parties.

22. The Board of Commissioners can also take legal and binding decisions without holding a Board of Commissioners Meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing about the proposals in question and all members of the Board of Commissioners have given their approval regarding the proposals submitted in writing. and sign the agreement. Decisions taken in this way have the same force as decisions legally taken at a Board of Commissioners Meeting.

Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris
Board of Commissioners Internal Meeting Agenda

No	Nomor Undangan Invitation Number	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Participants
1	DK/11/01/01/IPCC-23	11 Januari 2023 January 11, 2023	· Rencana Kerja Dewan Komisaris · Hal-hal strategis lainnya · Board of Commissioners Work Plan · Other strategic matters	· Drajat Sulistyo · Abdur Rahim Hasan · LM. Arya Bima Yudiantara
2	DK/20/02/02/IPCC-23	26 Februari 2023 February 26, 2023	· Review dan tanggapan performance tahun 2022; · Hal-hal strategis lainnya · Review and response to performance in 2022; · Other strategic matters	· Drajat Sulistyo · Abdur Rahim Hasan · LM. Arya Bima Yudiantara
3	DK/16/03/01/IPCC-23	27 Maret 2023 March 27, 2023	· Tindak lanjut keputusan Rakom sebelumnya; · Evaluasi kinerja perusahaan s.d. Februari 2023 · Hal-hal strategis lainnya · Follow up to previous BOC Meeting decisions; · Evaluation of company performance until February 2023 · Other strategic matters	· Drajat Sulistyo · Abdur Rahim Hasan · LM. Arya Bima Yudiantara
4	DK/13/04/01/IPCC-23	April 2023 April 16, 2023	· Tindak lanjut keputusan Rakom sebelumnya; · Evaluasi kinerja perusahaan s.d. Maret 2023; · Persiapan RUPS dan RUPS LB · Hal-hal strategis lainnya · Follow up to previous BOC Meeting decisions; · Evaluation of company performance up to March 2023; · Preparation for the GMS and EGMS · Other strategic matters	· Drajat Sulistyo · Abdur Rahim Hasan · LM. Arya Bima Yudiantara
5	DK/10/05/02/IPCC-23	19 Mei 2023 May 19, 2023	· Tindak lanjut hasil keputusan Rakom sebelumnya; · Evaluasi kinerja Perusahaan s.d. April 2023 · Hal-hal strategis lainnya · Follow up on the results of previous BOC Meeting decisions; · Evaluation of Company performance until April 2023 · Other strategic matters	· Drajat Sulistyo · Abdur Rahim Hasan · · LM. Arya Bima Yudiantara – absen pemulihan pasca sakit
6	DK/19/06/01/IPCC-23	22 Juni 2023 June 22, 2023	· Tindak lanjut hasil keputusan Rakom sebelumnya; · Evaluasi kinerja Perusahaan s.d. Mei 2023 · Hal-hal strategis lainnya · Follow up on the results of previous BOC Meeting decisions; · Evaluation of Company performance until May 2023 · Other strategic matters	· Drajat Sulistyo · Abdur Rahim Hasan · LM. Arya Bima Yudiantara
7	DK/10/07/01/IPCC-23	Juli 2023 July 19, 2023	· Tindak lanjut hasil keputusan Rakom sebelumnya; · Evaluasi kinerja Perusahaan s.d. Juni 2023 · Hal-hal strategis lainnya · Follow up on the results of previous Rakom decisions; · Evaluation of Company performance up to June 2023 · Other strategic matters	· Drajat Sulistyo · Abdur Rahim Hasan · LM. Arya Bima Yudiantara

Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris
Board of Commissioners Internal Meeting Agenda

No	Nomor Undangan Invitation Number	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Participants
8	DK/15/08/01/IPCC-23	Agustus 2023 August 24, 2023	• Tindak lanjut hasil keputusan Rakom sebelumnya; • Evaluasi kinerja Perusahaan s.d. Juli 2023 • Hal-hal strategis lainnya • Follow up on the results of previous BOC Meeting decisions; • Evaluation of Company performance until July 2023 • Other strategic matters	• Drajat Sulistyo • Abdur Rahim Hasan • LM. Arya Bima Yudiantara
9	DK/18/09/02/IPCC-23	26 September 2023 September 26, 2023	• Tindak lanjut hasil keputusan Rakom sebelumnya; • Evaluasi kinerja Perusahaan s.d. Agustus 2023 • Hal-hal strategis lainnya • Follow up on the results of previous BOC Meeting decisions; • Evaluation of Company performance until August 2023 • Other strategic matters	• Drajat Sulistyo • Abdur Rahim Hasan • LM. Arya Bima Yudiantara
10	DK/09/10/01/IPCC-23	Oktober 2023 October 17, 2023	• Tindak lanjut hasil keputusan Rakom sebelumnya; • Evaluasi kinerja Perusahaan TW III • Hal-hal strategis lainnya • Follow up on the results of previous BOC Meeting decisions; • Evaluation of Company performance Q III • Other strategic matters	• Drajat Sulistyo • Abdur Rahim Hasan • LM. Arya Bima Yudiantara
11	DK/21/11/02/IPCC-23	29 November 2023 November 29, 2023	• Tindak lanjut hasil keputusan Rakom sebelumnya; • Evaluasi kinerja Perusahaan s.d. Agustus 2023 • Hal-hal strategis lainnya • Follow up on the results of previous BOC Meeting decisions; • Evaluation of Company performance until August 2023 • Other strategic matters	• Drajat Sulistyo • Abdur Rahim Hasan • LM. Arya Bima Yudiantara
12	DK/13/12/02/IPCC-23	17 Desember 2023 December 17, 2023	• Tindak lanjut hasil keputusan Rakom sebelumnya; • Evaluasi kinerja Perusahaan s.d. Agustus 2022 • Hal-hal strategis lainnya • Follow up on the results of previous BOC Meeting decisions; • Evaluation of Company performance until August 2022 • Other strategic matters	• Drajat Sulistyo • Abdur Rahim Hasan • LM. Arya Bima Yudiantara

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Di tahun 2023, rapat internal Dewan Komisaris telah diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota diuraikan sebagai berikut:

Frequency of Meetings and Attendance Level of the Board of Commissioners

In 2023, internal meetings of the Board of Commissioners have been held 12 (twelve) times, with the level of attendance of each member described as follows:

Tabel Kehadiran Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2023
Table of Board of Commissioners Internal Meeting Attendance in 2023

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level (%)
Drajat Sulistyo	Komisaris Utama President Commissioner	12	12	100%
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	100%
LM. Arya Bima Yudiantara	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	11	91,67%

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Rapat Gabungan

Selain wajib menyelenggarakan rapat internal secara berkala, Dewan Komisaris juga mengadakan rapat yang mengundang kehadiran Direksi. Sesuai Pedoman Tata Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors

Joint Meeting Policy

Apart from being obliged to hold regular internal meetings, the Board of Commissioners also holds meetings which invite the presence of the Board of Directors. In accordance with the Working Procedures for the Relationship between the Board of Commissioners and Directors, the Board of Commissioners is required to hold regular meetings with the Board of Directors at least once every 4 (four) months.

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Agenda for Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors

Nomor Undangan Invitation Number	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat (Kehadiran Dewan Komisaris) Meeting Participants (Presence of the Board of Commissioners)	Peserta Rapat (Kehadiran Direksi) Meeting Participants (Attendance of the Board of Directors)
24 Januari 2023 January 24, 2023			
DK/18/01/01/IPCC-23	• Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya • Laporan kinerja Perusahaan s.d. Desember 2022 • Hal-hal strategis lainnya • Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions • Company performance reports until December 2022 • Other strategic matters	• Drajat Sulistyo • Abdur Rahim Hasan • LM. Arya Bima Yudiantara	• Rio T.N Lasse • Andi Hamdani • Sumarno
27 Februari 2023 February 27, 2023			

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Agenda for Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors

Nomor Undangan Invitation Number	**Agenda Rapat** Meeting Agendas	**Peserta Rapat (Kehadiran Dewan Komisaris)** Meeting Participants (Presence of the Board of Commissioners)	**Peserta Rapat (Kehadiran Direksi)** Meeting Participants (Attendance of the Board of Directors)
DK/20/02/01/IPCC-23	· Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya · Laporan kinerja Perusahaan s.d. Desember 2022 · Hal-hal strategis lainnya · Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions · Company performance reports until December 2022 · Other strategic matters	· Drajat Sulistyo · Abdur Rahim Hasan · LM. Arya Bima Yudiantara	· Rio T.N Lasse · Andi Hamdani · Sumarno
27 Maret 2023 March 27, 2023			
DK/16/03/01/IPCC-23	· Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya · Laporan kinerja Perusahaan s.d. Desember 2022 · Hal-hal strategis lainnya · Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions · Company performance reports until December 2022 · Other strategic matters	· Drajat Sulistyo · Abdur Rahim Hasan · LM. Arya Bima Yudiantara	· Andi Hamdani · Sumarno
April 2023 April 18, 2023			
DK/13/04/01/IPCC-23	· Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya · Laporan kinerja Perusahaan s.d. Desember 2022 · Hal-hal strategis lainnya · Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions · Company performance reports until December 2022 · Other strategic matters	· Drajat Sulistyo · Abdur Rahim Hasan · LM. Arya Bima Yudiantara	· Andi Hamdani · Sumarno
19 Mei 2023 May 19, 2023			
DK.10/05/01/IPCC-23	· Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya · Laporan kinerja Perusahaan s.d. Desember 2022 · Persiapan RUPS Tahunan & Agenda RUPS · Proposal Bisnis Layanan Logistik Alat Berat · Hal-hal strategis lainnya · Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions · Company performance reports until December 2022 · Preparation of the Annual GMS & GMS Agenda · Heavy Equipment Logistics Services Business Proposal · Other strategic matters	· Drajat Sulistyo · Abdur Rahim Hasan · LM. Arya Bima Yudiantara - absen krn pemulihan pasca sakit	· Sugeng Mulyadi · Bagus Dwipoyono · Sumarno
22 Juni 2023 June 22, 2023			

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Agenda for Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors

Nomor Undangan Invitation Number	**Agenda Rapat** Meeting Agendas	**Peserta Rapat (Kehadiran Dewan Komisaris)** Meeting Participants (Presence of the Board of Commissioners)	**Peserta Rapat (Kehadiran Direksi)** Meeting Participants (Attendance of the Board of Directors)
DK.19/06/01/IPCC-23	· Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya · Laporan kinerja Perusahaan s.d. Juni 2023 · Persiapan RUPS · Hal-hal strategis lainnya · Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions · Company performance reports until June 2023 · Preparation for the GMS · Other strategic matters	· Drajat Sulistyo · Abdur Rahim Hasan · LM. Arya Bima Yudiantara	· Sugeng Mulyadi · Bagus Dwipoyono · Sumarno
20 Juli 2023 July 20, 2023			
DK/10/07/01/IPCC-23	· Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya · Laporan kinerja Perusahaan s.d. Juni 2023 · Hal-hal strategis lainnya · Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions · Company performance reports until June 2023 · Other strategic matters	· Drajat Sulistyo · Abdur Rahim Hasan · LM. Arya Bima Yudiantara	· Sugeng Mulyadi · Bagus Dwipoyono
24 Agustus 2023 August 24, 2023			
DK/15/08/02/IPCC-23	· Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya · Laporan kinerja Perusahaan s.d. Juni 2023 · Hal-hal strategis lainnya · Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions · Company performance reports until June 2023 · Other strategic matters	· Drajat Sulistyo · Abdur Rahim Hasan · LM. Arya Bima Yudiantara	· Sugeng Mulyadi · Bagus Dwipoyono
September 2023 September 25, 2023			
DK/18/09/01/IPCC-23	· Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya · Laporan kinerja Perusahaan s.d. Agustus 2023 · Hal-hal strategis lainnya · Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions · Company performance reports until August 2023 · Other strategic matters	· Drajat Sulistyo · Abdur Rahim Hasan · LM. Arya Bima Yudiantara	· Sugeng Mulyadi · Bagus Dwipoyono · Wing Megantoro
16 Oktober 2023 October 16, 2023			
DK/09/10/02/IPCC-23	· Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya · Laporan kinerja Perusahaan TW III 2023 · Hal-hal strategis lainnya · Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions · Company performance report for Q3 2023 · Other strategic matters	· Drajat Sulistyo · Abdur Rahim Hasan · LM. Arya Bima Yudiantara	· Sugeng Mulyadi · Bagus Dwipoyono · Wing Megantoro
30 November 2023 November 30, 2023			

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Agenda for Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors

Nomor Undangan Invitation Number	**Agenda Rapat** Meeting Agendas	**Peserta Rapat (Kehadiran Dewan Komisaris)** Meeting Participants (Presence of the Board of Commissioners)	**Peserta Rapat (Kehadiran Direksi)** Meeting Participants (Attendance of the Board of Directors)
DK/21/11/01/IPCC-23	• Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya • Laporan kinerja Perusahaan s.d Oktober 2023 • Hal-hal strategis lainnya • Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions • Company performance report until October 2023 • Other strategic matters	• Drajat Sulistyo • Abdur Rahim Hasan • LM. Arya Bima Yudiantara	• Sugeng Mulyadi • Bagus Dwipoyono • Wing Megantoro
18 Desember 2023 December 18, 2023			
DK/13/12/01/IPCC-23	• Tindak lanjut hasil keputusan Rakomdir sebelumnya • Laporan kinerja Perusahaan s.d. November 2023 • Follow up on the results of previous BOC&BOD meeting decisions • Company performance reports until November 2023	• Drajat Sulistyo • Abdur Rahim Hasan • LM. Arya Bima Yudiantara	• Sugeng Mulyadi • Bagus Dwipoyono • Wing Megantoro

No	**Nama dan Jabatan** Name and Position	**Rapat Dewan Komisaris** Board of Commissioners Meeting			**Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi** Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors			**RUPS GMS**		
		Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	**Tingkat Kehdiran** Attendance Level	**Rata-Rata Tingkat Kehadiran** Average Attendance Level	**Frekuensi Kehadiran**	**Frekuensi Kehadiran** Attendance Frequency	**Tingkat Kehdiran** Attendance Level	**Rata-Rata Tingkat Kehadiran** Average Attendance Level	**Tingkat Kehdiran**	**Frekuensi Kehadiran** Attendance Frequency
1	Drajat Sulistyo (Komisaris Utama) (President Commissioner)	12	12	100%	12	12	100%	3	3	100%
2	Abdur Rahim Hasan (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	12	12	100%	12	12	100%	3	3	100%
3	LM Arya Bima Yudiantara (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	12	11	91,67%	12	12	100%	3	3	100%

RAPAT DIREKSI

Kebijakan Rapat Direksi

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
   a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
   b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
   c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 dapat dilangsungkan dan sah berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada nomor 3 di atas ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 di atas ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhimya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada nomor 5 diatas ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.
8. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

Board of Directors Meeting Policy

1. A Board of Directors Meeting can be held at any time if:
   a. deemed necessary by one or more members of the Board of Directors;
   b. upon written request from one or more members of the Board of Commissioners; or
   c. at the written request of 1 (one) or more shareholders who together represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights.
2. The Board of Directors is obliged to hold regular Board of Directors meetings at least 1 (one) time every month and the Board of Directors is obliged to hold regular meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 4 (four) months.
3. The Board of Directors meeting as referred to in number 2 can be held and legally has the right to make binding decisions if attended by 1/2 (one half) of the total number of members of the Board of Directors present or represented at the Meeting.
4. The attendance of members of the Board of Directors at the meeting as referred to in number 3 above must be disclosed in the Company's annual report.
5. The Board of Directors must schedule the meeting as referred to in number 2 above for the following year before the end of the Fiscal Year.
6. At the scheduled meeting as referred to in number 2, the meeting materials are delivered to the participants no later than 5 (five) calendar days before the meeting is held.
7. In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared as referred to in number 5 above, the meeting materials are delivered to the meeting participants no later than before the meeting is held. Calls for Board of Directors Meetings are made by members of the Board of Directors who have the right to represent the Board of Directors.
8. Summons for Board of Directors Meetings must be submitted by any means in written form to each member of the Board of Directors no later than 5 (five) calendar days before the Meeting is held, without considering the date of the Summons and the date of the Meeting. If all members of the Board of Directors are present or represented, the Summons must be given first. This is not required and the Board of Directors Meeting has the right to make legal and binding decisions.
9. The invitation must include the Meeting agenda, date, time and place of the Meeting.

10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
13.
    a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
    b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 di atas ini dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
16. Perbedaan pendapat *(dissenting opinions)* yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat *(dissenting opinions)* tersebut.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 diatas wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

10. Board of Directors meetings are held at the Company's domicile or place of business activities or at the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at other places within the territory of the Republic of Indonesia.
11. Board of Directors meetings are chaired by the President Director. In the event that the President Director is absent or unable to attend the Directors' Meeting for any reason, which does not need to be proven to a third party, then one of the members of the Board of Directors who is present and selected at the Directors' Meeting may chair the Directors' Meeting.
12. A member of the Board of Directors may be represented at a Board of Directors Meeting only by another member of the Board of Directors based on a power of attorney
13.
    a. A. Each member of the Board of Directors present has the right to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) votes for each other member of the Board of Directors whom he represents.
    b. Every member of the Board of Directors personally in any way, either directly or indirectly have an interest in a transaction, contract or agreement proposed, in which the Company is one of the parties must state the nature interests in a Board of Directors Meeting and is not entitled to participate in voting regarding matters relating to the transaction or contract, unless the Board of Directors Meeting determines otherwise.
14. Decision making at the Board of Directors Meeting as referred to in number 1 above is carried out based on deliberation and consensus.
15. In the event that a consensus deliberation decision is not reached, the decision is made based on a majority vote, i.e. approved by more than 1/2 (one half) of the members of the Board of Directors present.
16. Differences of opinion (dissenting opinions) that occur in the decisions of the Board of Directors Meeting must be stated clearly in the minutes of the Board of Directors meeting accompanied by the reasons for the dissenting opinions.
17. The results of the meeting as referred to in number 1 above must be stated in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Directors present, and submitted to all members of the Board of Directors.

18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 diatas ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada nomor 17 dan nomor 18 di atas ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

20. Risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada nomor 17 dan nomor 18 di atas ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
21. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan- keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
22. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.
23. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
24. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

18. The results of the meeting as referred to in number 3 above must be stated in the minutes of the meeting, signed by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who are present, and submitted to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
19. In the event that there are members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who do not sign the results of the meeting as referred to in numbers 17 and 18 above, the person concerned is obliged to state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.
20. Minutes of Board of Directors' meetings as referred to in numbers 17 and 18 above must be documented by the Company.
21. Minutes of Board of Directors' Meetings are valid evidence regarding the decisions taken at the relevant Directors' Meeting, both for members of the Board of Directors and for third parties.
22. The Board of Directors can also take legal and binding decisions without holding a Board of Directors Meeting, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing about the proposals in question and all members of the Board of Directors have given their approval regarding the proposals submitted in writing and signed the approval. . Decisions taken in this way have the same force as decisions legally taken at the Meeting.

23. Board of Directors meetings can also be conducted via teleconference, video conference, or other electronic media which allows all participants in the Board of Directors' Meeting to see and/or hear each other directly and participate in the Board of Directors' Meeting, provided that the minutes of the Meeting are made using telephone conference. or similar communication equipment will be made in writing and circulated among all members of the Board of Directors Meeting who participate in the meeting, to be signed. Decisions taken in this way have the same force as decisions legally taken at a Board of Directors Meeting.

24. Provisions regarding Board of Directors Meetings that have not been regulated in these articles of association refer to OJK Regulations and other applicable laws and regulations.

Agenda Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2023, Rapat Direksi membahas agenda-agenda, antara lain sesuai di bawah ini.

Board of Directors Meeting Agenda

Throughout 2023, the Board of Directors Meeting discussed agendas, including those below.

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
1	13 Januari 2023 January 13, 2023 UM.332/13/1/1/IKT-23	• Tindak lanjut Radir sebelumnya; • Pembahasan Materi Setiap Direktorat; • Hal-hal strategis lainnya. • Follow up on previous Board of Directors meeting; • Discussion of material for each directorate; • Other strategic matters.	• Rio T.N Lasse – Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Andi Hamdani – Direktur Operasi & Teknik • Sumarno – Direktur Keuangan dan SDM • Rio T.N Lasse – President Director / Acting Director of Commercial and Business Development • Andi Hamdani – Director of Operations & Engineering • Sumarno – Director of Finance and HC
2	30 Januari 2023 January 30, 2023 UM.332/30/1/1/IKT-23	• Tindak lanjut Radir sebelumnya; • Pembahasan Materi Setiap Direktorat; • Hal-hal strategis lainnya. • Follow up on previous Board of Directors meeting; • Discussion of material for each directorate; • Other strategic matters.	• Rio T.N Lasse – Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Andi Hamdani – Direktur Operasi & Teknik • Sumarno – Direktur Keuangan dan SDM • Rio T.N Lasse – President Director / Acting Director of Commercial and Business Development • Andi Hamdani – Director of Operations & Engineering • Sumarno – Director of Finance and HC
3	20 Februari 2023 February 20, 2023 UM.332/20/2/1/IKT-23	• Tindaklanjut Radir sebelumnya; • Program kerja Corporate Secretary; • Update hasil sementara Audit SPI Semester II/2022; • Kinerja operasi dan keuangan bulan Januari 2023; • Revenue sharing di Pelabuhan Tanjung Priok; • Persiapan ekspansi Balikpapan; • Investasi jaring debu; • Conference BIMP; • Hal-hal strategis lainnya. • Follow up on previous Board of Directors meeting; • Corporate Secretary work program; • Update on interim results of SPI Audit Semester II/2022; • Operational and financial performance in January 2023; • Revenue sharing at Pelabuhan Tanjung Priok; • Preparation for Balikpapan expansion; • Dust net investment; • BIMP Conference; • Other strategic matters.	• Rio T.N Lasse – Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Andi Hamdani – Direktur Operasi & Teknik • Sumarno – Direktur Keuangan dan SDM • Rio T.N Lasse – President Director / Acting Director of Commercial and Business Development • Andi Hamdani – Director of Operations & Engineering • Sumarno – Director of Finance and HC
4	6 Maret 2023 March 6, 2023 SK.02/6/3/1/SKPR/SKPR/IKT-23	• Tindak lanjut Radir sebelumnya; • Penunjukan pelaksana harian Direktur Utama dan Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis; • Hal-hal strategis lainnya. • Follow up on previous Board of Directors meeting; • Appointment of daily acting President Director and Commercial and Business Development Director; • Other strategic matters.	• Rio T.N Lasse – Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Andi Hamdani – Direktur Operasi & Teknik • Sumarno – Direktur Keuangan dan SDM • Rio T.N Lasse – President Director / Acting Director of Commercial and Business Development • Andi Hamdani – Director of Operations & Engineering • Sumarno – Director of Finance and HC

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
5	27 Maret 2023 March 27, 2023 SK.02/27/1/1/SKPR/SKPR/IKT-23	• Tindak lanjut Radir sebelumnya; • Pembahasan materi Rakomdir; • Agenda Safari Ramadhan; • Hal-hal strategis lainnya. • Follow up on previous Board of Directors meeting; • Discussion of Board of Commissioners and Directors meeting material; • Ramadhan Safari Agenda; • Other strategic matters.	• Andi Hamdani – Plt. Direktur Utama Direktur Operasi & Teknik • Sumarno – Direktur Keuangan dan SDM Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Andi Hamdani – Acting President Director and • Director of Operations & Engineering • Sumarno – Director of Finance and HR • Plt. Director of Commercial and Business Development
6	6 April 2023 April 6, 2023 SK.02/6/4/1/SKPR/SKPR/IKT-23	• Tindak lanjut Radir sebelumnya; • Persiapan Silaturahmi (buka puasa bersama); • Hal-hal strategis lainnya. • Follow up on previous Board of Directors meeting; • Preparation for Gathering (breaking the fast together); • Other strategic matters.	• Andi Hamdani – Plt. Direktur Utama Direktur Operasi & Teknik • Sumarno – Direktur Keuangan dan SDM Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Andi Hamdani – Acting President Director and • Director of Operations & Engineering • Sumarno – Director of Finance and HC • Acting Director of Commercial and Business Development
7	18 April 2023 April 18, 2023 SK.02/18/4/1/SKPR/SKPR/IKT-23	• Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Hal-hal strategis lainnya. • Appointment of Acting Director of Commercial and Business Development • Other strategic matters.	• Sugeng Mulyadi– Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Bagus Dwipoyono – Direktur Operasi & Teknik • Sumarno – Direktur Keuangan dan SDM • Sugeng Mulyadi – President Director / • Acting Director of Commercial and Business Development • Bagus Dwipoyono – Director of Operations & Engineering • Sumarno – Director of Finance and HC
8	3 Mei 2023 May 3, 2023 SK.02/11/5/1/SKPR/DIRUT/IKT-23	• Tindak lanjut Radir sebelumnya; • Program perkenalan Perusahaan kepada Direksi baru; • Overview kinerja operasional dan keuangan 5 tahun terakhir, Terminal Satelit, Struktur organisasi dan jumlah pegawai; • Hal-hal strategis lainnya. • Follow up on previous Board of Directors meeting; • Company introduction program for new Directors; • Overview of operational and financial performance for the last 5 years, Satellite Terminal, organizational structure and number of employees; • Other strategic matters.	• Sugeng Mulyadi– Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Bagus Dwipoyono – Direktur Operasi & Teknik • Sumarno – Direktur Keuangan dan SDM • Sugeng Mulyadi – President Director / • Acting Director of Commercial and Business Development • Bagus Dwipoyono – Director of Operations & Engineering • Sumarno – Director of Finance and HC
9	11 Mei 2023 May 11, 2023 SK.02/19/5/1/SKPR/DIRUT/IKT-23	• Tindak lanjut Radir sebelumnya; • Persiapan RUPS Tahunan; • Proposal bisnis layanan alat berat; • Persiapan Rakomdir; • Hal-hal strategis lainnya. • Follow up on previous Board of Directors meeting; • Preparation for the Annual GMS; • Heavy equipment service business proposal; • Preparation for Board of Commissioners and Directors meeting; • Other strategic matters.	• Sugeng Mulyadi– Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Bagus Dwipoyono – Direktur Operasi & Teknik • Sumarno – Direktur Keuangan dan SDM • Sugeng Mulyadi – President Director / • Acting Director of Commercial and Business Development • Bagus Dwipoyono – Director of Operations & Engineering • Sumarno – Director of Finance and HC

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
10	23 Mei 2023 May 23, 2023 SK.02/29/5/1/SKPR/ DIRUT/IKT-23	• Tindak lanjut radir sebelumnya; • Update pending matters Direktorat; • Tindak lanjut Rakomdir bulan Mei 2023; • Hal-hal strategis lainnya. • Follow up on previous Board of Directors meeting; • Update pending matters of the Directorate; • Follow-up to Board of Commissioners and Directors meeting in May 2023; • Other strategic matters.	• Sugeng Mulyadi– Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Bagus Dwipoyono – Direktur Operasi & Teknik • Sumarno – Direktur Keuangan dan SDM • Sugeng Mulyadi – President Director / Acting Director of Commercial and Business Development • Bagus Dwipoyono – Director of Operations & Engineering • Sumarno – Director of Finance and HC
11	5 Juni 2023 June 5, 2023 SK.02/12/6/1/SKPR/ DIRUT/IKT-23	• Tindak lanjut radir sebelumnya; • Pembahasan RKM 2024; • Pembahasan Implementasi Dedicated Car Terminal/single billing; • Update pending matters Direktorat; • Hal-hal strategis lainnya. • Follow up on previous Board of Directors meeting; • Discussion of RKM 2024; • Discussion on the Implementation of Dedicated Car Terminal/single billing; • Update pending matters of the Directorate; • Other strategic matters.	• Sugeng Mulyadi– Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Bagus Dwipoyono – Direktur Operasi & Teknik • Sumarno – Direktur Keuangan dan SDM • Sugeng Mulyadi – President Director / Acting Director of Commercial and Business Development • Bagus Dwipoyono – Director of Operations & Engineering • Sumarno – Director of Finance and HC
12	21 Juni 2023 June 21, 2023 SK.02/11/7/1/SKPR/DIRUT/ IKT-23	• Tindak lanjut radir sebelumnya; • Pembahasan RKM 2024; • Pembahasan Implementasi Dedicated Car Terminal/single billing; • Update pending matters Direktorat; • Hal-hal strategis lainnya. • Follow up on previous Board of Directors meeting; • Discussion of RKM 2024; • Discussion on the Implementation of Dedicated Car Terminal/single billing; • Update pending matters of the Directorate; • Other strategic matters.	• Sugeng Mulyadi– Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Bagus Dwipoyono – Direktur Operasi & Teknik • Sumarno – Direktur Keuangan dan SDM • Sugeng Mulyadi – President Director / Acting Director of Commercial and Business Development • Bagus Dwipoyono – Director of Operations & Engineering • Sumarno – Director of Finance and HC
13	10 Juli 2023 July 10, 2023 SK.02/27/7/1/SKPR/ DIRUT/IKT-23	• Tindak lanjut radir sebelumnya; • Tindak lanjut RUPS Tahunan dan RUPSLB; • Kinerja Perseroan dan Laporan Keuangan semester 1 tahun 2023; • Usulan RKAP Tahun buku 2024; • Tindak lanjut pengkajian Kerjasama Semayang; • Pembahasan implementasi dedicated Car Terminal; • Rencana pembahasan dermaga 007 dan 006 Tanjung Priok; • Hal-hal strategis lainnya. • Follow up on previous Board of Directors meeting; • Follow-up to the Annual GMS and EGMS; • Company Performance and Financial Reports for semester 1 of 2023; • Proposed RKAP for Fiscal Year 2024; • Follow-up to the Semayang Cooperation review; • Discussion on the implementation of a dedicated Car Terminal; • Discussion plan for Tanjung Priok docks 007 and 006; • Other strategic matters.	• Sugeng Mulyadi– Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Bagus Dwipoyono – Direktur Operasi & Teknik • Sumarno – Direktur Keuangan dan SDM • Sugeng Mulyadi – President Director / Acting Director of Commercial and Business Development • Bagus Dwipoyono – Director of Operations & Engineering • Sumarno – Director of Finance and HC

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
14	17 Juli 2023 July 17, 2023 SK.02/17/7/1/SKPR/ DIRUT/ IKT-23	• Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Keuangan dan SDM; • Hal-hal strategis lainnya. • Appointment of Acting Director of Finance and HC; • Other strategic matters.	• Sugeng Mulyadi– Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Bagus Dwipoyono – Direktur Operasi & Teknik • Sumarno – Direktur Keuangan dan SDM • Sugeng Mulyadi – President Director / • Acting Director of Commercial and Business Development • Bagus Dwipoyono – Director of Operations & Engineering • Sumarno – Director of Finance and HC
15	2 Agustus 2023 August 2, 2023 UM.332/2/8/1/IKT-23	• Tindak lanjut radir sebelumnya; • Finalisasi RJPP; • Penguatan implementasi HSSE; • Persiapan RUPSLB; • Peningkatan value creation; • Rencana pembentukan PMO CDM; • Persiapan pengoperasian Pelabuhan Semayang; • Kebutuhan SDM Operasional; • Penguatan implementasi HSSE; • Follow up on previous Board of Directors meeting; • Finalization of RJPP; • Strengthening HSSE implementation; • Preparation for the EGMS; • Increased value creation; • Plan to establish a CDM PMO; • Preparation for the operation of Semayang Port; • Operational HC needs; • Strengthening HSSE implementation;	• Sugeng Mulyadi– Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Bagus Dwipoyono – Direktur Operasi & Teknik Plt. Direktur Keuangan dan SDM • Sugeng Mulyadi – President Director / • Acting Director of Commercial and Business Development • Bagus Dwipoyono – Director of Operations & Engineering • Acting Director of Finance and HC
16	8 Agustus 2023 August 8, 2023 SK.02/14/8/1/SKPR/ DIRUT/IKT-23	• Tindak lanjut rapat sebelumnya; • Pembahasan kinerja Perusahaan s.d. Juli 2023; • Hal-hal strategis lainnya. • Follow up on previous meetings; • Discussion of Company performance up to July 2023; • Other strategic matters.	• Sugeng Mulyadi– Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Bagus Dwipoyono – Direktur Operasi & Teknik Plt. Direktur Keuangan dan SDM • Sugeng Mulyadi – President Director / • Acting Director of Commercial and Business Development • Bagus Dwipoyono – Director of Operations & Engineering • Acting Director of Finance and HC
17	28 Agustus 2023 August 28,2023 SK.02/30/8/1/SKPR/ DIRUT/IKT-23	• Pembahasan arahan dan tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja Perusahaan s.d. Juli 2023; • Update hasil lomba inovasi; • Persiapan HUT IPCC tahun 2023; • Persiapan gathering tahun 2023; • Hal-hal strategis lainnya. • Discussion of the Board of Commissioners' directions and responses regarding the Company's performance up to July 2023; • Update the results of the innovation competition; • Preparations for the IPCC Anniversary in 2023; • Preparation for the 2023 gathering; • Other strategic matters.	• Sugeng Mulyadi– Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Bagus Dwipoyono – Direktur Operasi & Teknik Plt. Direktur Keuangan dan SDM • Sugeng Mulyadi – President Director / • Acting Director of Commercial and Business Development • Bagus Dwipoyono – Director of Operations & Engineering • Acting Director of Finance and HC

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
18	6 September 2023 September 6, 2023 SK.02/6/9/1/SKPR/ IKT-23	· Program perkenalan Direksi baru; · Hal-hal strategis lainnya. · New Directors introduction program; · Other strategic matters.	· Sugeng Mulyadi– Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis · Wing Megantoro – Direktur Operasi & Teknik · Direktur Keuangan dan SDM · Sugeng Mulyadi – President Director / · Acting Director of Commercial and Business Development · Bagus Dwipoyono – Director of Operations & Engineering · Wing Megantoro – Director of Finance and HC
19	12 September 2023 September 12, 2023 SK.02/22/9/1/SKPR/ DIRUT/IKT-23	· Tindak lanjut rapat sebelumnya; · Pembahasan materi Rakomdir; · Hal-hal strategis lainnya. · Follow up on previous meetings; · Discussion of Board of Commissioners and Directors meeting material; · Other strategic matters.	· Sugeng Mulyadi– Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis · Bagus Dwipoyono – Direktur Operasi & Teknik · Direktur Keuangan dan SDM · Sugeng Mulyadi – President Director / · Acting Director of Commercial and Business Development · Bagus Dwipoyono – Director of Operations & Engineering · Wing Megantoro – Director of Finance and HC
20	22 September 2023 September 22, 2023 SK.02/4/10/1/SKPR/ DIRUT/IKT-23	· Tindak lanjut rapat sebelumnya; · Finalisasi materi Rakomdir; · Finalisasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan; · Hal-hal strategis lainnya. · Follow up on previous meetings; · Finalization of Board of Commissioners and Directors meeting materials; · Finalize the Company's Long Term Plan; · Other strategic matters.	· Sugeng Mulyadi– Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis · Bagus Dwipoyono – Direktur Operasi & Teknik · Direktur Keuangan dan SDM · Sugeng Mulyadi – President Director / · Acting Director of Commercial and Business Development · Bagus Dwipoyono – Director of Operations & Engineering · Director of Finance and HC
21	10 Oktober 2023 October 10, 2023 SK.02/10/10/1/SKPR/ DIRUT/IKT-23	· Tindak lanjut rapat sebelumnya; · Finalisasi materi Rakomdir; · Finalisasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan; · Hal-hal strategis lainnya. · Follow up on previous meetings; · Finalization of Board of Commissioners and Directors meeting materials; · Finalize the Company's Long Term Plan; · Other strategic matters.	· Sugeng Mulyadi– Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis · Bagus Dwipoyono – Direktur Operasi & Teknik · Direktur Keuangan dan SDM · Sugeng Mulyadi – President Director / · Acting Director of Commercial and Business Development · Bagus Dwipoyono – Director of Operations & Engineering · Wing Megantoro – Director of Finance and HC
22	25 Oktober 2023 October 25, 2023 SK.02/6/11/1/SKPR/DIRUT/ IKT-23	· Pedoman penetapan besaran penghasilan tahun 2023; · Pemberian Tantiem tahun buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris · Guidelines for determining the amount of income for 2023; · Providing bonuses for the 2022 Fiscal Year for the Board of Directors and Board of Commissioners	· Sugeng Mulyadi– Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis · Bagus Dwipoyono – Direktur Operasi & Teknik · Direktur Keuangan dan SDM · Sugeng Mulyadi – President Director / · Acting Director of Commercial and Business Development · Bagus Dwipoyono – Director of Operations & Engineering · Wing Megantoro – Director of Finance and HC

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
23	15 November 2023 November 15, 2023 SK.02/22/11/1/SKPR/ DIRUT/IKT-23	• Tindak lanjut rapat sebelumnya; • Performance bulan Oktober 2023; • Asset Gedung pitstop dan parkir karyawan yang terdampak rencana akses bersama IPCC-DKP; • Hal-hal strategis lainnya. • Follow up on previous meetings; • Performance in October 2023; • Assets for pitstop buildings and employee parking that are affected by the IPCC-DKP joint access plan; • Other strategic matters.	• Sugeng Mulyadi– Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Bagus Dwipoyono – Direktur Operasi & Teknik • Direktur Keuangan dan SDM • Sugeng Mulyadi – President Director / Acting Director of Commercial and Business Development • Bagus Dwipoyono – Director of Operations & Engineering • Wing Megantoro – Director of Finance and HC
24	21 November 2023 November 21, 2023 SK.02/27/11/1/SKPR/ DIRUT/IKT-23	• Tindak lanjut rapat sebelumnya; • Update pending matters divisi; • Hal-hal strategis lainnya. • Follow up on previous meetings; • Update pending divisional matters; • Other strategic matters.	• Sugeng Mulyadi– Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Bagus Dwipoyono – Direktur Operasi & Teknik • Direktur Keuangan dan SDM • Sugeng Mulyadi – President Director / Acting Director of Commercial and Business Development • Bagus Dwipoyono – Director of Operations & Engineering • Wing Megantoro – Director of Finance and HC
25	7 Desember 2023 December 7, 2023 SK.02/12/12/1/SKPR/ DIRUT/IKT-23	• Tindak lanjut rapat sebelumnya; • Performance s.d. November 2023; • Hal-hal strategis lainnya. • Follow up on previous meetings; • Performance up to November 2023; • Other strategic matters.	• Sugeng Mulyadi– Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Bagus Dwipoyono – Direktur Operasi & Teknik • Direktur Keuangan dan SDM • Sugeng Mulyadi – President Director / Acting Director of Commercial and Business Development • Bagus Dwipoyono – Director of Operations & Engineering • Wing Megantoro – Director of Finance and HC
26	13 Desember 2023 December 13, 2023 SK.02/22/12/1/SKPR/ DIRUT/IKT-23	• Tindak lanjut rapat sebelumnya; • Performance s.d. November 2023; • Hal-hal strategis lainnya. • Follow up on previous meetings; • Performance up to November 2023; • Other strategic matters.	• Sugeng Mulyadi– Direktur Utama / Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Bagus Dwipoyono – Direktur Operasi & Teknik • Direktur Keuangan dan SDM • Sugeng Mulyadi – President Director / Acting Director of Commercial and Business Development • Bagus Dwipoyono – Director of Operations & Engineering • Wing Megantoro – Director of Finance and HC

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi
Frequency and Attendance of Board of Directors Meetings

No	Nama Name	Jabatan Position	Rapat Direksi Board of Directors Meeting			Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris Joint Board of Directors Meeting with the Board of Commissioners			RUPS GMS		
			Wajib Rapat Mandatory Meeting	Frekuesi Kehadiran Frequency of Attendance	Rata-Rata Tingkat Kehadiran Average Attendance Level	Wajib Rapat Mandatory Meeting	Frekuesi Kehadiran Frequency of Attendance	Rata-Rata Tingkat Kehadiran Average Attendance Level	Wajib Rapat Mandatory Meeting	Frekuesi Kehadiran Frequency of Attendance	Rata-Rata Tingkat Kehadiran Average Attendance Level
1	Rio T.N Lasse*	Direktur Utama/ Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director/ Acting Director of Commercial and Business Development	4	4	100%	4	2	50%	1	-	-
2	Andi Hamdani*	Direktur Operasi & Teknik Director of Operations & Engineering	6	6	100%	4	4	100%	1	1	100%
3	Sumarno***	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HC	14	14	100%	8	6	75%	3	3	100%
41	Sugeng Mulyadi**	(Direktur Utama merangkap Plt Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) (President Director concurrently Acting Director of Commercial and Business Development)	20	20	100% 100% 100%	8	8	....%	3	3	100%
5	Bagus Dwipoyono**	(Direktur Operasi dan Teknik) (Director of Operations and Engineering)	20	20		8	8		3	3	
6	Wing Megantoro****	(Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia) (Director of Finance and Human Capital)	9	9		4	4		-	-	

Keterangan:
* Tidak lagi menjabat sebagai Direktur IPCC per 18 April 2023
** Mulai menjabat sebagai Direktur IPCC pada 18 April 2023
*** Tidak lagi menjabat sebagai Direktur IPCC per 5 September 2023
**** Mulai menjabat sebagai Direktur IPCC per 5 September 2023

Information:
* No longer served as Director of the IPCC as of April 18, 2023
** Began serving as Director of the IPCC on April 18, 2023
*** No longer served as Director of the IPCC as of September 5, 2023
**** Began serving as Director of the IPCC as of September 5, 2023

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Independensi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan aspek penting dalam implementasi GCG di Perseroan. Salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain adalah hubungan afiliasi.

IPCC secara tranparan mengungkapkan informasi tentang hubungan afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi yang meliputi:

- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi Lainnya;
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali;
- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris Lainnya; dan
- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Pada tabel pengungkapan hubungan afiliasi di bawah ini dapat dilihat bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama/pengendali.

DISCLOSURE OF AFFILIATED RELATIONSHIPS BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

The independence of the Board of Commissioners and Directors is an important aspect in implementing GCG in the Company. One of the criteria used to measure the independence of the Board of Commissioners and Directors, among others, is the affiliation relationship.

The IPCC transparently discloses information about the Affiliated Relationship of the Board of Commissioners and Directors which includes:

- Affiliated Relationship between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors;
- Affiliated Relationship between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
- Affiliated Relationship between members of the Board of Directors and Major and/or controlling Shareholders;
- Affiliated Relationship between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners; And
- Affiliated Relationship between members of the Board of Commissioners and Major and/or controlling Shareholders.

In the Affiliated Relationship disclosure table below, it can be seen that all members of the Company's Board of Commissioners and Directors have no family or financial relationships with members of the Board of Commissioners, Directors and major/controlling shareholders.

Tabel Hubungan Keluarga dan Keuangan Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama/ Pengendali

Table of Family and Financial Relations of the Board of Commissioners with Members of the Board of Directors and Major/Controlling Shareholders

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Family Relations With						Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With					
		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Shareholders	
		Ya/ Yes	Tidak/ No	Ya/ Yes	Tidak/ No	Ya/ Yes	Tidak/ No	Ya/ Yes	Tidak/ No	Ya/ Yes	Tidak/ No	Ya/ Yes	Tidak/ No
Drajat Sulistyo	Komisaris Utama President Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
LM. Arya Bima Yudiantara	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama merangkap Plt Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director Concurrently Acting Director of Commercial and Business Development	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Engineering	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Wing Megantoro	Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Director of Finance and Human Capital	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pengungkapan Rangkap Jabatan Direksi

Merujuk pada Undang-Undang No. 5 tahun 2009 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 26 tentang Jabatan Rangkap, maka anggota Direksi Perseroan tidak merangkap jabatan pada perusahaan yang termasuk di antaranya:

- Berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan Perseroan;
- Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; dan
- Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Informasi di bawah ini menjelaskan tentang rangkap jabatan Direksi Perseroan pada saat laporan Tahunan ini diungkapkan:

DISCLOSURE OF THE CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Disclosure of Board of Directors Concurrent Positions

Referring to Law no. 5 of 2009 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, article 26 concerning Concurrent Position s, members of the Company's Board of Directors do not hold concurrent positions in companies including:

- Be in the same relevant market as the Company;
- Has a close relationship in the field and/or type of business; And
- Together they can control the market share of certain goods and/or services which can result in monopolistic practices and/or unfair business competition.

The information below explains the concurrent positions of the Company's Directors at the time this Annual Report was disclosed:

Nama Name	**Jabatan di IPCC** Position at IPCC	**Rangkap Jabatan di IPCC** Concurrent Position at IPCC	**Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain** Position in other companies/ Institution
Sugeng Mulyadi	Direktur Utama President Director	Plt Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Acting Director of Commercial and Business Development	Tidak ada None
Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Engineering	Tidak ada None	Tidak ada None
LM. Wing Megantoro	Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Director of Finance and Human Capital	Tidak ada None	Tidak ada None

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Mengacu pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2009, tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terkait dengan Pasal 26 yang membahas mengenai Jabatan Rangkap, seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak merangkap jabatan pada perusahaan yang termasuk di antaranya: (1) Berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan Perusahaan; (2) Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; dan (3) Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Concurrent Position of Board of Commissioners

Referring to Law Number 5 of 2009, concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, related to Article 26 which discusses Concurrent Positions, all members of the Company's Board of Commissioners do not hold concurrent positions in the company including: (1) Being in the same relevant market as the Company; (2) Has a close connection in the field and/or type of business; and (3) Together they can control the market share of certain goods and/or services which could result in monopolistic practices and/or unfair business competition.

Adapun jabatan lain yang dirangkap oleh Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:

The other positions held by the Company's Board of Commissioners are as follows:

Nama Name	Jabatan di IPCC Position at IPCC	Rangkap Jabatan di IPCC Concurrent Position at IPCC	Jabatan di Perusahaan Lain Positions in Other Companies
Drajat Sulistyo	Komisaris Utama President Commissioner	Tidak ada None	Tidak ada None
Abdur Rahim Hasan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak ada None	Tidak ada None
LM. Arya Bima Yudiantara	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak ada None	Tidak ada None

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan dimaksud antara lain adalah perbedaan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif Perseroan dan atau pihak terkait dengan Perseroan, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka harus mengutamakan kepentingan Perseroan dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Perseroan.

MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In the event of a conflict of interest, members of the Board of Commissioners, Directors and Executive Officers of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk are prohibited from taking actions that could harm the Company or reduce the Company's profits and are required to disclose the conflict of interest in each decision. The conflict of interest referred to includes, among other things, differences between the interests of the Company and the personal interests of the owners, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Executive Officers of the Company and/or parties related to the Company, giving preferential treatment to certain parties outside the applicable procedures and provisions. If a decision still has to be taken, it must prioritize the interests of the Company and avoid losses or reduction in the Company's profits.

PENGUNGKAPAN TRANSAKSI DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib menyampaikan kepemilikan saham sebesar 5% (lima persen) di Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Sampai dengan 31 Desember 2023, Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya baik di Perseroan maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

DISCLOSURE OF COMPANY TRANSACTIONS AND SHARES OWNERSHIP BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Share Ownership of Members of the Board of Commissioners

Members of the Company's Board of Commissioners are required to convey share ownership of 5% (five percent) in the Company and in other companies, domiciled at home and abroad. Until 31 December 2023, the Board of Commissioners has disclosed its share ownership in both the Company and other companies domiciled at home and abroad. The share ownership of the Board of Commissioners can be seen in the table below.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Januari - Maret 2022
Table of Share Ownership of the Board of Commissioners January - March 2022

Nama Name	Kepemilikan Saham di Perseroan Share Ownership in Company	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain Share Ownership in Other Companies
Mega Satria	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Abdur Rahim Hasan	Tidak Ada None	Tidak Ada None
LM. Arya Bima Yudiantara	Tidak Ada None	Tidak Ada None

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris April - Desember 2022
Table of Share Ownership of the Board of Commissioners April - December 2022

Nama Name	Kepemilikan Saham di Perseroan Share Ownership in the Company	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain Share Ownership in Other Companies
Drajat Sulistyo	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Abdur Rahim Hasan	Tidak Ada None	Tidak Ada None
LM. Arya Bima Yudiantara	Tidak Ada None	Tidak Ada None


PELINDO
JASA SEJAHTERA
KARTIKA DWANTI

Organ Pendukung Dewan Komisaris
SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Hingga akhir 2022, Perseroan telah membentuk 3 (tiga) komite sebagai organ pendukung Dewan Komisaris, yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut adalah sebagai berikut:

- Komite Audit;
- Komite Pemantau Manajemen Risiko; dan
- Komite Nominasi dan Remunerasi.

Uraian berikut ini menjelaskan lebih rinci tentang profil, tanggung jawab, serta pelaksanaan tugas komite pendukung Dewan Komisaris.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris yang dibantu oleh seorang staf pegawai Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris IPCC saat ini dijabat oleh Sdri. Dewi Fitriyani yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris IPCC No. 15/KEP-DK/03/IKT-2020 tanggal 1 Maret 2020 tentang Perpanjangan Masa Tugas Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Until the end of 2022, the Company has formed 3 (three) committees as supporting organs for the Board of Commissioners, which assist in carrying out the duties and functions of the Board of Commissioners. These committees are as follows:

- Audit Committee;
- Risk Management Monitoring Committee; And
- Nomination and Remuneration Committee.

The following description explains in more detail the profile, responsibilities and implementation of the duties of the supporting committees of the Board of Commissioners.

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Secretary of the Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk or IPCC is appointed and is directly responsible to the Board of Commissioners who is assisted by a staff member of the Secretariat of the Board of Commissioners. The Secretary of the IPCC Board of Commissioners is currently held by Ms. Dewi Fitriyani who was appointed based on the Decree of the IPCC Board of Commissioners No. 15/KEP-DK/03/IKT-2020 dated March 1, 2020 concerning Extension of the Term of Service for the Secretary of the Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Secretary Profile

Dewi Fitriyani
Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, usia 46 tahun, berdomisili di Jakarta. Indonesian citizen, age 46 years, domiciled in Jakarta.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris IPCC No. 15/KEP-DK/03/IKT-2020 tanggal 1 Maret 2020 tentang Perpanjangan Masa Tugas Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. IPCC Board of Commissioners Decree No. 15/KEP-DK/03/IKT-2020 dated March 1, 2020 concerning Extension of the Term of Service for the Secretary of the Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk..
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti, • Master of Business Administration in Leadership & Logistic dari Kuhne Logistic University tahun 2017 • Bachelor of Economics in Accounting from Universitas Trisakti, • Master of Business Administration in Leadership & Logistics from Kuhne Logistic University in 2017
Sertifikasi Certification	-
Riwayat Karier Work Experience	VP Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan (2021-Sekarang) di PT Pelindo Solusi Logistik, DVP Pengelolaan Cabang (2020-2021), Corporate Secretary & Hub. Eksternal PT Pelabuhan Tanjung Priok (2017-2020), SDVP Protokoler & Tata Usaha Direksi Kantor Pusat (2017), dan ASP. Tata Usaha Direksi Kantor Pusat (2015) VP Marketing and Customer Service (2021-Present) at PT Pelindo Solusi Logistik, DVP Branch Management (2020-2021), Corporate Secretary & External Relations at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2017-2020), SDVP Protocol & Administration for Head Office Directors (2017), and ASP. Administration of Head Office Directors (2015)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti, serta Master of Business Administration in Leadership & Logistic dari Kuhne Logistic University tahun 2017. Selain menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris pada tahun 2017, beliau juga menjabat sebagai VP Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan (2021-Sekarang) di PT Pelindo Solusi Logistik, DVP Pengelolaan Cabang (2020-2021), Corporate Secretary & Hub. Eksternal PT Pelabuhan Tanjung Priok (2017-2020), SDVP Protokoler & Tata Usaha Direksi Kantor Pusat (2017), dan ASP. Tata Usaha Direksi Kantor Pusat (2015).

Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretaris Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:

- Mempersiapkan rapat, termasuk undangan rapat dan bahan rapat yang disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan pihak lain yang diundang.
- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
- Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.
- Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat, maupun dokumen lainnya.

Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta.

Obtained a Bachelor of Economics in Accounting from Universitas Trisakti, as well as a Master of Business Administration in Leadership & Logistics from Kuhne Logistic University in 2017. Apart from serving as Secretary of the Board of Commissioners in 2017, he also served as VP Marketing and Customer Service (2021-Present) at PT Pelindo Solusi Logistik, DVP Branch Management (2020-2021), Corporate Secretary & External Relations at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2017-2020), SDVP Protocol & Administration for Head Office Directors (2017), and ASP. Administration of Head Office Directors (2015).

Duties and Responsibilities

The Secretary of the Board of Commissioners is tasked with carrying out activities to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties, including:

- Prepare meetings, including meeting invitations and meeting materials which are submitted to the entire Board of Commissioners and other invited parties.
- Prepare minutes of meetings of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
- Provide data/information required by the Board of Commissioners and committees within the Board of Commissioners.
- Administer Board of Commissioners documents, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents.

- Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.
- Menyusun rancangan laporan Dewan Komisaris.
- Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
- Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
- Mengoordinasikan anggota Komite Dewan Komisaris, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung (liason officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

- Prepare a draft work plan and budget for the Board of Commissioners.
- Prepare a draft report for the Board of Commissioners.
- Ensure that the Board of Commissioners complies with statutory regulations and implements GCG principles.
- Provide information required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested.
- Coordinate members of the Board of Commissioners Committee, if necessary in order to expedite the duties of the Board of Commissioners.
- As a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.

Pendidikan/Pelatihan dan Pengembangan Sekretaris Dewan Komisaris

Education/Training and Development of the Secretary to the Board of Commissioners

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2023
Table of Training and Competency Development for the Secretary of the Board of Commissioners in 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Waktu Penyelenggaraan Implementation Time	Penyelenggara Organizer
Dewi Fitriyani (Sekretaris Dewan Komisaris) (Secretary of the Board of Commissioners)	GRC Summit 2023	Building Reslinet Fture through GRC and ESG	24-25 Agustus August 24 - 25	Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA)

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2023:

Sejak awal hingga akhir tahun 2023, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan perannya dalam membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Mempersiapkan rapat rutin yang dilakukan Dewan Komisaris baik rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi dan Manajemen Perseroan selama tahun 2022.
2. Membuat risalah rapat dari setiap rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat, maupun dokumen lainnya.
4. Mempersiapkan rapat, termasuk undangan rapat dan bahan rapat yang disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan pihak lain yang diundang.
5. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
6. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.

Implementation of Duties of Secretary to the Board of Commissioners in 2023:

From the beginning to the end of 2023, the Secretary of the Board of Commissioners has carried out various activities in accordance with his role in assisting the smooth running of the Board of Commissioners' duties, including:

1. Prepare for regular meetings held by the Board of Commissioners, both internal meetings and joint meetings with the Board of Directors and Company Management during 2022.
2. Prepare minutes of every meeting held by the Board of Commissioners throughout 2022.
3. Administer Board of Commissioners documents, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents.
4. Prepare meetings, including meeting invitations and meeting materials which are submitted to the entire Board of Commissioners and other invited parties.
5. Prepare minutes of meetings of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
6. Provide data/information required by the Board of Commissioners and committees within the Board of Commissioners.

7. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat, maupun dokumen lainnya.
8. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.
9. Menyusun rancangan laporan Dewan Komisaris.
10. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
11. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
12. Mengoordinasikan anggota Komite Dewan Komisaris, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
13. Sebagai penghubung (liason officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretaris Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perseroan.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan salah satu organ pendukung yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sistem pengendalian internal Perseroan, kepatuhan terhadap regulasi, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal. Keberadaan Komite Audit bertujuan untuk mengoptimalkan mekanisme checks and balances Perseroan, yang pada akhirnya dapat melindungi hak Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya.

Komite Audit Perseroan dibentuk pada tahun 2015 melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/30/03/03/IKT-15 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal.

Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 70; Tambahan Lembaran Negara No. 4197);
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (lembaran Negara Tahun 2007 No. 106; Tambahan Lembaran Negara 4756);
- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan

7. 6.Administer Board of Commissioners documents, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents.
8. 7.Prepare a draft work plan and budget for the Board of Commissioners.
9. Prepare a draft report for the Board of Commissioners.
10. Ensure that the Board of Commissioners complies with statutory regulations and implements GCG principles.
11. Provide information required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested.
12. Coordinate members of the Board of Commissioners Committee, if necessary in order to expedite the duties of the Board of Commissioners.
13. As a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties. In the context of orderly administration and implementation of good corporate governance, the Secretary of the Board of Commissioners is obliged to ensure that documents for carrying out activities are stored properly in the Company

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is one of the supporting organs that assists the implementation of the duties of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function over the Company's internal control system, compliance with regulations, the quality of financial reports and the effectiveness of the internal audit function. The existence of the Audit Committee aims to optimize the Company's checks and balances mechanism, which ultimately can protect the rights of Shareholders and other Stakeholders.

The Company's Audit Committee was formed in 2015 through Board of Commissioners Decree No. DK/30/03/03/IKT-15 concerning the Formation and Appointment of the Chair and Members of the PT Indonesia Kendaraan Terminal Audit Committee.

Legal Basis

- Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Gazette of 2003 No. 70; Supplement to State Gazette No. 4197);
- Law no. 40 of 2007 dated 16 August 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of 2007 No. 106; Supplement to State Gazette 4756);
- Government Regulation no. 101 of 2021 dated 1 October 2021 concerning the Merger of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III and the Company (Persero) PT

Indonesia III dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II;

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-06/MBU/04/2021 yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain (selain yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri dimaksud) kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit;
- Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governace) pada BUMN;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008618.AH.01.02. Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
- Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal No. 09/KEPDK/14/05/01/IKT-18 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua serta Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal tanggal 14 Mei 2018;
- Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. 17/KEPDK/X/IKT-2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;

- Salinan peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-5/MBU/09/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara.

Pelabuhan Indonesia IV into the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II;

- Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011, concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
- Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated 24 August 2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-06/MBU/04/2021 which states that the Board of Commissioners may provide other assignments (other than those stipulated in the Ministerial Regulation) to the Audit Committee as stipulated in the Audit Committee Charter;
- Decree of the Secretary of the Ministry of BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN;
- Financial Services Authority Regulation no. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
- Financial Services Authority Regulation no. 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee;
- Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0008618.AH.01.02. 2018 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
- Decision of the Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal No. 09/KEPDK/14/05/01/IKT-18 concerning the Dismissal and Appointment of the Chair and Members of the Audit Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal dated 14 May 2018;
- Decision of the Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. 17/KEPDK/X/IKT-2020 dated 1 October 2020 concerning the Determination of the Chair and Members of the Audit Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
- Copy of regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-5/MBU/09/2022 dated 1 September 2022 concerning the Implementation of Risk Management in State-Owned Enterprises.

Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit Perseroan disusun dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 13/KEP-DK/XII/IKT2018 tanggal 19 Desember 2018 dan telah diperbaharui pada tanggal 24 November 2022 sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/24/11/04/IPCC-22 tentang Pemutakhiran Piagam Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Piagam Komite Audit merupakan landasan dan pedoman kerja yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terutama dalam melaksanakan kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal Perseroan.

Piagam Komite Audit Perseroan berisi pokok-pokok aturan tentang hal-hal sebagai berikut:

- Landasan Hukum
- Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite
- Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komite
- Persyaratan Keanggotaan
- Rapat komite
- Laporan Pelaksanaan Tugas Komite
- Akses Kerahasiaan Informasi
- Rencana Kerja dan Anggaran
- Penghasilan Anggota Komite
- Pendidikan dan Tenaga Penunjang
- Penilaian Kinerja

Piagam Komite Audit ditinjau ulang secara berkala dan dapat diperbarui jika dianggap perlu, agar senantiasa selaras dengan perkembangan regulasi, dinamika bisnis, serta tujuan usaha Perseroan.

Audit Committee Charter

The Company's Audit Committee Charter was prepared and established based on the Decree of the Board of Commissioners No. 13/KEP-DK/XII/IKT2018 dated 19 December 2018 and updated on 24 November 2022 as regulated in the Decree of the Board of Commissioners No. DK/24/11/04/IPCC-22 concerning Updating the Audit Committee Charter of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

The Audit Committee Charter is the foundation and work guidelines that are binding and must be adhered to by all members of the Audit Committee in carrying out their duties and responsibilities, especially in carrying out compliance obligations with statutory regulations and the Company's internal controls.

The Company's Audit Committee Charter contains the main rules regarding the following matters:

- Legal Framework
- Procedures for Appointment and Dismissal of Committee Members
- Duties, Responsibilities and Authority of the Committee
- Membership Requirements
- Committee meeting
- Report on the Implementation of Committee Duties
- Access to Confidentiality of Information
- Work Plan and Budget
- Income of Committee Members
- Education and Supporting Personnel
- Performance Appraisal

The Audit Committee Charter is reviewed periodically and can be updated if deemed necessary, so that it is always in line with regulatory developments, business dynamics and the Company's business objectives.

Tugas Komite Audit

Sebagaimana telah diatur dalam Piagam Komite Audit Perseroan, tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal (SPI) dan audit eksternal;
- Memantau dan mengkaji hasil pelaporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal;
- Meninjau laporan audit dan bersama Dewan Komisaris memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (fraud), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta SPI;
- Mengevaluasi kinerja SPI;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SPI (PKPT);
- Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern serta pelaksanaannya;
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan kepada publik;
- Membantu Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris;
- Tugas Khusus dari Dewan Komisaris.

Audit Committee Duties

As regulated in the Company's Audit Committee Charter, the duties of the Audit Committee are as follows:

- Monitor and review the effectiveness of the implementation of internal audits (SPI) and external audits;
- Monitor and review the results of financial reporting audited by external auditors;
- Review audit reports and together with the Board of Commissioners ensure that the Board of Directors takes necessary corrective actions quickly to overcome control weaknesses, fraud, compliance issues with policies and laws and regulations as well as SPI;
- Evaluate SPI performance;
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the preparation of the audit plan, scope and budget of the SPI (PKPT);
- Provide recommendations regarding improvements to the internal control system and its implementation;
- Reviewing financial information that will be released by the Company to the public and/or authorities, including financial reports, projections and other reports related to the financial information of Issuers or Public Companies;
- Reviewing compliance with laws and regulations relating to the Company's activities;
- Provide independent opinions in the event of differences of opinion between management and accountants regarding the services provided;
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of accountants based on independence, scope of assignment, and service fees;
- Reviewing complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes;
- Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Company;
- Ensure that there are satisfactory review procedures for all information released by the Company to the public;
- Assist the Board of Commissioners and other tasks assigned by the Board of Commissioners;
- Special Duties of the Board of Commissioners.

Kriteria Komite Audit

Perseroan memastikan bahwa seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria atau persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite Audit Perseroan saat ini juga memiliki latar belakang profesional dalam bidang akuntan publik, ahli keuangan, dan seorang ahli terkait bidang usaha Perseroan.

Anggota Komite Audit Perseroan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Piagam (Charter) Komite Audit, sebagai berikut:

- Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung Perseroan;
- Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;

Audit Committee Criteria

The Company ensures that all members of the Audit Committee have fulfilled the criteria or requirements in accordance with applicable regulations. The Company's Audit Committee currently also has a professional background in the field of public accounting, financial experts, and an expert related to the Company's business sector.

Members of the Company's Audit Committee must fulfill several requirements as stipulated in the Audit Committee Charter, as follows:

- Must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with the field of work, and be able to communicate well;
- Must understand financial reports, company business, especially those related to services or business activities of Issuers or Public Companies, audit processes, risk management, and laws and regulations in the Capital Market sector as well as other related laws and regulations;
- Must comply with the Audit Committee Code of Conduct established by the Company;
- Willing to continuously improve competence through education and training;
- Must have at least 1 (one) member with an educational background and expertise in accounting and finance;
- Not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm, Public Appraisal Services Firm or other party providing insurance services, non-insurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company concerned within the last 6 (six) months;
- Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for Independent Commissioners;
- Does not own shares directly or indirectly in the Company;
- In the event that a member of the Audit Committee acquires Company shares either directly or indirectly as a result of a legal incident, the shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after acquiring the shares;
- Does not have any direct or indirect business relationships related to the Company's business activities;

- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- Memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

- Does not have any direct or indirect business relationships related to the Company's business activities;
- Have an adequate understanding of the principles of Good Corporate Governance.

Masa Jabatan dan Komposisi

Perseroan mengangkat anggota Komite Audit dengan masa jabatan paling lama adalah 5 (lima) tahun. Ketua dan/atau anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan, masa jabatannya tidak dapat melebihi dari masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Seluruh anggota Komite Audit yang masa jabatannya berakhir, dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Komposisi Komite Audit Perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Term of Office and Composition

The Company appoints members of the Audit Committee with a maximum term of office of 5 (five) years. The chairman and/or members of the Audit Committee who are members of the Company's Board of Commissioners, their terms of office cannot exceed their term of office as members of the Company's Board of Commissioners. All members of the Audit Committee whose term of office ends, can only be reappointed for 1 (one) subsequent period.

The composition of the Company's Audit Committee as of 31 December 2023 is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jabatan Lain di Perseroan** Other Positions in the Company	**Dasar Hukum Penunjukan** Legal Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode** Period
Abdur Rahim Hasan	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 07/KEP-DK/X/IKT-2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners Decree No. 07/KEP-DK/X/IKT-2020 dated 1 October 2020 concerning the Determination of the Chair and Members of the Audit Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen Following his term of office as Independent Commissioner	Pertama First
Noval Ali Abbas	Anggota Independen Independent Member	Tidak ada None	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/25/07/01/IPCC-23 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners Decree No. DK/25/07/01/IPCC-23 concerning Appointment of Audit Committee Members of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	25 Juli 2023 – 2026 July 25, 2023 - 2026	Kedua Second
Dyah Ayu Anggraheni	Anggota Independen Independent Member	Tidak ada None	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/25/07/01/IPCC-23 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners Decree No. DK/25/07/01/IPCC-23 concerning Appointment of Audit Committee Members of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	25 Juli 2023 – 2026 July 25, 2023 - 2026	Ketiga Third

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile

Abdur Rahim Hasan
Ketua Komite Audit/Komisaris Independen
Chairman of the Audit Committee/Independent Commissioner

Profil Lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris.
His complete profile has been described in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Sub-chapter.

Noval Ali Abbas
Anggota Independen Komite Audit
Independent Member of the Audit Committee

Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia, usia 59 tahun, domisili di Jakarta Indonesian citizen, 59 years old, domiciled in Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 07/KEP-DK/X/IKT-2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners Decree No. 07/KEP-DK/X/IKT-2020 dated October 1, 2020 concerning the Determination of the Chairman and Members of the Audit Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Manajemen Perusahaan dari Universitas Krisnadwipayana (1990) Bachelor of Corporate Management from Universitas Krisnadwipayana (1990)
Sertifikasi Certification	Profesional Internal Audit (PIA) PPa&K
Riwayat Karier Work Experience	• Komite Audit di PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (2015-2017) • Sekretaris Perusahaan di PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (2017-2019) • Individual Expert I Grade VII Bidang Hukum dan Kepatuhan Perusahaan SBU Pengusahaan Alat pada PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (2019-2020) • Audit Committee at PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (2015-2017) • Corporate Secretary at PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (2017-2019) • Individual Expert I Grade VII Sector of Law and Company Compliance SBU Equipment Business at PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (2019-2020)

Dyah Ayu Anggraheni
Anggota Independen Komite Audit
Independent Member of the Audit Committee

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, usia 44 tahun, domisili di Jakarta Indonesian citizen, 44 years old, domiciled in Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 07/KEP-DK/X/IKT-2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners Decree No. 07/KEP-DK/X/IKT-2020 dated October 1, 2020 concerning the Determination of the Chairman and Members of the Audit Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (2000) Bachelor Degree of Economics, Universitas Indonesia (2000)
Sertifikasi Certification	Certification in Audit Committee Practices (CACP) dengan no. sertifikat 10792/CACP/XII/2023. Certification in Audit Committee Practices (CACP) with no. certificate 10792/CACP/XII/2023
Riwayat Karier Work Experience	1. Supervisor Finance dan Accounting PT Media Televisi Indonesia (MetroTV) (2004 – 2008) 2. Supervisor Accounting PT Yummy Food Utama (2008 – 2010) 3. Manager of Finance dan Accounting PT Makara Mas – Universitas Indonesia (2010 – saat ini) 1. Finance and Accounting Supervisor at PT Media Televisi Indonesia (MetroTV) (2004 – 2008) 2. Accounting Supervisor at PT Yummy Food Utama (2008 – 2010) 3. Manager of Finance and Accounting at PT Makara Mas – Universitas Indonesia (2010 – present)

Independensi Anggota Komite

Audit Komite Audit wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen, serta penuh itikad baik. Komite Audit mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan, proses Audit Internal dan Audit Eksternal serta praktik GCG berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

Seluruh personel Komite Audit periode berjalan telah memenuhi syarat independensi sesuai dengan aturan POJK 55/2015. Informasi lebih rinci tentang independensi masing-masing personil Komite Audit diuraikan pada tabel berikut ini:

Independence of Committee Members

Audit The Audit Committee is obliged to carry out its duties and responsibilities professionally and independently, and in good faith. The Audit Committee supports the Board of Commissioners in evaluating and supervising the financial reporting process, Internal Audit and External Audit processes as well as GCG practices that run well and according to procedures.

All Audit Committee personnel for the current period have fulfilled the independence requirements in accordance with POJK 55/2015 regulations. More detailed information about the independence of each Audit Committee personnel is described in the following table:

Aspek Independensi Independence Aspect	Drajat Sulistyo	Abdur Rahim Hasan	LM. Arya Bima Yudiantara
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afilliasi Has no management relationships in the company, subsidiaries or affiliated companies	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Has no share ownership relationship in the Company	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no family relationship with the Board of Commissioners, Directors, and/or fellow members of the Audit Committee	√	√	√

Informasi Rangkap Jabatan

Informasi rangkap jabatan Komite Audit dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Concurrent Position Information

Information on the Concurrent Positions of the Audit Committee can be seen in the table below as follows:

Nama Name	Jabatan di Perseroan Position in the Company	Jabatan di Perusahaan Lain Positions in Other Companies	Nama Perusahaan Lain Other Company Names
Dyah Ayu Anggraheni	Tidak ada None	Mgr Finance dan Accounting Manager of Finance and Accounting	PT Makara Mas – Universitas Indonesia

Rapat Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam POJK 55/2015, Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pada tahun 2022, Komite Audit telah menyelenggarakan 24 (dua puluh empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran masingmasing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Audit Committee Meeting

In accordance with the provisions stipulated in POJK 55/2015, the Audit Committee holds regular meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months.

In 2022, the Audit Committee has held 24 (twenty four) meetings with the attendance level of each member as described in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Abdur Rahim Hasan	Ketua Chairman	36	36	100%
Noval Ali Abbas	Anggota Independen Independent Member	36	36	100%
Dyah Ayu Anggraheni	Anggota Independen Independent Member	36	36	100%

Pada rapat yang diselenggarakan selama tahun 2023, Komite Audit melakukan pembahasan terkait agenda-agenda berikut ini:

At meetings held throughout 2023, the Audit Committee discussed the following agendas:

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Participants
20 Jan 2023 January 20, 2023	Pembahasan Kinerja Tahun 2022 PT IKT Tbk Discussion of PT IKT Tbk's 2022 Performance	KA, KNR, KPMR, SPI, Manajemen Menengah KA, KNR, KPMR, SPI, Middle Management
31 Januari 2023 January 31, 2023	Pembahasan Profil Risiko 2023 Discussion of 2023 Risk Profile	KA, KNR, KPMR, Manajemen Risiko KA, KNR, KPMR, Risk Management
31 Januari 2023 January 31, 2023	Pembahasan PKPT 2023 dan Piagam Charter SPI Discussion of PKPT 2023 and SPI Charter	KA, KNR, KPMR, SPI
13 Februari 2023 February 13, 2023	Kick Off Meeting Assessment GCG Tahun Buku 2022 Kick Off Meeting GCG Assessment for Fiscal Year 2022	Dekom, Direksi, Organ pendukung (KA, KNR, KPMR), Manajemen Menengah Board of Commissioners, Directors, Supporting Organs (KA, KNR, KPMR), Middle Management
20 Februari 2023 February 20, 2023	Update Profil Risiko 2023 Update PKPT 2023 Monitoring LHA Semester I 2022 Update Progress Audit Semester II 2022 2023 Risk Profile Update 2023 PKPT update LHA Monitoring Semester I 2022 Update on Audit Progress Semester II 2022	KA, KNR, KPMR, SPI, Manajemen Risiko KA, KNR, KPMR, SPI, Risk Management
24 Februari 2023 February 24, 2023	SDM Kinerja Keuangan Januari 2023 Progress Audit LK tahun Buku 2022 HC Financial Performance January 2023 FS Audit Progress for Fiscal Year 2022	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan, SDM) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance, HC)
24 Maret 2023 March 24, 2023	Closing Audit 2022	KAP, Dekom, Direksi, Organ pendukung (KA, KNR, KPMR), Manajemen Menengah KAP, Board of Commissioners, Directors, supporting organs (KA, KNR, KPMR), Middle Management
14 April 2023 April 14, 2023	Profil Risiko dan Risiko Investasi sd TW I 2023 Risk Profile and Investment Risks until Q1 2023	KA, KNR, KPMR, Manajemen Risiko KA, KNR, KPMR, Risk Management
14 April 2023 April 14, 2023	Laporan Monitoring Temuan SPI Semester II tahun 2022 SPI Findings Monitoring Report Semester II 2022	KA, KNR, KPMR, SPI
14 April 2023 April 14, 2023	Kinerja Keuangan sd TW I 2023 dan Piutang Financial Performance until Q1 2023 and Receivables	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance)
16 Mei 2023 May 16, 2023	Proposal Bisnis Layanan Logistik Alat Berat Pembahasan Terkai Tarif Heavy Equipment Logistics Services Business Proposal Discussion Regarding Tariffs	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Komersial) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Commercial)
16 Mei 2023 May 16, 2023	Monitoring LHA Semester I dan II tahun 2022 Monitoring LHA Semester I and II 2022	KA, KNR, KPMR, SPI

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Participants
16 Mei 2023 May 16, 2023	Kinerja Keuangan sd April 2023 dan Piutang Ratifikasi Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Financial Performance until April 2023 and Receivables Ratification of Goods and Services Procurement Guidelines	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan, Pengadaan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance, Procurement)
21 Juni 2023 June 21, 2023	Monitoring LHA Semester I dan II tahun 2022 Monitoring LHA Semester I and II 2022	KA, KNR, KPMR, SPI
21 Juni 2023 June 21, 2023	Laporan HSSE sd Mei 2023 Kinerja Keuangan dan Posisi Piutang s.d Mei 2023 HSSE report until May 2023 Financial Performance and Receivables Position until May 2023	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan, HSSE) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance, HSSE)
10 Juli 2023 July 10, 2023	Kick Off Meeting RKAP 2024	Dekom, Direksi, Organ pendukung (KA, KNR, KPMR), Manajemen Menengah Board of Commissioners, Directors, Supporting Organs (KA, KNR, KPMR), Middle Management
13 Juli 2023 July 13, 2023	Pembahasan RKAP 2024 I Discussion of 2024 RKAP I	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah KA, KNR, KPMR, Middle Management
14 Juli 2023 July 14, 2023	Pembahasan RKAP 2024 II Discussion of 2024 RKAP II	Dekom, Direksi, Organ pendukung (KA, KNR, KPMR), Manajemen Menengah Board of Commissioners, Directors, Supporting Organs (KA, KNR, KPMR), Middle Management
15 Juli 2023 July 15, 2023	Pembahasan RKAP 2024 III Discussion of 2024 RKAP III	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah KA, KNR, KPMR, Middle Management
16 Juli 2023 July 16, 2023	Pembahasan RKAP 2024 IV (Final) Discussion of RKAP 2024 IV (Final)	Dekom, Direksi, Organ pendukung (KA, KNR, KPMR), Manajemen Menengah Board of Commissioners, Directors, Supporting Organs (KA, KNR, KPMR), Middle Management
22 Agustus 2023 August 22, 2023	Monitoring LHA Semester I dan II tahun 2022 Monitoring LHA Semester I and II 2022	KA, KNR, KPMR, SPI
22 Agustus 2023 August 22, 2023	Realisasi RKM sd Juli 2023 Progress Rencana Pengoperasian Terminal Semayang Rencana Divestasi atau Liquidasi MKO MTKI Realization of RKM until July 2023 Progress of Semayang Terminal Operation Plan MKO MTKI Divestment or Liquidation Plan	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Komersial) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Commercial)
22 Agustus 2023 August 22, 2023	Kinerja Produksi sd Juli 2023 Production Performance until July 2023	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Operasional -Produksi) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Operations - Production)
22 Agustus 2023 August 22, 2023	Kinerja Keuangan dan Piutang sd Juli 2023 Financial Performance and Receivables until July 2023	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance)
04 September 2023 September 04, 2023	Realisasi Investasi s.d Agustus 2023 Hal-hal strategis lainnya (update progress system digitalisasi) Investment Realization until August 2023 Other strategic matters (update on digitalization system progress)	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Teknik dan SI) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Engineering and IS)
22 September 2023 September 22, 2023	Laporan HSSE sd Agustus 2023 Hal-hal strategis lain HSSE report until August 2023 Other strategic matters	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (HSSE) KA, KNR, KPMR, Middle Management (HSSE)
22 September 2023 September 22, 2023	Monitoring LHA Semester I dan II tahun 2022 Monitoring LHA Semester I and II 2022	KA, KNR, KPMR, SPI
22 September 2023 September 22, 2023	Kinerja Keuangan sd Agustus 2023 dan Posisi Piutang Financial Performance until August 2023 and Receivables Position	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance)

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Participants
12 Oktober 2023 October 12, 2023	Pembahasan Struktur Organisasi PT IKT Tbk Discussion of the Organizational Structure of PT IKT Tbk	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (SDM & Umum) KA, KNR, KPMR, Middle Management (HC & General)
12 Oktober 2023 October 12, 2023	Pembahasan Revisi RJPP tahun 2021-2025 Discussion of RJPP Revisions for 2021-2025	Dekom, Direksi, Organ pendukung (KA, KNR, KPMR), Manajemen Menengah Board of Commissioners, Directors, Supporting Organs (KA, KNR, KPMR), Middle Management
12 Oktober 2023 October 12, 2023	Kinerja Keuangan sd September 2023 dan Posisi Piutang Financial Performance until September 2023 and Receivables Position	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance)
30 Oktober 2023 October 30, 2023	Kick off meeting audit LK tahun 2023 2023 FS audit kick off meeting	KAP, Dekom, Direksi, Organ pendukung (KA, KNR, KPMR), Manajemen Menengah KAP, Board of Commissioners, Directors, supporting organs (KA, KNR, KPMR), Middle Management
23 November 2023 November 23, 2023	Kinerja Keuangan sd Oktober 2023 dan Posisi Piutang Financial Performance until October 2023 and Receivables Position	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance)
15 Desember 2023 December 15, 2023	Realisasi Investasi sd November 2023 Perubahan Konstruksi Pembangunan gedung parkir (menyesuaikan SNI Gempa, kelengkapan utilitas dll) Investment Realization until November 2023 Changes in Construction of Parking building construction (adjusting SNI for Earthquake, utility equipment, etc.)	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Teknik) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Engineering)
15 Desember 2023 December 15, 2023	Monitoring temuan SPI Semester I tahun 2023 Monitoring SPI findings for Semester I 2023	KA, KNR, KPMR, SPI
15 Desember 2023 December 15, 2023	Kinerja Keuangan sd November 2023 dan Posisi Piutang Financial Performance until November 2023 and Receivables Position	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2023

Komite Audit telah berperan aktif dalam mendukung tugas Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2023, antara lain dengan melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti Laporan Keuangan, Laporan Manajemen, termasuk proyeksi dan informasi keuangan lainnya. Komite Audit juga memastikan bahwa kebijakan dan pengendalian internal telah berjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan sehingga meminimalisasi pelanggaran yang merugikan serta memberikan bahan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap percepatan atas penanganan/penuntasan masalah yang timbul oleh pihak manajemen.

Laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit berdasarkan rencana kerja Komite Audit tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi
2. Memberikan Evaluasi/Arahan/Tanggapan/Persetujuan
3. Melakukan Pengawasan pada Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Eksternal Auditor
4. Pengawasan Sistem Pengendalian Internal
5. Melakukan Kunjungan Kerja

Report of Audit Committee Duties Implementation for 2023

The Audit Committee has played an active role in supporting the duties of the Board of Commissioners throughout 2023, including by reviewing financial information issued by the company such as Financial Reports, Management Reports, including projections and other financial information. The Audit Committee also ensures that policies and internal controls are implemented in accordance with regulations and Law Regulations, thereby minimizing detrimental violations and providing input to the Board of Commissioners regarding the acceleration of handling/resolving problems that arise by management.

The report on the implementation of the Audit Committee's activities based on the 2023 Audit Committee work plan can be described as follows:

1. Implementation of Coordination Meetings
2. Provide evaluation/direction/response/approval
3. Supervise the Internal Supervisory Unit (SPI) and External Auditors
4. Supervision of the Internal Control System
5. Conduct work visits

6. Melakukan Peningkatan Wawasan dan Profesionalisme
7. Memberikan Laporan kepada Dewan Komisaris

6. Increase Insight and Professionalism
7. Provide Reports to the Board of Commissioners

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit Tahun 20223

Audit Committee Competency Development Program 2023

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Audit Tahun 2023
Table of Audit Committee Training and Competency Development for 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Waktu Penyelenggaraan** Implementation Time	**Penyelenggara** Organizer
Abdur Rahim Hasan (Ketua) (Chairman)	Informasi pengembangan kompetensi Ketua Komite Audit Abdur Rahim Hasan telah disampaikan pada Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Information on the competency development of the Chairman of the Audit Committee, Abdur Rahim Hasan, has been contained in the Competency Development of the Board of Commissioners	Abdur Rahim Hasan (Ketua) (Chairman)	Informasi pengembangan kompetensi Ketua Komite Audit Abdur Rahim Hasan telah disampaikan pada Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Information on the competency development of the Chairman of the Audit Committee, Abdur Rahim Hasan, has been contained in the Competency Development of the Board of Commissioners	Abdur Rahim Hasan (Ketua) (Chairman)
Noval Ali Abbas (Anggota) (Member)	GRC Summit 2023	Noval Ali Abbas (Anggota) (Member)	GRC Summit 2023	Noval Ali Abbas (Anggota) (Member)
Dyah Ayu Anggraheni (Anggota) (Member)	GRC Summit 2023	Dyah Ayu Anggraheni (Anggota) (Member)	GRC Summit 2023	Dyah Ayu Anggraheni (Anggota) (Member)

Penilaian dan Evaluasi Atas Kinerja Komite Audit Tahun 2023

Kinerja Komite Audit sepanjang tahun 2023 dinilai positif oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan pencapaian atau realisasi rencana kerja tahunan Komite Audit sebagaimana diuraikan berikut ini:

Assessment and Evaluation of the Performance of the Audit Committee in 2023

The performance of the Audit Committee throughout 2023 is assessed as positive by the Board of Commissioners, in accordance with the achievement or realization of the Audit Committee's annual work plan as described below:

No.	Kriteria Penilaian Assessment criteria	Status Pelaksanaan Implementation Status
1	Mengadakan Rapat Koordinasi (Internal, Dewan Komisaris, SPI dan Unit Terkait/Direksi dan manajemen PT IKT Tbk) Hold Coordination Meetings (Internal, Board of Commissioners, SPI and Related Units/Directors and management of PT IKT Tbk)	√
2	Melakukan rapat koordinasi, memberikan saran dan masukan serta telaah RJPP/RKAP 2024 Conduct coordination meetings, provide suggestions and input as well as review the 2024 RJPP/RKAP	√
3	Membuat laporan evaluasi atas Kinerja perseroan periode 2023 per triwulan Make an evaluation report on the company's performance for the 2023 period per quarter	√
4	Menyusun Tanggapan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Tahun Buku 2022 yang telah diaudit sebagai dasar penyampaian kinerja perseroan tahun buku 2022 ke pemegang saham (RUPS) Prepare a response to the audited Financial Responsibility Report for the 2022 financial year as a basis for conveying the company's performance for the 2022 financial year to shareholders (GMS)	√
5	Melakukan pengawasan dan membuat evaluasi atas kinerja eksternal audit Supervise and make evaluations of external audit performance	√
6	Mengusulkan calon auditor eksternal kepada Dewan Komisaris Proposing prospective external auditors to the Board of Commissioners	√
7	Memberikan saran dan masukan atas PKPT SPI periode 2023 Provide suggestions and input on PKPT SPI for the 2023 period	√
8	Berkoordinasi dengan SPI terkait pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam rangka peningkatan efektivitas pengendalian internal perseroan Coordinate with SPI regarding the implementation of the internal control system in order to increase the effectiveness of the company's internal control	√
9	Berkoordinasi dengan SPI untuk melakukan monitoring tindak lanjut hasil temuan audit Coordinate with SPI to carry out follow-up monitoring of audit findings	√
10	Membuat laporan evaluasi efektivitas pengendalian internal PT IKT Tbk tahun 2023 Create an evaluation report on the effectiveness of PT IKT Tbk's internal control in 2023	√
11	Membuat laporan evaluasi kinerja SPI PT IKT Tbk tahun 2023 Create a SPI performance evaluation report for PT IKT Tbk in 2023	√
12	Memberikan saran dan masukan terkait pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Provide suggestions and input regarding financial reporting in accordance with PSAK	√
13	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit 2024 Prepare the 2024 Audit Committee Work Plan and Budget	√
14	Penyusunan Laporan realisasi rencana kerja Komite Audit 2023 Preparation of a report on the realization of the 2023 Audit Committee work plan	√
15	Mengikuti seminar/workshop/conference /pelatihan/sertifikasi dalam meningkatkan kompetensi komite audit Participating in seminars/workshops/conferences/training/certification to improve audit committee competency	√

No.	Kriteria Penilaian Assessment criteria	Status Pelaksanaan Implementation Status
16	Melakukan kunjungan kerja dalam rangka mendapatkan informasi terkait pengembangan usaha perseroan maupun dalam rangka study banding/benchmark Conduct work visits in order to obtain information related to the company's business development as well as in the context of comparative/benchmark studies	√
17	Menyusun Kajian atas usulan Direksi yang memerlukan tanggapan/persetujuan Dewan Komisaris atau kajian atas hal-hal tertentu sesuai dengan arahan Dewan Komisaris Prepare studies on proposals from the Board of Directors that require a response/approval from the Board of Commissioners or study certain matters in accordance with the direction of the Board of Commissioners	√

Hasil Penilaian Kinerja Komite Audit

Results of Audit Committee Performance Assessment

No	Uraian Tugas Uraian Tugas	Penilaian Penilaian
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Implementation of Coordination Meetings	Baik
2	Evaluasi/Arahan/Tanggapan/Persetujuan Evaluation/Directions/Response/Approval	Baik
3	Pengawasan Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Eksternal Auditor Supervision of the Internal Supervisory Unit (SPI) and External Auditor	Baik
4	Pengawasan Sistem Pengendalian Internal Internal Control System Supervision	Baik
5	Kunjungan Kerja Work visit	Baik
6	Peningkatan Wawasan dan Profesionalisme Increased Insight and Professionalism	Baik
7	Laporan kepada Dewan Komisaris Report to the Board of Commissioners	Baik

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Nomor 16/KEPDK/VIII/IKT-2020 tanggal 20 Agustus 2020 telah mengesahkan pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Komite Pemantau Manajemen Risiko dibentuk sebagai upaya Perseroan dalam menyempurnakan penerapan manajemen risiko dan prinsip-prinsip GCG di Perseroan. Komite ini membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko disusun dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 13/KEP-DK/XII/IKT2018 tanggal 19 Desember 2018. Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko merupakan landasan dan pedoman kerja yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Komite Pemantau

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

The Board of Commissioners through the Company's Board of Commissioners Decree Number 16/KEPDK/VIII/IKT-2020 dated 20 August 2020 has approved the formation of the Risk Management Monitoring Committee.

The Risk Management Monitoring Committee was formed as an effort by the Company to improve the implementation of risk management and GCG principles in the Company. This committee assists the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function.

Risk Management Monitoring Committee Charter

The Risk Management Monitoring Committee Charter was prepared and established based on Board of Commissioners Decree No. 13/KEP-DK/XII/IKT2018 dated 19 December 2018. The Risk Management Monitoring Committee Charter is a binding work basis and guideline and must be adhered to by all members of the Risk

Manajemen Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan berisi pokok-pokok aturan tentang hal-hal sebagai berikut:

- Landasan Hukum
- Pengangkatan dan Pemberhentian
- Tugas Pokok
- Kewenangan
- Rapat Komite
- Tanggung Jawab
- Laporan Pelaksanaan Tugas Komite
- Akses Kerahasiaan Informasi
- Rencana Kerja dan Anggaran
- Penghasilan Anggota Komite
- Pengembangan/Peningkatan kapasitas
- Penggunaan Tenaga ahli
- Penilaian Kinerja
- Hubungan Kelembagaan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya agar pengelolaan Perseroan efektif dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen. Sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko diuraikan sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan Manajemen Risiko, dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan Manajemen Risiko Perseroan;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Perseroan;
- Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan Manajemen Risiko;
- Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;
- Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
- Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi

Management Monitoring Committee in carrying out their duties and responsibilities.

The Company's Risk Management Monitoring Committee Charter contains the main rules regarding the following matters:

- Legal Framework
- Appointment and Dismissal
- Main Duties
- Authority
- Committee Meeting
- Responsibility
- Report on the Implementation of Committee Duties
- Access to Confidentiality of Information
- Work Plan and Budget
- Income of Committee Members
- Capacity development/increasing
- Use of experts
- Performance Appraisal
- Institutional Relations

Duties and Responsibilities of the Risk Management Monitoring Committee

The Risk Management Monitoring Committee is responsible to the Board of Commissioners and assists the Board of Commissioners in carrying out its duties to ensure effective management of the Company and the implementation of competent and independent supervision. As stated in the Committee Charter, the duties and responsibilities of the Risk Management Monitoring Committee are described as follows:

- Monitor and review Risk Management reports and other reports related to the implementation of Risk Management;
- Monitor and evaluate the suitability of the implementation of the Company's Risk Management policies;
- Provide recommendations to the Board of Commissioners on matters that support the effectiveness of the implementation of Risk Management and the conformity of the Company's Risk Management policies;
- Assist the Board of Commissioners in evaluating and approving Risk Management policies;
- Assist the Board of Commissioners in evaluating the responsibility of the Board of Directors for implementing Risk Management policies;
- Assist the Board of Commissioners in evaluating and deciding on requests from the Board of Directors relating to transactions that require approval from the Board of Commissioners;
- Assist the Board of Commissioners in carrying out supervision over the implementation of other

manajemen risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS/Pemilik Modal.

Kriteria Komite Pemantau Manajemen Risiko

Perseroan memastikan bahwa seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko telah memenuhi kriteria atau persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Piagam (*Charter*) Komite, sebagai berikut:

- Memiliki integritas yang baik, pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup serta sertifikasi di bidang manajemen risiko risiko.
- Memiliki keseimbangan antara keahlian dan pengalaman di bidang manajemen risiko dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai bisnis secara umum dan perusahaan secara khusus.
- Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
- Mampu berkomunikasi secara efektif.
- Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
- Independen, objektif dan profesional.
- Tidak memiliki hubungan kekeluargaan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris dan Direksi.
- Memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Masa Jabatan dan Komposisi

Perseroan mengangkat anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan masa jabatan paling lama adalah 5 (lima) tahun. Ketua dan/atau anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan, masa jabatannya tidak dapat melebihi dari masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang masa jabatannya berakhir, dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Komposisi Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:
The composition of the Company's Risk Management Monitoring Committee as of 31 December 2023 is as follows:

risk management functions in accordance with the provisions of statutory regulations, articles of association and/or decisions of the GMS/Capital Owners.

Risk Management Monitoring Committee Criteria

The Company ensures that all members of the Risk Management Monitoring Committee have fulfilled the criteria or requirements in accordance with applicable regulations. Members of the Company's Risk Management Monitoring Committee must fulfill several requirements as stipulated in the Committee Charter, as follows:

- Have good integrity, sufficient knowledge and work experience as well as certification in the field of risk management.
- Have a balance of expertise and experience in the field of risk management with a broad background understanding of business in general and the company in particular.
- Have sufficient knowledge to read and understand financial reports and risk management policy implementation reports.
- Have no personal interests/relationships that could have a negative impact or conflict of interest on the Company.
- Able to communicate effectively.
- Can provide sufficient time to complete the task.
- Independent, objective and professional.
- Has no familial relationship through marriage or descent up to the second degree, either horizontally or vertically with the Commissioners and Directors.
- Have an adequate understanding of the principles of Good Corporate Governance.

Term of Office and Composition

The Company appoints members of the Risk Management Monitoring Committee with a maximum term of office of 5 (five) years. The chairman and/or members of the Risk Management Monitoring Committee who are members of the Company's Board of Commissioners, their terms of office cannot exceed their terms of office as members of the Company's Board of Commissioners. All members of the Risk Management Monitoring Committee whose term of office ends, can only be reappointed for 1 (one) subsequent period.

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions in the Company	Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	
LM. Arya Bima Yudiantara	Ketua Komite Committee Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor 20/KEP-DK/VI/IKT-2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Decree of the Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Number 20/KEP-DK/VI/IKT-2021 dated June 29, 2021 concerning the Determination of the Chair and Members of the Risk Management Monitoring Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen Following his term of office as Independent Commissioner	Pertama First
Sumarman	Anggota Komite Committee Member	Tidak ada None	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.10/KEP-DK/14/05/01/IKT-18 tanggal 14 Mei 2018 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners Decree No.10/KEP-DK/14/05/01/IKT-18 dated 14 May 2018 concerning the Determination of the Chair and Members of the Risk Management Monitoring Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	14 Mei 2018- 27 Desember 2023 May 14, 2018- December 27, 2023	Pertama First

Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko

Profile of the Risk Management Monitoring Committee

LM. Arya Bima Yudiantara
Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko
Chairman of the Risk Management Monitoring Committee

Profil Lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris.
His complete profile has been described in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Sub-chapter.

Sumarman
Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko
Member of the Risk Management Monitoring Committee

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, usia 53 tahun, domisili di Jakarta Indonesian citizen, 53 years old, domiciled in Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.10/KEP-DK/14/05/01/IKT-18 tanggal 14 Mei 2018 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Board of Commissioners Decree No.10/KEP-DK/14/05/01/IKT-18 dated May 14, 2018 concerning the Determination of the Chair and Members of the Risk Management Monitoring Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Muhammadiyah (1998) Bachelor of Mechanical Engineering from Universitas Muhammadiyah (1998)
Sertifikasi Certification	Sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP): 1. Qualified Risk Management Professional (QRMP) No.70209121900135352023 2. Certified in Enterprise Risk Governance (CERG) No.CERG-3120401 3. Certified Governance Risk Management Compliance Professional (CGRCP) 4. Qualified Risk Management Analyst (QRMA) Certification from the Professional Certification Institute (LSP): 1. Qualified Risk Management Professional (QRMP) No.70209121900135352023 2. Certified in Enterprise Risk Governance (CERG) No. CERG-3120401 3. Certified Governance Risk Management Compliance Professional (CGRCP) 4. Qualified Risk Management Analyst (QRMA)

Riwayat Karier Work Experience	1. ASM. Jaminan Mutu Kantor Pusat (2012-2016) 2. Deputi Vice President Jaminan Mutu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016-2018) 3. Deputi Vice President Risiko Operasional PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2018 – September 2021) 4. Departemen Head Risiko Operasional Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Oktober 2021-sekarang) 1. ASM. Head Office Quality Assurance (2012-2016) 2. Deputy Vice President for Quality Assurance at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016-2018) 3. Deputy Vice President for Operational Risk PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2018 – September 2021) 4. Department Head of Operational Risk at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Head Office (October 2021-present)

Independensi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko

Perseroan dapat memastikan bahwa Komite Pemantau Manajemen Risiko menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen, serta penuh itikad baik.

Seluruh personil Komite Pemantau Manajemen Risiko periode berjalan telah memenuhi syarat independensi sesuai dengan aturan yang berlaku. Informasi lebih rinci tentang independensi masing-masing personil Komite Pemantau Manajemen Risiko diuraikan pada tabel berikut ini:

Independence of Risk Management Monitoring Committee Members

The Company can ensure that the Risk Management Monitoring Committee carries out its duties and responsibilities professionally and independently, and in good faith.

All Risk Management Monitoring Committee personnel for the current period have fulfilled the independence requirements in accordance with applicable regulations. More detailed information regarding the independence of each Risk Management Monitoring Committee personnel is described in the following table:

Aspek Independensi Independence Aspect	LM. Arya Bima Yudiantara	Sumarman
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afilliasi Has no management relationships in the company, subsidiaries or affiliated companies	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Has no share ownership relationship in the Company	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no family relationship with the Board of Commissioners, Directors, and/or fellow members of the Audit Committee	√	√

Informasi Rangkap Jabatan

Informasi Rangkap Jabatan Informasi rangkap jabatan Komite Pemantau Manajemen Risiko periode berjalan diuraikan pada tabel di bawah ini:

Concurrent Position Information

Information on Concurrent Positions Information on concurrent positions of the Risk Management Monitoring Committee for the current period is described in the table below:

Nama Name	Jabatan di Perseroan Position in the Company	Jabatan di Perusahaan Lain Positions in Other Companies	Nama Perusahaan Lain Other Company Names
Sumarman	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Member of the Risk Management Monitoring Committee	Departemen Head Risiko Operasional Head of Operational Risk Department	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko wajib menyelenggarakan rapat secara internal maupun rapat bersama unit-unit kerja pendukung lainnya, guna membahas hal-hal terkait sistem manajemen risiko yang diterapkan di Perseroan.

Pada tahun 2023, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah mengadakan 16 (enam belas) kali rapat baik rapat khusus internal komite dan rapat bersama unit-unit kerja terkait lainnya, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Risk Management Monitoring Committee Meeting

The Risk Management Monitoring Committee is required to hold internal meetings and meetings with other supporting work units, to discuss matters related to the risk management system implemented in the Company.

In 2023, the Risk Management Monitoring Committee has held 16 (sixteen) meetings, both special internal committee meetings and joint meetings with other related work units, with the attendance level of each Committee member as described in the following table:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Pertemuan** Number of Meetings	**Kehadiran** Attendance	**Tingkat Kehadiran** Attendance Level
LM. Arya Bima Yudiantara	Ketua Chairman	36	36	100%
Sumarman	Anggota Member	36	36	100%

Pada rapat yang diselenggarakan selama tahun 2023, Komite Pemantau Manajemen Risiko melakukan pembahasan terkait agenda-agenda berikut ini:

At meetings held throughout 2023, the Risk Management Monitoring Committee discussed the following agendas:

Tanggal Rapat Meeting Date	**Agenda Rapat** Meeting Agenda	**Peserta** Participant
20 Jan 2023 January 20, 2023	Pembahasan Kinerja Tahun 2022 PT IKT Tbk Discussion of PT IKT Tbk's 2022 Performance	KA, KNR, KPMR, SPI, Manajemen Menengah KA, KNR, KPMR, SPI, Middle Management
31 Januari 2023 January 31, 2023	Pembahasan Profil Risiko 2023 Discussion of 2023 Risk Profile	KA, KNR, KPMR, Manajemen Risiko KA, KNR, KPMR, Risk Management
31 Januari 2023 January 31, 2023	Pembahasan PKPT 2023 dan Piagam Charter SPI Discussion of PKPT 2023 and SPI Charter	KA, KNR, KPMR, SPI
13 Februari 2023 January 13, 2023	Kick Off Meeting Assessment GCG Tahun Buku 2022 Kick Off Meeting GCG Assessment for Fiscal Year 2022	Dekom, Direksi, Organ pendukung (KA, KNR, KPMR), Manajemen Menengah Board of Commissioners, Directors, Supporting Organs (KA, KNR, KPMR), Middle Management
20 Februari 2023 February 20, 2023	Update Profil Risiko 2023 Update PKPT 2023 Monitoring LHA Semester I 2022 Update Progress Audit Semester II 2022 2023 Risk Profile Update 2023 PKPT update LHA Monitoring Semester I 2022 Update on Audit Progress Semester II 2022	KA, KNR, KPMR, SPI, Manajemen Risiko KA, KNR, KPMR, SPI, Risk Management

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
24 Februari 2023 February 24, 2023	SDM Kinerja Keuangan Januari 2023 Progress Audit LK tahun Buku 2022 HR Financial Performance January 2023 LK Audit Progress for Fiscal Year 2022	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan, SDM) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance, HR)
24 Maret 2024 March 24, 2024	Closing Audit 2022	KAP, Dekom, Direksi, Organ pendukung (KA, KNR, KPMR), Manajemen Menengah KAP, BOC, Directors, supporting organs (KA, KNR, KPMR), Middle Management
14 April 2023 April 14, 2023	Profil Risiko dan Risiko Investasi sd TW I 2023 Risk Profile and Investment Risks until Q1 2023	KA, KNR, KPMR, Manajemen Risiko KA, KNR, KPMR, Risk Management
14 April 2023 April 14, 2023	Laporan Monitoring Temuan SPI Semester II tahun 2022 SPI Findings Monitoring Report Semester II 2022	KA, KNR, KPMR, SPI
14 April 2023 April 14, 2023	Kinerja Keuangan sd TW I 2023 dan Piutang Financial Performance up to Q1 2023 and Receivables	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance)
16 Mei 2023 May 16, 2023	Proposal Bisnis Layanan Logistik Alat Berat Pembahasan Terkai Tarif Heavy Equipment Logistics Services Business Proposal Discussion Regarding Tariffs	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Komersial) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Commercial)
16 Mei 2023 May 16, 2023	Monitoring LHA Semester I dan II tahun 2022 Monitoring LHA Semester I and II 2022	KA, KNR, KPMR, SPI
16 Mei 2023 May 16, 2023	Kinerja Keuangan sd April 2023 dan Piutang Ratifikasi Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Financial Performance until April 2023 and Receivables Ratification of Goods and Services Procurement Guidelines	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan, Pengadaan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance, Procurement)
21 Juni 2023 June 21, 2023	Monitoring LHA Semester I dan II tahun 2022 Monitoring LHA Semester I and II 2022	KA, KNR, KPMR, SPI
21 Juni 2023 June 21, 2023	Laporan HSSE sd Mei 2023 Kinerja Keuangan dan Posisi Piutang s.d Mei 2023 HSSE report until May 2023 Financial Performance and Receivables Position until May 2023	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan, HSSE) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance, HSSE)
10 Juli 2023 July 10, 2023	Kick Off Meeting RKAP 2024	Dekom, Direksi, Organ pendukung (KA, KNR, KPMR), Manajemen Menengah Board of Commissioners, Directors, Supporting Organs (KA, KNR, KPMR), Middle Management
13 Juli 2023 July 13, 2023	Pembahasan RKAP 2024 I Discussion of 2024 RKAP I	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah KA, KNR, KPMR, Middle Management
14 Juli 2023 July 14, 2023	Pembahasan RKAP 2024 II Discussion of 2024 RKAP II	Dekom, Direksi, Organ pendukung (KA, KNR, KPMR), Manajemen Menengah Board of Commissioners, Directors, Supporting Organs (KA, KNR, KPMR), Middle Management
15 Juli 2023 July 15, 2023	Pembahasan RKAP 2024 III Discussion of 2024 RKAP III	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah KA, KNR, KPMR, Middle Management
16 Juli 2023 July 16, 2023	Pembahasan RKAP 2024 IV (Final) Discussion of RKAP 2024 IV (Final)	Dekom, Direksi, Organ pendukung (KA, KNR, KPMR), Manajemen Menengah Board of Commissioners, Directors, Supporting Organs (KA, KNR, KPMR), Middle Management

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
22 Agustus 2023 August 22, 2023	Monitoring LHA Semester I dan II tahun 2022 Monitoring LHA Semester I and II 2022	KA, KNR, KPMR, SPI
22 Agustus 2023 August 22, 2023	Realisasi RKM sd Juli 2023 Progress Rencana Pengoperasian Terminal Semayang Rencana Divestasi atau Liquidasi MKO MTKI Realization of RKM until July 2023 Progress of Semayang Terminal Operation Plan MKO MTKI Divestment or Liquidation Plan	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Komersial) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Commercial)
22 Agustus 2023 August 22, 2023	Kinerja Produksi sd Juli 2023 Production Performance until July 2023	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Operasional -Produksi) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Operations - Production)
22 Agustus 2023 August 22, 2023	Kinerja Keuangan dan Piutang sd Juli 2023 Financial Performance and Receivables until July 2023	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance)
04 September 2023 September 04, 2023	Realisasi Investasi s.d Agustus 2023 Hal-hal strategis lainnya (update progress system digitalisasi) Investment Realization until August 2023 Other strategic matters (update on digitalization system progress)	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Teknik dan SI) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Engineering and IS)
22 September 2023 September 22, 2023	Laporan HSSE sd Agustus 2023 Hal-hal strategis lain HSSE report until August 2023 Other strategic matters	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (HSSE) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Engineering and IS)
22 September 2023 September 22, 2023	Monitoring LHA Semester I dan II tahun 2022 Monitoring LHA Semester I and II 2022	KA, KNR, KPMR, SPI
22 September 2023 September 22, 2023	Kinerja Keuangan sd Agustus 2023 dan Posisi Piutang Financial Performance until August 2023 and Receivables Position	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance)
12 Oktober 2023 October 12, 2023	Pembahasan Struktur Organisasi PT IKT Tbk Discussion of the Organizational Structure of PT IKT Tbk	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (SDM & Umum) KA, KNR, KPMR, Middle Management (HC & General)
12 Oktober 2023 October 12, 2023	Pembahasan Revisi RJPP tahun 2021-2025 Discussion of RJPP Revisions for 2021-2025	Dekom, Direksi, Organ pendukung (KA, KNR, KPMR), Manajemen Menengah Board of Commissioners, Directors, Supporting Organs (KA, KNR, KPMR), Middle Management
12 Oktober 2023 October 12, 2023	Kinerja Keuangan sd September 2023 dan Posisi Piutang Financial Performance until September 2023 and Receivables Position	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance)
30 Oktober 2023 October 30, 2023	Kick off meeting audit LK tahun 2023 LK audit kick off meeting in 2023	KAP, Dekom, Direksi, Organ pendukung (KA, KNR, KPMR), Manajemen Menengah KAP, BOC, Directors, supporting organs (KA, KNR, KPMR), Middle Management
23 November 2023 November 23, 2023	Kinerja Keuangan sd Oktober 2023 dan Posisi Piutang Investment Realization until November 2023	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance)

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
15 Desember 2023 December 15, 2023	Realisasi Investasi sd November 2023 Perubahan Konstruksi Pembangunan gedung parkir (menyesuaikan SNI Gempa, kelengkapan utilitas dll) Changes in Construction of Parking building construction (adjusting SNI for Earthquake, utility equipment, etc.)	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Teknik) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Engineering)
15 Desember 2023 December 15, 2023	Monitoring temuan SPI Semester I tahun 2023 Monitoring SPI findings for Semester I 2023	KA, KNR, KPMR, SPI
15 Desember 2023 December 15, 2023	Kinerja Keuangan sd November 2023 dan Posisi Piutang Financial Performance until November 2023 and Receivables Position	KA, KNR, KPMR, Manajemen Menengah (Keuangan) KA, KNR, KPMR, Middle Management (Finance)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2023

Komite Pemantau Manajemen Risiko telah berperan aktif mendukung tugas Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2023 terutama dalam melakukan pengawasan dan pemberian saran/nasihat dalam bidang manajemen risiko.

Komite Pemantau Manajemen Risiko juga aktif dalam memberikan tanggapan terkait surat yang disampaikan oleh Manajemen Perseroan yang antara lain adalah:

- Tanggapan atas laporan Profil Risiko Operasional Triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2023;
- Tanggapan atas laporan Profil Risiko Investasi Triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2023;
- Tanggapan atas laporan performance bulanan;
- Arahan bidang pengembangan IT;
- Arahan bidang implementasi system manajemen mutu ISO 9001;
- Arahan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja serta keamanan;
- Laporan kerja pengawasan ke Pelabuhan Pontianak.
- Tanggapan atas usulan perubahan struktur organisasi dan nomenklatur;

Program Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2023

Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko sepanjang tahun 2023 dinilai positif oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan pencapaian atau realisasi rencana kerja tahunan Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagaimana diuraikan berikut ini:

Report on the Implementation of Duties of the Risk Management Monitoring Committee for 2023

The Risk Management Monitoring Committee has played an active role in supporting the duties of the Board of Commissioners throughout 2023, especially in carrying out supervision and providing suggestions/advice in the field of risk management.

The Risk Management Monitoring Committee is also active in providing responses regarding letters submitted by the Company's Management, which include:

- Response to the Operational Risk Profile report for Quarters 1, 2, 3 and 4 of 2023;
- Response to the Investment Risk Profile report for Quarters 1, 2, 3 and 4 of 2023;
- Response to monthly performance reports;
- Directions for IT development;
- Directions for the implementation of the ISO 9001 quality management system;
- Directions for implementing occupational health and safety and security;
- Monitoring work report to Pontianak Port.
- Responses to proposed changes to organizational structure and nomenclature;

Risk Management Monitoring Committee Competency Development Program in 2023

The performance of the Risk Management Monitoring Committee throughout 2023 is assessed as positive by the Board of Commissioners, in accordance with the achievement or realization of the Risk Management Monitoring Committee's annual work plan as described below:

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2023
Table of Risk Management Monitoring Committee Training and Development for 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Waktu Penyelenggaraan** Implementation Time	**Penyelenggara** Organizer
LM. Arya Bima Yudiantara	Informasi pengembangan kompetensi Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko LM. Arya Bima Yudiantara telah disampaikan pada Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Information on competency development for the Chair of the LM Risk Management Monitoring Committee. Arya Bima Yudiantara has presented it to the Competency Development of the Board of Commissioners			
Sumarman	Pelatihan Training	Project Risk Management	2 Maret 2023 March 2, 2023	Project Management Institute Indonesia
	Pelatihan Training	Business Continuity Management	8-10 Maret 2023 March 8 – 10, 2023	CRMS (Center for Risk Management & Sustainability)
	Pelatihan Training	Investment Risk Management	29 Mei 2023 May 29, 2023	PMLI (Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia) PMLI (Indonesian Maritime and Logistics Education)
	Pelatihan Training	Profesional Manajemen Risiko Berkualifikasi (Qualified Risk Management Professional – QRMP) Qualified Risk Management Professional (QRMP)	13-15 Juni 2023 June 13 – 15, 2023	CRMS (Center for Risk Management & Sustainability)
	Sertifikasi Certification	Profesional Manajemen Risiko Berkualifikasi (Qualified Risk Management Professional – QRMP) Qualified Risk Management Professional (QRMP)	27 Juni 2023 June 27, 2023	LSPMKS (Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera) LSPMKS (Kalyana Sejahtera Partner Professional Certification Institute)
	Pelatihan Training	Program GRC Summit 2023, Building Resilient Future Through GRC and ESG	23 Agustus 2023 August 23, 2023	IRMAPA (Indonesia Risk Management Profesional Association)
	Pelatihan Training	Trainer Internal Bidang Manajemen Risiko Internal Trainer in Risk Management	28-30 Agustus 2023 August 28 – 30, 2023	PMLI (Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia) PMLI (Indonesian Maritime and Logistics Education)
	Pelatihan Training	Edukasi Pasar Modal: Mengenal Instrumen Investasi Pasar Modal Indoanesia Capital Market Education: Getting to Know Indonesian Capital Market Investment Instruments	24 Oktober 2023 October 24, 2023	Mirae Asset Sekuritas indonesia Mirae Asset Indonesian Securities
	Pelatihan Training	SNIA, Trusted Advisor: Navigating the Frontier, Connecting Between Information Technology and Business Strategy	6-7 Desember 2023 December 6-7, 2023	YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit) YPIA (Internal Audit Education Foundation)
	GRC Summit 2023	Building Reslinet Fture through GRC and ESG	24-25 Agustus August 24-25	Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA)

Penilaian dan Evaluasi atas Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2023

Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko sepanjang tahun 2023 dinilai positif oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan pencapaian atau realisasi rencana kerja tahunan Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagaimana diuraikan berikut ini:

Assessment and Evaluation of the Performance of the Risk Management Monitoring Committee in 2023

The performance of the Risk Management Monitoring Committee throughout 2023 is assessed as positive by the Board of Commissioners, in accordance with the achievement or realization of the Risk Management Monitoring Committee's annual work plan as described below:

No.	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Status Pelaksanaan Implementation Status
1	Memastikan terlaksananya penyusunan profil risiko signifikan 2023 Ensure the implementation of the preparation of significant risk profiles for 2023	√
2	Mengevaluasi laporan kajian risiko investasi. Evaluate investment risk assessment reports.	√
3	Melakukan pemantauan atas realisasi dan hambatan yang dihadapi terkait Rencana Kerja Manajemen (RKM) tahun 2023. Monitoring the realization and obstacles faced regarding the 2023 Management Work Plan (RKM).	√
4	Melakukan pembahasan dan arahan/tanggapan terkait Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya. Carrying out discussions and directions/responses regarding Procurement Policy and its Implementation.	√
5	Melakukan pembahasan dan arahan/tanggapan terkait Kebijakan mutu dan peningkatan pelayanan. Carrying out discussions and directions/responses regarding quality policies and service improvements.	√
6	Melakukan pembahasan dan arahan/tanggapan terkait ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan isi Perjanjian Kerja Sama dengan pihak ketiga. Carrying out discussions and directions/responses regarding compliance with laws and regulations and the contents of Cooperation Agreements with third parties.	√
7	Melakukan pembahasan dan arahan/tanggapan terkait Implementasi Manajemen Risiko. Carrying out discussions and directions/responses regarding Risk Management Implementation.	√
8	Melakukan pembahasan dan arahan/tanggapan terkait kebijakan pengembangan sistem informasi. Carrying out discussions and directions/responses regarding information system development policies.	√
9	Memberikan evaluasi, arahan, tanggapan atas tupoksi Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Provide evaluation, direction, and response to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in managing the company and other tasks assigned by the Board of Commissioners.	√
10	Mengikuti *workshop* atau seminar terkait dengan Manajemen Risiko. Attend workshops or seminars related to Risk Management.	√
11	Menyusun Laporan Komite Pemantau Manajemen Risiko. Prepare the Risk Management Monitoring Committee Report.	√

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berpedoman pada ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014") tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi guna membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan prosedur dan proses nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta sistem dan besaran remunerasinya.

Dalam koridor implementasi GCG, pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bentuk salah satu bentuk transparansi Perseroan khususnya dalam proses nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 70; Tambahan Lembaran Negara No. 4297).
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 106; Tambahan Lembaran Negara No. 4756).
- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, di antaranya menyangkut pembentukan Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER- 11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Nomination and Remuneration CommitteeGuided by the provisions of POJK No. 34/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014") concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the Company established a Nomination and Remuneration Committee to assist the Board of Commissioners in implementing the procedures and process for nominating members of the Board of Commissioners and Directors, as well as the system and the amount of remuneration.

In the corridor of GCG implementation, the formation of a Nomination and Remuneration Committee is a form of transparency for the Company, especially in the nomination and remuneration process for the Board of Commissioners and Directors.

Legal Basis

- Law no. 19 of 2003 dated 4 October 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Gazette of 2003 No. 70; Supplement to State Gazette No. 4297).
- Law no. 40 of 2007 dated 16 August 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of 2007 No. 106; Supplement to State Gazette No. 4756).
- Government Regulation no. 101 of 2021 dated October 1, 2021 concerning the Merger of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, and the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV into the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II .
- Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, including the establishment of a Supporting Organ for the Board of Commissioners/Supervisory Board for the formation of the Nomination and Remuneration Committee.
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-14/MBU/10/2021 concerning Second Amendment to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER- 11/MBU/07/2021 dated July 30, 2021 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises.

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator (Parameter) Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governace) pada BUMN.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

- Akta Pendirian Perusahaan PT Indonesia Kendaraan Terminal No. 10 Tanggal 5 November 2012 yang dibuat di hadapan Yulianti Irawati, S.H. Notaris pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H. di Jakarta sebagaimana telah disetujui dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012.
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk No. 12 tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Silfia, S.H. Notaris pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0206655 tanggal 21 Mei 2018.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008618.AH.01.02. Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal No. 10/KEP-DK/14/05/01/IKT-18 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua serta Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indonesia Kendaraan Terminal tanggal 14 Mei 2018.

- Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. 18/KEP-DK/X/IKT-2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

- Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which states that in carrying out supervisory duties, the Board of Commissioners can form a Committee whose members are one or more members of the Board of Commissioners and are responsible to the Board of Commissioners.
- Decree of the Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S. MBU/2012 concerning Indicators (Parameters) for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOE.
- Financial Services Authority Regulation no. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
- Financial Services Authority Regulation no. 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committees for Issuers or Public Companies.
- State-Owned Enterprises Ministerial Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated 24 August 2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.
- Deed of Establishment of the PT Indonesia Kendaraan Terminal Company No. 10 November 5 2012 made in the presence of Yulianti Irawati, S.H. Replacement notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H. in Jakarta as approved in the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-58515.AH.01.01 of 2012.
- Deed of Resolutions Statement of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk No. 12 dated May 21, 2018 made in the presence of Silfia, S.H. Replacement notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., who has received approval from the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0206655 dated 21 May 2018.
- Financial Services Authority Regulation no. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Nomination and Remuneration Committee.
- Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0008618.AH.01.02. 2018 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Decision of the Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal No. 10/KEP-DK/14/05/01/IKT-18 concerning the Dismissal and Appointment of the Chair and Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal dated May 14, 2018.
- Decision of the Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. 18/KEP-DK/X/IKT-2020 dated October 1, 2020 concerning the Determination of the Chair and Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi disusun dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 13/KEP-DK/XII/IKT-2018 tanggal 19 Desember 2018. Guna menyelaraskan dengan aturan dan ketetapan baru yang dapat berdampak pada pelaksanaan kerja Nominasi dan Remunerasi, Piagam Komite ini telah diperbarui pada tanggal 1 Oktober 2022.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan landasan dan pedoman kerja yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi pokok-pokok aturan tentang hal-hal sebagai berikut:
- Landasan Hukum
- Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite
- Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komite
- Persyaratan Keanggotaan
- Rapat komite
- Laporan Pelaksanaan Tugas Komite
- Akses Kerahasiaan Informasi
- Rencana Kerja dan Anggaran
- Penghasilan Anggota Komite
- Pendidikan dan Tenaga Penunjang
- Penilaian Kinerja

Tugas dan tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi, sesuai dengan yang telah diatur dalam Piagam Komite, adalah sebagai berikut:
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi Perseroan dan Direksi anak perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Melakukan review secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta Perseroan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Nomination and Remuneration Committee Charter was prepared and stipulated based on the Decree of the Board of Commissioners No. 13/KEP-DK/XII/IKT-2018 dated December 19, 2018. In order to align with new rules and regulations that may impact the implementation of Nomination and Remuneration work, this Committee Charter has been updated on October 1, 2022.

The Nomination and Remuneration Committee Charter is a binding work basis and guideline and must be adhered to by all members of the Nomination and Remuneration Committee in carrying out their duties and responsibilities.

The Nomination and Remuneration Committee Charter contains the following rules:
- Legal Framework
- Procedures for Appointment and Dismissal of Committee Members
- Duties, Responsibilities and Authority of the Committee
- Membership Requirements
- Committee meeting
- Report on the Implementation of Committee Duties
- Access to Confidentiality of Information
- Work Plan and Budget
- Income of Committee Members
- Education and Supporting Personnel
- Performance Appraisal

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

The duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee, as regulated in the Committee Charter, are as follows:
- Provide recommendations regarding prospective members of the Company's Board of Directors and subsidiary Directors to the Board of Commissioners to be submitted to Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).
- Conduct regular reviews of the Company's Talent Management System as well as monitoring and evaluating its implementation. Prepare and provide recommendations regarding systems and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners and Directors to the Board of Commissioners to be submitted to Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).
- Evaluate remuneration policies.
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:

- Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Kebijakan remunerasi bagi karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Melakukan evaluasi kinerja secara individual dan kolegial bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Menyiapkan usulan program pengembangan kompetensi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi karyawan yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.
- Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perseroan.
- Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.

- Remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS).
- The remuneration policy for employees as a whole is to be submitted to the Board of Directors.
- Conduct individual and collegial performance evaluations for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
- Prepare proposals for competency development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
- Evaluate remuneration policies for employees which require approval/response from the Board of Commissioners.
- Evaluate the Board of Directors' proposals regarding the Company's organizational structure.
- Carry out other tasks as requested by the Board of Commissioners.

Kriteria Komite Nominasi dan Remunerasi

Kriteria Komite Nominasi dan Remunerasi, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Piagam Komite, adalah sebagai berikut:

- Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang nominasi dan remunerasi.
- Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
- Mampu berkomunikasi secara efektif.
- Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
- Para anggota secara bersama-sama memiliki keseimbangan antara keahlian dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai bisnis secara umum dan Perseroan secara khusus.
- Anggota Komite harus bersifat dan bersikap independen, objektif dan profesional baik dalam penampilan maupun dalam kenyataan.
- Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Memiliki kemampuan dalam menulis laporan yang baik untuk menuangkan evaluasi dan analisa kriteria nominasi dan sistem remunerasi.
- Memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Masa Jabatan dan Komposisi

Nomination and Remuneration Committee Criteria

The criteria for the Nomination and Remuneration Committee, in accordance with the provisions stipulated in the Committee Charter, are as follows:

- Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of nomination and remuneration.
- Has no personal interests/relationships that could have a negative impact and conflict of interest on the Company.
- Able to communicate effectively.
- Can provide sufficient time to complete the task.
- The members collectively have a balance of expertise and experience with a broad background understanding of business in general and the Company in particular.
- Committee members must be independent, objective and professional both in appearance and in reality.
- Has no familial relationship by marriage or descent up to the second degree, either horizontally or vertically, with members of the Board of Commissioners and Directors.
- Have the ability to write good reports to provide evaluation and analysis of nomination criteria and remuneration systems.
- Have an adequate understanding of the principles of Good Corporate Governance.

Term of Office and Composition

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.04/2015, masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Ketua dan/atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan, masa jabatannya tidak dapat melebihi dari masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang masa jabatannya berakhir, dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota komite yang merupakan pihak independen berasal dari luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

In accordance with Financial Services Authority Regulation Number 55/ POJK.04/2015, the term of office of members of the Nomination and Remuneration Committee who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for a 2 (two) year term of office, with does not reduce the right of the Board of Commissioners to dismiss him at any time.

The chairman and/or members of the Nomination and Remuneration Committee who are members of the Company's Board of Commissioners, their terms of office cannot exceed their terms of office as members of the Company's Board of Commissioners. All members of the Nomination and Remuneration Committee whose terms of office have ended can only be reappointed for 1 (one) subsequent period.

Membership of the Remuneration and Nomination Committee consists of 1 (one) Chairman who is an Independent Commissioner and at least 1 (one) committee member who is an independent party from outside the Company or a party who holds a managerial position under the Directors in charge of Human Capital.

The composition of the Company's Nomination and Remuneration Committee as of 31 December 2023 is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jabatan Lain di Perseroan** Other Positions in the Company	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode** Period
Abdur Rahim Hasan	Ketua Komite Committee Chairman	Anggota Komite Committee Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.15/KEP-DK/VIII/IKT-20 tanggal 20 Agustus 2020 Board of Commissioners Decree No.15/KEP-DK/VIII/IKT-20 dated August 20, 2020	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen Following his term of office as Independent Commissioner	Pertama First
LM. Arya Bima Yudiantara	Anggota Komite Committee Member	Anggota Komite Committee Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor 20/KEP-DK/VI/IKT-2021 tanggal 29 Juni 2021 Decree of the Board of Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Number 20/KEP-DK/VI/IKT-2021 June 29, 2021	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen Following his term of office as Independent Commissioner	Pertama Pertama
Ahmad Alyani Addarain	Anggota Komite Committee Member	Tidak ada None	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/25/07/02/IPCC-23 tanggal 25 Juli 2023 Board of Commissioners Decree No. DK/25/07/02/IPCC-23 dated July 25, 2023	2023-2026	Ketiga Third

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of the Nomination and Remuneration Committee

Abdur Rahim Hasan
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris Independen
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee/Independent Commissioner

Profil Lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris.
His complete profile has been described in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Sub-chapter.

LM. Arya Bima Yudiantara
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris Independen
Member of the Nomination and Remuneration Committee/Independent Commissioner

Profil Lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris.
His complete profile has been described in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Sub-chapter.

Ahmad Alyani Addarain
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, usia 35 tahun, domisili di Jakarta Indonesian citizen, 35 years old, domiciled in Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/25/07/02/IPCC-23 tanggal 25 Juli 2023 Board of Commissioners Decree No. 10/KEP-DK/14/05/01/IKT-18 dated May 14, 2018
Riwayat Pendidikan Educational background	Sarjana Psikologi Universitas Negeri Semarang (2013) Bachelor of Psychology, Universitas Negeri Semarang (2013)
Sertifikasi Certification	GRC summit 2023
Riwayat Karier Work Experience	1. Supervisor HRD di PT Suzuki Mobil Cirebon (2013-2014) 2. CMO di PT Astra Credit Companies (2014-2015) 3. Staff HRD di PT Riyana Cipta Pangan sebagai HRD (2015-2016) 4. Supervisor Area HRD di PT Wirasindo Santakarya (2016-2017) 5. Marketing Advisor di PT Summit Global Indonesia (2017-2019) 6. PT Indonesia Kendaraan Terminal sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi (2018-Sekarang) 1. HRD Supervisor at PT Suzuki Mobil Cirebon (2013-2014) 2. CMO at PT Astra Credit Companies (2014-2015) 3. HRD Staff at PT Riyana Cipta Pangan as HRD (2015-2016) 4. HRD Area Supervisor at PT Wirasindo Santakarya (2016-2017) 5. Marketing Advisor at PT Summit Global Indonesia (2017-2019) 6. PT Indonesia Kendaraan Terminal as Nomination and Remuneration Committee (2018-Present)

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan dapat memastikan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen, serta penuh itikad baik.

Seluruh personil Komite Nominasi dan Remunerasi periode berjalan telah memenuhi syarat independensi sesuai dengan aturan yang berlaku. Informasi lebih rinci tentang independensi masing-masing personil Komite Nominasi dan Remunerasi diuraikan pada tabel berikut ini:

Independence of Nomination and Remuneration Committee Members

The Company can ensure that the Nomination and Remuneration Committee carries out its duties and responsibilities professionally and independently, and in good faith.

All Nomination and Remuneration Committee personnel for the current period have fulfilled the independence requirements in accordance with applicable regulations. More detailed information about the independence of each Nomination and Remuneration Committee personnel is described in the following table:

Aspek Independensi Independence Aspect	Abdur Rahim Hasan	LM. Arya Bima Yudiantara	Ahmad Alyani Addarain
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afilliasi Has no management relationships in the company, subsidiaries or affiliated companies	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Has no share ownership relationship in the Company	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no family relationship with the Board of Commissioners, Directors, and/or fellow members of the Audit Committee	√	√	√

Informasi Rangkap Jabatan

Informasi rangkap jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi periode berjalan diuraikan pada tabel di bawah ini:

Concurrent Position Information

Information on the concurrent positions of the Nomination and Remuneration Committee for the current period is outlined in the table below:

Nama Name	Jabatan di Perseroan Position in the Company	Jabatan di Perusahaan Lain Positions in Other Companies	Nama Perusahaan Lain Other Company Names
Ahmad Alyani Addarain	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Remuneration and Nomination Committee	Sumber Daya Manusia dan Operasional Human Capital and Operations	PT Summit Global Indonesia

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyelenggarakan rapat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Piagam (Charter) Komite, guna membahas hal-hal terkait prosedur nominasi dan sistem remunerasi yang diterapkan di Perseroan.

Pada tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan 15 (lima belas) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Nomination and Remuneration Committee Meeting

The Nomination and Remuneration Committee is obliged to hold meetings in accordance with the provisions stipulated in the Committee Charter, to discuss matters related to nomination procedures and the remuneration system implemented in the Company.

In 2023, the Nomination and Remuneration Committee has held 15 (fiveteen) times with the attendance level of each Committee member as described in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Abdur Rahim Hasan	Ketua Komite Committe Chairman	12	12	100%
Ahmad Alyani Addarain	Anggota Komite Committee Member	12	12	100%

Pada rapat yang diselenggarakan selama tahun 2023, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pembahasan terkait agenda-agenda berikut ini:

At meetings held throughout 2023, the Nomination and Remuneration Committee Charter discussed the following agendas:

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
1	13 Januari 2023 January 13, 2023	Pembahasan Progja Bidang SDM Tahun 2023 Discussion of the 2023 HC Sector Progja	KA, KNR, KPMR, Manajemen (SDM & Umum) KA, KNR, KPMR, Management (HC & General)
2	21 Januari 2023 January 21, 2023	Pembahasan Seputar Pengelolaan Pegawai TNO Discussion Regarding TNO Employee Management	KA, KNR, KPMR, Manajemen (SDM & Umum) KA, KNR, KPMR, Management (HC & General)
3	14 Februari 2023 February 14, 2023	Pembahasan RKAP 2023 tentang Beban gaji Pegawai, Tantiem / Bonus, dan pengelolaan SDM Discussion of the 2023 RKAP regarding Employee salary expenses, Tantiem / Bonuses, and HC management	KA, KNR, KPMR, Manajemen (SDM & Umum) KA, KNR, KPMR, Management (HC & General)
4	24 Maret 2023 March 24, 2023	Pembahasan pengembangan dan pelaksanaan karir dengan SDM Discussion of career development and implementation with HC	KNR dan Manajemen (SDM & Umum) KNR and Management (HC & General)
5	10 April 2023 April 10, 2023	Pembahasan dengan divisi SDM terkait posisi Struktur Organisasi dan Manpower di setiap Divisi serta Pembahasan Indeks Kepuasan Pekerja Discussion with the HC division regarding the position of Organizational Structure and Manpower in each Division as well as Discussion of the Employee Satisfaction Index	KA, KNR, KPMR, Manajemen (SDM & Umum) KA, KNR, KPMR, Management (HC & General)
6	02 Mei 2023 May 02, 2023	Pembahasan dengan divisi SDM terkait workload job analisis dan remunerasi karyawan Discussion with the HC division regarding workload job analysis and employee remuneration	KNR dan Manajemen (SDM & Umum) KNR and Management (HC & General)
7	08 Juni 2023 June 08, 2023	Pembahasan terkait Fasilitas Kesehatan Dewan Komisaris dan Organ Komite Discussion regarding Health Facilities for the Board of Commissioners and Committee Organs	KA, KNR, KPMR, Manajemen (SDM & Umum) KA, KNR, KPMR, Management (HC & General)
8	22 Juni 2023 June 22, 2023	*Updating* Pengelolaan Pegawai Organik dan Non-Organik Updating Organic and Non-Organic Employee Management	KNR dan Manajemen (SDM & Umum) KNR and Management (HC & General)
9	16 Juli 2023 July 16, 2023	Pembahasan RKAP 2024 IV (Final) Discussion of RKAP 2024 IV (Final)	KA, KNR, KPMR, Direksi dan Manajemen (SDM & Umum) KA, KNR, KPMR, Directors and Management (HC & General)
10	08 Agustus 2023 August 08, 2023	Pembahasan Usulan Struktur Organisasi Discussion of Proposed Organizational Structure	KA, KNR, KPMR, Manajemen (SDM & Umum) KA, KNR, KPMR, Management (HC & General)
11	27 September 2023 September 27, 2023	Pembahasan Updaating SK Remunerasi, Fasilitas dan Tunjangan dan Biaya Opersaional Direksi Komisaris 2023 Discussion of Updating Decree on Remuneration, Facilities and Allowances and Operational Costs for Board of Directors and Board of Commissioners 2023	KNR, Sesdekom dan Manajemen (SDM & Umum) KNR, Sesdekom and Management (HC & General)
12	12 Oktober 2023 October 12, 2023	Pembahasan Struktur Organisasi PT IKT Tbk dan Pembahasan Revisi RJPP tahun 2021-2025 Discussion of the Organizational Structure of PT IKT Tbk and Discussion of the RJPP Revision for 2021-2025	KA, KNR, KPMR, Direksi dan Manajemen (SDM & Umum) KA, KNR, KPMR, Directors and Management (HC & General)
13	24 Oktober 2023 October 24, 2023	Pembahasan terkait besaran Tantiem Direksi dan Komisaris Discussion regarding the amount of Tantiem for Board of Directors and Board of Commissioners	KNR, Sesdekom dan Manajemen (SDM & Umum) KNR, Sesdekom and Management (HC & General)
14	15 November 2023 November 15, 2023	Update progress assessmen kinerja karyawan Update progress on employee performance assessment	KNR dan Manajemen (SDM & Umum) KNR and Management (HC & General)
15	06 Desember 2023 December 06, 2023	Pembahasan terkait usulan Direksi baru Discussion regarding proposals for new Directors	KNR dan Manajemen (SDM & Umum) KNR and Management (HC & General)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023

Komite Nominasi dan Remunerasi telah berperan aktif mendukung Dewan Komisaris dalam pelaksanaan prosedur nominasi dan penetapan sistem remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Sepanjang tahun 2022 Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan berbagai rekomendasi tentang hal-hal berikut ini:

- Laporan Tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023;
- Tanggapan Penyampaian Usulan Revisi RKAP Tahun 2023 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- Tanggapan Permohonan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021-2025 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- Tanggapan Usulan Perubahan Struktur Organisasi dan Nomenklatur PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- Tanggapan Usulan Besaran Gaji, tunjangan fasilitas Direksi dan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- Tanggapan Tantiem Direksi dan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- Tanggapan Usulan Besaran Biaya Operasional Direksi dan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- Arahan/Nasihat terkait Pengembangan karir dan suksesi manajemen PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- Arahan/Nasihat terkait Pengelolaan SDM PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam pelaksanaan kebijakan suksesi Direksi Perseroan, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki peran dalam menyiapkan dan memberikan rekomendasi proposal kandidat calon Anggota Direksi berdasarkan pemenuhan persyaratan, hasil Uji Kompetensi dan Kelayakan serta hasil evaluasi lainnya.

Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan yang akan menjadi bagian dari Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dari Perseroan serta menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Report on the Implementation of the Duties of the Nomination and Remuneration Committee for 2023

The Nomination and Remuneration Committee has played an active role in supporting the Board of Commissioners in implementing nomination procedures and determining the remuneration system for the Company's Board of Commissioners and Directors. Throughout 2022 the Nomination and Remuneration Committee has provided various recommendations regarding the following matters:

- Annual Report of the Nomination and Remuneration Committee for 2023;
- Response to Submission of Proposed Revision of RKAP for 2023 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- Response to Request for Long Term Company Plan (RJPP) 2021-2025 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- Response to Proposed Changes to the Organizational Structure and Nomenclature of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- Response to the proposed salary amount, facility allowances for the Directors and Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- .Response to Tantiem from Directors and Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- Response to the Proposed Operational Costs for the Directors and Commissioners of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- Directions/Advice regarding career development and management succession of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- Directions/Advice regarding HC Management of PT Indonesia Kendaraan Terminal T

Policy on Board of Directors' Succession

In implementing the Company's Board of Directors succession policy, the Nomination and Remuneration Committee has a role in preparing and providing recommendations for proposals for prospective members of the Board of Directors based on the fulfillment of requirements, Competency and Eligibility Test results and other evaluation results.

One of the tasks of the Remuneration and Nomination Committee is to develop a nomination system for members of the Company's Board of Commissioners and/or Directors which will become part of the Company's Corporate Governance Policy and serve as a guideline for the Board of Commissioners and the GMS in determining the remuneration and nomination of members of the Board of Commissioners and /or Directors.

Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023

Nomination and Remuneration Committee Competency Development Program in 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Waktu Penyelenggaraan Implementation Time	Penyelenggara Organizer
Abdur Rahim (Ketua)	Informasi pengembangan kompetensi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Abdur Rahim Hasan telah disampaikan pada Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Information on the competency development of the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Abdur Rahim Hasan, has been contained in the Competency Development of the Board of Commissioners	Abdur Rahim (Ketua) (Chairman)	Informasi pengembangan kompetensi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Abdur Rahim Hasan telah disampaikan pada Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Information on the competency development of the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Abdur Rahim Hasan, has been contained in the Competency Development of the Board of Commissioners	Abdur Rahim (Ketua) (Chairman)
Ahmad Alyani Addarain	GRC Summit 2023	Ahmad Alyani Addarain	GRC Summit 2023	Ahmad Alyani Addarain

Penilaian dan Evaluasi Atas Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023

Assessment and Evaluation of the Performance of the Nomination and Remuneration Committee in 2023

No.	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Status Pelaksanaan Implementation Status
1	Evaluasi penerapan prinsip - prinsip GCG bidang SDM Evaluation of the implementation of GCG principles in the HC field	Terlaksana dengan baik Well Done
2	Pembahasan dan review usulan RKAP bidang SDM Discussion and review of proposed RKAP in the HC sector	Terlaksana dengan baik Well Done
3	Rapat koordinasi triwulan bersama divisi SDM (Sinergi dengan Rapat Koordinasi Komite Audit / KPMR) Quarterly coordination meeting with HC division (Synergy with Audit Committee Coordination Meeting / KPMR)	Terlaksana dengan baik Well Done
4	Kajian usulan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Review of proposed remuneration for the Board of Commissioners and Directors	Terlaksana dengan baik Well Done
5	Kajian/rekomendasi atas desain dan pola struktur organisasi perusahaan berdasarkan usulan Direksi dan/atau penugasan Dewan Komisaris Review/recommendations on the design and pattern of the company's organizational structure based on proposals from the Board of Directors and/or assignments from the Board of Commissioners	Terlaksana dengan baik Well Done
6	Review atas penerapan sistem manajemen karier pekerja Review of the implementation of the employee career management system	Terlaksana dengan baik Well Done
7	Kunjungan kerja (Benchmarking) Work visit (Benchmarking)	Terlaksana dengan baik Well Done

No.	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Status Pelaksanaan Implementation Status
8	Menyusun rencana kerja dan anggaran KNR Prepare KNR work plans and budgets	Terlaksana dengan baik Well Done
9	Penyusunan laporan triwulan KNR Preparation of KNR quarterly reports	Terlaksana dengan baik Well Done
10	Seminar/pelatihan/workshop/studi banding Seminar/training/workshop/comparative study	Terlaksana dengan baik Well Done
11	Rapat dengan Dewan Komisaris Meeting with the Board of Commissioners	Terlaksana dengan baik Well Done
12	Rapat internal KNR (minimal satu bulan sekali) KNR internal meeting (at least once a month)	Terlaksana dengan baik Well Done
13	Review penugasan Dewan Komisaris lainnya yang relevan dengan bidang SDM Review other Board of Commissioners assignments relevant to the HC field	Terlaksana dengan baik Well Done

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan, diperlukan adanya peran Sekretaris Perusahaan.

In order to improve openness, service and communication to stakeholders as an implementation of the principles of good corporate governance in the Company, the role of the Corporate Secretary is required.

Sekretaris Perusahaan merupakan organ pendukung Direksi yang berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar-organ Perseroan dan sebagai penghubung yang menjembatani kepentingan Perseroan dengan regulator, Pemegang Saham, media, dan pihak eksternal lainnya.

The Corporate Secretary is a supporting organ for the Board of Directors which plays an important role in facilitating communication between the Company's organs and as a liaison that bridges the interests of the Company with regulators, Shareholders, the media and other external parties.

Fungsi Sekretaris Perusahaan di Perseroan telah selaras dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

The function of the Corporate Secretary in the Company is in line with the provisions of Financial Services Authority Regulation no. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.

Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi kesekretariatan perusahaan dan memastikan kepatuhan Perseroan kepada peraturan dan prinsip GCG. Sekretaris Perusahaan memiliki posisi strategis dalam membangun corporate image IPCC.

The Corporate Secretary carries out company secretarial functions and ensures the Company's compliance with GCG regulations and principles. The Corporate Secretary has a strategic position in building the IPCC corporate image.

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 10/POJK.04/2017;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.

Legal Basis:

- Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
- Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
- Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2014 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies as amended by Financial Services Authority Regulation 10/POJK.04/2017;
- Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies;
- Financial Services Authority Regulation Number 8/POJK.04/2015 concerning Issuer or Public Company Websites;
- Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies;
- Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies;
- Financial Services Authority Circular Number 30/SEOJK.04/2016 concerning Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan IPCC melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada beberapa pedoman kerja, di antaranya:

- Pedoman Good Corporate Governance
- Pedoman Tata Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi
- Pedoman Sponsorship atau Bentuk Bantuan Lainnya
- Pedoman Penyusunan dan Pembuatan Laporan Tahunan
- Pedoman Penyaluran Dana CSR
- Pedoman Pelaksanaan RUPS
- Pedoman Pengelolaan Informasi dengan Media
- Pedoman *Visit* dan *Field Trip*

Corporate Secretary Work Guidelines

The IPCC Corporate Secretary carries out his duties and responsibilities referring to several work guidelines, including:

- Good Corporate Governance Guidelines
- Guidelines for Work Procedures for the Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors
- Guidelines for Sponsorship or Other Forms of Assistance
- Guidelines for Preparing and Preparing Annual Reports
- Guidelines for Distribution of CSR Funds
- Guidelines for Implementing GMS
- Guidelines for Information Management with Media
- Visit and Field Trip Guidelines

Struktur dan Organisasi

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan beserta susunan pejabat dan pemimpin unit kerja di bawahnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. KP.428/1/1/IKT-18 tentang Alih Tugas/Jabatan bagi Pekerja di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tanggal 23 Juli 2018, diuraikan pada bagan di bawah ini:

Structure and Organization

The organizational structure of the Corporate Secretary along with the composition of officials and leaders of work units under it are as stipulated in the Decree of the Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. KP.428/1/1/IKT-18 concerning Transfer of Duties/Positions for Workers within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dated 23 July 2018, described in the chart below:

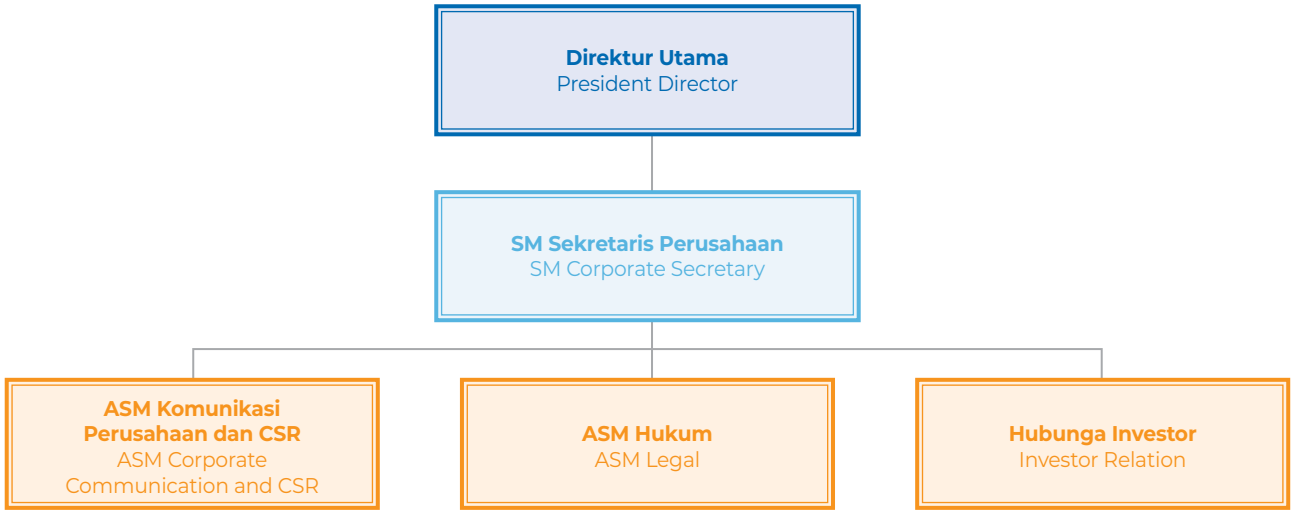

Dalam menjalankan fungsi dan peranannya, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan membawahi 3 (tiga) divisi yang memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda, yaitu:

- Komunikasi Perusahaan dan CSR
- Hukum
- Hubungan Investor

In carrying out its functions and roles, the Corporate Secretary is directly responsible to the President Director. The Corporate Secretary oversees 3 (three) divisions which have different duties and responsibilities, namely:

- Corporate Communication and CSR
- Law
- Investor Relations

Masing-masing divisi tersebut dipimpin oleh seorang Asisten Senior Manajer (ASM).

Each division is led by an Assistant Senior Manager (ASM).

Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile

Chandra Irawan **Sekretaris Perusahaan** **Menjabat Sejak 1 Februari 2023** Corporate Secretary Serving Since February 1, 2023	
Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, usia 42 tahun, berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia Indonesian citizen, 42 years old, domiciled in DKI Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No.KP.10.02/1/2/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tentang Alih Tugas/ Jabatan bagi Pekerja di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tanggal 1 Februari 2023. Decree of the Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No.KP.10.02/1/2/2/RKTK/SDMA/PLND-23 concerning Transfer of Duties/Positions for Workers within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dated February 1, 2023.
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. Magister Manajemen dari Universitas Trisakti (2009) 2. Master of Science in International Transport and Logistics dari World Maritime University in collaboration with Shanghai Maritime University (2013) 1. Master of Management from Universitas Trisakti (2009) 2. Master of Science in International Transport and Logistics from World Maritime University in collaboration with Shanghai Maritime University (2013)
Riwayat Karier Work Experience	Senior Manager Corporate Secretary di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2023-Sekarang) Senior Manager Marketing & Customer Relation di PT Pelabuhan Tanjung Priok (2021-2023) Senior Deputy Vice President Institutional Relations di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2019-2021), merangkap jabatan sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2019-2021) Deputy Vice President di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2016-2019), merangkap jabatan sebagai Sekretaris Dewan Komisaris di PT Integrasi Logistic Cipta Solusi (2016-2019) Manager Terminal Penumpang di PT Pelabuhan Tanjung Priok (2014-2016) Senior Manager Corporate Secretary at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2023-Present) Senior Manager Marketing & Customer Relations at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2021-2023) Senior Deputy Vice President Institutional Relations at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2019-2021), concurrently serving as Secretary to the Board of Commissioners of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2019-2021) Deputy Vice President at PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (Persero) (2016-2019), concurrently serving as Secretary to the Board of Commissioners at PT Integrasi Logistic Cipta Solusi (2016-2019) Passenger Terminal Manager at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2014-2016)

Riwayat Pelatihan Training History	1. Ahli Kepelabuhanan (Port Expert), Kementerian Perhubungan RI (2017 & 2022) 2. Practical Strategic Management, Diklat Indonesia (2021) 3. Business Outlook Transportasi Laut dan Logistik, CEDS Universitas Padjajaran (2020) 4. Train the Trainer, IPC Corporate University (2019) 5. Character Building Managerial Development Program, IPC Corporate University (2019) 6. Risk Assessment Technique, IPC Corporate University, Bogor (2018) 7. Quality Risk Management Awareness (QRMA), LPK MKS, Jakarta (2017) 8. Integrated ISO 9001:2015 ISO 14001 2015 & OHSAS 18001 2007 Auditor, Jakarta (2017) 9. Managerial Development Program IPC Corporate University Bogor (2016) 10. Negotiation Skill, IPC Corporate University, Caw Port Operation Safety Inspection Techniques, ASEAN German Technical Cooperation, Jakarta (2015) 11. Transformational Change Leadership Program, Rumah Perubahan, Jakarta (2015) 12. ISO 14001:2004 Lead Auditor Training, Jakarta (2015) 13. Training on Port Operation Safety Inspection Techniques, ASEAN German Technical Cooperation (2015) 14. Mandarin Course, Shanghai Maritime University, Shanghai, China (2012) 15. Breakbulk Cargo Training, APEC Antwerp, Belgium (2011) 16. Container Terminal Operation Training, Port Training Centre, Jakarta (2008) 17. ESQ Leadership Training, ESQ Leadership Center, Jakarta (2005) 1. Port Expert, Indonesian Ministry of Transportation (2017 & 2022) 2. Practical Strategic Management, Indonesian Education and Training (2021) 3. Business Outlook on Maritime Transportation and Logistics, CEDS Padjadjaran University (2020) 4. Train the Trainer, IPC Corporate University (2019) 5. Character Building Managerial Development Program, IPC Corporate University (2019) 6. Risk Assessment Technique, IPC Corporate University, Bogor (2018) 7. Quality Risk Management Awareness (QRMA), LPK MKS, Jakarta (2017) 8. Integrated ISO 9001:2015 ISO 14001 2015 & OHSAS 18001 2007 Auditor, Jakarta (2017) 9. Managerial Development Program IPC Corporate University Bogor (2016) 10. Negotiation Skills, IPC Corporate University, Caw Port Operation Safety Inspection Techniques, ASEAN German Technical Cooperation, Jakarta (2015) 11. Transformational Change Leadership Program, House of Change, Jakarta (2015) 12. ISO 14001:2004 Lead Auditor Training, Jakarta (2015) 13. Training on Port Operation Safety Inspection Techniques, ASEAN German Technical Cooperation (2015) 14. Mandarin Course, Shanghai Maritime University, Shanghai, China (2012) 15. Breakbulk Cargo Training, APEC Antwerp, Belgium (2011) 16. Container Terminal Operation Training, Port Training Center, Jakarta (2008) 17. ESQ Leadership Training, ESQ Leadership Center, Jakarta (2005)

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Tata Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi dan Pedoman Good Corporate Governance, antara lain adalah:

- Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
- Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- Menata usahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan RUPS;
- Mengelola Rapat Direksi;
- Mengelola Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi;
- Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perseroan secara umum;
- Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG;
- Menangani dan mengoordinasi permasalahan legal Perusahaan;

Duties and responsibilities of the Corporate Secretary

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary as regulated in the Guidelines for the Relationship between the Board of Commissioners and Directors and the Guidelines for Good Corporate Governance, include:

- Ensure that the Company complies with regulations regarding disclosure requirements in line with the implementation of GCG principles;
- Provide information required by the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
- Administer and store Company documents, including but not limited to, Shareholder Register, Special Register and minutes of Directors' meetings, Board of Commissioners' meetings and GMS;
- Managing Board of Directors' Meetings;
- Manage Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors;
- Assist the Board of Directors in solving general Company problems;
- Supervise the implementation of applicable regulations while remaining guided by GCG principles;
- Handle and coordinate the Company's legal issues;

- Menata usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perseroan;
- Mengoordinasi program kerja dan aktivitas Sekretaris Direksi;
- Mengikuti perkembangan/peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau stakeholders atas informasi yang dibutuhkan modal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- Sebagai penghubung (liaison officer) antara perusahaan dengan lembaga terkait dan masyarakat (luar dan lingkungan), termasuk penyusunan dan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Laporan Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan Tahun 2023

- Penyelenggaraan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- Penyelenggaraan 12 (dua belas) Rapat Dewan Komisaris, 12 (dua belas) Rapat gabungan Komisaris dan Direksi, 28 (dua puluh delapan) Rapat Direksi beserta dengan pengelolaan Notulensi Rapat.
- Pelaksanaan keterbukaan informasi dengan penyusunan 1 (satu) Laporan Tahunan, 1 (satu) Laporan Berkelanjutan dan 4 (empat) Laporan Keuangan.
- Pelaksanaan 1 (satu) kali public expose.
- Pengelolaan media komunikasi resmi IPCC seperti situs web dan akun media sosial sebagai bentuk keterbukaan informasi dan promosi.
- Pelaksanaan program media relations melalui siaran pers dan media gathering serta pemberitaan positif.
- Melakukan penyampaian keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui media Televisi.
- Melakukan pendampingan dalam kedinasan Direksi.
- Membuat agenda kerja bagi Direksi.
- Monitoring terhadap implementasi corporate identity.
- Menerbitkan materi promosi corporate dan promosi layanan.
- Pelaksanaan komunikasi kepada internal dengan mengadakan 1 (satu) kali Rapat Kerja Nasional.
- Pelaksanaan event seperti Safari Ramadan, Halalbihalal, peringatan HUT Kemerdekaan RI, peringatan HUT IPCC dan last call first call kapal.

- Administer and store Company documents;
- Coordinate the work program and activities of the Secretary of the Board of Directors;
- Follow applicable developments/regulations in the Capital Market sector;
- Provide input to the Board of Directors to comply with Law no. 8 of 1995 concerning Capital Markets;
- Provide services to the public or stakeholders regarding information needed for capital related to the condition of the Company;
- As a liaison officer between the company and related institutions and the community (external and environmental), including the preparation and implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) Program.

Report on the Implementation of Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary for 2023

- Holding 1 (one) annual General Meeting of Shareholders and 2 (two) Extraordinary General Meetings of Shareholders.
- Organizing 12 (twelve) Board of Commissioners meetings, 12 (twelve) joint meetings of Commissioners and Directors, 28 (twenty eight) Board of Directors meetings along with managing meeting minutes.
- Implementation of information disclosure by preparing 1 (one) Annual Report, 1 (one) Sustainability Report and 4 (four) Financial Reports.
- Implementation of 1 (one) public expose.
- Management of official IPCC communication media such as websites and social media accounts as a form of information disclosure and promotion.
- Implementation of media relations programs through press releases and media gatherings as well as positive reporting.
- Delivering open information to the public through television media.
- Provide assistance in the work of the Board of Directors.
- Create a work agenda for the Board of Directors.
- Monitoring the implementation of corporate identity.
- Publish corporate promotional materials and service promotions.
- Implementation of internal communication by holding 1 (one) National Working Meeting.
- Implementation of events such as Ramadan Safari, Halalbihalal, commemoration of the Independence Day of the Republic of Indonesia, commemoration of the IPCC Anniversary and ship last call first call.

- Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sepanjang tahun 2023 dengan nilai realisasi penyaluran bantuan sebesar Rp1.524.980.080 kepada masyarakat.

- Carrying out social and environmental responsibilities throughout 2023 with the realized value of donation distribution amounting to Rp1,524,980,080 to the communities.

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2023

Corporate Secretary Competency Development Program in 2023

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2023
Table of Training and Competency Development for Corporate Secretary in 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan Waktu Penyelenggaraan	Penyelenggara
CHANDRA IRAWAN (Senior Manager Sekretaris Perusahaan) (Corporate Secretary Senior Manager)	Konferensi dan Workshop Conferences and Workshops	Konferensi dan Workshop The 8th PR Indonesia Awards (PRIA) The 8th PR Indonesia Awards (PRIA) Conference and Workshop	15-17 Maret 2023 March 15-17, 2023	PR Indonesia
	Pelatihan Training	*Coaching for Corporate* (SM & ASM)	20 Maret 2023 March 20, 2023	Individual Expert
	Pelatihan Training	Penyusunan Knowledge Map Bersama KM Plus (Offline Preparation of Knowledge Map with KM Plus (Offline	19-20 Juni 2023 June 19-20, 2023	KM Plus
	Training Training	Service Excellence Training bersama Shaqnas Haque Service Excellence Training with Shaqnas Haque	8 Juli 2023 July 8, 2023	IKT
	GRC Summit 2023	Building Reslinet Fture through GRC and ESG	24-25 Agustus August 24-25	Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA)
	Pelatihan Training	Coaching & Mentoring oleh Kuncie Coaching & Mentoring by Kuncie	31 Agustus 2023 August 31, 2023	Kuncie Prof. Consultant & IPCC
	Workshop	Competition Through Innovation and Collaboration Indrawan Nugroho (CIAS) & Ary Syamsudin (TTMIN)	11 Desember 2023 December 11, 2023	CIAS & IKT

halaman ini sengaja dikosongkan

this page intentionally left blank

Audit Internal

Internal Audit

Perseroan memberikan tanggung jawab kepada Satuan Kerja Audit Internal untuk memastikan pelaksanaan seluruh aktivitas operasional dan bisnis sehari-hari telah sesuai dengan kebijakan, sistem, dan prosedur Audit Internal yang berlaku. Audit Internal mengemban tugas untuk menjalankan fungsi audit internal, yaitu dengan memberikan keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perseroan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara menguji, mengevaluasi, dan meningkatkan efektivitas sistem manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola perusahaan.

The Company gives responsibility to the Internal Audit Work Unit to ensure that the implementation of all daily operational and business activities is in accordance with applicable Internal Audit policies, systems and procedures. Internal Audit carries out the task of carrying out the internal audit function, namely by providing assurance and independent and objective consultation, with the aim of increasing added value and improving the Company's operations through a systematic approach by testing, evaluating and improving the effectiveness of the management system. risks, internal control, and corporate governance processes.

Dalam konteks *Enterprise Risk Management* (ERM) dengan model pendekatan 3LD (*three lines of defence*), auditor internal Perseroan memegang peranan penting sebagai pertahanan pelapis ketiga karena mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mengawasi fungsi-fungsi lainnya secara independen dan objektif.

In the context of Enterprise Risk Management (ERM) with the 3LD (three lines of defense) approach model, the Company's internal auditors play an important role as the third layer of defense because they carry out their duties and responsibilities and supervise other functions independently and objectively.

Dasar Hukum:

- UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 67 (1) yang menyatakan bahwa "Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas internal Perseroan".
- POJK No. 56/POJK.04/2015 ("POJK 56/2015") tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Legal basis:

- Law no. 19 of 2003 concerning BUMN article 67 (1) which states that "In every BUMN an internal supervision unit is formed which is the Company's internal supervisory apparatus".
- POJK No. 56/POJK.04/2015 ("POJK 56/2015") concerning the Establishment and Guidelines for Preparing the Internal Audit Unit Charter.

Visi, Misi, dan Tata Nilai

Vision, Mission and Values

Visi Vision	**Misi** Mission	**Tata Nilai** Values
Menjadi mitra strategis yang profesional, independen, dan obyektif bagi manajemen dalam mewujudkan visi misi Perseroan. Become a professional, independent and objective strategic partner for management in realizing the Company's vision and mission.	1. Melaksanakan kegiatan assurance dan consulting yang independen dan obyektif, untuk memberikan nilai tambah dalam peningkatan efektivitas risk management, control dan governance process di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk; 2. Memberikan Jasa konsultasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal; 3. Meningkatkan kompetensi sehingga menjadi auditor yang profesional. 1. Carrying out independent and objective assurance and consulting activities, to provide added value in increasing the effectiveness of risk management, control and governance processes within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk; 2. Providing consulting services in accordance with existing expertise to improve the quality of internal control; 3. Increase competence so that you become a professional auditor.	Sebagai strategic business partner, Audit Internal PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk harus memberikan Nilai Tambah dan dapat dipercaya, melalui: 1. Perumusan strategi yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan; 2. Struktur organisasi yang mendukung independensi; 3. Kompetensi auditor internal yang profesional; 4. Pelaksanaan internal audit yang berfokus pada area-area yang berisiko tinggi; 5. Penerapan teknologi yang mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan internal audit. As a strategic business partner, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Internal Audit must provide added value and be trustworthy, through: 1. Formulation of strategies that support the achievement of company goals; 2. Organizational structure that supports independence; 3. Professional internal auditor competency; 4. Implementation of internal audits that focus on high risk areas; 5. Application of technology that supports the efficiency and effectiveness of implementing internal audit activities.

Piagam Audit Internal

Piagam Audit Internal IPCC telah disusun dan ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris sejak tanggal 22 April 2022, sesuai dengan ketentuan POJK 56/2015. Piagam ini menjadi pedoman dan kerangka kerja bagi seluruh auditor internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Peran dan fungsi Audit Internal

Peran dan fungsi Audit Internal antara lain:

- Membantu Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan dan pelaksanaan audit, maupun pemantauan hasil audit;
- Melakukan evaluasi atas semua Divisi dalam pengelolaan operasional Perusahaan;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif terhadap hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan hasil audit dan disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan auditee;
- Memberikan jasa konsultasi internal perusahaan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan, selama tidak mempengaruhi independensi dan obyektivitas SPI, serta didukung dengan sumber daya yang memadai;
- Melaksanakan pemantauan hasil audit dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara periodik;
- Melakukan audit pendalaman sesuai permintaan Direksi dan/atau Komisaris, sebagai tindak hasil lanjut audit rutin yang berpotensi mengandung indikasi pelanggaran dan/atau kecurangan apabila diperlukan.
-
-

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Senior Manager Audit Internal dan Manajemen Risiko yang mengemban tugas sebagai Kepala Satuan Audit Internal memiliki tanggung jawab untuk:

- Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan menggunakan metodologi berbasis risiko (risk-based) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan tersebut diserahkan untuk disetujui oleh Direktur Utama;
- Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama serta melaporkan pelaksanaan pemeriksaan kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit;

Internal Audit Charter

The IPCC Internal Audit Charter has been prepared and adopted by the Board of Directors and Board of Commissioners since April 22 2022, in accordance with the provisions of POJK 56/2015. This charter is a guideline and framework for all internal auditors in carrying out their duties and responsibilities.

Role and function of Internal Audit

The role and function of Internal Audit include:

- Assist the President Director and/or Board of Commissioners in carrying out supervision by explaining operationally both the planning and implementation of audits, as well as monitoring audit results;
- Evaluate all divisions in the Company's operational management;
- Provide suggestions for improvements and objective information regarding audit results in the form of audit results reports and submit them to the President Director, Board of Commissioners and auditees;
- Providing internal company consulting services to provide added value and improve the quality of control, risk management and corporate governance, as long as it does not affect the independence and objectivity of SPI, and is supported by adequate resources;
- Monitor audit results and report periodically to the President Director and Board of Commissioners;
- Conduct in-depth audits as requested by the Directors and/or Commissioners, as a follow-up to routine audits that have the potential to contain indications of violations and/or fraud if necessary.

Internal Audit Duties and Responsibilities

The Senior Manager of Internal Audit and Risk Management who carries out duties as Head of the Internal Audit Unit has responsibility for:

- Prepare an Annual Supervision Work Program using a risk-based methodology and submit the Annual Supervision Work Program for approval to the President Director;
- Carry out the Annual Supervision Work Program which has been approved by the President Director and report the implementation of the audit to the President Director and/or the Board of Commissioners through the Audit Committee;

- Menjaga profesionalitas auditor dengan pengetahuan, keterampilan, dan etika yang diperlukan;
- Melaporkan rangkuman hasil pemeriksaan secara periodik kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
- Memberikan jasa konsultasi kepada manajemen di mana internal auditor tidak menjalankan tanggung jawab manajemen, misalnya menilai kecukupan pengendalian internal dari suatu sistem/proses yang akan diimplementasikan;
- Melaksanakan program evaluasi kualitas Satuan Pengawasan Internal. Hasil pelaksanaan program evaluasi dilaporkan kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
- Berkoordinasi dengan fungsi kontrol dan pengawasan lainnya (misalnya auditor eksternal);
- Melakukan audit investigasi atas aktivitas yang berindikasi kecurangan dan melaporkan hasil investigasi tersebut kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Wewenang Audit Internal

Dalam mengemban tugasnya, Audit Internal berwenang untuk:
- Memiliki akses tak terbatas ke seluruh Divisi, dokumen (baik fisik dan elektronik), properti, dan personil yang terkait dengan penugasan audit;
- Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi pemeriksaan, memilih obyek pemeriksaan, menentukan ruang lingkup pemeriksaan, serta menetapkan teknik pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan;
- Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil auditee saat melaksanakan pemeriksaan dan tenaga ahli lainnya, baik yang berasal dari internal PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk maupun dari pihak eksternal;
- Memiliki akses untuk berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
- Mendapat perlindungan dari Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya apabila menerima ancaman dari pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi maupun segala macam tuntutan dari pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas audit.

- Maintain the professionalism of auditors with the necessary knowledge, skills and ethics;
- Report a summary of audit results periodically to the President Director and/or Board of Commissioners through the Audit Committee;
- Providing consulting services to management where the internal auditor does not carry out management responsibilities, for example assessing the adequacy of internal control of a system/process to be implemented;
- Implement a quality evaluation program for the Internal Monitoring Unit. The results of the implementation of the evaluation program are reported to the President Director and/or the Board of Commissioners through the Audit Committee;
- Coordinate with other control and supervision functions (eg external auditors);
- Conduct investigative audits on activities that indicate fraud and report the results of these investigations to the President Director and/or Board of Commissioners through the Audit Committee.

Internal Audit Authority

In carrying out its duties, Internal Audit has the authority to:
- Have unlimited access to all Divisions, documents (both physical and electronic), property and personnel related to audit assignments;
- Allocate resources, determine the frequency of inspections, select inspection objects, determine the scope of inspections, and determine the inspection techniques required to achieve inspection objectives;
- Obtain the necessary assistance from auditee personnel when carrying out inspections and other experts, both from internal PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk and from external parties;
- Have access to communicate directly with the Board of Commissioners through the Audit Committee;
- Receive protection from the President Director and/or Board of Commissioners in carrying out their duties if they receive threats from other parties which could affect independence or all kinds of demands from other parties related to the implementation of audit duties.

Kedudukan Audit Internal dalam Struktur Organisasi

Kedudukan fungsi Audit Internal dalam struktur organisasi melekat pada Divisi Audit Internal dan Manajemen Risiko yang berkedudukan langsung di bawah level Direktur Utama. Dalam hal ini, Senior Manager Audit Internal dan Manajemen Risiko sebagai pemimpin Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Audit Internal melaporkan hasil pengawasan internal Perusahaan langsung kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris Cq. Komite Audit. Struktur organisasi Audit Internal ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. HK.56/1/5/IKT-21 tanggal 1 April 2021 tentang Struktur Organisasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

The Position of Internal Audit in the Organizational Structure

The position of the Internal Audit function in the organizational structure is attached to the Internal Audit and Risk Management Division which is located directly below the level of the President Director. In this case, the Senior Manager of Internal Audit and Risk Management as the leader of Internal Audit is directly responsible to the President Director. Internal Audit reports the results of the Company's internal supervision directly to the President Director and/or Board of Commissioners Cq. Audit Committee. The organizational structure of Internal Audit is stipulated in Directors' Decree No. HK.56/1/5/IKT-21 dated April 1, 2021 concerning the Organizational Structure of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.



Dalam rangka menjaga kesinambungan implementasi GCG di Perseroan, Audit Internal perlu melakukan koordinasi dengan Komite Audit, terutama terkait dengan pembahasan temuan-temuan audit yang diperoleh dan rencana tindak lanjut perbaikan yang diperlukan sehingga proses pencapaian tujuan organisasi Perseroan tidak terganggu.

In order to maintain the continuity of GCG implementation in the Company, Internal Audit needs to coordinate with the Audit Committee, especially regarding the discussion of audit findings obtained and follow-up plans for necessary improvements so that the process of achieving the Company's organizational goals is not disrupted.

Pihak Yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Kepala Audit Internal yang dijabat oleh Senior Manager Audit Internal dan Manajemen Risiko, diangkat dan diberhentikan langsung oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan komisaris.

Party Who Appoints and Dismisses the Head of Internal Audit

The Head of Internal Audit, held by the Senior Manager of Internal Audit and Risk Management, is appointed and dismissed directly by the President Director with approval from the Board of Commissioners.

Komposisi Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal No. HK.56/1/5/IKT-21 Tanggal 1 April 2021 tentang Struktur Organisasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Internal Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dipimpin oleh Senior Manager Audit Internal dan Manajemen Risiko yang dibantu oleh oleh dibantu oleh 3 (Tiga) orang Staff. Adapun komposisi personal Internal Audit per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Komposisi Audit Internal per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Internal Audit Composition

Based on the Decree of the Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal No. HK.56/1/5/IKT-21 Dated April 1, 2021 concerning the Organizational Structure of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, in carrying out its duties and responsibilities, Internal Audit of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk is led by the Senior Manager of Internal Audit and Risk Management who is assisted by assisted by 3 (three) staff. The personal composition of Internal Audit as of 31 December 2023 is as follows:

The composition of Internal Audit as of 31 December 2023 is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
Kamal Akhyar	Senior Manager Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Manajemen Risiko Senior Manager of the Internal Audit Unit (SPI) and Risk Management	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (PERSERO) No. KP.10.02/1/1/1/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 1 Januari 2023 Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (PERSERO) No. KP.10.02/1/1/1/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 1, 2023
Sumardinah	Senior Asisten Audit Internal Senior Assistant of Internal Audit	Surat Keputusan Direksi No. KP.428/1/3/IKT-21 tanggal 5 Agustus 2021 Board of Directors Decree No. KP.428/1/3/IKT-21 dated August 5, 2021
Muhammad Wahyu Okto Riendi	Senior Asisten Auditor Internal Senior Assistant Internal Auditor	KP.10.02/2/11/2/PPSD/PPSD/PLMT-23 Tanggal 02 November 2023 KP.10.02/2/11/2/PPSD/PPSD/PLMT-23 Date November 02, 2023
Suhendra	Junior Auditor	KP.10.02/3/11/1/RKTK/SDMA/PLND-23 Tanggal 03 November 2023 KP.10.02/3/11/1/RKTK/SDMA/PLND-23 Date November 03, 2023

Profil Senior Manager Audit Internal dan Manajemen Risiko

Profile of Senior Manager of Internal Audit and Risk Management

Kamal Akhyar
Senior Manager Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Manajemen Risiko
Senior Manager of Internal Audit Unit (SPI) and Risk Management

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, 48 tahun, domisili di Medan, Indonesia Indonesian citizen, 48 years old, domiciled in Medan, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (PERSERO) No. KP.10.02/1/1/1/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 1 Januari 2023 Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (PERSERO) No. KP.10.02/1/1/1/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 1, 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Sumatra Utara (1998) 2. Magister Sains dari Universitas Sumatra Utara (2005) 3. Magister Manajemen Transportasi dari Universitas Trisakti (2010) 1. Bachelor of Economics majoring in Management from Universitas Sumatra Utara (1998) 2. Master of Science from Universitas Sumatra Utara (2005) 3. Master of Transportation Management from Universitas Trisakti (2010)
Riwayat Karier Work Experience	1. Staf Kepala Urusan Umum Cabang Pelabuhan Belawan (1999) 2. Staf Umum Junior pada Divisi Umum Cabang Belawan (1999-2002) 3. Staf Penataan Administrasi Pesonalia Direktorat Pum Kantor Pusat (2002-2003) 4. Staf Pelatihan dan Pengembangan SDM Junior Tingkat I pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Organisasi dan SDM Kantor Pusat (2003-2005) 5. Asisten Manajer Personalia Cabang Pelabuhan Dumai (2005-2010) 6. Manajer Umum Cabang Pelabuhan Tanjung Balai Karimun (2010-2014) 7. Staf Bidang *Project Management Office* (PMO) Pengelolaan Alur PT Oiltanking di Cabang Pelabuhan TBK Senior pada Kantor Pusat (2014) 8. Sekretaris *Project Management Office* (PMO) Pengelolaan Alur Pelayaran (2014-2016) 9. Pengawas Bidang Khusus pada Satuan Pengawasan Internal Kantor Pusat (2016-2019) 10. Wakil Kepala Satuan Pengawasan Internal Kantor Pusat (2019-2020) 11. *Deputy Senior Vice* President SPI Pengawasan SDM dan Umum (2020-2021) 12. *Vice President* Pengendalian Internal Supporting SPI pada Subholding Pelindo Multi Terminal (2021-2022) 1. Staff of Head of General Affairs of the Belawan Port Branch (1999) 2. Junior General Staff at the Belawan Branch General Division (1999-2002) 3. Personnel Administration Structuring Staff of the Central Office Public Works Directorate (2002-2003) 4. Junior HC Training and Development Staff Level I in the Head Office Organizational and HR Planning and Development Sector (2003-2005) 5. Assistant Personnel Manager Dumai Port Branch (2005-2010) 6. General Manager of Tanjung Balai Karimun Port Branch (2010-2014) 7. Project Management Office (PMO) Staff for Flow Management at PT Oiltanking at TBK Port Branch Senior at Head Office (2014) 8. Secretary of Project Management Office (PMO) Shipping Flow Management (2014-2016) 9. Special Field Supervisor at the Head Office Internal Monitoring Unit (2016-2019) 10. Deputy Head of Internal Monitoring Unit at Head Office (2019-2020) 11. Deputy Senior Vice President SPI for HR and General Supervision (2020-2021) 12. Vice President Internal Control Supporting SPI at Pelindo Multi Terminal Subholding (2021-2022)

Riwayat Pelatihan
Training History

1. Latihan Ketrampilan Manajemen Tingkat Dasar (1996)
2. Manajemen Sumber Daya Manusia (1999)
3. Manajemen Perkantoran (2000)
4. Seminar Corporate Culture & Leadership (2001)
5. Meningkatkan Efektivitas Fungsi Supervisor (2001)
6. Merancang Program Pelatihan (2002)
7. Perencanaan Strategik (2002)
8. Penataran Dosen Mata Kuliah Ekonomi Islam (2004)
9. Internal QMS Auditor (2005)
10. Seminar Sistem Transportasi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Nasional (2008)
11. *Workshop Organization Development and Principle of Human Capital Management* (2009)
12. Pengawasan Alur Pengelolaan PT Oiltanking di Cabang Pelabuhan TBK (2014)
13. Pelatihan Legal Drafting (2010)
14. Workshop Coaching and Counseling (2010)
15. Workshop Recruitment System and Organizational Design (2010)
16. Forum Komunikasi Petugas Pelayanan Pimpinan di Kementerian Perhubungan (2010)
17. Certified Human Capital Professional (2011)
18. Port Management Course for Managers (2011)
19. Sosialisasi AVSEC Awareness International Airport (2012)
20. Sosialisasi Polis Asuransi PT Pelabuhan I (Persero) (2013)
21. Sosialisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sektor Transportasi (2013)
22. Diklat QIA Dasar 1 Angkatan A-262 (2017)
23. Diklat QIA Dasar 2 Angkatan A-242 (2017)
24. Diklat LPFA Fraud Audit 1 (2017)
25. Diklat QIA Lanjutan 1 Angkatan A-222 (2018)
26. Diklat QIA Lanjutan 2 Angkatan A-212 (2019)

1. Basic Management Skills Training (1996)
2. Human Capital Management (1999)
3. Office Management (2000)
4. Corporate Culture & Leadership Seminar (2001)
5. Increasing the Effectiveness of Supervisory Functions (2001)
6. Designing Training Programs (2002)
7. Strategic Planning (2002)
8. Lecturer Training in Islamic Economics Courses (2004)
9. Internal QMS Auditor (2005)
10. Seminar on Transportation Systems in Supporting National Economic Growth (2008)
11. Workshop on Organization Development and Principles of Human Capital Management (2009)
12. Supervision of PT Oiltanking Management Flow at TBK Port Branch (2014)
13. Legal Drafting Training (2010)
14. Coaching and Counseling Workshop (2010)
15. Recruitment System and Organizational Design Workshop (2010)
16. Communication Forum for Leadership Service Officers at the Ministry of Transportation (2010)
17. Certified Human Capital Professional (2011)
18. Port Management Course for Managers (2011)
19. AVSEC Awareness International Airport Socialization (2012)
20. Socialization of PT Pelabuhan I (Persero) Insurance Policy (2013)
21. Socialization of the Community Satisfaction Index in Improving the Quality of Public Services in the Transportation Sector (2013)
22. Basic QIA Training 1 Batch A-262 (2017)
23. Basic QIA Training 2 Batch A-242 (2017)
24. LPFA Fraud Audit Training 1 (2017)
25. Advanced QIA Training 1 Batch A-222 (2018)
26. Advanced QIA Training 2 Batch A-212 (2019)

Independensi Audit Internal

Perseroan dapat memastikan bahwa seluruh Audit Internal menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen, serta penuh itikad baik. Seluruh personil Audit Internal telah memenuhi syarat independensi sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- Senior Manager Internal Audit dan Manajemen Risiko dan pegawai Divisi Internal Audit dan Manajemen Risiko tidak diperkenankan:
- Mempunyai wewenang atau tanggung Jawab operasional langsung atas kegiatan yang diaudit;
- Terlibat dalam mengambil keputusan dalam kegiatan operasional;
- Jika Senior Manager Internal Audit dan Manajemen Risiko diharapkan memiliki peran dan/atau tanggung jawab di luar audit internal, kerangka pengaman (safeguards) akan dibuat untuk membatasi terjadinya penurunan independensi dan obyektivitas.
- SPI harus memiliki ketentuan atau prosedur yang mengatur pelaksanaan penugasan audit yang mampu menjaga objektivitas auditor dan Senior Manager Internal Audit dan Manajemen Risiko atas objek yang diaudit.

Internal Audit Independence

The Company can ensure that all Internal Audits carry out their duties and responsibilities professionally and independently, and in good faith. All Internal Audit personnel have fulfilled the independence requirements in accordance with applicable regulations, as described below:

- Senior Manager of Internal Audit and Risk Management and employees of the Internal Audit and Risk Management Division are not permitted:
- Has direct operational authority or responsibility for audited activities;
- Involved in making decisions in operational activities;
- If the Senior Manager of Internal Audit and Risk Management is expected to have roles and/or responsibilities outside of internal audit, safeguards will be created to limit the decline in independence and objectivity.
- SPI must have provisions or procedures that regulate the implementation of audit assignments that are able to maintain the objectivity of the auditor and the Senior Manager of Internal Audit and Risk Management over the object being audited.

Kualifikasi dan Sertifikasi Audit Internal

Untuk mendukung profesionalitas dan kompetensi Audit Internal, Perseroan mendukung dan memberikan fasilitas bagi seluruh auditor internal untuk mengikuti sejumlah pelatihan dan program sertifikasi.

Hingga 31 Desember 2023, auditor internal Perseroan sudah memiliki sertifikasi profesi yang relevan dengan bidang audit internal, antara lain:

Internal Audit Qualifications and Certification

To support the professionalism and competence of Internal Audit, the Company supports and provides facilities for all internal auditors to take part in a number of training and certification programs.

Until 31 December 2023, the Company's internal auditors already have professional certification relevant to the field of internal audit, including:

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
Kamal Akhyar	Senior Manager Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Manajemen Risiko Senior Manager of the Internal Audit Unit (SPI) and Risk Management	Sertifikasi QIA (Lanjutan) QIA Certification (Advanced)
Sumardinah	Senior Asisten Audit Internal Senior Assistant of Internal Audit	Sertifikasi QIA (Lanjutan) QIA Certification (Advanced)
Muhammad Wahyu Okto Riendi	Senior Asisten Auditor Internal Senior Assistant of Internal Auditor	Qualified Internal Audit (QIA) Qualified Internal Audit (QIA)

Rapat Internal Audit Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

Divisi Internal Audit dan Manajemen Risiko dilibatkan dalam rapat Direksi maupun rapat Direksi Komisaris, khususnya membahas hal-hal strategis perusahaan, pengendalian internal perusahaan, dan tindak lanjut atas temuan audit. Secara rutin, Divisi Audit Internal dan Manajemen Risiko mengadakan rapat koordinasi dengan auditee dan/atau Komite Audit membahas laporan audit dan progres atas tindak lanjut audit.

Pada tahun 2023, pelaksanaan rapat lintas-unit kerja tersebut sudah terlaksana sebanyak 12 (dua belas) kali.

Perencanaan dan Realisasi Aktivitas Audit Internal Tahun 2023

Perencanaan kegiatan audit internal senantiasa mempertimbangkan berbagai jenis informasi perubahan organisasi yang terjadi pada lingkup IPCC dengan menggunakan pendekatan:

- Pendekatan struktur organisasi;
- Pendekatan program; dan
- Pendekatan Proses Bisnis.

Proses perencanaan audit tahunan diatur dalam Prosedur Audit Internal IPCC, yang meliputi hal-hal berikut:

- Memahami proses bisnis;
- Menetapkan audit internal;
- Menetapkan rencana audit;
- Memberikan peringkat audit universe berdasarkan risiko dan frekuensi audit; dan
- Menentukan rencana audit.
-

Program kerja pengawasan tahunan untuk tahun 2023 ditetapkan oleh Kepala Audit Internal dan disetujui oleh Diretur Utama. Program kerja ini berisi rencana kegiatan pengawasan oleh audit Internal yang berfungsi sebagai alat pengendalian pengelolaan tugas-tugas pengawasan dengan menitikberatkan pada *Governance, Revenue Enhancemen*t dan *Cost Effectiveness* serta memberikan rekomendasi yang memiliki nilai tambah (*added value*).

Berikut ini adalah uraian rencana dan realisasi Program Kerja Audit Internal tahun 2023:

Internal Audit Meeting with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee

The Internal Audit and Risk Management Division is involved in Directors' meetings and Directors' and Commissioners' meetings, particularly discussing company strategic matters, company internal control, and follow-up to audit findings. Routinely, the Internal Audit and Risk Management Division holds coordination meetings with auditees and/or the Audit Committee to discuss audit reports and progress on audit follow-up.

In 2023, these cross-work unit meetings will have been held 12 (twelve) times.

Planning and Realization of Internal Audit Activities in 2023

Planning internal audit activities always considers various types of information on organizational changes that occur within the scope of the IPCC by using the approach:

- Organizational structure approach;
- Program approach; And
- Business Process Approach.

The annual audit planning process is regulated in the IPCC Internal Audit Procedures, which include the following:

- Understand business processes;
- Establish internal audit;
- Establish an audit plan;
- Provide audit universe rankings based on risk and audit frequency; And
- Determine the audit plan.

The annual supervisory work program for 2023 is determined by the Head of Internal Audit and approved by the President Director. This work program contains plans for supervisory activities by Internal Audit which function as a control tool for the management of supervisory tasks with an emphasis on Governance, Revenue Enhancement and Cost Effectiveness as well as providing recommendations that have added value.

The following is a description of the plans and realization of the 2023 Internal Audit Work Program:

Rencana Plan	Realisasi Realization
Laporan Manajemen Management Reports	Laporan Triwulanan Tahun 2023 2023 Quarterly Report
Pelaksanaan Audit Audit Implementation	1. Pelaksanaan Audit Rutin Semester II Tahun 2022 2. Pelaksanaan Audit Rutin Semester I Tahun 2023 1. Implementation of Routine Audits Semester II 2022 2. Implementation of Routine Audits Semester I 2023
Monitoring Hasil Audit Monitoring Audit Results	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi audit yang masih pending Completion of follow-up audit recommendations that are still pending
Assistance on External Audito	Pendampingan KAP KAP assistance
Self assesment internal control Self-assessment of internal control	Penilaian Tingkat Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan Tahun 2023 Assessment of the Level of Effectiveness of Company Internal Control in 2023
Peningkatan Kompetensi SDM Increasing HC Competency	Keiukutsertaan Pelatihan dan Seminar Participation in Training and Seminars

Untuk laporan hasil audit dan monitoring audit disampaikan kepada Direktur Utama, Komisaris Utama, Komite audit dan Auditee terkait.

Reports on audit results and audit monitoring are submitted to the President Director, President Commissioner, Audit Committee and related Auditees.

Laporan Pelaksanaan Tugas Audit Internal Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Audit Internal telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Audit yang disusun dengan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko (*risk-based audit*). Berikut ini adalah uraian kegiatan audit yang sudah dilaksanakan Audit Internal, antara lain:

Report of Internal Audit Duties Implementation for 2023

Throughout 2023, Internal Audit has carried out duties and responsibilities as stated in the Audit Annual Supervision Work Program (PKPT) which was prepared using a risk-based audit approach. The following is a description of audit activities that have been carried out by Internal Audit, including:

No.	Kegiatan Activity	Waktu Time	Realisasi Pelaksanaan Implementation Realization
Kegiatan Audit Audit Activities			
1.	Audit Umum & Operasional Semester II Tahun 2022 General & Operational Audit Semester II 2022	Direncanakan dilakukan pada Akhir Desember 2022-Januari 2023. It is planned to be carried out at the end of December 2022-January 2023.	Dilaksanakan Pada 3 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023. Terdapat 7 Objek Audit dengan hasil audit 2 temuan audit dan 8 rekomendasi. Carried out from January 3, 2023 to January 31, 2023. There are 7 audit objects with audit results of 2 audit findings and 8 recommendations.
2.	Audit Umum & Operasional Semester I Tahun 2023 General & Operational Audit Semester I 2023	Direncanakan dilakukan pada Juni 2023-Juli 2023 It is planned to be carried out in June 2023-July 2023	Dilaksanakan Pada 31 Juli 2023 s/d September 2023. Terdapat 7 Objek Audit dengan hasil audit 3 temuan audit dan 15 rekomendasi. Implemented from 31 July 2023 to September 2023. There are 7 audit objects with audit results of 3 audit findings and 15 recommendations.
3.	Audit Khusus Special Audit	*Tentative*	Selama Tahun 2023 belum ada hal-hal khusus yang perlu dilakukan audit. During 2023 there are no special matters that need to be audited.
4.	Monitoring Tindak Lanjut Audit Audit Follow-up Monitoring	Triwulan Quarterly	Dilakukan pelaporan Monitoring Tindak Lanjut Rekomenadi hasil audit Per Triwulan Tahun 2023 Reporting of Monitoring Follow-up Recommendations on audit results per quarter in 2023 will be carried out

No.	Kegiatan Activity	Waktu Time	Realisasi Pelaksanaan Implementation Realization
Kegiatan Non-Audit Non-Audit Activities			
1.	Pelatihan dan Seminar Training and Seminars	*Tentative*	1. Workshop Data Analitik untuk Auditor Internal 2. Sertifikasi Qualified Risk Management Professional (QRMP) 3. Mengikuti Konferensi Auditor Internal Tahun 2023 4. GRC Summit Tahun 2023 "Building Resilient Future Through GRC and ESG" 5. Pelatihan Enterprise Risk Management Fundamentals 6. Mengikuti Seminar Nasional Internal Auditor 2023 1. Data Analytics Workshop for Internal Auditors 2. Qualified Risk Management Professional (QRMP) certification 3. Participate in the 2023 Internal Auditor Conference 4. GRC Summit 2023 "Building Resilient Future Through GRC and ESG" 5. Enterprise Risk Management Fundamentals training 6. Participate in the 2023 National Internal Auditor Seminar
2.	Survei Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan Company Internal Control Effectiveness Survey	Semester II Tahun 2023 Semester II 2023	Survey Efektivitas Pengendalian Internal dilaksanakan pada bulan Desember 2023 dengan hasil skor tercapai 79,93 yang berarti tingkat pengendalian internal dinyatakan Efektif. The Internal Control Effectiveness Survey was carried out in December 2023 with a score of 79.93, which means the level of internal control was declared effective.

Hasil Temuan Audit Internal Tahun 2023

Hasil temuan Audit Internal selama Tahun 2023 beserta rekapitulasi tindak lanjut penyelesaiannya sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Internal Audit Findings Results in 2023

The results of the Internal Audit findings for 2023 along with a recapitulation of the follow-up to their completion up to December 31, 2023 are as follows:

No.	Judul Laporan Hasil Audit (LHA) Title of Audit Result Report (LHA)	Hasil Temuan Findings	Temuan Yang Sudah Ditindaklanjuti Findings That Have Been Followed Up	Temuan Yang Belum Ditindaklanjuti Findings That Have Not Been Followed Up
1.	Laporan Hasil Audit Semester I tahun 2023 Audit Results Report for Semester I 2023	2	2	-
2.	Laporan Hasil Audit Semester II tahun 2023 Second Semester Audit Results Report 2023	3	3	-

Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut Tahun 2022-2023

Recapitulation of Findings and Follow-up for 2022-2023

Tahun Year	Jumlah Temuan Audit Internal Number of Internal Audit Findings		Sisa Temuan Per 31 Desember 2022 Remaining Findings as of December 31, 2022	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations		Sisa Rekomendasi yang belum Ditindaklanjuti Per 31 Desember 2023 Remaining Recommendations that have not been Followed Up as of December 31, 2023
	Sudah Ditindaklanjuti Has been followed up	Dalam Proses Tindak Lanjut In the Follow-up Process		Sudah Ditindaklanjuti Has been followed up	Dalam Proses Tindak Lanjut In the Follow-up Process	
Tahun 2022-Semester I Year 2022-Semester I	2	-	-	11	-	-
Tahun 2022-Semester II 2022-Semester II	2	-	-	8	-	-
Tahun 2023-Semester I Year 2022-Semester I	3	-	-	12	3	-

Penyimpangan Internal

Internal *fraud* adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, karyawan tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Perseroan sehingga mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.

Untuk mencegah terjadinya internal fraud, Perseroan telah menerapkan fungsi audit internal yang efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan. Apabila terdapat hal-hal yang berindikasi penyimpangan/kecurangan (fraud) maka Audit Internal akan segera melakukan audit khusus (investigasi).

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat data penyimpangan internal yang terjadi di Perseroan sepanjang tahun 2022-2023:

Internal Deviation

Internal fraud is deviation/Fraudulent committed by management, permanent and non-permanent employees (honorary and outsourced) related to the Company's work processes and operational activities, thereby affecting the Company's financial condition.

To prevent internal fraud, the Company has implemented an effective internal audit function in all aspects and elements of activities. If there are things that indicate irregularities/fraud, Internal Audit will immediately carry out a special audit (investigation).

In the table below you can see data on internal irregularities that occurred in the Company throughout 2022-2023:

No.	Penyimpangan Internal Internal Deviation	Pengurus Manager		Karyawan Employee	
		2023	2022	2023	2022
1.	Telah diselesaikan Has been completed	0	0	0	0
2.	Dalam proses penyelesaian di internal di IPCC In the process of internal resolution at the IPCC	0	0	0	0
3.	Belum diupayakan penyelesaiannya No solution has been attempted yet	0	0	0	0
4.	Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum It has been followed up through the legal process	0	0	0	0

Program Pengembangan Kompetensi Audit Internal Tahun 2023

Internal Audit Competency Development Program in 2023

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Audit Internal Tahun 2023
Table of Internal Audit Competency Training and Development for 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Waktu Penyelenggaraan Implementation Time	Penyelenggara Organizer
Kamal Akhyar (Senior Manager Audit Internal dan Manajemen Risiko) (Senior Manager of Internal Audit and Risk Management)	Workshop	*Key Risk Indicator*	23-24 Februari 2023 February 23-24, 2023	CRMS
	Pelatihan Training	*Coaching for Corporate* (SM & ASM)	20 Maret 2023 March 20, 2023	Individual Expert
	Workshop	*Strategic Session* BOD-1	10 April 2023	KM Plus bersama SPMT KM Plus with SPMT
	Sertifikasi Certification	*Qualified Risk Management Professional* (QRMP)	19-23 Juni 2023 June 19-23, 2023	PPM Manajemen PPM Management
	Konferensi Conference	Konferensi Auditor Internal (KAI) tahun 2023	5-6 Juli 2023 July 5-6, 2023	YPIA

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Audit Internal Tahun 2023
Table of Internal Audit Competency Training and Development for 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Waktu Penyelenggaraan** Implementation Time	**Penyelenggara** Organizer
	GRC Summit 2023	*Building Reslinet Fture through* GRC *and* ESG	24-25 Agustus August 24-25, 2023	Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA)
	Talk show	*Coffee Connect Day*	24 Oktober 2023 October 24, 2023	PT Pelindo (Persero)
	Seminar Nasional National Seminar	Seminar Nasional Internal Auditor 2023 National Internal Auditor Seminar 2023	6-7 Desember 2023 December 6-7, 2023	YPIA
	Workshop	Competition Through Innovation and Collaboration Indrawan Nugroho (CIAS) & Ary Syamsudin (TTMIN)	11 Desember 2023 December 11, 2023	CIAS & IKT
Sumardinah Senior Asisten Auditor Internal Senior Assistant Internal Auditor	Pelatihan Training	Penyusunan Knowledge Map (Online) Preparation of Knowledge Map (Online)	22 Mei 2023 May 22, 2023	KM Plus
	Workshop	Penyusunan Ide Inovasi IPCC 2023 Preparation of IPCC 2023 Innovation Ideas	25 Mei 2023 May 25, 2023	Professional Consultant & Budaya Professional Consultant & Culture
	Pelatihan Training	Data Analitik untuk Auditor Internal (DAAI) Data Analytics for Internal Auditors (DAAI)	29-30 Mei 2023 May 29-20, 2023	YPIA
	Pelatihan Training	Penyusunan Knowledge Map Bersama KM Plus (Offline) Preparation of Knowledge Map with KM Plus (Offline)	19-20 Juni 2023 June 19-20, 2023	KM Plus
	Konferensi Conference	Konferensi Auditor Internal (KAI) tahun 2023 Internal Auditor Conference (KAI) in 2023	5-6 Juli 2023 July 5-6, 2023	YPIA
	GRC Summit 2023	Building Reslinet Fture through GRC and ESG	24-25 Agustus August 24-25	Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA)
	Talk show	*Coffee Connect Day*	24 Oktober 2023 October 24, 2023	PT Pelindo (Persero)
	Seminar Nasional National Seminar	Seminar Nasional Internal Auditor 2023 National Internal Auditor Seminar 2023	6-7 Desember 2023 December 6-7, 2023	YPIA
	Workshop	Competition Through Innovation and Collaboration Indrawan Nugroho (CIAS) & Ary Syamsudin (TTMIN)	11 Desember 2023 December 11, 2023	CIAS & IKT

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Audit Internal Tahun 2023
Table of Internal Audit Competency Training and Development for 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Waktu Penyelenggaraan** Implementation Time	**Penyelenggara** Organizer
PURI ANDANI Asisten Senior Manager Manajemen Resiko Assistant Senior Manager for Risk Management	Workshop	*Key Risk Indicator*	23-24 Februari 2023 February 23-24, 2023	CRMS
	Pelatihan Training	*Coaching for Corporate* (SM & ASM)	20 Maret 2023 March 20, 2023	Individual Expert
	Pelatihan Training	Penyusunan Knowledge Map (Online) Preparation of Knowledge Map (Online)	22 Mei 2023 May 22, 2023	KM Plus
	Pelatihan Training	Penyusunan Knowledge Map Bersama KM Plus (Offline) Preparation of Knowledge Map with KM Plus (Offline)	19-20 Juni 2023 June 19-20, 2023	KM Plus
	GRC Summit 2023	Building Reslinet Fture through GRC and ESG	24-25 Agustus August 24-25	Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA)
	Pelatihan Training	Coaching & Mentoring oleh Kuncie Coaching & Mentoring by Kuncie	31 Agustus 2023 August 31, 2023	Kuncie Prof. Consultant & IPCC
	Pelatihan Training	Mentoring Coaching Bersama Kuncie Mentoring Coaching with Kuncie	27 September 2023 September 27, 2023	Kuncie Prof. Consultant & IPCC
	Pelatihan Training	Enterprise Risk Management Fundamentals	30-31 Oktober 2023 October 30-31 2023	CRMS Indonesia
	Workshop	Competition Through Innovation and Collaboration Indrawan Nugroho (CIAS) & Ary Syamsudin (TTMIN)	11 Desember 2023 December 11, 2023	CIAS & IKT

Akuntan Publik
Public Accountant

Tidak hanya melaksanakan fungsi audit secara internal, Perseroan juga menerapkan fungsi audit yang dilaksanakan oleh pihak eksternal dari sejumlah instansi yang berwenang, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Dalam konteks audit atas laporan keuangan tahunan untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas, Perseroan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik ("KAP") dan Akuntan Publik ("AP"/Auditor) yang sudah terdaftar di OJK sebagai pihak eksternal yang bekerja secara independen untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan dan memberikan opini atas kesesuaian penyajian laporan keuangan tersebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

MEKANISME PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, mekanisme penunjukan KAP dan/atau AP dilakukan oleh Pemegang Saham, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 27 Juni 2023, ditetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, apabila dianggap perlu termasuk Audit Kinerja, Audit KPI dan Audit Kepatuhan Tahun Buku 2023.

Mekanisme penunjukan KAP tersebut sudah mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit sesuai Surat No. DK/19/06/02/IPCC-23 tanggal 19 Juni 2023.

Not only does the Company carry out audit functions internally, the Company also implements audit functions carried out by external parties from a number of authorized agencies, including the Financial Audit Agency (BPK), the Financial Services Authority (OJK), and the Public Accounting Firm (KAP).

In the context of an audit of annual financial reports to produce quality financial information, the Company uses the services of a Public Accounting Firm ("KAP") and a Public Accountant ("AP"/Auditor) who are registered with the OJK as external parties who work independently to carry out audits. on the Annual Financial Report and provide an opinion on the suitability of the presentation of the financial report with the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia.

MECHANISM FOR APPOINTING A PUBLIC ACCOUNTING FIRM (KAP)

In accordance with the principles of good governance, the mechanism for appointing KAP and/or AP is carried out by Shareholders, through the General Meeting of Shareholders (GMS) by considering proposals from the Board of Commissioners. This is in line with the provisions regulated in POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

At the Annual GMS held on 27 June 2023, the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) was appointed to provide audit services for the Company's Financial Report for the Fiscal Year ending on 31 December 2023 and other periods in the Fiscal Year 2023 for the purposes and interests of the Company, if deemed necessary including Performance Audit, KPI Audit and Compliance Audit for the 2023 Fiscal Year.

The KAP appointment mechanism has taken into account the recommendations provided by the Audit Committee in accordance with Letter No. DK/19/06/02/IPCC-23 dated June 19, 2023

KOORDINASI AKUNTAN PUBLIK DAN KOMITE AUDIT

Direksi dan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Audit Internal mengawasi jalannya proses audit eksternal dan memastikan kelancaran serta kesesuaian pelaksanaan proses audit eksternal dengan standar audit yang berlaku. Selain itu, Komite Audit juga memastikan ketepatan waktu pelaporan audit sesuai waktu yang telah disepakati bersama.

Pemantauan terhadap kinerja Akuntan Publik dan KAP serta progres lainnya terkait audit eksternal juga dibahas dalam rapat Komite Audit yang diikuti juga oleh Audit Internal dan Direksi. Dalam rapat gabungan tersebut umumnya Komite Audit membahas temuan audit yang diperoleh oleh auditor eksternal dan mendiskusikan tindak lanjut yang diperlukan atas temuan tersebut.

LINGKUP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN AUDITOR EKSTERNAL

Dalam proses audit eksternal, manajemen bertanggung jawab atas penyajian dan kebenaran isi laporan keuangan serta menjamin bahwa laporan keuangan tersebut sudah disusun sesuai dengan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Sementara itu, auditor eksternal bertanggung jawab untuk memberikan opini atas kewajaran pelaporan keuangan organisasi, terutama dalam penyajian posisi keuangan dan hasil operasi dalam suatu periode.

PROSEDUR AUDIT EKSTERNAL DAN STANDAR AUDIT

Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja dalam setiap penugasan *assurance* menerapkan prosedur dan Standar sebagai berikut:

- Kompeten, Independen dan Profesional;
- Memiliki Integritas dalam pelaksanaan tugasnya;
- Mempersiapkan strategi audit dan melakukan penilaian risiko;
- Melakukan pengujian untuk mendapatkan bukti audit yang memadai;
- Memastikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- Memberikan pernyataan pendapat (opini) mengenai laporan keuangan secara keseluruhan.

COORDINATION OF PUBLIC ACCOUNTANTS AND AUDIT COMMITTEES

The Board of Directors and Board of Commissioners, assisted by the Audit and Internal Audit Committees, supervise the external audit process and ensure the smoothness and conformity of the implementation of the external audit process with applicable audit standards. Apart from that, the Audit Committee also ensures the timeliness of audit reporting according to the mutually agreed time.

Monitoring of the performance of Public Accountants and KAPs as well as other progress related to external audits is also discussed in Audit Committee meetings which are also attended by Internal Audit and the Board of Directors. In these joint meetings, the Audit Committee generally discusses the audit findings obtained by the external auditor and discusses the necessary follow-up actions regarding these findings.

SCOPE OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND EXTERNAL AUDITORS

In the external audit process, management is responsible for the presentation and correctness of the contents of the financial reports and guarantees that the financial reports have been prepared in accordance with the audit standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI) and the Professional Standards for Public Accountants (SPAP). Meanwhile, the external auditor responsible for providing an opinion on the fairness of the organization's financial reporting, especially in the presentation of financial position and operating results in a period.

EXTERNAL AUDIT PROCEDURES AND AUDIT STANDARDS

Purwantono, Sungkoro, & Surja Public Accounting Firm (KAP) in every assurance assignment applies the following procedures and standards:

- Competent, Independent and Professional;
- Have integrity in carrying out their duties;
- Prepare audit strategies and carry out risk assessments;
- Carrying out tests to obtain adequate audit evidence;
- Ensure that financial reports comply with generally accepted accounting principles;
- Provide a statement of opinion regarding the overall financial report.

DAFTAR AKUNTAN PUBLIK PERIODE 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Sebagai bentuk transparansi informasi, berikut ini disampaikan daftar KAP, Akuntan Publik, dan lingkup jasa yang diberikan, beserta biaya yang telah dibayarkan Perseroan atas jasa audit laporan keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu:

LIST OF PUBLIC ACCOUNTANTS FOR THE LAST 5 (FIVE) YEARS PERIOD

As a form of information transparency, the following is a list of KAPs, Public Accountants, and the scope of services provided, along with the fees paid by the Company for Financial Statement Audit services for the last 5 (five) years, namely:

Tahun Buku Fiscal Year	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	**Nama Auditor** Auditor Name	**Biaya (Rp)** Fee	**Jasa Audit** Audit Services	**Opini Audit** Audit Opinion
2023	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young Global Network)	Moch. Dadang Syachruna	1.265.400.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar dalam semua hal yang material) Unqualified (Fair in all material respects)
2022	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young Global Network)	Moch. Dadang Syachruna	1.176.600.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar dalam semua hal yang material) Unqualified (Fair in all material respects)
2021	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young Global Network)	Moch. Dadang Syachruna	984.500.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar dalam semua hal yang material) Unqualified (Fair in all material respects)
2020	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young Global Network)	Moch. Dadang Syachruna	828.884.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar dalam semua hal yang material) Unqualified (Fair in all material respects)
2019	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young Global Network)	Muhammad Kurniawan	743.380.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar dalam semua hal yang material) Unqualified (Fair in all material respects)
2018	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young Global Network)	Muhammad Kurniawan	682.000.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar dalam semua hal yang material) Unqualified (Fair in all material respects)

JASA LAIN YANG DIBERIKAN PADA TAHUN 2023

Tidak ada jasa lain yang diberikan selain jasa audit laporan keuangan periode 2023.

OTHER SERVICES PROVIDED IN 2023

There are no other services provided apart from financial statements audit services for the 2023 period.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal merupakan sebuah sistem atau prosedur yang diterapkan secara terintegrasi dan melekat pada semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh karyawan. Perseroan menyadari pentingnya penerapan sistem pengendalian internal yang terintegrasi dan menyeluruh agar kegiatan operasional bisnis sehari-hari senantiasa berjalan lancar sehingga proses pencapaian target dan tujuan Perseroan tidak terganggu. Implementasi pengendalian internal yang efektif juga merupakan salah satu bentuk perwujudan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Aktivitas pengendalian internal yang diterapkan di Perseroan bertujuan untuk melindungi aset Perseroan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, mengurangi risiko terjadinya kerugian, mencegah terjadinya fraud atau penyimpangan, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan pencapaian tujuan.

Perseroan melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian internal berkaitan dengan perubahan kondisi internal dan eksternal. Agar kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dapat terus meningkat dari waktu ke waktu, Perseroan secara rutin mengevaluasi efektivitas penerapan pengendalian internal pada semua aspek operasional bisnis dan tingkatan organisasi. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan langkah perbaikan dan penyempurnaan SPI ke depan.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN COSO – INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

Sistem pengendalian internal yang diterapkan di Perseroan mengacu pada standar internasional, yaitu COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) - Internal Control Integrated Framework, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut:

The Internal Control System is a system or procedure that is implemented in an integrated manner and is attached to all actions and activities carried out by the leadership and all employees. The Company realizes the importance of implementing an integrated and comprehensive internal control system so that daily business operations always run smoothly so that the process of achieving the Company's targets and goals is not disrupted. Implementing effective internal control is also a form of embodiment of the principles of Good Corporate Governance.

Internal control activities implemented in the Company aim to protect the Company's assets, ensure the availability of reliable and trustworthy financial reporting, increase the Company's compliance with statutory provisions and regulations, reduce the risk of loss, prevent fraud or irregularities, and increase organizational effectiveness and achievement of objectives.

The Company continuously monitors the effectiveness of internal control in relation to changes in internal and external conditions. So that the quality of the implementation of the Internal Control System (SPI) can continue to improve over time, the Company regularly evaluates the effectiveness of the implementation of internal control at all aspects of business operations and organizational levels. The results of this evaluation are used as a basis for consideration for management to determine steps to improve and refine SPI in the future.

COMPLIANCE OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM WITH COSO - INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

The internal control system implemented in the Company refers to international standards, namely COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) - Internal Control Integrated Framework, as illustrated in the following chart:1. Control Environment

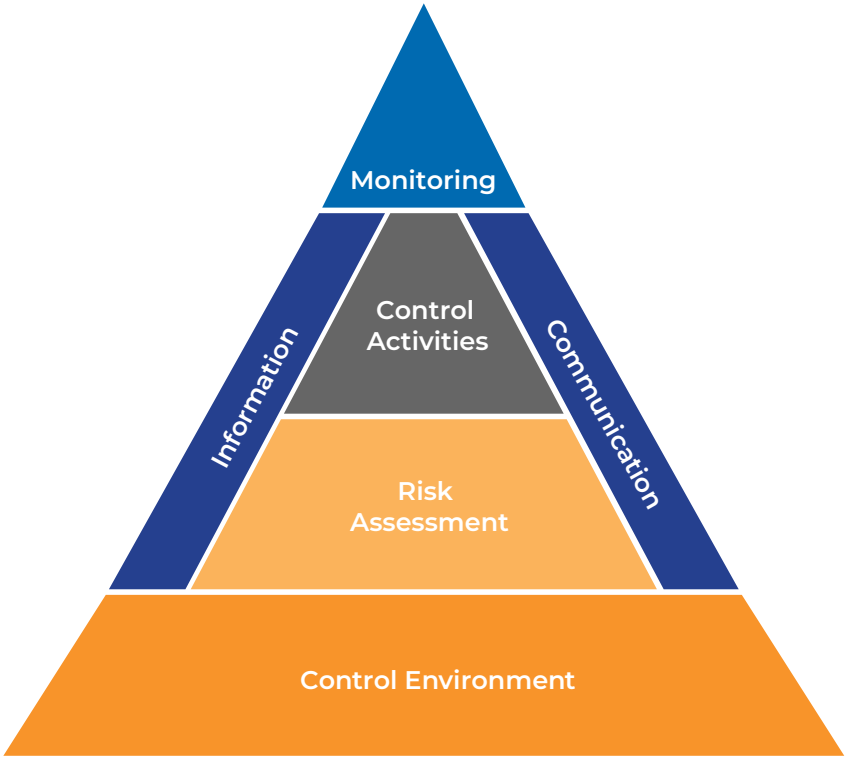

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah dasar dari seluruh komponen sistem pengendalian internal yang mampu membuat suatu organisasi perusahaan menjadi lebih disiplin dan terstruktur. Lingkungan pengendalian mencakup suasana organisasi dan sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian internal di dalam organisasi.

Implementasi di Perseroan:

- Menunjukkan komitmen terhadap Nilai-Nilai Budaya dan Etika.
- Pembentukan Struktur Organisasi yang menggambarkan pemisahan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perusahaan.
- Komitmen terhadap kompetensi.
- Menjunjung tinggi sikap profesionalisme dan akuntabilitas.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dilakukan dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko pada setiap fungsi yang ada di perusahaan. Sebuah penilaian risiko yang komprehensif memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap potensi risiko, sehingga akan memudahkan manajemen dalam merumuskan upaya mitigasi yang diperlukan sehingga akibat yang ditimbulkan dari risiko tersebut dapat diminimalisir.

1. Control Environment

The control environment is the basis of all components of the internal control system which is able to make a company organization more disciplined and structured. The control environment includes the organizational atmosphere and the attitudes of management and employees towards the importance of internal control in the organization.

Implementation in the Company:

- Demonstrate commitment to Cultural and Ethical Values.
- Establishment of an Organizational Structure that describes the separation of functions and duties of each company organ.
- Commitment to competence.
- Upholding an attitude of professionalism and accountability.

2. Risk Assessment

Risk assessment is carried out by identifying, analyzing and evaluating risks in each function in the company. A comprehensive risk assessment allows a better understanding of potential risks, making it easier for management to formulate the necessary mitigation efforts so that the consequences of these risks can be minimized.

Implementasi di Perseroan:
Mengidentifikasi dan menganalisis risiko berdasarkan dampak dan kecenderungan yang dijabarkan dalam suatu matriks risiko yang menggambarkan tingkat risiko pada masing-masing fungsi.

Implementation in the Company:
Identify and analyze risks based on impacts and trends described in a risk matrix that describes the level of risk for each function.

3. Prosedur Pengendalian
Prosedur pengendalian merupakan kebijakan ataupun prosedur yang diciptakan untuk bisa memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan juga mencegah terjadinya kecurangan yang mungkin bisa terjadi.

Implementasi di Perseroan:
- Memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian.
- Menyusun kebijakan dan prosedur maupun petunjuk teknis yang bertujuan untuk mendukung aktivitas pengendalian internal.

3. Control Procedures
Control procedures are policies or procedures created to ensure the achievement of company goals and also prevent fraud that might occur.

Implementation in the Company:
- Select and develop control activities.
- Develop policies and procedures as well as technical instructions aimed at supporting internal control activities.

4. Informasi dan Komunikasi
Perseroan menyadari bahwa informasi yang valid dan akurat sangat diperlukan oleh pihak eksternal. Komunikasi yang dimaksud dalam komponen ini juga melibatkan penyediaan atas suatu pemahaman yang lebih jelas terkait peran dan tanggung jawab seseorang yang berkaitan dengan pengendalian internal pada laporan keuangan.

Implementasi di Perseroan:
- Mengembangkan dan mengontrol Sistem Akuntansi, informasi dan komunikasi baik secara internal maupun eksternal untuk menghasilkan informasi yang relevan.
- Menerapkan sistem informasi dan komunikasi yang relevan, terpercaya, tepat waktu dan konsisten agar dapat memberikan informasi kepada seluruh stakeholders.

4. Information and Communication
The Company realizes that valid and accurate information is needed by external parties. The communication referred to in this component also involves providing a clearer understanding regarding a person's role and responsibilities relating to internal control in financial reports.

Implementation in the Company:
- Develop and control Accounting, information and communication systems both internally and externally to produce relevant information.
- Implement information and communication systems that are relevant, reliable, timely and consistent in order to provide information to all stakeholders.

5. Pengawasan
Pengawasan adalah suatu upaya yang dilakukan manajemen untuk menilai apakah sistem pengendalian internal sudah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui area-area pengendalian internal yang perlu ditingkatkan penerapannya ke depan.

Implementasi di Perseroan:
- Melakukan evaluasi dan kontrol secara terus-menerus.
- Mengkomunikasikan setiap aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

5. Supervision
Supervision is an effort made by management to assess whether the internal control system is running according to plan or not. Supervision is carried out to identify areas of internal control that need to be improved in the future.
Implementation in the Company:

Carry out continuous evaluation and control.
- Carry out continuous evaluation and control.
- Communicate every aspect that needs to be improved.

- Pengelolaan risiko melalui Sistem Pengendalian Internal harus dibuat secara terstruktur dan pendekatan yang digunakan oleh Perseroan mengacu pada pendekatan model Three Lines of Defense (LOD). Dengan pendekatan ini diharapkan setiap risiko dan kontrol dapat dikelola secara efektif oleh fungsi-fungsi terkait yang ada di Perseroan.

- Risk management through the Internal Control System must be structured and the approach used by the Company refers to the Three Lines of Defense (LOD) model approach. With this approach, it is hoped that every risk and control can be managed effectively by related functions in the Company.

Konsep Tiga Lini Pertahanan

Konsep tiga lini pertahanan (*The Three Lines of Defense*) membahas bagaimana tugas-tugas khusus yang terkait dengan risiko dan pengendalian dapat ditugaskan dan dikoordinasikan dalam suatu perusahaan, terlepas ukuran atau kompleksitasnya. Direksi dan Manajemen harus memahami perbedaan penting dalam peran dan tanggung jawab dari tugas-tugas ini dan bagaimana mereka harus secara optimal ditugaskan untuk perusahaan untuk memiliki kemungkinan peningkatan mencapai tujuannya. Adapun model ketiga lini pertahanan digambarkan sebagai berikut:

Three Lines of Defense Concept

The Three Lines of Defense concept discusses how specific tasks related to risk and control can be assigned and coordinated within an enterprise, regardless of its size or complexity. Directors and Management must understand the important differences in the roles and responsibilities of these tasks and how they should be optimally assigned to the company to have an increased likelihood of achieving its goals. The models for the three lines of defense are described as follows:Corporate governance requires appropriate structures and processes that enable: Accountability to Stakeholders for company oversight through integrity, leadership and transparency;

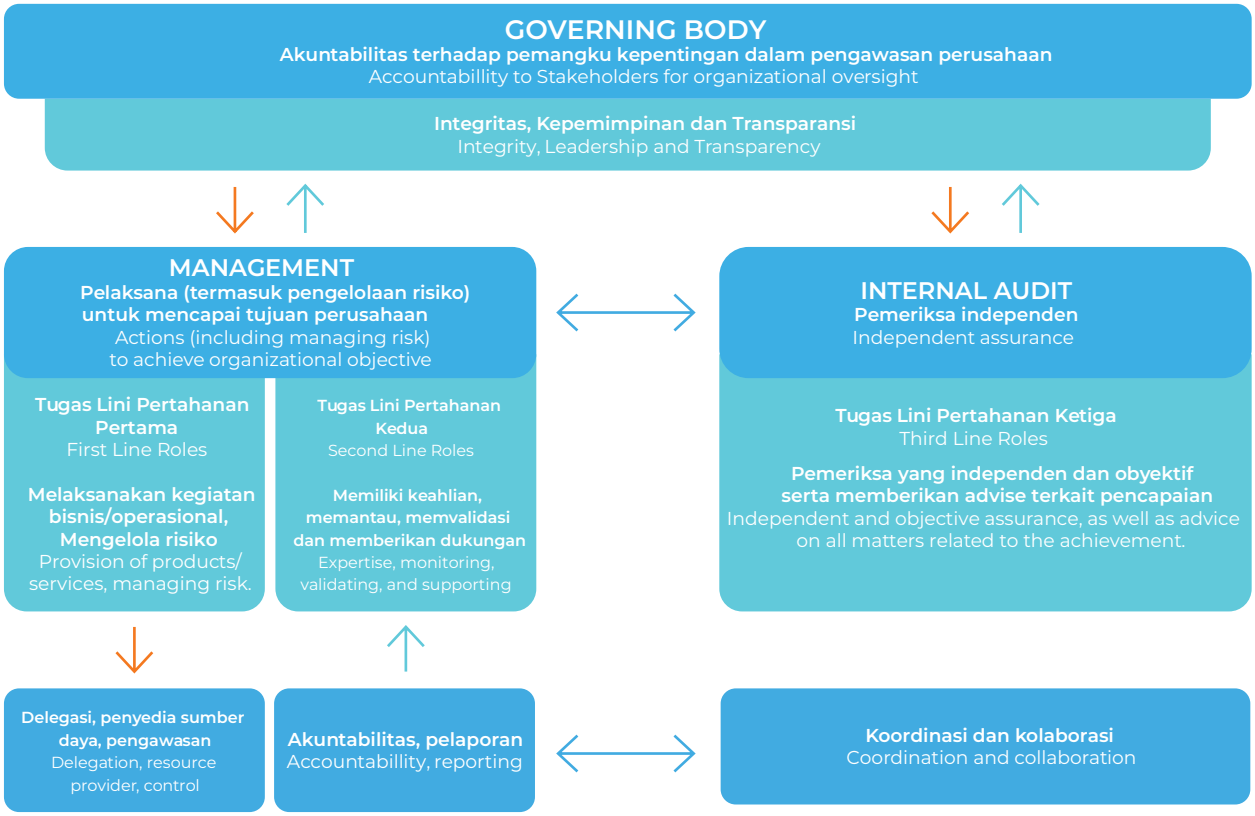

Dalam tata kelola perusahaan membutuhkan ketepatan struktur dan proses yang memungkinkan:

- Akuntabilitas kepada Stakeholder untuk pengawasan perusahaan melalui integritas, kepemimpinan, dan transparansi;
- Tindakan (termasuk mengelola risiko) oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pengambilan keputusan berbasis risiko dan penerapan sumber daya;
- *Assurance* dan saran dari audit internal yang independen untuk memberikan kejelasan dan kepercayaan diri untuk melakukan perbaikan secara terus menerus, melalui pemeriksaan yang teliti dan komunikasi berwawasan.

Manajemen, dan Internal audit memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi semua aktivitas harus diselaraskan dengan tujuan perusahaan. Dasar dari koherensi yang sukses adalah koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang teratur dan efektif.

1. *Governing Body* adalah Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan/atau mengawasi Persroan yang memastikan adanya struktur dan proses yang tepat untuk tata kelola yang efektif, serta visi dan misi Perseroan yang selaras dengan prioritas kepentingan para stakeholders. Peran dari *Governing Body*:
   a. Menentukan visi dan misi Perseroan.
   b. Bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan;
   c. Terlibat dengan *stakeholders* untuk memantau kepentingan mereka dan berkomunikasi secara transparan tentang target perusahaan;
   d. Memupuk budaya yang mempromosikan perilaku etis dan akuntabilitas;
   e. Menetapkan struktur dan proses tata kelola, termasuk komite pembantu sesuai kebutuhan;
   f. Mendelegasikan tanggung jawab dan memberikan sumber daya kepada manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan;
   g. Menentukan selera perusahaan untuk risiko dan melaksanakan pengawasan manajemen risiko (termasuk pengendalian internal);
   h. Menjaga pengawasan terhadap kepatuhan hukum, peraturan, dan etika;
   i. Membentuk dan mengawasi fungsi audit internal yang independen obyektif, dan kompeten.

Corporate governance requires appropriate structures and processes that enable:

- Accountability to Stakeholders for company oversight through integrity, leadership and transparency;
- Actions (including managing risks) by management to achieve corporate objectives through risk-based decision making and application of resources;
- Assurance and advice from independent internal audit to provide clarity and confidence to make continuous improvements, through thorough inspection and insightful communication.

Management and internal audit have different responsibilities, but all activities must be aligned with company goals. The basis of successful coherence is regular and effective coordination, collaboration and communication.

1. Governing Body is the Board of Directors and/or Board of Commissioners who are given responsibility for managing and/or supervising the Company, ensuring that there are appropriate structures and processes for effective governance, as well as the Company's vision and mission which is in line with the priority interests of stakeholders. Role of the Governing Body:
   a. Determine the Company's vision and mission.
   b. Responsible for company supervision;
   c. Engage with stakeholders to monitor their interests and communicate transparently about company targets;
   d. Foster a culture that promotes ethical behavior and accountability;
   e. Establish governance structures and processes, including subsidiary committees as needed;
   f. Delegating responsibilities and providing resources to management to achieve company goals;
   g. Determine the company's appetite for risk and implement risk management oversight (including internal controls);
   h. Maintain oversight of legal, regulatory and ethical compliance;
   i. Establish and supervise an independent, objective and competent internal audit function.

2. Lini Pertahanan Pertama (First Line of Defense):
Manajemen operasional, sebagai lini pertama, adalah pemilik dan pengelola risiko dan pengendaliannya. Manajemen operasional mencakup manajemen pada fungsi-fungsi inti, misalnya fungsi logistik, operasi, komersial, penjualan, dan pelayanan, maupun fungsi-fungsi pendukung, misalnya fungsi human capital, accounting, dan umum (general affairs). Manajemen operasional bertanggung jawab untuk mempertahankan efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan dari aktivitas operasional sehari-hari secara konsisten pada setiap proses yang ada termasuk di dalamnya risiko dan kontrol, sehingga selaras dengan tujuan Perseroan. Manajemen Perseroan memastikan bahwa pada lini pertama memiliki otonomi dalam mengelola risiko dan melakukan penilaian secara mandiri terhadap risiko yang dihadapi serta menjaga kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

   Adapun peran lini pertahanan pertama diuraikan sebagai berikut:
   a. Manajemen operasional pemilik dan mengarahkan tindakan (termasuk mengelola risiko) serta penerapan sumber daya dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi;
   b. Menjaga dialog berkelanjutan dengan Direksi, dan melaporkan hasil yang direncanakan, aktual, dan yang diharapkan terkait dengan tujuan organisasi;
   c. Menetapkan dan memelihara struktur dan proses yang sesuai untuk SOP dan manajemen risiko (termasuk pengendalian internal);
   d. Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan etika.

3. Lini Pertahanan Kedua (Second Line of Defense):
Lini pertahanan kedua merupakan bagian dari manajemen, tetapi memiliki independensi terhadap manajemen operasional (limited independent control) atau bertanggung jawab dalam perusahaan untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur, misalnya Bagian SDM, Kontrol Keuangan, Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Legal. Oleh karenanya, lini kedua juga memberikan tantangan terhadap pengelolaan risiko dan pengendalian oleh lini pertama. Lini kedua pada umumnya juga memberikan pedoman, sistem, pelatihan, dan internalisasi pada manajemen operasional. Fungsi manajemen risiko di dalam Perseroan bersama komite terkait untuk memantau praktik manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen operasional, membantu pemilik risiko dalam mengidentifikasi, menilai, dan melaporkan risiko dan kontrol yang dilakukan. Termasuk compliance terhadap peraturan perundang-undangan.

2. First Line of Defense:
Operational management, as the first line, is the owner and manager of risks and controls. Operational management includes management of core functions, for example logistics, operations, commercial, sales and service functions, as well as supporting functions, for example human capital, accounting and general affairs functions. Operational management is responsible for maintaining the effectiveness of the Internal Control System and consistent implementation of daily operational activities in every existing process, including risks and controls, so that it is in line with the Company's objectives. The Company's management ensures that in the first line it has autonomy in managing risks and carries out independent assessments of the risks faced and maintains compliance with established policies and procedures.

   The role of the first line of defense is described as follows:
   a. Owner's operational management and directing actions (including managing risks) and application of resources in its activities to achieve organizational goals;
   b. Maintain ongoing dialogue with the Board of Directors, and report on planned, actual, and expected results related to organizational goals;
   c. Establish and maintain appropriate structures and processes for SOPs and risk management (including internal controls);
   d. Ensure compliance with laws, regulations and ethics.

3. Second Line of Defense:
The second line of defense is part of management, but has independence from operational management (limited independent control) or is responsible within the company for designing and implementing policies and procedures, for example HR, Financial Control, Risk Management, Compliance and Legal. Therefore, the second line also poses challenges to risk management and control by the first line. The second line generally also provides guidelines, systems, training and internalization of operational management. The risk management function within the Company together with related committees is to monitor risk management practices carried out by operational management, assist risk owners in identifying, assessing and reporting risks and controls implemented. Including compliance with statutory regulations.

Fungsi compliance melakukan kontrol atas aktivitas yang dilakukan di Lini Pertahanan Pertama terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara umum. Beberapa fungsi yang khusus di Perseroan adalah: health and safety, kepatuhan lingkungan, dan whistle blowing system. Sedangkan fungsi keuangan melakukan controllership dengan memonitor isu-isu terkait keuangan, risks dan kepatuhan perusahaan.

The compliance function controls activities carried out in the First Line of Defense related to compliance with laws and regulations in general. Some of the specific functions in the Company are: health and safety, environmental compliance, and whistle blowing system. Meanwhile, the finance function carries out controllership by monitoring issues related to finance, risks and company compliance.

Beberapa tugas lainnya dari Lini Pertahanan Kedua adalah:

a. Menyiapkan risk management framework;
b. Membantu manajemen dalam mengembangkan proses dan kontrol untuk mengelola risiko dan isu di Perseroan;
c. Memberikan training dan panduan atas proses manajemen risiko;
d. Mengingatkan lini pertama atas adanya isu yang penting, perubahan peraturan yang mempengaruhi risiko;
e. Memonitor apakah Sistem Pengendalian Internal sudah memadai, apakah sudah compliance terhadap peraturan dan apakah perbaikan atas kelemahan kontrol dilakukan tepat waktu.

Some of the other tasks of the Second Line of Defense are:

a. Preparing a risk management framework;
b. Assist management in developing processes and controls to manage risks and issues in the Company;
c. Providing training and guidance on the risk management process;
d. Alert the first line to important issues, regulatory changes that affect risk;
e. Monitor whether the Internal Control System is adequate, whether it is in compliance with regulations and whether improvements to control weaknesses are carried out in a timely manner.

4. Lini Pertahanan Ketiga (Third Line of Defense):
Lini pertahanan ketiga adalah fungsi yang memiliki the highest level of independence control yang dimiliki oleh Unit Audit Internal. Internal Auditor adalah pihak yang bersifat independen, memberikan pemastian yang objektif, dan mendampingi perancangan aktivitas untuk memberikan nilai tambah dan pengembangan terhadap operasional perusahaan. Unit Audit Internal membantu perusahaan untuk mencapai sasaran secara sistematis dan melalui pendekatan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, proses tata kelola dan melaporkan setiap temuannya kepada Direktur Utama Perseroan dan/atau Dewan Komisaris serta bekerja sama atau berkoordinasi dengan Komite Audit.

4. Third Line of Defense:
The third line of defense is the function that has the highest level of independence control owned by the Internal Audit Unit. Internal Auditors are parties who are independent, provide objective assurance, and assist in the design of activities to provide added value and development to company operations. The Internal Audit Unit helps the company to achieve targets systematically and through a disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, governance processes and report any findings to the Company's President Director and/or Board of Commissioners as well as collaborating or coordinating with the Audit Committee.

Ruang lingkup pekerjaan Audit Internal antara lain:

a. Meyakinkan bahwa proses di operasi sudah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
b. Adanya Sistem Pengendalian Internal yang memadai atas pengamanan aset (safeguarding assets);
c. Keakuratan dari proses pelaporan keuangan;
d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan dan SOP;
e. Elemen-elemen manajemen risiko;

The scope of Internal Audit work includes:

a. Ensure that the operational processes are running in accordance with established standards;
b. The existence of an adequate Internal Control System for safeguarding assets;
c. Accuracy of the financial reporting process;
d. Compliance with laws and regulations, policies and SOPs;
e. Risk management elements;

f. Meyakinkan bahwa Lini Pertama dan Lini Kedua telah melakukan tugasnya dengan baik;
g. Komponen dan prinsip utama dalam Sistem Pengendalian Internal telah dijalankan dalam setiap proses di Perseroan (termasuk di setiap entitas, departemen, unit dan fungsi operasional);
h. Counterpart Pihak Luar Auditor Eksternal (BPK, KAP, SPI Perusahaan holding).

5. Eksternal:
Auditor Eksternal (BPK dan KAP), Regulator (OJK, Kantor pajak) dan eksternal lainnya yang berada di luar Perseroan, dapat menjadi bagian penting yang secara tidak langsung memiliki peran penting dalam perusahaan keseluruhan tata kelola dan struktur kontrol, berperan dalam mengevaluasi peran lines of defense (LoD) dalam Perseroan secara independen dan obyektif. Pihak Luar ini secara tidak langsung berperan sebagai tambahan LoD bagi Perseroan.

f. Ensure that the First Line and Second Line have done their job well;
g. The main components and principles in the Internal Control System have been implemented in every process in the Company (including in every entity, department, unit and operational function);
h. External Counterparty External Auditor (BPK, KAP, SPI holding company).

5. External:
External Auditors (BPK and KAP), Regulators (OJK, Tax Office) and other external auditors who are outside the Company, can be an important part that indirectly has an important role in the company's overall governance and control structure, playing a role in evaluating the role of lines of defense (LoD) within the Company independently and objectively. This external party indirectly acts as an additional LoD for the Company.

Implementasi Dalam Manajemen Perseroan

Sistem tiga lini dalam penerapan di perusahaan diatur dalam tugas kewenangan sesuai struktur organisasi yang ditetapkan Direksi. Gambaran model tiga lini pertahanan di PT Indonesia Kendaraan Terminal dapat diuraikan sebagai berikut:

Implementation in Company Management

The three-line system implemented in the company is regulated in the duties of authority according to the organizational structure determined by the Board of Directors. An overview of the three lines of defense model at PT Indonesia Kendaraan Terminal can be described as follows:

Governance Body	**Lini Pertama** First Line	**Lini Kedua** Second Line	**Lini Ketiga** Third Line	**Eksternal** External
Oversight	*Owner Risk*	*Control Support*	*Objective Assurance and Advise*	*Independent*
1. Komisaris/Commissioner 2. Direksi/Directors	1. Terminal 2. Teknik/ Technique 3. SDM & Pengadaan/ HR and Procurement 4. Komersial/ Commercial 5. Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary	1. Manajemen Risiko/Risk Management 2. Manajemen Mutu/Quality Management 3. Hukum/Law 4. Sistem Informasi/ Information Systems	SPI	1. BPK/CPC 2. Kantor Akuntan Publik/ Public Accounting Firm 3. Regulator/Regulators

Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

Sistem pengendalian internal yang diterapkan di Perseroan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

Financial and Operational Control System

The internal control system implemented in the Company can be grouped into two parts, namely:

Pengendalian Keungan Financial Control	Pengendalian Administrasi Administrative Control
Pengendalian internal keuangan/akuntansi, meliputi: 1. Menerapkan flow persetujuan dan pemisahan antara fungsi operasi yang jelas terkait alur otorisasi transaksi keuangan. 2. Melakukan pencatatan dan pengawasan fisik atas aset. 3. Menyusun prosedur dan sistem pencatatan keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengamanan aset Perseroan. Financial/accounting internal control, including: 1. Implement approval flows and clear separation between operational functions regarding the flow of financial transaction authorization.Carry out recording and physical supervision of assets. 2. Develop procedures and financial recording systems related to the management and security of the Company's assets.	Pengendalian internal pada aspek operasional, meliputi upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi usaha, melakukan update berkala atas seluruh kebijakan, prosedur dan sistem operasional yang berlaku di Perseroan agar dapat menggambarkan kegiatan operasional yang aktual. Penerapan pengendalian operasional bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara implementasi kegiatan dengan prosedur atau kebijakan internal yang berlaku. Internal control in operational aspects, includes efforts aimed at increasing business efficiency, carrying out regular updates on all policies, procedures and operational systems that apply in the Company in order to reflect actual operational activities. The implementation of operational control aims to ensure conformity between the implementation of activities and applicable internal procedures or policies.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Melalui organ-organ utama maupun organ pendukung yang ada, Perseroan memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan telah mematuhi dan mengindahkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Compliance with Law Regulations

Through existing main and supporting organs, the Company ensures that every business activity carried out by the Company complies with and heeds the applicable provisions and laws.

Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap hasil survei, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan sistem pengendalian internal di Perseroan secara umum mencapai nilai rata-rata sebesar 88,82 dengan tingkat margin error 6,52% atau pengendalian internal berada pada tingkat efektivitas “Sangat Efektif”. Namun dengan memperhatikan perkembangan perseroan saat ini maka masih terdapat ruang untuk melakukan peningkatan sistem pengendalian internal menjadi lebih baik lagi terutama terkait dengan pengintegrasian IT dalam implementasi pengendalian internal pengelolaan Perseroan.

Evaluation of Internal Control Effectiveness in 2023

Based on the results of testing and evaluation that have been carried out on the survey results, it can be concluded that the condition of implementing the internal control system in the Company generally reaches an average value of 88,82 with a margin of error level of 6,52% or internal control is at the “Very Effective” level of effectiveness. However, by paying attention to the company’s current developments, there is still room to improve the internal control system to make it even better, especially in relation to the integration of IT in the implementation of the Company’s internal control management.

No	Aspek Pengendalian Control Aspects	Bobot Nilai Value Weight	Nilai Value	Skor Score	Keterangan Information
1.	Lingkungan Pengendalian Control Environment	30	26,49	88,30	Sangat Efektif Very Effective
LP1	Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etik Commitment to integrity and ethical values	8	7,04	88,04	Sangat Efektif Very Effective
LP2	Independensi direksi terhadap manajemen dalam menjalankan tugas Independence of directors from management in carrying out their duties	5	4,35	86,98	Sangat Efektif Very Effective
LP3	Membuat Struktur, Garis Pelaporan, Otorisasi dan Pertanggungjawaban Create Structure, Reporting Lines, Authorization and Accountability	7	6,60	94,25	Sangat Efektif Very Effective

No	Aspek Pengendalian Control Aspects	Bobot Nilai Value Weight	Nilai Value	Skor Score	Keterangan Information
LP4	Komitmen pada kompetensi Commitment to competence	5	4,22	84,48	Sangat Efektif Very Effective
LP5	Mengembangkan akuntabilitas Develop accountability	5	4,27	85,49	Sangat Efektif Very Effective
2.	Penilaian Risiko Risk Assessment	20	18,35	91.77	Sangat Efektif Very Effective
PR1	Menetapkan tujuan dengan jelas Set goals clearly	5	4,64	92,89	Sangat Efektif Very Effective
PR2	Identifikasi dan Analisa risiko yang memengaruhi pencapaian Identify and analyze risks that affect achievement	5	4,71	94,22	Sangat Efektif Very Effective
PR3	Menilai potensi risiko *fraud* Assess potential fraud risks	5	4,41	88,26	Sangat Efektif Very Effective
PR4	Mengidentifikasi dan menganalisis perubahan yang signifikan Identify and analyze significant changes	5	4,59	91,72	Sangat Efektif Very Effective
3.	Aktivitas Pengendalian Control Activities	20	17,59	87,96	Sangat Efektif Very Effective
AP1	Menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian Establish and develop control activities	10	8,87	88,67	Sangat Efektif Very Effective
AP2	Menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi Establish and develop general control activities over technology	5	4,57	91,38	Sangat Efektif Very Effective
AP3	Menetapkan pengendalian melalui kebijakan dan prosedur Establish controls through policies and procedures	5	4,16	83,10	Sangat Efektif Very Effective
4.	Informasi dan Komunikasi Information and Communication	15	13,94	92,91	Sangat Efektif Very Effective
KI1	Memperoleh, menghasilkan dan menggunakan informasi berkualitas dan relevan Obtain, produce and use quality and relevant information	5	4,57	91,38	Sangat Efektif Very Effective
KI2	Mengkomunikasikan secara internal Communicate internally	5	4,66	93,10	Sangat Efektif Very Effective
KI3	Mengkomunikasikan secara internal Communicate internally	5	4,71	94,25	Sangat Efektif Very Effective
5.	Pemantauan Monitoring	15	12,45	83,00	Sangat Efektif Very Effective
P1	Melaksanakan evaluasi berkala dan berkesinambungan Carry out periodic and continuous evaluations	10	8,92	89,16	Sangat Efektif Very Effective
P2	Mengevaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan defisiensi Evaluate and communicate weaknesses and deficiencies	5	3,53	70,69	Sangat Efektif Very Effective
	Jumlah Total	100	88,82	88,82	Sangat Efektif Very Effective

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Perseroan telah berfungsi, terintegrasi, dan memungkinkan dilakukan perubahan dengan cepat sesuai tuntutan perubahan organisasi dan operasional serta telah berbasis IT. Seluruh jenis pengendalian ada dan berfungsi, baik preventif, detektif, maupun korektif.

This shows that the implementation of the internal control system within the Company is functional, integrated, and allows changes to be made quickly according to the demands of organizational and operational changes and is IT-based. All types of control exist and function, whether preventive, detective, or corrective.

Temuan Internal, Rekomendasi, dan Tindak Lanjutnya

Berdasarkan hasil evaluasi dan tes pengujian terhadap beberapa objek audit dengan periode audit Semester I tahun 2022 dengan audit rating opinion *Above Average Risk*, terdapat beberapa objek audit yang pengendalian internalnya lemah dan berpotensi risiko tinggi sebagai berikut:

Internal Findings, Recommendations, and Follow-up

Based on the results of evaluations and tests on several audit objects for the Semester I 2022 audit period with an Above Average Risk audit opinion rating, there are several audit objects that have weak internal control and have the potential for high risk as follows:

No	Temuan audit Temuan audit	Pengendalian Internal Pengendalian Internal	Jumlah Rekomendasi Jumlah Rekomendasi	Tingkat Prioritas Tingkat Prioritas
1.	Evaluasi Kegiatan Pencucian Unit Toyota Ekspor Tujuan Australia Evaluation of Toyota Export Unit Washing Activities Destination to Australia	Perlu beberapa perbaikan terhadap control pengendalian (Some improvement needed) Some improvements to the controls are needed (Some improvements needed)	4	Menengah Intermediate
2.	Evaluasi Kerjasama Pemanfaatan Peralatan dan Kendaraan Antara PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dengan PT Multi Terminal Indonesia Evaluation of Cooperation in the Utilization of Equipment and Vehicles between PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk and PT Multi Terminal Indonesia	Perlu beberapa perbaikan terhadap control pengendalian (Some improvement needed) Some improvements to the controls are needed (Some improvements needed)	5	Rendah Low
3.	Evaluasi Kecelakaan Kerja di Lingkungan PT IKT Tbk Evaluasi Kecelakaan Kerja di Lingkungan PT IKT Tbk	Perlu banyak perbaikan terhadap control pengendalian (Mayor improvement needed) Perlu banyak perbaikan terhadap control pengendalian (Mayor improvement needed)	6	Tinggi High

Di bawah ini adalah detail ilustrasi hasil audit dengan "Risk Bubbles" yang menggambarkan "likelihood dan impact":

Below is a detailed illustration of the audit results with "Risk Bubbles" which describe "likelihood and impact":

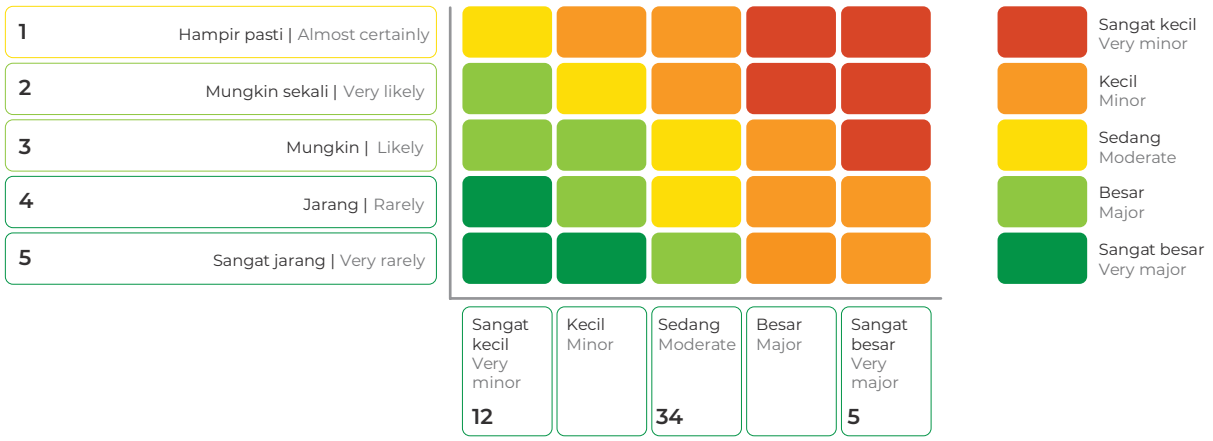

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2023

Secara umum pelaksanaan sistem pengendalian internal perseroan telah dilakukan secara efektif. Hal ini didasarkan pada Laporan hasil penilaian tingkat efektivitas pengendalian internal. Dari Analisa data yang tervalidasi meliputi Lingkungan Pengendalian (Control Environment), Penilaian Risiko (Penilaian Risiko), Aktivitas Pengendalian (Control Activities), Informasi dan Komunikasi (Information and Communication), dan Pemantauan (Monitoring), tingkat efektivitas pengendalian internal mencapai skor 88,82 atau tingkat pengendalian internal dinyatakan "Sangat Efektif".

Pada tahun 2023, Perseroan juga telah mampu menyelesaikan secara tuntas hasil temuan audit periode-periode sebelumnya. Namun dengan memperhatikan perkembangan perseroan saat maka masih terdapat ruang untuk melakukan peningkatan sistem pengendalian internal menjadi lebih baik lagi terutama terkait dengan pengintegrasian IT dalam implementasi pengendalian internal pengelolaan Perseroan.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners regarding the Adequacy of the Internal Control System in 2023

In general, the implementation of the company's internal control system has been carried out effectively. This is based on the report on the results of assessing the level of effectiveness of internal control. From the analysis of validated data including Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring, the level of internal control effectiveness reached a score of 88,82 or the level of internal control is declared "Very Effective".

In 2023, the Company was also able to completely resolve the audit findings of previous periods. However, by paying attention to the company's current developments, there is still room to improve the internal control system to make it even better, especially in relation to the integration of IT in the implementation of the Company's internal control management.

Manajemen Risiko
Risk Management

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang kepelabuhanan yang memiliki risiko inherent yang cukup besar, Perseroan berkomitmen untuk mengelola semua risiko secara efektif dan efisien serta memastikan kesinambungan dan risiko pertumbuhan dari bisnis inti yang berkelanjutan melalui pengelolaan risiko secara efektif dan proaktif, dengan berfokus pada risiko yang terpenting. Pengelolaan risiko Perseroan dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko bisnis yang material, IPCC telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Surat Keputusan No. HK.56/1/6/IKT-22 tanggal 22 April 2022. Pedoman manajemen risiko digunakan untuk memastikan bahwa semua level manajemen Perseroan selalu mempertimbangkan aspek pengelolaan risiko dalam menjalankan proses pengambilan keputusan. Kebijakan manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan budaya sadar risiko dengan menetapkan tahapan-tahapan proses standar pengelolaan risiko yang berlaku di Perusahaan.

As a company operating in the port sector which has quite large inherent risks, the Company is committed to managing all risks effectively and efficiently and ensuring the continuity and risk of sustainable growth of its core business through effective and proactive risk management, by focusing on the most important risks. . The Company's risk management is carried out in a coordinated and integrated manner. In supervising and managing material business risks, the IPCC has Risk Management Guidelines stipulated in the Board of Directors Decree No. HK.56/1/6/IKT-22 dated 22 April 2022. Risk management guidelines are used to ensure that all levels of the Company's management always consider risk management aspects in carrying out the decision-making process. The risk management policy aims to increase the risk awareness culture by establishing standard risk management process stages that apply in the Company.

Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan saat ini sudah mengadopsi standar ISO 31000 yang terdiri dari Prinsip Manajemen Risiko, Kerangka Kerja Manajemen Risiko dan Proses Manajemen Risiko. Secara simbolis, Komisaris dan Direksi menandatangi pernyataan Komitmen Bersama Penerapan Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2018, yang secara berkala setiap tahun senantiasa diperbarui.

The Company's Risk Management Guidelines have now adopted the ISO 31000 standard which consists of Risk Management Principles, Risk Management Framework and Risk Management Process. Symbolically, the Board of Commissioners and Board of Directors signed a statement of Joint Commitment to Implementing ISO 31000:2018 Based Risk Management, which is updated periodically every year.

Manajemen Perusahaan, yang terdiri dari Direksi dan Pejabat Senior Manager juga secara berkala menandatangani Komitmen Budaya Sadar Risiko yang secara berkala setiap tahun diperbarui.

The Company's management, consisting of Board of Directors and Senior Managers, also regularly signs the Risk Awareness Culture Commitment which is updated annually.

Komitmen Bersama Penerapan Manajemen Risiko
Joint Commitment to Implementing Risk Management



Pernyatan Komitmen Bersama Penerapan Budaya Sadar Risiko
Statement of Joint Commitment to Implementing a Risk Aware Culture



Untuk menjaga komitmen dan memastikan bahwa kebijakan budaya risiko telah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh manajemen dan *risk owner* maka Perseroan mengadakan kegiatan edukasi dan sosialisasi secara berkesinambungan mengenai manajemen risiko kepada unit-unit kerja.

To maintain commitment and ensure that the risk culture policy is understood and implemented by all management and risk owners, the Company carries out continuous education and outreach activities regarding risk management to work units.

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO IPCC

Pengelolaan manajemen risiko di IPCC melibatkan Divisi Audit Internal dan Manajemen Risiko yang berada di bawah Direktur Utama berdasarkan Peraturan Direksi No. HK.01/16/11/1/AMR/DIRUT/IKT-23 tanggal 16 November 2023 perihal Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dan ditetapkan oleh PT Pelindo Multi Terminal (Subholding) sebagaimana Surat nomor : PW.05.02/29/11/1/RINO/DKMR/PLMT-23 tanggal 29 November 2023 perihal Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

IPCC RISK MANAGEMENT STRUCTURE

Risk management at IPCC involves the Internal Audit and Risk Management Division which is under the President Director based on Board of Directors Regulation No. HK.01/16/11/1/AMR/DIRUT/IKT-23 dated November 16, 2023 concerning the Implementation of Risk Management within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk and stipulated by PT Pelindo Multi Terminal (Subholding) as in Letter number: PW.05.02/ 11/29/1/RINO/DKMR/PLMT-23 dated November 29, 2023 concerning Determination of Risk Categories and Classifications for PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.



1. Struktur organisasi Manajemen Risiko didasarkan pada filosofi bahwa proses Manajemen Risiko yang efektif tercapai apabila perusahaan berhasil membangun komitmen yang kuat dari Direksi dan Dewan Komisaris, serta berhasil mengintegrasikan proses Manajemen Risiko ke dalam seluruh proses bisnis perusahaan.
2. Perusahaan memiliki organ komite di bawah Komisaris yang fungsinya memantau aktivitas pengelolaan manajemen risiko perusahaan.
3. Perseroan menetapkan struktur kuasi di mana setiap unit memiliki Agen Risiko masing-masing (*Risk Agent*) yang ditetapkan pada Surat Keputusan Direksi No. HK.56/1/5/IKT-22 tanggal 7 Februari 2022. Struktur ini bersifat kuasi yang mewakili setiap divisi untuk menjadi Agen Manajemen Risiko.

1. The Risk Management organizational structure is based on the philosophy that an effective Risk Management process is achieved if the company succeeds in building strong commitment from the Board of Directors and Board of Commissioners, and successfully integrates the Risk Management process into all company business processes.
2. The company has a committee organ under the Commissioner whose function is to monitor the company's risk management activities.
3. The Company has established a quasi structure where each unit has its own Risk Agent (Risk Agent) as determined in Directors' Decree No. HK.56/1/5/IKT-22 dated 7 February 2022. This structure is quasi in nature which represents each division to become a Risk Management Agent.

4. Untuk memastikan implementasi dan menjaga proses Manajemen Risiko dapat berjalan secara baik dan dengan pengendalian yang efektif dan efisien, Direksi menetapkan kepala unit yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko perusahaan. Mereka bertugas menjabarkan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management*/"ERM") menjadi pedoman, prosedur, dan instruksi kerja serta melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam penerapannya.
5. Struktur organisasi perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko harus dirancang sedemikian rupa sehingga pemangku risiko, unit yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko perusahaan, dan auditor internal masing-masing harus independen antara satu dengan lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Manajemen Risiko

1. Mengkaji dan merekomendasikan kerangka, falsafah, dan strategi serta program Manajemen Risiko.
2. Mengkaji dan mengembangkan metode identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko.
3. Mengukur dan memonitor eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko maupun per aktivitas fungsional serta dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan.
4. Memonitor dan mengkaji ulang pencapaian target usaha dari segi risiko serta mendukung unit usaha dalam bentuk memberi masukan untuk memitigasi risiko yang dihadapi.
5. Menjadi fasilitator untuk proses implementasi Manajemen Risiko sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang telah diatur di kebijakan.

Peran dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Internal (SPI):

1. Melakukan evaluasi ketaatan dan efektivitas penerapan Manajemen Risiko serta melakukan audit berdasarkan berbasis risiko).
2. Mengawasi dan mengevaluasi kebijakan dan proses Manajemen Risiko secara menyeluruh.
3. Melakukan kaji ulang secara berkala mengenai kecukupan kebijakan dan prosedur.
4. Memastikan bahwa proses Manajemen Risiko telah berjalan dengan baik di seluruh aktivitas perusahaan.
5. Melakukan validasi dan kaji ulang berkala terhadap metodologi pengukuran risiko.

4. To ensure that the implementation and maintenance of the Risk Management process can run well and with effective and efficient control, the Board of Directors appoints a unit head who is responsible for managing company risks. They are tasked with describing Enterprise Risk Management (ERM) policies into guidelines, procedures and work instructions as well as providing guidance and coordination in their implementation.
5. The company's organizational structure related to the implementation of the Risk Management Function must be designed in such a way that risk stakeholders, units responsible for managing company risk, and internal auditors must each be independent of one another.

Duties and Responsibilities of the Risk Management Function

1. Review and recommend Risk Management frameworks, philosophies and strategies and programs.
2. Review and develop risk identification, measurement and control methods.
3. Measure and monitor overall risk exposure, per type of risk and per functional activity and its impact on company profitability.
4. Monitor and review the achievement of business targets in terms of risk and support business units by providing input to mitigate the risks faced.
5. Become a facilitator for the Risk Management implementation process in accordance with the duties and authorities as regulated in the policy.

Roles and Responsibilities of the Internal Audit Unit (SPI):

1. Evaluate the compliance and effectiveness of the implementation of Risk Management and conduct audits on a risk-based basis).
2. Oversee and evaluate Risk Management policies and processes as a whole.
3. Conduct regular reviews regarding the adequacy of policies and procedures.
4. Ensure that the Risk Management process is running well in all company activities.
5. Validate and periodically review the risk measurement methodology.

Manajemen dan Dukungan Kontrol Internal:

Agar tercipta suatu pengendalian internal yang baik, Manajemen Puncak harus:

1. Memastikan tersedianya infrastruktur.
2. Memastikan adanya kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan tepat guna.
4. Memastikan adanya pengelolaan risiko yang efektif di Perseroan.
5. Memastikan terbentuknya budaya risiko pada Perusahaan secara menyeluruh.
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Tujuan utama Sistem Pengendalian Internal adalah:

1. Menjaga dan mengamankan aset perusahaan.
2. Mendapatkan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya.
3. Mengurangi potensi dan dampak kerugian.
4. Meningkatkan peran serta Pemangku Kepentingan.

Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko:

Cakupan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko adalah:

1. Kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat.
2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur.
3. Pemisahan fungsi antara pemangku risiko, divisi Manajemen Risiko, dan audit internal.
4. Struktur organisasi perusahaan.
5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang andal, akurat, dan tepat waktu.
6. Prosedur yang cukup untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
7. Kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap penilaian kegiatan operasional Perseroan.
8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen.
9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai dari seluruh transaksi, temuan audit serta tanggapan dan tindak lanjut dari auditee.
10. Pengawasan dan kaji ulang secara berkala terhadap kejadian risiko dan perlakuannya.

Internal Control Management and Support:

In order to create good internal control, Top Management must:

1. Ensure the availability of infrastructure.
2. Ensure compliance with applicable laws and regulations.
3. Ensure the availability of complete, accurate, timely and effective financial and management information.
4. Ensure that there is effective risk management in the Company.
5. Ensure the formation of a risk culture in the Company as a whole.
6. Increase compliance with applicable regulations.

The main objectives of the Internal Control System are:

1. Maintain and secure company assets.
2. Get accurate and reliable financial reports.
3. Reduce the potential and impact of losses.
4. Increase stakeholder participation.

Internal Control and Risk Management:

The scope of the internal control system in implementing Risk Management is:

1. Suitability of the internal control system to the type and level of inherent risk.
2. Determination of authority and responsibility for monitoring compliance with policies and procedures.
3. Separation of functions between risk stakeholders, Risk Management division and internal audit.
4. Company organizational structure.
5. Reliable, accurate and timely reporting of financial and operational activities.
6. Adequate procedures to ensure compliance with Law Regulations.
7. Effective, independent and objective review of the assessment of the Company's operational activities.
8. Adequate testing and review of the management information system.
9. Complete and adequate documentation of all transactions, audit findings as well as responses and follow-up from auditees.
10. Regular monitoring and review of risk events and their treatment.

Komposisi Keanggotaan dan Sertifikasi

Per 31 Desember 2023, jumlah karyawan yang bertugas di Divisi Audit Internal dan Manajemen Risiko berjumlah 5 (Lima) orang, termasuk 1 (satu) orang di antaranya adalah Kepala Divisi Audit Internal dan Manajemen Risiko. Dari jumlah tersebut, relevan dengan manajemen risiko dan 1 (satu) karyawan alih daya sebagai administrator.

Anggota Divisi Manajemen Risiko aktif mengikuti sejumlah program sertifikasi yang relevan dengan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kualifikasi mereka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka sehingga diharapkan pengelolaan risiko Perseroan juga dapat berjalan efektif karena dikelola oleh orang-orang yang berkompetensi tinggi.

Berikut ini adalah beberapa jenis sertifikasi yang sudah dimiliki oleh sejimlah anggota Divisi Audit Internal dan Manajemen Risiko hingga akhir 2023, antara lain:

Membership Composition and Certification

As of December 31, 2023, the number of employees serving in the Internal Audit and Risk Management Division amounted to 5 (Five) people, including 1 (one) of whom is the Head of the Internal Audit and Risk Management Division. From this number, it is relevant to risk management and 1 (one) outsourced employee as administrator.

Members of the Risk Management Division actively participate in a number of certification programs relevant to risk management. This aims to increase their knowledge and qualifications to support the smooth implementation of their duties and responsibilities so that it is hoped that the Company's risk management can also run effectively because it is managed by highly competent people.

The following are several types of certification that a number of members of the Internal Audit and Risk Management Division already have by the end of 2023, including:

Sertifikasi/Pelatihan Certification/Training	**Jumlah Karyawan** Number of Employees
Qualified Risk Management Profesional (QRMP)	2
Key Risk Indicator	3
Enterprise Risk Management – Fundamental	25
GRC Summit 2023	2
Basic Governance Risk Compliance	3

Budaya dan Sosialisasi Manajemen Risiko

Agar implementasi manajemen risiko dapat berjalan efektif pada setiap jenjang organisasi, maka proses sosialisasi dan edukasi budaya sadar risiko menjadi salah satu tahapan penting yang tidak boleh terlewatkan. Oleh karena itu, Direksi menaruh perhatian besar terhadap upaya-upaya pengembangan budaya sadar risiko secara berkala dan berkelanjutan kepada seluruh karyawan, di antaranya dilakukan melalui:

1. Penyelenggaraan program pelatihan dan workshop berkala yang difokuskan pada pemahaman konsep-konsep dasar manajemen risiko, identifikasi risiko, evaluasi risiko, serta strategi mitigasi risiko yang relevan dengan berbagai unit kerja dalam organisasi.
2. Penandatanganan Komitmen dan Penerapan Budaya Risiko oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran Senior Manager sebagai bentuk komitmen tertulis dalam menerapkan dan memperkuat budaya sadar risiko dalam seluruh aktivitas perusahaan.

Risk Management Culture and Socialization

So that the implementation of risk management can run effectively at every level of the organization, the process of socializing and educating a risk awareness culture is an important stage that must not be missed. Therefore, the Board of Directors pays great attention to efforts to develop a risk awareness culture periodically and continuously for all employees, including through:

1. Organizing regular training programs and workshops that focus on understanding the basic concepts of risk management, risk identification, risk evaluation, and risk mitigation strategies that are relevant to various work units in the organization.
2. Signing of the Commitment and Implementation of Risk Culture by the Board of Commissioners, Directors and all Senior Managers as a form of written commitment to implementing and strengthening a risk awareness culture in all company activities.

3. Pelaporan profil risiko secara rutin yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko-risiko utama yang dihadapi perusahaan, yang dilakukan secara berkala dan transparan kepada Direksi dan Senior Manager untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
4. Koordinasi, sosialisasi, dan monitoring implementasi manajemen risiko di setiap Divisi secara rutin setiap Triwulan, yang melibatkan dialog antara Divisi Manajemen Risiko dengan unit kerja terkait guna memastikan pemahaman yang tepat tentang kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penilaian kinerja dalam implementasinya.
5. Pemberian penghargaan dan pengakuan kepada risk agent dan Divisi terbaik dalam hal pelaporan dan implementasi manajemen risiko pada unit kerja masing-masing sebagai bentuk dorongan dan apresiasi atas kontribusi dalam memperkuat budaya sadar risiko dalam perusahaan.

3. Regular risk profile reporting which includes identification, evaluation and mitigation of the main risks faced by the company, which is carried out regularly and transparently to the Board of Directors and Senior Managers to support appropriate decision making.
4. Coordination, socialization and monitoring of risk management implementation in each Division on a regular basis every quarter, which involves dialogue between the Risk Management Division and related work units to ensure proper understanding of risk management policies and procedures as well as performance assessment in their implementation.
5. Giving awards and recognition to the best risk agents and divisions in terms of reporting and implementing risk management in their respective work units as a form of encouragement and appreciation for their contribution in strengthening the risk awareness culture within the company.

Implementasi Rencana Kerja Manajemen Risiko 2023

Implementation of Risk Management Work Plan in 2023

Rencana Kerja Work Plan	**Realisasi Rencana Kerja** Work Plan Realization
Implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi Implementation of Integrated Risk Management	1. Sudah disusun Program Budaya Risiko 2. Sudah disusun Perencanaan kompetensi personil man risk 3. Kebijakan dan komitmen manajemen risiko telah disahkan tahun 2023 4. SK Risk Appetite dan Tolerance 2023 telah disahkan 5. SK Risk Agent 2023 telah disahkan 6. Pedoman Manajemen Risiko 2023 dan SOP telah disahkan dan disosialisasikan 7. Penyusunan Profil Risiko Triwulanan 8. Penyusunan Risk Based Budgeting 2024 9. Self Assessment dan Pemenuhan Dokumen GRC tahun 2023 1. A Risk Culture Program has been prepared 2. Man risk personnel competency planning has been prepared 3. Risk management policies and commitments have been ratified in 2023 4. The 2023 Risk Appetite and Tolerance Decree has been ratified 5. Decree of Risk Agent 2023 has been ratified 6. The 2023 Risk Management Guidelines and SOPs have been approved and socialized 7. Preparation of Quarterly Risk Profile 8. Preparation of Risk Based Budgeting 2024 9. Self Assessment and Fulfillment of GRC Documents in 2023
Penilaian risk maturity level Risk maturity level assessment	1. Workshop RMI 2. Self Assessment RMI 1. RMI Workshop 2. RMI Self-Assessment
Penyusunan Key Risk Indicator (KRI) sebagai Early Warning System Preparation of Key Risk Indicators (KRI) as an Early Warning System	Penyusunan draft KRI yang dikaitkan dengan Risiko Signifikan Preparation of KRI drafts associated with Significant Risks

Program Pelatihan Manajemen Risiko

- Telah tersertifikasinya Organ Dekom, Direksi, Unit Manajemen Risiko
- Pelatihan Key Risk Indicator
- Pelatihan Risk Fundamental –ISO 31000-2018 bagi Unit Manajemen Risiko dan Risk Agent
- Keikutsertaan dalam GRC Summit setiap Tahun
- Pelatihan Basic GRC dan Workshop Self Assessment GRC

Program Budaya Manajemen Risiko

- Penyusunan Risiko pada Aplikasi PRIMA
- Pelaksanaan Program 1-RO (1 jam bersama Risk Owner)
- Penyusunan Risiko, RKM & Anggaran 2024
- Berlabuh – Sosialisasi Risk Appetite dan Risk Awareness

- Pelaksanaan Program Raising (Risk Agent Intensive Meeting)
- Lomba Poster Risiko
- Sosialisasi Pedoman dan SOP Manajemen Risiko
- Survey Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Risk Management Training Program

- The BoC Organs, Board of Directors, Risk Management Unit have been certified
- Key Risk Indicator Training
- Fundamental Risk Training – ISO 31000-2018 for Risk Management Units and Risk Agents
- Participation in the GRC Summit every year
- Basic GRC Training and GRC Self Assessment Workshop

Risk Management Culture Program

- Risk Preparation in the PRIMA Application
- Implementation of the 1-RO Program (1 hour with the Risk Owner)
- Preparation of Risk, RKM & 2024 Budget
- Anchoring – Socialization of Risk Appetite and Risk Awareness

- Implementation of the Raising Program (Risk Agent Intensive Meeting)
- Risk Poster Competition
- Socialization of Risk Management Guidelines and SOPs
- Internal Control and Risk Management Survey

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Penerapan sistem manajemen risiko di IPCC mengacu pada ISO 31000, yang mencakup 11 prinsip manajemen risiko, 5 (lima) elemen kerangka kerja, serta 7 (tujuh) tahap proses pengelolaan risiko sebagaimana tergambar pada skema di bawah ini:

RISK MANAGEMENT SYSTEM

The implementation of the risk management system at IPCC refers to ISO 31000, which includes 11 risk management principles, 5 (five) framework elements, and 7 (seven) stages of the risk management process as depicted in the scheme below:

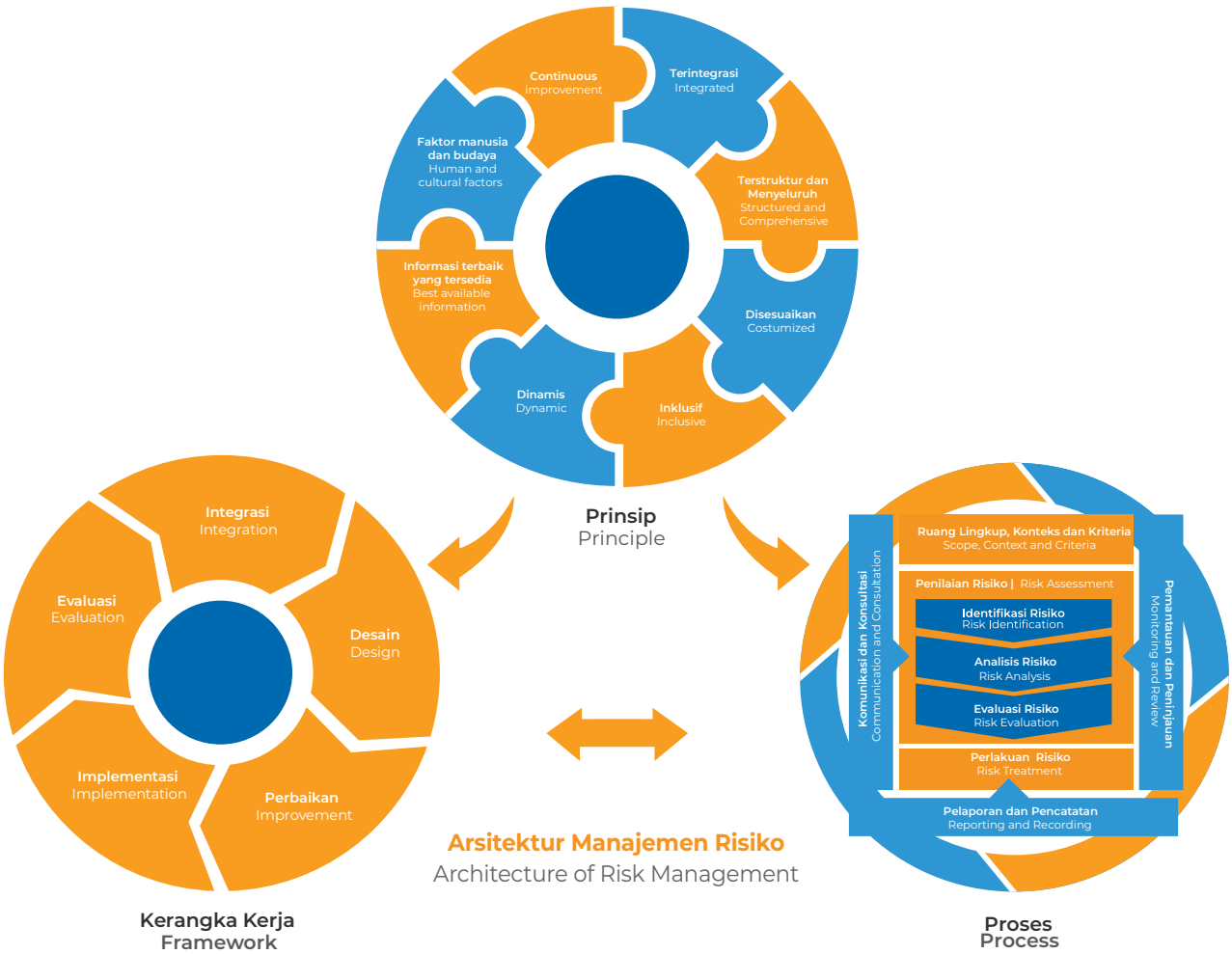

1. Prinsip Manajemen Risiko ISO 31000:2018

1. ISO 31000:2018 Risk Management Principles

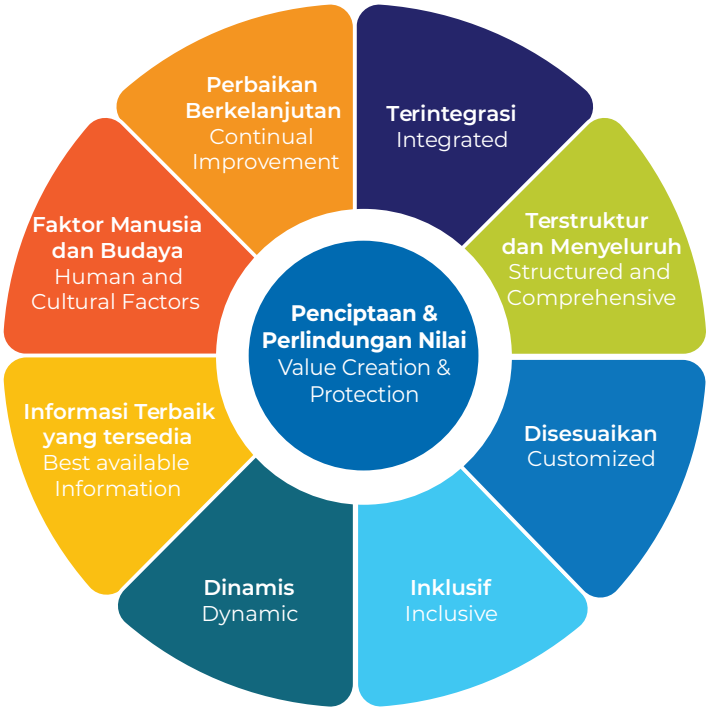

Prinsip manajemen risiko dalam ISO 31000 adalah dasar praktik penerapan manajemen risiko yang menjadi landasan paradigma bagi seluruh risk owner mengenai penerapan manajemen risiko yang benar dan efektif. Tujuan dari manajemen risiko itu sendiri adalah untuk menciptakan dan melindungi nilai.

Perseroan menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi dengan keseluruhan aktivitas perusahaan dengan menggunakan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif sehingga dapat memberikan hasil yang konsisten serta dapat menyesuaikan dengan konteks eksternal dan internal perusahaan. Penerapan manajemen risiko juga dilaksanakan secara inklusif dan dinamis, serta memperhatikan faktor manusia dan budaya. Penerapan manajemen risiko secara berkesinambungan terus ditingkatkan melalui proses pembelajaran.

The risk management principles in ISO 31000 are the basis for the practice of implementing risk management which is the basis for the paradigm for all risk owners regarding the correct and effective implementation of risk management. The purpose of risk management itself is to create and protect value.

The Company implements risk management that is integrated with all company activities using a structured and comprehensive approach so that it can provide consistent results and can adapt to the company's external and internal context. The implementation of risk management is also carried out in an inclusive and dynamic manner, and consider human and cultural factors. The implementation of risk management is continuously improved through a learning process.

Pemahaman yang benar mengenai tujuan dari penerapan manajemen risiko di atas memandu kesadaran seluruh unsur Perseroan mengenai pentingnya penerapan 8 (delapan) prinsip manajemen risiko yang dinilai dapat membentuk karakteristik:

a. Terintegrasi;
b. Terstruktur dan komprehensif;
c. Adaptif/dapat menyesuaikan;
d. Inklusif;
e. Dinamis;
f. Berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
g. Faktor manusia dan budaya; dan
h. Perbaikan berkesinambungan.

A correct understanding of the objectives of implementing risk management above guides the awareness of all elements of the Company regarding the importance of implementing 8 (eight) risk management principles which are considered to form the following characteristics:

a. Integrated;
b. Structured and comprehensive;
c. Adaptive/can adjust;
d. Inclusive;
e. Dynamic;
f. Based on the best information available;
g. Human and cultural factors; And
h. Continuous improvement.

2. Kerangka Manajemen Risiko ISO 31000:2018

2. ISO 31000:2018 Risk Management Framework



Kerangka kerja adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi yang dituangkan dalam kebijakan, prosedur, batas transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

The framework is a structured and systematic risk management system arrangement throughout the organization which is outlined in policies, procedures, transaction limits, authority and other provisions as well as various risk management tools that apply throughout the scope of business activities.

Kerangka manajemen risiko sesuai standar ISO 31000:2018 dimulai dengan pemberian mandat dan komitmen oleh jajaran manajemen puncak. Hal ini menandakan bahwa untuk bisa menerapkan manajemen risiko yang efektif sangat diperlukan dukungan dari para pemangku kepentingan internal organisasi, khususnya keterlibatan dan dukungan pimpinan puncak.

Kondisi ini menggambarkan bahwa pemimpin Perseroan memberikan teladan dan komitmen dalam mengelola risiko melalui kebijakan, wewenang, tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat organisasi yang disesuaikan dengan tujuan organisasi.

Berikut ini adalah 6 (enam) komponen yang menjadi kerangka kerja manajemen risiko Perseroan, yaitu:

a. Kepemimpinan dan Komitmen
   Direksi dan Dewan Komisaris berperan aktif dalam mengawal jalannya implementasi manajemen risiko dan bertugas memastikan bahwa manajemen risiko telah terintegrasi ke dalam seluruh kegiatan organisasi. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus menunjukkan sikap kepemimpinan dan komitmennya terhadap pengelolaan risiko yang efektif, tertuang dalam Komitmen antara Komisaris dan Direksi dan Penuansaan Implementasi Manajemen Risiko antara Direksi dan para Senior Manager.
b. Integrasi
   Integrasi pada kerangka kerja bermakna bahwa manajemen risiko menjadi bagian dan tidak bisa terpisahkan atau menyatu dalam tujuan, tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi, sasaran dan operasi organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, Perseroan menilai proses integrasi manajemen risiko sangat bergantung pada pemahaman terhadap struktur organisasi dan konteks organisasi yang tentunya dikelola pada setiap bagian dari struktur organisasi tersebut mempunyai tanggung jawab untuk mengelola risiko yang dihadapinya. Hal ini tertuang dalam perencanaan risiko tahun yang terintegrasi dengan Sasaran, RKM dan RKAP Perseroan.

The risk management framework according to the ISO 31000:2018 standard begins with the provision of mandates and commitments by top management. This indicates that to be able to implement effective risk management, support from the organization's internal stakeholders is very necessary, especially the involvement and support of top management.

This condition illustrates that the Company's leaders provide an example and commitment in managing risk through policies, authority, duties, responsibilities and accountability at the organizational level that are tailored to the organization's goals.

The following are the 6 (six) components that form the Company's risk management framework, namely:

a. Leadership and Commitment
   The Board of Directors and Board of Commissioners play an active role in overseeing the implementation of risk management and are tasked with ensuring that risk management is integrated into all organizational activities. Each member of the Board of Directors and Board of Commissioners must demonstrate a leadership attitude and commitment to effective risk management, as stated in the Commitment between the Commissioners and Directors and the Graduation of Risk Management Implementation between the Directors and Senior Managers.
b. Integration
   Integration into the framework means that risk management is part and cannot be separated or integrated into the goals, governance, leadership and commitment, strategy, targets and operations of the organization. To achieve this, the Company assesses that the risk management integration process is very dependent on understanding the organizational structure and organizational context, which of course is managed by each part of the organizational structure having the responsibility to manage the risks it faces. This is stated in the year's risk planning which is integrated with the Company's Targets, RKM and RKAP.

c. Desain
Desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen atau struktur. Desain dalam kerangka kerja manajemen risiko mencakup beberapa hal, yaitu (1) pemahaman organisasi dan konteksnya, (2) penegasan komitmen manajemen risiko, (3) penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas, (4) alokasi sumber daya, dan (5) penyiapan komunikasi dan konsultasi. Hal ini tertuang dalam sebuah komitmen, pedoman dan SOP Manajemen Risiko perusahaan tahun 2022.

d. Implementasi
Implementasi atau pelaksanaan dalam kerangka kerja manajemen risiko dilaksanakan setelah desain manajemen risiko dibuat dan ditetapkan. Jika desain manajemen risiko diimplementasikan dengan baik, maka kerangka kerja manajemen risiko dapat memastikan proses manajemen risiko menjadi bagian dari semua kegiatan dalam organisasi risiko yang dilakukan setiap Triwulan dan dilaporkan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

e. Evaluasi
Evaluasi dalam kerangka manajemen risiko dilakukan untuk mengukur kerangka kerja manajemen risiko secara berkala terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Hal ini dilaksanakan baik oleh Pemegang Saham maupun Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko yang dilaksanakan setiap Triwulan.

f. Perbaikan
Perbaikan dalam kerangka kerja manajemenrisiko terdiri dari adaptasi dan perbaikan yang berkesinambungan. Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Proses adaptasi suatu organisasi dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan yang terjadi baik pada lingkungan internal maupun eksternal, dengan begitu manajemen dapat mengambil langkah-langkah perbaikan sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini tertuang pada Tinjauan Perubahan yang dilakukan pada setiap dokumen serta pembaharuan komitmen yang dilakukan minimal 1 tahun sekali pada peraturan perusahaan.

c. Design
Design is a plan or design that is carried out before the creation of an object, system, component or structure. Design in a risk management framework includes several things, namely (1) understanding the organization and its context, (2) affirming risk management commitment, (3) determining roles, authority, responsibility and accountability, (4) resource allocation, and (5)) preparation of communications and consultations. This is stated in a commitment, guidelines and SOP for company Risk Management for 2022.

d. Implementation
Implementation or implementation within the risk management framework is carried out after the risk management design is created and determined. If the risk management design is implemented well, the risk management framework can ensure that the risk management process becomes part of all activities within the risk organization carried out every quarter and reported to Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors.

e. Evaluation
Evaluation within the risk management framework is carried out to periodically measure the risk management framework against the objectives, implementation plans, indicators and expected behavior in accordance with the goals of the organization or company. This is carried out by both Shareholders and the Board of Commissioners through the Risk Management Monitoring Committee which is carried out every quarter.

f. Improvement
Improvements in the risk management framework consist of continuous adaptation and improvement. Adaptation is the ability to adjust to the environment. The adaptation process of an organization is carried out by considering changes that occur in both the internal and external environment, so that management can take corrective steps in accordance with environmental changes that occur to achieve organizational goals. This is stated in the Review of Changes made to each document as well as renewal of commitments made at least once a year in company regulations.\

3. Proses Manajemen Risiko ISO 31000:2018

3. ISO 31000:2018 Risk Management Process

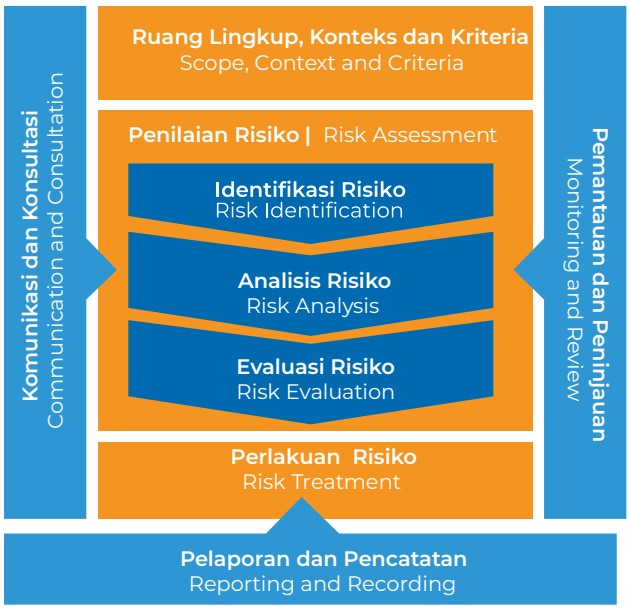

Proses Manajemen Risiko digunakan sebagai pedoman atau acuan agar organisasi dapat menjaga konsistensi pelaksanaan tahapan proses pengelolaan risiko mereka yang dimulai dari penetapan konteks sampai dengan pemantauan, tinjauan, dan pelaporan masing-masing risiko yang dikelola. Berikut ini adalah uraian proses kerja yang dilakukan dalam penerapan manajemen risiko:

a. Komunikasi dan Konsultasi
   Proses komunikasi dan konsultasi ialah proses dalam memahami dan mengkomunikasikan risiko dan strategi pengelolaannya kepada seluruh pemangku kepentingan. Tahapan ini menjadi penting karena penerapan manajemen risiko seharusnya dikembangkan oleh pihak-pihak yang telah paham mengenai risiko yang akan dihadapi perusahaan, sebab manajemen risiko bukanlah tanggung jawab satu atau dua pihak tertentu, tetapi tanggung jawab semua pihak di dalam perusahaan. Proses komunikasi dan konsultasi ini dilakukan baik saat penyusunan risiko tahun berikutnya maupun monitoring pelaksanaan mitigasi risiko.

The Risk Management Process is used as a guideline or reference so that organizations can maintain consistent implementation of the stages of their risk management process starting from determining the context to monitoring, reviewing and reporting each risk being managed. The following is a description of the work process carried out in implementing risk management:

a. Communication and Consultation
   The communication and consultation process is the process of understanding and communicating risks and management strategies to all stakeholders. This stage is important because the implementation of risk management should be developed by parties who understand the risks that the company will face, because risk management is not the responsibility of one or two particular parties, but is the responsibility of all parties in the company. This communication and consultation process is carried out both when preparing risks for the following year and monitoring the implementation of risk mitigation.

b. Menentukan Konteks, Jangkauan, dan Kriteria
Perseroan telah menentukan konteks, jangkauan, dan kriteria dari manajemen risiko. Penentuan kriteria risiko ini dilakukan berdasarkan *risk appetite* dan *tolerance* yang telah ditetapkan perusahaan serta arahan Kantor Pusat yang mana merupakan turunan dari Kementerian BUMN.

c. Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko
Perseroan melakukan identifikasi risiko (*risk identification*) untuk mengidentifikasi sumber risiko (risk causes), peristiwa risiko (risk events), dan dampak risiko (risk impacts) yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam konteks perusahaan. Selain itu, Perseroan juga melakukan analisis risiko (risk analysis) untuk memahami sifat dari risiko dan karakteristiknya termasuk kesesuaian level risiko. Risiko kemudian dievaluasi agar dapat menentukan langkah penanganan risiko (risk treatment) yang diperlukan. Akan hal ini, Perseroan telah memiliki Key Risk Indicators (KRI) yang bertujuan untuk mengukur risk drivers atau risk cause yang dapat digunakan untuk menghubungkan dampak dari risiko dengan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. KRI digunakan untuk memantau level of risk eksposur perusahaan terhadap suatu risiko sebelum kerugian akibat risiko tersebut terjadi. Hal ini tertuang dalam dokumen Kertas Kerja Risiko (KKR) yang di-update setiap Triwulan.

Selain itu, pada tahun 2023 Perseroan akan melakukan penyusunan Early Warning System (EWS) sebagai sebuah sistem yang mempunyai kemampuan untuk memberikan notifikasi peluang atau kesempatan terjadinya potensi risiko bisnis atau deteksi dini terhadap risiko bisnis yang berbasis KRI.

d. Pemantauan dan Pengkajian
Proses monitoring dan review adalah tahapan untuk memastikan bahwa risk assessment dan risk treatment sudah berjalan memadai dan efektif, memberikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

e. Penyimpanan dan Pelaporan
Perseroan menyusun laporan secara tepat waktu, akurat, dan dalam bentuk yang mudah dimengerti. Pelaporan disampaikan oleh Divisi Audit Internal dan Manajemen Risiko kepada Direktur Utama. Perseroan juga memiliki Loss Event Management, sebuah mekanisme untuk mencatat setiap kejadian yang merugikan perusahaan dalam sebuah database. Basis data ini dapat digunakan untuk tools analisis masa depan terutama dalam menentukan ukuran kemungkinan, dampak, dan

b. Determine Context, Scope, and Criteria
The Company has determined the context, scope and criteria for risk management. Determination of risk criteria is carried out based on the risk appetite and tolerance that has been determined by the company as well as the direction of the Head Office which is derived from the Ministry of SOE.

c. Risk Identification and Risk Analysis
The Company carries out risk identification to identify risk sources, risk events and risk impacts that are associated with achieving targets that have been determined in the company context. Apart from that, the Company also carries out risk analysis to understand the nature of risks and their characteristics, including the suitability of risk levels. The risks are then evaluated in order to determine the necessary risk treatment steps (risk treatment). In this regard, the Company has Key Risk Indicators (KRI) which aims to measure risk drivers or risk causes which can be used to relate the impact of a risk to the possibility of that risk occurring. KRI is used to monitor the level of risk of a company's exposure to a risk before losses due to that risk occur. This is stated in the Risk Working Paper (KKR) document which is updated every quarter.

In addition, in 2023 the Company will prepare an Early Warning System (EWS) as a system that has the ability to provide notification of opportunities or opportunities for potential business risks or early detection of KRI-based business risks.

d. Monitoring and Assessment
The monitoring and review process is a stage to ensure that risk assessment and risk treatment have been carried out adequately and effectively, providing feedback and recommendations for necessary improvements.

e. Storage and Reporting
The Company prepares reports timely, accurately and in a form that is easy to understand. Reports are submitted by the Internal Audit and Risk Management Division to the President Director. The company also has Loss Event Management, a mechanism to record every event that is detrimental to the company in a database. This database can be used for future analysis tools, especially in determining the size of the possibility, impact, and range of expected capacities,

jangkauan kapasitas, toleransi, dan selera yang diharapkan. Database ini juga dapat digunakan untuk menganalisa dan digunakan untuk mengembangkan rencana mitigasi yang tepat guna di kemudian hari untuk peristiwa serupa. Hal ini tertuang secara konsisten yang dilaporkan Triwulan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

tolerances, and tastes. This database can also be used to analyze and be used to develop appropriate mitigation plans in the future for similar events. This is stated consistently in quarterly reports to the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders.

Dalam pelaksanaannya proses Manajemen Risiko dibagi menjadi 2 (dua) proses yaitu Proses Strategis dan Taktikal, secara strategis pendekatannya, yaitu dengan top-down dan bottom-up serta menyeluruh (enterprise wide) mencakup kriteria risiko yang sudah ditetapkan.

In its implementation, the Risk Management process is divided into 2 (two) processes, namely the Strategic and Tactical Process, with a strategic approach, namely top-down and bottom-up and comprehensive (enterprise wide) covering predetermined risk criteria.

1. *Top-Down Process*
   Pada setiap periode pembuatan rencana strategis perusahaan dalam bentuk RJPP dan RKAP, direksi akan memberikan arahan kepada seluruh unit untuk target dan capaian sasaran yang diharapkan yang disertai dengan gambaran paparan potensi risiko beserta rencana strategis penanganannya yang mungkin terjadi. Setelah RJP dan RKAP tahun berikutnya untuk dilaporkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang di dalamnya terdapat analisis dan mitigasi risiko-risiko korporat (strategic, operasional, finansial, dan kepatuhan). Profil risiko tahunan disusun oleh unit yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko perusahaan berdasarkan hasil analisis, kajian, dan risk assessment di tingkat korporat dan unit kerja.

1. Top-Down Process
   In each period of making the company's strategic plan in the form of RJPP and RKAP, the board of directors will provide direction to all units regarding the expected targets and target achievements accompanied by a description of potential risk exposures along with strategic plans for handling them that may occur. After the following year's RJP and RKAP, it is to be reported to shareholders and other stakeholders, which includes analysis and mitigation of corporate risks (strategic, operational, financial and compliance). The annual risk profile is prepared by the unit responsible for managing company risk based on the results of analysis, studies and risk assessments at the corporate and work unit levels.

2. *Bottom-Up Process*
   Setiap tahun dan tiga bulan sekali seluruh unit kerja dengan difasilitasi oleh unit yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko perusahaan menyusun dan melaporkan eksposur risiko serta memonitor implementasi mitigasi risiko operasional dengan merujuk analisis risiko dan progres penanganan risiko sebelumnya.

2. Bottom-Up Process
   Every year and every three months, all work units, facilitated by the unit responsible for managing company risk, compile and report risk exposures and monitor the implementation of operational risk mitigation by referring to risk analysis and previous risk management progress.

3. *Tactical Process*
   Proses Manajemen Risiko didasarkan pada proses Manajemen Risiko ISO 31000:2018, mencakup dua kegiatan:

3. Tactical Process
   The Risk Management process is based on the ISO 31000:2018 Risk Management process, including two activities:

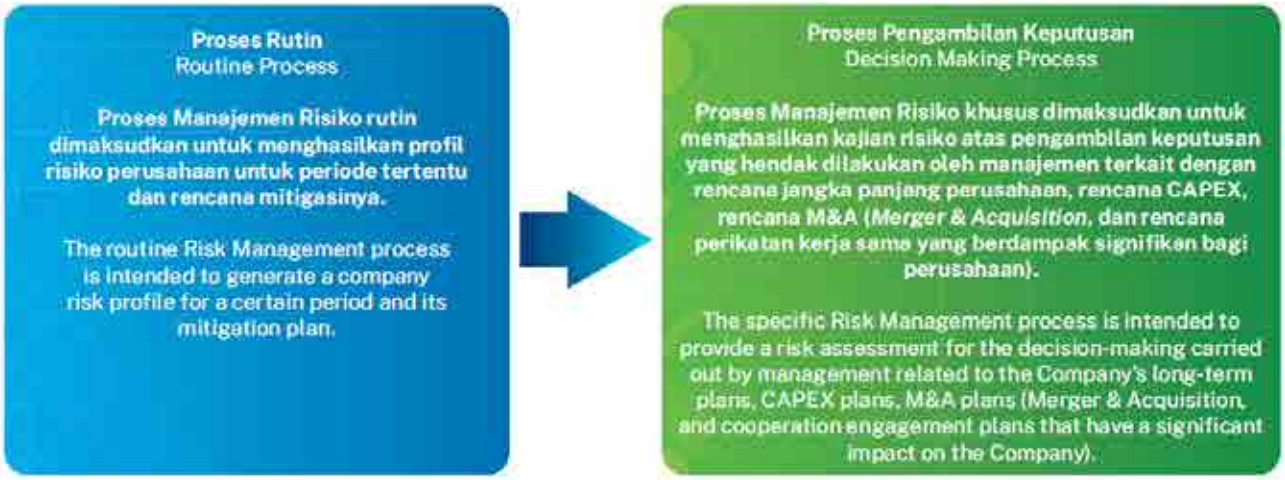

Matriks Risiko Signifikan IPCC 2023

Berlandaskan pada kerangka manajemen risiko berstandar ISO 31000:2018 yang diadopsi Perseroan, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan analisis dan menyusun profil risiko hingga posisi 31 Desember 2023.

Berikut ini adalah perkembangan profil risiko-risiko utama Perseroan dalam kurun 1 (satu) tahun terakhir yang sudah melalui proses pemetaan risiko-risiko utama yang diperoleh/*top-down*, yaitu risiko yang diidentifikasi melalui penilaian tujuan organisasi secara korporat yang belum teridentifikasi melalui pendekatan *bottom-up*, adalah sebagai berikut:

IPCC Significant Risks Matrix 2023

Based on the ISO 31000:2018 standard risk management framework adopted by the Company, the Risk Management and Compliance Division carried out analysis and prepared a risk profile up to 31 December 2023.

The following is the development of the Company's main risk profile in the last 1 (one) year which has gone through a top-down mapping process of the main risks, namely risks identified through assessing corporate organizational objectives that have not been identified through the bottom approach. -up, is as follows:

Matriks Risiko Signifikan IPCC 2023
IPCC 2023 Significant Risks Matrix

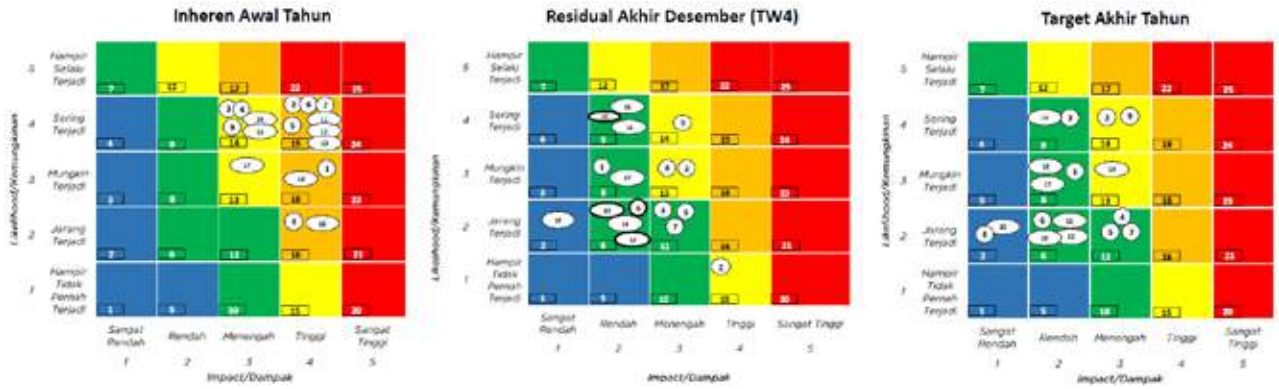

Tabel Matriks Risiko Signifikan IPCC 2023
Table of IPCC Significant Risk Matrix 2023

No	Peristiwa Risiko Risk Events	Risiko Inherent Inherent Risk	Risiko Risidual Residual Risk	Target Akhir Tahun Target at End of Year
1	Kegagalan dalam implementasi manajemen risiko Failure in implementing risk management	18	8	8
2	Defect barang/cargo milik pelanggan Defects in goods/cargo belonging to customers	19	15	14
3	*Cyber Attack* Sistem Informasi Information System Cyber Attack	14	13	9
4	Kegagalan pengembangan produk baru New product development failure	14	11	11
5	Kesulitaan untuk konsolidasi dan evaluasi KPI individu Difficulty in consolidating and evaluating individual KPIs	19	11	11
6	Tidak tercapainya pemenuhan penguatan fundamental SDM dan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya Failure to fulfill the fundamental strengthening of Human Capital and employee needs in accordance with their competencies	19	6	6
7	Kecelakaan kerja Work accident	19	11	11
8	Pencemaran lingkungan Environmental pollution	16	13	2
9	Data pada sistem tidak akurat Data on the system is inaccurate	14	14	14

Tabel Matriks Risiko Signifikan IPCC 2023
Table of IPCC Significant Risk Matrix 2023

No	Peristiwa Risiko Risk Events	Risiko Inherent Inherent Risk	Risiko Risidual Residual Risk	Target Akhir Tahun Target at End of Year
10	Tidak tersedianya lapangan penumpukan sesuai kebutuhan customer Unavailability of stacking yard according to customer needs	18	2	2
11	Penurunan Harga Saham Perusahaan Decrease in Company Share Prices	19	9	6
12	Berkurangnya Image Perusahaan pada dunia usaha dan perdagangan di mata pengguna jasa Reduced Company Image in the business and trade world in the eyes of service users	19	6	6
13	Tidak tercapainya sevice level agreement Failure to achieve service level agreement	19	6	6
14	Keterlambatan dan ketidaksesuaian Pelaporan keuangan Delays and discrepancies in financial reporting	14	9	9
15	Piutang macet dan piutang bermasalah Bad debts and problem receivables	14	9	9
16	Peningkatan Biaya Operasional Increased Operational Costs	16	6	6
17	Tidak Tercapainya Target Traffic/Throughput Traffic/Throughput Targets Not Achieved	13	8	8

Dari tabel diatas diketahui bahwa risiko yang belum mencapai target akhir tahun adalah:

- Defect barang/cargo milik pelanggan;
  Secara Realisasi Penanganan Risiko investasi jaring penahan debu baru sampai tahap Pengadaan. Selain itu kejadian Overspray yang mengakibatkan klaim terhadap unit terakhir bulan Juli dan sampai Desember belum terdapat kejadian klaim akibat overspray;
- *Cyber attack* sistem informasi;
  Sempat terjadi kejadian *downtime* sistem/*cyber* yang mengakibatkan beberapa aplikasi baik operasional dan administrasi tidak dapat diakses. Data monitoring serangan yang terjadi di IKT masih cukup tinggi Data per Oktober-Desesember 2023, didapatkan rata-rata serangan per hari 23.521 serangan. Sedangkan inisiasi pencegahan tambahan terhadap *cyber attack* ini baru akan dilaksanakan tahun 2024 yaitu Instalasi dan Konfigurasi *Security Network* SDWAN sebagai langkah awal pencegahan *cyber*.
- Pencemaran lingkungan;
  Pada Triwulan 3, penilaian risiko sempat mengalami penurunan dikarenakan adanya inisiatif yang dilakukan dalam pengurangan sampah plastic di PT IKT, namun data baku mutu air pada bulan Oktober dan November mengalami peningkatan pada total coliform bulan Oktober terpantau inlet 39,360, outlet STP 30,165 dan *outfall* 32,656, bulan November terpantau inlet 25,040, outlet 22,545 dan outfall 23,055.

From the table above, it is known that the risks of not reaching the year-end target are:

- Defects in customer goods/cargo;
  In terms of actual risk management, investment in dust protection nets has only reached the procurement stage. Apart from that, the Overspray incident resulted in claims on the last unit in July and until December there had been no claims due to overspray;
- Cyber attacks on information systems;
  There was a system/cyber downtime incident which resulted in several operational and administrative applications being inaccessible. Monitoring data for attacks that occur at IKT is still quite high. Data as of October-December 2023 shows an average of 23,521 attacks per day. Meanwhile, the initiation of additional prevention against cyber attacks will only be implemented in 2024, namely Installation and Configuration of SDWAN Network Security as the first step in cyber prevention.
- Environmental pollution;
  In Quarter 3, the risk assessment experienced a decrease due to initiatives carried out to reduce plastic waste at PT IKT, however water quality standard data in October and November experienced an increase in total coliforms in October observed at inlet 39,360, outlet STP 30,165 and outfall 32,656. In November, the inlet was 25,040, outlet 22,545 and outfall 23,055.

Untuk meminimalisir terjadinya peningkatan nilai parameter kualitas air limbah serta meningkatkan efektifitas kinerja IPAL, tim MHP akan memastikan pemeliharaan kinerja IPAL berjalan sesuai dengan SOP (Standard Operational Procedure) ataupun manual book pemeliharaan IPAL. Beberapa mitigasi tambahan yang dapat dilakukan kedepan tahun 2024 :

a. Memastikan tidak adanya benda non-organik di dalam air limbah yang dapat menyebabkan saluran air pipa air limbah tersumbat;
b. Memastikan air limbah tidak mengandung grease/ lemak yang dapat bersumber dari dapur maupun yang mengandung air bekas cucian yang dapat menghambat kinerja IPAL;
c. Melakukan kegiatan seeding bakteri secara rutin dan pemberian dosis klor yang tepat perlu diperhatikan kembali, namun pemberian klor ini tidak boleh berlebihan mengingat klor bersifat toksik.

- Penurunan harga saham Perusahaan.
  Penurunan harga saham Perusahaan belum mencapai target karena melihat harga saham yang cukup fluktuatif ditandai dengan data pergerakan saham di angka 815 (Triwulan 2), Data per 29 September 2023 di level 700 (Triwulan 3), data per 2 Januari 2024 diangka 705 (Triwulan 4) namun secara dampak risiko di bulan-bulan akhir ini sempat mengalami kenaikan, namun begitu aksi korporasi yang telah dilakukan cukup dapat menekan dampak risiko meski secara kejadian risiko masih memungkinkan terjadi. Hal ini juga berkaitan dengan pelaporan kepada OJK agar tidak mengalami keterlambatan agar risiko denda/ pemberitaan negatif tidak meningkat.

Adapun profil risiko serta upaya penanganannya yang telah di lakukan Perusahaan di sepanjang tahun 2023, sebagai berikut:

To minimize the increase in waste water quality parameter values and increase the effectiveness of IPAL performance, the MHP team will ensure that IPAL performance maintenance is carried out in accordance with the SOP (Standard Operational Procedure) or IPAL maintenance manual book. Several additional mitigations that can be carried out in 2024:

a. Ensure that there are no non-organic objects in the waste water that could cause the waste water pipe drain to become blocked;
b. Ensure that waste water does not contain grease/ fat which can come from the kitchen or contain used washing water which can hinder the performance of the IPAL;
c. Carrying out routine bacterial seeding activities and administering the correct dose of chlorine needs to be carefully considered, but the administration of chlorine should not be excessive considering that chlorine is toxic.

- Decrease in the Company's share price.
  The decline in the Company's share price has not yet reached the target because the share price is quite fluctuating as indicated by share movement data at 815 (Quarter 2), data as of 29 September 2023 at level 700 (Quarter 3), data as of 2 January 2024 at 705 (Quarter 4).) however, in terms of the risk impact in recent months there has been an increase, however, the corporate actions that have been carried out are sufficient to reduce the impact of risk even though in terms of risk events it is still possible to occur. This is also related to reporting to the OJK so that there are no delays so that the risk of fines/negative publicity does not increase.

The risk profile and efforts to handle it that the Company has carried out throughout 2023 are as follows:

Profil Risiko 2023 dan Upaya Mitigas
Risk Profile and Mitigation Efforts in 2023

Risiko Kepatuhan Compliance Risk	
Peristiwa Risiko Risk Events	Kegagalan dalam implementasi manajemen risiko Failure in implementing risk management
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	· Penyusunan Program Budaya Risiko · Manpower Planning Risiko · Updating Tata Kelola Risiko (Risk Appetite & Tolerance, Komitmen/Kebijakan, Pedoman, SOP · Asistensi dan Penyusunan Laporan Manajemen Risiko · Penyusunan Usulan RKAP Bidang Manajemen Risiko Tahun 2024 · Implementasi GRC secara menyeluruh · Preparation of a Risk Culture Program · Manpower Risk Planning · Updating Risk Governance (Risk Appetite & Tolerance, Commitment/Policy, Guidelines, SOP · Assistance and preparation of risk management reports · Preparation of Proposed RKAP for Risk Management in 2024 · Comprehensive implementation of GRC

Profil Risiko 2023 dan Upaya Mitigas
Risk Profile and Mitigation Efforts in 2023

Risiko Kepatuhan Compliance Risk	
Progres Penanganan Handling Progress	100%

2. Risiko Disrupsi Proses Bisnis 2. Risk of Business Process Disruption	
Peristiwa Risiko Risk Events	Defect barang/cargo milik pelanggan Defect b Defects in goods/cargo belonging to customers arang/cargo milik pelanggan
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	• Pekerjaan jaring penahan overspray di Sisi Selatan Lapangan E : • Penambahan jumlah cover mobil untuk kargo di Lapangan E1-E6 (estimasi awal 2000 cover) Pembuatan Jaring Debu Temporary di Galangan DKB • Pembuatan Berita Acara Kesepakatan antara IKT & DKB terkait pemasangan jaring debu di galangan DKB untuk mencegah over spray • Pembuatan desain jaring debu temporary & penentuan lokasi yang • disepakati • Pengerjaan fisik jaring debu temporary. Pemasangan jaring debu temporary di lokas i yang disepakati • Overspray containment net work on the South Side of Field E: • Increase in the number of car covers for cargo in Field E1-E6 (initial estimate 2000 covers) Making Temporary Dust Nets at the DKB Shipyard • Making Minutes of Agreement between IKT & DKB regarding the installation of dust nets at the DKB yard to prevent over spray • Making a temporary dust net design & determining the agreed location • Physical work on temporary dust nets. Installation of temporary dust nets at agreed locations
Progres Penanganan Handling Progress	35%

3. Risiko Keamanan Jaringan Network Security Risks	
Peristiwa Risiko Risk Events	Cyber Attack Sistem Informasi Information System Cyber Attack
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Pemeliharaan terhadap serangan cyber attack dilakukan oleh ILCS Maintenance against cyber attacks is carried out by ILCS
Progres Penanganan Handling Progress	100%

4. Risiko Pengembangan Bisnis Baru 4. New Business Development Ri	
Peristiwa Risiko Risk Events	Kegagalan pengembangan produk baru New product development failure
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Strategi & pengembangan Bisnis · Tindak lanjut potensi kerjasama inorganik · Kajian bersama potensi kerjasama dan valuasi · Penandatanganan PKS · Implementasi PKS · Justifikasi kelayakan partisipasi bidding (apabila ada) · Monitoring dan evaluasi · Ekspansi Bisnis rantai logistik (beyod the gate) / CDM Komersial Ekspansi Bisnis Rantai Logistik (beyond the gate) / CDM Business Strategy & development · Follow up on potential inorganic collaboration · Joint study of potential collaboration and valuation · Signing of the PKS · Implementation of PKS · Justification of eligibility for bidding participation (if any) · Monitoring and evaluation · Logistics chain business expansion (beyond the gate) / CDM Commercial Logistics Chain Business Expansion (beyond the gate) / CDM
Progress Penanganan Handling Progress	100%

5. Risiko Perencanaan 5. Planning Risk	
Peristiwa Risiko Risk Events	Kesulitaan untuk konsolidasi dan evaluasi KPI individu Difficulty in consolidating and evaluating individual KPIs
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Pembuatan Sistem Platform KPI Individu IPCC Creation of the IPCC Individual KPI Platform System
Progress Penanganan Handling Progress	100%

6. Risiko Ketersediaan Tenaga Terampil Risk of Availability of Skilled Personnel	
Peristiwa Risiko Risk Events	Tidak tercapainya pemenuhan penguatan fundamental SDM dan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya. Failure to fulfill the fundamental strengthening of human capital and employee needs in accordance with their competencies.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	· Program Pelatihan dan atau sertifikasi Pegawai · Monitoring penggunaan aplikasi e-wallet · Program sharing knowledge · Employee Training and/or certification program · Monitoring the use of e-wallet applications · Knowledge sharing program
Progress Penanganan Handling Progress	100%

7. Risiko HSSE 7. HSSE Risk	
Peristiwa Risiko Risk Events	Kecelakaan kerja Kecelakaan kerja

7. Risiko HSSE 7. HSSE Risk	
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	• Management walkthrough • Patroli harian • Safety talk/ Asakai • Rapat P2K3
Progress Penanganan Handling Progress	100%

8. Risiko Pencemaran Lingkungan 8. Risk of Environmental Pollution	
Peristiwa Risiko Risk Events	Kecelakaan kerja
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	IPCC Green Car Terminal : • Pembahasan konsep Solar Cell • Pengurangan penggunaan plastik untuk area perkantoran • Penggunaan sumber air alternative dari rain water tank IPCC Green Car Terminal : • Discussion of the Solar Cell concept • Reducing the use of plastic in office areas • Use of alternative water sources from rain water tanks
Progress Penanganan Handling Progress	100%

9. Risiko Reputasi Ekuitas Merek 9. Brand Equity Reputation Risk	
Peristiwa Risiko Risk Events	Data pada sistem tidak akurat Data on the system is inaccurate
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Enhancement Sistem Operasional Terminal Internasional dibagi dalam 2 tahap : Tahap pertama sampai dengan desain sistem (2023) • Review SOP dan WI Operasi Terminal Internasional • Business Requirements Document (BRD) • Membuat desain arsitektur TOS Terminal Internasional Tahap kedua development, UAT, Training dan Go Live (2024) Enhancement of the International Terminal Operational System is divided in 2 stages: First stage until system design (2023) • Review SOP and WI for International Terminal Operations • Business Requirements Document (BRD) • Creating an architectural design for the TOS International Terminal at the Second stage of development, UAT, Training and Go Live (2024
Progress Penanganan Handling Progress	100%

10. Risiko Disrupsi Proses Bisnis 10. Business Process Disruption Risk	
Peristiwa Risiko Risk Events	Tidak tersedianya lapangan penumpukan sesuai kebutuhan customer Unavailability of stacking yard according to customer needs
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Percepatan pengeluaran barang dari terminal (cargo impor) Penumpukan diluar TPS Terminal Internasional Acceleration of the release of goods from the terminal (import cargo) Stacking outside the International Terminal TPS
Progress Penanganan Handling Progress	100%

11. Risiko Pergerakan Saham Umum 11. Risk of General Stock Movements	
Peristiwa Risiko Risk Events	Penurunan Harga Saham Perusahaan Decrease in Company Stock Prices
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Peningkatan Persepsi dan Pemahaman Korporasi melalui Komunikasi ke Publik (Energizing Corporate Perception) Increasing Corporate Perception and Understanding through Communication to the Public (Energizing Corporate Perception)
Progress Penanganan Handling Progress	100%

12. Risiko Reputasi Ekuitas Merek 12. Brand Equity Reputation Risk	
Peristiwa Risiko Risk Events	Berkurangnya Image Perusahaan pada dunia usaha dan perdagangan di mata pengguna jasa Reduced Company Image in the business and trade world in the eyes of service users
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Optimalisasi Komunikasi Perusahaan berbasis Digital dengan Penguatan Branding Baru · Pelaksanaan publikasi dan promosi Perusahaan dengan media digital dan kegiatan berskala nasional; · Media Visit, Port Visit, Media Gathering, Sponsorship, Keikutsertaan Penghargaan, Talkshow dan seminar, Kolaborasi Public Figure, physical appearance perusahaan dan lainnya; · Peningkatan awareness masyarakat terhadap brand baru korporat.. Optimizing Digital-based Corporate Communications with Strengthening New Branding · Implementation of Company publications and promotions using digital media and national scale activities; · Media Visit, Port Visit, Media Gathering, Sponsorship, Award Participation, Talkshows and seminars, Public Figure Collaboration, company physical appearance and others; · Increasing public awareness of new corporate brands.
Progress Penanganan Risiko Handling Progress	100%

13. Risiko Disrupsi Proses Bisnis 13. Risk of Business Process Disruption	
Peristiwa Risiko Risk Events	Tidak tercapainya service level agreement Failure to achieve service level agreement
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Implementasi Cardom di Terminal Kendaraan Makassar Implementation of Cardom at the Makassar Car Terminal
Progress Penanganan Risiko Handling Progress	100%

14. Risiko Integritas Proses Pelaporan Keuangan 14. Financial Reporting Process Integrity Risk	
Peristiwa Risiko Risk Events	Keterlambatan dan ketidaksesuaian Pelaporan keuangan Delays and discrepancies in financial reporting
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Integrasi laporan Keuangan untuk wilayah Operasional di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk · Design struktur biaya dan struktur pendapatan sesuai struktur organisasi · Pengkodean nomor Faktur dan COA sesuai struktur yang dibuat · Design template kebutuhan management untuk informasi laporan keuangan · Development pada sistem keuangan Integration of Financial reports for Operational areas at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk · Design the cost structure and income structure according to the organizational structure · Coding the Invoice and COA numbers according to the structure created · Design a template for management needs for information · financial statements · Development of the financial system
Progress Penanganan Handling Progress	100%

15. Risiko Struktur Pendanaan Jangka Pendek 15. Risk of Short Term Funding Structure	
Peristiwa Risiko Risk Events	Piutang macet dan piutang bermasalah Bad debts and non-performing loan
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	• Optimalisasi sistem e-invoice yang dilengkapi dengan e-service • Optimalisasi sistem CMS dan Uper • Monitoring dan pengawasan terhadap piutang melalui kartu piutang yang terjadwal dikomunikasikan kepada customer • Optimization of the e-invoice system which is equipped with e-service • Optimization of CMS and Uper systems • Monitoring and supervision of receivables through scheduled receivable cards communicated to customers
Progress Penanganan Handling Progress	100%

16. Risiko Cost Overrun 16. Cost Overrun Risk	
Peristiwa Risiko Risk Events	Peningkatan Biaya Operasional Increased Operational Costs
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Pengendalian melalui implementation project closing Control through implementation project closing
Progress Penanganan Handling Progress	100%

17. Risiko Penjualan dan Pemasaran 17. Sales and Marketing Risks	
Peristiwa Risiko Risk Events	Tidak Tercapainya Target Traffic/Throughput Traffic/Throughput Targets Not Achieved
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Program pemasaran untuk mendukung pertumbuhan throughput Marketing program to support throughput growth
Progress Penanganan Handling Progress	100%

Tinjauan atas Efektivitas Manajemen Risiko Tahun 2023

Pada tahun 2023, Manajemen telah menetapkan sistem manajemen risiko meliputi komitmen bersama terkait implementasi manajemen risiko dan pembangunan budaya sadar risiko, pedoman manajemen risiko, prosedur dan instruksi kerja manajemen risiko. Untuk meningkatkan kapabilitas SDM dilakukan sosialisasi dan training kepada seluruh pegawai mengenai awareness Implementasi Manajemen Risiko. Disamping itu juga dilakukan integrasi manajemen risiko terhadap Sasaran Perusahaan, KPI Perusahaan, Program Kerja Perusahaan (RKM) dan usulan investasi berbasis manajemen risiko

Review of Risk Management Effectiveness in 2023

In 2023, Management has established a risk management system including joint commitments regarding the implementation of risk management and building a risk awareness culture, risk management guidelines, risk management procedures and work instructions. To increase HR capability, outreach and training is carried out to all employees regarding awareness of Risk Management Implementation. Apart from that, risk management is also integrated into Company Targets, Company KPIs, Company Work Programs (RKM) and risk management-based investment proposals.

Terhadap Pelaporan Profil Risiko pada tahun 2023, tingkat *Inherent Risk* dari total 17 (Tujuh Belas) Risiko Signifikan terdapat 11 (Sebelas) risiko dengan tingkat risiko tinggi (4) dari skala 1-5 (Sangat Rendah – Ekstrim). Pada Residual Risk (akhir tahun), realisasi mitigasi risiko dinilai cukup efektif dimana semua risiko sudah dapat masuk dalam batas toleransi yang ditetapkan, yaitu 1 (Satu) Risiko dalam kategori Sangat Rendah, 12 (Tiga Belas) risiko sudah dalam kategori Rendah dan 4 (Empat) risiko dalam kategori Menengah. Namun pengendalian atas risiko saat ini masih terus diantisipasi sehingga risiko yang ada saat ini tidak terjadi dikemudian hari.

Regarding Risk Profile Reporting in 2023, the Inherent Risk level out of a total of 17 (Seventeen) Significant Risks, there are 11 (Eleven) risks with a high risk level (4) on a scale of 1-5 (Very Low – Extreme). At Residual Risk (end of year), the realization of risk mitigation was considered quite effective where all risks were within the specified tolerance limits, namely 1 (One) Risk was in the Very Low category, 12 (Thirteen) risks were in the Low category and 4 (Four) risks in the Medium category. However, control over current risks is still being anticipated so that current risks do not occur in the future.

Proses tinjauan atas efektivitas manajemen risiko dilakukan secara Triwulanan meliputi semua aspek proses manajemen risiko dengan tujuan:

- Memastikan bahwa pengendaian manajemen risiko bisa berjalan efektif dan efisien;
- Memperoleh informasi yang terupdate untuk peningkatan proses manajemen risiko secara berkelanjutan;
- Memperoleh pelajaran dari perisitiwa risiko yang telah terjadi, trend, kegagalan dan keberhasilan dalam mitigasi risiko;
- Mengidentifikasi kemungkinan adanya risiko baru;
- Mendeteksi perubahan konteks internal dan eksternal perusahaan yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran perusahaan.

The review process for the effectiveness of risk management is carried out on a quarterly basis covering all aspects of the risk management process with the aim of:

- Ensure that risk management controls can run effectively and efficiently;
- Obtain updated information for continuous improvement of risk management processes;
- Obtain lessons from risk events that have occurred, trends, failures and successes in risk mitigation;
- Identify possible new risks;
- Detect changes in the company's internal and external context that influence the achievement of company targets.

Telah dilakukan pengukuran *Risk Maturity Index* (RMI) secara *Self Assessment* yang didampingi oleh Kantor Pusat Pelindo tahun 2023 dengan skor RMI PT IKT sebesar 3,09 kategori *Good Practice A* (dari skala 5) dengan menggunakan 11 aspek pendekatan yaitu integrasi, Perencanaan Kerangka Kerja, Implementasi Evaluasi Perbaikan, Komunikasi Konsultasi, Lingkup Konteks Kriteria, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Perlakuan Risiko, Monitoring Risiko dan Pelaporan. Selanjutnya akan dilakukan pengukuran kembali pada tahun 2024 yang telah dimasukkan programnya dalam Key Perfromance Indicator (KPI) dan Rencana Kerja Manajemen 2024.

The Risk Maturity Index (RMI) measurement has been carried out using a Self Assessment accompanied by the Pelindo Head Office in 2023 with a PT IKT RMI score of 3.09 in the Good Practice A category (on a scale of 5) using 11 aspects of the approach, namely integration, Framework Planning, Implementation of Improvement Evaluation, Consultation Communication, Criteria Context Scope, Risk Identification, Risk Analysis, Risk Evaluation, Risk Treatment, Risk Monitoring and Reporting. Next, measurements will be carried out again in 2024, the program has been included in the Key Performance Indicator (KPI) and the 2024 Management Work Plan.

Di samping itu, sebagai komitmen atas kepatuhan dan implementasi 3 (*Three lines of Model*) telah dilakukan *Self Assessment* GRC dengan skor 2,6 (Managed) dari skala 5 (*Agile*) menggunakan indicator GRC Capability Model 3.5 meliputi aspek *LEARN, ALIGN, PERFORM* dan *REVIEW*.

In addition, as a commitment to compliance and implementation of 3 (Three lines of Model) a GRC Self Assessment has been carried out with a score of 2.6 (Managed) on a scale of 5 (Agile) using the GRC Capability Model 3.5 indicator covering the aspects of LEARN, ALIGN, PERFORM and REVIEW.

Pencapaian di atas selaras dengan Sasaran Perusahaan dimana capaian laba bersih tahun 2023 sebesar 184,68 miliar dari target 105,04 miliar.

The above achievements are in line with the Company's targets, where net profit in 2023 will be 184.68 billion from the target of 105.04 billion.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulannya bahwa implementasi manajemen risiko di Perusahaan telah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran / target perusahaan, serta menambah nilai bagi pemangku kepentingan Perusahaan.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Manajemen telah menunjukkan komitmennya dalam implementasi sistem manajemen risiko dalam bentuk Penetapan:

- Pernyataan Komitmen bersama antara Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi tentang Implementasi Manajemen Risiko yang ditandatangani Desember 2023 untuk periode selama 1 (satu) tahun;
- Pernyataan Komitmen bersama antara Direksi dengan Senior Manager tentang Penerapan budaya sadar risiko Direksi yang ditandatangani Januari 2024 untuk periode selama 1 (satu) tahun;

- Pedoman manajemen risiko sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 yang berisi antara lain Model Tata Kelola Risiko, Klasifikasi Perusahaan berdasarkan Intensitas Risiko, Ketentuan Organ Pengelola Risiko, Taksonomi Risiko, Prinsip, Kerangka, dan Proses Manajemen Risiko sesuai dengan ISO 31000:2018 serta Roadmap Implementasi Manajemen Risiko yang ditandatangani bulan November 2023;

- Prosedur dan instruksi kerja Manajemen Risiko dengan pembaharuan proses yang ditandatangani bulan November 2023;
- Pelaporan Implementasi Manajemen Risiko dalam bentuk pelaporan Profil Risiko baik Operasional maupun Investasi dan disertai data – data kuantitatif secara konsisten setiap Triwulanan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham;
- Terdapat program – program manajemen risiko dalam bentuk Rencana Kerja Manajemen (RKM) dan Budaya Risiko;
- Penetapan struktural organisasi yang menangani manajemen risiko yaitu Subdivisi Manajemen Risiko yang tercantum pada SK Direksi nomor HK.56/1/5/IKT-21 tanggal 1 April 2021 perihal Struktur Organisasi;

From the description above, it can be concluded that the implementation of risk management in the Company has been effective in supporting the achievement of company goals/targets, as well as adding value to the Company's stakeholders.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners or Audit Committee regarding the Adequacy of the Risk Management System

Management has demonstrated its commitment to implementing the risk management system in the form of Determining:

- Statement of Joint Commitment between the Board of Commissioners and the Board of Directors regarding Risk Management Implementation signed in December 2023 for a period of 1 (one) year;
- Joint Statement of Commitment between the Board of Directors and Senior Managers regarding the Implementation of the Board of Directors' risk awareness culture, signed in January 2024 for a period of 1 (one) year;
- Risk management guidelines have been adapted to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-2/MBU/03/2023 which contains, among other things, Risk Governance Model, Company Classification based on Risk Intensity, Provisions for Risk Management Organs, Risk Taxonomy, Principles, Framework and Management Process Risk in accordance with ISO 31000:2018 and the Risk Management Implementation Roadmap signed in November 2023;
- Risk Management procedures and work instructions with process updates signed in November 2023;

- Risk Management Implementation Reporting in the form of Risk Profile reporting both Operational and Investment and accompanied by quantitative data consistently every Quarter to the Board of Commissioners and Shareholders;
- There are risk management programs in the form of Management Work Plans (RKM) and Risk Culture;

- The structural determination of the organization that handles risk management, namely the Risk Management Subdivision as stated in the Directors' Decree number HK.56/1/5/IKT-21 dated 1 April 2021 concerning Organizational Structure;

- Pembentukan Risk Agent yang secara konsisten diperbaharui dengan anggota dari perwakilan setiap Divisi untuk mendukung implementasi manajemen risiko, sebagaimana tertuang dalam SK Direksi HK.01/21/6/1/AMR/DIRUT/IKT-23 tanggal 21 Juni 2023 perihal Pembentukan Agen Manajemen Risiko untuk Implementasi Manajemen Risiko;
- Pelatihan dan sertifikasi di bidang manajemen risiko untuk personil yang menjabat sebagai dari mulai Direktur Pengelola Risiko, Senior Manager, Asisten Senior Manager dan Risk Agent;
- Digitalisasi dalam implementasi manajemen risiko melalui aplikasi Pelindo Risk Management (PRiMa);
- Implementasi GRC di Perusahaan pada tahun 2022 sampai dengan sekarang dan melakukan *Self-Assessment* GRC pada tahun 2023.

Bahwa bukti dokumentasi diatas telah mencukupi, dan selanjutkan untuk disosialisasikan, diimplementasikan, dipantau dan ditinjau secara berkesinambungan.

Business Continuity Management

Dalam rangka mempertahankan fungsi bisnis dari ancaman *force majeur*/gangguan eksternal yang dapat mengganggu jalannya operasional Perusahaan, serta upaya merespons dan menangani gangguan/bencana yang terjadi, maka Perusahaan menetapkan Pedoman *Business Continuity Management System* (BCMS). Pedoman ini memuat tentang konteks organisasi, Peran, Tanggung Jawab serta Wewenang Tim BCMS, Metodologi BCMS, Pemenuhan pada aspek SOM, Informasi terdokumentasi, Skema Operasional BCMS, Uji Caba Dokumen BCMS, serta Evaluasi Kerja dan Audit.

Pedoman ini diberlakukan melalui Surat Ketetapan Direksi No. HK.56/1/13/IKT-22 tanggal 22 November 2022, dengan tujuan:

1. Menjamin kelangsungan fungsi bisnis saat kondisi gangguan atau bencana, terutama fungsi bisnis atau operasional yang kritikal agar layanan Perusahaan tetap berjalan;
2. Memastikan ketersediaan prosedur kerja bagi Unit Kerja sebelum, saat, dan setelah gangguan atau bencana, sehingga dapat meminimalisasi dampak dan menghindari kerugian yang lebih besar bagi Perusahaan dan stakeholder.
3. Membangun budaya, pemahaman, dan kesadaran BCMS (BCMS *awareness*) melalui sosialisasi secara berkesinambungan dan simulasi penanganan gangguan atau bencana.

- The establishment of a Risk Agent which is consistently updated with members representing each Division to support the implementation of risk management, as stated in the Directors' Decree HK.01/21/6/1/AMR/DIRUT/IKT-23 dated 21 June 2023 concerning the Establishment of a Risk Management Agent for Risk Management Implementation;
- Training and certification in the field of risk management for personnel who serve as Risk Management Director, Senior Manager, Assistant Senior Manager and Risk Agent;
- Digitalization in the implementation of risk management through the Pelindo Risk Management (PRiMa) application;
- Implementing GRC in the Company from 2022 to now and conducting a GRC Self-Assessment in 2023.

The above documentation evidence is sufficient, and continues to be disseminated, implemented, monitored and reviewed on an ongoing basis.

Business Continuity Management

In order to maintain business functions from the threat of force majeure/external disruption that could disrupt the Company's operations, as well as efforts to respond to and handle disruptions/disasters that occur, the Company has established Business Continuity Management System (BCMS) Guidelines. This guideline contains organizational context, roles, responsibilities and authorities of the BCMS team, BCMS methodology, compliance with SOM aspects, documented information, BCMS operational scheme, BCMS document testing, as well as work evaluation and audit.

These guidelines are enforced through Directors' Decree No. HK.56/1/13/IKT-22 dated 22 November 2022, with the aim of:

1. Ensure the continuity of business functions during disruption or disaster conditions, especially critical business or operational functions so that the Company's services continue to run;
2. Ensure the availability of work procedures for Work Units before, during and after disruptions or disasters, so as to minimize the impact and avoid greater losses for the Company and stakeholders.
3. Building culture, understanding and awareness of BCMS (BCMS awareness) through continuous socialization and simulations of handling disturbances or disasters.

Ruang Lingkup

Implementasi BCMS Perusahaan meliputi seluruh layanan/produk maupun fungsi bisnis perusahaan yang termasuk kritikal, aset kritikal, seluruh penghuni (termasuk karyawan) yang berada di lokasi kerja perusahaan, aktivitas dan layanan T eknologi Informasi yang kritikal diprioritaskan yang dimiliki dan atau dikelola oleh perusahaan. Beberapa aktivitas dan layanan teknologi informasi non-kritikal dapat dimasukkan sebagai pelengkap/tambahan.

Ruang lingkup Kebijakan ini adalah:

1. Kebijakan *Business Continuity Management System* (BCMS) berlaku untuk seluruh Unit Kerja Perusahaan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Kebijakan BCMS mengatur perlindungan dan keselamatan aset Perusahaan (Karyawan, dokumen, dan lainnya) pada saat terjadi gangguan atau bencana sebagaimana dijelaskan secara lebih detail pada Prosedur Keadaan Darurat (ER *Plan).*
3. Kebijakan BCMS merupakan referensi Perusahaan dalam membangun ketahanan *(resiliency)* terhadap ancaman yang dapat mengganggu operasional Perusahaan.

Batasan

1. Implementasi BCMS merespons beberapa skenario gangguan/bencana yang paling berpotensi terjadi pada perusahaan.
2. *Back-up* layanan Teknologi Informasi fokus pada layanan teknologi informasi yang termasuk kritikal berdasarkan proses *Business Impact Analysis* (BIA).

Penerapan BCMS di Perusahaan menggunakan siklus Plan-Do-Check-Act (POCA) untuk merencanakan, menetapkan, mengimplementasikan, menjalankan, memantau, meninjau dan memelihara serta melakukan pengembangan berkelanjutan atas keefektifan implementasi BCMS. Penjelasan Siklus POCA adalah sebagai berikut:

Scope

Implementation of the Company's BCMS covers all company services/products and business functions including critical, critical assets, all occupants (including employees) located at the company's work location, prioritized critical Information Technology activities and services owned and/or managed by the company. Some non-critical information technology activities and services may be included as complementary/additional.

The scope of this Policy is:

1. The Business Continuity Management System (BCMS) policy applies to all Company Work Units throughout Indonesia.
2. BCMS policy regulates the protection and safety of Company assets (Employees, documents, etc.) in the event of a disruption or disaster as explained in more detail in the Emergency Procedure (ER Plan).
3. The BCMS policy is a reference for the Company in building resilience against threats that could disrupt the Company's operations.

Limitation

1. BCMS implementation responds to several disruption/ disaster scenarios that have the most potential to occur in the company.
2. Back-up Information Technology services focus on information technology services which are considered critical based on the Business Impact Analysis (BIA) process.

The implementation of BCMS in the Company uses the Plan-Do-Check-Act (POCA) cycle to plan, determine, implement, run, monitor, review and maintain as well as carry out continuous development of the effectiveness of BCMS implementation. The explanation of the POCA Cycle is as follows:

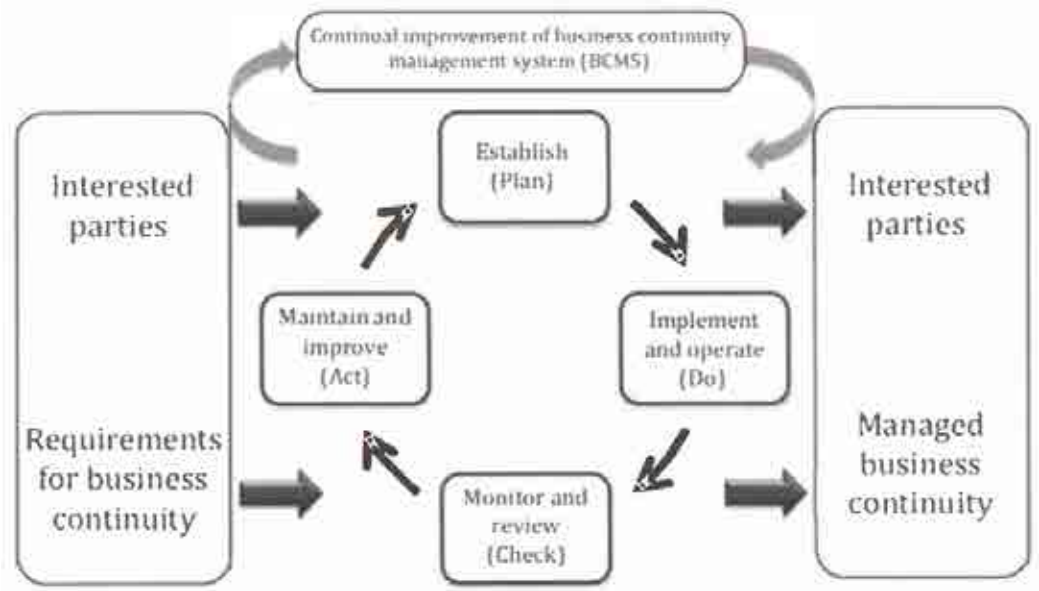

Plan (Menetapkan):
Menetapkan kebijakan BCMS, tujuan, kontrol, proses dan prosedur yang relevan untuk mengembangkan BCMS dalam rangka memberikan hasil yang sesuaidengan kebijakan dan tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Do (Mengimplementasikan dan mengoperasikan):
Mengimplementasikan dan mengoperasikan kebijakan BCMS, kontrol, proses dan prosedurnya.

Check (Memantau dan meninjau):
Memantau dan meninjau kinerja kebijakan dan tujuan BCMS, melaporkan hasilnya kepada T*op Management* untuk ditinjau, dan menentukan serta mengotorisasi tindakan perbaikan dan pengembangan.

Act (Memelihara dan mengembangkan):
Memelihara dan mengembangkan BCMS dengan mengambil tindakan korektif, berdasarkan hasil tinjauan manajemen dan menilai ulang ruang lingkup BCMS serta kebijakan dan tujuannya.

Dalam pelaksanaannya, implementasi BCMS merupakan tanggung jawab dari seluruh Insan Perusahaan, khususnya yang menangani keberlangsungan fungsi operasional dan bisnis Perusahaan, tidak terbatas pada bidang Teknologi Informasi, Manajemen Aset & Logistik, Sekretaris Perusahaan, SOM, dan Operasional. Setiap insan wajib mematuhi ketentuan internal terkait dengan BCMS sebelum, saat, dan setelah gangguan maupun bencana selesai.

Plan (Determine):
Establish BCMS policies, objectives, controls, processes and procedures that are relevant to developing BCMS in order to provide results in accordance with overall company policies and objectives.

Do (Implement and operate):
Implement and operate BCMS policies, controls, processes and procedures.

Check (Monitoring and reviewing):
Monitor and review the performance of BCMS policies and objectives, report results to Top Management for review, and determine and authorize corrective and developmental actions.

Act (Maintain and develop):
Maintain and develop the BCMS by taking corrective action, based on the results of management reviews and reassessing the scope of the BCMS as well as its policies and objectives.

In its implementation, the implementation of BCMS is the responsibility of all Company Personnel, especially those who handle the continuity of the Company's operational and business functions, not limited to the fields of Information Technology, Asset Management & Logistics, Corporate Secretary, SOM, and Operations. Every person is obliged to comply with internal provisions related to BCMS before, during and after the disruption or disaster is over.

Sebagai *second line of defense*, Sub Divisi Manajemen Risiko menyusun dan mengembangkan Kebijakan/ Pedoman BCMS Perusahaan, namun setiap Unit Kerja (*risk owner*) wajib engimplementasikan BCMS dan menyusun informasi dan dokumentasi BCMS yang menjadi bidang tanggung jawabnya.

Saat terjadi bencana atau gangguan, tugas dan tanggung jawab Sub Divisi Manajemen Risiko adalah melakukan pengawasan dan pelaporan atas bencana maupun gangguan yang terjadi.

As a second line of defense, the Risk Management Sub Division prepares and develops the Company's BCMS Policy/Guidelines, however each Work Unit (risk owner) is required to implement BCMS and compile BCMS information and documentation which is their area of responsibility.

When a disaster or disturbance occurs, the duties and responsibilities of the Risk Management Sub Division are to supervise and report on the disaster or disturbance that occurs.

Tim Business Continuity Management System (BCMS)

Untuk mendukung penerapan BCSM secara komprehensif dan efektive, Direksi membentuk Tim BCSM melalui Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.56/2/14/IKT-22 tanggal 24 November 2022 tentang Pembentukan Tim Business Continuity Management System (BCMS).

Business Continuity Management System (BCMS) Team

To support the implementation of BCSM comprehensively and effectively, the Board of Directors formed a BCSM Team through the Decree of the Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.56/2/14/IKT-22 dated 24 November 2022 concerning the Formation of a Business Continuity Management System (BCMS) Team.

Struktur Keanggotan BCMS
Struktur Keanggotan BCMS

No	Jabatan dalam TIM BCMS Position in the BCMS TEAM	Divisi/Unit Kerja Division/Work Unit
1	Pengarah Pusat Penanganan Gangguan Director of the Disturbance Management Center	Direktur Utama President Director
2	Ketua Pusat Penanganan Gangguan (Executive BCM) Head of the Center for Handling Disorders (Executive BCM)	Direktur SDM & Umum Director of HC & General Affairs
3	Caretaker	Direktur Operasi & Teknik Director of Operations & Engineering
4	Ketua Tim Pendukung Pusat Penanganan Gangguan Head of the Disorder Management Center Support Team	SM Audit Internal & Man.Risk SM of Internal Audit & Risk Management
5	Ketua Tim Tanggap Darurat Head of the Emergency Response Team	SM Mutu, HSE & PFSO SM of Quality, HSE & PFSO
6	Ketua Tim Kelangsungan Usaha (Koordinator BCM Divisi) Head of Business Continuity Team (BCM Division Coordinator)	Seluruh Kepala Divisi Unit kerja masing - masing All Division Heads of their respective work units
7	Ketua Alternatif (Koordinator Sub Divisi) Alternative Chairman (Sub Division Coordinator)	· ASM Sub Divisi Manajemen Risiko · ASM Sub Divisi Hukum · ASM Sub Divisi Mutu, HSE & PFSO · ASM Sub Divisi Key Account Mgt · ASM Sub Divisi Strategi · ASM Sub Divisi Umum & Rumah Tangga · ASM Sub Divisi Anggaran · ASM Sub Divisi Administrasi Penunjang Operasi · ASM Sub Divisi Operasi Domestik · ASM of Risk Management Sub Division · ASM of Legal Sub Division · ASM of Sub Division Quality, HSE & PFSO · ASM of Sub Division Key Account Mgt · ASM of Strategy Sub Division · ASM of General & Household Sub Division · ASM of Budget Sub Division · ASM of Operations Support Administration Sub Division · ASM of Domestic Operations Sub Division

Struktur Keanggotan BCMS
Struktur Keanggotan BCMS

No	Jabatan dalam TIM BCMS Position in the BCMS TEAM	Divisi/Unit Kerja Division/Work Unit
8	Ketua Tim Pemulihan Teknologi Head of Technology Recovery Team	SM Teknik & Sistem Informasi SM of Engineering & Information Systems
9	Ketua Tim Pemulihan Fasilitas Head of Facilities Recovery Team	

Metodologi Pengembangan Kerangka Kerja BCMS
BCMS Framework Development Methodology



Metodologi pengembangan kerangka kerja Business Continuity Management System (BCMS) terdiri dari:
1. Proses Business Impact Analysis (BIA);
2. Proses Risk assessment (RA);
3. Proses Threat Assessment,
4. Penentuan Business Continuity Strategy (BC Strategy);
5. Penyusunan dokumen BCMS;
6. Uji coba (testing) dan pelatihan (exercising) untuk seluruh Karyawan; dan
7. Maintenance dan pengembangan BCMS secara berkelanjutan (continous improvement).

Business Continuity Plan (BC Plan)

1. Setiap Unit Kerja wajib menyusun dokumen BC Plan.
2. Dokumen BC Plan harus mencantumkan tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga kelangsungan fungsi bisnis kritikal selama dan setelah terjadi gangguan atau bencana.
3. Dokumen BC Plan digunakan atau diaktivasi setelah diputuskan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tingkat kekritisan yang terjadi (dijelaskan lebih lanjut pada Tingkat Kekritisan dalam kebijakan BCMS, Bab 7 bagian A).

The Business Continuity Management System (BCMS) framework development methodology consists of:
1. Business Impact Analysis (BIA) process;
2. Risk assessment (RA) process;
3. Threat Assessment Process,
4. Determining Business Continuity Strategy (BC Strategy);
5. Preparation of BCMS documents;
6. Testing and training for all employees; And
7. Continuous maintenance and development of BCMS (continuous improvement).

Business Continuity Plan (BC Plan)

1. Each Work Unit is required to prepare a BC Plan document.
2. The BC Plan document must include actions that must be taken to maintain the continuity of critical business functions during and after a disruption or disaster.
3. The BC Plan document is used or activated after being decided by an authorized official according to the level of criticality that occurs (explained further in the Criticality Level in the BCMS policy, Chapter 7 part A).

4. Tujuan dan sasaran dari penyusunan dokumen BC Plan antara lain:
   a. Menjaga operasional dan bisnis perusahaan, khususnya yang termasuk dalam aktivitas kritikal dapat tetap berjalan, atau diprioritaskan untuk dipulihkan sesaat setelah gangguan/bencana terjadi;
   b. Mengamankan aset dan informasi penting Perusahaan;
   c. Meminimalisasi risiko akibat gangguan atau bencana dengan membatasi kerugian finansial, risiko hukum dan reputasi;
   d. Meyakini ketersediaan layanan dan produk yang berkesinambungan; dan
   e. Mempersiapkan alternatif lain agar fungsi bisnis kritikal tetap dapat berjalan untuk menjaga kelangsungan operasi Perusahaan. Dokumen BC Plan dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari tahapan sebelumnya Business Impact Analysis (BIA), Risk assessment (RA), dan Business Continuity Strategy (BC Strategy).
5. Pengembangan dan penyusunan dokumen BC Plan harus mempertimbangkan aspek pengamanan terhadap aset Perusahaan (sumber daya Teknologi Infomasi, sumber daya manusia, gedung, dan lain-lain).
6. Pengembangan dan penyusunan dokumen BC Plan disesuaikan dengan ketentuan internal dan eksternal Perusahaan.
7. Dokumen BC Plan juga mencakup: struktur hierarki pelaporan terkait gangguan atau bencana dan prosedur eskalasi.

Disaster Recovery Plan (DR Plan)

1. Dokumen DR Plan dikembangkan dan disusun oleh Divisi Teknik & Sistem Informasi pada dokumen terpisah dari kebijakan ini.
2. Dokumen DR Plan harus tersedia untuk setiap layanan Teknologi Informasi yang dinilai kritikal dalam mendukung bisnis dan operasional kritikal di setiap Unit Kerja berdasarkan hasil Business Impact Analysis (BIA), Risk assessment, dan BC Strategy.

4. The aims and objectives of preparing the BC Plan document include:
   a. Maintaining company operations and business, especially critical activities, can continue to run, or be prioritized for recovery immediately after a disturbance/disaster occurs;
   b. Securing important Company assets and information;
   c. Minimize risks resulting from disruptions or disasters by limiting financial losses, legal and reputation risks;
   d. Ensuring the continuous availability of services and products; And
   e. Prepare other alternatives so that critical business functions can continue to run to maintain the continuity of the Company's operations. The BC Plan document is created based on data obtained from the previous stages of Business Impact Analysis (BIA), Risk Assessment (RA), and Business Continuity Strategy (BC Strategy).
5. The development and preparation of the BC Plan document must consider aspects of securing Company assets (Information Technology resources, human resources, buildings, etc.).
6. Development and preparation of BC Plan documents in accordance with the Company's internal and external regulations.
7. The BC Plan document also includes: hierarchical structure of reporting related to disturbances or disasters and escalation procedures.

Disaster Recovery Plan (DR Plan)

1. The DR Plan document is developed and prepared by the Engineering & Information Systems Division in a separate document from this policy.
2. DR Plan documents must be available for every Information Technology service that is considered critical in supporting critical business and operations in each Work Unit based on the results of the Business Impact Analysis (BIA), Risk assessment and BC Strategy.

Pengembangan BCMS Berkelanjutan

1. Perusahaan berkomitmen mengembangkan kesesuaian, efektivitas, dan kecukupan BCMS di setiap Unit Kerja secara berkelanjutan.
2. Setiap tindakan pencegahan atau perbaikan yang diambil harus sesuai dengan tujuan Kebijakan BCMS.
3. Perubahan dan perbaikan yang dilakukan harus tercemin dalam dokumentasi BCMS.
4. Tindakan pencegahan atau perbaikan berfokus pada pencegahan dan perbaikan atas perencanaan penanganan gangguan yang terjadi.
5. Tujuan tindakan pencegahan atau perbaikan adalah meminimalkan kerugian serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas aktivitas BCMS.
6. Tindakan pencegahan diperlukan untuk mengantisipasi penyebab dari suatu gangguan. Tindakan pencegahan yang diambil harus sesuai dengan potensi dampak dari gangguan.
7. Tindakan korektif mengelola ketidaksesuaian atas implementasi BCMS. Manajemen harus mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terkait dengan implementasi BCMS untuk mencegah pengulangan kejadian serupa di masa mendatang.
8. Perusahaan harus terus-menerus meningkatkan efektivitas BCMS dengan cara melakukan kaji ulang dan menindaklanjuti:
   a. Hasil audit, analisis dari pemantauan kejadian;
   b. Tindakan pencegahan dan perbaikan; dan
   c. Kaji ulang oleh Manajemen.

Sustainable BCMS Development

1. The Company is committed to developing the suitability, effectiveness and adequacy of BCMS in each Work Unit on an ongoing basis.
2. Any preventive or corrective action taken must be in accordance with the objectives of the BCMS Policy.
3. Changes and improvements made must be reflected in the BCMS documentation.
4. Preventive or corrective actions focus on preventing and correcting planning for handling disturbances that occur.
5. The aim of preventive or corrective action is to minimize losses and increase the efficiency and effectiveness of BCMS activities.
6. Preventive measures are needed to anticipate the cause of a disturbance. The precautions taken must be appropriate to the potential impact of the disturbance.
7. Corrective actions to manage non-conformities regarding BCMS implementation. Management must take action to eliminate the causes of nonconformities related to BCMS implementation to prevent recurrence of similar events in the future.
8. Companies must continuously improve the effectiveness of the BCMS by reviewing and following up:
a. Audit results, analysis of event monitoring;
b. Preventive and corrective actions; And
c. Review by Management.

Perkara Hukum yang Berdampak Material yang Dihadapi oleh Perusahaan, Entitas Anak, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Legal Cases with Material Impact Faced by the Company, Subsidiaries, Members of The Board Of Directors and Members Of The Board Of Commissioners

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan tidak memiliki perkara perdata yang terdaftar di berbagai Pengadilan maupun perkara pidana yang diperiksa di tahap penyelidikan maupun pengadilan yang berdampak material yang melibatkan Perusahaan maupun entitas anak perusahaan, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris.

As of December 31, 2023, The Company has no civil cases registered in various courts or criminal cases inspected at the investigation or court stage which have a material impact involving the Company or its subsidiary entities, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

No	Perkara Hukum Legal Cases	Jumlah Perkara Number of Cases	
		Perdata Civil	Pidana Criminal
1	Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*) The case is finished (has permanent legal force/inkracht)	-	-
2	Perkara dalam proses penyelesaian The case is in the process of being resolved	-	-
Total Total		-	-

DAMPAK PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN

Pada tahun 2023, Perusahaan tidak mengalami permasalahan hukum.

IMPACT OF LEGAL CASES ON COMPANIES

In 2023, the Company did not experience any legal cases.

KASUS TERKAIT BURUH DAN KARYAWAN

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki kasus terkait buruh dan/atau karyawan.

CASES RELATED TO WORKERS AND EMPLOYEES

Until the end of 2023, the Company had no cases related to labor and/or employees.

SANKSI ADMINISTRATIF/SANKSI YANG DIKENAKAN KEPADA PERUSAHAAN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DAN OTORITAS LAINNYA PADA TAHUN 2023

Sampai dengan 31 Desember 2023, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perseroan, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Lainnya sehingga tidak ada informasi terkait yang dapat disajikan pada laporan ini.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS/ SANCTIONS IMPOSED ON COMPANIES, MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS BY THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY AND OTHER AUTHORITIES IN 2023

As of December 31, 2023, there are no administrative sanctions imposed on the Company, Members of the Board of Commissioners, and Members of the Board of Directors by the Financial Services Authority and Other Authorities so that no related information can be presented in this report.

Transparansi Kondisi Keuangan
Transparency of Financial Conditions

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan secara berkala menyampaikan laporan publikasi dan keterbukaan informasi kepada regulator sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK No. 43/POJK.04/2020 ("POJK 43/2020") tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten Dengan Aset Skala Kecil dan Emiten Dengan Aset Skala Menengah.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN

Pada tahun 2023, Perseroan sudah menyampaikan laporan publikasi dan keterbukaan informasi keuangan kepada regulator yang dapat diakses pada situs web Perseroan maupun situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), antara lain:

- Laporan Keuangan Triwulanan disampaikan kepada regulator sesuai dengan ketentuan dan tanggal yang telah ditetapkan.
- Laporan Tahunan IPCC disusun sesuai dengan ketentuan POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan SE OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan Tahunan 2021 sudah disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan melalui situs web IPCC: www.indonesiacarterminal.co.id dan juga dapat diakses pada situs web BEI: www.idx.co.id dengan mengakses kode saham: IPCC.

Berikut ini adalah daftar publikasi dan transparansi laporan keuangan yang sudah dilakukan Perseroan di tahun 2023:

As a public company, the Company periodically submits publication and information disclosure reports to regulators as regulated in the provisions of POJK No. 43/POJK.04/2020 ("POJK 43/2020") concerning Obligations for Information Disclosure and Corporate Governance for Issuers or Public Companies that Meet the Criteria for Issuers with Small-Scale Assets and Issuers with Medium-Scale Assets.

TRANSPARENCY OF THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION

In 2023, the Company has submitted a report on publication and disclosure of financial information to regulators which can be accessed on the Company's website and the Indonesian Stock Exchange (BEI) website, including:

- Quarterly Financial Reports are submitted to the regulator in accordance with the provisions and dates that have been determined.
- The IPCC Annual Report is prepared in accordance with the provisions of POJK No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies and SE OJK No. 16/SEOJK.04/2021 concerning Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies. The 2021 Annual Report has been submitted to the regulator and published via the IPCC website: www.indonesiacarterminal.co.id and can also be accessed on the IDX website: www.idx.co.id by accessing the share code: IPCC.

The following is a list of publications and transparency of financial reports that have been carried out by the Company in 2023:

No	Nama Laporan Report Name	Penyempaian Kepada Regulator Submission to Regulators	Media Publikasi Publication Media	Tanggal Publikasi Iklan Advertisement Publication Date
1	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit Kuartal I Submission of Unaudited Interim Financial Statements for Quarter I	OJK	Website IPCC dan OJK IPCC websites and OJK	Tidak di publikasin di iklan Not published in advertisements
2	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit Kuartal II Submission of Unaudited Interim Financial Statements for Quarter II	OJK	Website IPCC dan OJK IPCC websites and OJK	Tidak di publikasin di iklan Not published in advertisements
3	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit Kuartal III Submission of Unaudited Interim Financial Statements for Quarter III	OJK	Website IPCC dan OJK IPCC websites and OJK IPCC dan OJK	Tidak di publikasin di iklan Not published in advertisements
4	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit Kuartal IV Submission of Unaudited Interim Financial Statements for Quarter IV	OJK	Website IPCC dan OJK IPCC websites and OJK	Tidak di publikasin di iklan Not published in advertisements

No	Nama Laporan Report Name	Penyempaian Kepada Regulator Submission to Regulators	Media Publikasi Publication Media	Tanggal Publikasi Iklan Advertisement Publication Date
5	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Submission of Annual Financial Statements	OJK	Website IPCC dan OJK IPCC websites and OJK	Tidak di publikasin di iklan Not published in advertisements

TRANSPARANSI KONDISI NON-KEUANGAN PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2023, Perseroan sudah menyampaikan keterbukaan informasi mengenai transparansi non-keuangan, antara lain:

- Informasi terkait Tata Kelola Perusahaan, seperti: perubahan pengurus, perubahan anggota komite, amandeman Anggaran Dasar, dan lain-lain. Informasi-informasi ini wajib disampaikan kepada regulator dan dapat diakses pada situs web BEI: www.idx.co.id dengan mengakses kode saham: IPCC.
- Informasi Produk dan Layanan dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan ditampilkan pada situs web Perseroan: www.indonesiacarterminal.co.id sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas.
- Informasi mengenai pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa disampaikan kepada BEI dan OJK serta disediakan pada situs web Perseroan.

- Informasi mengenai transparansi struktur kepemilikan atau perubahan Pemegang Saham pada Laporan Tahunan dan situs web Perseroan.
- Informasi atau fakta material penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi keputusan pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, senantiasa diumumkan kepada masyarakat melalui situs web Perseroan dan BEI.
- Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi.

SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK

Sejalan dengan penerapan POJK No. 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik, sepanjang tahun 2023, Perseroan telah menyiapkan pelaporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik yang Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia. Pelaporan melalui SPE OJK-IDX yang disampaikan Perseroan di tahun 2023, adalah sebagai berikut:

TRANSPARENCY OF COMPANY NON-FINANCIAL CONDITIONS

Throughout 2023, the Company has provided information disclosure regarding non-financial transparency, including:

- .Information related to Corporate Governance, such as: changes in management, changes in committee members, amendments to the Articles of Association, etc. This information must be submitted to the regulator and can be accessed on the IDX website: www.idx.co.id by accessing the share code: IPCC.
- Product and Service Information is published through the Annual Report and displayed on the Company's website: www.indonesiacarterminal.co.id so that it can be easily accessed by the wider public.
- nformation regarding the implementation of the Annual GMS and Extraordinary GMS is submitted to the IDX and OJK and provided on the Company's website.
- Information regarding transparency of ownership structure or changes in Shareholders in the Annual Report and the Company's website.
- Important and relevant material information or facts regarding events, happenings or facts that can influence the decisions of interested parties regarding such information or facts, are always announced to the public via the Company's website and the IDX.

- Other information aimed at supporting information disclosure.

ELECTRONIC REPORTING SYSTEM

In line with the implementation of POJK No. 7/POJK.04/2018 concerning Submission of Reports Through the Electronic Reporting System for Issuers or Public Companies, throughout 2023, the Company has prepared reporting through the Integrated Electronic Reporting System of the Financial Services Authority and PT Bursa Efek Indonesia Financial and PT Bursa Efek Indonesia. The reporting via SPE OJK-IDX submitted by the Company in 2023 is as follows:

No	Tanggal Date	Uraian Description
1.	5 Januari 2023 January 5, 2023	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC] Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC]
2.	9 Februari 2023 February 9, 2023	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC] Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC]
3.	6 Maret 2023 March 6, 2023	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC] Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC]
4.	11 April 2023 April 11, 2023	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC] Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC]
5.	9 Mei 2023 May 9, 2023	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC] Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC]
6.	7 Juni 2023 June 7, 2023	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC] Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC]
7.	10 Juli 2023 July 10, 2023	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC] Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC]
8.	8 Agustus 2023 August 8, 2023	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC] Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC]
9.	9 September 2023 September 9, 2023	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC] Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC]
10.	7 Oktober 2023 October 7, 2023	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC] Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC]
11.	10 November 2023 November 10, 2023	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC] Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC]
12.	18 Desember 2023 December 18, 2023	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC] Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [IPCC]

TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

Perseroan mengungkapkan informasi mengenai produk dan layanan setransparan mungkin kepada mitra, publik dan Pemangku Kepentingan lainnya, dengan menggunakan berbagai media komunikasi, seperti:

- Situs Web: www.indonesiacarterminal.co.id
- Media sosial Perseroan pada berbagai platform, seperti Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube.
- Brosur/iklan di media massa dan berbagai media promosi dan komunikasi lainnya.

TRANSPARENCY OF PRODUCT AND SERVICE INFORMATION

The Company discloses information regarding products and services as transparently as possible to partners, the public and other Stakeholders, using various communication media, such as:

- Website: www.indonesiacarterminal.co.id
- The Company's social media on various platforms, such as Facebook, Twitter, Instagram and YouTube.
- Brochures/advertisements in mass media and various other promotional and communication media.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

Perseroan menaruh perhatian besar terhadap penegakkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, salah satunya terkait transparansi informasi produk dan/atau layanan, serta informasi material lainnya yang relevan untuk disampaikan kepada para Pemangku Kepentingan. Sevbagai perusahaan terbuka, Perseroan memastikan selalu mematuhi ketentuan publikasi laporan dan keterbukaan informasi yang diwajibkan oleh regulator sebagaimana telah diulas pada bagian terpisah dalam laporan tahunan ini.

The Company pays great attention to upholding the principles of good governance, one of which is related to transparency of product and/or service information, as well as other relevant material information to be conveyed to Stakeholders. As a public company, the Company ensures that it always complies with the provisions for publication of reports and information disclosure required by regulators as reviewed in a separate section in this annual report.

Perseroan meyakini penyebaran informasi yang transparan dan merata kepada seluruh Pemangku Kepentingan baik internal maupun eksternal dapat membantu, menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta menciptakan persepsi positif mengenai Perseroan di mata para Pemangku Kepentingan. Selain itu, transparansi informasi juga diperlukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemegang Saham ataupun Pemangku Kepentingan lainnya. Menyadari pentingnya penyampaian informasi yang akurat dan valid, maka pengelolaan informasi korporasi Perseroan dilakukan secara profesional dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 8/POJK.04/2015 ("POJK 8/2015") tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

The Company believes that the dissemination of transparent and even information to all Stakeholders, both internal and external, can help, maintain and increase knowledge, understanding and create a positive perception of the Company in the eyes of the Stakeholders. Apart from that, information transparency is also needed to support the decision-making process carried out by Shareholders or other Stakeholders. Realizing the importance of conveying accurate and valid information, the Company's corporate information management is carried out professionally by considering the provisions of POJK No. 8/POJK.04/2015 ("POJK 8/2015") concerning Issuer or Public Company Websites.

Namun demikian, transparansi informasi Perseroan tetap harus memperhatikan batasan kerahasiaan informasi yang hanya boleh diketahui oleh kalangan terbatas. Dengan begitu, tidak semua hal dapat diinformasikan terbuka secara keseluruhan. Perseroan hanya berhak untuk terbuka dan memberikan informasi kepada Pemangku Kepentingan sebatas pada hal-hal yang diatur dalam regulasi dan/atau pada hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian, kesepakatan serta komitmen bersama.

However, the Company's information transparency must still pay attention to the limits of confidentiality of information which can only be known by a limited circle of people. That way, not everything can be disclosed openly in its entirety. The Company only has the right to be open and provide information to Stakeholders limited to matters regulated in regulations and/or matters stipulated in agreements, agreements and joint commitments.

SITUS WEB

Perseroan membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada publik melalui situs web resmi: www.indonesiacarterminal.co.id yang dikelola oleh Sekretaris Perusahaan. Informasi yang ditampilkan dalam situs web Perseroan tersedia dalam 2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Perseroan secara berkala memperbarui tampilan dan konten yang disediakan dalam situs web tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada para Pemangku Kepentingan.

WEBSITE

The Company opens the widest possible access to information to the public through the official website: www.indonesiacarterminal.co.id which is managed by the Corporate Secretary. The information displayed on the Company's website is available in 2 (two) languages, namely Indonesian and English. The Company regularly updates the appearance and content provided on the website as a form of responsibility to the Stakeholders.

Beberapa pilihan informasi yang tersedia dalam situs web Perseroan, mencakup Latar Belakang Perusahaan, Layanan Perusahaan, informasi mengenai kinerja dan perkembangan terkini dari IPCC serta info terkait pengadaan dan lainnya. Informasi yang tersedia di situs web IPCC di-update secara berkala sesuai dengan perkembangan terkini dari IPCC.

Sementara itu untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai kinerja ataupun data lainnya mengenai Perseroan dapat langsung menghubungi:

Sekretaris Perusahaan IPCC | Kantor Pusat IPCC
Jl. Sindang Laut No. 100, Kali Baru, Kec. Cilincing
Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14110
Telp : 021 4393 2251
Faks : 021 4393 2250
Email : Email: corsec@indonesiacarterminal.co.id
info@indonesiacarterminal.co.id

Several choices of information available on the Company's website include Company Background, Company Services, information regarding the performance and latest developments from the IPCC as well as information related to procurement and others. The information available on the IPCC website is updated regularly in accordance with the latest developments from the IPCC.

Meanwhile, to obtain more detailed information regarding performance or other data regarding the Company, you can directly contact:

IPCC Corporate Secretary | IPCC Headquarters
Jl. Sindang Laut No. 100, Kali Baru, Kec. Cilincing
North Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 14110
Tel : 021 4393 2251
Fax : 021 4393 2250
Email : corsec@indonesiacarterminal.co.id
info@indonesiacarterminal.co.id

MEDIA SOSIAL

Selain menampilkan informasi secara lengkap pada situs web, Perseroan juga mengelola 4 (empat) akun media sosial, yaitu:

SOCIAL MEDIA

Apart from displaying complete information on the website, the Company also manages 4 (four) social media accounts, namely:


@IPCC Terminal Kendaraaan


@IPCC Terminal Kendaraaan


IPCC Terminal Kendaraaan


IPCC Terminal Kendaraaan

Di era digitalisasi sekarang ini, Perseroan melihat proses penyebaran informasi melalui media sosial terasa lebih efektif karena dapat menjangkau masyarakat luas dengan mudah dalam waktu yang cepat mengingat hampir seluruh masyarakat sudah akrab dengan kemajuan teknologi dan dunia digital. Dengan adanya media sosial, proses komunikasi antara Perseroan dan pihak-pihak yang berkepentingan pun dapat berjalan lebih mudah atau tidak harus melalui tahapan birokrasi yang rumit. Oleh sebab itu, platform media sosial Perseroan berfungsi secara aktif sebagai media penyampaian informasi mengenai aktivitas Perseroan dengan menggunakan tampilan atau visual yang menarik.

In the current era of digitalization, the Company sees that the process of disseminating information through social media feels more effective because it can reach the wider community easily in a short time considering that almost all people are familiar with technological advances and the digital world. With the existence of social media, the communication process between the Company and interested parties can run more easily or not have to go through complicated bureaucratic stages. Therefore, the Company's social media platform functions actively as a medium for conveying information regarding the Company's activities by using attractive displays or visuals.

KOMUNIKASI EKSTERNAL

Sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, Perseroan secara berkala menyebarluaskan informasi material mengenai aktivitas dan kinerja Perseroan. Keterbukaan informasi tersebut juga dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan regulator, di antaranya melalui kegiatan siaran pers, publikasi kinerja dan hasil usaha secara berkala di media massa nasional dan menggelar konferensi pers. Selain itu, Perseroan juga menerbitkan buku Laporan Tahunan yang dibagikan kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. Pemenuhan keterbukaan informasi untuk eksternal Perusahaan dikelola oleh Hubungan Investor Perusahaan.

HUBUNGAN INVESTOR

Tugas pokok hubungan investor, yaitu mewakili Direksi dalam hubungannya dengan pihak komunitas investor dan masyarakat pasar modal, antara lain meliputi:

- Menyusun strategi komunikasi khususnya kepada investor, calon investor, analis dan masyarakat pasar modal pada umumnya;
- Menyiapkan materi dan melaksanakan kegiatan road show, dan conference call;
- Mengkomunikasikan berbagai aspek terkait dengan saham dan kinerja Perseroan serta laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti analis, investor dan calon investor;
- Menjaga dan meningkatkan komunikasi antara perusahaan dengan para investor dan juga media baik di tingkat lokal maupun internasional;
- Menjaga dan meningkatkan komunikasi antara Perusahaan dengan media, pers;
- Mengelola hubungan dengan para analis, fund manager, pakar dan pengamat ekonomi (khususnya saham);
- Memantau dan melaporkan kepada Direksi atas hasil evaluasi para analis terhadap kinerja dan harga saham Perseroan secara berkala;
- Mengoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian Laporan Tahunan kepada investor/analis;
- Menyediakan data dan informasi keuangan Perseroan untuk investor dan masyarakat pasar modal.

EXTERNAL COMMUNICATIONS

As a form of transparency to the public, the Company periodically disseminates material information regarding the Company's activities and performance. This information disclosure is also carried out in order to fulfill regulatory requirements, including through press releases, regular publication of performance and business results in national mass media and holding press conferences. Apart from that, the Company also publishes an Annual Report book which is distributed to Shareholders and other Stakeholders. Fulfillment of information disclosure for external companies is managed by Company Investor Relations.

INVESTOR RELATIONS

The main duties of investor relations, namely representing the Board of Directors in their relations with the investor community and the capital market community, include:

- Develop a communication strategy, especially to investors, potential investors, analysts and the capital market community in general;
- Prepare materials and carry out road shows and conference calls;
- Communicate various aspects related to the Company's shares and performance as well as financial reports to interested parties, such as analysts, investors and potential investors;
- Maintain and improve communication between the company and investors and the media both at local and international levels;
- Maintain and improve communication between the Company and the media and press;
- Manage relationships with analysts, fund managers, experts and economic observers (especially stocks);
- Monitor and report to the Board of Directors the results of analysts' evaluations of the Company's performance and share price on a regular basis;
- Coordinate the preparation, publication and distribution of the Annual Report to investors/analysts;
- Provide the Company's financial data and information to investors and the capital market community.

AKTIVITAS HUBUNGAN INVESTOR

Divisi Hubungan Investor menjalankan fungsi komunikasi dengan komunitas keuangan dan pasar modal agar mereka mendapatkan informasi yang tepat dan akurat mengenai kinerja, prospek usaha maupun informasi lain-lain yang diperlukan bagi investor untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Divisi Hubungan Investor senantiasa memperhatikan prinsip kerahasiaan maupun perlakuan setara bagi semua investor.

Perseroan secara aktif dan rutin menyelenggarakan pertemuan dengan para stakeholders untuk memaparkan hasil kinerja triwulanan. Perseroan juga aktif menghadiri conference dan non-deal road show, serta kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh perusahaan sekuritas, tujuannya agar Perseroan dengan calon-calon investor potensial baik investor lokal maupun global. Selain itu, Perseroan juga menerima kunjungan dari para investor maupun mengadakan conference call sesuai dengan permintaan dari para investor.

Berikut ini adalah daftar aktivitas dan program kerja yang sudah dilakukan Divisi Hubungan Investor sepanjang tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

INVESTOR RELATIONS ACTIVITIES

The Investor Relations Division carries out communication functions with the financial community and capital markets so that they obtain precise and accurate information regarding performance, business prospects and other information needed by investors to support the decision-making process. All activities carried out by the Investor Relations Division always pay attention to the principles of confidentiality and equal treatment for all investors.

The Company actively and regularly holds meetings with stakeholders to present quarterly performance results. The Company also actively attends conferences and non-deal road shows, as well as other activities organized by securities companies, with the aim of connecting the Company with potential potential investors, both local and global investors. Apart from that, the Company also receives visits from investors and holds conference calls according to requests from investors.

The following is a list of activities and work programs that have been carried out by the Investor Relations Division throughout 2023, including the following:

NO	Siaran Pers Press Conference	Tanggal Date
1	Indonesia Kendaraan Terminal Siapkan Capex 2023 Rp 40 Miliar Indonesia Kendaraan Terminal Prepares 2023 Capex of Rp40 Billion	3 Januari 2023 January 3, 2023
2	IPCC Lepas Kapal Terakhir 2022 dan Sambut Kapal Pertama Tahun 2023 IPCC Releases Last Ship of 2022 and Welcomes First Ship of 2023	7 Januari 2023 January 7, 2023
3	Ekspor Mobil Lewat Terminal IPCC Naik 26,6% Car Exports Through IPCC Terminals Increase 26.6%	12 Januari 2023 January 12, 2023
4	Emitmen Manufaktur Lapor Bursa Bisnisnya Moncer! Ini Buktinya Manufacturing Issuers Report Their Business Markets Are Great! This is the proof	12 Januari 2023 January 12, 2023
5	IPCC Ekspansi Bisnis ke Kalimantan dan Indonesia Timur IPCC Business Expansion to Kalimantan and Eastern Indonesia	17 Januari 2023 January 17, 2023
6	Grup Pelindo (IPCC) Catat Bongkar Muat Mobil CBU Naik Drastis Pelindo Group (IPCC) notes that loading and unloading of CBU cars has increased drastically	15 Februari 2023 February 15, 2023
7	Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Catat Kenaikan Bongkar Muat Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Records Increase in Loading and Unloading	16 Februari 2023 February 16, 2023
8	Permintaan Mobil Meningkat Volume Bongkar Muat IPCC Melesat pada Awal Tahun Car Demand Increases IPCC Loading and Unloading Volumes Soar at the Beginning of the Year	19 Februari 2023 February 19, 2023
9	Go Global, IPCC Mau Ekspansi ke Brunei hingga Filipina Go Global, IPCC Wants to Expand to Brunei until Philippines	1 Maret 2023 March 1, 2023
10	IPCC Kebagian Berkah Permintaan Kendaraan CBU yang Melonjak Sepanjang 2023 IPCC Gets the Blessing of Soaring Demand for CBU Vehicles Throughout 2023	17 Maret 2023 March 17, 2023
11	Grup Pelindo (IPCC) Bakal Gelar RUPSLB Bulan Depan, Ini Agendanya Pelindo Group (IPCC) will hold an EGMS next month, here is the agenda	30 Maret 2023 March 30, 2023
12	Simak Strategi Bisnis IPCC untuk Capai Target Pertumbuhan 15% - 20% di 2023 Check out the IPCC Business Strategy to Achieve the Growth Target of 15% - 20% in 2023	8 April 2023 April 8, 2023

NO	Siaran Pers Press Conference	Tanggal Date
13	Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Tingkatkan Capex RP 200 M Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Increases Capex by Rp200 M	Mei 2023 May 25, 2023
14	Capex IPCC 2023 Rp 35 Miliar, Tahun 2024 Melonjak Jadi Rp 200 Miliar, Buat Apa? IPCC Capex 2023 Rp35 billion, in 2024 it will jump to Rp200 billion, for what?	Mei 2023 May 25, 2023
15	IPCC, Sokong Layanan Logistik Efisien IPCC, Support Efficient Logistics Services	25 Mei 2023 May 25, 2023
16	Dividen IPCC Disebut Berpotensi Lebih Menarik Ketimbang Deposito IPCC Dividends Are Said to Have the Potential to Be More Attractive Than Deposits	26 Mei 2023 May 26, 2023
17	Anak Usaha Pelindo (IPCC) Beri Sinyal Bakala Bagikan Dividen Lagi Pelindo's subsidiary (IPCC) gives a signal that it will distribute dividends again	26 Mei 2023 May 26, 2023
18	Pandemi Berakhir, Laba IPCC Melonjak Jadi Rp42,3 Miliar di Kuartal I-2023 Pandemic Ends, IPCC Profit Soars to Rp42.3 Billion in Quarter I-2023	26 Mei 2023 May 26, 2023
19	Dikepung Tantangan Global, Ini Fokus IPCC di 2023 Surrounded by Global Challenges, Here is the IPCC's Focus in 2023	26 Mei 2023 May 26, 2023
20	Grup Pelindo (IPCC) Bukukan Laba RP78,91 Miliar pada Kuartal II/2023 Pelindo Group (IPCC) Records Profit of Rp78.91 Billion in Quarter II/2023	18 Juni 2023 June 18, 2023
21	Anak Usaha Pelindo IPCC Siapkan Dividen 70 Persen dari Laba 2022 Pelindo IPCC Subsidiary Prepares Dividend of 70 Percent of 2022 Profit	19 Juli 2023 July 19, 2023
22	Bongkar Muat Ngebul, Pendapatann IPCC Semester I-2023 Melesat 21,37% Loading and Unloading Busts, IPCC Semester I-2023 Revenue Soars 21.37%	20 Juli 2023 July 20, 2023
23	IPCC anak usaha Pelindo cetak laba Rp78,92 miliar di semester I-2023 Pelindo's subsidiary IPCC recorded a profit of Rp78.92 billion in the first semester of 2023	20 Juli 2023 July 20, 2023
24	Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Raup Laba Rp78,9 Miliar di Kuartal II-2023 Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Earns Profit of Rp78.9 Billion in Quarter II-2023	20 Juli 2023 July 20, 2023
25	Anak Usaha Pelindo (IPCC) Bagikan Dividen Tunai Rp90 Miliar Hari Ini Pelindo Subsidiary (IPCC) Distributes Cash Dividends of Rp90 Billion Today	01 Agustus 2023 August 1, 2023
26	IPCC: Bongkar Muat Logistik di Terminal Kembali Ramai IPCC: Logistics Loading and Unloading at Terminals is Busy Again	10 Agustus 2023 August 10, 2023
27	Grup Pelindo, Indonesia Kendaran Terminal (IPCC) Resmi Masuk Indeks FTSE Pelindo Group, Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Officially Enters the FTSE Index	21 Agustus 2023 August 21, 2023
28	IPCC dan Pelabuhan Indonesia Investama Teken MoU Kembangkan Bisnis IPCC and Pelabuhan Indonesia Investama Sign MoU to Develop Business	30 Agustus 2023 August 30, 2023
29	Grup Pelindo (IPCC) Prediksi Kinerja 2024 Moncer Berkat Mobil Listrik Pelindo Group (IPCC) Predicts 2024 Performance to be Great Thanks to Electric Cars	06 September 2023 September 6, 2023
30	IPCC atau PT IKT Tbk. Gelar RUPS dan Pubex 2023 di awal September ini IPCC or PT IKT Tbk. Hold the 2023 GMS and Pubex in early September	07 September 2023 September 7, 2023
31	Grup Pelindo (IPCC) Ungkap Rencana Ekspansi, Biidik Pertumbuhan 20 Persen Pelindo Group (IPCC) Reveals Expansion Plans, Aims for 20 Percent Growth	19 September 23 September 19, 23
32	IPCC SAH Ekspansi Bisnis ke Balikpapan, Sebagai bagian dari EKOSISTEM Terminal KENDARAAN di Indonesia IPCC LEGAL Business Expansion to Balikpapan, as part of the VEHICLE Terminal ECOSYSTEM in Indonesia	30 September 23 September 30, 23
33	Laba Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Melonjak 30% Hingga Kuartal III-2023 Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Profits Jump 30% Until Quarter III-2023	20 Oktober 2023 October 21, 2023
34	Grup Pelindo (IPCC) Bukukan Laba RP141,94 Miliar Kuartal III/2023, Naik 30,35% Pelindo Group (IPCC) Recorded Profit of Rp141.94 Billion in Quarter III/2023, Increase 30.35%	21 Oktober 2023 October 21, 2023
35	IPCC Laporkan Laba Kuartal III-2023 Tumbuh 30,34% Jadi Rp141,94 Miliar IPCC Reports Third Quarter 2023 Profit Grows 30.34% to Rp141.94 Billion	21 Oktober 2023 October 21, 2023
36	Laba IPCC Melonjak di Kuartal III-2023 IPCC Profits Soar in the Third Quarter of 2023	21 Oktober 2023 October 21, 2023
37	Bunga Deposito Topang IPCC Raup Laba Rp141 Miliar Pada Akhir September 2023 Deposit Interest Supports IPCC to Earn Profit of Rp141 Billion by the End of September 2023	21 Oktober 2023 October 21, 2023

NO	Siaran Pers Press Conference	Tanggal Date
38	IPCC Raih Peningkatan Pendapatan 7,83 Persen Jadi Rp548 Miliar Di Kuartal III 2023 IPCC Achieves Revenue Increase of 7.83 Percent to Rp548 Billion in the Third Quarter of 2023	21 Oktober 2023 October 21, 2023
39	Kuartal III 2023, IPCC Raih Laba Rp141,94 Miliar, Naik 30,34 Persen Third Quarter 2023, IPCC Achieves Profit of Rp141.94 Billion, Increase 30.34 Percent	23 Oktober 2023 October 23, 2023
40	Kolaborasi IPCC dan Hyundai Glovis Makin Lekat Collaboration between IPCC and Hyundai Glovis is getting closer	03 November 2023 November 3, 2023
41	IPCC Lakukan Perluasan Lahan, Langkah yang Menguntungkan? IPCC Carrying Out Land Expansion, A Profitable Step?	12 November 2023 November 12, 2023
42	IPCC Proyeksikan Kas Internal Rp 1 Triliun pada 2024 IPCC Projects Internal Cash of Rp1 Trillion in 2024	13 November 2023 November 13, 2023
43	IPCC Tebar Dividen Rp21,70 per Saham IPCC Distributes Dividend of Rp21.70 per Share	13 Desember 2023 December 13, 2023
44	Grup Pelindo (IPCC) Bagi Dividen Interim Rp39,46 Miliar Pelindo Group (IPCC) Distributes Interim Dividends of Rp39.46 Billion	14 Desember 2023 December 14, 2023
45	IPCC bagikan dividen interim Rp 39,45 miliar IPCC distributes interim dividends of Rp39.45 billion	14 Desember 2023 December 14, 2023
46	Sambut Akhir Tahun Bahagia, IPCC Tebar Dividend Interim Welcoming a Happy End of Year, IPCC Distributes Interim Dividend	14 Desember 2023 December 14, 2023
47	Entitas Usaha Grup Pelindo (IPCC) Tebar Dividen Rp 39 Miliar Pelindo Group Business Entity (IPCC) Distributes Dividends of Rp39 Billion	14 Desember 2023 December 14, 2023
48	Awal Tahun 2024 Siap-siap Tadahi Dividen Interim IPCC Rp39,46 Miliar Early 2024 Get Ready to Obtain IPCC Interim Dividends of Rp39.46 Billion	15 Desember 2023 December 15, 2023
49	Cair 12 Januari 2024, IPCC Tabur Dividen Interim Rp21,7 per Lembar Disbursed January 12, 2024, IPCC Distributes Interim Dividend Rp21.7 per Share	18 Desember 2023 December 18, 2023
50	Kepoin Emiten bjb Sekuritas Menakar Kinerja IPCC di Tahun 2023 Kepoin Issuer BJB Sekuritas Measuring IPCC Performance in 2023	28 Desember 2023 December 28, 2023
51	Perluas Jangkauan Layanan, IPCC Menggandeng Subaru Expanding Service Range, IPCC Collaborates with Subaru	21 Desember 2023 December 21, 2023
52	Yakin Akan Tumbuh, Direktur Utama Sugeng Mulyadi dan Direktur Operasi dan Teknik Bagus Dwipoyono Beli Saham IPCC Confident of Growth, Main Director Sugeng Mulyadi and Director of Operations and Engineering Bagus Dwipoyono Buy IPCC Shares	21 Desember 2023 December 21, 2023

Siaran Pers Tahun 2023

Siaran pers merupakan sebuah sarana bagi Perseroan dalam menyampaikan beragam jenis informasi kepada publik. Dukungan media massa dalam hal ini sangat diperlukan oleh Perseroan karena tidak dapat dipungkiri bahwa informasi yang disampaikan melalui metode ini merupakan salah satu yang paling mudah tersebar secara masif.

Pada tahun 2023, Perseroan telah menerbitkan siaran pers sebanyak 57 kali. Hal ini merupakan sebuah bentuk transparansi informasi Perseroan kepada publik. Tabel berikut ini menyampaikan uraian tentang Siaran Pers IPCC di tahun 2023.

2023 Press Release

Press releases are a means for the Company to convey various types of information to the public. Mass media support in this case is very necessary for the Company because it cannot be denied that the information conveyed through this method is one of the easiest to spread massively.

In 2023, the Company has issued press releases 57 times. This is a form of transparency of Company information to the public. The following table provides a description of IPCC Press Releases in 2023.

NO	Siaran Pers Press Release	Tanggal Date
1	Indonesia Kendaraan Terminal Siapkan Capex 2023 Rp 40 Miliar Indonesia Kendaraan Terminal Prepares 2023 Capex of Rp40 Billion	3 Januari 2023 January 3, 2023
2	IPCC Lepas Kapal Terakhir 2022 dan Sambut Kapal Pertama Tahun 2023 IPCC Releases Last Ship of 2022 and Welcomes First Ship of 2023	7 Januari 2023 January 7, 2023
3	Ekspor Mobil Lewat Terminal IPCC Naik 26,6% Car Exports Through IPCC Terminals Increase 26.6%	12 Januari 2023 January 12, 2023
4	Emitmen Manufaktur Lapor Bursa Bisnisnya Moncer! Ini Buktinya Manufacturing Issuers Report Their Business Markets Are Great! This is the proof	12 Januari 2023 January 12, 2023
5	IPCC Ekspansi Bisnis ke Kalimantan dan Indonesia Timur IPCC Business Expansion to Kalimantan and Eastern Indonesia	17 Januari 2023 January 17, 2023
6	Grup Pelindo (IPCC) Catat Bongkar Muat Mobil CBU Naik Drastis Pelindo Group (IPCC) notes that loading and unloading of CBU cars has increased drastically	15 Februari 2023 February 15, 2023
7	Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Catat Kenaikan Bongkar Muat Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Records Increase in Loading and Unloading	16 Februari 2023 February 16, 2023
8	Permintaan Mobil Meningkat Volume Bongkar Muat IPCC Melesat pada Awal Tahun Car Demand Increases IPCC Loading and Unloading Volumes Soar at the Beginning of the Year	19 Februari 2023 February 19, 2023
9	Go Global, IPCC Mau Ekspansi ke Brunei hingga Filipina Go Global, IPCC Wants to Expand to Brunei until Philippines	1 Maret 2023 March 1, 2023
10	IPCC Kebagian Berkah Permintaan Kendaraan CBU yang Melonjak Sepanjang 2023 IPCC Gets the Blessing of Soaring Demand for CBU Vehicles Throughout 2023	17 Maret 2023 March 17, 2023
11	Grup Pelindo (IPCC) Bakal Gelar RUPSLB Bulan Depan, Ini Agendanya Pelindo Group (IPCC) will hold an EGMS next month, here is the agenda	30 Maret 2023 March 30, 2023
12	Simak Strategi Bisnis IPCC untuk Capai Target Pertumbuhan 15% - 20% di 2023 Check out the IPCC Business Strategy to Achieve the Growth Target of 15% - 20% in 2023	8 April 2023 April 8, 2023
13	Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Tingkatkan Capex RP 200 M Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Increases Capex by Rp200 Billion	25 Mei 2023 May 25, 2023
14	Capex IPCC 2023 Rp 35 Miliar, Tahun 2024 Melonjak Jadi Rp 200 Miliar, Buat Apa? IPCC Capex 2023 is Rp35 billion, in 2024 it will jump to Rp200 billion, for what?	25 Mei 2023 May 25, 2023
15	IPCC, Sokong Layanan Logistik Efisien IPCC, Support Efficient Logistics Services	25 Mei 2023 May 25, 2023
16	Dividen IPCC Disebut Berpotensi Lebih Menarik Ketimbang Deposito IPCC Dividends Are Said to Have the Potential to Be More Attractive Than Deposits	26 Mei 2023 May 26, 2023
17	Anak Usaha Pelindo (IPCC) Beri Sinyal Bakala Bagikan Dividen Lagi Pelindo's subsidiary (IPCC) gives a signal that it will distribute dividends again	26 Mei 2023 May 26, 2023
18	Pandemi Berakhir, Laba IPCC Melonjak Jadi Rp42,3 Miliar di Kuartal I-2023 Pandemic Ends, IPCC Profit Soars to Rp42.3 Billion in Quarter I-2023	26 Mei 2023 May 26, 2023
19	Dikepung Tantangan Global, Ini Fokus IPCC di 2023 Surrounded by Global Challenges, Here is the IPCC's Focus in 2023	26 Mei 2023 May 26, 2023
20	Anak Usaha Pelindo IPCC Siapkan Dividen 70 Persen dari Laba 2022 Pelindo IPCC Subsidiary Prepares Dividend of 70 Percent of 2022 Profit	26 Mei 2023 May 26, 2023
21	Grup Pelindo (IPCC) Bukukan Laba RP78,91 Miliar pada Kuartal II/2023 Pelindo Group (IPCC) Records Profit of Rp78.91 Billion in Quarter II/2023	18 Juni 2023 June 18, 2023
22	Bongkar Muat Ngebul, Pendapatann IPCC Semester I-2023 Melesat 21,37% Loading and Unloading is Bulky, IPCC Revenue Semester I-2023 Soars 21.37%	19 Juli 2023 July 19, 2023
23	IPCC anak usaha Pelindo cetak laba Rp78,92 miliar di semester I-2023 Pelindo's subsidiary IPCC recorded a profit of Rp78.92 billion in the first semester of 2023	20 Juli 2023 July 20, 2023
24	Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Raup Laba Rp78,9 Miliar di Kuartal II-2023 Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Earns Profit of Rp78.9 Billion in Quarter II-2023	20 Juli 2023 July 20, 2023
25	Anak Usaha Pelindo IPCC Siapkan Dividen 70 Persen dari Laba 2022 Pelindo IPCC Subsidiary Prepares Dividend of 70 Percent of 2022 Profit	01 Agustus 2023 August 01, 2023
26	Grup Pelindo (IPCC) Bukukan Laba RP78,91 Miliar pada Kuartal II/2023 Pelindo Group (IPCC) Records Profit of Rp78.91 Billion in Quarter II/2023	10 Agustus 2023 August 10, 2023

NO	Siaran Pers Press Release	Tanggal Date
27	Bongkar Muat Ngebul, Pendapatann IPCC Semester I-2023 Melesat 21,37% Loading and Unloading is Bulky, IPCC Revenue Semester I-2023 Soars 21.37%	21 Agustus 2023 August 21, 2023
28	IPCC anak usaha Pelindo cetak laba Rp78,92 miliar di semester I-2023 Pelindo's subsidiary IPCC recorded a profit of Rp78.92 billion in the first semester of 2023	30 Agustus 2023 August 30, 2023
29	Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Raup Laba Rp78,9 Miliar di Kuartal II-2023 Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Earns Profit of Rp78.9 Billion in Quarter II-2023	06 September 2023 September 06, 2023
30	Anak Usaha Pelindo (IPCC) Bagikan Dividen Tunai Rp90 Miliar Hari Ini Pelindo Subsidiary (IPCC) Distributes Cash Dividends of Rp90 Billion Today	01 Agustus 2023 August 01, 2023
31	IPCC: Bongkar Muat Logistik di Terminal Kembali Ramai IPCC: Logistics Loading and Unloading at Terminals is Busy Again	10 Agustus 2023 August 10, 2023
32	Grup Pelindo, Indonesia Kendaran Terminal (IPCC) Resmi Masuk Indeks FTSE Pelindo Group, Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Officially Enters the FTSE Index	21 Agustus 2023 August 21, 2023
33	IPCC dan Pelabuhan Indonesia Investama Teken MoU Kembangkan Bisnis IPCC and Pelabuhan Indonesia Investama Sign MoU to Develop Business	30 Agustus 2023 August 31, 2023
34	Grup Pelindo (IPCC) Prediksi Kinerja 2024 Moncer Berkat Mobil Listrik Pelindo Group (IPCC) Predicts 2024 Performance to be Great Thanks to Electric Cars	06 September 2023 September 06, 2023
35	IPCC atau PT IKT Tbk. Gelar RUPS dan Pubex 2023 di awal September ini IPCC or PT IKT Tbk. Hold the 2023 GMS and Pubex in early September	07 September 2023 September 07, 2023
36	Grup Pelindo (IPCC) Ungkap Rencana Ekspansi, Biidik Pertumbuhan 20 Persen Pelindo Group (IPCC) Reveals Expansion Plans, Aims for 20 Percent Growth	19 September 23 September 19, 2023
37	IPCC SAH Ekspansi Bisnis ke Balikpapan, Sebagai bagian dari EKOSISTEM Terminal KENDARAAN di Indonesia IPCC LEGAL Business Expansion to Balikpapan, as part of the Kendaraan Terminal ECOSYSTEM in Indonesia	21 Oktober 2023 October 21, 2023
38	Laba Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Melonjak 30% Hingga Kuartal III-2023 Indonesian Kendaraan Terminal (IPCC) Profits Jump 30% Until Quarter III-2023	21 Oktober 2023 October 21, 2023
39	Grup Pelindo (IPCC) Bukukan Laba RP141,94 Miliar Kuartal III/2023, Naik 30,35% Pelindo Group (IPCC) recorded Profit of Rp141.94 Billion in Quarter III/2023, Increased by 30.35%	21 Oktober 2023 October 21, 2023
40	IPCC Laporkan Laba Kuartal III-2023 Tumbuh 30,34% Jadi Rp141,94 Miliar IPCC Reports Third Quarter 2023 Profit Grows 30.34% to Rp141.94 Billion	21 Oktober 2023 October 21, 2023
41	Laba IPCC Melonjak di Kuartal III-2023 IPCC Profits Soar in the Third Quarter of 2023	21 Oktober 2023 October 21, 2023
42	Bunga Deposito Topang IPCC Raup Laba Rp141 Miliar Pada Akhir September 2023 Deposit Interest Supports IPCC to Earn Profit of Rp141 Billion by the End of September 2023	21 Oktober 2023 October 21, 2023
43	IPCC Raih Peningkatan Pendapatan 7,83 Persen Jadi Rp548 Miliar Di Kuartal III 2023 IPCC Achieves Revenue Increase of 7.83 Percent to Rp548 Billion in the Third Quarter of 2023	21 Oktober 2023 October 21, 2023
44	Kuartal III 2023, IPCC Raih Laba Rp141,94 Miliar, Naik 30,34 Persen Third Quarter 2023, IPCC Achieves Profit of Rp141.94 Billion, Increased by 30.34 Percent	23 Oktober 2023 October 23, 2023
45	Kolaborasi IPCC dan Hyundai Glovis Makin Lekat Collaboration between IPCC and Hyundai Glovis is getting closer	03 November 2023 November 03, 2023
46	IPCC Lakukan Perluasan Lahan, Langkah yang Menguntungkan? IPCC Carrying Out Land Expansion, A Profitable Step?	12 November 2023 November 12, 2023
47	IPCC Proyeksikan Kas Internal Rp 1 Triliun pada 2024 IPCC Projects Internal Cash of Rp1 Trillion in 2024	13 November 2023 November 13, 2023
48	IPCC Tebar Dividen Rp21,70 per Saham IPCC Distributes Dividend of Rp21.70 per Share	13 Desember 2023 December 13, 2023
49	Grup Pelindo (IPCC) Bagi Dividen Interim Rp39,46 Miliar Pelindo Group (IPCC) Distributes Interim Dividends of Rp39.46 Billion	14 Desember 2023 December 14, 2023
50	IPCC bagikan dividen interim Rp 39,45 miliar IPCC distributes interim dividends of Rp39.45 billion	14 Desember 2023 December 14, 2023
51	Sambut Akhir Tahun Bahagia, IPCC Tebar Dividend Interim Welcoming a Happy End of Year, IPCC Distributes Interim Dividend	14 Desember 2023 December 14, 2023

NO	Siaran Pers Press Release	Tanggal Date
52	Entitas Usaha Grup Pelindo (IPCC) Tebar Dividen Rp 39 Miliar Pelindo Group Business Entity (IPCC) Distributes Dividends of Rp39 Billion	14 Desember 2023 December 14, 2023
53	Awal Tahun 2024 Siap-siap Tadahi Dividen Interim IPCC Rp39,46 Miliar Early 2024 Get Ready to Obtain IPCC Interim Dividends of Rp39.46 Billion	15 Desember 2023 December 15, 2023
54	Cair 12 Januari 2024, IPCC Tabur Dividen Interim Rp21,7 per Lembar Disbursed January 12 2024, IPCC Distributes Interim Dividend Rp21.7 per Share	18 Desember 2023 December 18, 2023
55	Kepoin Emiten bjb Sekuritas Menakar Kinerja IPCC di Tahun 2023 Kepoin Issuer bjb Securities Measuring IPCC Performance in 2023	28 Desember 2023 December 28, 2023
56	Perluas Jangkauan Layanan, IPCC Menggandeng Subaru Expanding Service Range, IPCC Collaborates with Subaru	21 Desember 2023 December 21, 2023
57	Yakin Akan Tumbuh, Direktur Utama Sugeng Mulyadi dan Direktur Operasi dan Teknik Bagus Dwipoyono Beli Saham IPCC Confident of Growth, President Director Sugeng Mulyadi and Director of Operations and Engineering Bagus Dwipoyono Buy IPCC Shares	21 Desember 2023 December 21, 2023

KOMUNIKASI INTERNAL

Perseroan memiliki komitmen tinggi untuk membina hubungan yang baik dengan karyawan salah satu caranya dengan membangun hubungan komunikasi internal yang baik dan efektif.

Proses komunikasi internal dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai kanal komunikasi internal yang dimiliki, seperti:

INTERNAL COMMUNICATIONS

The Company has a high commitment to fostering good relationships with employees, one of the ways is by building good and effective internal communication relationships.

The internal communication process is carried out by optimizing various internal communication channels, such as:

Tabel Frekuensi Keterbukaan Informasi dalam Komunikasi Internal
Frequency Table of Information Disclosure in Internal Communication

Media Keterbukaan Informasi Information Disclosure Media	2023
Grup WhatsApp WhatsApp Group	25
Email Perusahaan Company Email	11
Pelindo E-Office	10
Portaverse	10

halaman ini sengaja dikosongkan

this page intentionally left blank

Kode Etik
Code of Conduct

IPCC senantiasa menjunjung tinggi integritas dengan memiliki dan menjalankan Pedoman Kode Etik dan Bisnis yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.56/3/4/IKT-2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Pedoman Kode Etik dan Bisnis.

Pedoman Kode Etik dan Bisnis IPCC menjadi dasar sikap dan tindakan karyawan agar dapat bekerja secara profesional dan beretika dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan serta peraturan internal dan eksternal yang berlaku. Kode Etik dan Bisnis IPCC berlaku bagi seluruh level organisasi meliputi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan.

TUJUAN PEMBERLAKUAN KODE ETIK

Tujuan pemberlakuan Pedoman Kode Etik dan Bisnis antara lain untuk memberikan informasi, kesadaran, pelatihan, serta cara untuk melaporkan setiap pelanggaran atau ketidakjelasan terkait dengan etika profesional dan etika kerja. Selain itu, Kode Etik Bisnis dapat membantu Insan IPCC dalam mengatasi isu-isu seputar etika atau dilema yang mungkin dihadapi dalam keseharian. Pelanggaran dari kode etik bisnis ini merupakan tindakan indisipliner dan akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Kode Etik dan Bisnis IPCC menjelaskan perilaku-perilaku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan serta standar berperilaku yang diharapkan dari karyawan saat berinteraksi dengan rekan kerja, mitra bisnis, pelanggan, dan konsumen. Dengan adanya Kode Etik Bisnis, Perseroan berharap dapat menghadirkan lingkungan kerja yang disiplin, kondusif, dan teratur bagi seluruh karyawan. Hal ini sekaligus menekankan komitmen Perseroan terhadap sikap integritas, pelaksanaan etika bisnis dan standarisasi yang menuntun seluruh insan Perseroan untuk selalu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian dalam upaya menghadirkan praktik operasi yang adil, penerapan Kode Etik Bisnis juga bertujuan untuk menutup celah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

IPCC always upholds integrity by having and implementing the Code of Conduct Guidelines stipulated based on the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No. HK.56/3/4/IKT-2022 dated 12 December 2022 concerning Code of Conduct Guidelines.

The IPCC Code of Conduct guidelines are the basis for employee attitudes and actions so that they can work professionally and ethically by using basic principles that refer to the Company's Vision, Mission and Culture as well as applicable internal and external regulations. The IPCC Code of Conduct applies to all levels of the organization including the Board of Commissioners, Directors and all employees.

PURPOSE OF ENFORCEMENT A CODE OF CONDUCT

The aim of enforcing the Code of Conduct Guidelines is, among other things, to provide information, awareness, training, and a way to report any violations or ambiguities related to professional ethics and work ethics. In addition, the Code of Business Ethics can assist IPCC Personnel in dealing with ethical issues or dilemmas that may be faced in everyday life. Violation of this business Code of Conduct is an disciplinary action and will be subject to applicable sanctions.

The IPCC Code of Conduct explains the behaviors that should or should not be performed as well as the standards of behavior that are expected from employees when interacting with colleagues, business partners, customers and consumers. With the Code of Business Ethics, the Company hopes to provide a disciplined, conducive and orderly work environment for all employees. This also emphasizes the Company's commitment to integrity, implementation of business ethics and standardization which guides all Company personnel to always carry out their duties with full responsibility. Then, in an effort to provide fair operating practices, the implementation of the Code of Business Ethics also aims to close the gap in Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) practices.

Selain menjaga pertumbuhan bisnis yang positif dan berkelanjutan, Perseroan juga harus menjaga citra dan kredibilitas perusahaan di mata para Pemangku Kepentingan karena kepercayaan yang diberikan kepada Perseroan merupakan hal berharga yang dapat mendukung keberlangsungan usaha pada jangka panjang. Hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan perilaku seluruh insan Perseroan dalam berinteraksi dengan para Pemangku Kepentingan. Pengelolaan Perseroan yang baik selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika.

Pedoman Kode Etik dan Bisnis Perseroan mengatur 2 (dua) topik utama, yakni etika kerja dan etika bisnis, yang bersifat mengikat bagi semua karyawan.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Pokok-pokok Pedoman Kode Etik Bisnis terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Etika Profesional dan Etika Kerja, dengan uraian sebagai berikut:

1. **Etika Profesional**
   Etika Profesional adalah pedoman etika yang mengatur perilaku yang diharapkan dari seorang insan Perseroan, baik sebagai individu yang profesional ataupun dalam berhubungan dengan segenap Pemangku Kepentingan.
   a. Insan IPCC
      Mengatur perilaku seluruh insan Perseroan sebagai individu ataupun sebagai profesional sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
   b. Pelanggan
      Selaras dengan salah satu corporate values Perseroan yaitu customer centric, dimana insan IPCC harus berkomitmen untuk memberikan perhatian, harga, kualitas, waktu dan keamanan yang setara melalui pemberian layanan dengan standar kualitas yang baik kepada pelanggan, yaitu di antaranya:
      i) Insan Perseroan diharapkan dapat secara konsisten memenuhi harapan pelanggan dan memberikan pelayanan yang luar biasa dan berkualitas.
      ii) Insan Perseroan diharuskan untuk menjaga perilaku baik dan tekun dalam memberikan kepuasan pelanggan dan bekerja dengan pemikiran yang inovatif dan kreatif.
      iii) Insan Perseroan diharuskan bekerja sama untuk menghilangkan perilaku arogan dan birokratis karena hal tersebut berpengaruh buruk bagi perkembangan dan keberhasilan Perseroan.

Apart from maintaining positive and sustainable business growth, the Company must also maintain the company's image and credibility in the eyes of its Stakeholders because the trust given to the Company is a valuable thing that can support long-term business sustainability. This is of course very closely related to the behavior of all Company personnel in interacting with Stakeholders. Good company management, apart from having to follow applicable rules and regulations, must also uphold ethical norms and values.

The Company's Code of Conduct Guidelines regulates 2 (two) main topics, namely work ethics and business ethics, which are binding on all employees.

PRINCIPLES OF THE CODE OF CONDUCT

The main points of the Code of Business Ethics are divided into 2 (two), namely Professional Ethics and Work Ethics, with the following description:

1. **Professional Ethics**
   Professional Ethics are ethical guidelines that regulate the behavior expected of a Company member, both as a professional individual and in dealing with all Stakeholders.

   a. IPCC People
      Regulate the behavior of all Company personnel as individuals or as professionals in accordance with applicable regulations and norms.
   b. Customers
      In line with one of the Company's corporate values, namely customer centric, where IPCC personnel must be committed to providing equal attention, price, quality, time and safety by providing services with good quality standards to customers, including:
      i) Company personnel are expected to consistently meet customer expectations and provide extraordinary and quality service.

      ii) Company personnel are required to maintain good behavior and be diligent in providing customer satisfaction and work with innovative and creative thinking.

      iii) Company personnel are required to work together to eliminate arrogant and bureaucratic behavior because this has a negative impact on the development and success of the Company.

iv) Insan Perseroan harus yakin dengan prinsip penyempurnaan secara terus-menerus dengan mengikutsertakan pendapat serta saran dari para pelanggan dan menggunakannya sebagai cara untuk terus menyempurnakan proses dan kualitas pelayanan kami.
v) Insan Perseroan harus memperhatikan keluhan-keluhan pelanggan dan mencoba menyelesaikannya memberikan solusi yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.
vi) Insan Perseroan diharapkan untuk membangun pola komunikasi yang jujur dengan para pelanggan untuk mendorong terciptanya hubungan yang saling percaya dan transparan.
vii) Insan Perseroan memperlakukan para pelanggan sebagai tumpuan bisnis Perseroan dan menjadikan kepuasan mereka sebagai pertimbangan yang utama, sehingga Insan Perseroan akan selalu berusaha untuk memberikan nilai berharga bagi para pelanggan.

c. Vendor

Perseroan terus berusaha membangun hubungan berbasis kepercayaan dan kemakmuran para vendor, berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu di antaranya:

i) Berkolaborasi dengan para vendor dengan cara menguraikan segala kesepakatan dalam dokumen tertulis yang didasari maksud baik dan menguntungkan kedua belah pihak.
ii) Melakukan pendekatan yang terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku.
iii) Percaya dalam memberikan kesempatan yang setara kepada para vendor dalam menjalankan bisnis.
iv) Menghentikan hubungan bisnis dengan vendor mana pun apabila mereka tidak mematuhi Kode Etik Bisnis Perseroan dan menjalankan bisnis dengan cara yang
v) Menciptakan transparansi dan membangun kepercayaan dengan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dapat membantu para vendor membangun pemahaman yang lebih baik mengenai bisnis kami.
vi) Secara tegas mematuhi Kode Etik Bisnis Perseroan dan mendorong para vendor untuk mengikuti hal yang sama di mana Perseroan memiliki hak penuh untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka apabila terjadi pelanggaran.

iv) Company personnel must believe in the principle of continuous improvement by incorporating opinions and suggestions from customers and using them as a way to continuously improve our processes and service quality.
v) Company personnel must pay attention to customer complaints and try to resolve them by providing solutions that can be implemented on an ongoing basis.
vi) Company personnel are expected to build honest communication patterns with customers to encourage the creation of relationships of mutual trust and transparency.
vii) Company Personnel treat customers as the foundation of the Company's business and make their satisfaction the main consideration, so that Company Personnel will always strive to provide valuable value to customers.

c. Vendors

The Company continues to strive to build relationships based on trust and prosperity with vendors, based on applicable laws, including:

i) Collaborate with vendors by outlining all agreements in written documents that are based on good intentions and benefit both parties.
ii) Take an open, transparent and accountable approach in complying with applicable rules and laws.
iii) Believes in providing equal opportunities to vendors in running business.
iv) Terminate business relationships with any vendor if they do not comply with the Company's Code of Business Ethics and conduct business in a manner that
v) Create transparency and build trust by providing information according to business needs that can help vendors build a better understanding of our business.
vi) Strictly comply with the Company's Code of Business Ethics and encourage vendors to follow the same where the Company has the full right to take legal action against them if violations occur.

d. Kompetitor
Perseroan berkomitmen untuk mematuhi hukum persaingan bisnis baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, yaitu di antaranya:
i) Tidak terlibat dalam praktik perdagangan terlarang, penyalahgunaan dominasi pasar atau aktivitas perdagangan tidak adil lainnya, berdasarkan peraturan dan arahan pemerintah.
ii) Tidak akan menyampaikan informasi yang tidak benar tentang layanan kompetitor.
iii) Mengutamakan keadilan, kebenaran, dan transparansi terhadap kompetisi bisnis dengan mengikuti aturan dan undang-undang yang berlaku.
iv) Tidak diperkenankan menyampaikan komentar atau pendapat tentang layanan atau produk yang dihasilkan kompetitor.

e. Komunitas dan Lingkungan
Perseroan berkomitmen untuk mendukung kelangsungan ekonomi, lingkungan dan sosial, yaitu di antaranya:
i) Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekaligus mendorong kerapian dan membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas sekitar tempat bekerja.
ii) Dalam bekerja selalu menunjukkan perilaku yang baik dengan rekan kerja dan anggota komunitas lainnya.
iii) Menjaga lingkungan dengan meminimalisasi dan mengurangi dampak lingkungan di area sekitar.
iv) Secara konsisten memberikan komitmen untuk membangun bangsa dengan cara yang bertanggung jawab dan memperhatikan keadaan lingkungan dan komunitas.
v) Mematuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah dan mengaplikasikan peraturan yang relevan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

f. Institusi Pemerintah
Perseroan berkolaborasi penuh dengan regulator dan institusi lain dengan tujuan membangun hubungan yang harmonis serta memastikan kelancaran fungsi bisnis, yaitu di antaranya:
i) Dalam berinteraksi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan dan peraturan perusahaan yang berlaku.
ii) Membangun hubungan yang harmonis dan positif dengan mengutamakan kejujuran dan saling menghormati.
iii) Harus mendapatkan persetujuan yang dibutuhkan sebelum berinteraksi dengan regulator dan institusi terkait saat menjalankan bisnis.

d. Competitors
The Company is committed to complying with business competition laws both written and unwritten, including:
i) Not engage in illicit trading practices, abuse of market dominance or other unfair trading activities, based on government regulations and directives.
ii) Will not convey incorrect information about competitor services.
iii) Prioritize fairness, truth and transparency in business competition by following applicable rules and laws.
iv) It is not permitted to express comments or opinions about services or products produced by competitors.

e. Community and Environment
The Company is committed to supporting economic, environmental and social sustainability, including:
i) Maintain a clean and healthy environment while encouraging tidiness and building harmonious relationships with the community around the place of work.
ii) When working, always show good behavior with colleagues and other community members.
iii) Protect the environment by minimizing and reducing environmental impacts in the surrounding area.
iv) Consistently provide a commitment to develop the nation in a responsible manner and pay attention to the condition of the environment and community.
v) Comply with all government laws and regulations and apply relevant regulations in carrying out daily work.

f. Government Institutions
The Company collaborates fully with regulators and other institutions with the aim of building harmonious relationships and ensuring smooth business functions, including:
i) When interacting, you must comply with the provisions of applicable laws and company regulations.
ii) Building harmonious and positive relationships by prioritizing honesty and mutual respect.
iii) Must obtain necessary approvals before interacting with regulators and relevant institutions while conducting business.

iv) Memastikan setiap informasi dan laporan yang diberikan kepada regulator dan pemerintah akurat dan lengkap.
v) Dilarang memberikan suap/gratifikasi yang mempengaruhi keputusan atau sebagai imbalan atas perlakuan yang diinginkan.

g. Aktivitas Politik
Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan sikap netral terhadap partai politik, tidak memberikan bantuan dana ke partai politik, politisi, atau calon pejabat mana pun di negara mana pun. Beberapa etika yaitu di antaranya:
i) Menghindari menjadi anggota atau pengurus Partai Politik.
ii) Menghindari mengatasnamakan IPCC Terminal dalam aktivitas dan kontribusi pada kegiatan politik.
iii) Menghindari menggunakan dana, harta benda, pelayanan atau sumber daya IPCC untuk aktivitas dan kontribusi politik.
iv) Menghindari penggunaan atribut partai, melakukan kampanye dan aktivitas politik di lingkungan kerja.

2. Etika Kerja
Etika Kerja adalah pedoman etika yang mengatur perilaku yang diharapkan dari seorang insan Perseroan, terkait dengan pelaksanaan aktivitas pekerjaan sehari-hari:

- Pendokumentasian dan Pencatatan Perusahaan
- Mengikuti semua prinsip dan standar pendokumentasian dan pencatatan, melaporkan semua informasi dalam Perseroan secara akurat dan tepat waktu.
- Kontrol Internal
- Memiliki kontrol internal yang kuat untuk mematuhi hukum dan prosedur yang berlaku.
- Perjalanan Dinas
- Pedoman etika yang mengatur mengenai perjalanan dinas insan Perseroan.
- Kerahasiaan Data dan/atau Informasi
- Setiap insan Perseroan berkomitmen untuk melindungi informasi bisnis dan pribadi serta menjamin kerahasiaannya.
- Setiap insan Perseroan berkomitmen untuk berperilaku etis sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan menghindari hubungan, aktivitas, atau perkumpulan yang akan mengurangi kemampuan pengambilan keputusan secara adil dan objektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
- Hubungan Pribadi
- Menghindari hubungan pribadi atau keterlibatan emosional dengan kompetitor, vendor atau bawahan yang akan mempengaruhi kemampuan membuat keputusan.

iv) Ensure that all information and reports provided to regulators and the government are accurate and complete.
v) It is prohibited to give bribes/gratuities to influence decisions or in return for desired treatment.

g. Political Activities
The Company is committed to maintaining a neutral attitude towards political parties, not providing financial assistance to any political party, politician or candidate for office in any country. Some ethics include:
i) Avoid becoming a member or administrator of a political party.
ii) Avoid using the name of the IPCC Terminal in activities and contributions to political activities.
iii) Avoid using IPCC funds, property, services or resources for political activities and contributions.
iv) Avoid using party attributes, conducting campaigns and political activities in the work environment.

2. Work Ethics
Work Ethics are ethical guidelines that regulate the expected behavior of Company personnel, related to the implementation of daily work activities:

- Company Documentation and Recording
- Follow all documentation and recording principles and standards, report all information within the Company accurately and on time.
- Internal Controls
- Have strong internal controls to comply with applicable laws and procedures.
- Business trips
- Ethical guidelines governing official travel of Company personnel.
- Confidentiality of Data and/or Information
- Every member of the Company is committed to protecting business and personal information and ensuring its confidentiality.
- Every member of the Company is committed to behaving ethically in accordance with the Company's interests by avoiding relationships, activities or associations that will reduce the ability to make decisions fairly and objectively in carrying out their duties and responsibilities.
- Personal Relationships
- Avoid personal relationships or emotional involvement with competitors, vendors or subordinates that would influence decision-making ability.

- Memperlakukan Keluarga dan Teman
- Pedoman etika yang mengatur hubungan keluarga atau pertemanan dengan kompetitor, vendor, atau bawahan.
- Donasi
- Setiap insan Perseroan tidak diperkenankan untuk mendukung atau memberikan donasi untuk kepentingan politik. Donasi hanya akan diberikan dengan dasar etika kerja dan profesional.
- Anti-Penyuapan
- Perseroan secara tegas mengecam dan melarang segala bentuk penyuapan.
- Media, Komunikasi dan Penyebaran Informasi
- Pedoman yang mengatur mengenai cara penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan.

PERNYATAAN BAHWA KODE ETIK PERUSAHAAN BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Pedoman Kode Etik dan Bisnis IPCC berlaku tanpa terkecuali bagi setiap karyawan hingga ke tingkat Direksi. Sebagai bukti atas komitmen dan kesungguhan seluruh insan Perseroan dalam menerapkan menjalankan aktivitas bisnis yang sehat sesuai dengan standar dan moral etika tertinggi dalam setiap kegiatan yang dilakukan, maka Perseroan mewajibkan masing-masing karyawan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk menandatangani Pakta Integritas.

PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI KODE ETIK

Kegiatan sosialisasi atau internalisasi menjadi salah satu tahapan penting yang tidak boleh terlewatkan di dalam proses penegakkan Kode Etik. Oleh sebab itu, kegiatan sosialisasi Kode Etik harus dilakukan secara terus menerus sehingga pada jangka panjang dapat menjadi sebuah budaya kerja yang melekat kuat pada ekosistem bisnis Perseroan.

Perseroan membagikan buku Pedoman Kode Etik kepada seluruh insan IPCC untuk dibaca, dipelajari, dan ditandatangani sebagai bukti bahwa masing-masing karyawan sudah memahami standar perilaku yang diharapkan Perseroan. Selain itu, agar proses sosialisasi dapat berjalan efektif dan menjangkau seluruh tingkatan karyawan serta pihak eksternal, Perseroan juga mencantumkan Pedoman Kode Etik juga tersedia pada situs web Perseroan, yang dapat diakses pada halaman www.indonesiacarterminal.co.id/kode-etik-perusahaan.

- Treat Family and Friends
- Ethical guidelines governing family or friendship relationships with competitors, vendors, or subordinates.
- Donation
- Every member of the Company is not permitted to support or make donations for political interests. Donations will only be given on the basis of work ethics and professionalism.
- Anti-Bribery
- The Company firmly condemns and prohibits all forms of bribery.
- Media, Communication and Information Dissemination
- Guidelines that regulate how to convey information to stakeholders.

STATEMENT THAT THE COMPANY'S CODE OF CONDUCT APPLIES TO ALL LEVELS OF THE ORGANIZATION

The IPCC Code of Conduct guidelines apply without exception to every employee up to the Board of Directors level. As proof of the commitment and seriousness of all Company personnel in implementing healthy business activities in accordance with the highest ethical standards and morals in every activity carried out, the Company requires each employee, including the Board of Commissioners and Directors, to sign an Integrity Pact.

DISSEMINATION AND SOCIALIZATION OF THE CODE OF CONDUCT

Socialization or internalization activities are one of the important stages that cannot be missed in the process of enforcing the Code of Conduct . Therefore, the Code of Conduct socialization activities must be carried out continuously so that in the long term it can become a work culture that is firmly embedded in the Company's business ecosystem.

The Company distributes the Code of Conduct Manual to all IPCC employees to read, study and sign as proof that each employee understands the standards of behavior expected by the Company. In addition, so that the socialization process can run effectively and reach all levels of employees and external parties, the Company also includes Code of Conduct Guidelines which are also available on the Company's website, which can be accessed on the page www.indonesiacarterminal.co.id/kode-istik-usaha.

Seluruh upaya sosialisasi tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman yang mendalam kepada seluruh karyawan agar mereka selalu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai etika dan standar moral yang sudah ditetapkan. Pada jangka panjang, implementasi Kode Etik Bisnis yang berkesinambungan.

Hingga akhir tahun 2023, Perseroan tetap konsisten dalam melakukan sosialisasi Kode Etik kepada seluruh karyawan yang disampaikan melalui media internal.

PAKTA INTEGRITAS

Seluruh Insan Perseroan diharapkan untuk berperan aktif dalam penerapan GCG dan menjadikan GCG sebagai nilai utama dalam aktivitas di lingkungan Perseroan. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan menandatangani Pakta Integritas yang setiap tahunnya diperbarui.

Pada tahun 2023, seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan telah menandatangani Pakta Integritas. Melalui penandatanganan pakta integritas tersebut, seluruh insan Perseroan telah menyatakan:

1. Bersedia menerapkan nilai AKHLAK (Amanah, Kolaboratif, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kompeten), etika kerja, profesionalisme, bekerja dengan disiplin, penuh semangat dan memberikan hasil terbaik dengan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada pelaksanaan pekerjaan sehari-hari;
2. Bersedia menjunjung tinggi kepentingan Perusahaan dari pada kepentingan pribadi atau golongan, serta melaksanakan secara sungguh-sungguh tugas yang diberikan oleh manajemen Perusahaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik di Perusahaan maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bersedia menjaga reputasi Perusahaan dengan terlibat aktif dalam usaha untuk mencegah, melaporkan, mengungkapkan dan tidak melakukan tindakan-tindakan Curang (Fraud), korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merugikan kedudukan, kehormatan, nama baik dan kepentingan Perseroan;
4. Selama menjabat bersedia mematuhi Kebijakan, tujuan, dan persyaratan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan, berintegritas dan berpegang teguh pada prinsip 4 NO's, yaitu:
   a. *No Bribery* (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan);
   b. *No Kickback* (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
   c. *No Gift* (bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku);

All socialization efforts are carried out to raise awareness and deep understanding among all employees so that they always behave in accordance with the ethical values and moral standards that have been set. In the long term, sustainable implementation of the Code of Business Ethics.

Until the end of 2023, the Company remains consistent in disseminating the Code of Conduct to all employees via internal media.

INTEGRITY PACT

All Company Personnel are expected to play an active role in implementing GCG and make GCG the main value in activities within the Company. This commitment is demonstrated by signing the Integrity Pact which is renewed every year.

In 2023, all members of the Board of Commissioners, Directors and employees have signed the Integrity Pact. Through the signing of the integrity pact, all Company personnel have stated:

1. Willing to apply AKHLAK values (Trustworthy, Collaborative, Harmonious, Loyal, Adaptive and Competent), work ethics, professionalism, work with discipline, full of enthusiasm and provide the best results by adhering to the principles of Good Corporate Governance in the implementation of daily work;
2. Willing to uphold the interests of the Company rather than personal or group interests, and seriously carry out the duties assigned by the Company's management in accordance with the legal provisions in force both in the Company and the Unitary State of the Republic of Indonesia;
3. Willing to maintain the Company's reputation by being actively involved in efforts to prevent, report, disclose and not commit acts of fraud, corruption, collusion and nepotism which could harm the position, honor, good name and interests of the Company;
4. During his tenure, he is willing to comply with the Anti-Bribery Management System policies, objectives and requirements, have integrity and adhere to the 4 NO's principles, namely:
   a. No Bribery (no bribery and extortion);
   b. No Kickback (no commissions, tokens of gratitude either in the form of money or in other forms);
   c. No Gift (contrary to applicable rules and regulations);

d. *No Luxurious Hospitality* (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
5. Melakukan internalisasi dan mengajak insan Pelindo termasuk keluarga untuk menerapkan prinsip 4 NO's;
6. Bersedia memegang teguh komitmen untuk menerapkan Standard Operating Procedures (SOP), SLA/SLG dan transparansi di seluruh kegiatan yang dilaksanakan di bawah wewenang saya;
7. Bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang diminta oleh pihak yang berwenang yang menurut ketentuan perundangan wajib saya berikan sehubungan dengan adanya pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun unit kerja di bawah tanggung jawab saya;
8. Bersedia melaporkan melalui Whistle Blowing System Pelindo Bersih jika di dalam menjalankan tugas Saya melihat dan/atau mengetahui adanya tindakan kecurangan, korupsi, pencurian, pelanggaran kebijakan dan peraturan perusahaan, pemerasan, penggelapan yang dilakukan oleh pegawai atau mitra kerja PELINDO;
9. Apabila dikemudian hari ternyata yang menyangkut diri saya ataupun unit kerja di bawah tanggung jawab saya terindikasi dengan bukti awal terdapat tindakan Curang (Fraud), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka saya bersedia dilakukan pemeriksaan oleh Perusahaan dan jika terbukti bersalah menerima hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik di Perusahaan maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENEGAKKAN KODE ETIK

Setiap karyawan diharuskan menandatangani pedoman perilaku saat bergabung di Perseroan dan mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Perseroan juga secara berkala mengadakan berbagai event internal yang rangkaian acaranya bertujuan untuk mensosialisasikan dan menekankan pentingnya menjunjung tinggi sikap profesional, integritas, dan nilai-nilai etika bisnis lainnya dalam bekerja.

Agar pelaksanaan penerapan Kode Etik dapat berjalan efektif, Perseroan telah membentuk tim Kelompok Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (KP2DK) dengan tujuan:
1. Sebagai sumber informasi bagi para Insan Perseroan dan unit kerja tentang kebijakan dan standar perilaku yang diatur dalam pedoman ini.
2. Mengkaji secara berkala dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memperjelas perilaku.
3. Melaporkan penerapan dan kepatuhan terhadap pedoman ini serta masalah-masalah yang dihadapi secara periodik agar dapat dikaji lebih lanjut.

d. No Luxurious Hospitality (no excessive reception or entertainment).
5. Internalize and invite Pelindo personnel, including families, to apply the 4 NO's principles;
6. Willing to uphold the commitment to implement Standard Operating Procedures (SOP), SLA/SLG and transparency in all activities carried out under my authority;
7. Willing to provide information, both verbal and written, requested by the competent authorities which according to statutory provisions I am obliged to provide in connection with complaints involving myself or the work unit under my responsibility;
8. Willing to report via the Pelindo Bersih Whistle Blowing System if in carrying out my duties I see and/or become aware of any acts of fraud, corruption, theft, violations of company policies and regulations, extortion, embezzlement committed by PELINDO employees or work partners;
9. If in the future it turns out that it concerns me or the work unit under my responsibility, it is indicated by initial evidence that there have been acts of Fraud, Corruption, Collusion and Nepotism, then I am willing to be investigated by the Company and if proven guilty, receive punishment in accordance with legal provisions. which applies both to the Company and the Unitary State of the Republic of Indonesia.

ENFORCEMENT OF THE CODE OF CONDUCT

Every employee is required to sign a code of conduct when joining the Company and apply it in their daily activities. The Company also periodically holds various internal events whose series of events aim to socialize and emphasize the importance of upholding professional attitudes, integrity and other business ethical values at work.

In order to implement the Code of Conduct effectively, the Company has formed an Employee Disciplinary Violation Inspection Group (KP2DK) team with the aim of:
1. As a source of information for Company Personnel and work units regarding the policies and standards of behavior regulated in this guideline.
2. Review periodically and make necessary adjustments to clarify behavior.
3. Report on the implementation and compliance with these guidelines as well as problems encountered periodically so that they can be studied further.

4. Membahas adanya pelanggaran dan mempertimbangkan sanksi yang dijatuhkan sesuai peraturan yang berlaku untuk dilaporkan dan direkomendasikan kepada:
   a. Direktur Keuangan dan SDM untuk kasus pelanggaran disiplin sedang atau berat dengan ancaman hukuman selain Pemutusan Hubungan Kerja;
   b. Tim Pertimbangan Disiplin Karyawan (TPDK) untuk kasus pelanggaran disiplin berat dengan ancaman hukuman berupa Pemutusan Hubungan Kerja.

SANKSI UNTUK SETIAP JENIS PELANGGARAN

Jenis sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada karyawan yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin kerja adalah:
1. Hukuman Disiplin Ringan;
2. Hukuman Disiplin Sedang;
3. Hukuman Disiplin Berat.

Jenis Hukuman Disiplin Ringan dapat berupa:
1. Teguran secara tertulis dari atasan langsung;
2. Pernyataan tidak puas secara tertulis dari Perusahaan.

Jenis Hukuman Disiplin Sedang berupa:
1. Denda sebesar 10% dari Penghasilan sebulan selama 3 (tiga) bulan, sesuai peraturan yang berlaku;
2. Denda sebesar 20% dari Penghasilan sebulan selama 3 (tiga) bulan, sesuai peraturan yang berlaku.

Jenis Hukuman Disiplin Berat dapat berupa:
1. Penurunan jabatan dan/atau kelas jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah dari jabatan dan/atau kelas jabatan semula;
2. Penurunan jabatan dan/atau kelas jabatan 2 (dua) tingkat lebih rendah dari jabatan dan/atau kelas jabatan semula;
3. Pengembalian Pekerja yang ditugaskan di Perusahaan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Terhadap karyawan yang melanggar disiplin, selain hukuman di atas dilakukan pemotongan bonus untuk tahun saat jatuhnya hukuman sebagai berikut:
1. Untuk Hukuman Disiplin Ringan Bonus tahunan diberikan 70%;
2. Untuk Hukuman Disiplin Sedang Bonus tahunan diberikan 40%;
3. Untuk Hukuman Disiplin Berat tidak diberikan Bonus tahunan.

4. Discuss any violations and consider sanctions imposed in accordance with applicable regulations to be reported and recommended to:
   a. Director of Finance and HR for cases of moderate or serious disciplinary violations with the threat of punishment other than Termination of Employment;
   b. Employee Discipline Consideration Team (TPDK) for cases of serious disciplinary violations with the threat of punishment in the form of Termination of Employment.

SANCTIONS FOR EACH TYPE OF VIOLATION

The types of sanctions or penalties that can be given to employees who are proven to have committed work discipline violations are:
1. Light Disciplinary Punishment;
2. Moderate Disciplinary Punishment;
3. Severe Disciplinary Punishments.

Types of Light Disciplinary Punishment can be:
1. Written warning from direct superior;
2. Written statement of dissatisfaction from the Company.

Types of Medium Disciplinary Punishment in the form of:
1. Fine of 10% of monthly income for 3 (three) months, according to applicable regulations;
2. A fine of 20% of a month's income for 3 (three) months, according to applicable regulations.

Types of Severe Disciplinary Punishment can be:
1. Demotion of position and/or class of position to 1 (one) level lower than the original position and/or class of position;
2. Demotion of position and/or position class to 2 (two) levels lower than the original position and/or position class;
3. Return of workers assigned to the company to PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

For employees who violate discipline, in addition to the above penalties, bonuses will be deducted for the year in which the penalty is imposed as follows:
1. For light disciplinary punishment, the annual bonus is given 70%;
2. For Medium Disciplinary Punishments, the annual bonus is given 40%;
3. For Severe Disciplinary Punishments no annual Bonus is given.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, tidak terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh jajaran Manajemen Puncak maupun karyawan Perseroan.

NUMBER OF CODE OF CONDUCT VIOLATIONS IN 2023

Throughout 2023, there are no violations of the Code of Conduct occurred/were committed by the Company's Top Management or employees.

TREN KUALITAS PENERAPAN KODE ETIK PERUSAHAAN TAHUN 2022-2023

TRENDS IN THE QUALITY OF IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S CODE OF CONDUCT IN 2022-2023

Jenis Pelanggaran Type of Violation	2023	2022
Pelanggaran Ringan Misdemeanor	-	-
Pelanggaran Sedang Moderate Violation	-	-
Pelanggaran Berat Serious Violation	-	-

Jenis Sanksi Types of Sanctions	2023	2022
Teguran secara tertulis dari atasan langsung; Written warning from direct superior;	-	-
Pernyataan tidak puas secara tertulis dari Perusahaan Written statement of dissatisfaction from the Company	-	-
Denda sebesar 10% dari Penghasilan sebulan selama 3 (tiga) bulan, sesuai peraturan yang berlaku. A fine of 10% of a month's income for 3 (three) months, according to applicable regulations.	-	-
Denda sebesar 20% dari Penghasilan sebulan selama 3 (tiga) bulan, sesuai peraturan yang berlaku. A fine of 20% of a month's income for 3 (three) months, according to applicable regulations.	-	-
Penurunan jabatan. Demotion.	-	-
Pengembalian Pekerja yang ditugaskan di IPCC kepada Pelindo. Return of workers assigned to IPCC to Pelindo.	-	-

EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI KODE ETIK TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, Perseroan masih terus konsisten untuk menegakkan pokok-pokok Kode Etik dan penerapan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP), yang sekaligus juga berfungsi sebagai landasan kebijakan Sistem Anti Korupsi dan menjadi gerbang utama dalam sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan.

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE 2023 CODE OF CONDUCT

Throughout 2023, the Company will continue to be consistent in upholding the main points of the Code of Conduct and implementing ISO 37001:2016 concerning the Anti-Bribery Management System (SMAP), which also functions as the basis for the Anti-Corruption System policy and becomes the main gateway in the Company's Whistle Blowing system.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen

Share Ownership Program by Employees and/or Management

Hingga 31 Desember 2023, Perseroan belum memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen.

As of December 31, 2023, the Company does not have a share ownership program for employees and/or management.

Kebijakan Pengungkapan Informasi Lainnya

Other Information Disclosure Policy

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Sebagai anak perusahaan BUMN yang juga merupakan perusahaan terbuka, Perseroan senantiasa mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam aturan kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Direksi dan Komisaris.

Perseroan memastikan bahwa tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan. Informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi telah diuraikan dalam Bab Profil Perusahaan dan pada Bab Tata Kelola Perusahaan, dalam Laporan Tahunan ini.

SHARE OWNERSHIP OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

As a subsidiary of a BUMN which is also a public company, the Company always complies with all applicable laws and regulations, including the rules for ownership of Company shares by members of the Board of Directors and Commissioners.

The Company ensures that no members of the Board of Directors and Board of Commissioners own shares in the Company. Information on share ownership of the Board of Commissioners and Directors has been described in the Company Profile Chapter and in the Corporate Governance Chapter, in this Annual Report.

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistle Blowing System

GAMBARAN UMUM

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara konsisten dan berkelanjutan menjadi nafas dan landasan bagi pelaksanaan bisnis Perseroan. Sebagai warga korporasi yang baik, Perseroan berkomitmen untuk selalu mengedepankan praktik operasi yang adil di mana segala aktivitas dan kegiatan usaha yang dijalankan harus menjunjung tinggi sikap profesional dan integritas, memiliki kesadaran untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, menghargai hak-hak rekan kerja dan para mitra, serta memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku.

Semua insan IPCC juga diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab, transparan dan akuntabel, serta menghindari aktivitas/kegiatan yang mengarah kepada tindakan yang tidak beretika atau melanggar pedoman perilaku, dan benturan kepentingan.

Sebagai bentuk tindak lanjut atas komitmen tersebut, Perseroan telah mengembangkan berbagai perangkat dan kebijakan internal untuk mendukung hadirnya lingkungan kerja yang sehat, salah satunya dengan membangun dan memperkenalkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System/"WBS") sebagai media pelaporan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk melaporkan indikasi pelanggaran atau dugaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. Dengan adanya WBS, Perseroan berharap dapat menekan terjadinya potensi pelanggaran atau praktik bad governance, yakni dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak agar mereka lebih tergerak tanpa ada keraguan untuk menyampaikan informasi-informasi pelanggaran yang kemungkinan besar terjadi pada lingkup bisnis Perseroan, sepanjang laporan tersebut dilandasi dengan itikad baik dan bukan merupakan upaya untuk merugikan Perseroan dalam menciptakan ekosistem bisnis yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

GENERAL DESCRIPTION

The consistent and sustainable application of the principles of good governance is the breath and foundation for the implementation of the Company's business. As a good corporate citizen, the Company is committed to always prioritizing fair operating practices where all activities and business activities carried out must uphold a professional attitude and integrity, have awareness of creating a healthy business competition climate, respect the rights of colleagues and employees. partners, and have the awareness to comply with applicable laws and regulations.

All IPCC personnel are also expected to be able to carry out their duties and responsibilities with full responsibility, transparency and accountability, as well as avoiding activities that lead to unethical actions or violate the code of conduct, and conflicts of interest.

As a form of follow-up to this commitment, the Company has developed various internal tools and policies to support the presence of a healthy work environment, one of which is by building and introducing a Whistle Blowing System (WBS) as a reporting medium that can be utilized by parties. - interested parties to report indications of violations or suspected violations committed by employees. With the existence of WBS, the Company hopes to reduce the occurrence of potential violations or bad governance practices, namely by providing opportunities for all parties so that they are more motivated without any hesitation to convey information about violations that are likely to occur within the Company's business scope, as long as the report is based on in good faith and is not an attempt to harm the Company in creating a business ecosystem that is free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) practices.

PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Penerapan WBS di Perseroan telah dilengkapi dengan Pedoman yang tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar dan Penerapan WBS yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor HK.56/2/2/IKT-21 Tanggal 1 September 2021 tentang Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar (Pungli) dan penerapan Whistle Blowing System (WBS) di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Pedoman tersebut terdiri dari 4 sub-bab, yaitu:

1. Latar belakang dan tujuan
2. Alur Komunikasi Tim/Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) serta Pungli
3. Program IPCC Bersih
4. Alur Proses WBS berikut dengan langkah-langkah tindak lanjut pelaporan dan saluran serta media penyampaiannya

Semua pedoman tersebut ditinjau secara berkala oleh manajemen untuk memastikan kesesuaiannya terhadap dinamika dan disrupsi bisnis yang terjadi.

RUANG LINGKUP WBS

Sebagaimana tercantum dalam Pedoman WBS, berikut ini adalah lingkup pelaporan/pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS, antara lain meliputi:

WHISTLE BLOWING SYSTEM MANUAL

The implementation of WBS in the Company has been equipped with the guidelines contained in the Guidelines for Gratification Management, Reporting of Illegal Levies and Implementation of WBS which have been stipulated through the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors Number HK.56/2/2/IKT-21 dated 1 September 2021 concerning Management Gratification, Reporting of Illegal Levies (Extortion) and implementation of the Whistle Blowing System (WBS) within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. The guidelines consist of 4 sub-chapters, namely:

1. Background and objectives
2. Communication flow of the Gratification Control Team/ Unit (UPG) and Extortion
3. IPCC Clean Program
4. WBS Process Flow along with follow-up reporting steps and delivery channels and media

All these guidelines are reviewed regularly by management to ensure their suitability for the dynamics and business disruption that is occurring.

WBS SCOPE

As stated in the WBS Guidelines, the following is the scope of reporting/complaints regarding alleged violations that can be reported through the WBS, including:

Kategori Pelaporan Reporting Category	**Penjelasan** Explanation
Tindakan curang (tidak adil) Fraudulent (unfair) actions	Tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, ataupun menggerakkan orang lain untuk memberikan keuntungan kepadanya dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum. Actions aimed at benefiting oneself or others, by using a false name or false dignity, by deception, or a series of lies, or by encouraging other people to provide benefits to them in ways that are not true and against the law.
Korupsi Corruption	Tindakan yang secara tidak wajar dan tidak legal dengan tujuan untuk memperkaya diri atau memperkaya orang-orang yang memiliki hubungan istimewa dengannya dengan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Actions that are unreasonable and illegal with the aim of enriching oneself or enriching people who have a special relationship with them by abusing the position and power entrusted to them.
Pencurian Thievery	Kegiatan/tindakan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. The activity/action of taking an item, which wholly or partly belongs to another person, with the intention of possessing it unlawfully.
Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan Violation of Company Policies and Regulations	Tindakan yang dilakukan baik disengaja maupun terencana yang bertentangan dengan kebijakan dan peraturan internal Perseroan. Actions carried out whether intentional or planned that conflict with the Company's internal policies and regulations.

Kategori Pelaporan Reporting Category	**Penjelasan** Explanation
Benturan kepentingan Conflict of Interest	Sebuah situasi dan kondisi karena kedudukan dan jabatan memiliki kewenangan yang berpotensi disalahgunakan baik sengaja maupun tidak disengaja untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis IPCC. A situation and condition due to position and position has the potential to be misused, either intentionally or unintentionally, for personal interests, thereby creating a conflict between personal and/or group and/or family interests and the IPCC's economic interests.
Penyuapan (Gratifikasi) Bribery (Gratification)	Suatu tindakan/kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan sadar, seperti menerima sesuatu atau janji, sedangkan seseorang tersebut mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya seseorang tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya. An action/activity carried out deliberately and consciously, such as receiving something or a promise, while a person knows or reasonably suspects that giving something or a promise is intended to make the person do something or not do something in their duties, which is contrary to their authority or obligations. .
Penggelapan Embezzlement	Tindakan atau kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang saat ini ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Actions or activities carried out intentionally and consciously against the law to own something which wholly or partly belongs to another person, which is currently in his or her control, not because of a crime.
Penipuan Fraud	Tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan sadar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Actions or activities carried out intentionally and consciously with the intention of benefiting oneself or others unlawfully, by using a false name or false dignity with deception, or a series of lies, encouraging other people to hand over something to them, or to give them a debt. or write off receivables.
Pemerasan Extortion	Kegiatan atau tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang tersebut atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Activities or actions carried out with the intention of unlawfully benefiting oneself or another person, forcing someone with violence or the threat of violence to give something, which in whole or in part belongs to that person or another person, or in order to create a debt or write off a receivable.
Pungutan Liar (Pungli) Illegal Levies (Extortion)	Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Illegal levies are acts carried out by someone by requesting payment of an amount of money that is not appropriate or not based on the regulations relating to the payment. This is often equated with acts of extortion, fraud or corruption. Illegal levies are also included in the category of office crimes, where the concept of office crimes explains that officials, in order to benefit themselves or others, abuse their power to force someone to give something, to pay or receive payment at a discount, or to do something for themselves.

SOSIALISASI DAN UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Perseroan melakukan sosialisasi WBS secara berkala kepada seluruh insan IPCC agar pemahaman setiap karyawan mengenai fungsi, keberadaan, dan mekanisme kerja WBS semakin mendalam. Kegiatan sosialisasi WBS tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan platform internal yang ada sehingga diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan karyawan. Selain membangun kesadaran internal, IPCC juga melakukan sosialisasi WBS kepada pihak eksternal, salah satunya dengan cara mempublikasikan kebijakan WBS pada situs web Perseroan, dan whistleblowing system.

SOCIALIZATION AND EFFORTS TO IMPROVE THE QUALITY OF THE WHISTLE BLOWING SYSTEM

The Company regularly socializes the WBS to all IPCC personnel so that each employee's understanding of the function, existence and working mechanisms of the WBS becomes deeper. The WBS socialization activity is carried out by optimizing the existing internal platform so that it is hoped that it can reach all levels of employees. Apart from building internal awareness, the IPCC also disseminates WBS to external parties, one of which is by publishing the WBS policy on the Company's website and the whistle blowing system.

PIHAK PENGELOLA ADUAN

Pengelolaan WBS pada lingkup IPCC menjadi tanggung jawab yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem pencegahan dan saluran whistleblowing di lingkungan Perseroan.

Seluruh laporan yang masuk melalui WBS harus dianalisis oleh Tim UPG dan setiap laporan yang masuk serta telah dianalisis tersebut disampaikan kepada Direksi Perseroan.
Tim Unit Pengendali Gratifikasi

COMPLAINTS MANAGEMENT

WBS management within the scope of the IPCC is the responsibility of those responsible for implementing the prevention system and whistle blowing channels within the Company.

All reports entered through the WBS must be analyzed by the UPG Unit and every report that is entered and has been analyzed is submitted to the Company's Board of Directors.

Ketua Tim Unit Head	Senior Manager Sekretaris Perusahaan Senior Manager of Corporate Secretary
Wakil Ketua Tim Vice Unit Head	Senior Manager Audit Internal dan Manajemen Risiko Senior Manager of Internal Audit and Risk Management
Sekretaris Secretary	Assistant Senior Manager Hukum Assistant Senior Manager of Legal
Anggota Member	Para Senior Manager Perusahaan Company Senior Managers

SUB-TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Jika diperlukan, Ketua Tim UPG dapat mengusulkan pembentukan sub-tim dalam menjalankan tugas kelancaran pengelolaan Whistle Blowing System (WBS).

GRATIFICATION CONTROL UNIT SUB-TEAM

If necessary, the UPG Unit Head can propose the formation of a sub-team to carry out the task of smoothly managing the Whistle Blowing System (WBS).

MEKANISME ATAU PROSEDUR PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLE BLOWING MECHANISM OR PROCEDURE



Sesuai Laporan yang Dierima

According to the Report Received



Alur Tindak Lanjut Laporan

Terefleksi pada flow chart di atas, berikut ini adalah mekanisme atau prosedur pelaporan pengaduan yang harus dipahami dan dilakukan oleh para Pelapor apabila ingin menyampaikan laporan pengaduan mereka melalui saluran WBS Perseroan, yaitu:

1. Pelapor menyampaikan laporan pengaduannya kepada Tim UPG dengan isi laporan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
   a. Pelapor harus menyebutkan identitasnya agar Manajemen dapat memberikan jaminan perlindungan terhadapnya. Pengungkapan identitas secara jelas juga bertujuan untuk mempermudah tindaklanjut laporan dalam hal dibutuhkan data tambahan;
   b. Uraian pelanggaran yang dilaporkan;
   c. Data pelapor dan pihak lain yang terlibat serta unitnya (bila ada);
   d. Data terkait tempat kejadian dan waktu kejadian;
   e. Dokumen pendukung dan/atau bukti lainnya (bila ada).
2. Laporan yang masuk akan diterima oleh Tim UPG dan direkam dalam register pelaporan WBS Perseroan.
3. Tim UPG akan menindaklanjuti laporan dalam waktu maksimal 1 hari kerja.

Report Follow-up Flow

Reflected in the flow chart above, the following is a complaint reporting mechanism or procedure that must be understood and carried out by Whistleblowers if they wish to submit their complaint report via the Company's WBS channel, namely:

1. The reporter submits his complaint report to the UPG Unit with the contents of the report containing at least the following:
   a. The reporter must state his identity so that Management can guarantee protection for him. Disclosure of identity clearly also aims to make it easier to follow up on reports in the event that additional data is needed;
   b. Description of the reported violation;
   c. Data of the reporter and other parties involved and their units (if any);
   d. Data related to the location of the incident and time of the incident;
   e. Supporting documents and/or other evidence (if any).
2. Incoming reports will be received by the UPG Unit and recorded in the Company's WBS reporting register.
3. The UPG Unit will follow up on the report within a maximum of 1 working day.

4. Laporan dapat ditindaklanjuti apabila:
   a. Merupakan tindakan pelanggaran yang melibatkan insan Perseroan;
   b. Berdampak terhadap kinerja dan reputasi Perseroan;
   c. Tim UPG akan memprioritaskan tindak lanjut laporan yang akan disampaikan oleh pelapor yang menyebutkan identitas serta dilengkapi dengan 2 (dua) alat bukti pendukung.
5. Laporan yang disampaikan kepada Tim UPG untuk selanjutnya dianalisis oleh Tim Pengendali Internal.
6. Laporan Hasil Analisa Tim Pengendali Internal disampaikan kepada Direktur Utama. Setelah itu, Direksi Utama menugaskan Satuan Pengendali Internal (SPI) untuk melakukan proses investigasi.
7. Hasil dari proses investigasi yang dilakukan SPI kemudian dilaporkan kembali kepada Direktur Utama.
8. Selanjutnya, Divisi Sumber Daya Manusia menentukan reward untuk Pelapor dan punishment bagi pelaku pelanggaran yang terbukti bersalah.

4. Reports can be followed up if:
   a. Is an act of violation involving Company personnel;
   b. Impact on the Company's performance and reputation;
   c. The UPG Unit will prioritize follow-up reports that will be submitted by the reporter who states their identity and is equipped with 2 (two) pieces of supporting evidence.
5. Reports submitted to the UPG Unit for further analysis by the Internal Control Team.
6. The Internal Control Team Analysis Result Report is submitted to the President Director. After that, President Director assigned the Internal Control Unit (SPI) to carry out the investigation process.
7. The results of the investigation process carried out by SPI are then reported back to President Director.
8. Next, the Human Capital Division determines rewards for whistleblowers and punishment for perpetrators of violations who are proven guilty.

MEDIA PELAPORAN WBS

Para Pelapor baik dari pihak eksternal (masyarakat) dan internal (insan IPCC) dapat menyampaikan laporan pengaduan mereka melalui sarana berikut ini:

WBS REPORTING MEDIA

Whistleblowers from both external (community) and internal (IPCC personnel) parties can submit their complaint reports through the following means:

	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Pelindo Group
Telephone	021-43932251 ext. 211 0811933930	021-27822345
Faksimile Fax	021-43932251	021-27823456
Surat Elektronik Electronic Mail	info@indonesiacarterminal.co.id good.governance@indonesiacarterminal.co.id	pelindobersih@whistleblowing.link
Situs Web Website	www.indonesiacarterminal.co.id/pengelolaan-gratifikasi-dan-whistle-blowing-system	www.pelindobersih.whistleblowing.link
Surat Pos Postal Mail	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Tim UPG IPCC Jl. Sindang Laut No.101, Cilincing, Jakarta 14110 IPCC UPG Unit Jl. Sindang Laut No. 101, Cilincing, Jakarta 14110	Pelindo Bersih, PO Box 1074, JKS 12010

JUMLAH LAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2023

Tim UPG Perseroan tidak menerima adanya laporan pengaduan terkait dengan tindakan pelanggaran aturan dan/atau kode etik, tindakan gratifikasi atau pun korupsi sejak awal hingga akhir tahun 2023.

NUMBER OF WHISTLE BLOWING REPORTS IN 2023

The Company's UPG Unit did not receive any complaints reports related to violations of rules and/or codes of ethics, acts of gratification or corruption from the beginning to the end of 2023.

No.	Kejadian Mencurigakan Suspicious Incident	Jumlah Laporan Number of Reports
1	Tindakan Curang (Tidak Adil) Fraudulent (Unfair) Actions	-
2	Korupsi Corruption	-
3	Pencurian Thievery	-
4	Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan Violation of Company Policies and Regulations	-
5	Benturan Kepentingan Conflict of Interest	-
6	Penyuapan/Gratifikasi Bribery/Gratification	-
7	Penggelapan Embezzlement	-
8	Penipuan Fraud	-
9	Pemerasan Extortion	-

EVALUASI PENERAPAN WBS TAHUN 2023

Mohon informasi/data terkait evaluasi penerapan WBS 2023

Perseroan menilai bahwa penerapan Whistle Blowing System di tahun 2022 berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim UPG IPCC telah bertanggung jawab dalam upaya sosialisasi WBS baik secara internal kepada seluruh insan IPCC maupun secara eksternal kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama kepada customer dan vendor.

Sepanjang tahun 2022 Tim UPG IPCC juga telah melaksanakan kewajibannya dalam mengelola saluran atau media laporan pengaduan, serta melakukan tindak lanjut apabila terdapat laporan yang diterima.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap efektivitas operasionalisasi WBS yang dilakukan oleh Tim UPG IPCC selama 2022, dapat dinyatakan bahwa:

1. Tidak terdapat laporan pengaduan pelanggaran yang disampaikan melalui Customer Care 0811933930.
2. Tidak terdapat laporan pengaduan pelanggaran yang disampaikan melalui surat elektronik corsec@indonesiacarterminal.co.id dan good.governance@indonesiacarterminal.co.id.
3. Tidak terdapat laporan pengaduan pelanggaran yang disampaikan melalui Hotline 021-43932251 ext. 211.

EVALUASI PENERAPAN WBS TAHUN 2023

Evaluation of WBS Implementation in 2023

Please provide information/data related to the evaluation of the implementation of the 2023 WBS The Company assesses that the implementation of the Whistle Blowing System in 2022 will run well in accordance with applicable regulations. The IPCC UPG Unit has been responsible for the WBS socialization efforts both internally to all IPCC personnel and externally to all stakeholders, especially customers and vendors.

Throughout 2022, the IPCC UPG Unit has also carried out its obligations in managing complaint reporting channels or media, as well as carrying out follow-up actions if reports are received.

Based on the results of the evaluation of the effectiveness of WBS operationalization carried out by the IPCC UPG Unit during 2022, it can be stated that:

1. There are no reports of violations submitted via Customer Care 0811933930.
2. There are no reports of complaints of violations submitted via electronic mail corsec@indonesiacarterminal.co.id and good.governance@indonesiacarterminal.co.id.
3. There are no reports of violations submitted via Hotline 021-43932251 ext. 211.

4. Tidak terdapat laporan pengaduan pelanggaran yang disampaikan melalui WhatsApp Group Customer Perseroan: IPCC Care.
5. Tidak terdapat laporan pengaduan pelanggaran yang disampaikan melalui situs web www.indonesiacarterminal.co.id.

Dengan tidak adanya laporan pengaduan yang masuk melalui kanal pelaporan pelanggaran yang telah disediakan pada 2023, maka Perseroan menyimpulkan bahwa seluruh insan IPCC telah bertindak serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh itikad baik dan telah memahami pokok-pokok Kode Etik IPCC dengan baik.

RENCANA PENGEMBANGAN WBS TAHUN 2023

Sistem WBS Perseroan sudah berjalan dengan cukup baik sampai dengan saat ini dan efektif digunakan sebagai media pelaporan pengaduan. Namun demikian, penyempurnaan terhadap implementasi operasionalisasinya tetap harus diawasi secara berkala, salah satunya dengan melibatkan pengawasan Dewan Komisaris untuk memastikan WBS senantiasa dikelola secara objektif dan independen.

Di tahun 2023 dan selanjutnya, Perseroan akan lebih proaktif dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan WBS IPCC dan meningkatkan pemanfaatan sarana saluran (media) pelaporan WBS yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal demi terwujudnya IPCC bersih.

Sebagai bentuk kesungguhan Perseroan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari praktik kecurangan, Perseroan juga memiliki komitmen tinggi untuk tetap mempertahankan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyuapan (SMAP). Di samping itu, Perseroan juga akan melaksanakan sosialisasi di lingkungan kerja dan terminal satelit IPCC.

4. There are no reports of violations submitted via the Company's WhatsApp Group Customer: IPCC Care.
5. There are no reports of violations submitted via the website www.indonesiacarterminal.co.id.

With no complaint reports coming in through the Whistle Blowing channels that have been provided in 2023, the Company concludes that all IPCC personnel have acted and carried out their duties and responsibilities in full good faith and have understood the main points of the IPCC Code of Conduct well.

WBS DEVELOPMENT PLAN FOR 2023

The Company's WBS system has been running quite well to date and is effectively used as a medium for reporting complaints. However, improvements to the operational implementation must still be monitored periodically, one of which is by involving the supervision of the Board of Commissioners to ensure that the WBS is always managed objectively and independently.

In 2023 and beyond, the Company will be more proactive in implementing the socialization of the IPCC WBS policy and increasing the utilization of WBS reporting channels (media) that can be used by both internal and external stakeholders for the realization of a clean IPCC.

As a form of the Company's seriousness in creating a work environment that is free from fraudulent practices, the Company also has a high commitment to maintaining the Bribery Prevention and Control Program (SMAP). In addition, the Company will also carry out outreach in the IPCC work environment and satellite terminal.

Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services

Untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional bisnis sehari-hari, Perseroan sangat menyadari bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa menjadi suatu aktivitas yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, sebagai perwujudan atas praktik tata kelola yang baik, terutama untuk menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan, Perseroan telah memiliki Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang telah diperbarui dan disahkan melalui SK Direksi Nomor: HK.01/20/6/1/SDMU/DIRUT/IKT-23 tanggal 20 Juni 2023.

To support the smooth running of daily business operations, the Company is very aware that the procurement of goods and services is an unavoidable activity. Therefore, as an embodiment of good governance practices, especially to avoid potential conflicts of interest, the Company has a Guide to Procurement of Goods and/or Services which has been updated and approved through Directors' Decree Number: HK.01/20/6/1 /SDMU/DIRUT/IKT-23 dated June 20 2023.

Pedoman ini mengatur tentang mekanisme, penanggung jawab, dan prinsip-prinsip etika yang wajib dipatuhi dan menjadi landasan penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada lingkup IPCC.

This guideline regulates the mechanisms, responsible persons and ethical principles that must be adhered to and is the basis for carrying out goods and services procurement activities within the scope of the IPCC.

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di Perseroan umumnya mencakup Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultasi, dan Jasa Lain-Lain yang pembiayaannya bersumber dari pendanaan internal atau yang dianggap sebagai dana Perusahaan. Pada praktiknya, Perseroan berkomitmen untuk selalu melaksanakan aktivitas pengadaan barang dan jasa secara akuntabel, adil, dan wajar.

Procurement of goods and services carried out by the Company generally includes procurement of goods, construction work, consulting services and other services whose financing comes from internal funding or which are considered company funds. In practice, the Company is committed to always carrying out goods and services procurement activities in an accountable, fair and reasonable manner.

PENANGGUNG JAWAB PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengelola atau penanggung jawab kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa di Perseroan adalah unit kerja di lingkungan IPCC atau Tim Ad Hoc atau pihak tertentu, yaitu lembaga profesional yang ditetapkan dan diberi wewenang untuk melaksanakan proses Pemilihan Penyedia. Penentuan proses Pemilihan Penyedia yang akan dilaksanakan oleh Tim Ad Hoc atau lembaga profesional sekurang-kurangnya disepakati dan/atau ditetapkan oleh Direktur Penyelenggara dan Direktur Pengguna.

RESPONSIBLE FOR PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

The manager or person responsible for the procurement of goods and/or services in the Company is a work unit within the IPCC or Ad Hoc Team or a certain party, namely a professional institution that is determined and authorized to carry out the Provider Selection process. Determining the Provider Selection process to be carried out by the Ad Hoc Team or professional institution is at least agreed and/or determined by the Organizing Director and User Director.

Adapun uraian tugas dari penyelenggara pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

1. Melakukan seleksi terhadap Pelaku Usaha untuk menjadi Pelaku Usaha Terseleksi (PUT).
2. Melaksanakan proses Pemilihan Penyedia.
3. Menyiapkan dan menyusun konsep Surat Perjanjian/Kontrak, surat perintah kerja (SPK) termasuk adendum hasil proses Pemilihan Penyedia.
4. Membuat laporan atas setiap proses Pemilihan Penyedia maupun atas seluruh proses yang sedang dan sudah dilaksanakan secara periodik kepada Direktur Penyelenggara.
5. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen asli proses Pemilihan Penyedia termasuk salinan dasar referensi penyusunan HPS/OE yang diterima dari Pengguna.

The job description of the goods and services procurement organizer is as follows:

1. Selecting Business Actors to become Selected Business Actors (PUT).
2. Carry out the Provider Selection process.
3. Prepare and compile draft Agreement/Contract Letters, work orders (SPK) including addendums to the results of the Provider Selection process.
4. Make reports on each Provider Selection process as well as on all processes that are and have been carried out periodically to the Organizing Director.
5. Store and administer the original documents of the Provider Selection process including a copy of the basic HPS/OE preparation references received from the User.

PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

1. Efisiensi, untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;
2. Efektivitas, sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. Kompetitif, terbuka bagi Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara peserta/calon Penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
4. Transparansi, semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa terbuka bagi Pelaku Usaha yang berminat;
5. Keadilan, memberikan perlakuan yang sama bagi semua Pelaku Usaha yang memenuhi syarat; dan
6. Akuntabilitas, mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Dalam proses pengadaan, Perseroan selalu mengutamakan produk dalam negeri, rancang bangun, dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

Kami juga mengutamakan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pemberian preferensi harga akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, IPCC mengutamakan sinergi antar-BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau antar Perusahaan Terafiliasi BUMN, dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian.

BASIC PRINCIPLES OF PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Procurement of Goods/Services must apply the principles:

1. Efficiency, to obtain optimal and best results in the shortest time using the minimum possible funds and capabilities in a reasonable manner and not just based on the lowest price;
2. Effectiveness, in accordance with established needs and providing maximum benefits in accordance with the established targets;
3. Competitive, open to Business Actors who meet the requirements and carried out through healthy competition between participants/potential Providers who are equal and meet certain requirements/criteria based on clear and transparent provisions and procedures;
4. Transparency, all provisions and information regarding the procurement of goods/services are open to interested business actors;
5. Justice, providing equal treatment for all Business Actors who meet the requirements; And
6. Accountability, achieving targets and being accountable so as to avoid potential abuse and deviation.

In the procurement process, the Company always prioritizes domestic products, national design and engineering, as well as expanding opportunities for small businesses, as long as the quality, price and purpose can be accounted for.

We also prioritize the preference for using domestic production while still paying attention to the provisions of applicable laws and regulations. The procedure for granting price preferences will be regulated in separate regulations.

In carrying out the procurement of goods and services, the IPCC prioritizes synergy between BUMNs, BUMN Subsidiaries, and/or between BUMN Affiliated Companies, in order to increase business or economic efficiency.

ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Para pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi etika dasar sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
2. Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, dan menjaga informasi yang bersifat rahasia.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan, dan hasil pekerjaan.
4. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya.
5. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam Pengadaan Barang/Jasa.
6. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perseroan.
7. Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perseroan.
8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan, atau berupa apa pun kepada siapa pun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

ETHICS IN PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES

The parties involved in the process of implementing the Procurement of Goods/Services are required to comply with the following basic ethics:

1. Carry out tasks in an orderly manner, with a sense of responsibility, for the smooth and accurate achievement of the objectives of procurement of goods/services.
2. Work professionally by upholding honesty, independence and maintaining confidential information.
3. Do not influence each other, either directly or indirectly, which results in unhealthy competition, a decrease in the quality of the procurement process and work results.
4. Responsible for all decisions made in accordance with his/her authority.
5. Prevent conflicts of interest from parties involved directly or indirectly in the procurement of goods/services.
6. Prevent financial leaks and losses to the Company.
7. Do not abuse authority and carry out joint activities with the aim of personal, group or other party gain which directly or indirectly harms the Company.
8. Do not accept, offer or promise to give gifts, compensation or anything else to anyone who is known or reasonably suspected to be related to the procurement of goods/services.

KEBIJAKAN SELEKSI PEMASOK DAN PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR

Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan kreditur agar dapat terus mendapatkan kepercayaan sehingga prospek pertumbuhan Perseroan dalam jangka panjang dapat terus terjaga. Perseroan telah memiliki kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur yang bertujuan untuk menjaga terpenuhinya hak-hak Kreditur dan menjaga kepercayaan yang diberikan Kreditur terhadap Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga memiliki kebijakan seleksi pemasok untuk mendukung terlaksananya proses pengadaan yang transparan dan akuntabel. Kebijakan ini telah dituangkan di dalam SK Nomor HK.56/3/8/IKT-20 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

SUPPLIER SELECTION POLICY AND FULFILLMENT OF CREDITOR RIGHTS

The Company always pays attention to the interests of creditors in order to continue to gain trust so that the Company's long-term growth prospects can continue to be maintained. The Company has a policy of fulfilling creditors' rights which aims to ensure the fulfillment of Creditors' rights and maintain the trust that Creditors place in the Company.

Apart from that, the Company also has a supplier selection policy to support the implementation of a transparent and accountable procurement process. This policy has been stated in Decree Number HK.56/3/8/IKT-20 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services within PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

KEBIJAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN VENDOR

Hingga akhir 2023, Perseroan belum memiliki kebijakan yang dimaksud. Manajemen akan mempertimbangkan untuk menyusun kebijakan tersebut sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG Perseroan ke depan.

SURVEI KEPUASAN VENDOR

Pada tahun 2023, Perusahaan mengadakan survei kepuasan vender dengan maksud dan tujuan, yaitu mendapatkan masukan dari supplier/vendor dalam rangka perbaikan dan penyempuraan proses pengadaan barang/jasa. Adapun tujuan dilakukan servei, antara lain:

1. Untuk mengukur nilai indeks kepuasan vendor Perusahaan;
2. Untuk mengetahui aspek dari proses pengadaan barang/jasa Perusahaan yang perlu ditingkatkan;
3. Untuk mengukur nilai indesk engagement vendor Perusahaan.

Survei dilaksanakan pada 20 Desember 2023-5 Januari 2024 terhadap 21 perusahaan/koperasi yang menjadi mitra/vendor Perusahaan. Indeks dilakukan oleh pihak independen, yaitu PT Multi Utama Risetindo. Berikut hasil survei kepuasan vendor 2023:

POLICY FOR VENDOR CAPABILITY IMPROVEMENT

Until the end of 2023, the Company does not yet have the policy in question. Management will consider developing this policy as an effort to improve the quality of the Company's GCG implementation in the future.

VENDOR SATISFACTION SURVEY

In 2023, the Company will conduct a vendor satisfaction survey with the aim and objective, namely to obtain input from suppliers/vendors in order to improve and perfect the goods/services procurement process. The aims of serving include:

1. To measure the value of the Company's vendor satisfaction index;
2. To find out aspects of the Company's goods/services procurement process that need to be improved;
3. To measure the value of the Company's vendor engagement index.

The survey was conducted on 20 December 2023-5 January 2024 on 21 companies/cooperatives that are partners/vendors of the Company. The index is carried out by an independent party, namely PT Multi Utama Solusindo. Following are the results of the 2023 vendor satisfaction survey:




Indeks Kepuasan Penyedia / Vendor
Tahun 2023 Berdasarkan Aspek
4.61
Keterbukaan Informasi
4.58
Mekanisme dan Proses Pengadaan
4.50
Personil
4.58
Perizinan & Kontrak
4.68
Sarana & Teknologi

Kebijakan Anti-Korupsi dan Anti-Gratifikasi

Anti-Corruption and Anti-Gratification Policy

Sebagai perusahaan terbuka yang menjunjung tinggi penerapan prinsip-prinsip GCG pada pengelolaan bisnisnya, maka Perseroan menyatakan komitmen dan kesungguhan untuk menciptakan organisasi yang bersih yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

As a public company that upholds the application of GCG principles in its business management, the Company declares its commitment and sincerity to create a clean organization that is free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) practices as mandated in Law Number 31 of 1999 concerning Actions Corruption Crime.

Dalam menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan Pihak Ketiga, sering kali Perseroan bersinggungan dengan praktik sebuah pedoman khusus yang mengatur tentang pengendalian atas praktik tersebut. Kebijakan Pengelolaan Gratifikasi disosialisasikan secara berkala kepada seluruh insan Perseroan agar semua karyawan memiliki pemahaman yang sama dan kuat tentang bagaimana seharusnya mereka menyikapi tindakan. Dengan mematuhi pedoman ini, setiap karyawan dapat terhindar dari tindakan pidana suap.

In establishing a harmonious working relationship with third parties, the Company often comes into contact with the practices of a special guideline that regulates the control of these practices. The Gratification Management Policy is socialized regularly to all Company personnel so that all employees have the same and strong understanding of how they should respond to their actions. By complying with these guidelines, every employee can avoid criminal acts of bribery.

Perseroan memastikan seluruh aktivitas operasional bisnisnya dijalankan secara profesional, independen, berintegritas dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya Perseroan dalam menyempurnakan kualitas praktik GCG agar celah-celah yang memungkinkan terjadinya praktik KKN oleh insan Perseroan dapat terdeteksi sesegera mungkin.

The Company ensures that all its business operational activities are carried out professionally, independently, with integrity and sustainably. This is done as one of the Company's efforts to improve the quality of GCG practices so that gaps that allow KKN practices by Company personnel can be detected as soon as possible.

Secara paralel, Perseroan juga terus mempersiapkan perangkat kebijakan dan kapasitas internal agar praktik anti-korupsi dan anti-gratifikasi di lingkungan IPCC dapat berjalan efektif.

In parallel, the Company also continues to prepare policy tools and internal capacity so that anti-corruption and anti-gratification practices within the IPCC can run effectively.

Kebijakan Anti Korupsi yang diterapkan di Perseroan juga telah termaktub dalam Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. Perseroan memiliki tekad, komitmen dan kesungguhan untuk menjadi sebuah entitas usaha yang unggul, bersih, berintegritas dan profesional.

The Anti-Corruption Policy implemented in the Company is also contained in the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) Guidelines. The Company has determination, commitment and sincerity to become a business entity that is superior, clean, has integrity and professionalism.

Sebagai bentuk kesungguhan Direksi dan Dewan Komisaris dalam menegakkan program anti-korupsi yang kuat di lingkungan IPCC, maka Perseroan menghimbau agar semua pihak yang melihat atau mengetahui adanya tindakan-tindakan yang mengarah pada praktik KKN di Perseroan dapat segera melaporkan hal tersebut melalui media WBS yang dikelola oleh Tim UPG IPCC. Laporan pelanggaran wajib disampaikan kepada Tim UPG IPCC selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima dengan menyerahkan objek gratifikasi yang diterima.

As a form of the seriousness of the Board of Directors and Board of Commissioners in upholding a strong anti-corruption program within the IPCC, the Company urges all parties who see or are aware of any actions that lead to KKN practices in the Company to immediately report this matter through the managed WBS media. by the IPCC UPG Team. Violation reports must be submitted to the IPCC UPG Unit no later than 7 (seven) working days from the date the Gratification is received by handing over the object of the gratification received.

Di samping itu, laporan pelanggaran terkait korupsi dan gratifikasi juga dapat disampaikan kepada Komipi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL). Laporan Gratifikasi akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dinuatakan lengkap dan diterima oleh KPK. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di www.gol.kpk.go.id

MEKANISME PELAPORAN TINDAKAN GRATIFIKASI

1. **Menerima barang/jasa yang terindikasi objek Gratifikasi**
   Penerimaan gratifikasi dapat diidentifikasi secara mandiri oleh karyawan sesuai dokumen gratifikasi perusahaan. Identifikasi penerimaan barang dapat dikonsultasikan langsung kepada Tim memastikan pemberian merupakan objek gratifikasi karyawan yang telah menerima gratifikasi dapat langsung melaporkan penerimaan gratifikasi.

   Laporan Gratifikasi disampaikan secara online melalui aplikasi Gratifikasi Laporan Gratifikasi akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK. Untuk informasi lebih le dilihat di https://gol.kpk.go.id/

2. **Mengisi Form Gratifikasi dan menyerahkan objek gratifikasi yang diterima**
   Karyawan dapat juga melaporkan hasil penerimaan gratifikasi kepada Tim UPG dengan mengisi Form Gratifikasi selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi. Pelaporan gratifikasi beserta penyerahan objek gratifikasi yang telah diterima.

   Untuk penerimaan Gratifikasi yang merupakan barang yang cepat kedaluwarsa (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda serah terima kepada Tim UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud.

3. **Membuat laporan non-gratifikasi**
   Jika ternyata laporan karyawan atas pemberian yang diterimanya tidak masuk dalam objek gratifikasi maka Tim UPG membuat laporan atas hasil klarifikasi.

In addition, reports of violations related to corruption and gratification can also be submitted to the Corruption Eradication Commission (KPK) via the Online Gratification (GOL) application. The Gratification Report will be processed by the Corruption Eradication Commission within 30 (thirty) working days after the report is declared complete and received by the Corruption Eradication Commission. For more complete information, please see www.gol.kpk.go.id

Reporting Mechanism of Gratification Act

1. **Receive goods/services that are indicated as Gratification objects**
   Receiving gratuities can be identified independently by employees according to the company's gratification documents. Identification of receipt of goods can be consulted directly with the Team to ensure that the gift is an object of gratification. Employees who have received gratification can immediately report receipt of gratification.

   Gratification reports are submitted online via the Gratification application. Gratification reports will be processed by the KPK within 30 (thirty) days when the report is declared complete and received by the KPK. For more information, see https://gol.kpk.go.id/

2. **Filling out the Gratification Form and submit the object of gratification received**
   Employees can also report the results of receiving gratuities to the UPG Team by filling in the Gratification Form no later than 7 working days after receiving the gratification. Gratification reporting along with delivery of gratification objects that have been received.

   For receipt of Gratification which are goods that expire quickly (for example: food and drink), it can be handed over to the Social Institution by submitting proof of handover to the UPG Team no later than 7 (seven) days after the date of receipt of the Gratification as intended.

3. **Making a non-gratification report**
   If it turns out that the employee's report regarding the gift they received is not included in the gratification object, the UPG Team will make a report on the results of the clarification.

4. **Mengembalikan barang ke karyawan terkait**
   Tim UPT mengembalikan barang yang telah dilaporkan karyawan berdasarkan Form Gratifikasi yang diisi dan diserahkan ke Tim UPG.

5. **Membuat laporan gratifikasi**
   Tim UPG menerima seluruh laporan gratifikasi dari Pegawai dan menyusun laporan gratifikasi serta hasil klarifikasi terhadap penerimaan barang. Untuk barang dalam kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporka ke KPK, maka Tim UPG dapat langsung memutuskan untuk menyalurkan barang gratifikasi ke pihak yang membutuhkan sesuai ketetapan KPK.

6. **Penyaluran barang oleh Tim UPG disertai dengan bukti penyaluran barang**
   Melaporkan hasil penyaluran barang gratifikasi ke KPK Setelah barang disalurkan, Tim UPG melaporkannya bersama dengan bukti penyaluran barang. Laporan gratifikasi harus disampaikan secara online dan akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web resmi KPK di https://gol.kpk.go.id/.

7. **Menunggu hasil ketetapan KPK oleh Tim UPG**

   Setelah laporan selesai dilakukan dan lengkap sesuai dengan ketentuan KPK, Tim UPG akan menunggu hasil ketetapan dari KPK.

8. **Melaksanakan hasil ketetapan KPK oleh Tim UPG**

   Berdasarkan hasil ketetapan KPK, Tim UPG akan menindaklanjuti seluruh putusan dan mempersiapkan bukti hasil tindakan yang berlaku.

9. **Monitoring dan Evaluasi efektivitas penanganan Gratifikasi**
   EVP Sekretariat Perusahaan secara rutin melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap efektivitas penanganan gratifikasi bersama dengan Tim UPG.

10. **Menyalurkan barang gratifikasi oleh karyawan**
    Karyawan dapat langsung menyalurkan barang yang diterima yang wajib dilaporkan ke KPK. Barang dalam kategori yang tidak wajib dilaporkan sesuai ketentuan KPK, maka dapat diserahkan kepada lembaga sosial dengan disertai bukti tanda serah terima.

4. **Return the goods to the relevant employee**
   The UPT Team returns items that have been reported by employees based on the Gratification Form which is filled in and submitted to the UPG Team.

5. **Making a gratification report**
   The UPG Team receives all gratification reports from employees and prepares gratification reports as well as clarification results regarding the receipt of goods. For items in the gratification category that do not have to be reported to the Corruption Eradication Commission, the UPG Team can immediately decide to distribute gratuity items to parties who need them according to KPK regulations.

6. **Distribution of goods by the UPG Team is accompanied by proof of distribution of goods**
   Report the results of the distribution of gratuity goods to the Corruption Eradication Commission After the goods are distributed, the UPG Team reports it along with proof of distribution of the goods. Gratification reports must be submitted online and will be processed by the KPK within 30 working days after the report is declared complete and received by the KPK. For further information, visit the official KPK website at https://gol.kpk.go.id/.

7. **Waiting for the results of the KPK decision by the UPG Team**
   After the report is completed and complete in accordance with KPK regulations, the UPG Team will wait for the results of the decision from the KPK.

8. **Implementing the results of KPK decisions by the UPG Team**
   Based on the results of the KPK's decision, the UPG Team will follow up on all decisions and prepare evidence of the results of the applicable actions.

9. **Monitoring and evaluating the effectiveness of handling gratification**
   EVP Corporate Secretariat routinely monitors and evaluates the effectiveness of handling gratuities together with the UPG Team.

10. **Distributing gratuity by employees**
    Employees can directly distribute goods received which must be reported to the Corruption Eradication Commission. Goods in categories that do not have to be reported according to KPK regulations can be handed over to social institutions accompanied by proof of handover.

SOSIALISASI KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI TAHUN 2023

Perseroan memiliki pedoman gratifikasi, pungutan liar (pungli) dan Whistle Blowing System (WBS) yang wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan. Dalam rangka mempersempit rentang perbedaan pemahaman setiap individu terhadap penerapan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Perseroan, maka Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal, dengan ketentuan:

1. Pemahaman terhadap Pedoman Pengendalian Internal harus dijadikan acuan oleh seluruh insan IPCC maupun oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan Perseroan yang bebas dari praktik KKN dan IPCC bersih.
2. Bagi pihak internal, sosialisasi diarahkan agar seluruh karyawan mengambil sikap tegas terhadap praktik penerimaan dan pemberian gratifikasi di Perseroan.
3. Bagi pihak eksternal, sosialisasi diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan oleh Perseroan sehingga terwujud proses bisnis yang sehat serta bebas dari aktivitas yang dapat merugikan Perseroan.
4. Sosialisasi yang berkelanjutan dilakukan untuk memudahkan dan memastikan bahwa seluruh insan IPCC maupun pihak lain mengetahui adanya Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Sosialisasi anti korupsi diselenggarakan bersamaan dengan sosialiasi dan upaya peningkatan kualitas sistem pelaporan pelanggaran serta kode etik, salah satunya melalui situs web Perusahaan.

DISSEMINATION OF ANTI-CORRUPTION POLICY IN 2023

The Company has guidelines for gratuities, illegal levies (extortion) and a Whistle Blowing System (WBS) that all employees must comply with. In order to narrow the range of differences in each individual's understanding of the implementation of the Gratification Control Guidelines in the Company, the Company continuously carries out outreach activities to internal and external parties, with the provisions:

1. Understanding of the Internal Control Guidelines must be used as a reference by all IPCC personnel and all stakeholders in realizing Company management that is free from corruption and IPCC practices that are clean.
2. For internal parties, socialization is directed so that all employees take a firm stance towards the practice of accepting and giving gratuities in the Company.
3. For external parties, socialization is directed at providing an understanding of the Gratification Control Guidelines established by the Company so that a healthy business process is created and free from activities that could harm the Company.
4. Continuous outreach is carried out to facilitate and ensure that all IPCC personnel and other parties are aware of the Gratification Control Guidelines.

Anti-corruption outreach is held in conjunction with outreach and efforts to improve the quality of the violation reporting system and code of ethics, one of which is through the Company's website.

Kebijakan Insider Trading
Insider Trading Policy

Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus yang berkaitan dengan aktivitas insider trading. Namun demikian dalam menjalankan usahanya Perseroan senantiasa mencegah adanya insider trading.

The Company does not have a specific policy relating to insider trading activities. However, in carrying out its business, the Company always prevents insider trading.

Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Implementation of State Official Wealth Reporting (LHKPN)

Sebagai anak usaha BUMN yang dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah Indonesia, maka anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pejabat struktural Perseroan dikategorikan sebagai Penyelenggara Negara sehingga berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

As a subsidiary of a SOE owned by the State through the Indonesian Government, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and structural officials of the Company are categorized as State Administrators and are therefore obliged to report and declare their assets before and after taking office. This provision is regulated in Law Number 28 of 1999 concerning the Administration of a State that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism.

PELAPORAN LHKPN PERUSAHAAN

Kebijakan pelaporan LHKPN IPCC telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.56/3/5/IKT-22 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam peraturan tersebut, pihak yang wajib melaporkan LHKPN adalah Direksi dan Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah DIreksi.

COMPANY LHKPN REPORT

The IPCC LHKPN reporting policy has been ratified through Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. HK.56/3/5/IKT-22 dated 19 December 2022 concerning Guidelines for Reporting Assets for the Board of Commissioners and Directors. In this regulation, the parties who are required to report LHKPN are the Directors and Officials 1 (one) level below the Board of Directors.

PENGELOLA LHKPN

Pengelolaan LHKPN di IPCC dilakukan di bawah Senior Manager Sekretaris Perusahaan

LHKPN MANAGEMENT

LHKPN management at IPCC is carried out under the Senior Manager of the Corporate Secretary.

TRANSPARANSI LHKPN PEJABAT TAHUN 2023

Di bawah ini disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perseroan yang berstatus wajib lapor di tahun 2023, yaitu level Dewan Komisaris dan Direksi dengan jumlah wajib lapor sebanyak 6 (enam) orang dan seluruh wajib lapor (100%) telah menyerahkan LHKPN kepada regulator.

OFFICIAL LHKPN TRANSPARENCY IN 2023

Below is the transparency of the submission of LHKPN to Company officials who have mandatory reporting status in 2023, namely the level of the Board of Commissioners and Directors with a total of 6 (six) people required to report and all mandatory reporting (100%) have submitted LHKPN to the regulator.

Lewat Pejabat Office Position	**Jumlah Wajib Lapor** Number of Mandatory Reports	**Jumlah yang Sudah Melaporkan** Number of People Who Have Reported	
		Jumlah Quantity	**%**
Dewan Komisaris Board of Commissioners	3	3	100
Direksi Board of Directors	3	3	100

Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik
Donation to Political Activity

Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak pernah mengikuti aktivitas perpolitikan dan tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik.

Throughout 2023, the Company has never participated in any political activities and has never provided funds for any political parties

Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Direksi dan Dewan Komisaris Apabila Terlibat dalam Kejahatan Keuangan
Policy for Dismissal of Board of Directors and Board of Commissioners if Engaged in Financial Crimes

Kebijakan pengunduran diri maupun pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diatur secara jelas di dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual* PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Tahun 2023 yang telah disetujui dan ditandatangani bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

The policy of resignation and dismissal of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company has been clearly regulated in the Company's Articles of Association and 2023 Board Manual of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk which has been approved and signed jointly by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Transparansi Praktik Bad Governance
Report on Company Activities that Pollute the Environment

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak mendapat laporan terkait aktivitas Perseroan yang mencemari lingkungan.

THROUGHOUT 2023, THE COMPANY RECEIVED NO REPORTS REGARDING THE COMPANY'S ACTIVITIES THAT POLLUTE THE ENVIRONMENT.

Throughout 2023, the Company received no reports regarding the Company's activities that pollute the environment.

PENGUNGKAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sepanjang tahun 2023, IPCC tidak memiliki kasus yang berkaitan dengan perpajakan. IPCC berupaya memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Pengelolaan pajak di Perusahaan diemban oleh Divisi Keuangan. Informasi mengenai pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan telah disampaikan di Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

DISCLOSURE OF TAX OBLIGATIONS FULFILLMENT

Throughout 2023, the IPCC has no cases related to taxation. The IPCC strives to fulfill its obligations as a taxpayer. Tax management in the Company is carried out by the Finance Division. Information regarding disclosure of fulfillment of tax obligations has been presented in the Management Analysis and Discussion Chapter on Company Performance, this Annual Report.

KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Informasi, analisis, dan pembahasan kinerja pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan periode 2023 dan 2022 yang masing-masing telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja. Laporan Keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

INCOMPATIBILITY IN THE PRESENTATION OF ANNUAL REPORTS AND FINANCIAL STATEMENTS WITH APPLICABLE REGULATIONS AND FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SAK)

The information, analysis and discussion of performance in this annual report refers to the Company's Financial Report for the 2023 and 2022 periods, each of which has been audited by the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm. The Company's Financial Reports are prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), which includes Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") of the Indonesian Accountants Association and Capital Market Regulations that applies, among other things, Regulation of the Capital Markets and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 concerning Guidelines for Presenting Financial Reports, Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 concerning Presentation and Disclosure of Financial Reports of Issuers or Public Companies.

PENGUNGKAPAN SEGMEN OPERASI PADA LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan yang tertera dalam PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi dan untuk kepentingan Manajemen serta berdasarkan segmen geografis, Perseroan mengelompok segmen operasi berdasarkan jenis usaha dan geografis, seperti yang telah ditampilkan dalam Laporan Keuangan Audit tahun 2023 yang terdiri dari:

1. Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang;
2. Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas;
3. Segmen geografis.

KESESUAIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN DIGITAL

Laporan Tahunan IPCC baik yang disampaikan kepada pemegang saham, investor, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perseroan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perseroan.

DISCLOSURE OF OPERATING SEGMENTS IN FINANCIAL STATEMENT

In accordance with what is stated in PSAK No. 5 (2015 Adjustments) concerning Operational Segments and for the purposes of Management and based on geographic segments, the Company groups operating segments based on type of business and geography, as shown in the 2023 Audited Financial Report which consists of:

1. Terminal Services and Goods Services;
2. Miscellaneous Services, Facilities and Utility Operations;
3. Geographic segments.

CONFORMITY OF ANNUAL REPORT BOOKS AND DIGITAL ANNUAL REPORTS

The IPCC Annual Report, whether submitted to shareholders, investors, stakeholders, or uploaded on the Company's official website, is in accordance with the Annual Report book printed and published by the Company.

07

Laporan Keuangan

Financial Report




KOMATSU
KOMATSU
KOMATSU
KOMATSU
CASE
CASE

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements as of December 31, 2023 and
for the year then ended with independent auditor's report

PELINDO
MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/*Name* : Sugeng Mulyadi
   Alamat kantor/*Office address* : Jl. Sindang Laut No.100 RT.001/RW.011 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara 14110
   Alamat domisili/*Domicile address* : Jl. Haluan No. 302 RT.005/ RW.001 Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara
   Nomor telepon/*Telephone number* : 021-43932251
   Jabatan/*Title* : Direktur Utama/*President Director*
2. Nama/*Name* : Wing Megantoro
   Alamat kantor/*Office address* : Jl. Sindang Laut No.100 RT.001/RW.011 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara 14110
   Alamat domisili/*Domicile address* : Jl. Guntur Raya B-2/12 RT.007/RW.019 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan
   Nomor telepon/*Telephone number* : 021-43932251
   Jabatan/*Title* : Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia/ *Finance and Human Capital Director*

menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perusahaan") pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili direksi

DIRECTOR'S STATEMENT ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND FOR
THE YEAR THEN ENDED
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk

We, the undersigned:

1. Name : Sugeng Mulyadi
   Office address : Jl. Sindang Laut No.100 RT.001/RW.011 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara 14110
   Domicile address : Jl. Haluan No. 302 RT.005/ RW.001 Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara
   Telephone number : 021-43932251
   Title : Direktur Utama/*President Director*
2. Name : Wing Megantoro
   Office address : Jl. Sindang Laut No.100 RT.001/RW.011 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara 14110
   Domicile address : Jl. Guntur Raya B-2/12 RT.007/RW.019 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan
   Telephone number : 021-43932251
   Title : Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia/ *Finance and Human Capital Director*

declare that:

1. *Directors are responsible for the preparation and presentation of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (the "Company") financial statements December 31, 2023.*
2. *The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements;*
   b. *The Company's financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.*
4. *Directors are esponsible for the Company's internal control systems.*

This statement has been made truthfully.

For and on behalf of directors

Jakarta, 26 Maret/ *March 26*, 2024

METERAI TEMPEL
2973FALX071060354

Sugeng Mulyadi
Direktur Utama/ *President Director*

Wing Megantoro
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia / *Finance and Human Capital Director*

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi | ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Laporan Auditor Independen	i-x	*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan	1-2	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	4	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	5	*Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan	6-91	*Notes to the Financial Statements*

****

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (the "Company"), which comprise the statement of financial position as af December 31, 2023 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2023 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal-hal paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, memberikan dasar bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Key audit matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matter were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Kecukupan Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") atas Piutang Usaha

Penjelasan atas hal audit utama:

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo piutang usaha Perusahaan adalah sebesar Rp61,6 miliar yang merepresentasikan 3,4% dari total aset. Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah mengakui penyisihan untuk KKE atas piutang usaha sebesar Rp35,0 miliar.

Secara umum, dalam menilai dasar penurunan nilai piutang usaha secara individual, manajemen menggunakan pertimbangan yang signifikan untuk mengevaluasi kolektibilitas dari masing-masing pelanggan setelah mempertimbangkan pengalaman gagal bayar atau tunggakan, dan analisis umur. Manajemen Perusahaan juga menghitung penyisihan KKE menggunakan pendekatan yang disederhanakan berdasarkan matriks provisi. Penerapan model KKE oleh Perusahaan juga melibatkan pelaksanaan pertimbangan dan estimasi manajemen yang signifikan dalam menentukan asumsi yang akan digunakan dalam model KKE.

Pengungkapan terkait detail piutang usaha dan penyisihan penurunan nilai menggunakan model KKE disajikan dalam Catatan 2, 3 dan 5 atas laporan keuangan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Key audit matter (continued)

Adequacy of Allowance for Expected Credit Loss ("ECL") on Trade Receivables

Description of the key audit matter:

As of December 31, 2023, the Company's trade receivables outstanding balance amounted to Rp61.6 billion which represents 3.4% of total assets. As of December 31, 2023, the Company recognized allowance for ECL on trade receivables amounting to Rp35.0 billion.

In general, in assessing the individual basis of impairment of trade receivables, management exercised significant judgments to evaluate the collectability from individual customers after taking into account experience of default or delinquency, and aging analysis. The Company's management also calculated the allowance for ECL using simplified approach based on provision matrix. The Company's application of the ECL model also involved the exercise of significant management's judgments and estimates in determining the assumptions to be used in the ECL model.

The related disclosures of details of trade receivables and allowance for impairment using ECL are presented in Notes 2, 3 and 5 to the financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Kecukupan Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") atas Piutang Usaha (lanjutan)

Respons audit:

Kami memeroleh pemahaman mengenai proses manajemen dalam melakukan penilaian atas kecukupan penyisihan KKE dari piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2023.

Kami memeriksa penilaian penurunan nilai individual dari manajemen dan asumsi yang digunakan untuk mengevaluasi kolektibilitas dari pelanggan-pelanggan yang dapat dinilai terpisah secara individu, dengan mempertimbangkan hal-hal seperti pengalaman gagal bayar, penerimaan dari pelanggan secara historis, komitmen atau kesepakatan pembayaran tertentu, serta analisa terhadap umur piutang usaha.

Kami juga memeroleh dan memeriksa akurasi matematikal dari perhitungan KKE manajemen. Kami menguji probabilitas default (PD) sebagai asumsi utama manajemen atas model KKE dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber masukan. Kami melibatkan pakar internal dari auditor kami dalam mereview model KKE dan menjalankan kembali pendekatan statistik dari manajemen. Selanjutnya, kami melakukan perhitungan ulang atas penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal pelaporan dengan menggunakan model KKE yang diadopsi oleh Perusahaan.

Kami memeriksa kelengkapan pengungkapan yang dibuat dalam laporan keuangan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Key audit matter (continued)

Adequacy of Allowance for Expected Credit Loss ("ECL") on Trade Receivables (continued)

Audit response:

We obtained an understanding of the management's process of its assessment of the adequacy of allowance for ECL on its trade receivables as of December 31, 2023.

We assessed the individual impairment assessment of management and the assumptions used to evaluate the collectability from individual customers that can be assessed separately, by considering maters such as experience of default, historical collection of customers, certain commitments or payment arrangements, and trade receivables aging analysis.

We also obtained and checked the mathematical accuracy of the ECL calculation of management. We tested the probability of default (PD) as key assumptions used in the ECL model by comparing them with the information obtained from source inputs. We involved our auditor's internal expert in reviewing the ECL model and reperforming the management's statistical approach. Further, we performed recalculation of the allowance for credit losses at reporting date using the ECL model adopted by the Company.

We checked the completeness of the disclosures made in the financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2023 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam pelaksanaannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024continued)

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in 2023 Annual Report ("The Annual Report") other than the accompanying financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Company or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of such financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, serta mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00313/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Moch. Dadang Syachruna
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0697/*Public Accountant Registration No. AP.0697*

26 Maret 2024/*March 26, 2024*

00313

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/*December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	670.181.616	4,25a,26,27	1.019.760.808	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto		5,26,27		*Trade receivables - net*
Pihak ketiga	61.574.688		65.247.512	*Third parties*
Pihak berelasi	49.759	25b	605.950	*Related parties*
Piutang lain-lain		26,27		*Other receivables*
Pihak ketiga	-		107.874	*Third parties*
Pihak berelasi	-		181.133	*Related parties*
Beban dibayar di muka	1.350.494		253.671	*Prepaid expenses*
Uang muka	-	6	1.264.235	*Advances*
Pendapatan masih akan diterima		7,26,27		*Accrued revenue*
Pihak ketiga	7.502.672		6.309.552	*Third parties*
Pihak berelasi	2.069.246	25c	-	*Related parties*
Pajak dibayar dimuka	16.393.419	15a	2.246.337	*Prepaid taxes*
TOTAL ASET LANCAR	**759.121.894**		**1.095.977.072**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap - neto	359.356.153	8	362.665.282	*Fixed assets - net*
Aset takberwujud - neto	4.631.410	9	3.594.146	*Intangible assets - net*
Aset hak-guna - neto	606.287.386	10	675.416.693	*Right-of-use assets - net*
Aset pajak tangguhan - neto	55.762.548	15e	51.020.185	*Deferred tax assets - net*
Aset tidak lancar lainnya	3.154.996	11,25d,26,27	3.154.996	*Other non-current assets*
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**1.029.192.493**		**1.095.851.302**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
TOTAL ASET	**1.788.314.387**		**2.191.828.374**	***TOTAL ASSETS***

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/*December 31*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha		12,26,27		*Trade payables*
Pihak ketiga	5.725.244		10.236.573	*Third parties*
Pihak berelasi	40.147.885	25e	82.238.552	*Related parties*
Utang lain-lain		13,26,27		*Other payables*
Pihak ketiga	11.888.179		8.843.245	*Third parties*
Pihak berelasi	1.803.832	25f	4.743.923	*Related parties*
Beban akrual	42.362.703	16,26,27	54.608.458	*Accrued expenses*
Utang pajak	14.747.727	15b	38.224.196	*Taxes payable*
Liabilitas jangka pendek lainnya		14,26,27		*Other current liabilities*
Pihak ketiga	15.386.720		9.432.575	*Third parties*
Pihak berelasi	31.778.442	25g	18.696.488	*Related parties*
Bagian lancar atas liabilitas sewa	42.127.118	10,27	407.847.400	*Current portion of lease liabilities*
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**205.967.850**		**634.871.410**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas sewa	359.479.683	10,27	394.986.777	*Lease liabilities*
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**359.479.683**		**394.986.777**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
TOTAL LIABILITAS	**565.447.533**		**1.029.858.187**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham				*Share capital*
Modal dasar - 5.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh)				*Authorized capital - 5,000,000,000 shares at Rp100 (full amount) par value*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.818.384.820 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh)	181.838.482	17	181.838.482	*Issued and fully paid capital - 1,818,384,820 shares at Rp100 (full amount) par value*
Tambahan modal disetor	749.460.284	18	749.460.284	*Additional paid-in capital*
Saldo laba				*Retained earnings*
Cadangan umum	8.000.000	19	6.000.000	*General reserve*
Belum ditentukan penggunaannya	283.568.088		224.671.421	*Unappropriated*
TOTAL EKUITAS	**1.222.866.854**		**1.161.970.187**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.788.314.387**		**2.191.828.374**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
Pendapatan operasi	735.204.940	20,25h	726.573.259	*Operating revenues*
Beban pokok pendapatan	(408.727.911)	21,25i	(379.726.574)	*Cost of revenues*
LABA BRUTO	**326.477.029**		**346.846.685**	***GROSS PROFIT***
Beban umum dan administrasi	(76.343.229)	22	(88.903.663)	*General and administrative expenses*
Pendapatan operasi lainnya	3.780.536	23	285.803	*Other operating income*
Beban operasi lainnya	(8.706.351)	23	(13.172.272)	*Other operating expenses*
LABA USAHA	**245.207.985**		**245.056.553**	***INCOME FROM OPERATIONS***
Pendapatan keuangan	38.036.797	24	26.528.275	*Finance income*
Beban keuangan	(46.424.352)	24	(58.597.992)	*Finance expenses*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	**236.820.430**		**212.986.836**	***INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN				***CORPORATE INCOME TAX EXPENSES***
Kini	(50.707.949)	15d	(62.001.703)	*Current*
Tangguhan	4.742.363	15d,15e	10.739.634	*Deferred*
LABA TAHUN BERJALAN	**190.854.844**		**161.724.767**	***INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	-		-	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**190.854.844**		**161.724.767**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	**104,96**		**88,94**	***BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Share Capital Issued and Fully Paid*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Saldo Laba/*Retained Earnings*		Total Ekuitas/ *Total Equity*	
				Cadangan umum/ *General reserve*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021		**181.838.482**	**749.460.284**	**4.000.000**	**129.693.879**	**1.064.992.645**	***Balance as of December 31, 2021***
Pembagian dividen kas	19	-	-	-	(64.747.225)	(64.747.225)	*Distribution of cash dividend*
Pembentukan cadangan umum	19	-	-	2.000.000	(2.000.000)	-	*General reserve appropriation*
Total laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	161.724.767	161.724.767	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		**181.838.482**	**749.460.284**	**6.000.000**	**224.671.421**	**1.161.970.187**	***Balance as of December 31, 2022***
Pembagian dividen kas	19	-	-	-	(129.958.177)	(129.958.177)	*Distribution of cash dividend*
Pembentukan cadangan umum	19	-	-	2.000.000	(2.000.000)	-	*General reserve appropriation*
Total laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	190.854.844	190.854.844	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		**181.838.482**	**749.460.284**	**8.000.000**	**283.568.088**	**1.222.866.854**	***Balance as of December 31, 2023***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	735.347.994		710.378.896	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kerjasama mitra usaha	(164.112.103)		(133.949.293)	*Payments to partnerships*
Pembayaran pemasok, utilitas dan lainnya	(213.780.395)		(151.452.869)	*Payments to suppliers, utilities and others*
Pembayaran kepada karyawan	(66.798.650)		(60.921.754)	*Payments to employees*
Pembayaran pajak penghasilan	(73.735.135)		(41.414.227)	*Payments for income taxes*
Penerimaan pendapatan keuangan	32.191.471		21.302.355	*Proceeds from finance income*
KAS NETO DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI	**249.113.182**		**343.943.108**	***NET CASH PROVIDED FROM OPERATING ACTIVITIES***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembayaran atas perolehan aset tetap dan aset tak berwujud	(27.239.475)		(32.879.633)	*Payments for acquisition of fixed assets and intangible assets*
KAS NETO DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	**(27.239.475)**		**(32.879.633)**	***NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran dividen	(113.207.337)	19	(42.039.321)	*Payments for dividends*
Pembayaran liabilitas sewa	(458.245.562)	10	(18.132.859)	*Payments for lease liabilities*
KAS NETO DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN	**(571.452.899)**		**(60.172.180)**	***NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES***
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**(349.579.192)**		**250.891.295**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**1.019.760.808**	4	**768.869.513**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**670.181.616**	4	**1.019.760.808**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-58515.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 19 November 2012 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 4 Juni 2013. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 45 tanggal 18 Juli 2023, dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0149824.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan kegiatan usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan. Perusahaan menjalankan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pelayanan usaha bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi *stevedoring*, *cargodoring*, serta *receiving/delivery* atas kendaraan, alat berat dan suku cadang, termasuk namun tidak terbatas mendirikan/menjalankan anak perusahaan dan usaha lainnya yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha utama, penyediaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, khususnya terkait bidang usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yaitu sebagai berikut:

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (the "Company") was established based on the Company Establishment Deed No. 10 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta. The deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-58515.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 19, 2012 and published in the Supplement of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 45 dated June 4, 2013. The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest through Notarial Deeds No. 45 dated July 18, 2023 of Notary Ashoya Ratam, SH., M.Kn., a notary in Jakarta. The deed has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0149824.AH.01.11.Tahun 2023 dated July 24, 2023.

Based on Article 3 of its Articles of Association, the scope of the Company's purposes and objectives are conducting seaport service business activities, which are related to water transportation for passengers, animals or goods, such as the operation of terminal facilities such as ports and docks, navigation, inspection of cargo and/or containers using ionizing radiation sources (radioactive substances and ionizing radiation generators), waterway locking operations and others, navigation, shipping and berthing activities, mooring services, and pilotage services. The Company carries out business activities in the supply and/or service of loading and unloading of ships in ports which include stevedoring, cargodoring, and receiving/ delivery of vehicles, heavy equipment and spare parts, including but not limited to establishing/running subsidiaries and other businesses has a direct or indirect relationship with the main business activities, providing and developing port facilities and optimizing the utilization of Company-owned resources, especially in relation to sea port service business, namely as follows:

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
- Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
- Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bantu bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering dan ro-ro;
- Penyediaan dan/atau jasa bongkar muat barang;
- Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yaitu penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Entitas induk Perusahaan adalah PT Pelindo Multi Terminal. (Catatan 17)

Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan memulai kegiatan usaha komersial pada tanggal 1 Desember 2012.

Kantor Perusahaan berlokasi di Jl. Sindang Laut No. 100, Cilincing, Jakarta Utara 14110, Indonesia.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and general information (continued)

- *To provide and/or serve dock services for mooring;*
- *To provide and/or serve refueling and clean water service;*
- *To provide and/or serve passenger and/or vehicles handling facilities;*
- *To provide and/or serve dock services for loading and unloading activities of goods and container;*
- *To provide and/or serve warehousing services and products hoarding location, loading and unloading tools and port equipment;*
- *To provide and/or serve terminal sevices for container, liquid bulk, dry bulk and ro-ro;*
- *To provide and/or serve loading and unloading services of goods;*
- *To provide and/or serve products distribution and consolidation center.*

In order to achieve the purpose and objectives mentioned above the Company can carry out supporting business activities by providing and/or tug service of vessel.

As of December 31, 2023 and 2022, The Company's parent is PT Pelindo Multi Terminal. (Note 17)

The Company's ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

The Company started its commercial operations on December 1, 2012.

The Company's office is located at Jl. Sindang Laut No. 100, Cilincing, Jakarta Utara 14110, Indonesia.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum efek Perusahaan

Pada tanggal 9 Juli 2018, Perusahaan telah menawarkan 509.147.700 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat dan dicatatkan di BEI dengan harga penawaran perdana sebesar Rp1.640 (nilai penuh) per saham.

c. Manajemen kunci dan karyawan

Susunan manajemen kunci Perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*
Dewan Komisaris/*Board of Commisioners*		
Komisaris Utama/*President Commissioner*	Drajat Sulistyo	Drajat Sulistyo
Komisaris Independen/*Independent Commissioner*	Abdur Rahim Hasan	Abdur Rahim Hasan
Komisaris Independen/*Independent Commissioner*	LM. Arya Bima Yudiantara	LM. Arya Bima Yudiantara
Dewan Direksi/*Board of Directors*		
Direktur Utama/*President Director*	Sugeng Mulyadi	Rio T. N. Lasse
Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis/ *Act. Director of Commercial and Business Development*	Sugeng Mulyadi	Rio T. N. Lasse
Direktur Operasi dan Teknik/*Director of Operation and Engineering*	Bagus Dwipoyono	Andi Hamdani
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia/ *Director of Finance and Human Resources*	Wing Megantoro	Sumarno

Susunan Komite Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*
Komite Audit/*Audit Committee*		
Ketua/*Head*	Abdur Rahim Hasan	Abdur Rahim Hasan
Anggota/*Member*	Dyah Ayu Anggraheni	Dyah Ayu Anggraheni
Anggota/*Member*	Noval Ali Abbas	Noval Ali Abbas
Komite Manajemen Risiko/ *Risk Management Committee*		
Ketua/*Head*	LM. Arya Bima Yudiantara	LM. Arya Bima Yudiantara
Anggota/*Member*	-	Sumarman
Komite Nominasi dan Remunerasi/ *Nomination and Remuneration Committee*		
Ketua/*Head*	Abdur Rahim Hasan	Abdur Rahim Hasan
Anggota/*Member*	LM. Arya Bima Yudiantara	LM. Arya Bima Yudiantara
Anggota/*Member*	Ahmad Alyani Addarain	Ahmad Alyani Addarain

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan masing-masing memiliki 85 dan 78 orang karyawan (tidak diaudit) yang merupakan karyawan Pelindo yang ditugaskan di Perusahaan (Catatan 28d).

1. GENERAL (continued)

b. Public offering of the Company's shares of capital

As of July 9, 2018, the Company offered 509,147,700 shares with par value of Rp100 (full amount) per share to the public and subsequently registered in IDX at a subscription price of Rp1,640 (full amount) per share.

c. Key management and employees

The composition of the Company's key management which consists of The Board of Commissioners and The Board of Directors are as follow:

The composition of the Company's Committees are as follow:

As of December 31, 2023 and 2022, The Company has 85 and 78 employees (unaudited), respectively, which are the employees of Pelindo to the Company (Note 28d).

1. UMUM (lanjutan)

d. Perizinan

Berikut adalah izin-izin penting yang diperoleh Perusahaan sehubungan dengan operasional pelabuhan:

1) Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-9644/KPU.01/2017 tentang Perpanjangan atas Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-1796/KPU.01/2016 tentang Penetapan Lapangan Penimbunan di Pelabuhan Laut Sebagai Tempat Penimbunan Sementara atas Nama Perusahaan. Penetapan ini berlaku sampai dengan 14 November 2019.

   Penetapan tersebut diperpanjang melalui Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-161/KPU.01/2020 tentang Perpanjangan atas Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-1796/KPU.01/2016 tentang Penetapan Lapangan Penimbunan di Pelabuhan Laut Sebagai Tempat Penimbunan Sementara atas Nama Perusahaan. Penetapan ini berlaku sampai dengan 14 November 2024.

   Pada April 2022, terdapat perubahan perizinan KEP-161/KPU.01/2020 Penetapan Lapangan Penimbunan di Pelabuhan Laut Sebagai Tempat Penimbunan Sementara atas Nama Perusahaan menjadi KEP-1599/KPU.01/2022 dikarenakan adanya perubahan ukuran tempat penimbunan. Perizinan ini berlaku hingga 14 November 2024.

2) Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat No. 6/N.13/31.72/-1.819.6/2018 tanggal 31 Mei 2018 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Surat ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya. Surat ini dapat ditinjau dan dicabut kembali apabila pemegang izin melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.

3) Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan No. 002-0185-DN yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Kode Internasional Tentang Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan *(ISPS Code*) berdasarkan Wewenang Pemerintah Republik Indonesia oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut.

1. GENERAL (continued)

d. Permits

The following are significant permits obtained by the Company in relation to port operations:

1) The Minister of Finance Decree No. KEP-9644/KPU.01/2017 regarding Extension of the Minister of Finance Deecree No. KEP-1796/KPU.01/2016 regarding Determination of Stacking Yard in Sea Port as Temporary Stacking Area for the Company. This stipulation is valid until November 14, 2019.

   Those stipulation extended through the Minister of Finance Decree No. KEP-161/KPU.01/2020 regarding the Extension of Minister of Finance Decree No. KEP-1796/KPU.01/2016 regarding the Determination of Stacking Yard in Sea Port as Temporary Stacking Area for the Company. This stipulation is valid until November 14, 2024.

   In April 2022, there was a change in permits from KEP-161/KPU.01/2020 regarding the Determination of Stacking Yard in Sea Port as Temporary Stacking Area for the Company to KEP-1599/KPU.01/2022 due to a change in the size of stacking yard. This license is valid until November 14, 2024.

2) Operational License for Stevedoring Company No. 6/N.13/31.72/-1.819.6/2018 dated May 31, 2018 from the Investment and Integrated Services Office of the one door Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta. The license is valid from the date of issuance and for as long as the Company operates. The license can be evaluated and revoked if the license holder commits criminal offences related to its operation.

3) Statement of Compliance with Port Facility Security Requirements No. 002-0185-DN issued under the provisions of the International Code for The Security of Ships and Port Facilities (ISPS Code) under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia by Directorate General of Sea Transportation.

1. UMUM (lanjutan)

d. Perizinan (lanjutan)

Berikut adalah izin-izin penting yang diperoleh Perusahaan sehubungan dengan operasional pelabuhan: (lanjutan)

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa pemenuhan fasilitas pelabuhan Perusahaan dengan ketentuan SOLAS 74 bab XI-2 dan bagian A dari Peraturan Internasional untuk keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*ISPS Code*) telah diverifikasi dan fasilitas pelabuhan telah beroperasi sesuai rancangan keamanan fasilitas pelabuhan yang disetujui, yaitu:

- Kapal barang lainnya;
- Informasi lainnya yang relevan: domestik dan internasional;

Pernyataan tersebut diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2018 dan berlaku sampai dengan 25 Mei 2023. Perizinan tersebut diperbaharui pada tanggal 26 April 2023 dengan Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan No. AL.803/2/6/SoCPF/DL/2023 yang berlaku sampai dengan 24 Mei 2028.

4) Nomor Induk Berusaha 8120212041457 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Pemerintah Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, jucto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam lampirannya, izin usaha yang terverifikasi dan telah terbit adalah Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut sebagai Kegiatan Usaha Utama dengan Kode KBLI 52221, Pergudangan dan Penyimpanan dengan Kode KBLI 52101 sebagai Kegiatan Usaha Pendukung dan Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) dengan Kode KBLI 52240 sebagai Kegiatan Usaha Pendukung.

1. GENERAL (continued)

d. Permits (continued)

The following are significant permits obtained by the Company in relation to port operations: (continued)

The statement certifies that the Company's port facilities have fulfilled the provisions of SOLAS 74 chapter XI-2 and part A of the International Code for the Security of Ship and Port Facilities (ISPS Code) has been verified and that the port facility operates in accordance with the approved port facility security plan, which are:

- *Other cargo services;*
- *Other relevant information: domestic and international;*

The Statement of Compliance was issued on May 24, 2018 and valid until May 25, 2023. The permit was renewed on April 26, 2023 with the Port Facility Security Compliance Statement No. AL.803/2/6/SoCPF/DL/2023, which will be valid until May 24, 2028.

4) Business Identity Number 8120212041457 issued by the OSS Institute on behalf of the Indonesian Government based on the provisions of Government Regulation Number 24 of 2018 Article 19 paragraph (2) and Article 32 regarding Integrated Business Licensing Services Electronically, in conjunction with Regulation Number 6 Year 2023 concerning the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 concerning Job Creation into Law. In its appendix, the business licenses that have been verified and issued are Sea Port Service Activities as the Main Business Activity with KBLI code 52221, Warehousing and Storage with KBLI code 52101 as Supporting Business Activity and Cargo Handling (Loading Unloading of Goods) with KBLI code 52240 as Supporting Business Activity.

1. UMUM (lanjutan)

d. Perizinan (lanjutan)

Berikut adalah izin-izin penting yang diperoleh Perusahaan sehubungan dengan operasional pelabuhan: (lanjutan)

Nomor Induk Berusaha berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, telah memenuhi komitmen, dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Izin Usaha tersebut diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2018, dengan perubahan kedua pada tanggal 14 Juli 2022.

5) Pada tanggal 20 Februari 2020, Perusahaan memperoleh Surat Izin Usaha Bongkar Muat dari Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.2/N.13.7/31.72.04.1004.01.001.I.1.e/2/ -1.819.6/2020. Surat ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya. Surat ini dapat ditinjau dan dicabut kembali apabila pemegang izin melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya. Surat tersebut diterbitkan sebagai pembaharuan informasi Perusahaan dari Surat Izin Usaha sebelumnya.

6) Pada tanggal 14 Februari 2021, Perusahaan memperoleh Surat Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Otoritas Pelabuhan Kelas Utama Tanjung Priok No.PMKU.IDJKT.0221.000010. Registrasi pemberitahuan melakukan kegiatan usaha ini berlaku sampai dengan 14 Februari 2022. Surat ini telah diperbaharui beberapa kali, terakhir melalui Surat Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Otoritas Pelabuhan Kelas Utama Tanjung Priok No. PMKU.IDJKT.0124.000083 tanggal 25 Januari 2024. Registrasi pemberitahuan melakukan kegiatan usaha ini berlaku sampai dengan 25 Januari 2025.

1. GENERAL (continued)

d. Permits (continued)

The following are significant permits obtained by the Company in relation to port operations: (continued)

The Business Identity Number is valid throughout the territory of the Republic of Indonesia, has fulfilled commitments, and is effective as long as the Business Operator carries out its business and/or activities in accordance with the provisions of the Legislation Regulations. The Business License was issued on October 15, 2018, with the second amendment on July 14, 2022.

5) On February 20, 2020, the Company obtained the Stevedoring Operating License from the Investment Management Unit and One-Stop Integrated Service of the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta No.2/N.13.7/31.72.04.1004.01.001.I.1.e/2/ -1.819.6/2020. This letter is valid from the date of issuance and is valid for as long as the Company is still operating. This letter can be reviewed and revoked if the license holder commits a criminal offense related to its operation. The letter was issued as a renewal of Company information from the previous Business License.

6) On February 14, 2021, the Company obtained a Notification Letter of Conducting Business Activities from the Ministry of Transportation Directorate General of Sea Transportation Tanjung Priok Main Class Port Authority Office No. PMKU.IDJKT.0221.000010. This registration of notification for conducting business activities is valid until February 14, 2022. This letter has been several times amended, the latest through Notification Letter of Conducting Business Activities from the Ministry of Transportation Directorate General of Sea Transportation Tanjung Priok Main Class Port Authority Office No. PMKU.IDJKT.0124.000083 dated January 25, 2024. This registration of notification for conducting business activities is valid until January 25, 2025.

1. UMUM (lanjutan)

e. Operasi Bersama

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki operasi bersama dengan persentase kepemilikan seperti berikut:

Nama Perusahaan/ *Company name*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business activities*	Tahun pendirian/ *Year of Establishment*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination*	
					December 31, 2023	December 31, 2022
Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia ("MKO MTKI")	Gresik, Jawa Timur	Terminal kendaraan/*Car terminal*	2015	45,00%	3.212.745	2.751.810

Ringkasan informasi keuangan MKO MTKI tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Total aset	3.212.745	2.751.810	*Total assets*
Total liabilitas	108.786	159.416	*Total liabilities*
Total ekuitas	3.103.959	2.592.394	*Total equity*
Pendapatan	1.928.698	604.084	*Revenue*
Laba (rugi) usaha	458.683	(423.523)	*Profit (loss) from operations*
Total laba (rugi) komprehensif	511.565	(375.834)	*Total comprehensive income (loss)*

f. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajemen Perusahaan pada tanggal 26 Maret 2024. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut.

1. GENERAL (continued)

e. Joint operation

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has joint operation with effective percentage of ownership as follows:

The summary of MKO MTKI's financial information as of December 31, 2023 and 2022 and for the years then ended are as follows:

f. Completion of Financial Statements

The management is responsible for the preparation and presentation of the financial statements, which were completed and authorized for issuance by the Company's Management on March 26, 2024. The Company's Board of Directors who signed the Directors' statement are responsible for the fair preparation and presentation of such financial statements.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Perusahaan telah menyusun laporan keuangan dengan dasar bahwa Perusahaan akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam Catatan yang relevan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah sebagai mata uang fungsional dan pelaporan Perusahaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan" or "OJK"). These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

The Company has prepared the financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

The financial statements, except for the statement of cash flows, have been prepared based on an accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts that were measured by using a basis as disclosed in the relevant Notes.

The statements of cash flows was prepared using direct method and present receipts and expenditures of cash and cash equivalents, which were classified into operating, investing and financing activities.

The Company used Rupiah as functional and reporting currency.

All figures in the financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

b. Foreign currency transactions and balances

The financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency and presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current statements of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan tidak memiliki saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

c. Perubahan kebijakan akuntansi

Perusahaan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan Perusahaan:

- Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

  Amandemen ini memberikan panduan untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan dalam mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas menjadi persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

  Amandemen tersebut berdampak pada pengungkapan kebijakan akuntansi Perusahaan, namun tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian item apa pun dalam laporan keuangan Perusahaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Foreign currency transactions and balances (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

c. Changes in accounting principles

The Company made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that have affected the financial statements of the Company:

- *Amendment of PSAK 1: Presentation of financial statement - Disclosure of accounting policies*

  This amendments provide guidance to help entities apply materiality judgments to accounting policy disclosures. The amendments aim to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

  The amendments have had an impact on the Company's disclosures of accounting policies, but not on the measurement, recognition or presentation of any items in the Company's financial statements.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

- Amandemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan

  Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi.

  Perusahaan menerapkan amandemen tersebut secara retrospektif hanya untuk aset tetap yang dibuat supaya aset siap digunakan pada atau setelah awal periode penyajian paling awal ketika entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

  Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan Perusahaan karena tidak ada penjualan atas item-item yang dihasilkan aset tetap yang menjadi tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal periode sajian paling awal.

- Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi

  Amandemen PSAK 25 memperjelas perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

  Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Changes in accounting principles (continued)

- *Amendment of PSAK 16: Fixed Assets - Proceeds before Intended Use*

  The amendments prohibit entities from deducting from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.

  The Company applies the amendments retrospectively only to items of fixed assets made available for use on or after the beginning of the earliest period presented when the entity first applies the amendment.

  These amendments had no impact on the financial statements of the Company as there were no sales of such items produced by fixed assets made available for use on or after the beginning of the earliest period presented.

- *Amendment of PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates*

  The amendments to PSAK 25 clarify the distinction between changes in accounting estimates, changes in accounting policies and the correction of errors. They also clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

  The amendments had no impact on the Company's financial statements.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal

  Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama dan perbedaan temporer kena pajak dan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning.

  Amandemen ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua

  Amandemen PSAK 46 ini diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aturan Model Pilar Dua yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), dan mencakup:
  - Pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua; dan
  - Persyaratan pengungkapan bagi entitas yang terkena dampak untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut, terutama sebelum tanggal berlakunya undang-undang tersebut.

  Pengecualian tersebut, yang penggunaannya harus diungkapkan, segera berlaku saat penerbitan amandemen ini. Persyaratan pengungkapan lainnya berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, namun tidak untuk periode interim yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2023.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Changes in accounting principles (continued)

- *Amendment of PSAK 46: Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*

  The amendments to PSAK 46 Income Taxes narrow the scope of the initial recognition exception, so that it no longer applies to transactions that give rise to equal taxable and deductible temporary differences such as leases and decommissioning liabilities.

  The amendments had no impact on the Company's financial statements.

- *Amendment of PSAK 46: Income Taxes - International Tax Reform - Pillar Two Model Rules*

  The amendments to PSAK 46 have been introduced in response to the Pillar Two Rules, issued by Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and include:
  - *An exception to the recognition and disclosure of deferred taxes related to the Pillar Two income taxes; and*
  - *Disclosure requirements for affected entities to help users of the financial statements better understand an entity's exposure to Pillar Two income taxes arising from that legislation, particularly before its effective date.*

  The exception – the use of which is required to be disclosed – applies immediately upon the issue of these amendments. The remaining disclosure requirements apply for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023, but not for any interim periods ending on or before December 31, 2023.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua (lanjutan)

  Pada tanggal 31 Desember 2023, Perundang-undangan terkait pajak penghasilan Pilar Dua belum diberlakukan atau secara substantif belum diberlakukan di Indonesia tempat Perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, Perusahaan masih dalam proses melakukan penilaian atas potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua. Potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua, jika ada, saat ini tidak diketahui atau dapat diperkirakan secara wajar.

  Amandemen tersebut tidak berdampak pada laporan keuangan Perusahaan karena tidak termasuk dalam cakupan aturan model Pilar Dua karena pendapatannya kurang dari EUR750 juta/tahun.

d. Transaksi dengan pihak berelasi

Perusahaan memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi, seperti yang dijelaskan dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang mungkin tidak sama dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 25 atas laporan keuangan.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak-pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan merupakan pihak ketiga.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Kas dan setara kas tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Changes in accounting principles (continued)

- *Amendment of PSAK 46: Income Taxes - International Tax Reform - Pillar Two Model Rules (continued)*

  As of December 31, 2023, the Pillar Two income taxes legislation has not yet been enacted or has not yet substantively enacted in Indonesia where the Company operates. Therefore, the Company is still in the process of assessing the potential exposure to Pillar Two income taxes. The potential exposure, if any, to Pillar Two income taxes is currently not known or reasonably estimable.

  The amendments had no impact on the Company's financial statements as the Company is not in scope of the Pillar Two model rules as its revenue is less than EUR750 million/year.

d. Transactions with related parties

The Company has transactions with related parties, as defined in PSAK No. 7 "Related Party Disclosures".

The transactions are made based on terms agreed by the parties which may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in Note 25 to the financial statements.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the notes to the financial statements are third parties.

e. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of 3 (three) months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value. Cash and cash equivalents were not used as collateral and unrestricted.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

i) Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Perusahaan telah menerapkan cara praktis, diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL"), aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

i) Financial assets

Initial recognition and measurement

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not measured at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i) Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:
- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan
- NWLR

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Perusahaan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan pendapatan masih akan diterima.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur melalui NWPKL dan NWLR.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Subsequent measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:
- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *FVTPL.*

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:
- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Company's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalent, trade receivables, other receivables and accrued revenue.

The Company has no financial assets measured in FVOCI and FVTPL.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i) Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan Perusahaan) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir; atau
- Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan *'pass-through'*, dan salah satu dari (a) Perusahaan telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan *'pass-through'*, Perusahaan mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Perusahaan masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Perusahaan tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Perusahaan tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutannya. Dalam kasus tersebut, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Perusahaan.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Perusahaan untuk membayar kembali.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Company's statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired; or*
- *The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Company also recognizes an associated liability. In such cases, the Company also recognizes an associated liability. The transferred assets and related liabilities are measured on a basis that reflects the rights and obligations that are still retained by the Company.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai

Perusahaan mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Perusahaan, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena piutang usaha tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Perusahaan tidak menelurusi perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan *(forward-looking)* atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Impairment

The Company recognizes an allowance for Expected Credit Loss ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have not been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). However, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its trade receivables do not contain significant financing component, the Company applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Company established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Perusahaan menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 365 hari dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Perusahaan juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Perusahaan tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Perusahaan. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

ii) Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Perusahaan menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas sewa dan liabilitas jangka pendek lainnya - utang dividen dan uang titipan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Impairment (continued)

The Company considers a financial asset in default when contractual payments are 365 days past due. However, in certain cases, the Company may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

ii) Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Company designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as trade payables, other payables, accrued expenses, lease liabilities, and other current liabilities - dividend payables and deposits received.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)

i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akusisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

ii) Utang dan Akrual

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Perusahaan tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)

ii) Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)

i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

ii) Payables and Accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefit liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

The Company has not designated any financial liability measured as FVTPL.

Derecognition

A financial liability is derecognized when it is extinguished, that is when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

iii) Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

g. Pengukuran nilai wajar

Perusahaan mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan pada nilai wajar, dan aset dan liabilitas yang diakuisisi pada kombinasi bisnis. Perusahaan juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, dan aset keuangan tertentu pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL").

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)

ii) Financial liabilities (continued)

Derecognition (continued)

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

iii) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

g. Fair value measurement

The Company initially measures financial instruments at fair value, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations. They also measure certain recoverable amounts of the cash generating unit ("CGU") using fair value less cost of disposal ("FVLCD") and certain financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

i. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

ii. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perusahaan.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Fair value measurement (continued)

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

i. in the principal market for the asset or liability, or the loss of an active market for the financial asset due to financial difficulties.

ii. in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

i) Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
ii) Level 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
iii) Level 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terdapat perpindahan antara level dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

Tim pelaporan keuangan Perusahaan bertanggung-jawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar, seperti nilai wajar (dikurangi biaya untuk menjual) UPK (untuk uji penurunan nilai) dan aset keuangan pada NWPKL.

Penilai eksternal terlibat dalam penilaian aset signifikan. Keterlibatan penilai eksternal ditentukan setiap tahun setelah dibahas dan disetujui oleh Direksi Perusahaan. Kriteria pemilihan termasuk pengetahuan pasar, reputasi, independensi dan kemampuan mematuhi standar profesi. Metode penilaian dan input yang digunakan dibahas dan diputuskan bersama oleh Perusahaan dan penilai eksternal.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Fair value measurement (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.
ii) Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
iii) Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

The Company's financial reporting team in charge of valuation to determine the policies and procedures for recurring fair value measurement, such as fair value (less costs of disposal) of CGUs (for impairment test purpose) and financial assets at FVOCI.

External valuers are involved for valuation of significant assets. Involvement of external valuers is decided upon annually after discussion with and approval by the Company's Board of Directors. Selection criteria include market knowledge, reputation, independence and whether professional standards are maintained. Valuation techniques and inputs to use were discussed and decided by the Company and external valuers.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan level pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

h. Aset tetap

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 "Aset Tetap".

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penyisihan penurunan nilai.

Biaya perbaikan yang signifikan diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari 1 (satu) tahun.

Penyusutan dimulai pada saat aset telah siap digunakan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Fair value measurement (continued)

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

h. Fixed assets

The Company applied PSAK No. 16 "Fixed Assets".

All fixed assets are initially recognized at cost, which comprises their purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for them to be capable of operating in the manner intended by management.

Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met.

Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

The cost of major inspections is recognized in the carrying amount of the fixed asset as a replacement if the recognition criteria are met. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Major spare parts and stand-by equipment are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations for more than 1 (one) year.

Depreciation starts when the asset is already available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the asset as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan fasilitas pelabuhan	10-30	*Port facilities buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	4-10	*Port facilities installation*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	5-10	*Port facilities equipments*
Jalan dan bangunan	10-25	*Road and building*
Peralatan	4-5	*Equipment*
Emplasemen	3-25	*Emplacement*
Kendaraan	5	*Vehicles*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Aset tetap (lanjutan)

Aset dalam pembangunan dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset dalam pembangunan tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang sesuai pada saat konstruksi telah selesai dan tersedia untuk digunakan. Aset dalam pembangunan tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dievaluasi dan jika diperlukan, disesuaikan secara prospektif. Perusahaan melakukan uji penurunan nilai aset tetap bila terdapat indikasi bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Aset tetap operasi bersama dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

i. Aset takberwujud

Perusahaan menerapkan PSAK No. 19 "Aset Takberwujud".

Aset tidak berwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada pengakuan awal sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tidak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset tidak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal, tidak termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, tidak dikapitalisasi dan pengeluaran terkait tercermin dalam laba rugi pada periode pengeluaran tersebut terjadi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Fixed assets (continued)

Construction in progress is stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the construction in progress. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the construction is completed and available for use. Construction in progress is not depreciated as it is not yet available for use.

The carrying amount of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year in which the asset is derecognized.

At each end of reporting period, the residual values, useful lives and depreciation methods are reviewed, and adjusted prospectively, if appropriate. The Company conducts impairment test for the fixed assets when there is any indication that the carrying values may not be fully recoverable.

Joint operation fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of similar fixed assets.

i. Intangible assets

The Company applied PSAK No. 19 "Intangible Assets".

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is their fair value at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses. Internally generated intangibles, excluding capitalized development costs, are not capitalized and the related expenditure is reflected in profit or loss in the period in which the expenditure is incurred.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset takberwujud (lanjutan)

Perusahaan menerapkan PSAK No. 19 "Aset Takberwujud". (lanjutan)

Masa manfaat aset tidak berwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas.

Aset tidak berwujud dengan umur yang terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomi dan dinilai penurunan nilainya setiap kali terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mungkin mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas ditelaah setidaknya pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan masa manfaat yang diharapkan atau pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset dianggap memodifikasi periode atau metode amortisasi, jika sesuai, dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi atas aset takberwujud dengan umur terbatas diakui dalam laporan laba rugi dalam kategori beban yang sesuai dengan fungsi aset takberwujud tersebut.

Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji penurunan nilainya setiap tahun, baik secara individual maupun pada tingkat unit penghasil kas. Penilaian kehidupan tidak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah kehidupan tidak terbatas terus dapat didukung. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas dilakukan secara prospektif.

Aset tidak berwujud dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan (yaitu, pada tanggal penerima memperoleh kendali) atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Intangible assets (continued)

The Company applied PSAK No. 19 "Intangible Assets". (continued)

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite.

Intangible assets with finite lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in the statement of profit or loss in the expense category that is consistent with the function of the intangible assets.

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortized, but are tested for impairment annually, either individually or at the cash-generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

An intangible asset is derecognized upon disposal (i.e., at the date the recipient obtains control) or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising upon derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Pengaturan bersama

Perusahaan menerapkan PSAK No. 66 "Pengaturan Bersama".

Perusahaan merupakan pihak dalam pengaturan bersama apabila terdapat pengaturan kontraktual yang memberikan pengendalian bersama atas aktivitas relevan kepada Perusahaan dan minimal satu pihak lainnya. Pengendalian bersama diuji dengan prinsip yang sama dengan penilaian pengendalian atas anak perusahaan.

Perusahaan mengklasifikasikan kepentingannya dalam pengaturan bersama sebagai berikut:
- Ventura bersama: ketika Perusahaan memiliki hak hanya pada net aset dari pengaturan bersama
- Operasi bersama: ketika Perusahaan memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas yang terkait dengan pengaturan bersama.

Dalam melakukan penilaian klasifikasi kepentingan dalam pengaturan bersama, Perusahaan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- Struktur pengaturan bersama
- Bentuk hukum pengaturan bersama apabila dibentuk melalui kendaraan terpisah
- Persyaratan pengaturan kontraktual dalam perjanjian
- Fakta dan keadaan lain (termasuk semua perjanjian kontraktual lainnya).

Perusahaan mencatat kepentingannya dalam operasi bersama dengan mengakui hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban dalam ketentuan kontraktual.

k. Penurunan nilai aset non-keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 48 "Penurunan Nilai Aset".

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, atau apabila pengujian tahunan atas penurunan nilai aset tertentu disyaratkan, maka Perusahaan membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Joint arrangements

The Company applied PSAK No. 66 "Joint Arrangements".

The Company is a party to a joint arrangement when there is a contractual arrangement that confers joint control over the relevant activities of the arrangement to the Company and at least one other party. Joint control is assessed under the same principles as control over subsidiaries.

The Company classifies its interests in joint arrangements as either:

- *Joint ventures: where the Company has rights to only the net assets of the joint arrangement*
- *Joint operations: where the Company has both the rights to assets and obligations for the liabilities of the joint arrangement.*

In assessing the classification of interests in joint arrangements, the Company considers:

- *The structure of the joint arrangement*
- *The legal form of joint arrangements structured through a separate vehicle*
- *The contractual terms of the agreement*
- *Any other facts and circumstances (including any other contractual arrangements).*

The Company accounts for its interests joint operations by recognizing its share of assets, liabilities, revenues and expenses in accordance with its contractually conferred rights and obligations.

k. Impairment of non-financial assets

The Company applied PSAK No. 48 "Impairment of Assets".

At each end of reporting date, the Company assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for certain asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Perusahaan mendasarkan perhitungan penurunan nilai pada rincian perhitungan anggaran atau prakiraan yang disusun secara terpisah untuk masing-masing UPK Perusahaan atas aset individual yang dialokasikan. Perhitungan anggaran dan prakiraan ini secara umum mencakup periode selama lima atau sepuluh tahun sesuai dengan stabilitas arus kas perkebunan terkait. Setelah periode yang dianggarkan proyeksi arus kas diestimasi dengan melakukan ekstrapolasi proyeksi yang dianggarkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan jangka panjang yang tetap.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh pengali penilaian atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Impairment of non-financial assets (continued)

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

The Company bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations which are prepared separately for each of the Company's CGUs to which the individual assets are allocated. These budgets and forecast calculations are generally covering a period of five or ten years in accordance with the stability of each estate's cash flows. Beyond the forecasted period, the estimated cash flows are determined by extrapolating the forecasted cash flows using a steady long term growth rate.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, the Company uses an appropriate valuation model to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada peride/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai pada aset tetap dan aset non-keuangan tidak lancar lainnya yang disajikan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023.

l. Provisi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 57 "Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi".

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Impairment of non-financial assets (continued)

An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods/years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Management believes that there is no indication of impairment in values for fixed assets and other non-current non-financial assets presented in the statement of financial position as of December 31, 2023.

l. Provisions

The Company applied PSAK No. 57 "Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets".

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the liabilities and a reliable estimate can be made of the amount of the liabilities.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Provisi (lanjutan)

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak lagi terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

m. Perpajakan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 "Pajak Penghasilan".

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: Pajak Penghasilan.

Perusahaan menyajikan beban pajak final atas pendapatan keuangan dan pendapatan sewa atas penyewaan ruang kantor sebagai bagian dari beban operasi lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

l. Provisions (continued)

Provisions are reviewed at each end of reporting period and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the liabilities, the provision is reversed.

m. Taxation

The Company applied PSAK No. 46 "Income Taxes".

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 46: Income Tax.

The Company present the final tax expense arising from finance income and rent income from rent of the office room as part of other operating expenses in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Company operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;

ii) dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

i) jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau

ii) dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Taxation (continued)

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

i) where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;

ii) in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

i) where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or

ii) in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Item pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di PKL maupun secara langsung di ekuitas.

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas baik entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah liabilitas atau aset pajak tangguhan yang signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:
- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

The Company offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if it has a legally enforceable right to set off current tax assets and current tax liabilities and the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:
- *Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- *Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai (lanjutan)

Jumlah PPN neto yang diajukan untuk direstitusi, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan.

n. Pendapatan dan beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Perusahaan melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

Pendapatan dari penjualan jasa diakui pada saat terpenuhinya seluruh kondisi berikut:

1. Mengindentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
   - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak;
   - Perusahaan bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
   - Kontrak memiliki substansi komersial; dan
   - Besar kemungkinan Perusahaan akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Taxation (continued)

Value Added Tax (continued)

The net amount of VAT which is claimed for restitution from, or payable to, the taxation authorities is included as part of assets or liabilities in the statement of financial position.

n. Revenue and expense

In determining revenue recognition, the Company perform analysis transaction through the following five steps of assessment:

Revenue from rendering of services is recognized when all of the following conditions are met:

1. Identify contracts with customers with certain criteria as follows:
   - *The contract has been agreed by the parties involved in the contract;*
   - *The Company can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred;*
   - *The contract has commercial substance; and*
   - *It is probable that the Company will receive benefits for the goods or services transferred.*
2. Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, luxury sales tax, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.
5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui apabila kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi melebihi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Liabilitas kontrak diakui ketika pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan melebihi kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan diterima dimuka".

Kriteria tertentu juga harus terpenuhi untuk setiap aktivitas Perusahaan seperti yang dijelaskan di bawah.

Pendapatan dari penjualan jasa diakui dalam laba rugi pada saat jasa diberikan. Untuk penjualan jasa yang mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal pelaporan, tingkat penyelesaian transaksi ditentukan dengan memperhatikan survei pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pendapatan dari penjualan jasa diakui pada saat terpenuhinya seluruh kondisi berikut:

- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Perusahaan;
- tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Bila hasil transaksi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui hanya sebesar beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali. Taksiran rugi pada jasa segera diakui dalam laba rugi.

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Revenue and expense (continued)

Payment of the transaction price differs for each contracts. Contract asset is recognised when performance obligation satisfied is more than the payments by customer. Contract liability is recognized when the payments by customer is more than the performance obligation satisfied. Contract assets are presented under "Trade receivables" and contract liabilities are presented under "Deferred Income".

The specific criteria also must be met for each of the Company's activities as described below.

Revenue from sales of services is recognized in profit or loss when the services are rendered. For sales of services in which the service are rendered by reference to the stage of completion of the transaction at the reporting date, the stage of completion is assessed by reference to surveys of work performed.

Revenue from rendering of services is recognized when all of the following conditions are met:

- *the amount of revenue can be measured reliably;*
- *it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Company;*
- *the stage of completion of the transaction at the reporting date can be measured reliably; and*
- *the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.*

When the outcome of a transaction involving the rendering of services cannot be estimated reliably, revenue is recognized only to the extent of the expenses recognized that are recoverable. An expected loss on a service is recognized immediately in profit or loss.

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Informasi segmen

Perusahaan menerapkan PSAK No. 5 "Segmen Operasi".

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk atau jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

p. Sewa

Perusahaan menilai pada saat insepsi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Perusahaan sebagai Penyewa

Perusahaan menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Perusahaan mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Aset hak-guna

Perusahaan mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Segment information

The Company applied PSAK No. 5 Segment Operation".

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products or services (business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

p. Lease

The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Company as Lessee

The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

Rights-of-use assets

The Company recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai Penyewa (lanjutan)

Aset hak-guna (lanjutan)

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Perusahaan pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai.

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Perusahaan dan pembayaran pinalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

p. Lease (continued)

The Company as Lessee (continued)

Rights-of-use assets (continued)

If ownership of the leased asset transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.The right-of-use assets are also assessed for impairment.

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Company uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai Penyewa (lanjutan)

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah

Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Perusahaan juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Perusahaan sebagai Pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Perusahaan tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya.

Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontijensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana sewa kontijensi tersebut diperoleh.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

p. Lease (continued)

The Company as Lessee (continued)

Short-term leases and leases of low-value assets

The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Company also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

The Company as Lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in operating income in the profit or loss due to its operating nature.

Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income. Contingent rent are recognized as revenue in the period in which they are earned.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perusahaan pada saat efektif.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Akan ada 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional,
2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK),
3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan
4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

Standar Akuntansi Keuangan Internasional

Standar ini merupakan adopsi penuh dari *International Financial Reporting Standards* ("IFRS") yang diterjemahkan kata demi kata dan tidak ada modifikasi dari Standar IFRS, termasuk tanggal efektifnya. Entitas yang memenuhi persyaratan dapat menerapkan standar ini, sejak tanggal efektif.

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK IAI.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Accounting standards issued but not yet effective

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Company's financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Company when they become effective.

Effective beginning on or after January 1, 2024

Financial Accounting Standards Pillars

These standards provides requirements and guidelines for entities to apply the correct financial accounting standards in preparing general purpose financial statements. There will be 4 (four) financial accounting standards that are currently applied in Indonesia, namely:

1. *Pillar 1 International Financial Accounting Standards,*
2. *Pillar 2 Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK),*
3. *Pillar 3 Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities/Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability, and*
4. *Pillar 4 Indonesian Financial Accounting Standards for Micro Small and Medium Entities.*

International Financial Accounting Standard

This standard is a full-adoption of International Financial Reporting Standards ("IFRS") which is translated in a word-for-word basis and there is no modifications from IFRS Standards, including the effective date. Entities that meet the requirements can apply this standard, from the effective date.

Financial Accounting Standards Nomenclature

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by DSAK IAI.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 (lanjutan)

Amandemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
- hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif dengan penerapan dini diperkenankan.

Perusahaan saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Perusahaan.

Amandemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik

Amandemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amandemen berlaku secara retrospektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan. Perusahaan saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Perusahaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2024 (lanjutan)

Amendment of PSAK 1: Non-current Liabilities with Covenants

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- *what is meant by a right to defer settlement,*
- *the right to defer must exist at the end of the reporting period,*
- *classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and*
- *only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.*

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024 retrospectively with early adoption permitted.

The Company is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company's financial reporting.

Amendment of PSAK 73: Lease Liability in a Sale and Leaseback

The amendment to PSAK 73 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

The amendment applies retrospectively to annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Earlier application is permitted. The Company is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company's financial reporting.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 (lanjutan)

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60: Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

Amandemen ini akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan, namun perlu diungkapkan. Amandemen tersebut diperkirakan tidak mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

r. Laba per saham

Perusahaan menerapkan PSAK No. 56 (Revisi 2014) "Laba per saham".

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar, yaitu sebesar Rp104,96 (nilai penuh) dan Rp88,94 (nilai penuh) saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

s. Biaya emisi saham

Biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan modal saham Perusahaan kepada publik dikurangkan langsung dengan hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dalam laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2024 (lanjutan)

Amendment of PSAK 2 and PSAK 60: Supplier Finance Arrangements

The amendments to PSAK 2 and PSAK 60 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

The amendments will be effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Early adoption is permitted, but will need to be disclosed.The amendments are not expected to have a material impact on the Company's financial statements.

r. Earnings per share

The Company applied PSAK No. 56 (Revised 2014) "Earning per share".

Earnings per share is computed by dividing income for the year by the weighted-average number of shares outstanding, amounting Rp104.96 (full amount) and Rp88.94 (full amount) shares as of December 31, 2023 and 2022 respectively.

s. Share issuance costs

Costs incurred in connection with the Company's issuance of share capital to the public were offset directly with the proceeds and presented as deduction to additional paid-in capital account in the statement of financial position.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:
1) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
2) untuk diperdagangkan,
3) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
4) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:
1) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
2) untuk diperdagangkan,
3) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
4) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Current and non-current classification

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:
1) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
2) held primarily for the purpose of trading,
3) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or
4) cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:
1) expected to be settled in the normal operating cycle,
2) held primarily for the purpose of trading,
3) due to be settled within twelve months after the reporting period, or
4) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan merupakan mata uang dalam lingkungan ekonomi dimana Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban Perusahaan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah dalam Rupiah.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2f.

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Nilai tercatat neto utang pajak penghasilan badan pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.314.833 (2022: Rp29.069.207). Penjelasan lebih rinci mengenai pajak penghasilan diungkapkan dalam Catatan 15.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments

The following judgments are made by the management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements.

Determination of functional currency

The functional currency of the Company is the currency of the primary economic environment in which the Company operates. It is the currency that mainly influences the Company's revenue and expenses. Based on the Company's management assessment, the Company's functional currency is the Rupiah.

Classification of financial assets and liabilities

The Company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2f.

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. The net carrying amount of corporate income tax payable as of December 31, 2023 was Rp3,314,833 (2022: Rp29,069,207). Further details regarding taxation are disclosed in Note 15.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis.

Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, laba rugi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2h. Tidak terdapat perubahan estimasi masa manfaat aset tetap selama periode pelaporan.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities within the next reporting period are disclosed below. The Company based its assumption and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstantes and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Estimate useful lives of fixed assets

The useful life of each of the item of the Company's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets.

The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

The estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 2h. There is no change in the estimated useful lives of fixed assets during the reporting period.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Beban pajak kini

Perusahaan mengakui beban pajak kini berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak periode berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan menetapkan estimasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dari KKE. Matriks provisi digunakan untuk menghitung KKE untuk piutang usaha dan lain-lain. Tarif provisi didasarkan pada hari tunggakan untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa.

Matriks provisi awalnya didasarkan pada riwayat tingkat kerugian pelanggan. Perusahaan akan melakukan penyesuaian pengalaman kerugian historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi yang terkait erat dengan riwayat tingkat kerugian diperkirakan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar pada sektor-sektor pelanggan beroperasi, riwayat tingkat kerugian disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, riwayat tingkat gagal bayar yang diamati diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

Evaluasi atas korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi dan KKE, adalah estimasi signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Kerugian kredit historis Perusahaan dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili tingkat gagal bayar pelanggan aktual di masa depan.

Nilai tercatat dari piutang usaha Perusahaan sebelum penyisihan untuk penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp96.672.346 (2022: Rp100.772.305). Penjelasan lebih lanjut atas piutang usaha diungkapkan dalam Catatan 5.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Current tax expense

The Company recognizes current tax expense based on the estimated taxable income for the period computed using the prevailing tax rates.

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Company estimates impairment allowance for trade receivables using simplified approach of ECL. A provision matrix is used to determine ECL for trade and other receivables, where the provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns.

The provision matrix is initially based on the customers historical observed loss rates. The Company will adjust the historical observed loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions closely related to the historical observed loss are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the sectors where customers are operating, the historical losses are adjusted accordingly. At every reporting date, the historical observed loss rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed loss rates, forecast economic conditions and ECLs, is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical observed loss rate and forecast of economic conditions may not be representative of customer's actual default in the future.

The carrying amount of the Company's trade receivables before allowance for impairment as of December 31, 2023 was Rp96,672,346 (2022: Rp100,772,305). Further details on trade receivables are disclosed in Note 5.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak, jika besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui, berdasarkan kemungkinan waktu realisasi dan jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2m dan 15.

Perhitungan pajak penghasilan tangguhan diungkapkan dalam Catatan 15e.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Notes 2m and 15.

The calculation of deferred income tax is disclosed in Note 15e.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Kas			***Cash on hand***
Rupiah	98.702	123.502	*Rupiah*
Bank			***Cash in banks***
Pihak berelasi (Catatan 25a)			*Related parties (Note 25a)*
Rupiah	35.082.914	19.637.306	*Rupiah*
Deposito berjangka			***Time deposits***
Pihak berelasi (Catatan 25a)			*Related parties (Note 25a)*
Rupiah	635.000.000	1.000.000.000	*Rupiah*
Total	**670.181.616**	**1.019.760.808**	***Total***

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank.

Accounts in bank earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank.

Tingkat bunga per tahun deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of the time deposits are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Rupiah	3,00% - 7,00%	2,50% - 5,25%	*Rupiah*

Kas dan setara kas tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

Cash and cash equivalents were not used as collateral at the reporting date.

Saldo kas dan setara kas, pada tanggal pelaporan, tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents were not restricted to use at the reporting date.

5. PIUTANG USAHA / *5. TRADE RECEIVABLES*

a. Berdasarkan umur piutang / *a. Based on age*

Rincian umur piutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut: / *The aging analysis of trade from the date of invoice issuance are as follows:*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Belum jatuh tempo	1.567.137	4.565.372	*Not yet due*
Telah jatuh tempo:			*Overdue:*
1 - 30 hari	38.627.831	43.306.662	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	10.928.038	10.322.018	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	4.679.312	4.292.027	*61 - 90 days*
91 - 180 hari	6.686.766	4.163.749	*91 - 180 days*
Lebih dari 180 hari	34.183.262	34.122.477	*More than 180 days*
Total	**96.672.346**	**100.772.305**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(35.047.899)	(34.918.843)	*Allowance for impairment*
Neto	**61.624.447**	**65.853.462**	***Net***

b. Berdasarkan pelanggan / *b. Based on customer*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Quantum Perkasa Logistik	14.362.683	14.362.683	*PT Quantum Perkasa Logistik*
PT Glovis Indonesia Logistics	10.410.770	6.362.600	*PT Glovis Indonesia Logistics*
PT Bandar Krida Jasindo	10.394.497	13.613.088	*PT Bandar Krida Jasindo*
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia	10.146.423	5.355.135	*PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia*
PT Bumi Logistik Utama	6.149.224	1.516.951	*PT Bumi Logistik Utama*
PT Easternindo Carmitra Lintas	4.760.598	2.949.574	*PT Easternindo Carmitra Lintas*
PT Roro Samudra Putra Harmonimas	4.518.217	6.016.976	*PT Roro Samudra Putra Harmonimas*
PT Astra Daihatsu Motor	4.279.563	10.123.557	*PT Astra Daihatsu Motor*
PT Bukit Merapin Nusantara Lines	3.436.490	2.128.175	*PT Bukit Merapin Nusantara Lines*
PT Glovis Indonesia International	3.380.439	3.760.944	*PT Glovis Indonesia International*
PT Dharma Lautan Utama	3.114.083	2.337.031	*PT Dharma Lautan Utama*
PT Agung Transina Raya	2.390.011	3.442.904	*PT Agung Transina Raya*
PT Harapan Baru Lines	2.186.824	1.331.317	*PT Harapan Baru Lines*
PT Atosim Lampung Pelayaran	1.995.261	6.331.807	*PT Atosim Lampung Pelayaran*
PT Jagat Zamrud Khatulistiwa	1.699.776	1.699.776	*PT Jagat Zamrud Khatulistiwa*
PT Adimas Bahtera Harapan	1.356.368	1.252.389	*PT Adimas Bahtera Harapan*
PT ICT Logistik Indonesia	1.255.382	2.007.334	*PT ICT Logistik Indonesia*
PT Toyota Astra Motor	1.111.570	1.411.094	*PT Toyota Astra Motor*
PT Suzuki Indomobil Motor	1.058.145	2.329.409	*PT Suzuki Indomobil Motor*
PT Anugrah Permata Samudra	-	1.681.732	*PT Anugrah Permata Samudra*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	8.616.263	10.151.879	*Others (each below Rp1 billion)*
Subtotal	96.622.587	100.166.355	*Sub-total*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(35.047.899)	(34.918.843)	*Allowance for impairment*
Pihak ketiga - neto	**61.574.688**	**65.247.512**	***Third parties - net***
Pihak berelasi (Catatan 25b)	49.759	605.950	*Related parties (Note 25b)*
Total piutang usaha - neto	**61.624.447**	**65.853.462**	***Total trade receivable - net***

5. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *5. TRADE RECEIVABLES (continued)*

c. Berdasarkan mata uang / *c. Based on currency*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Rupiah	96.672.346	100.772.305	*Rupiah*
Dikurangi:			*Less :*
Penyisihan penurunan nilai	(35.047.899)	(34.918.843)	*Allowance for impairment*
Neto	**61.624.447**	**65.853.462**	***Net***

d. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut: / *d. The movement in the allowance for impairment of receivables is as follows:*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Saldo awal	34.918.843	35.348.745	*Beginning balance*
Penambahan tahun berjalan	129.056	-	*Allowance for the year*
Pemulihan tahun berjalan	-	(429.902)	*Reversal for the year*
Total	**35.047.899**	**34.918.843**	***Total***

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen berpendapat bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha cukup memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on management's evaluation regarding the collectability of each receivable account on December 31, 2023 and 2022, management believes that the allowances for impairment of trade receivables are adequate to cover possible expected credit losses that may arise from uncollectability of trade receivables.

Pada tanggal 31 Desember 2023, tidak terdapat piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan.

As of December 31, 2023, there is no trade receivables used as collateral.

6. UANG MUKA / *6. ADVANCES*

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo ini merupakan uang muka yang dikeluarkan untuk kegiatan bongkar muat di terminal serta kegiatan operasional Perusahaan lainnya.

As of December 31, 2022, the balance represents advance payments for loading and unloading activities in terminal and other operational activities of the Company.

7. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA / *7. ACCRUED REVENUE*

Pendapatan masih akan diterima terutama merupakan piutang kepada pelanggan atas jasa yang telah selesai dilakukan oleh Perusahaan, namun belum difakturkan (piutang belum difakturkan).

Accrued revenue mainly represents receivables from customers for services which have been delivered by the Company, but not yet billed (unbilled receivable).

Rincian akun ini pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Details of the account as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Anugrah Permata Samudra	1.796.727	-	*PT Anugrah Permata Samudra*
PT Bandar Krida Jasindo	1.451.950	263.699	*PT Bandar Krida Jasindo*
PT Bumi Logistik Utama	853.937	-	*PT Bumi Logistik Utama*
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia	580.405	1.364.475	*PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia*

7. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA (lanjutan) / *7. ACCRUED REVENUE (continued)*

Rincian akun ini pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of the account as of December 31, 2023 and 2022 are as follows: (continued)

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Pihak ketiga (lanjutan)			*Third parties (continued)*
PT Suzuki Indomobil Motor	166.635	716.450	*PT Suzuki Indomobil Motor*
PT Astra Daihatsu Motor	-	1.721.090	*PT Astra Daihatsu Motor*
PT Glovis Indonesia Logistics	-	744.467	*PT Glovis Indonesia Logistics*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	2.653.018	1.499.371	*Others (each below Rp500 million)*
Subtotal	7.502.672	6.309.552	*Sub-total*
Pihak berelasi (Catatan 25c)	2.069.246	-	*Related parties (Note 25c)*
Total	**9.571.918**	**6.309.552**	***Total***

Rincian umur pendapatan masih akan diterima dihitung sejak tanggal diakuinya adalah sebagai berikut:

The aging analysis of accrued revenue from the recognition dates are as follow:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
1 - 30 hari	9.571.918	6.309.552	*1 - 30 days*

Pendapatan masih akan diterima tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

Accrued revenue were not used as collateral at reporting date.

8. ASET TETAP / *8. FIXED ASSETS*

Mutasi 31 Desember 2023 / *Movements in December 31, 2023*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Cost***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan fasilitas pelabuhan	230.126.038	4.667.096	-	-	234.793.134	*Port facilities buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	41.324.491	-	-	-	41.324.491	*Port facilities installation*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	22.746.411	-	-	-	22.746.411	*Port facilities equipments*
Jalan dan bangunan	150.856.163	-	-	-	150.856.163	*Road and building*
Peralatan	15.269.988	-	(401.572)	-	14.868.416	*Equipment*
Emplasemen	16.575.694	-	-	-	16.575.694	*Emplacement*
Kendaraan	2.153.802	-	-	-	2.153.802	*Vehicles*
Aset dalam pembangunan	5.263.426	22.677.222	(170.783)	(2.801.104)	24.968.761	*Construction in progress*
Subtotal	484.316.013	27.344.318	(572.355)	(2.801.104)	508.286.872	*Sub-total*
Operasi bersama						***Joint operation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	4.680.537	-	-	-	4.680.537	*Port facilities buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	151.857	-	-	-	151.857	*Port facilities installation*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	438.750	-	-	-	438.750	*Port facilities equipments*
Jalan dan bangunan	643.361	-	-	-	643.361	*Road and building*
Peralatan	1.535.822	-	-	-	1.535.822	*Equipment*
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	*Emplacement*
Subtotal	11.980.847	-	-	-	11.980.847	*Sub-total*
Total biaya perolehan	**496.296.860**	**27.344.318**	**(572.355)**	**(2.801.104)**	**520.267.719**	***Total cost***

8. ASET TETAP (lanjutan) / *8. FIXED ASSETS (continued)*

Mutasi 31 Desember 2023 (lanjutan) / *Movements in December 31, 2023 (continued)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2023					
	Saldo awal/ ***Beginning balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo akhir/** ***Ending balance***	
Dikurangi:						***Less:***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan fasilitas pelabuhan	41.306.818	9.511.078	-	-	50.817.896	*Port facilities buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	25.294.959	5.149.507	-	-	30.444.466	*Port facilities installation*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	16.314.613	1.895.969	-	-	18.210.582	*Port facilities equipments*
Jalan dan bangunan	26.870.492	6.830.258	-	-	33.700.750	*Road and building*
Peralatan	11.107.130	1.255.879	(38.042)	-	12.324.967	*Equipment*
Emplasemen	6.157.612	2.284.864	-	-	8.442.476	*Emplacement*
Kendaraan	1.723.041	-	-	-	1.723.041	*Vehicles*
Subtotal	128.774.665	26.927.555	(38.042)	-	155.664.178	*Sub-total*
Operasi bersama						***Joint operation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	1.091.893	155.984	-	-	1.247.877	*Port facilities buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	148.820	-	-	-	148.820	*Port facilities installation*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	429.975	-	-	-	429.975	*Port facilities equipments*
Jalan dan bangunan	437.946	56.894	-	-	494.840	*Road and building*
Peralatan	1.505.105	-	-	-	1.505.105	*Equipment*
Emplasemen	1.243.174	177.597	-	-	1.420.771	*Emplacement*
Subtotal	4.856.913	390.475	-	-	5.247.388	*Sub-total*
Total akumulasi penyusutan	**133.631.578**	**27.318.030**	**(38.042)**	**-**	**160.911.566**	***Total accumulated depreciation***
Nilai buku	**362.665.282**				**359.356.153**	***Net book value***

Mutasi 31 Desember 2022 / *Movements in December 31, 2022*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2022					
	Saldo awal/ ***Beginning balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo akhir/** ***Ending balance***	
Biaya perolehan						***Cost***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan fasilitas pelabuhan	178.010.029	-	-	52.116.009	230.126.038	*Port facilities buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	37.914.182	-	-	3.410.309	41.324.491	*Port facilities installation*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	22.746.411	-	-	-	22.746.411	*Port facilities equipments*
Jalan dan bangunan	150.856.163	-	-	-	150.856.163	*Road and building*
Peralatan	13.863.234	-	-	1.406.754	15.269.988	*Equipment*
Emplasemen	12.534.428	-	-	4.041.266	16.575.694	*Emplacement*
Kendaraan	2.153.802	-	-	-	2.153.802	*Vehicles*
Aset dalam pembangunan	44.018.760	27.767.026	(3.030.549)	(63.491.811)	5.263.426	*Construction in progress*
Subtotal	462.097.009	27.767.026	(3.030.549)	(2.517.473)	484.316.013	*Sub-total*
Operasi bersama						***Joint operation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	4.680.537	-	-	-	4.680.537	*Port facilities buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	151.857	-	-	-	151.857	*Port facilities installation*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	438.750	-	-	-	438.750	*Port facilities equipments*
Jalan dan bangunan	643.361	-	-	-	643.361	*Road and building*
Peralatan	1.535.822	-	-	-	1.535.822	*Equipment*
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	*Emplacement*
Subtotal	11.980.847	-	-	-	11.980.847	*Sub-total*
Total biaya perolehan	**474.077.856**	**27.767.026**	**(3.030.549)**	**(2.517.473)**	**496.296.860**	***Total cost***
Dikurangi:						***Less:***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan fasilitas pelabuhan	30.720.500	10.586.318	-	-	41.306.818	*Port facilities buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	20.363.991	4.930.968	-	-	25.294.959	*Port facilities installation*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	14.374.306	1.940.307	-	-	16.314.613	*Port facilities equipments*
Jalan dan bangunan	20.278.727	6.591.765	-	-	26.870.492	*Road and building*
Peralatan	10.382.285	724.845	-	-	11.107.130	*Equipment*
Emplasemen	3.536.564	2.621.048	-	-	6.157.612	*Emplacement*
Kendaraan	1.723.041	-	-	-	1.723.041	*Vehicles*
Subtotal	101.379.414	27.395.251	-	-	128.774.665	*Sub-total*

8. ASET TETAP (lanjutan) / *8. FIXED ASSETS (continued)*

Mutasi 31 Desember 2022 (lanjutan) / *Movements in December 31, 2022 (continued)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2022					
	Saldo awal/ ***Beginning balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo akhir/** ***Ending balance***	
Dikurangi: (lanjutan)						***Less: (continued)***
Akumulasi penyusutan (lanjutan)						***Accumulated depreciation (continued)***
Operasi bersama						***Joint operation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	935.908	155.985	-	-	1.091.893	*Port facilities buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	148.820	-	-	-	148.820	*Port facilities installation*
Alat-alat fasilitas pelabuhan	429.975	-	-	-	429.975	*Port facilities equipments*
Jalan dan bangunan	381.052	56.894	-	-	437.946	*Road and building*
Peralatan	1.505.105	-	-	-	1.505.105	*Equipment*
Emplasemen	1.065.578	177.596	-	-	1.243.174	*Emplacement*
Subtotal	4.466.438	390.475	-	-	4.856.913	*Sub-total*
Total akumulasi penyusutan	**105.845.852**	**27.785.726**	**-**	**-**	**133.631.578**	***Total accumulated depreciation***
Nilai buku	**368.232.004**				**362.665.282**	***Net book value***

Aset operasi bersama merupakan aset yang diserahkan untuk dikelola oleh MKO MTKI berdasarkan perjanjian kontraktual dengan PT Maspion Industrial Estate ("MIE") (Catatan 28c).

Joint operation assets represent assets that are transferred to be managed by MKO MTKI based on a contractual agreement with PT Maspion Industrial Estate ("MIE") (Note 28c).

Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan reklasifikasi aset dalam pembangunan menjadi aset takberwujud, masing-masing sebesar Rp2.801.104 dan Rp2.517.473.

Reclassifications as of December 31, 2023 and 2022 were the reclassifications of construction in progress into intangible assets amounted Rp2,801,104 and Rp2,517,473.

Rincian aset dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

The details of construction in progress are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Persentase penyelesaian/ ***Percentage of completion***	**Akumulasi biaya/** ***Accumulated costs***	**Estimasi penyelesaian/** ***Estimated completion***	
Bangunan fasilitas pelabuhan	30-89%	12.151.651	Desember/*December* 2024	*Port facilities building*
Jalan dan bangunan	84%	11.881.401	Februari/*February* 2024	*Road and building*
Peralatan	68%	935.709	Juni/*June* 2024	*Equipment*
		24.968.761		

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Persentase penyelesaian/ ***Percentage of completion***	**Akumulasi biaya/** ***Accumulated costs***	**Estimasi penyelesaian/** ***Estimated completion***	
Bangunan fasilitas pelabuhan	3%	1.988.813	Desember/*December* 2024	*Port facilities building*
Jalan dan bangunan	72%	565.116	Oktober/*October* 2023	*Road and building*
Peralatan	73%	2.709.497	Oktober/*October* 2023	*Equipment*
		5.263.426		

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset dalam pembangunan yang dimiliki Perusahaan merupakan konstruksi aset tetap yang bersifat *multi-year*.

As of December 31, 2023 and 2022, assets under construction owned by the Company are multi-year construction of fixed assets.

8. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan mengasuransikan aset tetap perusahaan terhadap berbagai risiko masing-masing pada PT Asuransi Ramayana Tbk dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) melalui asuransi bersama Pelindo yang melingkupi aset di wilayah kerja kantor pusat, cabang dan anak perusahaan Pelindo. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan telah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul terkait dengan aset yang diasuransikan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat aset tetap yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual atau yang dihentikan dari penggunaan aktif.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat perubahan atas estimasi umur manfaat, nilai residu dan metode penyusutan untuk seluruh aset tetap.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Nilai wajar aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp6.733.459 pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan laporan dari penilai independen adalah sebesar Rp8.298.900. Jumlah nilai buku aset tetap yang tidak dilakukan penilaian pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp352.622.694. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara nilai wajar dan jumlah tercatat aset tetap yang tidak dilakukan penilaian tersebut.

Rincian alokasi beban penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

8. FIXED ASSETS (continued)

On December 31, 2023 and 2022, the Company insured its fixed asset against various risks with PT Asuransi Ramayana Tbk and PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), respectively, through joint insurance with Pelindo which covered assets in the working area of the head office, branches and subsidiaries of Pelindo. Management believes that the coverage amount is sufficient to cover possible losses arising from the assets insured.

As of December 31, 2023 and 2022, there were no fixed assets classified as held for sale or terminated from active use.

As of December 31, 2023 and 2022, the management believes that there was no change on useful lives, residual values and method of depreciation on all fixed assets.

Management believes that there was no impairment in the value of directly owned fixed assets as of December 31, 2023 and 2022.

The fair value of fixed assets with net book value of Rp6,733,459 as of December 31, 2023 based on independent appraisal reports amounted to Rp8,298,900. The net book value of fixed assets that were not appraised by independent appraiser as of December 31, 2023 amounted to Rp352,622,694. Management believes that there is no significant difference between the fair value and carrying amount of these fixed assets.

Details of allocation of depreciation expenses for fixed assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Beban pokok pendapatan (Catatan 21)	25.744.776	26.012.180	*Cost of revenues (Note 21)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 22)	1.573.254	1.773.546	*General and administrative expenses (Note 22)*
Total	**27.318.030**	**27.785.726**	***Total***

Aset tetap kepemilikan langsung dan aset operasi bersama tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

Directly owned fixed assets and joint operation assets were not used as collateral at reporting date.

9. ASET TAKBERWUJUD / *9. INTANGIBLE ASSETS*

Mutasi 31 Desember 2023 / *Movements in December 31, 2023*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2023					
	Saldo awal/ ***Beginning balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo akhir/** ***Ending balance***	
Biaya perolehan						***Cost***
Studi tata kelola perusahaan	9.715.520	-	-	-	9.715.520	*Corporate governance study*
Piranti lunak	7.901.631	-	-	2.801.104	10.702.735	*Software*
Total biaya perolehan	**17.617.151**	**-**	**-**	**2.801.104**	**20.418.255**	***Total cost***
Dikurangi:						***Less:***
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Studi tata kelola perusahaan	9.715.520	-	-	-	9.715.520	*Corporate governance study*
Piranti lunak	4.307.485	1.763.840	-	-	6.071.325	*Software*
Total akumulasi amortisasi	**14.023.005**	**1.763.840**	**-**	**-**	**15.786.845**	***Total accumulated amortization***
Nilai buku	**3.594.146**				**4.631.410**	***Net book value***

Mutasi 31 Desember 2022 / *Movements in December 31, 2022*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2022					
	Saldo awal/ ***Beginning balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo akhir/** ***Ending balance***	
Biaya perolehan						***Cost***
Studi tata kelola perusahaan	9.715.520	-	-	-	9.715.520	*Corporate governance study*
Piranti lunak	5.384.158	-	-	2.517.473	7.901.631	*Software*
Total biaya perolehan	**15.099.678**	**-**	**-**	**2.517.473**	**17.617.151**	***Total cost***
Dikurangi:						***Less:***
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Studi tata kelola perusahaan	9.715.520	-	-	-	9.715.520	*Corporate governance study*
Piranti lunak	2.933.435	1.374.050	-	-	4.307.485	*Software*
Total akumulasi amortisasi	**12.648.955**	**1.374.050**	**-**	**-**	**14.023.005**	***Total accumulated amortization***
Nilai buku	**2.450.723**				**3.594.146**	***Net book value***

Aset takberwujud berupa studi tata kelola perusahaan merupakan jasa konsultasi penyusunan *business model* dan *target operating model* yang dilakukan oleh PT Boston Consulting Indonesia, pihak ketiga dan diamortisasi selama 5 (lima) tahun.

Intangible assets in form of corporate governance study represents consulting services of business model and target operating model provided by PT Boston Consulting Indonesia, a third party, and amortized for 5 (five) years.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Management believes that there was no impairment in the value of directly owned intangible assets as of December 31, 2023 and 2022.

Beban amortisasi seluruhnya dialokasikan pada beban umum dan administrasi (Catatan 22).

Amortization expenses are wholly allocated to general and administrative expenses (Note 22).

10. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA / *10. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES*

Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

The movements in right-of-use assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2023					
	Saldo Awal/ ***Beginning Balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***	
Harga perolehan						***Acquisition Costs***
Tanah dan bangunan fasilitas pelabuhan	894.236.920	10.224.641	-	-	904.461.561	*Land and port facilities*
Peralatan	98.962	-	-	-	98.962	*Equipments*
Kendaraan	5.017.052	369.193	-	-	5.386.245	*Vehicles*
Subtotal	899.352.934	10.593.834	-	-	909.946.768	*Sub-total*

10. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut: (lanjutan)

10. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (continued)

The movements in right-of-use assets are as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2023					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Dikurangi: **Akumulasi Penyusutan**						***Less:*** ***Accumulated Depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan fasilitas pelabuhan	221.359.623	78.046.001	-	-	299.405.624	*Land and port facilities*
Peralatan	98.962	-	-	-	98.962	*Equipments*
Kendaraan	2.477.656	1.677.140	-	-	4.154.796	*Vehicles*
Subtotal	223.936.241	79.723.141	-	-	303.659.382	*Sub-total*
Nilai buku bersih	**675.416.693**				**606.287.386**	***Net book value***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2022					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Harga perolehan						***Acquisition Costs***
Tanah dan bangunan fasilitas pelabuhan	865.357.295	28.879.625	-	-	894.236.920	*Land and port facilities*
Peralatan	65.302	33.660	-	-	98.962	*Equipments*
Kendaraan	2.523.281	3.793.345	(1.299.574)	-	5.017.052	*Vehicles*
Subtotal	867.945.878	32.706.630	(1.299.574)	-	899.352.934	*Sub-total*
Dikurangi: **Akumulasi Penyusutan**						***Less:*** ***Accumulated Depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan fasilitas pelabuhan	147.450.302	73.909.321	-	-	221.359.623	*Land and port facilities*
Peralatan	65.302	33.660	-	-	98.962	*Equipments*
Kendaraan	2.143.229	1.309.109	(974.682)	-	2.477.656	*Vehicles*
Subtotal	149.658.833	75.252.090	(974.682)	-	223.936.241	*Sub-total*
Nilai buku bersih	**718.287.045**				**675.416.693**	***Net book value***

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The detail of lease liabilities is as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Liabilitas sewa			***Lease liabilities***
Bagian lancar	42.127.118	407.847.400	*Current portion*
Bagian jangka panjang	359.479.683	394.986.777	*Non-current portion*
Total	**401.606.801**	**802.834.177**	***Total***

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in statement of profit or loss are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Bunga atas liabilitas sewa	46.424.352	58.597.992	*Interest on lease liabilities*
Beban penyusutan aset hak-guna	79.723.141	75.252.090	*Depreciation of right-of-use assets*
Beban terkait liabilitas sewa dengan nilai rendah atau jangka pendek	915.365	573.932	*Expense related to short-term liabilities low-value assets*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beban penyusutan aset hak guna dicatat sebagai bagian dari beban pokok pendapatan (Catatan 21).

As of December 31, 2023 and 2022, the depreciation expense of right-of-use assets was recorded as part of cost of revenues (Note 21).

10. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Beberapa transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Perusahaan sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Perusahaan. Perusahaan mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Perusahaan mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Perusahaan.

10. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (continued)

Some leases contain extension options exercisable by the Company before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Company. The Company assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Company reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

Summary of component of changes in the liabilities arising from leases is as folllow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Liabilitas sewa			***Lease liabilities***
Saldo awal	802.834.177	730.007.653	*Beginning balance*
Penambahan utang sewa	10.593.834	32.706.630	*Additional lease liabilities*
Pengurangan	-	(345.239)	*Deductions*
Penambahan bunga	46.424.352	58.597.992	*Addition of interest*
Pembayaran	(458.245.562)	(18.132.859)	*Payment*
Total	**401.606.801**	**802.834.177**	***Total***

11. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

11. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Uang jaminan (Catatan 25d)	3.154.996	3.154.996	*Guarantee deposits (Note 25d)*
Total	**3.154.996**	**3.154.996**	***Total***

Aset tidak lancar lainnya merupakan uang jaminan pelayanan listrik, lapangan penumpukan dan pelayanan kesehatan.

Guarantee deposits represents deposits for electricity services, standing yard and health services.

12. UTANG USAHA

12. TRADE PAYABLES

a. Berdasarkan pemasok

a. By supplier

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Energi Cakrawala Buana	992.872	539.630	*PT Energi Cakrawala Buana*
PT Mitra Integrasi Informatika	443.520	450.360	*PT Mitra Integrasi Informatika*
PT Tangguh Maju Bersama	375.887	550.313	*PT Tangguh Maju Bersama*
PT Mahardika Teknotama Integrasi	337.642	-	*PT Mahardika Teknotama Integrasi*
PT Puji Margo International	312.565	-	*PT Puji Margo International*
PT Sinar Cakra Abadi	303.500	112.646	*PT Sinar Cakra Abadi*
Koperasi Karyawan TPT	298.781	356.440	*Koperasi Karyawan TPT*
PT Gagasan Adinusa	270.797	270.797	*PT Gagasan Adinusa*
PT Berjaya Teknik Bersama	267.604	269.908	*PT Berjaya Teknik Bersama*
Yapanindo Konsultan	241.530	-	*Yapanindo Konsultan*
PT Fajar Tri Insani	215.107	-	*PT Fajar Tri Insani*
PT Multi Utama Risetindo	207.207	225.000	*PT Multi Utama Risetindo*

12. UTANG USAHA (lanjutan) / *12. TRADE PAYABLES (continued)*

a. Berdasarkan pemasok (lanjutan) / *a. By supplier (continued)*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Pihak ketiga (lanjutan)			*Third parties (continued)*
PT Jangkar Teknologi Integrasi	204.300	-	*PT Jangkar Teknologi Integrasi*
Wardhana Kristanto Lawyers	136.000	204.000	*Wardhana Kristanto Lawyers*
Kopegmar	-	4.032.496	*Kopegmar*
PT Galva Technologies	-	447.885	*PT Galva Technologies*
PT Biosis Multi Jaya	-	452.833	*PT Biosis Multi Jaya*
PT Sigma Sakti	-	245.700	*PT Sigma Sakti*
PT Insight Consulting	-	240.840	*PT Insight Consulting*
PT Wiryo Cranes Perkasa	-	183.209	*PT Wiryo Cranes Perkasa*
PT Bintang Mega Aldebaran	-	136.560	*PT Bintang Mega Aldebaran*
Lain-lain (Masing-masing dibawah Rp100 juta)	1.117.932	1.517.956	*Others (each below Rp100 million)*
Subtotal	5.725.244	10.236.573	*Sub-total*
Pihak berelasi (Catatan 25e)	40.147.885	82.238.552	*Related parties (Note 25e)*
Total	**45.873.129**	**92.475.125**	***Total***

b. Berdasarkan mata uang / *b. By currency*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Rupiah	45.873.129	92.475.125	*Rupiah*

13. UTANG LAIN-LAIN / *13. OTHER PAYABLES*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Pelita Karya Perkasa	4.073.975	-	*PT Pelita Karya Perkasa*
PT Laut Raya Krenindo	3.645.722	-	*PT Laut Raya Krenindo*
PT Sinar Cakra Abadi	2.171.388	5.357.254	*PT Sinar Cakra Abadi*
PT Atrya Swacipta Rekayasa	526.670	-	*PT Atrya Swacipta Rekayasa*
CV Pandawa Sukses Kreasi	421.465	575.060	*CV Pandawa Sukses Kreasi*
PT Sigma Sakti	351.469	-	*PT Sigma Sakti*
PT Trias Gegas Cipta	222.406	371.734	*PT Trias Gegas Cipta*
PT Primus Indonesia	189.012	189.026	*PT Primus Indonesia*
PT LAPI Ganeshatama Consulting	129.846	129.846	*PT LAPI Ganeshatama Consulting*
PT Bekasi Raya Putra	115.544	-	*PT Bekasi Raya Putra*
CV Karya Kencana	-	736.344	*CV Karya Kencana*
PT Jangkar Teknologi Integrasi	-	396.884	*PT Jangkar Teknologi Integrasi*
CV Aditia Prima Mandiri	-	307.698	*CV Aditia Prima Mandiri*
PT Sysfile Prima Strategi	-	102.950	*PT Sysfile Prima Strategi*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 juta)	40.682	676.449	*Others (each below Rp100 million)*
Subtotal	11.888.179	8.843.245	*Sub-total*
Pihak berelasi (Catatan 25f)	1.803.832	4.743.923	*Related party (Note 25f)*
Total	**13.692.011**	**13.587.168**	***Total***

Utang lain-lain kepada pihak ketiga dan pihak berelasi merupakan utang atas pembelian dan pembangunan aset tetap dan aset takberwujud.

Other payables to third parties and related party are payables for purchase and construction of fixed assets and intangible assets.

14. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA / *14. OTHER CURRENT LIABILITIES*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Sewa diterima di muka:			*Unearned rent*:
Pihak ketiga	-	44.352	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 25g)	-	19.800	*Related parties (Note 25g)*
Subtotal	-	64.152	*Sub-total*
Uang titipan:			*Deposits received*:
Pihak ketiga			*Third parties*
Pelanggan	4.505.218	2.854.196	*Customers*
Vendor	1.073.879	155.078	*Vendors*
Karyawan	944.137	1.278.056	*Employees*
Pihak berelasi (Catatan 25g)	1.183.184	1.069.677	*Related parties (Note 25g)*
Subtotal	7.706.418	5.357.007	*Sub-total*
Utang dividen:			*Dividend payable*:
Pihak ketiga	8.863.486	5.100.893	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 25g)	30.595.258	17.607.011	*Related parties (Note 25g)*
Subtotal	39.458.744	22.707.904	*Sub-total*
Total	**47.165.162**	**28.129.063**	***Total***

15. PERPAJAKAN / *15. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid Tax*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Pajak Pertambahan Nilai	16.393.419	-	*Value Added Tax*
Pajak penghasilan			*Income taxes*
Pasal 21	-	2.246.337	*Article 21*
Total	**16.393.419**	**2.246.337**	***Total***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Pajak penghasilan badan			*Corporate income tax*
Tahun berjalan	3.314.833	29.069.207	*Current year*
Pajak penghasilan			*Income taxes*
Pasal 4(2)	110.506	178.960	*Article 4(2)*
Pasal 15	9.706	-	*Article 15*
Pasal 21	3.912.011	732.041	*Article 21*
Pasal 23	1.167.256	499.632	*Article 23*
Pasal 25	6.233.415	3.506.227	*Article 25*
Pajak Pertambahan Nilai	-	4.238.129	*Value Added Tax*
Total	**14.747.727**	**38.224.196**	***Total***

c. Beban pajak final / *c. Final tax expense*

Beban pajak final timbul dari pajak final atas pendapatan sewa ruang kantor.

The final tax expense arises from the final tax on rental income for rent of the office spaces.

15. PERPAJAKAN (lanjutan) / *15. TAXATION (continued)*

d. Beban pajak penghasilan / *d. Income tax expense*

Beban (manfaat) pajak penghasilan terdiri dari: / *Income tax expense (benefit) consists of:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Beban pajak penghasilan kini:			*Current tax expenses:*
Tahun berjalan	50.707.949	58.816.036	*Current year*
Penyesuaian ketetapan pajak	-	3.185.667	*Adjustments from tax assesment letter*
	50.707.949	62.001.703	
Manfaat pajak tangguhan	(4.742.363)	(10.739.634)	*Deferred tax benefit*
Total	**45.965.586**	**51.262.069**	***Total***

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut: / *Reconciliation between income before corporate income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income with the estimated taxable income are as follows:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	236.820.430	212.986.836	*Income before corporate income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi:			*Less:*
Pendapatan kena pajak final	(14.297.569)	(8.252.674)	*Income subject to final tax*
Laba sebelum pajak penghasilan badan	222.522.861	204.734.162	*Income before corporate income tax*
Perbedaan temporer:			*Temporary differences:*
Penyisihan penurunan nilai	129.056	(429.902)	*Provision for impairment*
Imbalan kerja pegawai	(2.935.881)	4.534.181	*Employee benefit*
Penyusutan dan amortisasi	(3.261.103)	(1.032.768)	*Depreciation and amortization*
Beban sewa	(51.475.363)	(19.405.691)	*Rent expenses*
Penyusutan aset hak-guna	79.723.141	75.252.090	*Right-of-use assets depreciation*
Perbedaan tetap:			*Permanent differences:*
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	23.824.762	30.221.819	*Non-deductible expenses*
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	(38.036.797)	(26.528.275)	*Finance income subject to final tax*
Taksiran penghasilan kena pajak	230.490.676	267.345.616	*Estimated taxable income*
Beban pajak penghasilan - kini	50.707.949	58.816.036	*Income tax expense - current*
Dikurangi: pajak penghasilan dibayar di muka	(47.393.116)	(29.746.829)	*Less: prepaid income taxes*
Taksiran utang pajak penghasilan	**3.314.833**	**29.069.207**	***Estimated income tax payable***

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

d. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

d. Income tax expense (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan yang dikalikan tarif pajak yang berlaku dengan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before corporate income tax multiplied by the applicable tax rate and income tax expense are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	236.820.430	212.986.836	*Income before corporate income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi:			*Less:*
Pendapatan kena pajak final	(14.297.569)	(8.252.674)	*Income subject to final tax*
Laba sebelum pajak penghasilan badan	222.522.861	204.734.162	*Income before corporate income tax*
Beban pajak penghasilan pada tarif pajak yang berlaku	48.955.029	45.041.516	*Income tax expense at the applicable tax rate*
Pengaruh perbedaan tetap pada tarif pajak yang berlaku:			*Effect of permanent differences at the applicable tax rate:*
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	5.241.448	6.648.800	*Non-deductible expenses*
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	(8.368.095)	(5.836.220)	*Finance income subject to final tax*
Penyesuaian ketetapan pajak penghasilan badan (Catatan 15f)	-	3.185.667	*Adjustments on tax notice related to corporate income tax (Note 15f)*
Penyesuaian lain	137.204	2.222.306	*Other adjustments*
Beban pajak penghasilan	**45.965.586**	**51.262.069**	***Income tax expenses***

Perhitungan taksiran penghasilan kena pajak di atas menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

The above calculation of estimated taxable income are used as a basis in filing the Annual Corporate Income Tax Return.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia menandatangani UU No.7/2021 tentang "Harmonisasi Peraturan Perpajakan", yang menerapkan, antara lain, tarif pajak penghasilan badan sebagai berikut:

On October 29, 2021, the President of the Republic of Indonesia signed UU No.7/2021 regarding "Harmonization of Tax Regulation", which applies, among others, the corporate income tax rate as follows:

a. Sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 (sebelumnya 20% yang diatur dalam Perppu No.1 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020).

a. 22% effective starting fiscal year 2022 (previously 20% as stipulated in Perppu No.1 Year 2020 dated March 31, 2020).

b. Perusahaan Terbuka dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif pada butir a di atas.

b. Resident publicly-listed companies in Indonesia whose at least 40% or more of the total paid-up shares or other equity instruments are listed for trading in the Indonesia stock exchanges and meet certain requirements in accordance with the government regulations, can apply tariff of 3% lower than the rate as stated in point a above.

15. PERPAJAKAN (lanjutan) / *15. TAXATION (continued)*

d. Beban pajak penghasilan (lanjutan) / *d. Income tax expense (continued)*

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan tidak memenuhi persyaratan penurunan tarif pajak tersebut di atas.

For the year ended December 31, 2023 and 2022, the Company did not comply to the requirements for lower tax rate as stated above.

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company calculates and pays tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time tax becomes due.

e. Pajak penghasilan tangguhan / *e. Deferred income tax*

Rincian aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The details of the Company's deferred tax assets are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	7.710.537	7.682.145	*Allowance for impairment of trade receivables*
Imbalan kerja pegawai	4.309.530	4.955.423	*Employee benefit*
Penyusutan dan amortisasi	1.682.653	2.364.292	*Depreciation and amortization*
Liabilitas sewa	175.443.053	184.609.997	*Lease liabilities*
Aset hak-guna	(133.383.225)	(148.591.672)	*Right-of-use assets*
Neto	**55.762.548**	**51.020.185**	***Net***

Mutasi aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The movement of the Company's deferred tax assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/*Year ended December 31, 2023*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dibebankan ke/*Charged to*			Saldo akhir/ *Ending balance*	
		Laba (rugi)/ *Profit (loss)*	Ekuitas/ *Equity*	Penyesuaian/ *Adjustments*		
Aset pajak tangguhan						***Deferred tax assets***
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	7.682.145	28.392	-	-	7.710.537	*Allowance for impairment of trade receivables*
Imbalan kerja pegawai	4.955.423	(645.893)	-	-	4.309.530	*Employee benefit*
Penyusutan dan amortisasi	2.364.292	(717.443)	-	35.804	1.682.653	*Depreciation and amortization*
Liabilitas sewa	184.609.997	(11.324.580)	-	2.157.636	175.443.053	*Lease liabilities*
Total	**199.611.857**	**(12.659.524)**	**-**	**2.193.440**	**189.145.773**	***Total***
Liabilitas pajak tangguhan						***Deferred tax liabilities***
Aset hak-guna	(148.591.672)	17.539.091	-	(2.330.644)	(133.383.225)	*Right-of-use assets*
Total	(148.591.672)	17.539.091	**-**	**(2.330.644)**	(133.383.225)	***Total***
Aset pajak tangguhan - neto	**51.020.185**	**4.879.567**	**-**	**(137.204)**	**55.762.548**	***Deferred tax assets - net***

15. PERPAJAKAN (lanjutan) / *15. TAXATION (continued)*

e. Pajak penghasilan tangguhan (lanjutan) / *e. Deferred income tax (continued)*

Mutasi aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The movement of the Company's deferred tax assets are as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022/*Year ended December 31, 2022*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dibebankan ke/*Charged to* Laba (rugi)/ *Profit (loss)*	Ekuitas/ *Equity*	Penyesuaian/ *Adjustments*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset pajak tangguhan						***Deferred tax assets***
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	7.776.724	(94.579)	-	-	7.682.145	*Allowance for impairment of trade receivables*
Imbalan kerja pegawai	6.181.191	997.520	-	(2.223.288)	4.955.423	*Employee benefit*
Penyusutan dan amortisasi	2.586.042	(227.209)	-	5.459	2.364.292	*Depreciation and amortization*
Liabilitas sewa	181.759.744	(4.269.252)	-	7.119.505	184.609.997	*Lease liabilities*
Total	**198.303.701**	**(3.593.520)**	**-**	**4.901.676**	**199.611.857**	***Total***
Liabilitas pajak tangguhan						***Deferred tax liabilities***
Aset hak-guna	(158.023.150)	16.555.460	-	(7.123.982)	(148.591.672)	*Right-of-use assets*
Total	**(158.023.150)**	**16.555.460**	**-**	**(7.123.982)**	(148.591.672)	***Total***
Aset pajak tangguhan - neto	**40.280.551**	**12.961.940**	**-**	**(2.222.306)**	**51.020.185**	***Deferred tax assets - net***

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan kembali melalui penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

The management believes that the deferred tax assets can be fully recovered through future taxable income.

f. Surat ketetapan pajak / *f. Tax assesment letter*

Pada berbagai tanggal di tahun 2023, Perusahaan menerima surat tagihan pajak atas berbagai macam pajak penghasilan untuk berbagai masa pajak di tahun 2019, 2020 dan 2023 dan PPN untuk berbagai masa pajak di tahun 2020. Perusahaan mengakui beban sebesar Rp21.831 (Catatan 23) sehubungan dengan tagihan tersebut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2023.

On various dates in 2023, the Company received tax underpayment for various witholding taxes for various tax periods in 2019, 2020 and 2023 and VAT for various tax periods in 2020. The Company recognized an expense of Rp21,831 (Note 23) in relation to these claims in the statement of profit or loss and other comprehensive income year 2023.

Pada tanggal 21 April 2022, Perusahaan menerima ketetapan pajak lebih bayar atas pajak penghasilan badan tahun 2020 sebesar Rp1.224.015 dari yang dilaporkan di surat pemberitahuan pajak sebesar Rp4.409.682. Perusahaan menerima pengembalian lebih bayar pajak sebesar Rp289.633 setelah dikompensasikan dengan kurang bayar pajak serta surat tagihan pajak dengan total sebesar Rp934.382. Perusahaan menyetujui ketetapan pajak lebih bayar atas pajak penghasilan badan tersebut dan mengakui selisih atas perbedaannya sebesar Rp3.185.667 (Catatan 15d). Perusahaan telah mencatat beban atas penerimaan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

On April 21, 2022, The Company received tax overpayment assessment on corporate income tax for 2020 of Rp1,224,015, against the overpayment reported in tax return of Rp4,409,682 as reported in its tax return. The company received a refund of tax overpayment of Rp289,633 after being compensated by underpayment of taxes and notice of tax collection totaling Rp934,382. The Company accepted this overpayment assessment for corporate income tax and recognized the differences of Rp3,185,667 (Note 15d). The Company has recorded expenses on receipts of tax assessment letters and tax bills, income statements, and other comprehensive income for the current year.

16. BEBAN AKRUAL / *16. ACCRUED EXPENSES*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Kerjasama mitra usaha	18.679.614	35.218.237	*Partnerships*
Pegawai	13.277.902	13.980.245	*Employees*
Umum	7.983.257	2.062.992	*General*
Administrasi kantor	1.465.878	1.363.495	*Office administration*
Bahan	951.428	34.976	*Material*
Pemeliharaan	4.624	1.948.513	*Maintenance*
Total	**42.362.703**	**54.608.458**	***Total***

Beban akrual - kerjasama mitra usaha merupakan beban akrual atas pembagian pendapatan yang diperoleh dari pencapaian besaran realisasi kegiatan pelayanan jasa bongkar muat.

Accrued expenses - partnership mainly represents accrued expenses from sharing revenue derived from the achievement of loading and unloading activities.

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban akrual untuk biaya bonus dan tantiem.

Accrued expenses - employee mainly represents accrued expenses for employee's bonus and director's tantiem.

Beban akrual - umum terutama merupakan beban akrual atas beban perjalanan dinas, renovasi ruangan, dan umum lainnya.

Accrued expenses - general mainly represents accrued expenses for business trip, renovation, and others.

17. MODAL SAHAM / *17. SHARE CAPITAL*

Susunan kepemilikan saham pada Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of shares ownership in the Company as of December 31, 2023 and 2022, respectively, are as follows:

Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Total nilai nominal/ *Total nominal amount*	*Shareholders*
PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT")	1.296.144.749	71,28%	129.614.475	*PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT")*
PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")	13.092.371	0,72%	1.309.237	*PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")*
PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	100.682.600	5,54%	10.068.260	*PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")*
Publik (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)	408.465.100	22,46%	40.846.510	*Public (each less than 5% of shares)*
Total	**1.818.384.820**	**100%**	**181.838.482**	***Total***

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., modal dasar Perusahaan berjumlah Rp40.000.000 yang terbagi atas 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham.

Based on the Company Establishment Deed No. 10 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., authorized shares of the Company amounting to Rp40,000,000 divided into 4,000,000 shares with a nominal amount of Rp10,000 (full amount) per share.

Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 1.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000.000 terdiri dari 990.000 saham dengan nilai nominal Rp9.900.000 milik Pelindo dan 10.000 saham dengan nilai nominal Rp100.000 milik MTI.

Of the authorized shares, 1,000,000 shares with nominal amount of Rp10,000,000 has been issued and fully paid which consists of 990,000 shares with a nominal amount of Rp9,900,000 owned by Pelindo and 10,000 shares with a nominal amount of Rp100,000 owned by MTI.

17. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No. 48 tanggal 14 April 2018 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menyetujui diantaranya:

- Peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp500.000.000 yang terbagi atas 5.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham.
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp120.000.000 melalui kapitalisasi cadangan umum sebesar Rp96.000.000 dan kapitalisasi saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp24.000.000.

Perubahan tersebut telah diberitahukan oleh Perusahaan melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0151353 tanggal 17 April 2018 dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU0008618.AH.01.02 tanggal 17 April 2018.

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) Perusahaan No. 26 tanggal 11 Mei 2018 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui diantaranya:

- Melepaskan saham portepel dalam rangka penawaran umum perdana saham para pemegang saham serta menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan yang berasal dari saham portepel dalam rangka penawaran umum perdana saham yang sebelumnya sebesar Rp130.000.000 yang terbagi atas 1.300.000.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (nilai penuh) per saham, dengan tambahan Rp120.923.172 sehingga modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp130.923.712 yang terbagi atas 1.309.237.120 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham.
- Peningkatan modal disetor sebesar Rp923.712 dilakukan melalui kapitalisasi saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp30.991 dan kapitalisasi cadangan umum sebesar Rp892.721.

Perusahaan telah melakukan peningkatan modal saham ditempatkan dan disetor penuh melalui penawaran umum efek sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 1b.

17. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Deed of Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company No. 48 dated April 14, 2018 of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, the Company's shareholders agreed among others:

- *Increase of authorized share capital of the Company to be amounting to Rp500,000,000 consisting of 5,000,000,000 shares with nominal value of Rp100 (full amount) per share.*
- *Increase of issued and paid-up capital amounting to Rp120,000,000 through capitalization of general reserves amounting to Rp96,000,000 and capitalization of unappropriated reteained earnings amounting to Rp24,000,000.*

The change has been notified by the Company through Letter No. AHU-AH.01.03-0151353 dated April 17, 2018 and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No. AHU0008618.AH.01.02 dated April 17, 2018.

Based on Deed of Shareholders Resolution in lieu of General Meeting of Shareholders (Circular of Shareholders GMS) of the Company No. 26 dated May 11, 2018 by Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, the Company's shareholders agreed among others:

- *Issuing the portfolio shares in accordance with the initial public offering of shares of the shareholders and agreeing the increase of issued and paid-up capital of the Company from the portfolio shares in accordance with the initial public offering of shares from previously amounted Rp130,000,000 consisted of 1,300,000,000 shares with nominal value of Rp100 (full amount) per shares, with addition amounting to Rp120,923,172 so that share issued and paid-up capital of the Company to be amounting to Rp130,923,712 consisted of 1,309,237,120 shares with nominal value of Rp100 (full amount) per shares.*

- *The increase of paid-up capital amounting to Rp923,712 are made through capitalization of unappropriated retained earnings amounting to Rp30,991 and capitalization of general reserve amounting to Rp892,721.*

The Company has increased its issued and fully paid capital stock through public offerings of shares of stock as disclosed in Note 1b.

17. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Pelindo pada Perusahaan kepada PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT") nomor SK.03/3/1/1/PBAN/UTMN/PLND-22 tanggal 3 Januari 2022, saham Perusahaan milik Pelindo sebanyak 1.296.144.749 lembar saham atau setara dengan 71,28% dialihkan kepada SPMT.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No. 04 tanggal 1 Juli 2022 dari Ashoya Ratam, SH, MKn. notaris di Jakarta, saham Perusahaan milik Pelindo sebanyak 1.296.144.749 lembar saham atau setara dengan 71,28% dialihkan kepada SPMT. Perubahan tersebut telah diberitahukan dan Perusahaan telah menerima surat pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.09.0013090 tanggal 8 Juli 2022.

17. SHARE CAPITAL (continued)

Based on The Agreement of Transfer of Right of Shares of Pelindo in the Company to PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT") number SK.03/3/1/1/PBAN/UTMN/PLND-22 dated January 3, 2022, the Company shares owned by Pelindo amounting to 1,296,144,749 shares or equivalent to 71.28% were transferred to SPMT.

Based on the Deed of Statement of Resolutions of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 04 July 1, 2022 from Ashoya Ratam, SH, MKn. notary in Jakarta, the Company shares owned by Pelindo amounting to 1,296,144,749 shares or equivalent to 71.28% were transferred to SPMT. The changes have been reported and the Company has received from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU-AH.01.09.0013090 dated July 8, 2022.

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR

18. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Agio Saham (Catatan 1b)	784.087.458	784.087.458	*Share premium (Note 1b)*
Biaya emisi saham	(34.627.174)	(34.627.174)	*Share issuance cost*
Total	**749.460.284**	**749.460.284**	***Total***

Tambahan modal disetor merupakan agio saham yang berasal dari selisih lebih hasil penawaran umum perdana atas nilai nominal saham setelah dikurangi biaya penerbitan.

Additional paid-in capital represents premium on stock from excess of proceeds from the initial public offering of shares over par value after deducting the issuance costs.

19. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan No.25 tanggal 27 Juni 2023 dari Titik Krisna Mukti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2022 sebagai berikut:

- pembagian dividen sebesar 70% dari laba bersih atau sebesar Rp113.207.337, dimana sebanyak Rp22.707.904 telah dibagikan sebagai dividen interim tahun 2022 sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan berjumlah Rp90.499.433;
- cadangan umum sebesar Rp2.000.000;
- sisa 29% sebesar Rp46.517.430 sebagai laba ditahan.

Pembagian dividen tersebut di atas telah dibayarkan lunas pada tanggal 26 dan 27 Juli 2023.

19. CASH DIVIDEND AND GENERAL RESERVE

Based on the Deed of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders No.25 dated June 27, 2023 of Titik Krisna Mukti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company's shareholders determine the use of the Company's net profit for the year 2022 as follows:

- *dividend distribution of 70% of net profit or amounting to Rp113,207,337, in which Rp22,707,904 has been distributed as interim dividend for 2022, therefore, the remaining amount will be distributed as final dividend amounting to Rp90,499,433;*
- *general reserves amounting to Rp2,000,000;*
- *the remaining 29% amounting to Rp46,517,430 as retained earnings.*

The dividend distribution above has been fully paid on July 26 and 27, 2023.

19. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM (lanjutan)

Pada tanggal 14 Desember 2023, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun 2023 sebesar Rp39.458.744 dan telah dibayarkan pada tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp11.048.298 kepada publik dan pada tanggal 1 Maret 2024 sebesar Rp28.126.341 kepada SPMT. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, pembagian dividen interim senilai Rp284.105 kepada MTI belum dibayarkan.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan No.76 tanggal 30 Juni 2022 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2021 sebagai berikut:

- pembagian dividen sebesar 70% dari laba bersih sebesar Rp42.039.321;
- cadangan umum sebesar Rp2.000.000;
- sisa 27% sebesar Rp16.016.852 sebagai laba ditahan.

Pembagian dividen tersebut di atas telah dibayarkan lunas pada tanggal 3, 29 dan 30 Agustus 2022.

Pada tanggal 16 Desember 2022, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun 2022 sebesar Rp22.707.904 dan telah dibayarkan pada tanggal 13 Januari 2023, 31 Maret 2023 dan 31 Juli 2023 masing-masing sebesar Rp6.358.213 kepada publik serta Rp16.349.691 kepada SPMT dan MTI.

19. CASH DIVIDEND AND GENERAL RESERVE (continued)

On December 14, 2023, the Company declared interim dividend for 2023 amounted Rp39,458,744, and was paid on January 10, 2024 to Public amounted to Rp11,048,298 and was paid on March 1, 2024 amounted to Rp28,126,341 to SPMT. As of the date of completion of the financial statements, the distribution of interim dividends amounting to Rp284,105 to MTI had not been paid.

Based on the Deed of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders No.76 dated June 30, 2022 of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company's shareholders determine the use of the Company's net profit for the year 2021 as follows:

- *dividend distribution of 70% of net profit amounting to Rp42,039,321;*
- *general reserves amounted to Rp2,000,000;*
- *the remaining 27% amounting to Rp16,016,852 as retained earnings.*

The dividend distribution above has been fully paid on August 3, 29 and 30, 2022.

On December 16, 2022, the Company declared interim dividend for 2022 amounted Rp22,707,904, and was paid on January 13, 2023, March 31, 2023, and July 31, 2023 amounted Rp6,358,213 to public and amounted Rp16,349,691 to SPMT and MTI, respectively.

20. PENDAPATAN OPERASI / *20. OPERATING REVENUES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Pelayanan jasa terminal	670.809.173	671.072.719	*Terminal services*
Pelayanan jasa barang	40.953.474	38.434.538	*Cargo services*
Pelayanan rupa-rupa usaha	9.144.724	8.813.328	*Miscellaneous services*
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	14.297.569	8.252.674	*Land, building, water and electricity*
Total	**735.204.940**	**726.573.259**	***Total***

Pendapatan operasi - pelayanan jasa terminal terdiri dari kegiatan bongkar muat kargo dan penumpukan.

Operating revenues - terminal services consists of cargo loading-unloading activities and stacking yard.

Pendapatan operasi - pelayanan jasa barang terutama merupakan pendapatan jasa dermaga atas penggunaan fasilitas pelabuhan Perusahaan.

Operating revenues - cargo services mainly represents revenue from usage of Company's port facilities.

Pendapatan operasi - pelayanan rupa-rupa usaha terutama merupakan pendapatan atas jasa kebersihan pelabuhan.

Operating revenues - miscellaneous services mainly represents revenue from port cleaning services.

20. PENDAPATAN OPERASI (lanjutan) / *20. OPERATING REVENUES (continued)*

Rincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 10% dari jumlah pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of customers which represents more than 10% of the total revenues are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		Persentase terhadap jumlah Pendapatan/*Percentage to total Revenue*		
	2023	2022	2023	2022	
PT Bandar Krida Jasindo	165.286.791	150.061.969	22,48	20,65	*PT Bandar Krida Jasindo*
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia	72.316.987	76.057.810	9,84	10,47	*PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia*
PT Astra Daihatsu Motor	71.394.874	72.861.637	9,71	10,03	*PT Astra Daihatsu Motor*
Total	**308.998.652**	**298.981.416**	**42,03**	**41,15**	***Total***

21. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *21. COST OF REVENUES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	2022	
Kerjasama mitra usaha	150.752.551	139.322.957	*Partnership*
Penyusutan (Catatan 8 dan 10)	105.467.917	101.264.270	*Depreciation (Note 8 and 10)*
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	54.143.451	43.860.506	*Salaries, wages, and employee benefits*
Tenaga kerja non-organik	47.623.881	49.819.055	*Non-organic labor*
Konsesi	19.324.504	15.727.710	*Concession*
Bahan dan utilitas	13.307.604	12.537.450	*Supplies and utilities*
Pemeliharaan	11.097.084	12.420.328	*Maintenance*
Beban eksploitasi lainnya	7.010.919	4.774.298	*Other exploitation expenses*
Total	**408.727.911**	**379.726.574**	***Total***

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada transaksi dari satu pemasok atau mitra dengan total pembelian kumulatif melebihi 10% dari total pendapatan Perusahaan.

During the year ended December 31, 2023 and 2022, there were no purchases made from any single supplier or partner with a cumulative amount exceeding 10% of total sales of the Company.

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *22. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	2022	
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	17.219.936	16.106.153	*Salaries, wages, and employee benefits*
Tenaga kerja non-organik	11.314.894	14.475.725	*Non-organic labor*
Pemeliharaan	7.646.950	16.753.720	*Maintenance*
Pajak bumi dan bangunan	7.033.229	7.312.141	*Land and building taxes*
Administrasi kantor	4.889.742	5.496.856	*Office administration*
Konsultan	4.398.070	6.052.172	*Consultant*
Bahan dan utilitas	4.232.388	4.603.916	*Supplies and utilities*
Pembebanan imbalan pasca kerja	2.904.638	1.745.499	*Recharge for post employment benefit*
Perjalanan dinas	2.147.047	2.816.695	*Business travelling*
Amortisasi (Catatan 9)	1.763.840	1.374.050	*Amortization (Notes 9)*
Penyusutan (Catatan 8)	1.573.254	1.773.546	*Depreciation (Note 8)*
Pendidikan dan pelatihan	986.876	1.338.295	*Training and workshop*
Asuransi	848.827	706.165	*Insurance*
Penyisihan (pemulihan) penurunan nilai piutang usaha	129.056	(429.902)	*Allowance (reversal) for impairment of trade receivables*
Beban umum lainnya	9.254.482	8.778.632	*Other general expenses*
Total	**76.343.229**	**88.903.663**	***Total***

23. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI LAINNYA / *23. OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Pendapatan operasi lainnya:			***Other operating income:***
Pendapatan denda	70.329	265.446	*Income from penalty*
Lain-lain	3.710.207	20.357	*Others*
Total	**3.780.536**	**285.803**	***Total***
Beban operasi lainnya:			***Other operating expenses:***
Rugi penghapusan aset tetap	534.313	3.030.549	*Loss on disposal fixed assets*
Denda dan kekurangan pajak (Catatan 15f)	21.831	934.382	*Tax penalties (Note 15f)*
Pajak final pendapatan keuangan	6.475.710	5.073.251	*Final tax from finance income*
Pajak dibayar di muka yang tidak dapat dikreditkan	-	2.632.396	*Non-creditable prepaid taxes*
Lain-lain	1.674.497	1.501.694	*Others*
Total	**8.706.351**	**13.172.272**	***Total***

24. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN / *24. FINANCE INCOME AND EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Pendapatan keuangan:			***Finance income:***
Bunga deposito berjangka	36.300.305	23.951.225	*Interests on time deposits*
Bunga jasa giro	1.736.492	2.577.050	*Interests on current accounts*
Total	**38.036.797**	**26.528.275**	***Total***
Beban keuangan:			***Finance expense:***
Bunga aset sewaan	46.424.352	58.597.992	*Interest on lease liabilities*
Total	**46.424.352**	**58.597.992**	***Total***

25. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *25. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES*

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

In the ordinary course of business, the Company engages in transactions with related parties, which are conducted based on prices and terms agreed between the parties. The nature of relationships and transactions with related parties are as follows:

Sifat relasi/ *Nature of relationship*	**Nama pihak berelasi/** *Name of related party*	**Jenis transaksi/** *Nature of transaction*
Entitas induk PT Pelindo Multi Terminal/ *Parent entity of PT Pelindo Multi Terminal*	PT Pelabuhan Indonesia ("Pelindo")	Imbalan kerja, konsesi, sewa, dan kerjasama mitra usaha/ *Employee benefit, concession, rent and business partnership*
Entitas induk/ *Parent Entity*	PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT")	Dividen, kerjasama mitra usaha/ *Dividend, business partnership*
Entitas sepengendalian Pelindo/ *Entities under common control Pelindo*	PT Menara Maritim Indonesia ("MMI")	Layanan sewa ruang kantor/ *Office leases*

25. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

25. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

In the ordinary course of business, the Company engages in transactions with related parties, which are conducted based on prices and terms agreed between the parties. The nature of relationships and transactions with related parties are as follows: (continued)

Sifat relasi/ ***Nature of relationship***	**Nama pihak berelasi/** ***Name of related party***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transaction***
Entitas sepengendalian Pelindo (lanjutan)/ *Entities under common control Pelindo (continued)*	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS")	Layanan teknologi informasi/ *Information technology services*
	PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Penyedia listrik/ *Electricity provider*
	PT Electronic Data Interchange Indonesia ("EDII")	Layanan sistem informasi/ *Information system services*
	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia ("PMLI")	Pendidikan dan pelatihan/ *Training and education*
	PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	Dividen/*Dividend*
	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI")	Pemeliharaan alat/ *Equipment maintenance*
	PT IPC Terminal Petikemas ("IPC TPK")	Kerjasama mitra usaha/ *Business partnership*
	PT Intan Sejahtera Utama ("ISMA")	Penyedia Tenaga Alih Daya/ *Outsourcing*
	PT Pelindo Daya Sejahtera ("PDS")	Penyedia Tenaga Alih Daya/ *Outsourcing*
	PT Lamong Energi Indonesia ("LEGI")	Penyedia listrik / *Electricity provider*
	PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTP")	Kerjasama mitra usaha / *Business partnership*
	PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")	Dividen, kerjasama mitra usaha / *Dividend, business partnership*
Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia/ *Entities under common control of the Government of the Republic of Indonesia*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Transaksi keuangan/*Financial transaction*
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Transaksi keuangan/*Financial transaction*
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Transaksi keuangan/*Financial transaction*
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Transaksi keuangan/*Financial transaction*
	PT BNI Life Insurance	Asuransi tenaga kerja/ *Employee insurance*

25. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

25. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

In the ordinary course of business, the Company engages in transactions with related parties, which are conducted based on prices and terms agreed between the parties. The nature of relationships and transactions with related parties are as follows: (continued)

Sifat relasi/ *Nature of relationship*	Nama pihak berelasi/ *Name of related party*	Jenis transaksi/ *Nature of transaction*
Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia (lanjutan)/ *Entities under common control of the Government of the Republic of Indonesia (continued)*	PT Rumah Sakit Pelabuhan ("RSP")	Layanan kesehatan/ *Health services*
	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Lain-lain/*Others*
	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) ("KBN")	Sewa/*Lease*

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Balances and transactions with related parties are as follows:

a. Kas dan setara kas (Catatan 4)

a. Cash and cash equivalents (Note 4)

	Jumlah/*Total*		Persentase terhadap jumlah Aset/*Percentage to total Assets*		
	31 Desember/ *December 31,2023*	31 Desember/ *December 31,2022*	31 December/ *December 31,2023*	31 Desember/ *December 31,2022*	
Bank					***Bank***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	32.715.745	14.447.163	1,83	0,66	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.235.597	5.179.191	0,13	0,24	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	131.572	10.952	0,01	0,00	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Deposito berjangka					***Time deposits***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	385.000.000	255.000.000	21,53	11,63	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	250.000.000	460.000.000	13,98	20,99	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	285.000.000	-	13,00	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Total	**670.082.914**	**1.019.637.306**	**37,48**	**46,52**	***Total***

b. Piutang usaha (Catatan 5)

b. Trade receivable (Note 5)

	Jumlah/*Total*		Persentase terhadap jumlah Aset/*Percentage to total Assets*		
	31 Desember/ *December 31,2023*	31 Desember/ *December 31,2022*	31 December/ *December 31,2023*	31 Desember/ *December 31,2022*	
MTI	35.340	-	0,00	0,00	*MTI*
Pelindo	14.419	123.125	0,00	0,01	*Pelindo*
PTP	-	482.825	0,00	0,02	*PTP*
Total	**49.759**	**605.950**	**0,00**	**0,03**	***Total***

25. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *25. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)*

c. Pendapatan masih akan diterima (Catatan 7) / *c. Accrued revenue (Note 7)*

	Jumlah/*Total*		Persentase terhadap jumlah Aset/*Percentage to total Assets*		
	31 Desember/ *December 31,2023*	31 Desember/ *December 31,2022*	31 December/ *December 31,2023*	31 Desember/ *December 31,2022*	
SPMT	1.760.910	-	0,10	-	*SPMT*
Pelindo	308.336	-	0,02	-	*Pelindo*
Total	**2.069.246**	**-**	**0,12**	**-**	***Total***

d. Aset tidak lancar lainnya (Catatan 11) / *d. Other non-current assets (Note 11)*

	Jumlah/*Total*		Persentase terhadap jumlah Aset/*Percentage to total Assets*		
	31 Desember/ *December 31,2023*	31 Desember/ *December 31,2022*	31 December/ *December 31,2023*	31 Desember/ *December 31,2022*	
Uang jaminan					***Guarantee deposits***
KBN	2.359.191	2.359.191	0,13	0,11	*KBN*
EPI	305.805	305.805	0,02	0,01	*EPI*
RSP	300.000	300.000	0,02	0,01	*RSP*
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	190.000	190.000	0,01	0,01	*Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*
Total	**3.154.996**	**3.154.996**	**0,18**	**0,14**	***Total***

e. Utang usaha (Catatan 12) / *e. Trade payables (Note 12)*

	Jumlah/*Total*		Persentase terhadap jumlah Liabilitas/*Percentage to total Liabilities*		
	31 Desember/ *December 31,2023*	31 Desember/ *December 31,2022*	31 December/ *December 31,2023*	31 Desember/ *December 31,2022*	
Pelindo	27.061.064	53.315.276	4,79	5,18	*Pelindo*
ILCS	5.454.304	764.706	0,96	0,07	*ILCS*
PDS	2.531.585	21.837.743	0,45	2,12	*PDS*
EPI	1.176.881	1.963.154	0,21	0,19	*EPI*
JPPI	1.047.672	550.340	0,19	0,06	*JPPI*
IPC TPK	886.070	289.329	0,16	0,03	*IPC TPK*
PTP	760.663	760.663	0,13	0,07	*PTP*
PMLI	563.282	904.189	0,10	0,09	*PMLI*
ISMA	352.465	333.642	0,06	0,03	*ISMA*
RSP	296.352	1.388.085	0,05	0,13	*RSP*
PII	15.794	-	0,00	0,00	*PII*
MMI	1.753	6.415	0,00	0,00	*MMI*
LEGI	-	79.855	0,00	0,01	*LEGI*
EDII	-	45.155	0,00	0,00	*EDII*
Total	**40.147.885**	**82.238.552**	**7,10**	**7,98**	***Total***

f. Utang lain-lain (Catatan 13) / *f. Other payables (Note 13)*

	Jumlah/*Total*		Persentase terhadap jumlah Liabilitas/*Percentage to total Liabilities*		
	31 Desember/ *December 31,2023*	31 Desember/ *December 31,2022*	31 December/ *December 31,2023*	31 Desember/ *December 31,2022*	
EPI	1.055.502	1.096.734	0,19	0,10	*EPI*
ILCS	748.330	3.466.757	0,13	0,34	*ILCS*
JPPI	-	180.432	0,00	0,02	*JPPI*
Total	**1.803.832**	**4.743.923**	**0,32**	**0,46**	***Total***

25. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *25. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)*

g. Liabilitas jangka pendek lainnya (Catatan 14) / *g. Other current liabilities (Note 14)*

	Jumlah/*Total*		Persentase terhadap jumlah Liabilitas/*Percentage to total Liabilities*		
	31 Desember/ *December 31,2023*	31 Desember/ *December 31,2022*	31 December/ *December 31,2023*	31 Desember/ *December 31,2022*	
Sewa diterima di muka					***Unearned rent***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	19.800	-	0,00	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Uang titipan					***Deposits received***
PT BNI Life Insurance	1.074.776	1.069.677	0,19	0,10	*PT BNI Life Insurance*
MTI	88.291	-	0,02	-	*MTI*
IPC TPK	20.117	-	0,00	-	*IPC TPK*
Utang dividen					***Dividend payables***
SPMT	28.126.341	16.186.195	4,97	1,57	*SPMT*
PII	2.184.812	1.257.320	0,39	0,12	*PII*
MTI	284.105	163.496	0,05	0,02	*MTI*
Total	**31.778.442**	**18.696.488**	**5,62**	**1,81**	***Total***

h. Pendapatan operasi (Catatan 20) / *h. Operating revenues (Note 20)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31*,		Persentase terhadap jumlah Pendapatan/*Percentage to total Revenue*		
	2023	2022	2023	2022	
SPMT	1.760.910	-	0,24	-	*SPMT*
Pelindo	308.336	110.913	0,04	0,01	*Pelindo*
MTI	184.000	-	0,03	-	*MTI*
PTP	-	1.556.163	-	0,21	*PTP*
Total	**2.253.246**	**1.667.076**	**0,31**	**0,22**	***Total***

i. Beban pokok pendapatan (Catatan 21) / *i. Cost of revenues (Note 21)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31*,		Persentase terhadap jumlah Beban Pokok Pendapatan/*Percentage to total Cost of Revenues*		
	2023	2022	2023	2022	
PDS	57.503.823	47.533.885	14,07	12,51	*PDS*
Pelindo	45.534.637	32.270.269	11,14	8,49	*Pelindo*
ISMA	13.421.410	9.380.132	3,28	2,47	*ISMA*
ILCS	8.235.300	8.138.719	2,01	2,14	*ILCS*
EPI	3.633.554	4.675.725	0,89	1,23	*EPI*
IPC TPK	3.371.537	3.471.950	0,82	0,92	*IPC TPK*
JPPI	1.725.959	1.020.434	0,42	0,26	*JPPI*
PMLI	1.313.932	1.177.679	0,32	0,31	*PMLI*
MMI	652.430	309.825	0,16	0,08	*MMI*
LEGI	207.158	79.845	0,05	0,02	*LEGI*
MTI	129.969	-	0,03	-	*MTI*
EDII	52.000	129.153	0,01	0,03	*EDII*
Total	**135.781.709**	**108.187.616**	**33,20**	**28,46**	***Total***

j. Kompensasi personil manajemen kunci / *j. Key management personnel compensation*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	2022	
Imbalan kerja jangka pendek	10.081.645	12.620.596	*Short-term employee benefits*

26. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Instrumen Keuangan

Nilai tercatat instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat (berdasarkan jumlah nosional) kas dan setara kas, piutang usaha, pendapatan masih akan diterima, piutang lain-lain, uang jaminan, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, uang titipan dan utang dividen kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena instrumen keuangan tersebut berjangka pendek.

Estimasi nilai wajar bersifat *judgmental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:
- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Perusahaan akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

Informasi Nilai Wajar

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, hirarki nilai wajar Perusahaan untuk aset yang nilai wajarnya diungkapkan adalah sebagai berikut:

26. FAIR VALUE MEASUREMENT

Financial Instruments

The carrying values of financial instruments presented in the statement of financial position approximate their fair values.

Management has determined that the carrying amounts (based on notional amounts) of cash and cash equivalents, trade receivables, accrued revenue, other receivables, guarantee deposits, trade payables, other payables, accrued expenses, deposits received, and dividend payables are reasonably approximate their fair values because they are mostly short-term in nature.

Fair value estimation is judgmental and involved various boundaries, including:

- *Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.*
- *Fair value estimation are not always indicating value that the Company will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.*

Fair Value Information

As of December 31, 2023 and 2022, fair value hierarchy of the Company for assets which fair value were disclosed are as follows:

	31 Desember 2023/*December 31, 2023*				
	Total/ ***Total***	**Level 1/** ***Level 1***	**Level 2/** ***Level 2***	**Level 3/** ***Level 3***	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					***Assets for which fair value are disclosed***
Aset tidak lancar					***Non-current Assets***
Aset tetap *)	8.298.900	-	8.298.900	-	*Fixed assets *)*

*) Untuk aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp6.733.459/*For fixed assets with net book value of Rp6,733,459*

	31 Desember 2022/*December 31, 2022*				
	Total/ ***Total***	**Level 1/** ***Level 1***	**Level 2/** ***Level 2***	**Level 3/** ***Level 3***	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					***Assets for which fair value are disclosed***
Aset tidak lancar					***Non-current Assets***
Aset tetap *)	8.419.365	-	8.419.365	-	*Fixed assets *)*

*) Untuk aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp7.123.934/*For fixed assets with net book value of Rp7,123,934*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat pengalihan antara pengukuran nilai wajar Level 1 dan Level 2, dan tidak terdapat pengalihan dari Level 3 pengukuran nilai wajar.

Tidak terdapat aset dan liabilitas lain yang diukur dan diungkapkan selain yang telah dijelaskan diatas.

As of December 31, 2023 and 2022, there is no transfer between measurement of fair value of Level 1 and Level 2 and no transfer from Level 3 fair value measurements.

No other assets and liabilities have been measured and disclosed other than above explained.

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan adalah risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko suku bunga. Kegiatan operasional Perusahaan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Tabel berikut menunjukkan jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risks arising from the Company's financial instruments are liquidity risk, credit risk and interest rate risk. The operational activities of the Company are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Liquidity risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flows position of the Company is not enough to cover the liabilities which become due.

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Company's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

The table below summarizes the maturity profile of financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

31 Desember 2023/*December 31, 2023*

	Kurang dari 1 tahun/ *Below 1 year*	1-3 tahun/ *1-3 years*	3-5 tahun/ *3-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Total/ *Total*	
Utang usaha	45.873.129	-	-	-	45.873.129	*Trade payables*
Utang lain-lain	13.692.011	-	-	-	13.692.011	*Other payables*
Beban akrual	42.362.703	-	-	-	42.362.703	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka pendek lainnya	47.165.162	-	-	-	47.165.162	*Other current liabilities*
Liabilitas sewa	42.127.118	-	552.448.212	-	594.575.330	*Lease liabilities*
Total	**191.220.123**	**-**	**552.448.212**	**-**	**743.668.335**	***Total***

31 Desember 2022/*December 31, 2022*

	Kurang dari 1 tahun/ *Below 1 year*	1-3 tahun/ *1-3 years*	3-5 tahun/ *3-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Total/ *Total*	
Utang usaha	92.475.125	-	-	-	92.475.125	*Trade payables*
Utang lain-lain	13.587.168	-	-	-	13.587.168	*Other payables*
Beban akrual	54.608.458	-	-	-	54.608.458	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka pendek lainnya	28.064.911	-	-	-	28.064.911	*Other current liabilities*
Liabilitas sewa	407.847.400	5.959.925	597.983.473	-	1.011.790.798	*Lease liabilities*
Total	**596.583.062**	**5.959.925**	**597.983.473**	**-**	**1.200.526.460**	***Total***

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)*

Risiko kredit / *Credit risk*

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya.

Credit risk is the risk that the Company will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations.

Tabel berikut menyajikan eksposur posisi keuangan terkait risiko kredit.

The table below shows the Company's exposures related to credit risk.

	31 Desember/*December 31*, 2023		31 Desember/*December 31,* 2022		
	Total Bruto/ *Gross Amount*	Total Neto/ *Net Amount*	Total Bruto/ *Gross Amount*	Total Neto/ *Net Amount*	
Aset keuangan					***Financial Assets***
Lancar					*Current*
Bank dan deposito berjangka	670.082.914	670.082.914	1.019.637.306	1.019.637.306	*Cash in bank and time deposits*
Piutang usaha	96.672.346	61.624.447	100.772.305	65.853.462	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	-	-	289.007	289.007	*Other receivables*
Pendapatan masih akan diterima	9.571.918	9.571.918	6.309.552	6.309.552	*Accrued revenue*
Tidak lancar					*Non-current*
Uang jaminan	3.154.996	3.154.996	3.154.996	3.154.996	*Guarantee deposits*
Total	**779.482.174**	**744.434.275**	**1.130.163.166**	**1.095.244.323**	***Total***

Risiko suku bunga / *Interest rate risk*

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga:

The following table sets out the carrying amount, by maturity, of the Company's financial assets that are exposed to interest rate risk:

	Suku bunga mengambang/ *Floating interest rate*		Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate*			
	<= 1 Tahun/ *<= 1 Year*	> 1 Tahun/ *> 1 Year*	<= 1 Tahun/ *<= 1 Year*	> 1 Tahun/ *> 1 Year*	Jumlah/*Total*	
31 Desember 2023						***December 31, 2023***
Bank dan deposito berjangka	670.082.914	-	-	-	670.082.914	*Cash in bank and time deposit*
31 Desember 2022						***December 31, 2022***
Bank dan deposito berjangka	1.019.637.306	-	-	-	1.019.637.306	*Cash in bank and time deposit*

Dampak perubahan tingkat suku bunga per tahun deposito berjangka terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The effect of changes in the annual interest rates of time deposits to profit before income tax is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	2022	
Kenaikan 50 basis poin	3.454.167	3.839.583	*Increase by 50 basis points*
Penurunan 50 basis poin	(3.454.167)	(3.839.583)	*Decrease by 50 basis points*

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimumkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Perusahaan dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company manages its capital to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position to ensure optimal capital structure to reduce the cost of capital.

28. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Sewa

1) Pada 17 Desember 2018, Perusahaan dan Pelindo menandatangani berita acara kesepakatan tentang sewa atas aset-aset berupa lahan dan dermaga Pelindo pada area Pelabuhan Tanjung Priok. Jangka waktu perjanjian ini adalah 15 (lima belas) tahun dimulai dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2032.

   Total pembayaran sewa sebesar Rp1.312.560.791 akan dibayarkan setiap 5 (lima) tahun dengan nilai pembayaran sebesar Rp320.590.261, Rp439.522.318 dan Rp552.448.212 masing-masing di tahun 2018, 2023 dan 2028. Perusahaan telah melakukan pembayaran pertama pada tanggal 28 Desember 2018 dan pembayaran kedua pada tanggal 3 Mei 2023.

2) Pada 9 Maret 2022, Perusahaan dan Pelindo Regional 2 Tanjung Priok menandatangani perjanjian tentang Pendayagunaan Aset Tetap Lahan Eks Dharma Karya Perdana (DKP) No. HK.566/1/9/IKT-22. Jangka waktu perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Berita Acara Mulai Operasi yaitu dimulai dari tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. Lease

1) On December 17, 2018, the Company and Pelindo signed an agreement regarding rent for Pelindo's assets in the form of land and piers in the Tanjung Priok Port area. This agreement is valid for 15 (fifteen) years starting January 1, 2018 until December 31, 2032.

   Total rent payment for the agreement amounting to Rp1,312,560,791 will be paid every 5 (five) years amounting to Rp320,590,261, Rp439,522,318 and Rp552,448,212 each in 2018, 2023 and 2028, respectively. The Company has made the first payment on December 28, 2018 and the second payment on May 3, 2023.

2) On March 9,2022, the Company and Pelindo Regional 2 signed an agreement on the utilization of assets of Eks Dharma Karya Perdana (DKP) field No. HK.566/1/9/IKT-22. The term of this agreement is 1 (one) year since the signing of the Minutes of Commencement of Operations, which is from November 1, 2022, until October 31, 2023.

28. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Sewa (lanjutan)

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, perjanjian antara Perusahaan dengan Pelindo Regional 2 masih dalam tahap perpanjangan.

3) Pada tanggal 14 November 2018, Perusahaan dan Pelindo menandatangani perjanjian tentang pendayagunaan aset di area pelabuhan Eks Presiden, Tanjung Priok. Jangka waktu dalam perjanjian ini adalah selama 2 (dua) tahun dimulai dari tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020 dan telah diperpanjang dari tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023.

Pada tanggal 6 November 2023, Perusahaan dan Pelindo menandatangani perjanjian tentang Kerjasama Optimalisasi Aset Pelindo Regional 2 Tanjung Priok di Dermaga dan Lapangan Eks Presiden. Nilai kerjasama adalah *revenue sharing* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan pengoperasian lapangan. Jangka waktu dalam perjanjian ini adalah selama 6 (enam) bulan dimulai dari tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, perjanjian antara Perusahaan dengan Pelindo masih dalam tahap perpanjangan.

4) Pada 4 Desember 2019, Perusahaan dan Pelindo menandatangani perjanjian tentang pendayagunaan aset di Jalan Sindang Laut (Eks-PP) seluas 10.000 m2. Jangka waktu perjanjian ini adalah 4 (empat) tahun dimulai dari tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.

Pada 15 Mei 2023, Perusahaan dan Pelindo menandatangani perjanjian tentang pendayagunaan aset di Jalan Sindang Laut (Eks-PP) seluas 10.000 m2. Jangka waktu perjanjian ini adalah 2 (dua) tahun dimulai dari tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024.

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a. Lease (continued)

As of the completion date of the financial statements, the agreement between the Company with Pelindo Regional 2 still in the process for extension.

3) On November 14, 2018, the Company and Pelindo entered into agreement regarding utilization of asset in the Ex Presiden, Tanjung Priok port area. This agreement is valid for 2 (two) years starting from May 15, 2018 until May 14, 2020 and has been extended starting from May 15, 2020 and until May 14, 2023.

On November 6, 2023, the Company and Pelindo signed an agreement on Cooperation in Optimizing Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Assets in the Dock and Ex Presiden Field. The value of the cooperation is a revenue sharing of 30% (thirty percent) of the field operating income. The term of this agreement is 6 (six) months starting from 15 May 2023 until 14 November 2023.

As of the completion date of the financial statements, the agreement between the Company with Pelindo still in the process for extension.

4) On December 4, 2019, the Company and Pelindo signed an agreement on the utilization of assets on Jalan Sindang Laut (Ex-PP) covering an area of 10,000 m2. This agreement is valid for 4 (four) years starting November 1, 2018 until October 31, 2022.

On May 15, 2023, the Company and Pelindo signed an agreement regarding the utilization of assets on Sindang Laut Road (Ex-PP) covering an area of 10,000 m2. The term of this agreement is 2 (two) years starting from November 1, 2022 until October 31, 2024.

28. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Sewa (lanjutan)

5) Pada 30 September 2022, Perusahaan dan Pelindo menandatangani perjanjian tentang pendayagunaan aset di Jalan Sindang Laut (Eks-PP) seluas 13.274 m2. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dimulai dari tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025.

6) Pada 19 Agustus 2022, Perusahaan dan KBN menandatangani perjanjian tentang sewa menyewa gudang terbuka/depo. Jangka waktu perjanjian ini adalah 2 (dua) tahun dimulai dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024.

b. Perjanjian pelayanan bongkar muat dan jasa pelayanan pelabuhan lainnya

1) Pada tanggal 8 April 2021, Perusahaan dan PT Anugrah Permata Samudra, pihak ketiga, menandatangani perjanjian tentang pelayanan dan penanganan kargo *passenger car* (CBU), alat berat, *bus & truck*, *spare parts* di Terminal Internasional Perusahaan. Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak 18 Desember 2020 sampai dengan 17 Desember 2022.

Pada tanggal 6 Juli 2023, Perusahaan dan PT Anugrah Permata Samudra, menandatangani Berita Acara Kesepakatan No. PJ.01/6/7/I/KOM/DIRUT/IKT-23 tentang pemberlakuan sementara Kerjasama mitra usaha bongkar muat di Terminal Internasional Perusahaan. Kemudian, pada tanggal 4 Oktober 2023, Perusahaan dan PT Anugrah Permata Samudra, memperbaharui Berita Acara Kesepakatan tersebut dengan Berita Acara Kesepakatan No. KS.01/4/10/1/KOM/DIRUT/IKT-23 tentang pemberlakuan sementara kerjasama mitra usaha bongkar muat di Terminal Internasional Perusahaan.

Apabila dalam 3 (tiga) bulan belum dilakukan pembaruan perjanjian maka Berita Acara Kesepakatan ini akan diperbarui.

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a. Lease (continued)

5) On September 30, 2022, the Company and Pelindo signed an agreement on the utilization of assets on Jalan Sindang Laut (Ex-PP) covering an area of 13,274 m2. This agreement is valid for 3 (three) years starting October 1, 2022 until October 1, 2025.

6) On August 19, 2022, the Company and KBN signed an agreement regarding the lease of an open warehouse/depot. This agreement is valid for 2 (two) years starting August 1, 2022 until July 31, 2024.

b. Loading unloading services and other port services agreements

1) On April 8, 2021, the Company and PT Anugrah Permata Samudra, third party, entered into agreement regarding service and handling of cargo passenger car (CBU), heavy equipment, bus & truck, spare parts in International Terminal of the Company. The agreement is valid for 24 (twenty-four) months starting from December 18, 2020 until December 17, 2022.

On July 6, 2023, the Company and PT Anugrah Permata Samudra, signed the Minutes of Agreement No. PJ.01/6/7/I/KOM/DIRUT/IKT023 regarding the temporary implementation of the stevedoring business partner cooperation in International Terminal of the Company. Then, on October 4, 2023 the Company and PT Anugrah Permata Samudra, updated the Minutes of Agreement with Minutes of Agreement No. KS.01/4/10/1/KOM/DIRUT/IKT-23 regarding the temporary implementation of the stevedoring business partner cooperation in International Terminal of the Company.

If within 3 (three) months the agreement has not been renewed, this Minutes of Agreement will be updated.

28. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pelayanan bongkar muat dan jasa pelayanan pelabuhan lainnya (lanjutan)

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, perjanjian antara Perusahaan dengan PT Anugrah Permata Samudra masih dalam tahap perpanjangan.

2) Pada tanggal 8 April 2021, Perusahaan dan PT Bandar Krida Jasindo, pihak ketiga, menandatangani perjanjian tentang pelayanan dan penanganan kargo *passenger car* (CBU), alat berat, *bus & truck*, *spare parts* di Terminal Internasional Perusahaan. Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022.

Pada tanggal 16 Juni 2023, Perusahaan dan PT Bandar Krida Jasindo, menandatangani Berita Acara Kesepakatan No. KS.01/26/6/I/KOM/DIRUT/IKT-23 tentang pemberlakuan sementara kerjasama mitra usaha bongkar muat di Terminal Internasional dan Domestik Perusahaan.

Pada tanggal 15 September 2023, Perusahaan dan PT Bandar Krida Jasindo, memperbaharui Berita Acara Kesepakatan tersebut dengan Berita Acara No. KS.02.15/9/I/KOM/DIRUT/IKT-23 tentang pemberlakuan sementara kerjasama mitra usaha bongkar muat di Terminal Internasional dan Domestik Perusahaan. Apabila dalam 3 (tiga) bulan belum dilakukan pembaruan perjanjian maka Berita Acara Kesepakatan ini akan diperbarui.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, perjanjian antara Perusahaan dengan PT Bandar Krida Jasindo masih dalam tahap perpanjangan.

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Loading unloading services and other port services agreements (continued)

As of the completion date of the financial statements, the agreement between the Company with PT Anugrah Permata Samudra still in the process for extension.

2) On April 8, 2021, the Company and PT Bandar Krida Jasindo, third party, entered into agreement regarding service and handling of cargo passenger car (CBU), heavy equipment, bus & truck, spare parts in International Terminal of the Company. The agreement is valid for 24 (twenty-four) months starting December 21, 2020 until December 20, 2022.

On June 16, 2023, the Company and PT Bandar Krida Jasindo, signed the Minutes of Agreement No. KS.01/26/6/I/KOM/DIRUT/IKT-23 *regarding the temporary implementation of the stevedoring business partner cooperation in International and Domestic Terminal of the Company.*

On September 15, 2023, the Company and PT Bandar Krida Jasindo, updated the Minutes of Agreement with the Minutes of Agreement No. KS.02.15/9/I/KOM/DIRUT/IKT-23 *regarding the temporary implementation of the stevedoring business partner cooperation in International and Domestic Terminal of the Company. If within 3 (three) months the agreement has not been renewed, this Minutes of Agreement will be updated.*

As of the completion date of the financial statements, the agreement between the Company with PT Bandar Krida Jasindo still in the process for extension.

28. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pelayanan bongkar muat dan jasa pelayanan pelabuhan lainnya (lanjutan)

3) Pada tanggal 10 Februari 2021, Perusahaan dan PT Adimas Bahtera Harapan, pihak ketiga, menandatangani berita acara kesepakatan No. HK.566/1/8/IKT-21 dan 11/ABH-JKT/KONTRAK/Dir/II/21 tentang kerjasama pelayanan dan penanganan kargo *passenger car* (CBU), truk/bus, alat berat dan general cargo di terminal domestik Perusahaan. Jangka waktu kesepakatan ini adalah 10 Februari 2021 sampai dengan 9 Februari 2022.

Pada tanggal 27 Juni 2022, Perusahaan dan PT Adimas Bahtera Harapan, pihak ketiga, menandatangani perjanjian kerjasama No. HK.566/7/1/IKT-22 tentang pelayanan dan penanganan kargo *passenger car* (CBU), truk/bus, alat berat dan general cargo di terminal domestik Perusahaan. Perjanjian ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan 9 Februari 2024.

4) Pada tanggal 10 Maret 2016, Perusahaan dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, pihak ketiga, menandatangani perjanjian kerja sama jasa pelayanan kepelabuhanan, pelayanan bongkar muat dan penyediaan lahan di area Perusahaan. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.

Pada tanggal 11 Februari 2021, Perusahaan dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, pihak ketiga, menandatangani perjanjian kerja sama jasa pelayanan kepelabuhanan, pelayanan bongkar muat dan penyediaan lahan di area Perusahaan. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024.

Perjanjian pekerjaan ini diubah dengan addendum tanggal 10 April 2023 terkait dengan ruang lingkup pada perjanjian dan berlaku efektif mulai tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 29 Februari 2024.

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Loading unloading services and other port services agreements (continued)

3) On February 10, 2021, the Company and PT Adimas Bahtera Harapan, third party, entered into an agreement No. HK.566/1/8/IKT-21 and 11/ABH-JKT/KONTRAK/Dir/II/21 regarding the cooperation in the service and handling of cargo passenger car (CBU), trucks/busses, heavy equipments and general cargo in Company's domestic terminal. This agreement is valid for February 10, 2021 until February 9, 2022.

On June 27, 2022, the Company and PT Adimas Bahtera Harapan, third party, entered into an agreement No. HK.566/7/1/IKT-22 regarding the cooperation in the service and handling of cargo passenger car (CBU), trucks/busses, heavy equipments and general cargo in Company's domestic terminal. The agreement is valid for 24 (twenty-four) months starting February 10, 2022 until February 9, 2024.

4) On March 10, 2016, the Company and PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, third party, entered into a partnership agreement regarding port handling services, stevedoring and yard providing within the Company's area. The agreement is valid for 5 (five) years starting from March 1, 2016 until February 28, 2021.

On February 11, 2021, the Company and PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, third party, entered into a partnership agreement regarding port handling services, stevedoring and yard providing within the Company's area. The agreement is valid for 3 (three) years starting from March 1, 2021 until February 29, 2024.

This agreement was last amended through addendum dated April 10, 2023 regarding the scopa on the agreement with effective date from March 14, 2022 until February 29, 2024.

28. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pelayanan bongkar muat dan jasa pelayanan pelabuhan lainnya (lanjutan)

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, perjanjian antara Perusahaan dengan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia masih dalam tahap perpanjangan.

5) Pada tanggal 2 Mei 2016, Perusahaan dan PT Astra Daihatsu Motor, pihak ketiga, menandatangani perjanjian kerja sama tentang jasa pelayanan kepelabuhanan dan pelayanan bongkar muat di area Perusahaan. Perjanjian ini telah beberapa kali dilakukan addendum, terakhir pada tanggal 21 Juni 2022 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2025.

6) Pada tanggal 21 Desember 2021, Perusahaan dan PT Toyota-Astra Motor, pihak ketiga, menandatangani perjanjian tentang jasa pelayanan pelabuhan di area Perusahaan. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan 15 November 2026.

7) Pada tanggal 9 Juni 2022, Perusahaan dan PT Roro Samudra Putra Harmonimas, pihak ketiga, menandatangani perjanjian tentang pelayanan dan penanganan kargo *passenger car* (CBU), alat berat, bus & truck dan *general cargo* di Terminal Domestik Perusahaan. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2022.

Pada tanggal 2 Mei 2023, Perusahaan dan PT Roro Samudra Putra Harmonimas, pihak ketiga, menandatangani perjanjian tentang pelayanan dan penanganan kargo *passenger car* (CBU), alat berat, bus & truck dan *general cargo* di Terminal Domestik Perusahaan. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 30 September 2024.

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Loading unloading services and other port services agreements (continued)

As of the completion date of the financial statements, the agreement between the Company with PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia still in the process for extension.

5) On May 2, 2016, the Company and PT Astra Daihatsu Motor, third party, entered into a partnership agreement regarding port handling services and stevedoring services within the Company's area. The agreement has been amended several times, with last amendment on June 21, 2022 and valid until March 31, 2025.

6) On December 21, 2021, the Company and PT Toyota-Astra Motor, third party, entered into agreement regarding port handling service within the Company's area. The agreement is valid for 5 (five) years starting from November 16, 2021 until November 15, 2026.

7) On June 9, 2022, the Company and PT Roro Samudra Putra Harmonimas, third party, entered into agreement concerning service and handling of passenger car cargo (CBU), heavy equipment, bus & truck and general cargo at the Company's Domestic Terminal. The agreement is valid for 1 (one) years starting from October 1, 2021 until September 30, 2022.

On May 2, 2023, the Company and PT Roro Samudra Putra Harmonimas, third party, entered into agreement concerning service and handling of passenger car cargo (CBU), heavy equipment, bus & truck and general cargo at the Company's Domestic Terminal. The agreement is valid for 2 (two) years starting from October 1, 2022 until September 30, 2024.

28. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pelayanan bongkar muat dan jasa pelayanan pelabuhan lainnya (lanjutan)

8) Pada tanggal 1 Oktober 2018, Perusahaan dan Pelindo Cabang Panjang sepakat menandatangani perjanjian tentang kerjasama pelayanan kapal ro-ro di Pelabuhan Panjang. Perjanjian ini telah beberapa kali dilakukan perpanjangan, terakhir pada tanggal 31 Januari 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan dan Pelindo Cabang Panjang sepakat menandatangani perjanjian tentang kerjasama optimalisasi Dermaga C1 & C2 dan lapangan buffer di Pelabuhan Panjang. Nilai kerjasama adalah *revenue sharing* sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari realisasi pendapatan kotor yang telah didapatkan Perusahaaan atas kegiatan di area kerjasama. Perjanjian ini berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2022.

Pada tanggal 6 Oktober 2022, Perusahaan dan Pelindo Cabang Panjang sepakat menandatangani Berita Acara pengakhiran perjanjian tentang kerjasama optimalisasi Dermaga C1 & C2 dan lapangan buffer di Pelabuhan Panjang. Pengakhiran perjanjian kerjasama terhitung mulai tanggal 31 Desember 2021.

9) Pada tanggal 23 Juli 2021, Perusahaan dan IPC TPK menandatangani berita acara kesepakatan tentang pengoperasian dermaga dan lapangan 107 dan 108 Pelabuhan Tanjung Priok. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Pada tanggal 26 April 2022, Perusahaan dan IPC TPK sepakat menandatangani perjanjian kerjasama tentang pengoperasian dermaga dan lapangan 107 dan 108 Pelabuhan Tanjung Priok. Nilai kerjasama adalah *revenue sharing* sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari realisasi pendapatan kotor setelah dikurangi biaya kerjasama mitra usaha (KSMU). Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Loading unloading services and other port services agreements (continued)

8) On October 1, 2018, the Company and Pelindo Branch Panjang agreed to sign agreement concerning Cooperation in ro-ro Ship Service at Panjang Port. The agreement has been extended several times, with last extension on January 31, 2020 and valid until December 31, 2021.

On September 30, 2021, the Company and Pelindo Branch Panjang agreed to sign an agreement concerning the pier optimization in C1 & C2 piers and Port Panjang buffer field. The value of the cooperation is revenue sharing of 35% (thirty-five percent) of the realized gross income that has been obtained by the Company for activities in the cooperation area. This agreement is valid for 15 (fifteen) months from October 1, 2021 until December 31, 2022.

On October 6, 2022, the Company and Pelindo Branch Panjang agreed to sign the Minutes of termination of the agreement regarding the pier optimization in C1 & C2 piers and Port Panjang buffer field. Termination of the cooperation agreement starting December 31, 2021.

9) On July 23, 2021, the Company and IPC TPK signed minutes of agreement regarding Collaboration on Dock and Field Operations 107 and 108 Tanjung Priok Port. This agreement is valid from April 1, 2021 until March 31, 2022.

On April 26, 2022, the Company and IPC TPK agreed to signed agreement regarding Collaboration on Dock and Field Operations 107 and 108 Tanjung Priok Port. The value of the cooperation is a revenue sharing of 55% (fifty five percent) of the realized gross income after deducting business partner cooperation costs (KSMU). This agreement is valid from April 1, 2022 until March 31, 2023.

28. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pelayanan bongkar muat dan jasa pelayanan pelabuhan lainnya (lanjutan)

Pada tanggal 15 Mei 2023, Perusahaan dan IPC TPK sepakat menandatangani perjanjian kerjasama tentang pengoperasian dermaga dan lapangan 107 dan 108 Pelabuhan Tanjung Priok. Nilai kerjasama adalah *revenue sharing* sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari realisasi pendapatan kotor setelah dikurangi biaya kerjasama mitra usaha (KSMU). Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.

10) Pada tanggal 31 Mei 2021, Perusahaan dan Pelindo Cabang Pontianak sepakat menandatangani perjanjian tentang kerjasama pelayanan kapal ro-ro di Pelabuhan Pontianak. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

Pada tanggal 1 Juli 2022, Perusahaan dan Pelindo Cabang Pontianak sepakat menandatangani perjanjian tentang kerjasama optimalisasi aset untuk pelayanan kapal ro-ro di Pelabuhan Pontianak. Nilai kerjasama adalah *revenue sharing* sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari realisasi pendapatan kotor atas pengelolaan dan pengoperasian kegiatan pelayanan kapal ro-ro di Area Kerjasama setelah dikurangi biaya konsesi. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

Pada tanggal 26 Juni 2023, Perusahaan dan Pelindo Cabang Pontianak sepakat menandatangani perjanjian tentang kerjasama optimalisasi aset untuk pelayanan kapal ro-ro di Pelabuhan Pontianak. Nilai kerjasama adalah *revenue sharing* sebesar 50% (lima puluh persen) dari realisasi pendapatan kotor atas pengelolaan dan pengoperasian kegiatan pelayanan kapal ro-ro di Area Kerjasama setelah dikurangi biaya konsesi. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Loading unloading services and other port services agreements (continued)

On May 15, 2023, the Company and IPC TPK agreed to signed agreement regarding Collaboration on Dock and Field Operations 107 and 108 Tanjung Priok Port. The value of the cooperation is a revenue sharing of 55% (fifty five percent) of the realized gross income after deducting business partner cooperation costs (KSMU). This agreement is valid from April 1, 2023 until March 31, 2024.

10) On May 31, 2021, the Company and the Pontianak Branch of Pelindo agreed to sign an agreement on ro-ro vessel service cooperation at the Pontianak Port. This agreement is valid for 1 (one) year from July 1, 2021 until June 30, 2022.

On July 1, 2022, the Company and Pelindo Branch Pontianak agreed to sign an agreement regarding cooperation in asset optimization for ro-ro ship services at Pontianak Port. The value of the cooperation is revenue sharing of 44% (fourty-four percent) of the realized gross income from the management and operation of ro-ro ship service activities in the Cooperation Area after deducting concession fees. This agreement is valid from July 1, 2022 until June 30, 2023.

On June 26, 2023, the Company and Pelindo Branch Pontianak agreed to sign an agreement regarding cooperation in asset optimization for ro-ro ship services at Pontianak Port. The value of the cooperation is revenue sharing of 50% (fifty percent) of the realized gross income from the management and operation of ro-ro ship service activities in the Cooperation Area after deducting concession fees. This agreement is valid from July 1, 2023 until June 30, 2024.

28. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pelayanan bongkar muat dan jasa pelayanan pelabuhan lainnya (lanjutan)

11) Pada tanggal 5 Mei 2021, Perusahaan dan PT Quantum Perkasa Logistik, pihak ketiga, menandatangani perjanjian tentang pelayanan dan penanganan kargo *passenger car* (CBU), alat berat, bus/truk, *general cargo* dan motor di Terminal Domestik Perusahaan. Perjanjian ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 dan tidak diperpanjang.

12) Pada tanggal 27 Desember 2021, Perusahaan dan PT Glovis Indonesia Logistic, pihak ketiga, menandatangani perjanjian kerjasama tentang penanganan dan penumpukan kargo di Terminal Internasional. Kesepakatan ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pada tanggal 27 Desember 2023, Perusahaan dan PT Glovis Indonesia Logistic, pihak ketiga, menandatangani perpanjangan perjanjian penanganan dan penumpukan kargo di Terminal Internasional. Kesepakatan ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025.

13) Pada tanggal 10 Desember 2021, Perusahaan dan Pelindo Regional I, menandatangani perjanjian penyediaan jasa kepelabuhanan atas pengoperasian terminal ro-ro dan kendaraan di Pelabuhan Belawan. Nilai kerjasama adalah *revenue sharing* sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari realisasi pendapatan kotor. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022.

Pada tanggal 7 Maret 2022, Perusahaan dan Pelindo Regional I, menandatangani perjanjian tambahan (addendum) tentang kerjasama penyediaan jasa kepelabuhanan atas pengoperasian terminal ro-ro dan kendaraan di Pelabuhan Belawan. Berdasarkan amandemen tersebut, nilai kerjasama adalah *revenue sharing* sebesar 60% (enam puluh persen) dari realisasi pendapatan kotor.

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Loading unloading services and other port services agreements (continued)

11) On May 5, 2021, the Company and PT Quantum Perkasa Logistik, third party, signed an agreement on the service and handling of passenger car (CBU) cargo, heavy equipment, bus/truck, general cargo and motorcycle at the Company's Domestic Terminal. This agreement is valid for 24 (twenty four) months from December 27, 2020 until December 26, 2022 and not extended.

12) On December 27, 2021, the Company and PT Glovis Indonesia Logistic, a third party, signed a cooperation agreement regarding the handling and stacking of cargo at the International Terminal. This agreement is valid from January 1, 2022 to December 31, 2023.

On December 27, 2023, the Company and PT Glovis Indonesia Logistic, a third party, signed the extension of cooperation agreement regarding the handling and stacking of cargo at the International Terminal. This agreement is valid from January 1, 2024 to December 31, 2025.

13) On December 10, 2021, the Company and Region I of Pelindo, signed an agreement for the provide of port services for the operation of the ro-ro terminal and vehicles at the Belawan Port. The value of the cooperation is a revenue sharing of 55% (fifty five percent) of the realized gross income. This agreement is valid for 1 (one) year, starting from January 1, 2022.

On March 7, 2022, the Company and Pelindo Regional I signed an addendum agreement regarding cooperation in the provision of port services for the operation of ro-ro terminals and vehicles at Belawan Port. Based on the amendment, the value of the cooperation is a revenue sharing of 60% (sixty percent) of the realized gross income.

28. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pelayanan bongkar muat dan jasa pelayanan pelabuhan lainnya (lanjutan)

Pada tanggal 26 Juni 2023, Perusahaan dan Pelindo Regional I, menandatangani perjanjian tambahan (addendum) II tentang kerjasama penyediaan jasa kepelabuhanan atas pengoperasian terminal ro-ro dan kendaraan di Pelabuhan Belawan. Berdasarkan amandemen tersebut, jangka waktu berlakunya perjanjian adalah 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2022.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, perjanjian antara Perusahaan dengan Pelindo Regional I masih dalam tahap perpanjangan.

14) Pada tanggal 31 Maret 2022, Perusahaan dan Pelindo Regional IV, menandatangani perjanjian kerjasama penyediaan jasa kepelabuhanan atas pengelolaan dan pengoperasian terminal ro-ro dan kendaraan di Pelabuhan Makassar. Nilai kerjasama adalah *revenue sharing* sebesar 60% (enam puluh persen) dari realisasi pendapatan kotor. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022.

15) Pada tanggal 29 September 2023, Perusahaan dan PT Pelindo Multi Terminal (“SPMT”), menandatangani perjanjian kerjasama pengoperasian dan pemeliharaan terminal ro-ro Semayang di Pelabuhan Balikpapan. Nilai kerjasama adalah *revenue sharing* sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari realisasi pendapatan kedatangan kapal dan penggunaan layanan jasa kepelabuhanan setelah dikurangi konsesi, sharing ke Pelindo Regional 4 dan *return commission* ke pengguna jasa oleh SPMT. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2025.

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Loading unloading services and other port services agreements (continued)

On June 26, 2023, the Company and Pelindo Regional I, signed an additional agreement (addendum) II on the provision of port services for the operation of ro-ro and vehicle terminals at Belawan Port. Based on this amendment, the term of the agreement is 2 (two) years starting from January 1, 2022.

As of the completion date of the financial statements, the agreement between the Company with Pelindo Regional I still in the process for extension.

14) On March 31, 2022, the Company and Pelindo Regional IV, signed a cooperation agreement to provide port services for the management and operation of ro-ro terminals and vehicles at Makassar Port. The value of the cooperation is a revenue sharing of 60% (sixty percent) of the realized gross income. This agreement is valid for 2 (two) years from March 31, 2022.

15) On September 29, 2023, the Company and PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT"), signed an agreement for the operation and maintenance of the ro-ro Semayang terminal in Balikpapan Port. The value of the cooperation is revenue sharing of 45% (forty-five percent) of the realized income from ship arrivals and the use of port services after deducting concessions, sharing to Pelindo Regional 4, and return commission to service users by SPMT. This agreement is valid for 2 (two) years starting from October 1, 2023 until September 30, 2025.

28. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pelayanan bongkar muat dan jasa pelayanan pelabuhan lainnya (lanjutan)

16) Pada tanggal 8 Agustus 2023, Perusahaan dan PT Glovis Indonesia International, pihak ketiga, menandatangani perjanjian layanan operasi unit CBU Hyundai. Layanan tersebut diberikan di area eksternal dan area internal Perusahaan untuk unit CBU yang diterima dari pabrik sebelum didistribusikan ke tujuan akhir atau *dealer*. Nilai perjanjian adalah tarif layanan yang telah diatur dalam kontrak. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2024.

c. Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik Jawa Timur

Pada tanggal 9 April 2015, Perusahaan dan MIE mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik, Jawa Timur dengan membentuk MKO MTKI. Jangka waktu perjanjian adalah 25 tahun dengan porsi pendanaan Perusahaan dan MIE masing-masing sebesar 45% dan 55%.

Pada bulan Maret 2016, MKO MTKI telah beroperasi secara komersial.

d. Perjanjian pelaksanaan penugasan dan pembinaan pekerja Pelindo yang ditugaskan pada Anak Perusahaan di lingkungan Pelindo

Pada tanggal 15 November 2019, Pelindo dan Perusahaan menandatangani perjanjian tentang penugasan dan pembinaan pekerja Pelindo yang ditugaskan pada Perusahaan. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Loading unloading services and other port services agreements (continued)

16) On August 8, 2023, the Company and PT Glovis Indonesia International, third party, signed an agreement for the operation service of Hyundai CBU units. The services provided in the external area and internal area of the Company for CBU units received from the factory before being distributed to the final destination or dealer. The value of the agreement is the service rate that has been determined in the contract. This agreement is valid for 1 (one) year starting from August 1, 2023, until July 31, 2024.

c. Construction and Operation of Car Terminal in Gresik Jawa Timur

On April 9, 2015, The Company and MIE entered into an Agreement of Construction and Operation of Car Terminal in Gresik, Jawa Timur by establishing MKO MTKI. The period of agreement is 25 years with the funding portion for the Company and MIE amounting to 45% and 55%, respectively.

On March 2016, MKO MTKI has operated commercially.

d. Agreement on the assignment and development of Pelindo employees assigned to Subsidiaries of Pelindo

On November 15, 2019, Pelindo and the Company signed an agreement on the assignment and development of Pelindo workers assigned to the Company. This agreement is valid for 5 (five) years.

29. INFORMASI SEGMEN

Perusahaan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam segmen-segmen yang meyediakan jasa pelayanan terminal, jasa pelayanan barang, jasa rupa-rupa dan pengusahaan fasilitas dan utilitas (Catatan 20).

Informasi yang menyangkut segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

29. SEGMENT INFORMATION

The Company operates and manages business in segments which provides terminal services, cargo services and miscellaneous, facilities and utilities services (Note 20).

Information concerning the Company's business segments are as follows:

	31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut/ *December 31, 2023 and for the year then ended*				
	Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang/ *Terminal and Cargo Services*	**Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas/ *Miscellaneous, Facilities and Utilities Services***	**Non-segmen/ *Non-segment***	**Total/ *Total***	
Pendapatan operasi segmen	711.762.647	23.442.293	-	735.204.940	*Segment operating revenues*
Beban pokok pendapatan	(406.004.450)	(2.723.461)	-	(408.727.911)	*Cost of revenues*
Laba bruto	**305.758.197**	**20.718.832**	**-**	**326.477.029**	***Gross profit***
Beban umum dan administrasi			(76.343.229)	(76.343.229)	*General and administrative expenses*
Pendapatan operasi lainnya			3.780.536	3.780.536	*Other operating income*
Beban operasi lainnya			(8.706.351)	(8.706.351)	*Other operating expenses*
Laba usaha	**305.758.197**	**20.718.832**	**(81.269.044)**	**245.207.985**	***Income for operations***
Pendapatan keuangan			38.036.797	38.036.797	*Finance income*
Beban keuangan			(46.424.352)	(46.424.352)	*Finance expenses*
Laba sebelum pajak penghasilan badan	**305.758.197**	**20.718.832**	**(89.656.599)**	**236.820.430**	***Income before corporate income tax***
Beban pajak penghasilan badan					***Corporate income tax expenses***
Kini				(50.707.949)	*Current*
Tangguhan				4.742.363	*Deferred*
Laba tahun berjalan				**190.854.844**	***Income for the year***
Penghasilan komprehensif lain				-	*Other comprehensive income*
Total laba komprehensif tahun berjalan				**190.854.844**	***Total comprehensive income for the year***
Aset dan Liabilitas					*Assets and Liabilities*
Aset segmen	1.031.623.300	8.322.166	748.368.921	1.788.314.387	*Segment assets*
Liabilitas segmen	485.392.757	-	80.054.776	565.447.533	*Segment liabilities*
Informasi lainnya					*Other information*
Pengeluaran modal	27.344.318	-	-	27.344.318	*Capital expenditure*
Penyusutan dan amortisasi segmen	105.172.937	294.980	3.337.094	108.805.011	*Segment depreciation and amortization*

29. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

29. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Company's business segments are as follows: (continued)

	31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut/ *December 31, 2022 and for the year then ended*				
	Pelayanan Jasa Terminal dan Jasa Barang/ *Terminal and Cargo Services*	**Pelayanan Jasa Rupa-Rupa, Pengusahaan Fasilitas dan Utilitas/ *Miscellaneous, Facilities and Utilities Services***	**Non-segmen/ *Non-segment***	**Total/ *Total***	
Pendapatan operasi segmen	709.507.257	17.066.002	-	726.573.259	*Segment operating revenues*
Beban pokok pendapatan	(376.196.453)	(3.530.121)	-	(379.726.574)	*Cost of revenues*
Laba bruto	**333.310.804**	**13.535.881**	**-**	**346.846.685**	***Gross profit***
Beban umum dan administrasi			(88.903.663)	(88.903.663)	*General and administrative expenses*
Pendapatan operasi lainnya			285.803	285.803	*Other operating income*
Beban operasi lainnya			(13.172.272)	(13.172.272)	*Other operating expenses*
Laba usaha	**333.310.804**	**13.535.881**	**(101.790.132)**	**245.056.553**	***Income for operations***
Pendapatan keuangan			26.528.275	26.528.275	*Finance income*
Beban keuangan			(58.597.992)	(58.597.992)	*Finance expenses*
Laba sebelum pajak penghasilan badan	**333.310.804**	**13.535.881**	**(133.859.849)**	**212.986.836**	***Income before corporate income tax***
Beban pajak penghasilan badan					***Corporate income tax expenses***
Kini				(62.001.703)	*Current*
Tangguhan				10.739.634	*Deferred*
Laba tahun berjalan				**161.724.767**	***Income for the year***
Penghasilan komprehensif lain				-	*Other comprehensive income*
Total laba komprehensif tahun berjalan				**161.724.767**	***Total comprehensive income for the year***
Aset dan Liabilitas					*Assets and Liabilities*
Aset segmen	1.102.628.281	7.085.478	1.082.114.615	2.191.828.374	*Segment assets*
Liabilitas segmen	941.922.565	64.152	87.871.470	1.029.858.187	*Segment liabilities*
Informasi lainnya					*Other information*
Pengeluaran modal	23.526.950	3.437.095	802.981	27.767.026	*Capital expenditure*
Penyusutan dan amortisasi segmen	100.954.957	309.313	3.147.596	104.411.866	*Segment depreciation and amortization*

29. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Informasi yang menyangkut pendapatan berdasarkan segmen geografis Perusahaan adalah sebagai berikut:

29. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Company's revenue based on geographical segments are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Pendapatan			***Revenue***
Tanjung Priok, Jakarta	687.408.848	701.429.469	*Tanjung Priok, Jakarta*
Belawan, Sumatra Utara	23.183.271	13.196.692	*Belawan, North Sumatra*
Makassar Sulawesi Selatan	15.667.631	5.514.129	*Makassar, South Sulawesi*
Pontianak, Kalimantan Barat	6.316.366	4.946.373	*Pontianak, West Kalimantan*
Balikpapan, Kalimantan Timur	1.760.910	-	*Balikpapan, East Kalimantan*
Gresik, Jawa Timur	867.914	267.338	*Gresik, East Java*
Panjang, Lampung	-	1.219.258	*Panjang, Lampung*
Total	**735.204.940**	**726.573.259**	***Total***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Aset tidak lancar			***Non-current assets***
Jakarta	1.022.459.034	1.088.727.368	*Jakarta*
Gresik, Jawa Timur	6.733.459	7.123.934	*Gresik, East Java*
Total	**1.029.192.493**	**1.095.851.302**	***Total***

30. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Berdasarkan Surat Pemberitahuan No.KU.02.04/14/12/2/SKPR/SKPR/IKT-23 perihal pembagian dividen interim tertanggal 14 Desember 2023, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan memutuskan dan menyetujui untuk membagi dan membayar dividen interim untuk semester I tahun 2023 sebesar Rp21,70 (nilai penuh) setiap sahamnya. Pada tanggal 10 Januari 2024 dan 1 Maret 2024, Perusahaan melakukan pembayaran dividen tersebut kepada publik dan SPMT masing-masing sebesar Rp11.048.299 dan Rp28.126.341.

30. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Based on Notification Letter Number KU.02.04/14/12/2/SKPR/SKPR/IKT-23 regarding interim dividend distribution dated December 14, 2023, the Board of Directors and Board of Commissioners at the Company have decided and agreed to distribute and to pay interim dividend for the first half of 2023 amounting to Rp21.70 (full amount) per share. On January 10, 2024 and March 1, 2024, the Company made a dividend payment to public and SPMT amounting to Rp11,048,299 and Rp28,126,341, respectively.

31. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Aktivitas signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas Perusahaan adalah sebagai berikut:

31. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Significant activities which did not affect the Company's cash flows are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Penambahan aset melalui utang lain-lain yang terdiri atas:			*Addition of assets through other payable consisting of:*
Aset tetap	12.134.421	7.339.424	*Fixed assets*
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	10.593.834	32.706.630	*Addition of right-of-use assets through lease liabilities*

31. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

31. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION (continued)

Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Movement of liabilities arising from financing activities in the statement of cash flows are as follows:

			Non- arus kas/*Non-cash flow*			
	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	**Arus kas/ *Cash flow***	**Pengakuan bunga/ *Interest recognition***	**Lainnya/ *Others***	**31 Desember 2023/ December 31, *2023***	
Liabilitas sewa	802.834.177	(458.245.562)	46.424.352	10.593.834	401.606.801	*Lease liabilities*

			Non- arus kas/*Non-cash flow*			
	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	**Arus kas/ *Cash flow***	**Pengakuan bunga/ *Interest recognition***	**Lainnya/ *Others***	**31 Desember 2022/ December 31, *2022***	
Liabilitas sewa	730.007.653	(18.132.859)	58.597.992	32.361.391	802.834.177	*Lease liabilities*

Referensi Silang SEOJK No. 16 /SEOJK.04/2021: Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Cross-Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Format and Completing the Annual Report of Issuers or Public Companies

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
I. Ketentuan Umum General Terms	
2. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:	√
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik. The Annual Report is a report on the board of directors and board of commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies.	√
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Issuers are parties who make public offerings.	√
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. A Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority.	√
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publically-listed Company	√
e. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business.	√
f. Direksi: Board of Directors:	√
i) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	√
ii) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai badan hukum tersebut. for an Issuer or a Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	√
g. Dewan Komisaris: Board of Commissioners:	√
i) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	√

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
ii) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. for the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	√
h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS: General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:	√
i) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and	√
ii) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut. for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity. .	√
3. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies.	√
4. Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies.	√
5. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.	√
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports.	√
II. Bentuk Laporan Report Format	
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik. The Annual Report is presented in the form of printed and electronic documents.	√
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik. The Annual Report is presented in the form of a printed document, printed on light colored paper, of good quality, A4 size, bound, and can be reproduced with good quality.	√
3. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.	√

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
4. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam portable document format (PDF). The Annual Report presented in the form of an electronic document is the Annual Report converted into a portable document format (PDF).	√
II. Isi Laporan Tahunan Annual Report Contents	
1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat: The Annual Report shall at least contain:	
ikhtisar data keuangan penting; overview of important financial data;	12-19
a. informasi saham (jika ada); stock information (if any);	23-24
b. laporan Direksi; report of the Board of Directors;	52-67
c. laporan Dewan Komisaris; report of the Board of Commissioners;	38-51
d. profil Emiten atau Perusahaan Publik; profile of the Issuer or Public Company;	70-143
e. analisis dan pembahasan manajemen; management analysis and discussion;	144-217
f. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; governance of Issuers or Public Companies;	260-583
g. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;	N/A
h. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan audited annual financial report; and	584-689
i. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding their responsibility for the Annual Report.	68-69
2. Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Annual Report Contents	
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Summary of Important Financial Data Summary of important financial data containing financial information that is presented in the form of a comparison for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the Issuer or Public Company has carried out its business activities for less than 3 (three) years, at least containing:	12-19
i) pendapatan/penjualan; income/sales;	12
ii) laba bruto; gross profit;	12
iii) laba (rugi); profit (loss);	12
iv) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; the amount of profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	12
v) total laba (rugi) komprehensif; total comprehensive profit (loss);	12

KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
vi)	jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	12
vii)	laba (rugi) per saham; earning (loss) per share;	12
viii)	jumlah aset; total assets;	15
ix)	jumlah liabilitas; total liabilities;	15
x)	jumlah ekuitas; total equity;	15
xi)	rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; ratio of profit (loss) to total assets;	18
xii)	rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; ratio of profit (loss) to equity;	18
xiii)	rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; ratio of profit (loss) to revenue/sales;	18
xiv)	rasio lancar; current ratio;	18
xv)	rasio liabilitas terhadap ekuitas; ratio of liabilities to equity;	19
xvi)	rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan ratio of liabilities to total assets; and	19
xvii)	informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.	18-19
b.	Informasi Saham Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Stock Information Stock information for a Public Company shall at least contain:	23-24
i)	saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: shares that have been issued for each quarterly period presented in the form of a comparison for the last 2 (two) fiscal years, at least containing:	23-24
·	jumlah saham yang beredar; number of shares outstanding;	23-24
·	kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed;	23-24
·	harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan the highest, lowest, and closing share prices based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and	23-24
·	volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	23-24

Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek;
Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on a stock exchange;

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
ii) dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: in the event of a corporate actions that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) shall be added with at least an explanation regarding:	25
· tanggal pelaksanaan aksi korporasi; the date of implementation of the corporate action;	25
· rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; the ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares;	25
· jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; the number of outstanding shares before and after the corporate action;	25
· jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan the number of convertible securities exercised (if any); and	25
· harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; the share price before and after the corporate action;	25
iii) dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan in the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares in the fiscal year, the reasons for the suspension and/or delisting of shares shall be explained; and	25
iv) dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut. in the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, it explains the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or cancellation of the share listing (delisting).	25
c. Laporan Direksi Board of Directors' Report	52-67
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report shall at least contain a brief description of:	
1. kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: performance of the Issuer or Public Company, at least containing:	
a. strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;	58-60
b. peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	60
c. proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	60-61
d. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and	61-62
e. kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; obstacles faced by Issuers or Public Companies;	62-63
2. gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and	63-64

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
3. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. implementation of the governance of Issuers or Public Companies.	64-65
d. Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	38-51
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:	
1. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; evaluation of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	43-44
2. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	44-45
3. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. views on the implementation of governance of the Issuer or Public Company.	45-46
a. Profil Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Profile	70-143
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: The profile of the Issuer or Public Company contains at least the following information:	√
1. nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; name of the Issuer or Public Company, including if there is a change in name, the reason for the change, and the effective date of the name change in the fiscal year;	72, 78
2. akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:	73
a. alamat; address;	73
b. nomor telepon; telephone number;	73
c. alamat surat elektronik; dan e-mail address; and	73
d. alamat situs web; website address;	73
3. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief history of the Issuer or Public Company;	74-77
4. visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan; vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate culture or corporate values;	83-87
5. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the fiscal year, as well as types of goods and/or services produced;	88-95
6. wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.	96-97
7. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	98-99

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
8. daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	100
9. profil Direksi, paling sedikit memuat: Directors' profile, at least containing:	102-107
a. nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; name and position in accordance with the duties and responsibilities;	102-107
b. foto terbaru; recent photograph;	102-107
c. usia; age;	102-107
d. kewarganegaraan; nationality;	102-107
e. riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	102-107
f. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	102-107
i) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; the legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;	102-107
ii) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	102-107
iii) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	102-107
iv) hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and	102-107
v) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	108-109
10. profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: profile of the Board of Commissioners, at least containing:	110-115
a. nama dan jabatan; name and position;	110-115
b. foto terbaru; recent photograph;	110-115
c. usia; age;	110-115
d. kewarganegaraan; nationality;	110-115

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
e. riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	110-115
f. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	110-115
i) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;	110-115
ii) dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;	110-115
iii) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	110-115
iv) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	110-115
g. hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter;	110-115
h. pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms; and	387-388
i. perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;	116
11. dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; in the event that there is a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the fiscal year ends up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;	116
12. jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.	128-130
13. nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding:	131
a. pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company;	131

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and	102-107, 110-115, 132
c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; community shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company;	131
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information can be presented in tabular form.	√
14. persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; the percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;	102-107, 110-115, 132
Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.	102-107, 110-115, 132
15. jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: number of shareholders and percentage of ownership at the end of the fiscal year based on classification:	133
a. kepemilikan institusi lokal; ownership in local institutions;	133
b. kepemilikan institusi asing; ownership in foreign institutions;	133
c. kepemilikan individu lokal; dan local individual ownership; and	133
d. kepemilikan individu asing; foreign individual ownership;	133
16. informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; information regarding the majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to the individual owner, which is presented in the form of a schematic or chart;	135
17. nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. the name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	136
18. kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, dividends shares, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	139
19. informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	140

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
20. informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/ asosiasi/aliansinya meliputi: information on the use of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) services and their networks/associations/alliances include:	140, 491
a. nama dan alamat; name and address;	140, 491
b. periode penugasan; assignment period;	140, 491
c. informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; information on audit and/or non-audit services provided;	140, 491
d. biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and	140, 491
e. dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan in the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and	140, 491
Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/aliances can be presented in tabular form.	140, 491
21. nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP	141
a. Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Analysis and Discussion Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management analysis and discussion contains analysis and discussion of financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred in the fiscal year, which at least contains:	144-217
1. tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a review of operations per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:	150-152
a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; production, which includes the process, capacity, and development;	151
b. pendapatan/penjualan; dan income/sales; and	151-152
c. profitabilitas; profitability;	154-164
2. kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding:	174-190
a. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; current assets, non-current assets, and total assets;	174-181
b. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; current liabilities, long term liabilities, and total liabilities;	182-186
c. ekuitas; equity;	187
d. pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan income/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and	188

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
e. arus kas; cash flows;	191-192
3. kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; ability to pay debts or obligations by presenting the relevant ratio calculations;	194-196
4. tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; collectibility level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations;	195-196
5. struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; capital structure and management policies on the capital structure with the basis for determining the said policy;	197
6. bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: discussion of material ties for capital goods investment with an explanation that at least contains:	198
a. tujuan dari ikatan tersebut; the purpose of the bond;	198
b. sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; the expected source of funds to fulfill the commitment;	198
c. mata uang yang menjadi denominasi; dan the currency in which it is denominated; and	198
d. langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; steps that are planned by the Issuer or Public Company to protect the risk from the related foreign currency position;	198
7. bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: discussion of capital goods investments realized in the last fiscal year, at least contains:	
a. jenis investasi barang modal; type of capital goods investment;	198
b. tujuan investasi barang modal; dan the purpose of capital goods investment; and	198
c. nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; the total of capital goods investments;	198
8. informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); information and material facts occurring after the date of the accountant's report (if any);	199-200
9. prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; the business prospects of the Issuer or Public Company are related to the conditions of the industry, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;	200-201
10. perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: comparison between the target/projection at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization), regarding:	61
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	202
b. laba (rugi); profit (loss);	202
c. struktur modal (capital structure); atau capital structure; or	197
d. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	200-201

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
11. target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:	61
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	61
b. laba (rugi); profit (loss);	61
c. struktur modal (capital structure); capital structure;	61
d. kebijakan dividen; atau dividend policy; or	204-205
e. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	61
12. aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share;	165-172
13. uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least:	204-205
a. kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;	205
b. tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;	205
c. jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan the amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and	205
d. jumlah dividen per tahun yang dibayar; the amount of dividends paid annually;	205
e. Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	205
14. realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: realization of the use of proceeds from the public offering, provided that:	352
a. dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan in the event that during the fiscal year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and	343; 352
b. dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; in the event that there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change;	343; 352
15. informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: material information (if any), regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing :	207
a. tanggal, nilai, dan objek transaksi; date, value, and object of the transaction;	207

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
b. nama pihak yang melakukan transaksi; name of the party conducting the transaction;	209-210
c. sifat hubungan afiliasi (jika ada); nature of the affiliation relationship (if any);	209-210
d. penjelasan mengenai kewajaran transaksi; explanation of the fairness of the transaction;	208
e. pemenuhan ketentuan terkait; dan compliance with related provisions; and	212
f. dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: in the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:	208-212
i) pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan a statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and	√
ii) peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); the role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;	√
g. untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; for affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously;	208
Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.	208
h. untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	208
i. dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed;	208
16. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan changes in the provisions of laws and regulations that have a significant effect on Issuers or Public Companies and their impact on financial statements (if any); and	213
17. perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). changes in accounting policies, reasons and impact on financial statements (if any).	214-216

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
a. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Governance	260-583
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The governance of the Issuer or Public Company shall at least contain a brief description of:	
1. RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at least contains:	
a. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:	
i) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year; and	328-352
ii) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;	328-352
· dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	330; 335; 340; 345
2. Direksi, paling sedikit memuat: The Board of Directors, at least contains:	361-375
a. tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.	367-368
b. pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;	361-362
c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;	414-423
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: training and/or competency development of members of the Board of Directors:	384-385
i) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	384
ii) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	384-385
e. penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: the Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:	375
f. prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	375

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
g. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and	375
h. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	√
3. Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The Board of Commissioners, at least contains:	376-388
a. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	380
b. pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; a statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners;	376-377
c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS;	405-413
Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	√
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	384-385
i) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	384
ii) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	384-385
e. penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:	394-397
i) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; procedures for implementing performance appraisals;	√
ii) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and	√
iii) pihak yang melakukan penilaian; dan party conducting the assessment; and	√
f. penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:	386; 445-446; 456; 466-467
i) prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	√

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
ii) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; the criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings;	√
iii) Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	397-403
· prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	397-398
· prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	398-400
» prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	399-400
» struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/ bonus dan lainnya; dan the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and	400-401
» besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	401-402
· Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, shall at least contain:	N/A
» nama; name;	
» dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;	
» periode penugasan dewan pengawas syariah; period of assignment of the sharia supervisory board;	
» tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and	
» frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies;	
· Komite audit, paling sedikit memuat: The audit committee, at least contains:	433-445
» nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	438-439
» usia; age;	438-439
» kewarganegaraan; nationality;	438-439
» riwayat pendidikan; educational history;	438-439

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
» riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	438-439
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	438-439
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee as well as other positions (if any); and	438-439; 440
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	438-439
» periode dan masa jabatan anggota komite audit; period and term of office of the audit committee members;	438
» pernyataan independensi komite audit; statement of independence of the audit committee;	440
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	444
» kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and	441-443
» pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; the implementation of the audit committee's activities for the fiscal year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	443-444
· komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:	457-467
» nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	461-462
» usia; age;	461-462
» kewarganegaraan; nationality;	461-462
» riwayat pendidikan; educational history;	461-462
» riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	461-462
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	461-462
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	461-462; 463
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	461-462
» periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	461

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
» pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	462-463
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	466
» uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	459-460
» pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); a statement that it has a guideline or charter;	459-460
» kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	463-464
» uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and	465
» dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	-
1. alasan tidak dibentuknya komite; dan reasons for not forming the committee; and	-
2. pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; the party carrying out the nomination and remuneration function;	
· komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least containing:	446-456
» nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	448-450
» usia; age;	448-450
» kewarganegaraan; nationality;	448-450
» riwayat pendidikan; educational history;	448-450
» riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	448-450
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	448-450
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	448-450; 450
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	448-450
» periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	449
» pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	450

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); and	454-455
» uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	447
» pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; a statement that the committee has had guidelines or charters;	450
» kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and	451-454
» uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; a brief description of the committee's activities for the fiscal year;	454
· Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: Corporate secretary, at least contains:	468-473
» nama; name;	470-471
» domisili; domicile;	470-471
» riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	470-471
» dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan legal basis for appointment as company secretary; and	470-471
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	470-471
» riwayat pendidikan; educational history;	470-471
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan training and/or competency improvement followed during the fiscal year; and	473
» uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; a brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the fiscal year;	472-473
· Unit audit internal, paling sedikit memuat: Internal audit unit, at least contains:	475-488
» nama kepala unit audit internal; name of the head of the internal audit unit;	480-481
» riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	480-481
» dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan legal basis for the appointment as head of the internal audit unit; and	480-481
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	480-481
» kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); qualification or certification as an internal audit profession (if any);	482
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; training and/or competency improvement to be followed during the fiscal year;	486-488
» struktur dan kedudukan unit audit internal; structure and position of the internal audit unit;	478

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
» uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	476-477
» pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan a statement that the internal audit unit has had guidelines or charters; and	476
» uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; a brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	484-485
· uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing:	492-503
» pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;	492
» tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan review of the effectiveness of the internal control system; and	500-501
» pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	503
· sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least contains:	504-536
» gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; general description of the risk management system of the Issuer or Public Company;	504
» jenis risiko dan cara pengelolaannya; types of risks and how to manage them;	522-527
» tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system; and	527-528
» pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	529-530
· perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:	537
» pokok perkara/gugatan; subject matter/claim;	537
» status penyelesaian perkara/gugatan; dan status of settlement of cases/claims; and	537
» pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; effect on the condition of the Issuer or Public Company;	537
· informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any);	537

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
· informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: information regarding the code of ethics of the Issuer or Public Company includes:	551-560
» pokok-pokok kode etik; main points of the code of ethics;	552-556
» bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan form of socialization of the code of ethics and its enforcement efforts; and	556-557
» pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; a statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of Issuers or Public Companies;	556
· uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); a brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP);	-
Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:	
» jumlah saham dan/atau opsi; number of shares and/or options;	
» jangka waktu pelaksanaan; implementation period;	
» persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan requirements for eligible employees and/or management; and	
» harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; exercise price or determination of exercise price;	
· uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a brief description of the information disclosure policy regarding:	
» kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and	427-428
» pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; implementation of the policy;	427-428
· uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company, at least containing:	562-569
» cara penyampaian laporan pelanggaran; method of submitting a violation report;	566-567
» perlindungan bagi pelapor; protection for whistleblowers;	566
» penanganan pengaduan; complaint handling;	566-567
» pihak yang mengelola pengaduan; dan party managing the complaint; and	565

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
» hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: result of complaint handling, at least:	
» jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan number of complaints received and processed in the fiscal year; and	567-568
» tindak lanjut pengaduan; follow-up on complaints;	567-568
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter is disclosed.	-
· uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:	575-578
· program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan a description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:	575-576
» pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and	578
» Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies;	√
· penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.	297-317
» pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies, including:	√
» penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). a statement regarding the recommendations that have been implemented; and/or	√
» Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	√
viii) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies	N/A
1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at at least includes:	√
a. penjelasan strategi keberlanjutan; explanation of the sustainability strategy;	√
b. ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);	√
c. profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief profile of the Issuer or Public Company;	√
d. penjelasan Direksi; explanation of the Board of Directors;	√
e. tata kelola keberlanjutan; sustainability governance;	√

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
f. kinerja keberlanjutan; sustainability performance;	√
g. verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; written verification from an independent party, if any;	√
h. lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan feedback sheet for readers, if any; and	√
i. tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; the response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback;	√
2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	√
3. informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat: information on the Sustainability Report in number 1) can:	√
a. diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau disclosed in other relevant sections outside the social and environmental responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or	√
b. merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik; refers to other sections outside the social and environmental responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company;	√
4. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan; The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report;	√
5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:	√
a. memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan contains all the information as referred to in number 1); and	√
b. disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	√
6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information that information on social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and	√

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report.	√
8. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Financial Report	584-689
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial reports contained in the Annual Report are prepared in accordance with financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.	√
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report Statements of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding the responsibilities of the Annual Report are prepared in accordance with the format of Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report as contained in the Appendix I which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.	68-69

Annual Report
2023
Laporan Tahunan

Enhancement & Expansion

PELINDO MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

Jl. Sindang Laut No. 100,
Cilincing - Jakarta Utara 14110
Phone: +62 21 4393 2251
Customer Service: +62 811 933 9930
Whistle Blowing: +62 21 4393 2251 ext 211
E-mail: corsec@indonesiacarterminal.co.id

indonesiacarterminal.co.id